



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

R P J M D

PERUBAHAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menunjukkan bahwa penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019 belum sepenuhnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RPJMD Provinsi Riau beserta perubahannya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renstra Tahun 2014 – 2019;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota yang tidak selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Januari 2018
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (1,13/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2014 – 2019

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Penyempurnaan dimaksud dengan melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 berdasarkan hasil Review RPJMD Provinsi Riau pada tahun 2015 dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan mengikuti ketentuan sistem Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I:

Cukup Jelas

Pasal II:

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-23
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-29
2.1.4. Aspek Demografi	II-36
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-46
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-46
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-82
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-91
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-95
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-95
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-181
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-241
2.3.4. Fokus Penunjang Urusan	II-298
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-306
2.4.1. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-306
2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-306
2.4.3. Produktivitas Total Daerah	II-314
2.4.4. Nilai Tukar Petani	II-321

	2.4.5. Kriminalitas	II-324
	2.4.6. Rasio Ketergantungan.....	II-326
	2.4.7. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan).....	II-327
BAB	III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Provinsi Riau Masa Lalu	III-2
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-4
	3.1.2. Neraca Daerah.....	III-16
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-31
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-39
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-41
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-57
BAB	IV : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS	
	DAERAH	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
	4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-3
	4.1.2. Aspek Pelayanan Umum	IV-5
	4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	IV-21
	4.2. Isu Strategis	IV-22
	4.2.1. Isu Strategis Provinsi Tetangga yang berbatasan dengan Provinsi Riau	IV-22
	4.2.2. Isu Strategis Provinsi Riau	IV-30
	4.2.3. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV-40
BAB	V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi	V-1
	5.2. Misi	V-4
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB	VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
	PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi Pembangunan Provinsi Riau	VI-1
	6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau	VI-8
	6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2015)	VI-9
	6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2016)	VI-13

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2017)	VI-17
6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2018).....	VI-21
6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2019)	VI-25
6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan.....	VI-33
6.3.1. Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya	VI-33
6.3.2. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN	VI-49
6.3.3. Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	VI-50
6.3.4. Kawasan Strategis Nasional untuk Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi	VI-52
6.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau	VI-53
6.5 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau.....	VI-54
6.6 Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam Program Pembangunan Daerah.....	VI-72

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1

BAB IX : PENUTUP	IX - 1

DAFTAR TABEL

			<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	:	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	I-8
Tabel 1.2	:	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	I-12
Tabel 2.1	:	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau ...	II-3
Tabel 2.2	:	Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-9
Tabel 2.3	:	Luas dan Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau	II-11
Tabel 2.4	:	Sungai Yang Bermuara di Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-13
Tabel 2.5	:	Profil Sungai Utama Provinsi Riau	II-14
Tabel 2.6	:	Sumber Air Untuk Penyediaan Air Bersih Provinsi Riau, 2009-2013	II-15
Tabel 2.7	:	Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Per Bulan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-19
Tabel 2.8	:	Perkembangan Jumlah Hari Hujan (HH) dan Jumlah Curah Hujan (MM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-20
Tabel 2.9	:	Keadaan Suhu (oC) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-21
Tabel 2.10	:	Kelembaban Udara (%) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-22
Tabel 2.11	:	Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-24
Tabel 2.12	:	Bencana Alam dan Korban Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-29
Tabel 2.13	:	Bencana Alam Banjir dan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Korban Tahun 2014	II-30
Tabel 2.14	:	Rekapitulasi Hot Spot Pantauan Satelit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Modis 1 Januari 9 Desember 2015	II-35

Tabel 2.15	:	Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-36
Tabel 2.16	:	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2015	II-38
Tabel 2.17	:	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2015.....	II-40
Tabel 2.18	:	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Per Kabupaten Kota Tahun 2014.....	II-43
Tabel 2.19	:	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah).....	II-48
Tabel 2.20	:	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Konstan 2010 Tanpa Migas Provinsi Riau Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah).....	II-49
Tabel 2.21	:	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2010-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)	II-50
Tabel 2.22	:	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah).....	II-52
Tabel 2.23	:	PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-55
Tabel 2.24	:	Perkembangan Inflasi Per kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	II-61
Tabel 2.25	:	Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Per kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2014	II-64
Tabel 2.26	:	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-75
Tabel 2.27	:	Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-80
Tabel 2.28	:	Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-82
Tabel 2.29	:	IPM Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-83
Tabel 2.30	:	Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-89

Tabel 2.31	:	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014	II-89
Tabel 2.32	:	Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014	II-92
Tabel 2.33	:	Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014	II-94
Tabel 2.34	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Sederajat Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-98
Tabel 2.35	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-99
Tabel 2.36	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-100
Tabel 2.37	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Sederajat Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-101
Tabel 2.38	:	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-104
Tabel 2.39	:	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-105
Tabel 2.40	:	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-106
Tabel 2.41	:	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	II-109
Tabel 2.42	:	Ketersediaan Sekolah (Ruang Kelas) dan Penduduk Usia Sekolah Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-110
Tabel 2.43	:	Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-114
Tabel 2.44	:	Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-115
Tabel 2.45	:	Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-118
Tabel 2.46	:	Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015	II-119

Tabel 2.47	:	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Riau	II-121
Tabel 2.48	:	Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2010– 2014.....	II-122
Tabel 2.49	:	Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayan Kesehatan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014 dan 2015.....	II-124
Tabel 2.50	:	Jumlah dan Rasio Dokter Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014	II-128
Tabel 2.51	:	Jumlah Dokter Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014 dan 2015.....	II-129
Tabel 2.52	:	Jumlah Tenaga Medis, Rasio dan Kasus DBD Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-131
Tabel 2.53	:	Jumlah Kasus Demam Berdarah Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015.....	II-132
Tabel 2.54	:	Jumlah Tenaga Medis dan Rasio Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2015	II-133
Tabel 2.55	:	Prevalensi Gizi Kurang dan Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan (K1 dan K4) Provinsi Riau 2011- 2015	II-136
Tabel 2.56	:	Status Gizi Berdasarkan Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Menurut Kab/Kota, 2015	II-137
Tabel 2.57	:	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan (K1 dan K4) Provinsi Riau 2011-2015	II-138
Tabel 2.58	:	Kunjungan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	II-139
Tabel 2.59	:	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-140
Tabel 2.60	:	Kondisi Jalan di Provinsi Riau, 2015	II-142
Tabel 2.61	:	Konstruksi Jalan di Provinsi Riau, 2015.....	II-142
Tabel 2.62	:	Infrastruktur Jalan Nasional dan Provinsi Melintasi Kabupaten di Provinsi Riau, 2014	II-143
Tabel 2.63	:	Panjang Jalan Menurut Status Per Kabupaten Kota Tahun 2014	II-146
Tabel 2.64	:	Rasio Tempat Ibadah Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015.....	II-148
Tabel 2.65	:	Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014	II-149

Tabel 2.66	:	Produksi Perusahaan Air Minum Menurut Sumber Air Yang Digunakan di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-150
Tabel 2.67	:	Kapasitas Ketersediaan Air Minum Layak Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2015	II-153
Tabel 2.68	:	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Kabupaten Kota di Provinsi Riau, Tahun 2015	II-155
Tabel 2.69	:	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Memasak Kabupaten Kota di Provinsi Riau, Tahun 2014	II-155
Tabel 2.70	:	Ketersediaan Dokumen RTRW Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-157
Tabel 2.71	:	Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau	II-158
Tabel 2.72	:	Ketentuan Umum Zonasi.....	II-162
Tabel 2.73	:	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014	II-176
Tabel 2.74	:	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Provinsi Riau Tahun 2015	II-177
Tabel 2.75	:	Rekapitulasi Nama OKP pada Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Di Provinsi Riau Tahun 2015	II-178
Tabel 2.76	:	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015	II-179
Tabel 2.77	:	Jumlah Panti Sosial Anak Terlantar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-180
Tabel 2.78	:	Jumlah PMKS dan PSKS Provinsi Riau.....	II-180
Tabel 2.79	:	Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-181
Tabel 2.80	:	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015	II-182
Tabel 2.81	:	Rasio Kesetaraan Gender di Setiap Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	II-183
Tabel 2.82	:	Rasio Kesetaraan Gender di Setiap Status Kepegawaian Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-184
Tabel 2.83	:	Perkembangan Rasio Produksi dan Kebutuhan Beras dan Jagung Di Provinsi Riau, 2010-2014	II-185

Tabel 2.84	:	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Beras dan Jagung Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-186
Tabel 2.85	:	Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014.....	II-187
Tabel 2.86	:	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-188
Tabel 2.87	:	Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia dan Unggas Provinsi Riau Tahun 2010-2014	II-190
Tabel 2.88	:	Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia dan Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 ...	II-191
Tabel 2.89	:	Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014	II-192
Tabel 2.90	:	Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-193
Tabel 2.91	:	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengelohan dan Penguraian Limbah Provinsi Riau (P3ES, 2015)	II-196
Tabel 2.92	:	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Riau (P3ES, 2015).....	II-197
Tabel 2.93	:	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Tempat Tingal dan Ruang Hidup Provinsi Riau (P3ES, 2015).....	II-200
Tabel 2.94	:	Sifat Kimia Air Empat Sungai Utama Provinsi Riau Tahun 2009-2013	II-203
Tabel 2.95	:	Indikator dan Parameter IKLH Provinsi Riau.....	II-205
Tabel 2.96	:	Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2014	II-206
Tabel 2.97	:	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau Tahun 2014 dan Sasaran Tahun 2019	II-208
Tabel 2.98	:	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Banjir Provinsi Riau (P3ES, 2015)	II-210
Tabel 2.99	:	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-214
Tabel 2.100	:	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Per kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-215

Tabel 2.101 :	Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-217
Tabel 2.102 :	Jumlah Desa dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	II-218
Tabel 2.103 :	Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2014 Provinsi Riau.....	II-219
Tabel 2.104 :	Jumlah Penduduk Peserta KB Provinsi Riau Tahun 2014	II-220
Tabel 2.105 :	Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-221
Tabel 2.106 :	Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-223
Tabel 2.107 :	Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Menurut Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2015	II-223
Tabel 2.108 :	Jumlah Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-225
Tabel 2.109 :	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi di Provinsi Riau Tahun 2010-2.....	II-226
Tabel 2.110 :	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2014	II-227
Tabel 2.111 :	Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-228
Tabel 2.112 :	Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-229
Tabel 2.113 :	Jumlah Investor PMDN dan PMA Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-232
Tabel 2.114 :	Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015	II-233
Tabel 2.115 :	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda/Ormas Provinsi Riau Tahun 2015	II-234
Tabel 2.116 :	Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-235
Tabel 2.117 :	Penilaian Kinerja Pemerintahan Umum Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015	II-236

Tabel 2.118	:	Penilaian Kinerja Pemerintahan Umum Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015	II-237
Tabel 2.119	:	Rekapitulasi Implementasi Budaya Melayu dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah (MI, MTS dan MA) Provinsi Riau 2013	II-238
Tabel 2.120	:	Jumlah Pengunjung ke Museum dan dan Pergelaran Seni di Taman Budaya	II-239
Tabel 2.121	:	Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-240
Tabel 2.122	:	Objek Wisata Yang Terdapat di Provinsi Riau, 2015	II-242
Tabel 2.123	:	Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-245
Tabel 2.124	:	Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau menurut Pintu Masuk Utama Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-246
Tabel 2.125	:	Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau Per Bulan Menurut Pintu Masuk Utama Provinsi Riau Tahun 2015	II-247
Tabel 2.126	:	Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau menurut Kebangsaan Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-248
Tabel 2.127	:	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Yang tersedia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-248
Tabel 2.128	:	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Yang tersedia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-249
Tabel 2.129	:	Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Di Provinsi Riau, 2011-2015	II-250
Tabel 2.130	:	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2015	II-251
Tabel 2.131	:	Kebutuhan dan Kemampuan Beras Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015.....	II-253
Tabel 2.132	:	Potensi Peningkatan Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015	II-254
Tabel 2.133	:	Perkembangan Luas Panen Sayur-Sayuran Di Provinsi Riau, 2010-2015	II-255

Tabel 2.134	:	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-Sayuran Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015	II-256
Tabel 2.135	:	Perkembangan Jumlah Pohon, Rumpun dan Produksi Buah Buahan Provinsi Riau, 2010-2015	II-258
Tabel 2.136	:	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah Buahan Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015	II-259
Tabel 2.137	:	Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Provinsi Riau, 2011-2015	II-261
Tabel 2.138	:	Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Per kabupaten Kota di Provinsi Riau tahun 2014	II-263
Tabel 2.139	:	Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Provinsi Riau Tahun 2014	II-266
Tabel 2.140	:	Populasi Ternak dan Produksi Daging Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-270
Tabel 2.141	:	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2015 – 2015	II-271
Tabel 2.142	:	Luas Hutan Menurut Fungsi Tahun 2015 Berdasarkan TGHK Update SK Nomor: 878/Menhut II/2014.....	II-272
Tabel 2.143	:	Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Riau Tahun 2011 -2015	II-273
Tabel 2.144	:	Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-273
Tabel 2.145	:	Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-274
Tabel 2.146	:	Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-274
Tabel 2.147	:	Produksi Hasil Tambang Provinsi Tahun 2011-2015	II-275
Tabel 2.148	:	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015	II-276
Tabel 2.149	:	Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-278

Tabel 2.150	:	Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Yang Terlayani Listrik di Provinsi Riau 2014	II-281
Tabel 2.151	:	Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Yang Terlayani Listrik di Provinsi Riau 2014	II-282
Tabel 2.152	:	Perkembangan Eskpor Migas dan Migas Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-284
Tabel 2.153	:	Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2015	II-284
Tabel 2.154	:	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	II-286
Tabel 2.155	:	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	II-286
Tabel 2.156	:	Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013	II-287
Tabel 2.157	:	Jenis Industri Pengolahan Yang Berkembang Menurut KBLI 5 Digit di Provinsi Riau, 2013	II-288
Tabel 2.158	:	Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-290
Tabel 2.159	:	Lokasi Kawasan Industri Provinsi Riau, 2015 ...	II-291
Tabel 2.160	:	Target dan Realisasi Penempatan Transmigran Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014.....	II-293
Tabel 2.161	:	Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal Provinsi RiauTahun 2011 – 2014 ..	II-293
Tabel 2.162	:	Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-294
Tabel 2.163	:	Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-295
Tabel 2.164	:	Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2015	II-296
Tabel 2.165	:	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Tahun 2012-2016 Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau	II-298
Tabel 2.166	:	Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Ribu Rupiah).....	II-300
Tabel 2.167	:	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 2015	II-301
Tabel 2.168	:	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Diklat) Provinsi Riau Tahun 2014-2015.....	II-302

Tabel 2.169	: Bidang dan Jumlah Penelitian dan Pengembangan (R&D) Provinsi Riau Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, 2010-2014	II-303
Tabel 2.170	: Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	II-307
Tabel 2.171	: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-308
Tabel 2.172	: Perkembangan Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) dan Per Kapita/Tahun Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014.....	II-311
Tabel 2.173	: Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) dan Per Kapita/Tahun Menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014..	II-312
Tabel 2.174	: Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	II-316
Tabel 2.175	: Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-317
Tabel 2.176	: Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015.....	II-323
Tabel 2.177	: Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Sub Sektor Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	II-324
Tabel 2.178	: Angka Kriminalitas Tahun 2010-2014 di Provinsi Riau.....	II-325
Tabel 2.179	: Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar Pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014.....	II-326
Tabel 2.180	: Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2011– 2015	II-327
Tabel 2.181	: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Riau	II-329
Tabel 2.182	: Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau.....	II-300
Tabel 3.1	: Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-5
Tabel 3.2	: Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau	III-6

Tabel 3.3	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-7
Tabel 3.4	:	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (%).....	III-7
Tabel 3.5	:	Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-8
Tabel 3.6	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-9
Tabel 3.7	:	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-9
Tabel 3.8	:	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-10
Tabel 3.9	:	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-11
Tabel 3.10	:	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-11
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-12
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-13
Tabel 3.13	:	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-14
Tabel 3.14	:	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-14
Tabel 3.15	:	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-15
Tabel 3.16	:	Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-15

Tabel 3.17	:	Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-16
Tabel 3.18	:	Proporsi Sumber Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau	III-17
Tabel 3.19	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-18
Tabel 3.20	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-19
Tabel 3.21	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-19
Tabel 3.22	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-20
Tabel 3.23	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-20
Tabel 3.24	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-21
Tabel 3.25	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-21
Tabel 3.26	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-22
Tabel 3.27	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-22
Tabel 3.28	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-23
Tabel 3.29	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-23
Tabel 3.30	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah).....	III-24

Tabel 3.31	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-24
Tabel 3.32	:	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Neraca Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-26
Tabel 3.33	:	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-27
Tabel 3.34	:	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-29
Tabel 3.35	:	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 Provinsi Riau	III-36
Tabel 3.36	:	Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2019 Provinsi Riau (Rp. Jutaan).	III-38
Tabel 3.37	:	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)	III-39
Tabel 3.38	:	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)	III-40
Tabel 3.39	:	Realisasi Belanja Pendidikan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)	III-41
Tabel 3.40	:	Analisis Proporsi Belanja Pendidikan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)	III-41
Tabel 3.41	:	Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau	III-43
Tabel 3.42	:	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-44
Tabel 3.43	:	Estimasi dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-45
Tabel 3.44	:	Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-45
Tabel 3.45	:	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-45
Tabel 3.46	:	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-46

Tabel 3.47	:	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-46
Tabel 3.48	:	Anggaran dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-47
Tabel 3.49	:	Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-47
Tabel 3.50	:	Anggaran dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-48
Tabel 3.51	:	Anggaran dan Realisasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)	III-48
Tabel 3.52	:	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011- 2015 Provinsi Riau.....	III-50
Tabel 3.53	:	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah).....	III-51
Tabel 3.54	:	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun Anggaran 2017-2019 Provinsi Riau (Juta Rupiah)	III-52
Tabel 3.55	:	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 (Milyar Rupiah)	III-54
Tabel 3.56	:	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 (Milyar Rupiah).....	III-55
Tabel 3.57	:	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-56
Tabel 3.58	:	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 (Juta Rupiah)	III-56
Tabel 3.59	:	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 -2019 (Juta Rupiah)	III-57
Tabel 3.60	:	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019 (Juta Rupiah)	III-58

Tabel 3.61	:	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019.....	III-59
Tabel 3.62	:	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 – 2019.....	III-61
Tabel 4.1	:	Rencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang berkaitan dengan Konektivitas Provinsi Sumatera Barat-Riau	IV-29
Tabel 4.2	:	Rencana Kebutuhan Infrastruktur Koridor Ekonomi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Provinsi Riau.....	IV-30
Tabel 4.3	:	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV-41
Tabel 4.4	:	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-45
Tabel 5.1	:	Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Misi.....	V-6
Tabel 5.2	:	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-8
Tabel 5.3	:	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-9
Tabel 5.4	:	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-9
Tabel 5.5	:	Angka Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-10
Tabel 5.6	:	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019.....	V-10
Tabel 5.7	:	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-11
Tabel 5.8	:	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-11
Tabel 5.9	:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-12
Tabel 5.10	:	Nilai Investasi PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-12
Tabel 5.11	:	Nilai Investasi PMA Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2019	V-13

Tabel 6.1	:	Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau RPJMD 2014-2019	VI-2
Tabel 6.2	:	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019	VI-31
Tabel 6.3	:	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Riau	VI-56
Tabel 6.4	:	Perumusan Rekomendasi Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019	VI-73
Tabel 7.1	:	Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Provinsi Riau 2014-2016.....	VII-2
Tabel 7.2	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2019 Provinsi Riau	VII-62
Tabel 7.3	:	Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan RPJMD Provinsi Riau 2017-2019 ...	VII-63
Tabel 8.1	:	Indikator Kinerja Daerah	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 : Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-7
Gambar 2.1 : Peta Provinsi Riau	II-2
Gambar 2.2 : Peta Jarak Antara Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru).....	II-3
Gambar 2.3 : Letak Geografis Provinsi Riau	II-4
Gambar 2.4 : Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau.....	II-6
Gambar 2.5 : Peta Daerah Rawan Banjir Provinsi Riau	II-8
Gambar 2.6 : Peta Geologi Provinsi Riau	II-10
Gambar 2.7 : Kelas Jenis Tanah Provinsi Riau.....	II-12
Gambar 2.8 : Persentase Sumber Suplai Bahan Baku Air Provinsi Riau, 2015	II-15
Gambar 2.9 : Peta Curah hujan Provinsi Riau.....	II-18
Gambar 2.10 : Peta Sebaran Fungsi Kawasan Pada Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Provinsi Riau (RTRW, 2013-2030)	II-23
Gambar 2.11 : Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014 .	II-24
Gambar 2.12 : Tutupan Lahan Provinsi Riau Berdasarkan RTRW, 2014-2033	II-25
Gambar 2.13 : Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Riau	II-31
Gambar 2.14 : Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah Provinsi Riau	II-32
Gambar 2.15 : Peta Indeks Resiko Bencana Erosi Provinsi Riau	II-33
Gambar 2.16 : Peta Indeks Resiko Bencana Gunung Api Provinsi Riau	II-34
Gambar 2.17 : Sebaran Titik Api Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-35
Gambar 2.18 : Distribusi Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2015	II-39
Gambar 2.19 : Piramida Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau, 2015	II-41

Gambar 2.20 :	Perrtumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2010-2015.....	II-42
Gambar 2.21 :	Persentase Penduduk Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah, 2014	II-44
Gambar 2.22 :	Kontribusi (%) PDRB Harga Konstan Dengan Migas HB dan HK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau 2015	II-51
Gambar 2.23 :	Kontribusi (%) PDRB Harga Konstan Dengan Migas HB dan HK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau 2015	II-53
Gambar 2.24 :	PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2011 - 2015	II-54
Gambar 2.25 :	PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-56
Gambar 2.26 :	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-57
Gambar 2.27 :	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-58
Gambar 2.28 :	Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2011-2015..	II-60
Gambar 2.29 :	Tingkat Inflasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-62
Gambar 2.30 :	Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-63
Gambar 2.31 :	Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-65
Gambar 2.32 :	Pembentukan Indek Williamson Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2015	II-66
Gambar 2.33 :	Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2002-2015	II-67
Gambar 2.34 :	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau Tahun 2002-2015	II-69
Gambar 2.35 :	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau 2015	II-70
Gambar 2.36 :	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2002-2015	II-71
Gambar 2.37 :	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau 2015	II-72
Gambar 2.38 :	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau Tahun 2002-2015	II-73

Gambar 2.39 :	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau 2015	II-74
Gambar 2.40 :	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-76
Gambar 2.41 :	Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-76
Gambar 2.42 :	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-77
Gambar 2.43 :	Indek Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-78
Gambar 2.44 :	Garis Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-78
Gambar 2.45 :	Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Provinsi Riau Tahun 2010-2014	II-79
Gambar 2.46 :	Persentase Distribusi Jumlah Kasus Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-81
Gambar 2.47 :	IPM Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-84
Gambar 2.48 :	Angka Harapan Hidup Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-85
Gambar 2.49 :	Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-86
Gambar 2.50 :	Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-87
Gambar 2.51 :	Pengeluaran Per Kapita Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-88
Gambar 2.52 :	Tingkat Pengangguran Terbuka Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-90
Gambar 2.53 :	Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-97
Gambar 2.54 :	Angka Partisipasi Kasar PAUD Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-98
Gambar 2.55 :	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-99
Gambar 2.56 :	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015 ..	II-101
Gambar 2.57 :	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-102
Gambar 2.58 :	Angka Partisipasi Murni Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-103

Gambar 2.59 :	Angka Partisipasi Murni SDS/MI (%) Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-105
Gambar 2.60 :	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-106
Gambar 2.61 :	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015.....	II-107
Gambar 2.62 :	Jumlah Penduduk Usia 7-12/Kelas Per Kabupaten Kota Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-111
Gambar 2.63 :	Jumlah Penduduk Usia 13-15/Kelas Per Kabupaten Kota Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-111
Gambar 2.64 :	Jumlah Penduduk Usia 16-18/ Kelas Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-112
Gambar 2.65 :	Rasio Siswa Guru SD/MI Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015	II-115
Gambar 2.66 :	Rasio Siswa Guru SMP/MTs Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-116
Gambar 2.67 :	Rasio Siswa Guru SMA/SMK Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-117
Gambar 2.68 :	Pertumbuhan (%) Rasio Kelulusan Pertahun Tiap Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015	II-118
Gambar 2.69 :	Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-125
Gambar 2.70 :	Rasio Dokter Menurut Keahlian Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-130
Gambar 2.71 :	Rasio Tenaga Medis Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-134
Gambar 2.72 :	Surplus/Defisit Pustu, Poskesdes dan Polindes Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-135
Gambar 2.73 :	Infrastruktur Jalan Provinsi Riau, 2014	II-141
Gambar 2.74 :	Panjang Jalan Menurut Status Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2014	II-145
Gambar 2.75 :	Jumlah Pelanggan Air Minum Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Riau Tahun 2011-2015	II-151

Gambar 2.76 :	Persentase Rumah Tangga Penyediaan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Riau, Provinsi Tetangga dan Indonesia, Tahun 2014	II-152
Gambar 2.77 :	Arahan Struktur Ruang Wilayah Riau Tahun 2014-2030	II-160
Gambar 2.78 :	TPAK dan TPT Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-182
Gambar 2.79 :	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Beras dan Jagung Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-187
Gambar 2.80 :	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Sayur-sayuran dan Buah-Buahan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-189
Gambar 2.81 :	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Ruminansia dan Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-192
Gambar 2.82 :	Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-194
Gambar 2.83 :	Persentase Penanganan Sampah Kota Pekanbaru.....	II-196
Gambar 2.84 :	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (P3ES, 2015).....	II-197
Gambar 2.85 :	Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (P3ES, 2015)	II-198
Gambar 2.86 :	Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Provinsi Riau Tahun 2005-2014	II-199
Gambar 2.87 :	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (P3ES,2015)	II-201
Gambar 2.88 :	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Per Provinsi Sumatera (BLH Provinsi Riau, 2015)	II-207
Gambar 2.89 :	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Menggambarkan Posisi Provinsi Riau Tahun 2013 (BLH Provinsi Riau, 2015).....	II-207
Gambar 2.90 :	Jumlah Titik Api Tahun 2010-2014 di Provinsi Riau	II-209
Gambar 2.91 :	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana (P3ES, 2015)	II-210
Gambar 2.92 :	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2014.....	II-213

Gambar 2.93 :	Pertumbuhan Penduduk Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-216
Gambar 2.94 :	Rasio Akseptor KB Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-220
Gambar 2.95 :	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2014	II-227
Gambar 2.96 :	Perkembangan Kinerja Koperasi Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2015	II-230
Gambar 2.97 :	Peta Lokasi Objek Wisata di Provinsi, 2015.....	II-244
Gambar 2.98 :	Produktivitas Padi Sawah Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2015	II-252
Gambar 2.99 :	Produktivitas Sayuran Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2014	II-257
Gambar 2.100 :	Produktivitas Buah-Buahan Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2014	II-260
Gambar 2.101 :	Persentase Keluasan Komoditas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2015	II-262
Gambar 2.102 :	Produktivitas Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-264
Gambar 2.103 :	Sebaran PKS di Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014	II-267
Gambar 2.104 :	Jumlah Energi Listrik Yang Diproduksi, Dibeli dan Diterima Dari Unit Lain di Provinsi Riau Tahun 2010-2015	II-277
Gambar 2.105 :	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Provinsi Riau dan Provinsi Tetangga Tahun 2010-2014	II-279
Gambar 2.106 :	Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-280
Gambar 2.107 :	Jumlah Desa Belum Aliri Listrik Per Kabupaten Kota 2014.....	II-281
Gambar 2.108 :	Peta Lokasi Kawasan Industri Yang Terdapat di Provinsi, 2015	II-292
Gambar 2.109 :	Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-295
Gambar 2.110 :	Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015	II-307

Gambar 2.111	:Pengeluaran Konsumsi Per Rumah Tangga dan Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014	II-309
Gambar 2.112	:Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan Per Kapita/Bulan Provinsi Riau Tahun 2010-2014	II-310
Gambar 2.113:	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerRumah Tangga dan Per Kapita Tertinggi dan Terendah Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014	II-313
Gambar 2.114	:Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan Per Kapita/Bulan Provinsi Riau Tahun 2010-2014	II-314
Gambar 2.115	:Produktivitas (PDRB Dengan Migas Terhadap Angkatan Kerja) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014	II-320
Gambar 2.116	:Produktivitas Total Berdasarkan PDRB Tanpa Migas Tahun 2015 Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau	II-321
Gambar 4.1	: Koridor Ekonomi Sumatera Barat	IV-38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengartikan Pembangunan Nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bagian pelaksanaan dari tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan Pembangunan Nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019 ini dilakukan dengan memperhatikan hasil review RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, sebagaimana diatur pada pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Beberapa poin penting yang direkomendasikan dalam hasil Review RPJMD tersebut antara lain :

1. Sinkronisasi antara dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 terhadap dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
2. Penyesuaian di dalam pembagian urusan pemerintahan yaitu absolut, konkuren, dan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Penyesuaian standar pelayanan minimum.

4. Identifikasi terhadap dokumen review renstra SKPD Provinsi Riau.
5. Pergeseran asumsi ekonomi makro.
6. Koreksi serta penyempurnaan terhadap sasaran, target, dan indikator.

Selanjutnya perubahan RPJMD Provinsi Riau dilakukan untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 pada diktum kedua yang menyatakan bahwa segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disesuaikan dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD pada pentahapan ke-3 Perubahan RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang **pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat;**
- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang **peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas;**
- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang **pembangunan nilai dan budaya Melayu yang agamis;**
- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang **peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal.**

Selanjutnya disusun kegiatan tahunan sesuai dengan isu strategis daerah dan visi misi Gubernur sesuai dengan skala prioritas yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi, misi dan program Gubernur terpilih Provinsi Riau tahun 2014-2019 Bapak H. Annas Maamun dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau tahun 2019-2019 Bapak Ir. H Arsyadjuliandi Rachman, MBA yang dilantik pada tanggal 19 Februari 2014. Visi dan misi ini menunjukkan arah pembangunan yang mencerminkan upaya pengembangan potensi maupun penanganan permasalahan

pembangunan sehingga mampu meningkatkan peran dan menguatkan posisi strategis Provinsi Riau sesuai dengan indikator kinerja daerah yang ingin dicapai dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Provinsi Riau dengan posisi yang strategis, dalam koridor ekonomi Sumatera, terletak pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka), berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Kawasan ini merupakan kutub pertumbuhan ekonomi di Asia yang masuk dalam rencana strategis nasional dan global seperti kerjasama *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asean – China Free Trade Area (ACFTA)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, sehingga memberikan pengaruh langsung terhadap segala aspek pembangunan Provinsi Riau.

Pembangunan Provinsi Riau yang didukung posisi strategis dan sumberdaya alam yang besar, mempunyai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus *specific, measurable, achievable, realistic dan timely (SMART)*. Sehingga hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Perubahannya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014. Selain itu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

disusun ini juga berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi Riau, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Riau. RPJMD Provinsi Riau juga merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

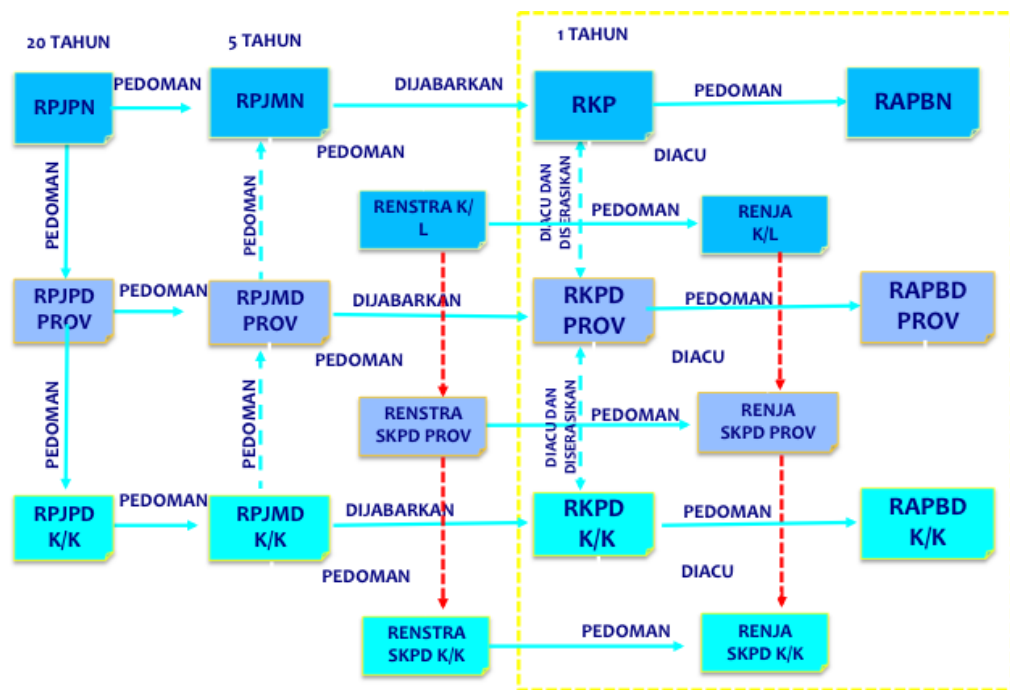
Selain berpedoman Perubahan RPJPD dan RPJMN yang memuat Nawacita dengan Sembilan agenda prioritas yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.

- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi ini juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perencanaan pembangunan provinsi tetangga yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Kepulauan Riau.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya adalah:

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Riau beserta Perubahannya pada periode tahun 2014 – 2019;
- Menjadi landasan penyusunan Renstra dan Perubahan Renstra serta Penyusunan Renja SKPD/OPD dalam

merencanakan Program Prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi tolak ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
5. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Riau beserta Perubahannya adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam arah kebijakan dan program pembangunan beserta perubahannya secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014–2019;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau selama lima tahun dan menyelaraskan kondisi daerah dan nasional, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja dengan badan pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 terdiri dari 9 (Sembilan) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Provinsi Riau beserta Perubahannya.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Provinsi Riau secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau untuk pencapaian tujuan dan sasaran kurun waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang di rumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode jabatan.

BAB 9 PENUTUP

Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 beserta perubahannya yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum Provinsi Riau meliputi kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

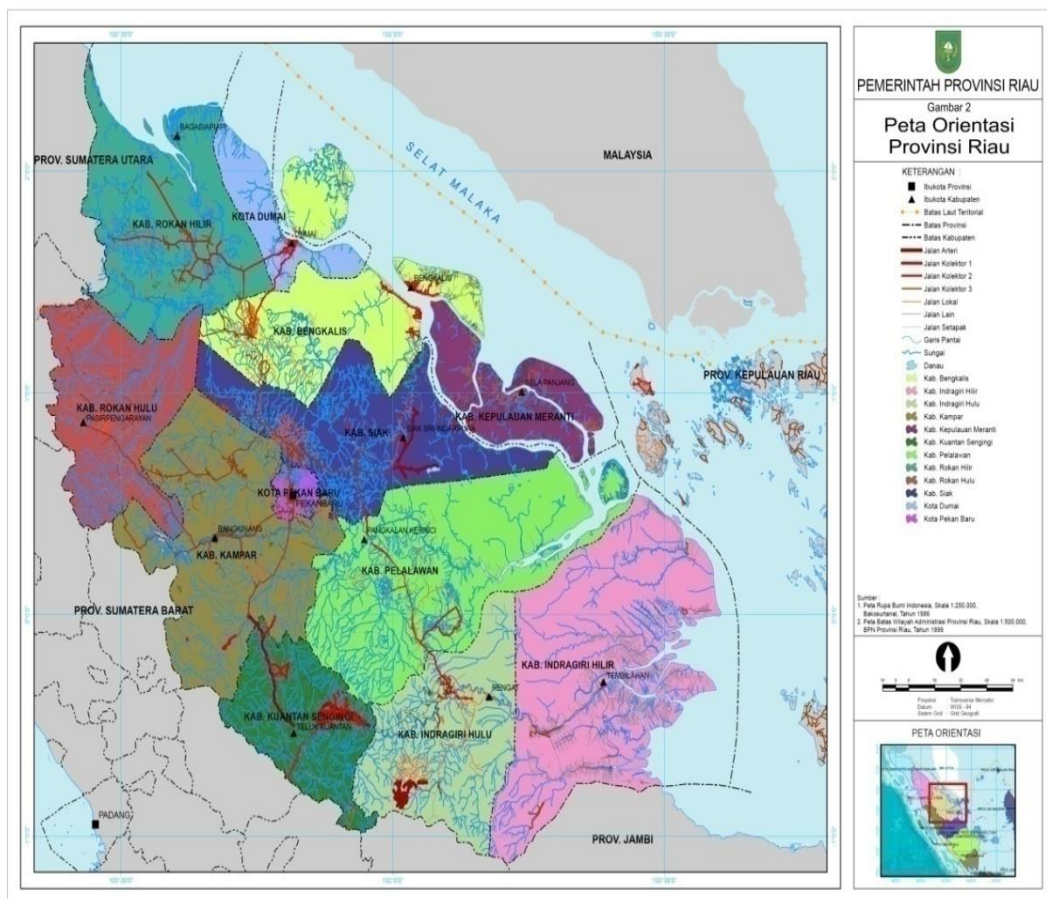
Kondisi geografi Provinsi Riau yang dianalisis meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan kondisi demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Riau gambaran mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas wilayah Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 90.128,76 Km², dimana terdiri dari 89.083,57 Km² luas daratan dan 1.045,19 Km² luas lautan atau perairan. Nama-nama masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Peta Provinsi Riau

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah kabupaten/kota ditunjukkan Tabel 2.1 serta letak masing-masingnya wilayah lihat pada Gambar 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No.	Kota/Kabupaten	Ibukota	Luas (Ha)
1	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	752.743,28
2	Kampar	Bangkinang	1.089.721,66
3	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	527.273,74
4	Indragiri Hulu	Rengat	797.816,84
5	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.346.589,47
6	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.302.018,65
7	Siak	Siak Sri Indrapura	784.396,97
8	Bengkalis	Bengkalis	852.043,63
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-API	915.472,45
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	363.679,18
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	63.340,30
12	Kota Dumai	Dumai	217.779,79
JUMLAH			9.012.875,96

Sumber: Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2015

Secara administrasi Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 Kota serta 164 kecamatan dan 1.846 desa/kelurahan. Berdasarkan aspek perwilayahan Provinsi Riau berada pada wilayah Timur Sumatera yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) dapat dilihat pada Gambar 2.2.

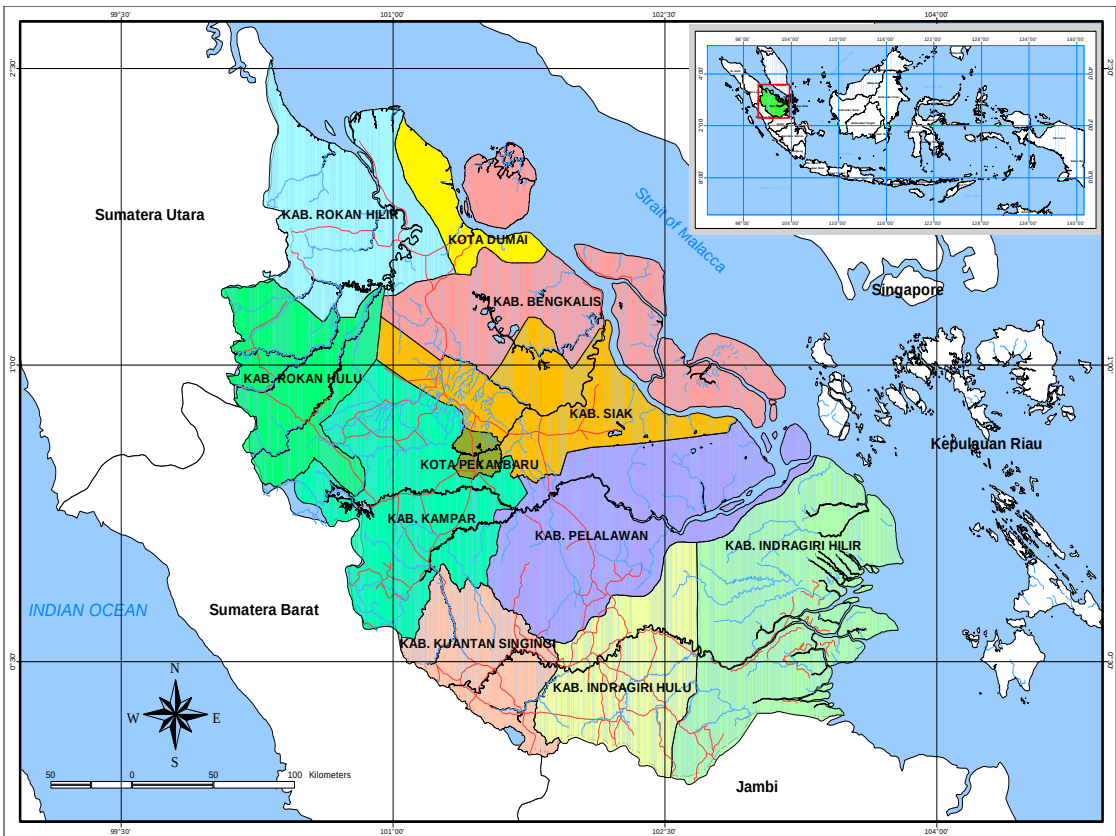


Gambar 2.2
Peta Jarak Antara Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru)

2.1.1.2.Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05’00” Lintang Selatan - 02°25’00”Lintang Utara dan antara 100°00’00” Bujur Timur hingga 105°05’00” Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka (Gambar 2.3).

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional, Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.



Gambar 2.3
Letak Geografis Provinsi Riau

Daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10

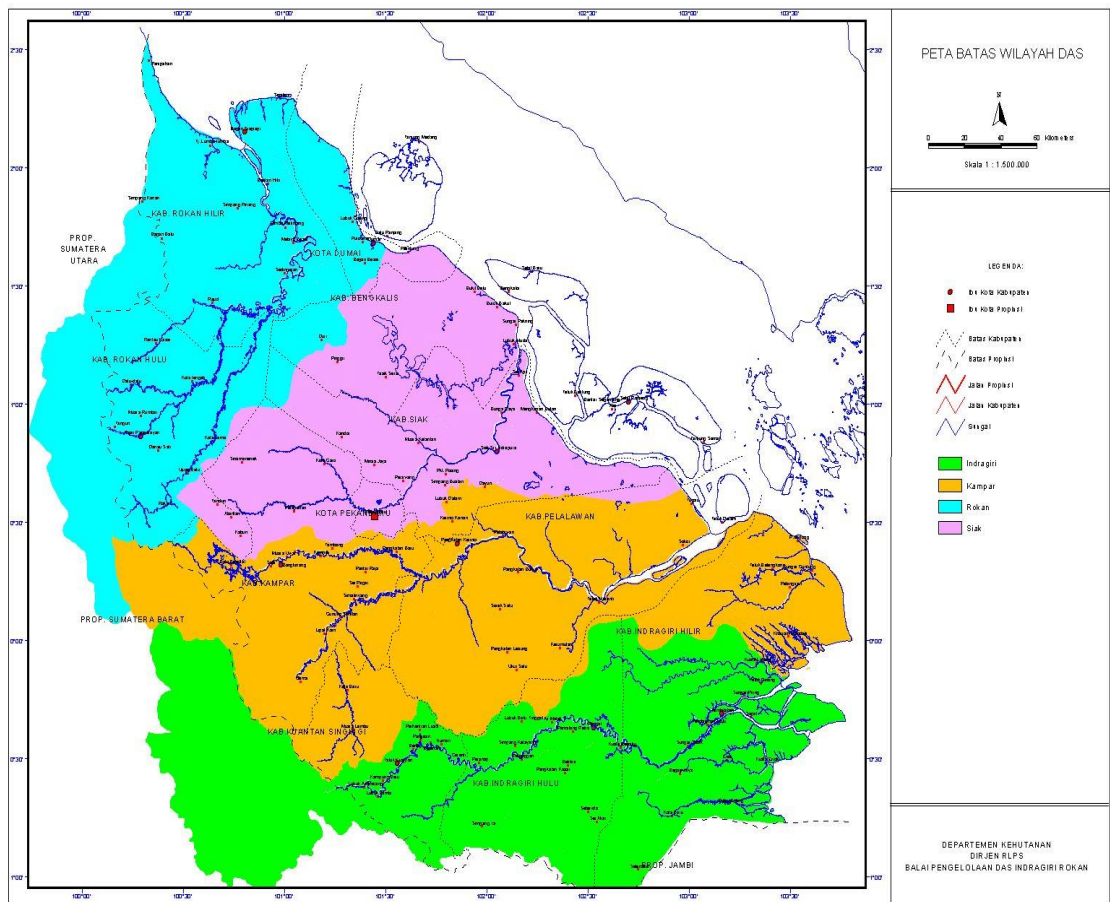
meter dari permukaan laut (dpl); bagian tengah merupakan dataran bergelombang; serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai timur.

Secara umum fisiografi pesisir timur dapat dibedakan menjadi tiga bentuk daratan, yaitu daratan aluvial dan gambut, daratan dan teras sungai serta daerah pebukitan/ pergunungan. Pantai timur Provinsi Riau didominasi oleh lahan dengan kemiringan $< 2\%$ atau datar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tidak banyak memiliki morfologi yang curam, dan didominasi datar atau bergelombang. Hanya pada kawasan yang berdekatan dengan Bukit Barisan yang memiliki lereng-lereng yang curam, terutama wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara (Riau).

Jenis tanah yang ada di Provinsi Riau didominasi jenis tanah organosol. Tanah organosol merupakan tanah organik yang berasal dari gambut dan rawa. Sebarannya mencapai 50% luas wilayah Riau terutama berada pada dataran rendah dan wilayah pesisir. Jenis tanah dominan kedua adalah tanah podsolik merah kuning.

Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai diantaranya terdapat 4 (empat) sungai besar yang mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan masyarakat sekitar bantaran sungai, pariwisata dan perikanan. Sungai-sungai tersebut mengalir mulai dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka, keempat sungai itu adalah:

- Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dengan kedalaman 8-12 meter.
- Sungai Rokan sepanjang ± 400 Km dengan kedalaman 6-8 meter.
- Sungai Kampar sepanjang 400Km dengan kedalaman ± 6 meter.
- Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6-8 meter.



Gambar 2.4
Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau

Sungai-sungai tersebut memiliki anak-anak sungai yang cukup banyak dan membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS tersebut tersebar merata diseluruh wilayah daratan Provinsi Riau. Peta dan sebaran DAS dapat dilihat pada Gambar 2.4.

2.1.1.3. Topografi

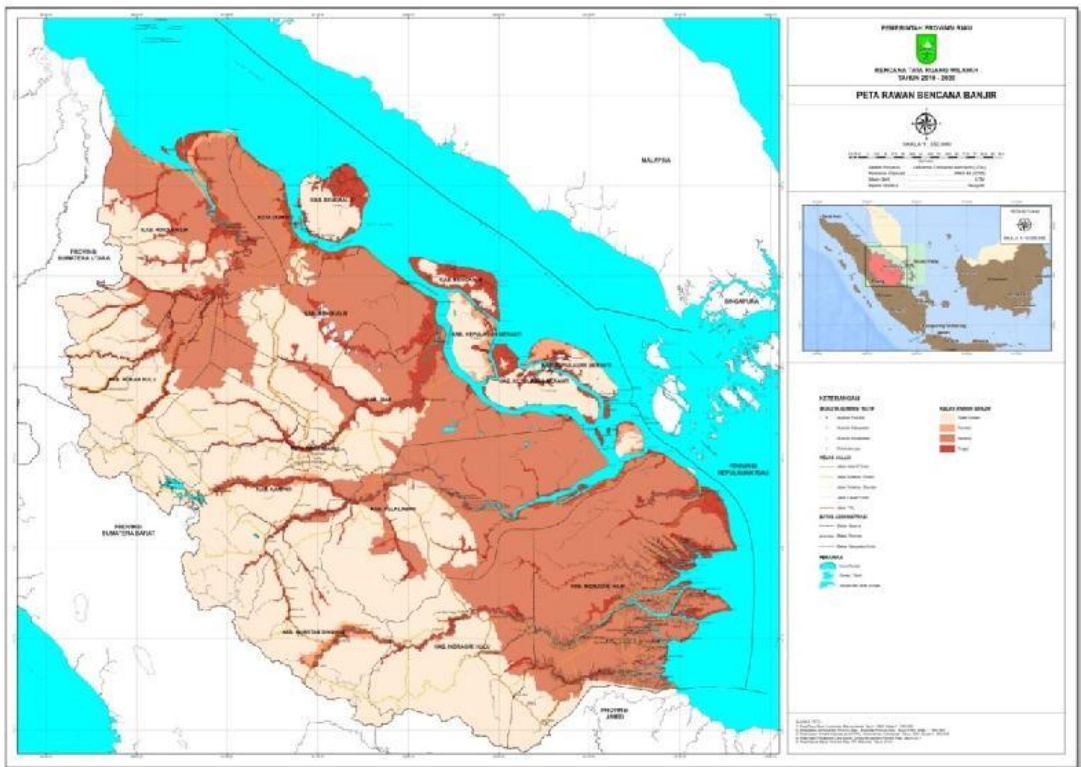
Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Wilayah Provinsi Riau antara 2 – 91 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bengkalis merupakan kota yang paling rendah, yaitu berada 2 meter dari permukaan laut, sedangkan Kota Pasir Pengaraian berada 91 m dari permukaan laut. Kebanyakan kota di Provinsi Riau berada dibawah 10 meter di atas permukaan laut, seperti Rengat, Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Dumai.

Berdasarkan ketinggiannya, daratan Riau dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah bagian timur yang didominasi

oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dari permukaan laut (dpl), bagian tengah merupakan dataran bergelombang dan bagian barat yang merupakan dataran berbukit dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan.

Dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rataannya ketinggian 10 meter dpl. Kemiringan lahan 0–2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15–40% seluas 737.966 hektar. Wilayah dataran rendah berada diposisi bagian pantai timur Sumatera, yang merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau.

Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai timur. Akibatnya daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Peristiwa banjir yang terbesar di daerah bahagian Timur Riau terjadi pada tahun 2004, 2006 dan 2015. Bencana banjir dan genangan air terjadi hampir diseluruh wilayah muara sungai seperti Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri/Batang Kuantan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan di wilayah hulu serta berkurangnya daerah resapan air akibat dari penebangan hutan. Berdasarkan catatan badan yang berwenang, banjir dan genangan air berada pada ketinggian 1 sampai dengan 2,5 meter.



Gambar 2.5
Peta Daerah Rawan Banjir Provinsi Riau

Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian berkisar 0-5 meter dpl. Walaupun demikian ada beberapa tempat memiliki ketinggian 30–91 meter dpl. Wilayah yang relatif rendah dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl), Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl). Wilayah yang cukup tinggi dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Gambaran ketinggian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Wilayah Provinsi Riau didominasi oleh lahan dengan kemiringan < 2% atau datar. Hal ini terlihat jelas khususnya pada wilayah pesisir. Pada kawasan pesisir ini kemiringan lahan 100% datar (kemiringan < 2%). Topografi sebahagian besar wilayah Provinsi Riau relatif datar dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0 s.d. 91 m. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tidak banyak memiliki topografi yang curam. Kebanyakan topografi di Riau lebih datar atau bergelombang. Hanya pada kawasan yang berdekatan dengan Bukit

Barisan yang memiliki lereng-lereng yang curam, terutama wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tabel 2.2:
Tinggi Beberapa Kotadari PermukaanLaut
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

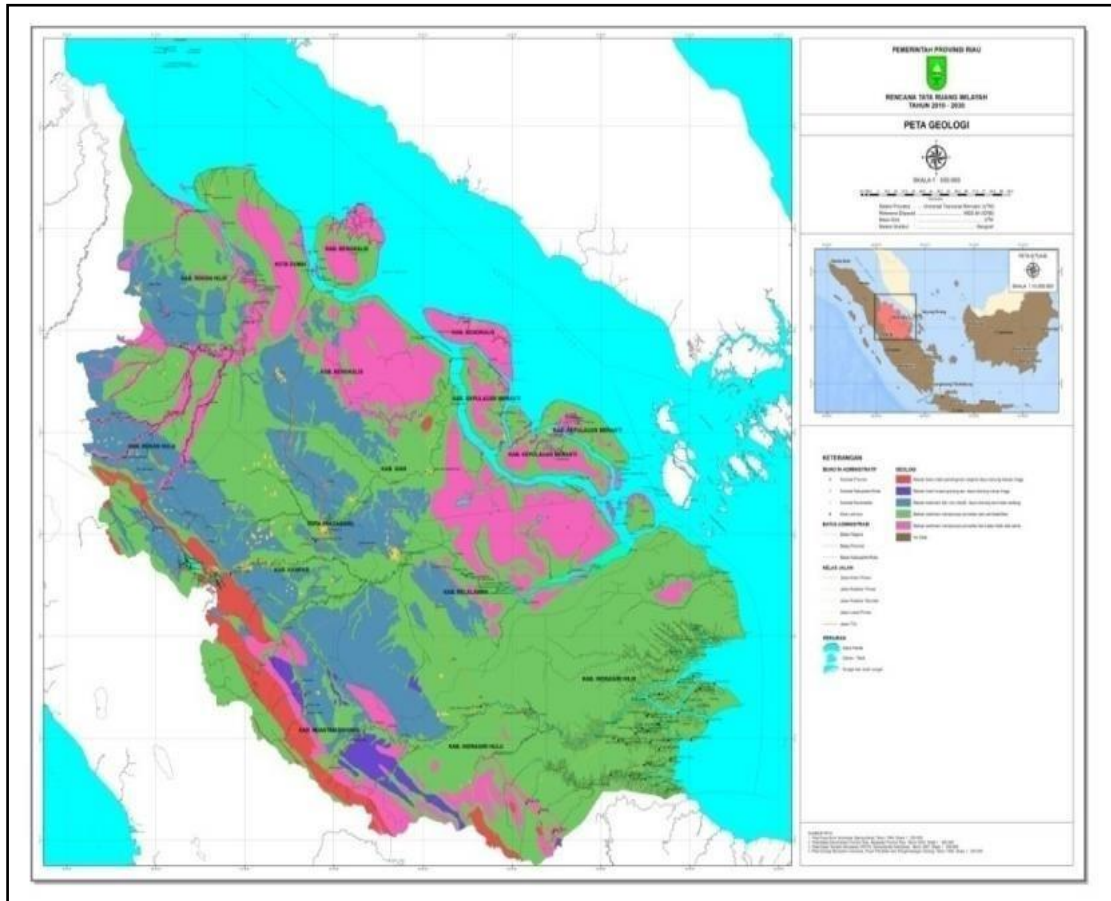
No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Dari Permukaan Laut (meter)
1	Kuantan Singingi	TelukKuantan	57
2	Indragiri Hulu	Rengat	4
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	3
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	5
5	Siak	Siak Sri Indrapura	5
6	Kampar	Bangkinang	30
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	91
8	Bengkalis	Bengkalis	2
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	5
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	2
11	Pekanbaru	Pekanbaru	10
12	Dumai	Dumai	5

Sumber:BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

2.1.1.4. Geologi

Faktor pengontrol utama struktur geologi regional di cekungan Sumatra tengah adalah adanya Sesar Sumatra yang terbentuk pada zaman kapur. Subduksi lempeng yang miring dari arah Barat Daya Pulau Sumatra mengakibatkan terjadinya *strong dextral wrenching stress* di Cekungan Sumatra Tengah (Wibowo, 1995). Hal ini dicerminkan oleh bidang sesar yang curam yang berubah sepanjang jurus perlapisan batuan, struktur sesar naik dan adanya *flower structure* yang terbentuk pada saat inversi tektonik dan pembalikan-pembalikan struktur. Selain itu, terbentuknya sumbu perlipatan yang searah jurus sesar dengan penebalan sedimen terjadi pada bagian yang naik (*inverted*) (Shaw et al., 1999).

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier dibagian barat dan selatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada diwilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat disekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan.



Gambar 2.6
Peta Geologi Provinsi Riau

Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Berdasarkan interpretasi kawasan gempa berdasarkan pendekatan hazard gempa (sejarah bencana gempa atau kejadian gempa wilayah Sumatera), maka Provinsi Riau berada dalam kawasan Zona C dan Zona D atau masih dalam kategori rendah rawan gempa.

Berdasarkan kepada land unit, yang disusun berdasarkan peta land system skala 1: 250.000 dan laporan Reppot (1988). Land unit yang terdapat pada Provinsi Riau dapat dibedakan atas:

- 1) Kejapah (KJP) merupakan dataran rumput antar pasang surut di bawah bakau dengan batuan alluvium campuran estuarin dan marin yang masih muda termasuk satuan fisiografi Group

Marin. Topografi datar dengan lereng 0-3%, relief <2 meter jenis tanah Entisol dengan tekstur halus.

- 2) Kahayan (KHY) merupakan dataran-dataran pasir pada sungai/muara dengan batuan aluvium campuran estuarin dan marin yang masih muda/aluvium sungai muda, termasuk satuan fisiografi grup marin/ aluivial. Topografi datar dengan lereng 0-3% relief 2-10 meter. Jenis tanah entisol dengan tekstur halus.
- 3) Sebangau (SBG) merupakan jalur meander sungai-sungai besar dengan tanggul-tanggul yang lebar, batuan aluvium sungai muda, termasuk satuan fisiografi grup Aluivial. Topografi datar dengan lereng 0-3% relief < 2 meter, lebar lembah 501-200 meter. Jenis tanah tergolong Entisol dengan tekstur tanah halus.

Tabel 2.3:
Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau

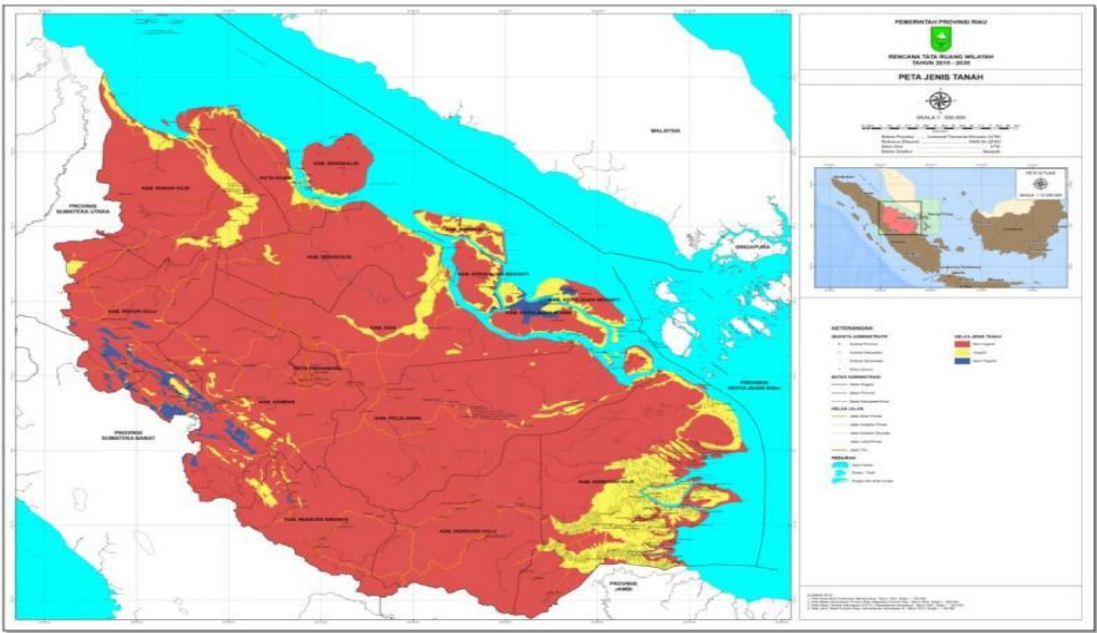
No	Jenis Tanah	Bahan Induk	Fisiografi
1.	Entisols	Aluvium	Datar
2.	Histosols	Organik	Datar
3.	Inceptisols	Aluvium Metamorf Sedimen	Berombak-Bergelombang Datar Bergunung Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang
4.	Mollisols	Batu Gamping	Berbukit
5.	Oxisols	Metamorf Sedimen Volkanik	Berbukit Berbukit Berombak-Bergelombang Datar-Berombak
6.	Ultisols	Metamorf Plutonik Sedimen Volkanik	Berbukit Berbukit Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang Berbukit Bergunung

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015

- 4) Klaru (KLR) merupakan dataran banjir tergenang tetap dengan batuan aluivium sungai muda termasuk satuan fisiografi grup aluivial dan topografi datar dengan lereng 0-3% , relief < 2 meter jenis tanah Entisol dengan tekstur halus.

- 5) Muara Beliti (MBI) merupakan dataran sendimen berbatu tufa yang berombak sampai bergelombang dengan batuan tufit, batuan lumpur, batuan lanau termasuk satuan fisiografi group dataran. Topografi bergelombang dengan lereng 9-15%, relief 11-50meter, lebar puncak 500-200 meter, lebar lembah 25-200 meter. Jenis tanah Inseptisol dengan tekstur halus.
- 6) Sungai aur (SAR) merupakan dataran endapan bertufa yang berbukit dengan batuan lumpur, batuan lanau, termasuk satuan fisiografi grup dataran, topografi berbukit dan lereng 16-25% relief 11-50 meter lebar puncak <50meter lebar lembah 25-200 meter. Jenis tanah tergolong Ultisol dengan tekstur tanah agak halus.

Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi *alluvium* (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan *neogen* seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan *permokarbon*, *paleogen* dan *neogen* dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan. Di Provinsi Riau terdapat enam jenis tanah utama yakni jenis tanah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik.



Gambar 2.7
Kelas Jenis Tanah Provinsi Riau

Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat didaerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bencah berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kampar serta Rokan Hulu. Kelas jenis tanah non organik tersebar diseluruh bagian wilayah Provinsi Riau dan merupakan kelas jenis tanah yang terbesar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Provinsi Riau terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang ada berupa sungai, danau, dan lainnya. Sedangkan untuk air tanah berupa cekungan air tanah sebanyak 3 buah yaitu CAT Pekanbaru, CAT Jambi-Dumai dan CAT Tulak.

Tabel 2.4:
Sungai Yang Bermuara di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Nama Sungai	Muara
1	Sungai Kubu	Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir
2	Sungai Bangko	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
3	Sungai Sinaboi	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
4	Sungai Ala	Kec. Dumai Barat Kota Dumai
5	Sungai Bukit Batu	Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
6	Sungai Siak Kecil	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
7	Sungai Siak	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
8	Sungai Penyengat	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
9	Sungai Rokan	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
10	Sungai Kampar	Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
11	Sungai Guntung	Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
12	Sungai Gaung	Kec. Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
13	Sungai Indragiri	Kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
14	Sungai Reteh	Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
15	Sungai Kateman	Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai, 4 (empat) diantaranya merupakan sungai utama yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan dan sumber air bagi

masyarakat. Ke empat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi oleh pasang surut. Daftar 15 (lima belas) sungai yang bermuara pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Diantara 4 sungai utama di atas, Sungai Kampar dan Sungai Siak pada saat ini merupakan sungai prioritas Nasional. Sungai terpanjang di Provinsi Riau adalah sungai Indragiri dengan panjang 645 kilometer. Sedangkan sungai terdalam adalah Sungai Siak dengan kedalaman 8–12 meter. Sesuai panjang sungai, Sungai Indragiri memiliki luasan cacthmen area terluas yaitu 32.525Km² diikuti Sungai Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Siak. Sungai dengan debit terbesar adalah Sungai Indragiri yaitu sebesar 2.760M³/detik pada kondisi maksimal dan 65M³/detik pada kondisi minimal. Data sungai utama di Provinsi Riau ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5:
Profil Sungai Utama Provinsi Riau

No	NamaSungai	Panjang (Km)	Kedalaman (M)	LuasCatchmen Area (Km ²)	Debit(M ³ /Detik)	
					Maks.	Min.
1	Rokan	325	6–8	28.318	1.980	48
2	Siak	345	8–12	14.010	1.700	45
3	Kampar	580	6	31.302	2.200	49
4	Indragiri	645	6–8	32.525	2.760	65

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Neraca Sumber Daya Alam Riau 2013)

Sungai-sungai utama di Provinsi Riau selain berfungsi sebagai transportasi air, sungai-sungai ini berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat.Dari keempat sumber air tersebut, sungai merupakan pensuplai bahan baku terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,34%.

Sumber air berasal dari air bawah permukaan (air tanah) dan air permukaan (sungai, danau, waduk, mata air dan sebagainya. Sumber penyediaan air bersih di Provinsi Riau oleh perusahaan airminum, berasal dari 4 sumber yaitu sungai, waduk, mata air dan sumber lain. Jika dilihat perkembangan penyediaan air bersih diprovinsi Riau menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,16% terutama disumbang oleh sumber air sungai sebesar

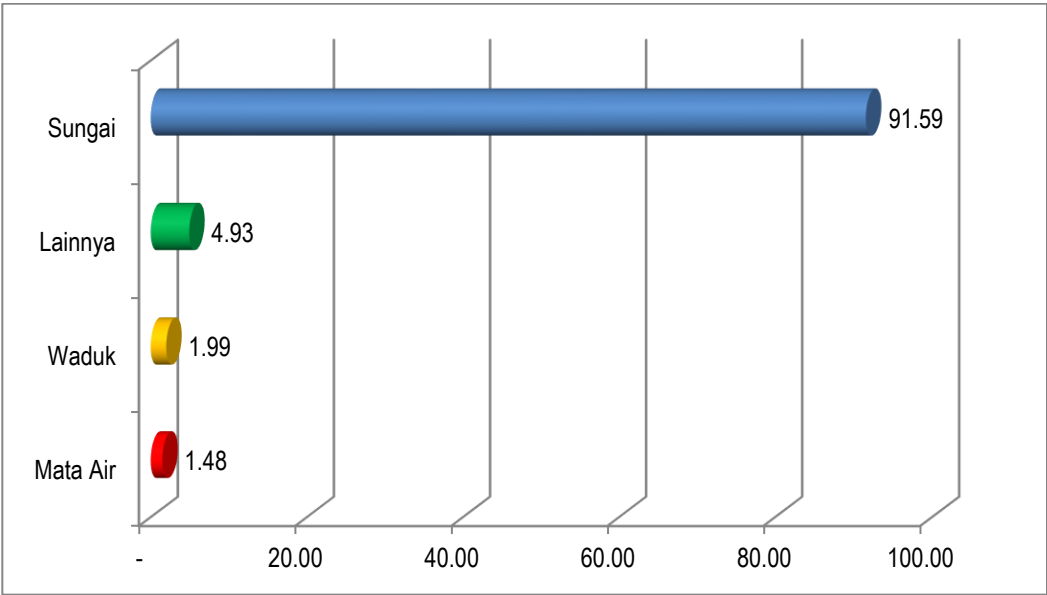
8,34% selanjutnya tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan hanya tumbuh -13,35%. Perkembangan volume dan pertumbuhan sumber penyediaan air bersih di Provinsi Riau 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6:
Sumber Air Untuk Penyediaan Air Bersih Provinsi Riau, 2011-2015

Sumber Air	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sungai (M³)	18.379.597	18.381.882	18.400.000	13.368.558	14.483.924
Pertumbuhan (%)		0,01	0,10	(27,34)	8,34
Waduk (M³)	397.333	399.764	399.800	235.057	105.457
Pertumbuhan (%)		0,61	0,01	(41,21)	(55,14)
Mata Air (M³)	297.658	298.027	298.222	0	19.842
Pertumbuhan (%)		0,12	0,07	(100,00)	-
Lainnya (M³)	989.700	990.986	990.991	3.803.389	3.870.271
Pertumbuhan (%)		0,13	0,00	283,80	1,76
Jumlah (M³)	20.064.288	20.070.659	20.089.013	17.407.004	18.479.494
Pertumbuhan (%)		0,03	0,09	(13,35)	6,16

Sumber:BPS (Riau Dalam Angka, 2016)

Sementara itu distribusi sumber penyediaan air bersih di provinsi Riau pada tahun 2014 masih didominasi oleh air lainnya sebanyak 283,80%. Sedangkan sumber air sungai lainnya -27,34, waduk -41,21, mata air -100%. Persentase sumber bahanbaku air bersih tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 2.8.



Sumber : BPS (Riau Dalam Angka, 2015)

Gambar 2.8
Persentase Sumber Suplai Bahan Baku Air Provinsi Riau, 2015

Air minum ataupun air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah Perusahaan Air Minum menjadi 25 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum 2.089 liter per detik. Produksi air minum yang di salurkan pada tahun 2013 sebesar 22,48 juta m³ sejumlah 0,46 juta m³ (2,03%) didistribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, sejumlah 8,90 juta m³ (39,69%) ke kelompok Niaga, 0,19 juta m³ (0,88 persen) ke kelompok sosial, 0,25 juta m³ (1,09%) ke kelompok industri dan 3,99 juta m³ (17,78%) ke kelompok khusus. Sedangkan air minum yang susut/hilang dalam penyaluran sebesar 8,66 juta m (38,51%) (BPS Riau Dalam Angka, 2016).

Kedalaman muka air tanah sangat berkorelasi dengan ketinggian tempat dan topografi. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa wilayah Riau memiliki ketinggian tempat yang rendah dengan topografi beragam dari datar sampai berbukit, walaupun dengan dominasi berombak. Dengan demikian, kedalaman muka air tanah juga beragam, namun sebagian besar wilayah Riau memiliki kedalaman muka air tanah yang dalam. Secara umum kedalaman muka air tanah Provinsi Riau beragam dari 0,5-6,0 m, dan sebagian besar kedalaman muka air tanahnya > 3 m.

2.1.1.6. Klimatologi

a) Tipe iklim

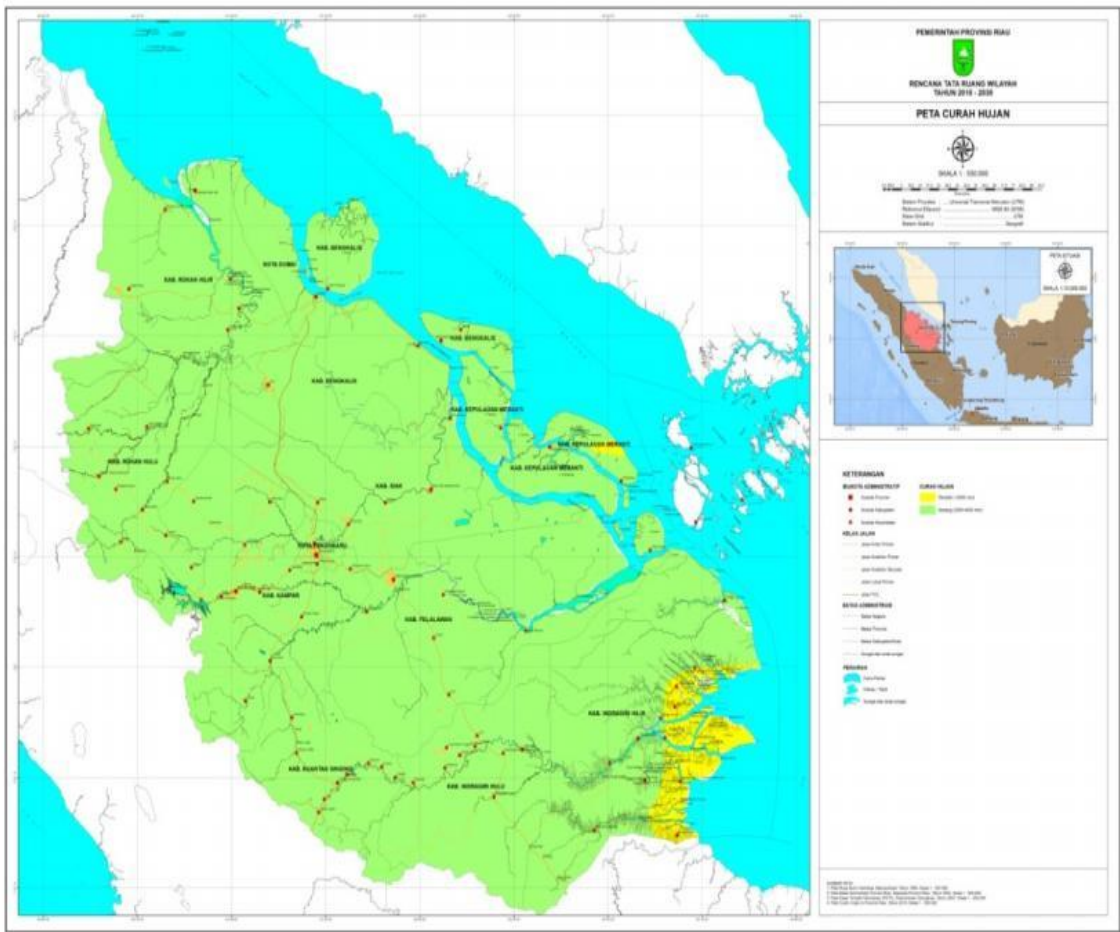
Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim, suatu penciri yang membedakan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sering digunakan untuk kajian-kajian kehutanan dan pertanian.

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata rata curah hujan berkisar antara 1.700-4.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan karena secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis katulistiwa.

Selama periode 2011-2015, dimana tahun 2012 merupakan tahun yang paling banyak curah hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2012 adalah Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 hari, Kota Dumai 163 kali, Kabupaten Kampar 147 kali dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah hari hujan 140 kali. Jumlah Curah Hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupten Indragiri Hilir sebesar 1.722,0 mm, (BPS, Riau Dalam Angka, 2016).

b) Curah hujan

Berdasarkan curah hujan, Provinsi Riau dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah dengan curah hujan sedang dan rendah. Daerah dengan curah hujan sedang (2000– 4000 mm) mencakup sebagian besar Provinsi Riau. Daerah dengan curah hujan rendah (<2000mm) terdapat dibagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Detail curah hujan menurut wilayah di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.7 serta Tabel 2.8.



Gambar 2.9
Peta Curah hujan Provinsi Riau

Selama periode 2010–2015, hari hujan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau terjadi disetiap bulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditunjukkan dengan tingginya hari hujan dan curah hujan. Musim kemarau umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga September yang ditunjukkan dengan menurunnya hari hujan dan curah hujan.

Tabel 2.7:
Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Per Bulan
Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015

NO	BULAN	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1	Jan	25	227.00	12	66.70	13	110.90	8,25	88,73	16	139,9
2	Feb	15	88.10	22	247.60	19	335.00	0,67	2,14	9	34,4
3	Mar	19	116.00	17	324.60	22	339.00	5,42	99,80	21	356,5
4	Apr	23	328.10	22	215.30	18	172.10	14,33	209,85	19	129,3
5	May	12	101.70	18	182.60	15	129.20	13,08	184,29	15	140,1
6	Jun	11	65.20	9	140.60	7	56.00	12,17	128,03	13	103,6
7	Jul	8	26.10	18	262.20	11	133.90	10,75	106,97	5	13,5
8	Aug	15	228.70	16	97.00	13	186.20	16,67	240,56	10	277,8
9	Sep	15	304.90	15	185.80	na	na	8,83	130,76	7	60,0
10	Oct	23	266.40	21	228.90	na	na	12,42	204,46	11	64,7
11	Nov	22	317.10	17	439.50	na	na	19,25	359,83	22	411,4
12	Dec	23	335.30	20	245.00	na	na	15,42	277,26	25	317,1
JUMLAH		211	2.404,00	217	2.636,00	118	1.462	137,25	2.032,67	173	2.048,3

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2015) dan BMKG (2016)
 Keterangan: HH = Hari Hujan; MM = Mili Meter, na: not available

Kondisi hari hujan dan curah hujan menurut kabupaten/kota cukup bervariasi. Selama periode 2011–2015, jumlah Hari Hujan (HH) berkisar antara 83–146 hari hujan/tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 1.313–2.530 milimeter pertahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8. Jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan yang cukup ekstrim tinggi terjadi pada tahun 2012 di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 217 hari hujan dengan jumlah curah hujan sebesar 2.635 milimeter dan terendah pada tahun 2013 di Kabupaten Rokan Hilir dengan hari hujan sebesar 40 hari dengan curah hujan 988,5 milimeter.

Tabel 2.8:
Perkembangan Jumlah Hari Hujan (HH) dan Jumlah Curah Hujan (MM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1	Kuantan Singingi	121	2.304	140	4.080	71	2.023	115	2.225	103	2.450
2	Indragiri Hulu	192	2.288	168	2.305	56	858	165	2.082	146	1.940
3	Indragiri Hilir	133	1.781	130	1.707	76	1.134	68	1.385	139	1.988
4	Pelalawan	167	2.394	200	2.788	100	1.231	170	2.141	188	1.722
5	Siak	Na	na	114	2.148	192	2.275	161	1.911	77	1.300
6	Kampar	127	2.938	75	3.360	54	961	147	2.695	146	1.894
7	Rokan Hulu	142	1.998	112	1.958	64	1.527	116	2.480	148	1.768
8	Rokan Hilir	83	2.088	73	2.470	40	988.5	150	2.020	72	1.689
9	Bengkalis	122	2.110	101	1.881	45	1.340	150	2.183	156	1.656
10	Kep. Meranti	Na	na	194	2.974	86	661	73	1.771	150	1.312
11	Pekanbaru	211	2.404	217	2.635	118	1.462	188	2.343	173	2.048
12	Dumai	164	2.249	160	2.095	96	1.298	144	1.474	157	1.022
Rataan		146	2.255	140	2.530	83	1.313	137	2.059	138	1.732

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2015) dan BMKG (2016)

Keterangan: HH = Hari Hujan; MM = Mili Meter, na: not available;

Kabupaten lain dengan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan relatif rendah adalah Kabupaten Inhil, Kabupaten Siak dan Kep. Meranti serta Kota Dumai. Rendahnya jumlah hari hujan dan curah hujan berkorelasi positif dengan kebakaran hutan dan lahan kabupaten/kota bersangkutan disamping faktor lain seperti suhu, kelembaban dan luasan pembukaan lahan pertanian.

c) Suhu

Keadaan suhu Provinsi Riau yang diukur di Kota Pekanbaru selama periode 2011-2015, dengan rata-rata setinggi 28,30 derajat celcius, yang secara detail ditunjukkan pada Tabel 2.9. Suhu pada siang hari berkisar antara 23,20 - 33,40 derajat celcius. Suhu minimum sebesar 19,90 derajat celcius terjadi pada bulan Oktober 2011 dan suhu maksimum sebesar 35,80 derajat celcius terjadi pada bulan Mei 2011. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi perubahan cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global.

Indikasi perubahan iklim terjadi di Kota Pekanbaru. Data dari

Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau menunjukkan bahwa suhu udara dan curah hujan dari tahun 2011-2015 berfluktuasi.

Tabel 2.9:
Keadaan suhu (°C) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Bulan	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015*	
		Mak	Min	Mak	Min	Mak	Min	Mak	Min	Mak	Min
1	Jan	33,50	22,00	33,10	23,20	32,90	23,50	32,70	20,40	32,40	21,15
2	Feb	35,50	21,00	32,60	23,10	32,10	23,20	35,00	20,60	33,30	21,70
3	Mar	34,60	21,50	32,60	23,10	34,10	23,50	35,20	22,00	34,95	23,00
4	Apr	35,40	21,80	33,20	23,30	34,40	23,80	33,30	22,60	32,80	23,62
5	Mei	35,80	22,30	33,20	23,60	34,20	24,10	35,40	22,90	34,60	23,80
6	Jun	35,00	22,50	33,80	23,60	34,60	23,40	35,70	21,80	35,50	22,25
7	Jul	34,60	21,80	32,80	23,60	33,30	23,00	35,90	22,00	35,25	22,60
8	Aug	33,40	23,30	32,40	23,30	33,30	22,80	34,90	22,00	34,85	21,75
9	Sep	35,00	21,50	33,10	23,10	na	na	34,20	22,20	33,70	22,63
10	Okt	34,60	19,90	32,60	23,50	na	na	35,00	21,40	34,83	22,34
11	Nov	35,00	22,50	32,50	23,40	na	na	34,20	22,40	33,61	22,50
12	Des	34,10	22,20	32,80	24,40	na	na	34,20	21,90	34,04	22,13
Rataan		34,70	21,70	32,90	23,60	33,60	23,40	32,40	24,10	34,15	22,45

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)
Keterangan: MAK = Maksimum; MIN = Minimum
Keterangan: *Estimasi

d) Kelembaban

Jumlah hari hujan, curah hujan dan suhu berkorelasi positif dengan tingkat kelembaban. Selama periode 2011– 2015, kelembaban udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 69% - 85% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.10. Tingkat kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau (Februari–Juli) ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya pada musim hujan (November –Desember).

Daerah yang paling sering hujan selama tahun 2015 adalah Kota Pekanbaru 173 hari hujan dan paling sedikit Kabupaten Rokan Hilir 72 hari hujan. Jumlah hari hujan, curah hujan, suhu dan tingkat

kelembaban disamping kondisi lahan dan maraknya pembukaan lahan berkorelasi positif terhadap kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak terhadap kabut asap sehingga kualitas udara menjadi sangat tidak sehat. Pada tahun 2014, kebakaran lahan dan hutan mulai banyak terjadi pada bulan Juni dan Juli, bersamaan dengan musim kemarau dan pembukaan lahan gambut. Terkait dengan jumlah titik api dibahas pada sub Lingkungan Hidup.

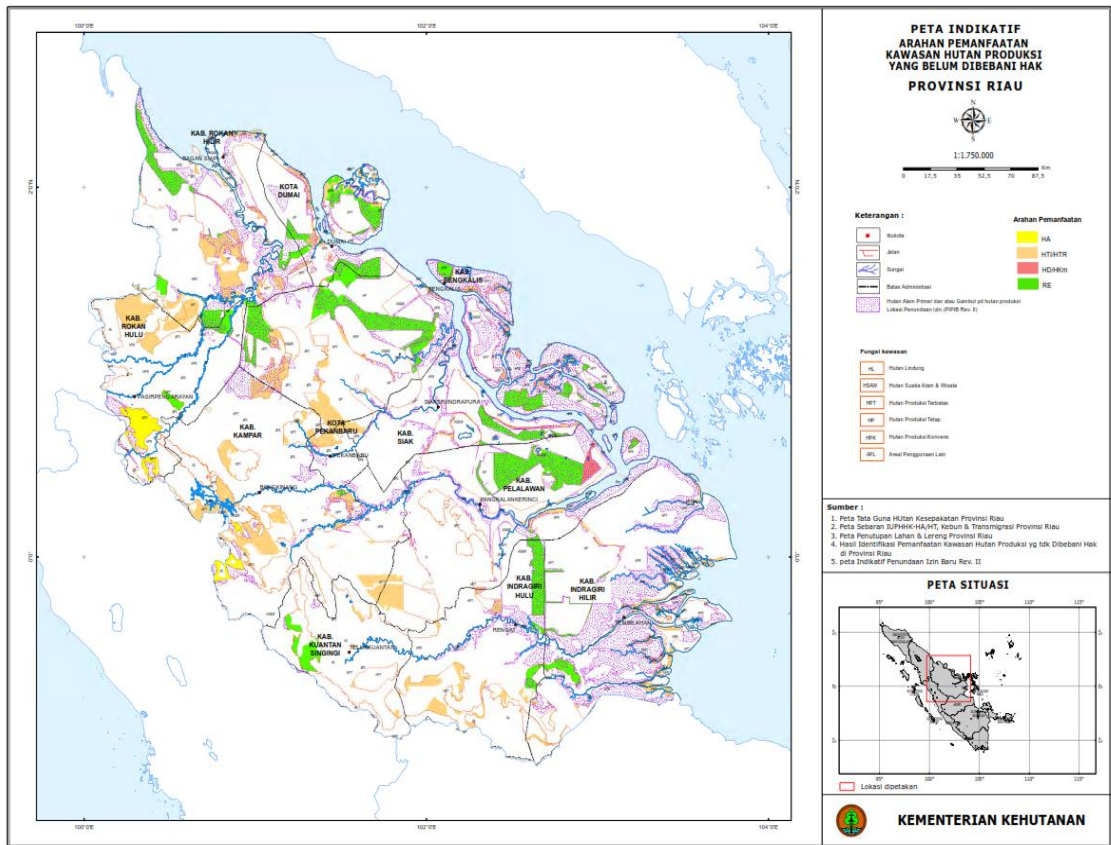
Tabel 2.10:
Kelembaban Udara (%)
Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Bulan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jan	78,00	69,30	78,00	80,00	79,00
2	Feb	70,00	77,60	82,00	74,00	76,00
3	Mar	72,00	73,70	80,00	77,00	80,00
4	Apr	75,00	73,00	77,80	76,00	80,00
5	Mei	75,00	75,50	78,90	80,00	81,00
6	Jun	74,00	71,10	72,00	75,00	78,00
7	Jul	69,00	76,80	78,00	74,00	75,00
8	Aug	73,00	75,30	77,00	79,00	81,00
9	Sep	76,00	80,00	na	78,00	79,00
10	Okt	77,00	75,30	na	80,00	85,00
11	Nov	77,00	83,00	na	81,00	82,00
12	Des	78,00	82,30	na	83,00	85,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015) dan BMKG (2016)
 Keterangan: MAK = Maksimum; MIN = Minimum

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 9.012.875,96 hektar. Penggunaan lahan di Provinsi Riau sebagai berikut : (1) Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, (2) Hutan Lindung (3) Hutan produksi Terbatas, (4) Hutan Produksi, (5) Hutan produksi yang dapat dikonversi, (6) Areal Penggunaan Lain/APL dengan rincian luasan mengacu kepada Perda RTRW Provinsi Riau. Peta sebaran fungsi kawasan pada arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani hak dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10
Peta Sebaran Fungsi Kawasan Pada Arahan Pemanfaatan Hutan
Produksi Provinsi Riau (RTRW, 2016-2035)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan serta pesisir dan laut, pertambangan, industri dan pariwisata serta pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam rangka percepatan akses untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau.

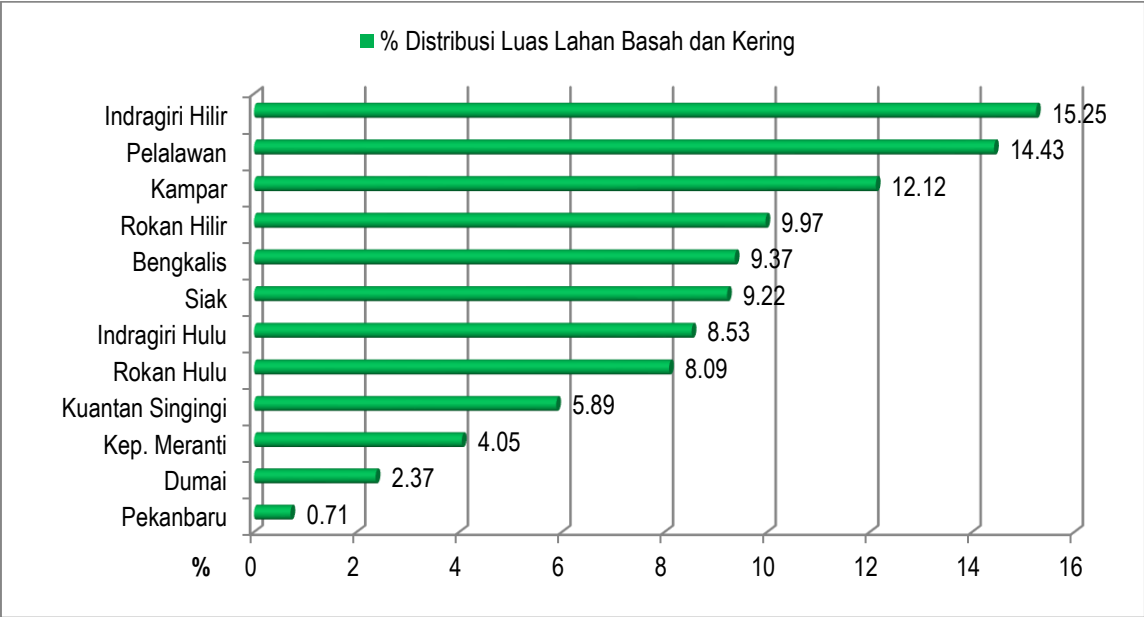
Sesuai dengan sistem informasi geografis berupa kondisi lahan (peta kesuburan fisik dan kimia tanah serta kelerengan lahan) dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan disamping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan. Jenis lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian yaitu lahan basah dan lahan kering seluas 8,88 juta hektar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.11 dan Persentase distribusi luas lahan menurut Kabupaten Kota lihat pada Gambar 2.11. Luas

lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas dari total luasan Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 1,355 juta hektar (15,18%) dan tersempit di Kota Pekanbaru sebanyak 0,063 juta hektar (0,71%). Pengembangan lahan kering untuk budidaya pertanian sebagian besar digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan.

Tabel 2.11:
Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau, Tahun 2014

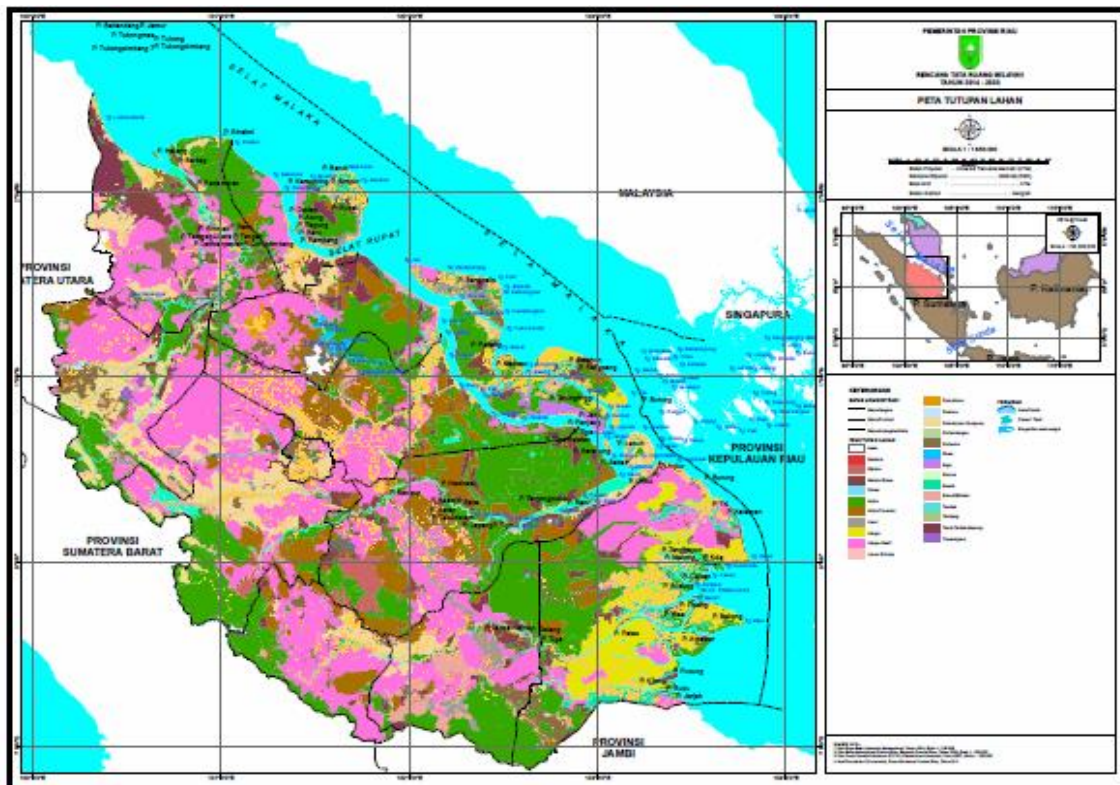
No	Kabupaten/Kota	Lahan Basah		Lahan Kering		Jumlah Luas Lahan	
		(ha)	%	(ha)	%	(ha)	(%)
1	Kuantan Singingi	519.527,33	5,97	3.961,58	2,20	523.494,88	5,89
2	Indragiri Hulu	740.438,88	8,50	17.329,56	9,64	757.776,94	8,53
3	Indragiri Hilir	1.321.623,13	15,18	33.457,53	18,61	1.355.095,84	15,25
4	Pelalawan	1.276.060,03	14,65	6.121,43	3,41	1.282.196,11	14,43
5	Siak	790.672,67	9,08	28.590,12	15,91	819.271,87	9,22
6	Kampar	1.061.113,49	12,19	16.219,90	9,02	1.077.345,58	12,12
7	Rokan Hulu	713.577,78	8,20	5.642,66	3,14	719.228,64	8,09
8	Bengkalis	809.682,36	9,30	23.379,26	13,01	833.070,92	9,37
9	Rokan Hilir	880.433,30	10,11	5.675,10	3,16	886.118,51	9,97
10	Kep. Meranti	355.555,82	4,08	4.073,79	2,27	359.633,69	4,05
11	Pekanbaru	34.494,02	0,40	28.542,54	15,88	63.036,96	0,71
12	Dumai	204.234,09	2,35	6.756,09	3,76	210.992,53	2,37
Total		8.707.412,90	100,00	179.749,56	100,00	8.887.262,46	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2015)



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2015)

Gambar 2.11
Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau, Tahun 2014



Gambar 2.12
Tutupan Lahan Provinsi Riau Berdasarkan RTRW 2016-2035

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2016-2035 (Gambar 2.12) bahwa arahan untuk areal penggunaan lain menyesuaikan menurut Perda RTRW Provinsi Riau. Sedangkan Pengembangan sektor-sektor potensi baik pertanian dan non pertanian sudah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2016-2035 sebagaimana tutupan lahan Gambar 2.12 di atas. Berdasarkan luasan penggunaan lahan eksisting tahun 2014 menurut tutupan lahan menunjukkan bahwa terdapat dua sub sektor yang mendominasi penggunaan lahan yaitu perkebunan dan kehutanan.

Kawasan budidaya ruang daratan di wilayah Riau, mencakup di dalamnya kawasan pesisir, lokasinya tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Kawasan budidaya tersebut dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut Kawasan Hutan Produksi direncanakan untuk dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Hutan Rakyat dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

2.1.2.1 Pertanian Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Perikanan (Pesisir dan Laut)

Pada tahun 2015 sektor pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) provinsi Riau pada harga berlaku dengan migas sebesar 22,33% dan harga konstan dengan migas sebanyak 24,27% menempati urutan ketiga pada harga berlaku dan urutan kedua pada harga konstan dari 17 sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Sedangkan kontribusi sektor pertanian PDRB harga berlaku tanpa migas 30,25% dan pada harga tanpa migas sebanyak 30,99%. Kontribusi yang besar tersebut terutama disumbangkan oleh sub sektor perkebunan dengan empat komoditas utama yaitu kelapa sawit, kelapa dan karet serta sagu.

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2015 dinyatakan bahwa luas kawasan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 142.021 hektar, sub sektor perkebunan seluas 3.550.211 hektar.

Pengembangan budidaya pertanian dengan peruntukan kawasan dirinci penggunaannya sebagai berikut:

- a) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan terdapat di seluruh kabupaten dan kota dengan luas kurang lebih 503.886 Ha.
- b) Kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura terdapat diseluruh kabupaten dan kota dengan luas kurang lebih 203.075 Ha.
- c) Kawasan peruntukan pertanian budidaya Perkebunan Rakyat (PBR) dikembangkan di diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
- d) Kawasan peruntukan pertanian budidaya peternakan terdiri dari Peternakan Rakyat dan Peternakan Besar, yang dikembangkan diseluruh kabupaten terutama di kawasan-kawasan permukiman perdesaan (*hinterland*);

2.1.2.2 Wilayah Pesisir dan Laut

Wilayah Pesisir dan Laut Perairan pesisir dan laut Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh

masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumber daya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumber daya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

i. Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan untuk berlokasi:

1. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting;
2. Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting
3. Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting.

ii Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:

1. Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota, Kawasan ini terutama terdapat di kawasan sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai.
2. Budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang, Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka.

Selanjutnya terhadap pengembangan potensi lainnya di wilayah pesisir dan laut seperti pengembangan pariwisata terdapat di masing-masing kabupaten/kota antara lain Kabupaten Pelalawan yaitu wisata bono, Kabupaten Bengkalis yaitu kawasan wisata pulau rupert, pantai

selat baru, dan pantai prapat tunggal meskom, Kabupaten Rokan Hilir yaitu kawasan wisata pulau jemur, Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu event wisata bokor, kawasan mangrove, dan kawasan wisata tasik, Kota Dumai yaitu pantai teluk makmur, dan kawasan mangrove, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pantai solop dan Kabupaten Siak yaitu Ekowisata Mangrove serta dukungan infrastruktur menuju pariwisata.

Pengembangan industri di wilayah pesisir dan laut terdapat di Kota Dumai yaitu kawasan industri Dumai sekitarna, Kabupaten Siak yaitu kawasan Industri Tanjung Buton dan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kawasan industri Kuala Enok.

Pembangunan pelabuhan pada wilayah pesisir dan laut sangat diperlukan terutama untuk kebutuhan pintu masuk dan keluar utama barang dari/ke Provinsi Riau, dan sebagai penunjang kawasan industri sekaligus membuka keterisoliran wilayah kepulauan. Upaya Pemerintah Provinsi Riau mendorong Pelindo meningkatkan fasilitas pelabuhan Dumai dan membangun pelabuhan peti kemas untuk mempercepat arus masuk/keluar barang. Hal yang sama untuk meneruskan pembangunan pelabuhan Samudera Kuala enok juga akan mempercepat bongkar/muat barang untuk Riau bagian selatan. Sedangkan untuk perumahan, pembangunan diarahkan pada kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.

2.1.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Percepatan pembangunan sangat tergantung dari kondisi kewilayahan (infrastruktur), luas wilayah serta kelancaran urusan administratif. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari terlalu luasnya wilayah administrasi yang dikelola oleh provinsi adalah kurang terperhatikannya dan kurang meratanya pembangunan untuk wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi sehingga hampir semua aspek wilayah tertinggal. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah maka perlu percepatan pengembangan beberapa wilayah. Peluang pengembangan wilayah dari kabupaten induk menjadi kabupaten baru antara lain di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kampar Kiri.

Disisi lain, dengan semakin menggeliatnya perekonomian di daerah-daerah tertentu menjadikan beberapa ibu kota kabupaten menjelma menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Berkembangnya kota-kota pertumbuhan baru ini lebih disebabkan perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya, namun perkembangannya belum mendapat sentuhan perencanaan kota yang baik. Beberapa kota yang telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dan berpeluang dikembangkan menjadi kota antara lain: Kota Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu, Kota Perawang di Kabupaten Siak, dan Kota Duri di Kabupaten Bengkalis.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap, Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi, Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir),

Tabel 2.12:
Bencana Alam dan Korban Provinsi Riau Tahun 2011–2015

Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
Frekuensi (kali)	12	27	29	44	20	32,40
Korban						
a. Meninggal (orang)	0	2	4	2	4	37,50
b. Menderita (orang)	7.669	16.134	46.900	15.642	18.425	63,05
Rumah						
a. Hancur (Unit)	315	188	267	359	290	4,24
b. Rusak (Unit)	0	0	0	127	0	-
Bantuan Beras (kg)	28.200	22.700	23.900	22.300	2.700	(27,20)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Selama periode 2010-2015, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend penurunan sebesar 32,40%, Frekuensi bencana alam banjir cenderung menurun diikuti dengan

jumlah korban meninggal yang menurun menjadi 37,50%. Walaupun frekuensi bencana alam banjir terjadi peningkatan namun jumlah korban yang menderita meningkat sebanyak 63,05%. Rumah korban banjir yang rusak akibat banjir juga menurun sebesar 424% dan jumlah rumah yang rusak menurun dari 127 unit rumah menjadi 0 unit rumah.

Meski frekuensi bencana alam banjir, korban menderita dan kerusakan rumah cenderung menurun, namun penanganan dan bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah menurun sebanyak - 27,20%. Kedepan, penanganan dan antuan korban bencana harus mendapat perhatian yang lebih terencana dan terkoordinasi serta tuntas.

Bencana alam dan korban terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Riau, namun bencana banjir besar yang memberikan dampak negatif pada tahun 2012 ditunjukkan Tabel 2.13. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang frekuensi banjirnya terbanyak diikuti Kabupaten Bengkalis. Korban menderita terbanyak akibat bencana banjir terdapat di Kabupaten Kampar 4.665 jiwa diikuti Kabupaten Pelalawan sebanyak 2.221 jiwa. Jumlah rumah yang hancur akibat bencana alam, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis dan wilayah yang tidak kena musibah banjir pada tahun 2014 adalah Kabupaten Siak dan Rokan Hilir.

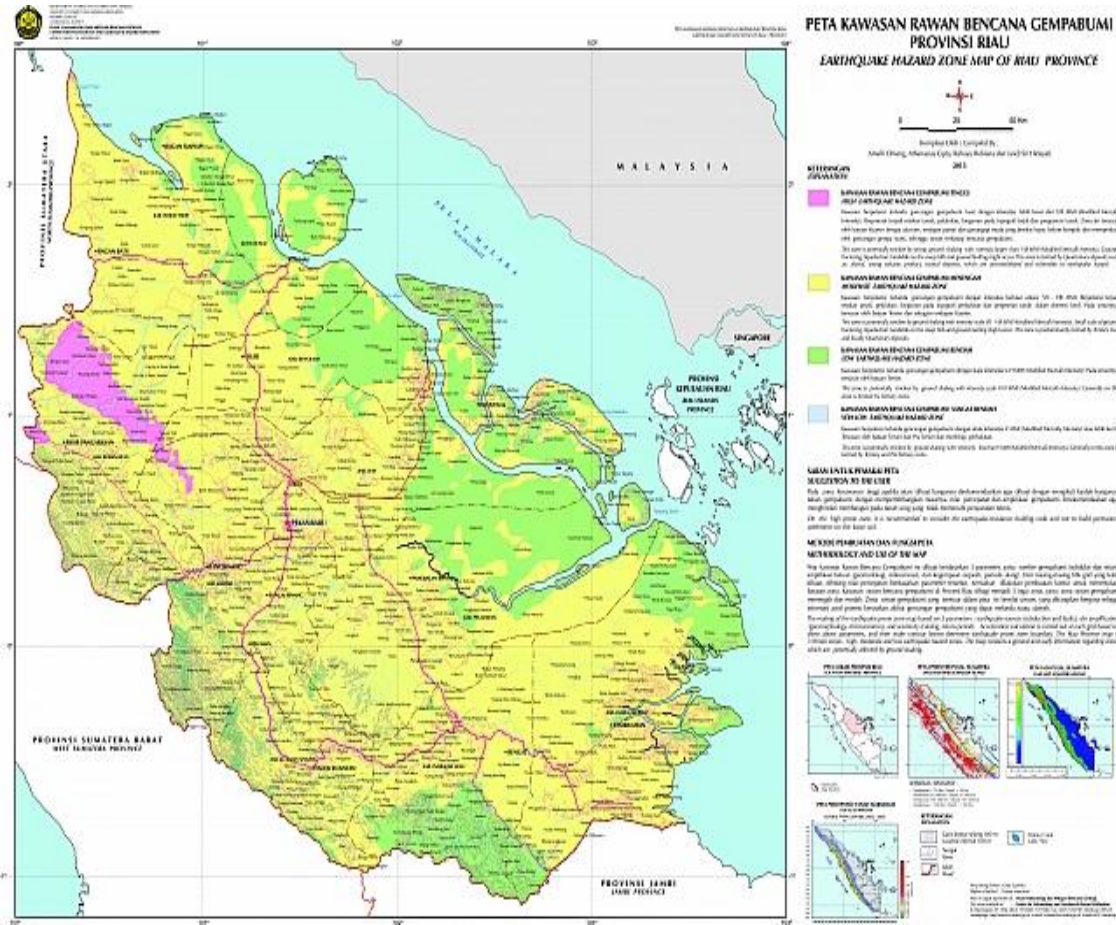
Tabel 2.13:
Bencana Alam Banjir dan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Korban Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Frek	Korban (Jiwa)		Rumah (Unit)		Bantuan
			Mati	Menderit a	Hancur	Rusak	Beras (Kg)
1	Kuantan Singingi	2	-	1.921	-	127	3.800
2	Indragiri Hulu	1	-	1.667	-	-	2.000
3	Indragiri Hilir	21	2	333	267	-	2.000
4	Pelalawan	1	-	2.221	-	-	5.000
5	Siak	-	-	-	-	-	-
6	Kampar	3	-	4.665	-	-	3.500
7	Rokan Hulu	2	-	3.102	-	-	3.000
8	Bengkalis	10	-	85	85	-	-
9	Kep, Meranti	2	-	438	-	-	2.000
10	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-
11	Pekanbaru	1	-	1.200	-	-	1.000
12	Dumai	1	-	10	7	-	-
Total		44	2	15.642	359	127	22.300

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Bencana alam kebakaran hutan dan lahan (gambut) bukan saja berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau menjadi “berbahaya” sehingga berdampak kepada kesehatan, tetapi juga telah mengganggu penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penanganan bencana di Provinsi Riau.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi yang dikompilasi oleh Omang dkk (2013), Provinsi Riau dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan kawasan yaitu kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah. Sebaran tingkatan kerawanan gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 2.13.



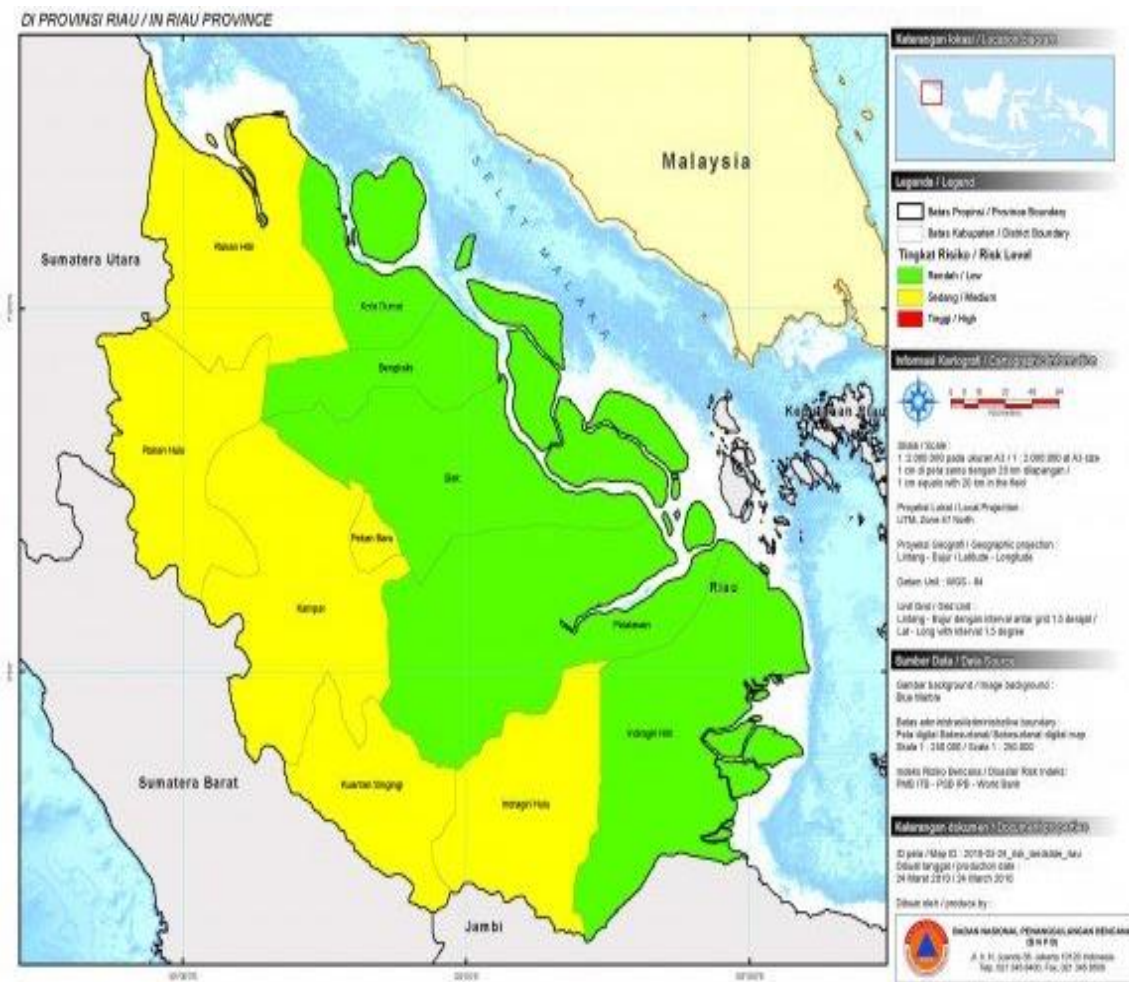
Gambar 2.13
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Riau

Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi adalah kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi kuat dengan intensitas lebih besar VIII MMI (Modified Marcelli Intensity). Berpotensi terjadi

retakan tanah, pelulukan, longsor pada topografi terjal, dan pergeseran tanah.

Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah adalah kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa dengan intensitas VII-VIII MMI. Berpotensi terjadi retakan tanah, pelulukan, longsor pada topografi perbukitan, dan pergeseran tanah dalam dimensi kecil. Kawasan rawan bencana gempa bumi rendah adalah kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa dengan intensitas V-VI MMI. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat rendah adalah kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa dengan intensitas V MMI atau lebih kecil.

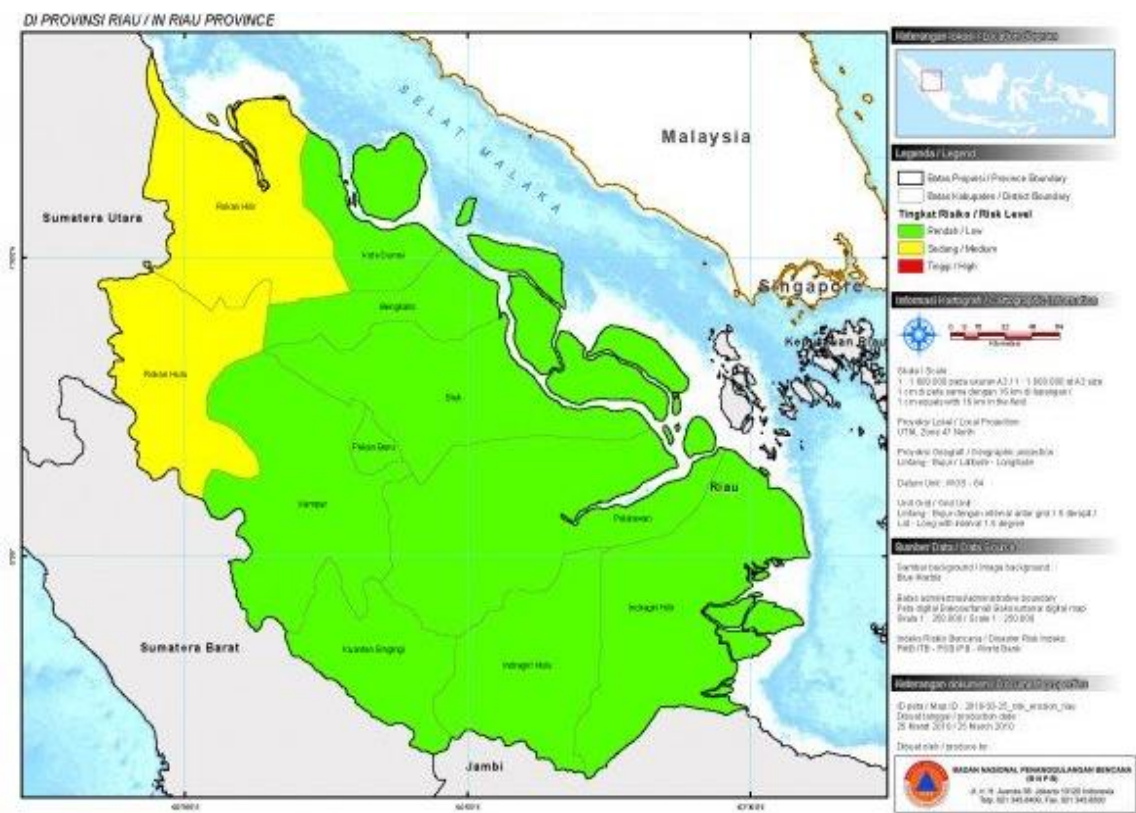
Provinsi Riau merupakan daerah tingkat kerawanan bencana pergeseran tanah dengan indeks resiko mulai dari sedang sampai rendah. Peta indeks resiko bencana gerakan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.14.



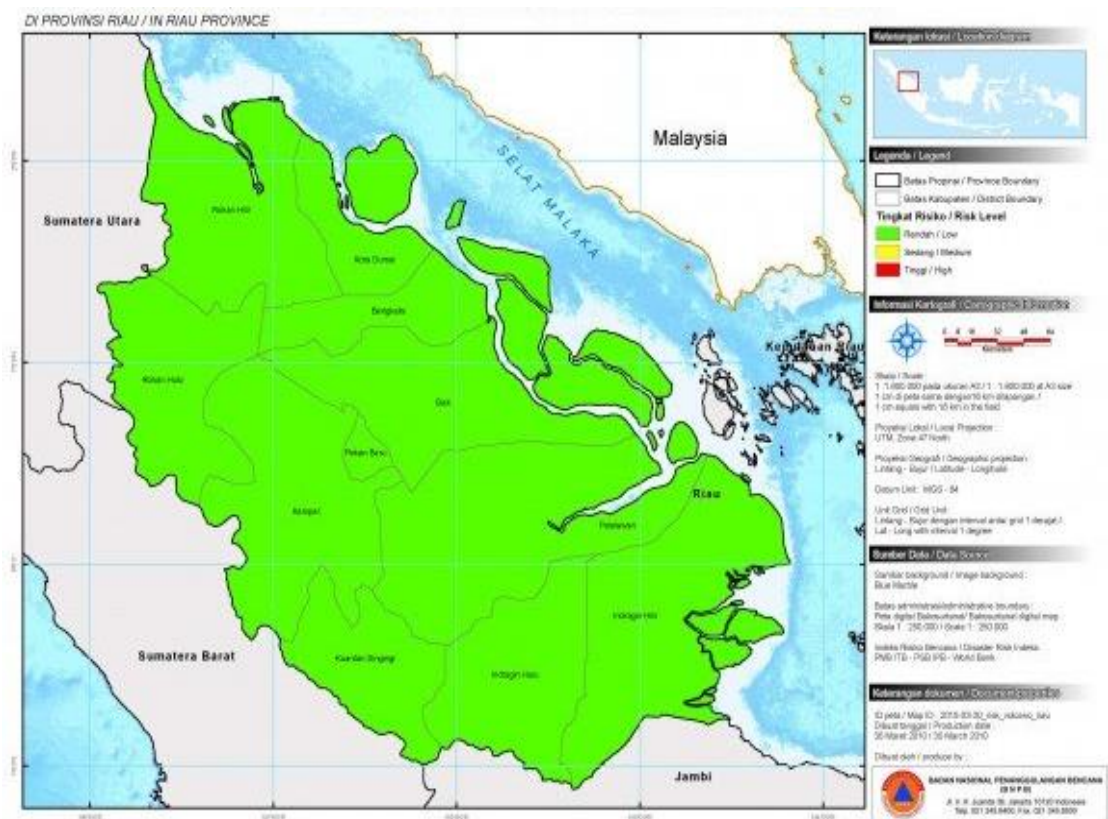
Gambar 2.14
Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah Provinsi Riau

Kawasan dengan tingkat resiko bencana gerakan tanah sedang dominan ditemukan kabupaten yang mempunyai daratan tinggi terutama sekitar kaki bukit barisan dan berbatasan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Sebaliknya kawasan dengan indeks resiko bencana gerakan tanah rendah ditemukan pada kabupaten dengan daratan rendah dan berbatasan dengan daerah pesisir.

Meskipun luas daerah yang mempunyai indeks resiko bencana gerakan tanah rendah sampai sedang hampir sama, tingkat resiko bencana erosi berbeda. Secara umum Provinsi Riau termasuk pada daerah yang aman dari bencana erosi. Sebagian besar kawasan Provinsi Riau mempunyai indeks resiko bencana erosi rendah, hanya kawasan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebagian kecil kawasan yang berbatasan dengan Sumatera Barat indeks resiko bencana erosi sedang (Gambar 2.15).



Gambar 2.15
Peta Indeks Resiko Bencana Erosi Provinsi Riau



Gambar 2.16
Peta Indeks Resiko Bencana Gunung Api Provinsi Riau

Secara geografis Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka, dan tidak berada pada barisan gunung aktif yang hanya ditemukan pada bagian barat pulau Sumatera. Oleh sebab itu, Provinsi Riau tidak memiliki resiko bencana gempa vulkanik. Semua kabupaten dan kota memiliki indeks resiko bencana gunung api rendah, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.16

Bencana alam kebakaran hutan dan lahan gambut masih menjadi bencana tahunan sampai tahun 2015 meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Bahkan bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 merupakan bencana kebakaran dan kabut asap terlama karena jumlah titik api (hot spot) sudah ditemukan sejak bulan Januari sampai Desember 2015 sehingga status bencana ditetapkan menjadi darurat bencana kabut asap. Jumlah titik api yang terpantau melalui satelit Modis mulai 1 Januari sampai 9 Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

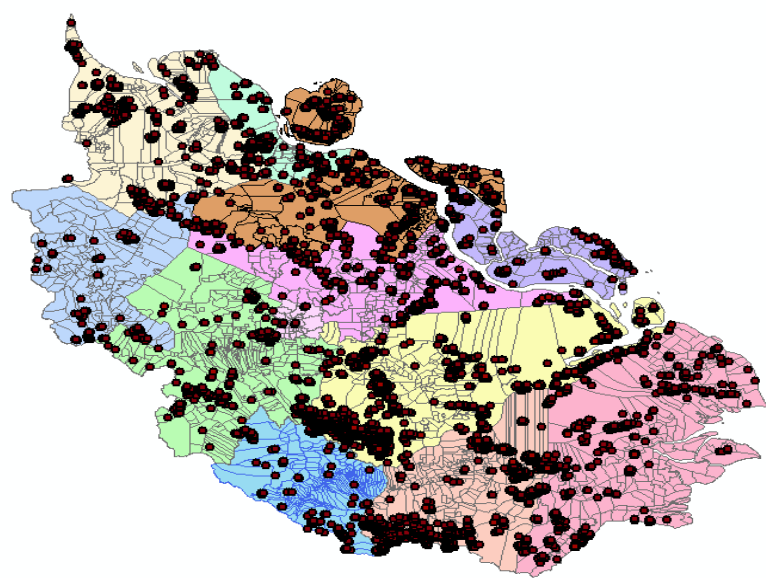
Pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa wilayah yang paling sedikit ditemukan titik api di Kota Pekanbaru hanya sebanyak 14 (0,17%) diikuti Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu dan Kuansing masing-masing 133 (1,57%) dan 171 (2,02%) titik api.

Tabel 2.14:
Rekapitulasi Hot Spot Pantauan Satelit Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Modis 1 Januari 9 Desember 2015

Kabupaten Kota	Bulan												Jumlah	Distribusi(%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
Kuantan Singingi	11	1	-	4	-	20	55	19	52	9	-	-	171	2,02
Indragiri Hulu	16	2	-	18	10	46	236	202	369	156	5	2	1.062	12,57
Indragiri Hilir	16	33	24	60	50	55	161	117	158	80	10	1	765	9,05
Pelalawan	46	81	176	156	146	191	461	167	508	54	22	-	2.008	23,76
Siak	4	59	68	152	68	44	164	42	58	30	7	2	698	8,26
Kampar	4	3	10	30	24	27	106	45	121	-	4	-	374	4,42
Rokan Hulu	1	8	24	2	6	15	45	8	22	2	-	-	133	1,57
Bengkalis	41	279	662	322	72	73	325	39	36	22	12	4	1.887	22,33
Rokan Hilir	2	31	56	20	16	114	368	31	19	-	-	-	657	7,77
Kep. Meranti	4	39	148	32	22	13	36	7	4	51	6	1	363	4,29
Pekanbaru	-	-	4	-	-	-	7	3	-	-	-	-	14	0,17
Dumai	-	12	87	38	10	24	135	6	8	-	-	-	320	3,79
Provinsi Riau	145	548	1.259	834	424	622	2.099	686	1.355	404	66	10	8.452	100,00

Sumber: BPBN Provinsi Riau, 2016

Pada tahun 2015 total jumlah titik api mencapai 8.452 titik dan terbanyak ditemukan pada Kabupaten Pelalawan yaitu 2.008 titik api (23.76%), diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.887 titik api (22,33%). Titik api terbanyak ditemukan pada bulan Juli yaitu 2.099 titik api. Titik api ditemukan pada seluruh kabupaten dan kota Provinsi Riau, sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17
Sebaran Titik Api Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Jumlah titik api yang banyak berdampak pada padamenurunnya kualitas udara di Provinsi Riau menjadi “berbahaya” sehingga mengganggu kesehatan dan penerbangan serta hubungan baikdengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penanganan bencana di Provinsi Riau.

2.1.4 Aspek Demografi

Penduduk Provinsi Riau tahun 2015 berjumlah 6.344.402 orang terdiri dari perempuan 3.086.841 orang dan laki-laki 3.257.561 orang berdasarkan data proyeksi BPS Pusat hingga tahun 2035.

2.1.4.1 Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk provinsi selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan sebanyak 769.474 jiwa atau meningkat sebanyak 13,80%. Penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15:
Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten
Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Tahun						Pertumb uhan/Ta hun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Kuantan Singingi	293.314	294.468	302.631	306.718	310.619	314.276	1,39
Indragiri Hulu	365.421	372.074	383.814	392.354	400.901	409.431	2,30
Indragiri Hilir	670.499	675.898	676.419	685.530	694.614	703.734	0,97
Pelalawan	304.597	329.539	339.869	358.210	377.221	396.990	5,45
Siak	379.089	391.760	404.093	416.298	428.499	440.841	3,06
Kampar	692.179	711.236	733.506	753.376	773.171	793.005	2,76
Rokan Hulu	478.496	507.079	523.024	545.483	568.576	592.278	4,36
Bengkalis	500.635	503.604	519.389	527.918	536.138	543.987	1,68
Rokan Hilir	556.575	574.419	592.403	609.779	627.233	644.680	2,98
Kep.Meranti	175.989	177.004	177.587	178.839	179.894	181.095	0,57
Pekanbaru	903.038	929.247	958.352	984.674	1.011.467	1.038.118	2,83
Dumai	255.096	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	2,31
Provinsi Riau	5.574.928	5.726.241	5.879.109	6.033.268	6.188.442	6.344.402	2,62

Sumber : BPS Riau Dalam Angka, 2016.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau mempunyai penduduk terbanyak di Provinsi Riau, sebaliknya Kabupaten Meranti merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten kota periode 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.15. Pertambahan jumlah penduduk selama periode tersebut sebesar 769.474 orang atau rata-rata 128.246 orang per tahun atau tumbuh sebesar 2,62% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan sebesar 5,45% per tahun, Rokan Hulu sebesar 4,36% per tahun dan Siak sebesar 3,06% per tahun.

2.1.4.2 Kepadatan Penduduk

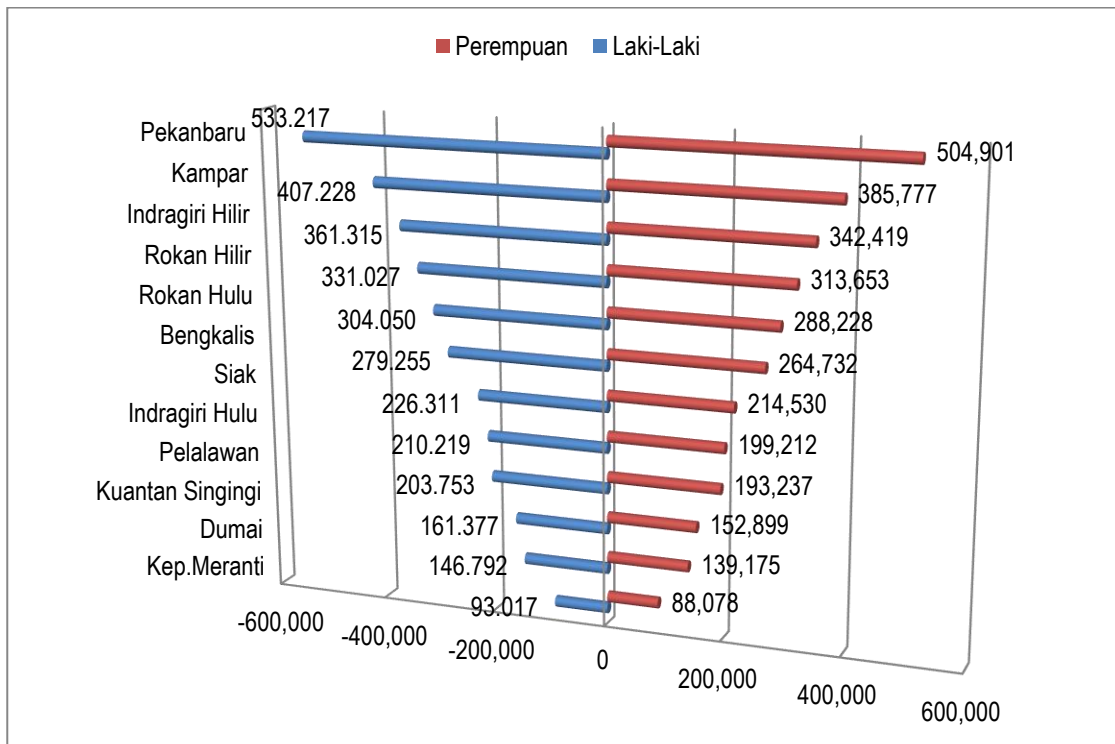
Jumlah penduduk sebanyak 6.344.402 jiwa terdiri dari 3.257.561 laki-laki dan 3.086.841 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.522.673 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau tahun 2015 mencapai 71,17 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang. Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang ada.

Tabel 2.16:
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten
Di Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk			
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Pendduk (Jw/Km ²)
Kuantan Singingi	527.273,74	161.377	152.899	314.276	60,41
Indragiri Hulu	797.816,84	210.219	199.212	409.431	53,34
Indragiri Hilir	1.346.589,47	361.315	342.419	703.734	51,00
Pelalawan	1.302.018,65	203.753	193.237	396.990	32,00
Siak	784.396,97	226.311	214.530	440.841	53,54
Kampar	1.089.721,66	407.228	385.777	793.005	72,57
Rokan Hulu	752.743,28	304.050	288.228	592.278	81,92
Bengkalis	852.043,63	279.255	264.732	543.987	64,47
Rokan Hilir	915.472,45	331.027	313.653	644.680	71,94
Kep.Meranti	363.679,18	93.017	88.078	181.095	286,09
Pekanbaru	63.340,30	533.217	504.901	1.038.118	287,80
Dumai	217.779,79	146.792	139.175	285.967	140,25
Riau	9.012.875,96	3.257.561	3.086.841	6.344.402	71,17

Sumber: BPS Riau Dalam Angka, 2016

Berdasarkan pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.18 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak 1.038.118 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 287 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 181.095 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km². Sementara itu kepadatan penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Pelalawan hanya sebanyak 32 jiwa/km².



Gambar 2.18
Distribusi Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten Di Provinsi
Riau Tahun 2015

2.1.4.3 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Riau tahun 2015 dengan kelompok umur terbanyak melebihi 10% ada pada kelompok umur 0–4 tahun yaitu sebesar 11,66%, diikuti kelompok umur 5–9 tahun (11,32%), kelompok umur 10–14 tahun (10,16%) dan kelompok umur 25–29 tahun (10,13%). Selanjutnya, kelompok umur dengan persentase berkisar 5-10% merupakan kelompok umur 15-49 tahun, kecuali kelompok umur 25-29 tahun.

Bila kelompok umur ini dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 55–75+) dan produktif (15–54 tahun) memperlihatkan bahwa rasionya 39,64% tergolong umur tidak produktif dan 60,36% tergolong umur produktif. Rasio antara jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk tidak produktif di Provinsi Riau cukup ideal dan dapat menjadi bonus demografi untuk mendukung pembangunan.

Piramida penduduk berbentuk limas menunjukkan banyaknya penduduk yang berusia produktif antara 15-64 tahun atau sebesar 65,81 persen pada tahun 2015. Komposisi umur penduduk Provinsi Riau dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada Gambar 2.19.

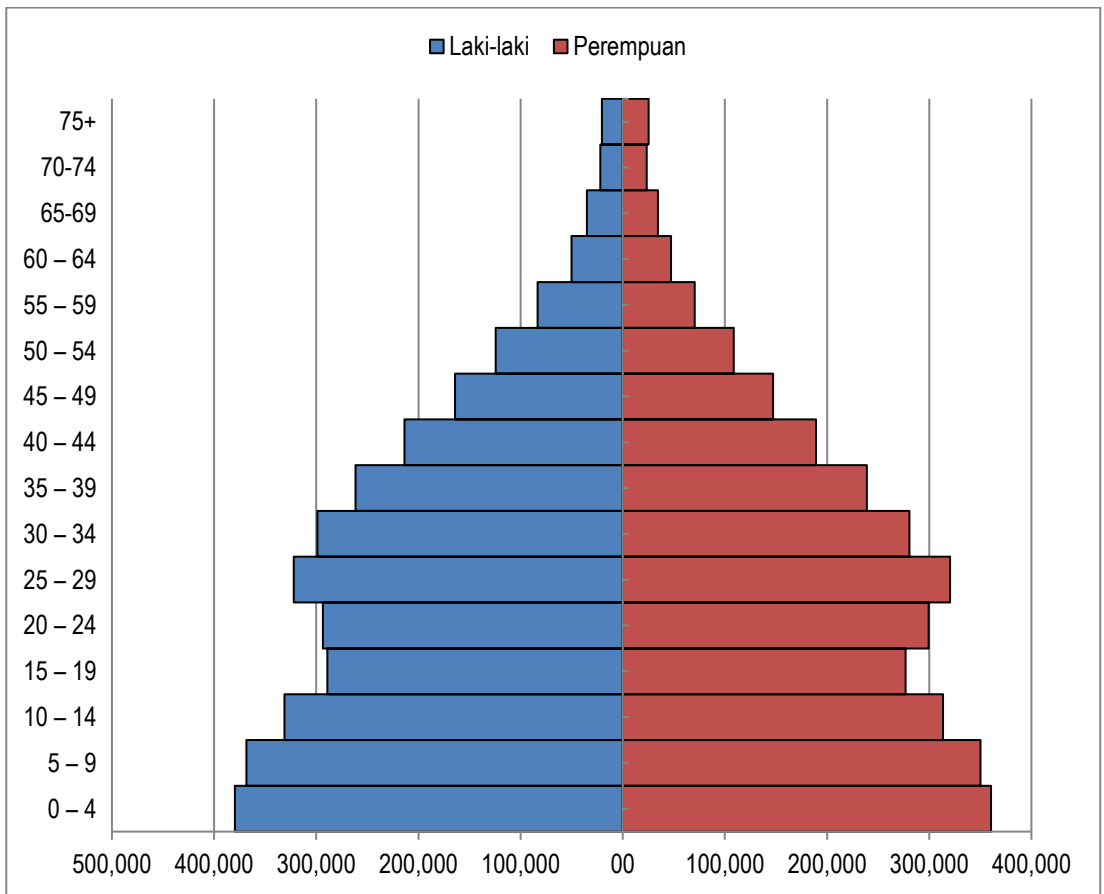
Tabel 2.17:
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Riau Tahun 2015

Kelompok Umur	Penduduk			
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 4	379.506	360.543	740.049	11,66
5 - 9	368.430	350.048	718.478	11,32
10 - 14	330.968	313.623	644.591	10,16
15 - 19	289.271	276.890	566.161	8,92
20 - 24	293.506	299.424	592.930	9,35
25 - 29	322.173	320.414	642.587	10,13
30 - 34	298.718	280.594	579.312	9,13
35 - 39	261.582	238.921	500.503	7,89
40 - 44	213.696	189.223	402.919	6,35
45 - 49	164.181	147.242	311.423	4,91
50 - 54	124.439	108.657	233.096	3,67
55 - 59	83.394	70.380	153.774	2,42
60 - 64	50.166	47.229	97.395	1,54
65 - 69	35.182	34.264	69.446	1,09
70 - 74	21.826	23.460	45.286	0,71
75+	20.523	25.312	45.835	0,72
Jumlah/ Total	3.257.561	3.086.841	6.344.402	100,00

Sumber: BPS Riau Dalam Angka, 2016

Model piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda dan tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi daerah ini.



Sumber: BPS Riau Dalam Angka, 2016

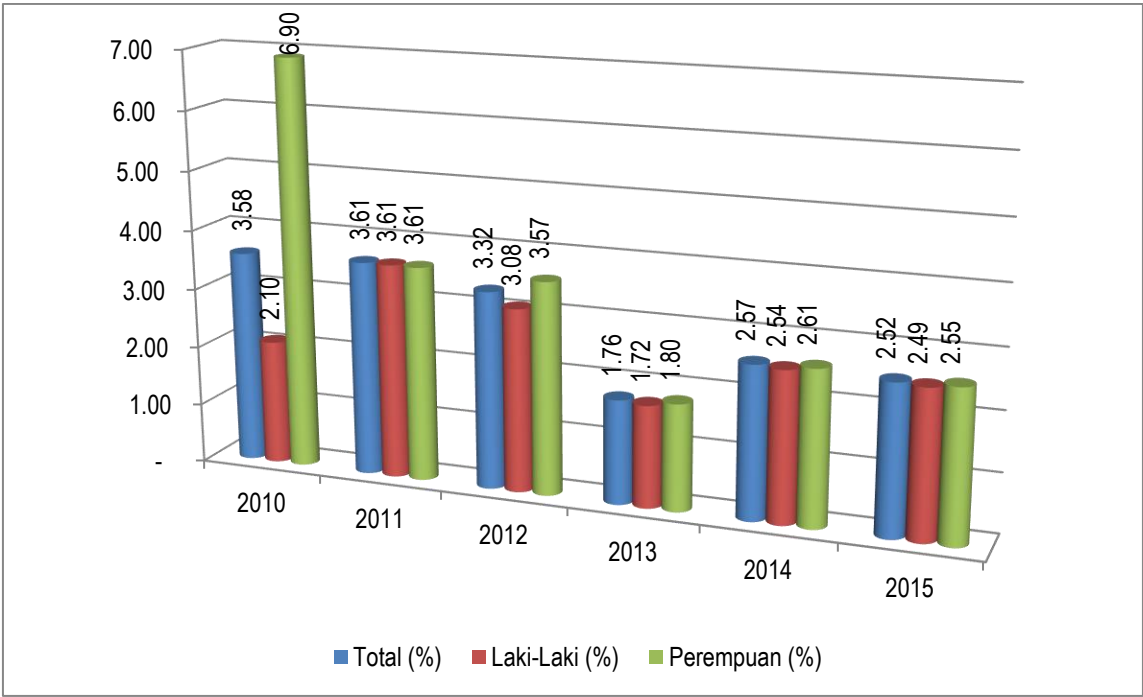
Gambar 2.19
Piramida Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau, 2015

2.1.4.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten kota Provinsi Riau tergolong tinggi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% pertahun). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,89%. per tahun. Berdasarkan proyeksi tersebut menunjukkan akan adanya pertambahan penduduk yang cukup banyak atau meningkat dari 5.588.367 jiwa pada tahun 2010 menjadi 6.344.402 jiwa pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 806.035 jiwa selama lima tahun. Kabupaten kota yang diprediksi paling banyak akan mengalami pertambahan jumlah penduduk adalah kota Pekanbaru.

Pada periode yang sama, rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,59 dan perempuan tumbuh sebesar 3,51% pertahun dan jumlah rumahtangga meningkat sebesar 1,64% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau termasuk pada kategori tertinggi di Indonesia. Meskipun Provinsi Riau berhasil dalam pelaksanaan

program Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa, tetapi laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan terutama berasal dari provinsi tetangga. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.



Gambar 2.20
Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Riau 2010-2015

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah

pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

2.1.4.5Penduduk Bersekolah

Jumlah penduduk Provinsi Riau yang tergolong dalam usia sekolah (5-24 tahun) cukup besar yaitu 39,76% dari total penduduk. Pada usia tersebut seharusnya semua penduduk telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka, tetapi pada kenyataannya masih ada penduduk pada usia sekolah tidak bersekolah. Persentase penduduk berumur 7-24 tahun ke atas yang masih sekolah menurut kabupaten/kota dan kelompok umur tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18:
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Per Kabupaten Kota Tahun 2014

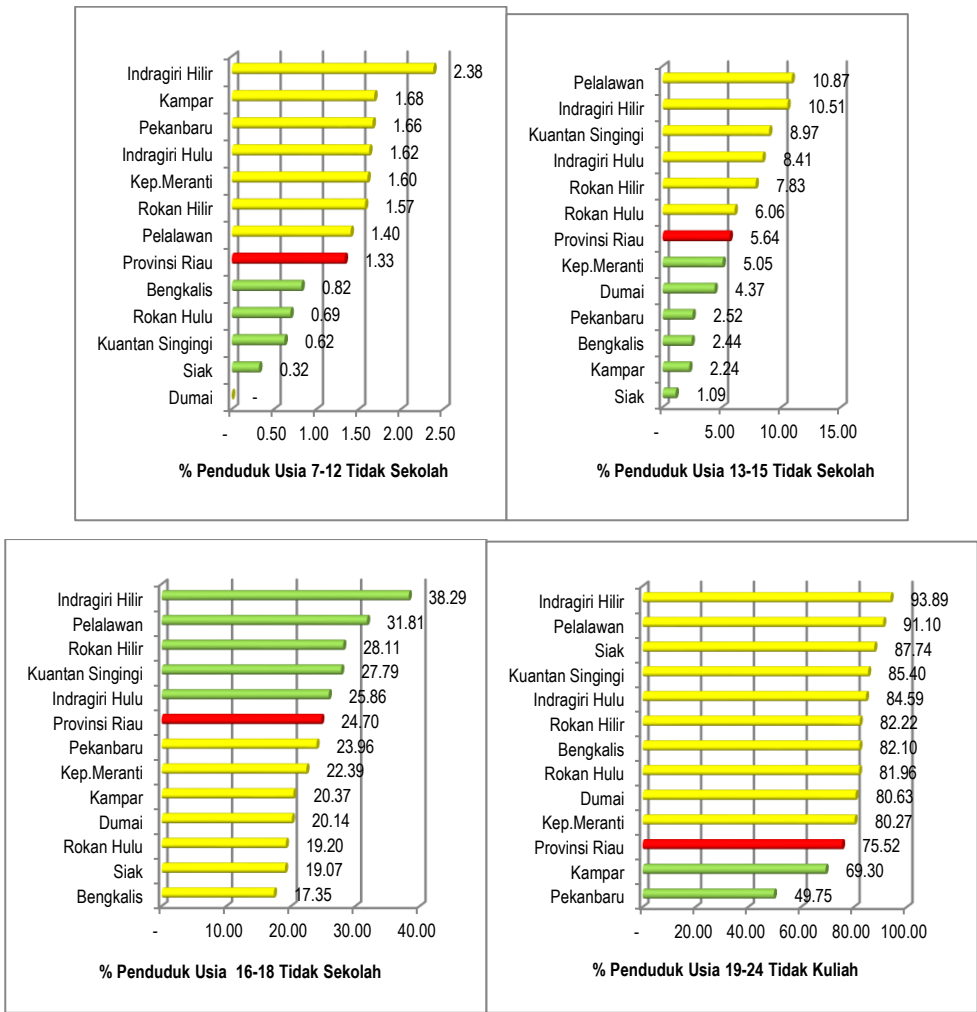
Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	7 – 12	13-15	16-18	19-24
Kuantan Singingi	99,38	91,03	72,21	14,60
Indragiri Hulu	98,38	91,59	74,14	15,41
Indragiri Hilir	97,62	89,49	61,71	6,11
Pelalawan	98,60	89,13	68,19	8,90
Siak	99,68	98,91	80,93	12,26
Kampar	98,32	97,76	79,63	30,70
Rokan Hulu	99,31	93,94	80,80	18,04
Bengkalis	99,18	97,56	82,65	17,90
Rokan Hilir	98,43	92,17	71,89	17,78
Kep.Meranti	98,40	94,95	77,61	19,73
Pekanbaru	98,34	97,48	76,04	50,25
Dumai	100,00	95,63	79,86	19,37
Provinsi Riau	98,67	94,36	75,30	24,48

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2015

Penduduk kelompok berumur 7-12 tahun merupakan kelompok umur bersekolah dengan persentase rata-rata paling tinggi (98,67%) yang bersekolah. Walaupun demikian, seharusnya semua penduduk kelompok ini bersekolah (100%) karena merupakan usia wajib belajar. Pada Tabel 2.18 dapat dilihat, hanya Kota Dumai yang mencapai 100% kelompok umur ini telah bersekolah sedangkan persentase yang terendah yang penduduk usia sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 97,62% yang bersekolah.

Kondisi yang berbeda dengan kelompok umur 7-12 tahun, ditemukan pada kelompok umur 19-24 tahun dimana kelompok umur ini merupakan kelompok umur yang telah menamatkan Sekolah Menengah Atas dan sedang mengikuti pendidikan tinggi. Penduduk yang sedang mengikuti pendidikan tinggi hanya 24,48%. Gambaran ini mengindikasikan kualitas sumber daya manusia Provinsi Riau didominasi oleh penduduk dengan tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai ke tingkatan yang lebih rendah. Oleh sebab itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya agar jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi bisa meningkat.

Proporsi penduduk Provinsi Riau menurut umur dan tingkatan sekolah cenderung semakin tinggi usia dan tingkatan sekolah semakin rendah persentase penduduk yang bersekolah. Proporsi jumlah penduduk usia sekolah dan kuliah yang tidak bersekolah dan tidak kuliah per kabupaten kota di uraian pada Gambar 2.21.



Gambar 2.21
Persentase Penduduk Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah, 2014

Berdasarkan pada Gambar 2.21 tersebut dapat dilihat persentase tertinggi usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 2,38% dan terendah di Kota Dumai sebesar 0%, namun terdapat 7 kabupaten yang persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di atas rata-rata provinsi. Untuk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, persen tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan sebesar 10,87% dan terendah di Kabupaten Siak sebesar 1,09% dan masih terdapat 6 kabupaten di atas rata-rata provinsi yang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Sedangkan untuk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, persen tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 38,29% dan terendah di Kabupaten Bengkalis sebesar 17,35% dan masih terdapat 5 kabupaten di atas rata-rata provinsi yang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Sementara itu untuk usia 19-24 atau usia memasuki perguruan tinggi menunjukkan bahwa hanya kota Pekanbaru dan Kampar yang memiliki partisipasi tertinggi jumlah penduduknya yang melanjutkan ke perguruan tinggi (PT). Hal ini tergambar dari persentase penduduk usia tersebut yang tidak melanjutkan ke PT masing-masing hanya 49,75% dan 69,30%. Artinya secara umum jumlah penduduk provinsi Riau yang melanjutkan PT hanya 24,48% dan kabupaten yang terbanyak penduduknya tidak melanjutkan ke PT adalah Indragiri Hilir sebesar 93,89%.

Pendidikan merupakan dasar penting membangun daerah, dan banyak sekali manfaat pendidikan bagi kemajuan daerah. Diantara manfaat tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia, meningkatkan integritas sosial, memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, seseorang dapat berkembang secara optimal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan bermoral baik, meningkatkan produktivitas dari individu itu sendiri sehingga berakibat pada peningkatan produktivitas wilayah yang tergambar pada peningkatan nilai PDRB harga konstan dan akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan dan ekonomi Provinsi Riau.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terbagi kedalam 2 fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini pemerataan pendapatan, indeks ketimpangan Williamson, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminilitas yang tertangani.

2.2.1.1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun, Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9) Informasi dan Komunikasi (10) Jasa Keuangan dan Asuransi (11) Real Estate (12) Jasa Perusahaan (13) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (14) Jasa Pendidikan (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (15) Jasa lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada tahun 2011 harga konstan dengan migas adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 31,86% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 130.695.413,91 milyar dan yang terendah adalah sektor jasa perusahaan sebesar 0,00% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 15.910,46 milyar. Namun pada tahun 2015 terjadi pergeseran struktur ekonomi dimana sektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan dengan nilai PDRB

sebesar Rp. 126.862.608,44 milyar atau 28,26% dari PDRB provinsi Riau dan telah mampu melebihi kontribusi pertambangan dan galian yang hanya mencapai 24,18% atau Rp 108.549.184,57 milyar. Sedangkan yang memberikan kontribusi terendah masih pada sektor jasa perusahaan sebesar 0,01% namun telah mengalami peningkatan nilai PDRB menjadi Rp. 23.486,51 milyar. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan sudah mampu mengatasi kontribusi industri pengolahan nasional yang hanya sebesar 20,84% pada tahun 2015.

Tabel 2.19:
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB
Atas dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015 (Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	Tahun									
		2011	Kontribusi (%)	2012	Kontribusi (%)	2013	Kontribusi (%)	2014	Kontribusi (%)	2015	Kontribusi (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	94.307.398,39	22,99	97.910.954,92	23,00	102.216.742,85	23,43	108.568.089,31	24,28	108.946.313,04	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	130.695.413,91	31,86	128.830.869,29	30,27	123.107.880,32	28,22	116.605.822,90	26,00	108.549.184,57	24,18
C	Industri Pengolahan	101.453.207,42	24,73	108.380.602,37	25,46	115.915.838,36	26,57	122.442.814,46	27,35	126.862.608,44	28,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	184.181,79	0,04	193.986,65	0,05	199.837,47	0,05	213.455,40	0,05	227.185,92	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59.654,39	0,01	60.171,10	0,01	60.558,43	0,01	61.197,88	0,01	62.674,66	0,01
F	Konstruksi	28.043.231,23	6,84	29.079.864,65	6,83	29.849.808,50	6,84	32.374.800,93	7,23	34.442.582,69	7,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.394.843,65	7,65	34.840.617,85	8,19	36.789.162,70	8,43	38.195.888,58	8,48	38.816.690,84	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	2.793.277,73	0,68	3.105.941,92	0,73	3.316.025,45	0,76	3.581.029,03	0,80	3.773.618,29	0,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.588.035,80	0,39	1.752.598,73	0,41	1.856.454,65	0,43	1.985.851,15	0,44	2.023.318,32	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	2.547.340,92	0,62	2.947.576,21	0,69	3.269.245,87	0,75	3.453.612,01	0,77	3.700.665,06	0,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.232.709,28	0,79	3.667.608,82	0,86	4.028.079,32	0,93	4.226.738,09	0,95	4.241.598,05	0,94
L	Real Estate	3.074.570,37	0,75	3.309.557,18	0,78	3.528.851,60	0,81	3.716.645,98	0,83	4.026.522,95	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	15.910,46	0,00	17.744,97	0,00	19.331,32	0,00	21.812,83	0,00	23.486,51	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.091.698,11	1,73	7.532.398,87	1,77	7.762.820,86	1,78	7.881.527,65	1,76	8.227.912,82	1,83
P	Jasa Pendidikan	1.772.979,10	0,43	1.849.882,49	0,43	1.926.725,14	0,44	2.040.423,48	0,45	2.170.080,88	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	581.006,65	0,14	634.372,15	0,15	688.346,91	0,16	746.157,94	0,17	820.327,73	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.380.381,00	0,34	1.511.250,28	0,36	1.651.797,68	0,38	1.835.742,28	0,41	2.021.824,61	0,45
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		410.215.840,20	100,00	425.625.998,45	100,00	436.187.507,43	100,00	447.951.609,90	100,00	448.936.595,38	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016)

Tabel 2.20:
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB
Atas Dasar Konstan 2010 Tanpa Migas Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015 (Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	Tahun									
		2011	Kontri busi (%)	2012	Kontri busi (%)	2013	Kontri busi (%)	2014	Kontri busi (%)	2015	Kontri busi (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	94.307.398,39	31,84	97.910.954,92	31,12	102.216.742,85	30,89	108.568.089,31	30,89	108.946.313,04	30,39
B	Pertambangan dan Penggalian	26.745.809,31	9,03	28.095.875,73	8,93	29.255.443,37	8,78	30.853.807,07	8,78	28.721.253,62	8,01
C	Industri Pengolahan	91.346.617,99	30,84	98.069.858,00	31,17	105.367.966,51	31,77	111.656.636,03	31,77	116.244.214,10	32,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	184181,79	0,06	193.986,65	0,06	199.837,47	0,06	213.455,40	0,06	227185,92	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59654,39	0,02	60.171,10	0,02	60.558,43	0,02	61.197,88	0,02	62674,66	0,02
F	Konstruksi	28.043.231,23	9,47	29.079.864,65	9,24	29.849.808,50	9,21	32.374.800,93	9,21	34.442.582,69	9,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.394.843,65	10,6	34.840.617,85	11,08	36.789.162,70	10,87	38.195.888,58	10,87	38.816.690,84	10,83
H	Transportasi dan Pergudangan	2.793.277,73	0,94	3.105.941,92	0,99	3.316.025,45	1,02	3.581.029,03	1,02	3.773.618,29	1,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.588.035,80	0,54	1.752.598,73	0,56	1.856.454,65	0,57	1.985.851,15	0,57	2.023.318,32	0,56
J	Informasi dan Komunikasi	2.547.340,92	0,86	2.947.576,21	0,94	3.269.245,87	0,98	3.453.612,01	0,98	3.700.665,06	1,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.232.709,28	1,09	3.667.608,82	1,17	4.028.079,32	1,2	4.226.738,09	1,2	4.241.598,05	1,18
L	Real Estate	3.074.570,37	1,04	3.309.557,18	1,05	3.528.851,60	1,06	3.716.645,98	1,06	4.026.522,95	1,12
M,N	Jasa Perusahaan	15.910,46	0,01	17744,97	0,01	19.331,32	0,01	21.812,83	0,01	23.486,51	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.091.698,11	2,39	7.532.398,87	2,39	7.762.820,86	2,24	7.881.527,65	2,24	8.227.912,82	2,3
P	Jasa Pendidikan	1.772.979,10	0,6	1.849.882,49	0,59	1.926.725,14	0,58	2.040.423,48	0,58	2.170.080,88	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	581006,65	0,2	634372,15	0,2	688346,91	0,21	746157,94	0,21	820.327,73	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.380.381,00	0,47	1.511.250,28	0,48	1.651.797,68	0,52	1.835.742,28	0,52	2.021.824,61	0,56
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		296.159.646,17	100,00	314.580.260,52	100,00	331.787.198,63	100,00	351.413.415,64	100,00	358.490.270,09	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016)

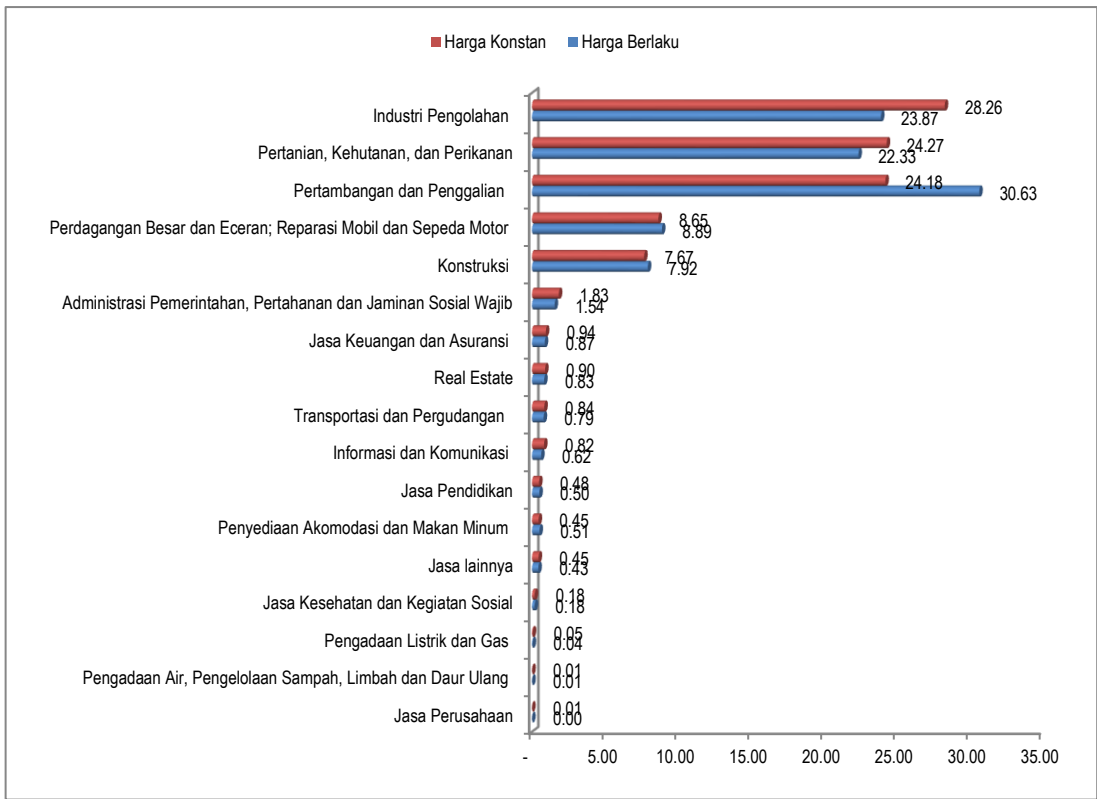
Tabel 2.21:
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2015
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

No	LAPANGAN USAHA	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,50	22,99	19,08	23,00	19,00	23,43	19,68	24,28	22,33	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	39,10	31,86	42,16	30,27	42,21	28,22	39,51	26,00	30,63	24,18
C	Industri Pengolahan	22,08	24,73	20,60	25,46	20,56	26,57	20,87	27,35	23,87	28,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,31	6,84	6,24	6,83	6,30	6,84	6,69	7,23	7,92	7,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	7,65	6,69	8,19	6,63	8,43	7,81	8,48	8,89	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	0,59	0,68	0,59	0,73	0,62	0,76	0,66	0,80	0,79	0,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,39	0,36	0,41	0,39	0,43	0,48	0,44	0,51	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	0,53	0,62	0,54	0,69	0,52	0,75	0,52	0,77	0,62	0,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	0,79	0,76	0,86	0,81	0,93	0,80	0,95	0,87	0,94
L	Real Estate	0,68	0,75	0,66	0,78	0,67	0,81	0,69	0,83	0,83	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,48	1,73	1,48	1,77	1,44	1,78	1,36	1,76	1,54	1,83
P	Jasa Pendidikan	0,41	0,43	0,38	0,43	0,37	0,44	0,41	0,45	0,50	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,13	0,15	0,13	0,16	0,14	0,17	0,18	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,34	0,30	0,36	0,31	0,38	0,34	0,41	0,43	0,45
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016)

Sementara Tabel 2.21 menunjukkan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada tahun 2011 harga konstan tanpa migas masih sektor pertambangan dan penggalian sebesar 31,84% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 94.307.398,39 milyar, namun tahun 2015 kontribusi tertinggi tergeser oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebanyak 32,43% atau sebanyak Rp. 116.244.214,10 milyar sementara sektor pertambangan dan penggalian hanya 8,01 % dengan Rp. 28.721.253,62 milyar. Terendah masih pada tahun 2011 adalah sektor jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 0,01% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 15.910,46 milyar menjadi Rp. 23.486,51 milyar pada tahun 2015. Sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan harga konstan dengan migas adalah jasa lainnya dan informasi dan komunikasi masing-masing 38,64% dan 36,64%.

PDRB atas dasar harga konstan secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas tahun 2010–2015 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Tabel 2.22.



Gambar 2.22
Kontribusi (%) PDRB Harga Konstan Demgan Migas HB dan HK
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau 2015

Sementara itu jika dilihat kontribusi tertinggi menurut lapangan usaha dengan migas harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2015 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi pada harga konstan dimana pada lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalan hanya menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, walaupun pada harga berlaku masih ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalan. Dominasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalan dalam PDRB Provinsi Riau pada harga berlaku harus mendapat perhatian karena produksi minyak dan gas sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui terus menurun disamping terjadinya penurunan harga komoditas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya yang dapat terus diperbaharui seperti industri pengolahan dan pariwisata perlu digesa sehingga ke depan perekonomian Provinsi Riau terus tumbuh dengan pemerataan yang semakin baik.

Tabel 2.22:
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas
Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)

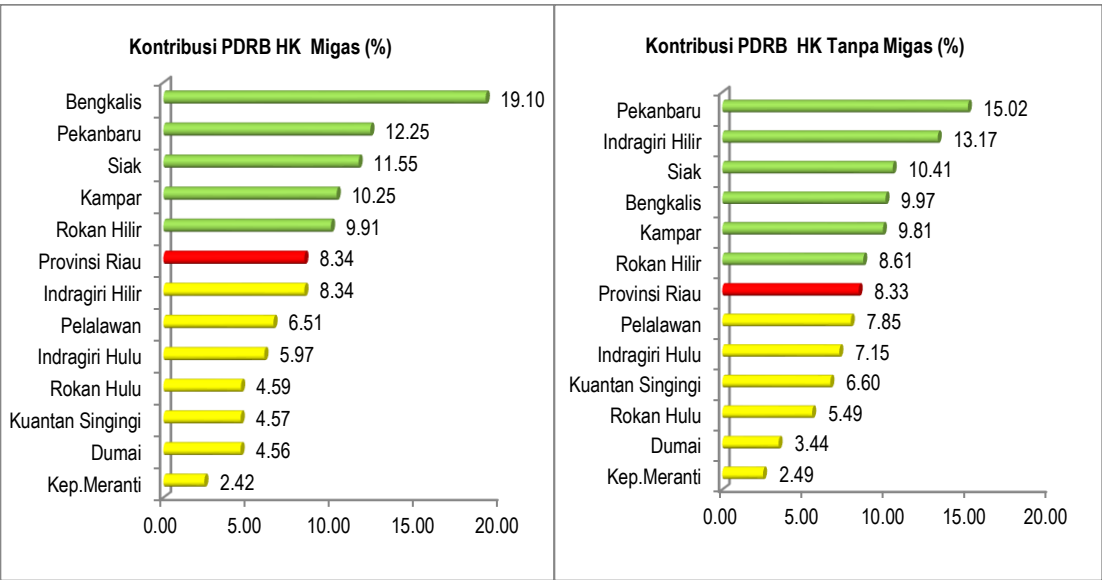
No	Kabupaten Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kuantan Singingi	173.070,06	183.331,99	193.341,17	203.311,55	198.992,66	3,61
2	Indragiri Hulu	218.741,24	237.084,59	251.816,53	265.728,96	258.049,82	4,31
3	Indragiri Hilir	300.665,29	324.444,58	347.683,00	371.558,01	379.220,57	6,00
4	Pelalawan	251.611,03	259.208,79	273.582,39	290.567,90	297.760,11	4,31
5	Siak	521.469,30	532.267,98	518.659,94	514.850,38	513.696,19	-0,36
6	Kampar	393.783,06	416.685,47	442.741,37	458.164,66	463.045,82	4,15
7	Rokan Hulu	170.267,17	180.690,54	191.410,18	203.832,63	207.789,66	5,12
8	Bengkalis	919.992,89	913.970,11	882.140,95	850.036,97	826.764,08	-2,63
9	Rokan Hilir	399.608,04	414.182,31	424.508,98	441.442,06	445.835,47	2,78
10	Kep.Meranti	92.879,25	99.098,09	103.107,36	107.888,77	110.775,56	4,51
11	Pekanbaru	448.457,70	483.517,37	511.232,89	545.702,79	575.573,48	6,44
12	Dumai	182.422,62	189.098,46	196.139,47	202.047,96	204.456,52	2,90
	Riau	4.072.967,65	4.233.580,28	4.336.364,24	4.455.132,65	4.481.959,92	2,43

Sumber: BPS (PDRB Kabupaten Kota Se Provinsi Riau, 2016)

Sementara itu perkembangan PDRB harga konstan dengan migas tahun 2011-2015 menurut Kabupaten/Kota ditunjukkan pada

Tabel 2.23, dimana PDRB tertinggi dengan migas adalah Kabupaten Bengkalis dengan nilai Rp. 82.676.408,29 juta rupiah diikuti oleh kota Pekanbaru sebesar Rp. 57.557.347,62 juta rupiah.

PDRB menurut Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.23, memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara PDRB kabupaten kaya sebagai penghasil migas dengan kabupaten/kota bukan penghasil migas, PDRB tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis diikuti Kabupaten Siak, Rokan Hilir dan Kampar, Kontribusi PDRB dengan migas dibanding tanpa migas dalam PDRB Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar masing-masingnya sebesar 88,19%, 75,56%, 70,83% dan 65,50%, Kabupaten yang memiliki sumber daya migas dalam jumlah kecil adalah Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan, Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir tidak memiliki sumber daya migas.



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Gambar 2.23
Kontribusi (%) PDRB Harga Konstan Migas dan Dengan Tanpa Migas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

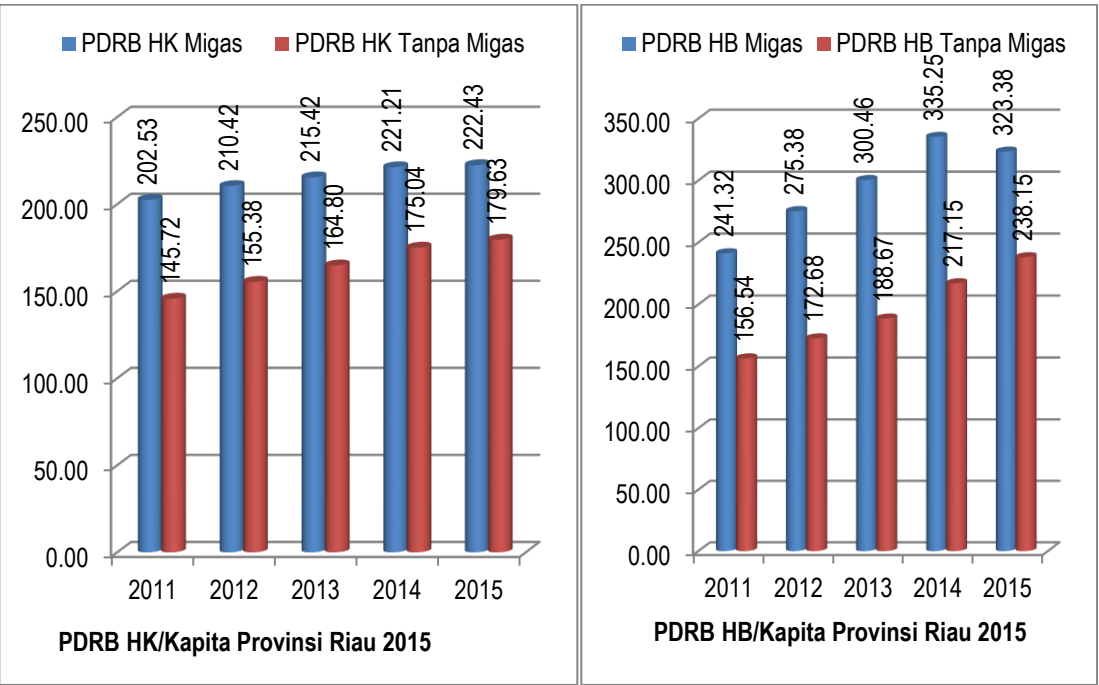
Tingginya ketergantungan migas dalam PDRB di Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar perlu diantisipasi melalui pengembangan sumber daya yang dapat diperbaharui, Disisi lain, kabupaten yang rendah sumber daya perlu mendapat dukungan pembangunan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Riau

sehingga ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau akan semakin rendah lagi.

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Riau telah bergeser dari pertanian, kehutanan, dan perikanan ke ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Riau. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, kemudian sektor Industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Sementara peranan sektor lainnya di bawah 5 persen. Pergeseran struktur ekonomi dalam pembentukan PDRB tersebut tentunya akan merubah tingkat PDRB perkapita.



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

Gambar 2.24
PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2011-2015

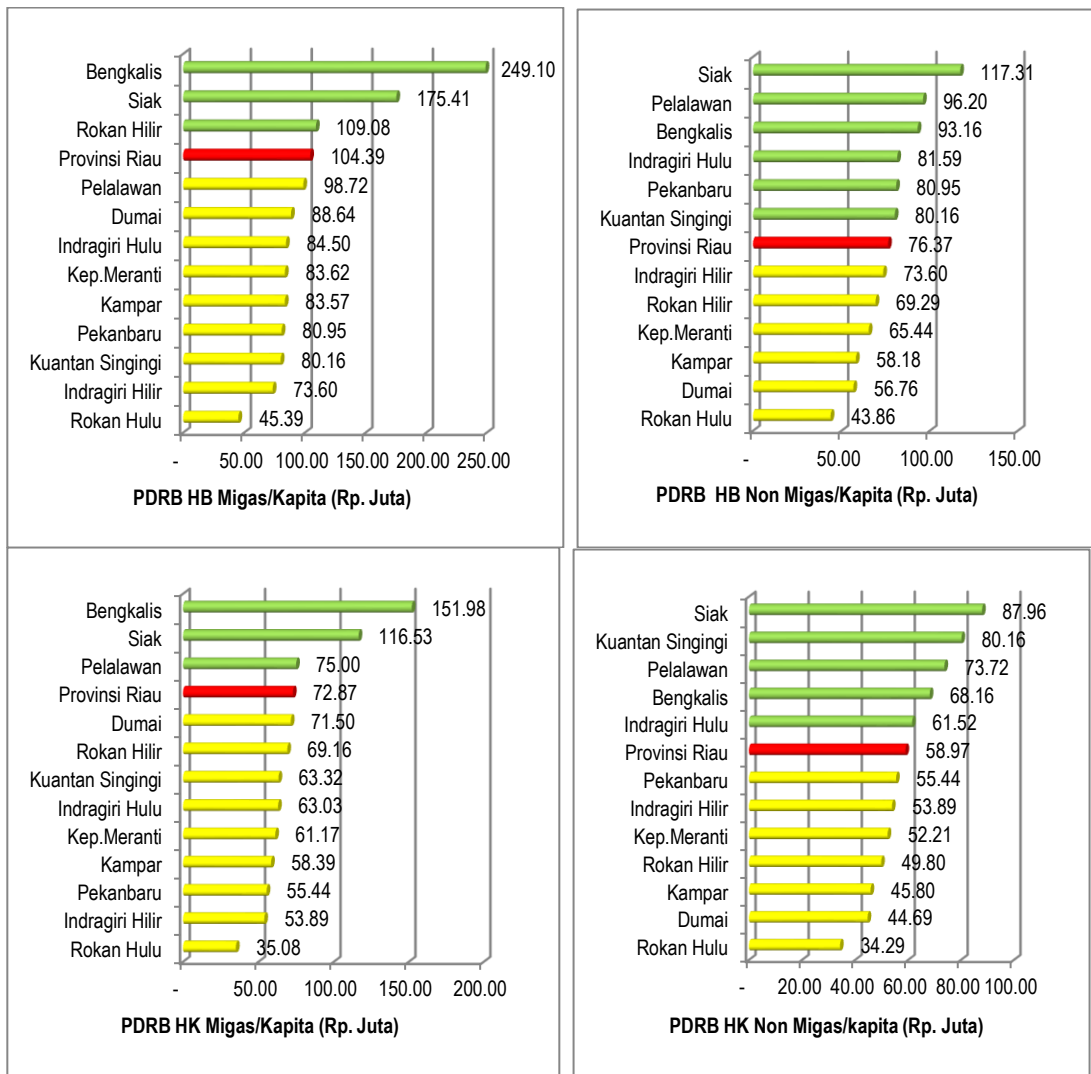
Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Riau tahun 2011 – 2015 ditunjukkan pada Gambar 2.24. Selama periode tersesebut, PDRB per kapita HB dengan migas menunjukkan trend meningkat dari Rp. 241,32 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 323,38 juta tahun 2015. Sementara dengan HK dengan migas meningkat dari Rp. 202,53 juta menjadi Rp. 222,43 juta pada tahun 2015.

Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita HB dengan migas naik 5,23% per tahun dan tanpa migas naik 14.62% per tahun. Sementara HK dengan migas turun 0,30% per tahun dan HK tanpa migas naik 2,86% pertahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan HB dengan migas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan HK dengan migas dengan selisih peningkatan 5,53%. Demikian halnya dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan HB tanpa migas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan HK tanpa migas (TM) dengan selisih peningkatan 11,76%. Hal ini memberikan gambaran bahwa tiingkat kenaikan harga pada komoditas non migas mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas dengan migas. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa kesejahteraan dan daya beli masyarakat Provinsi Riau cenderung semakin baik.

Tabel 2.23:
PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten Kota	PDRB Perkapita (Rp. Juta)			
		Dengan Migas		Tanpa Migas	
		HB	HK	HB	HK
1	Kuantan Singingi	80,16	63,32	80,16	80,16
2	Indragiri Hulu	84,50	63,03	81,59	61,52
3	Indragiri Hilir	73,60	53,89	73,60	53,89
4	Pelalawan	98,72	75,00	96,20	73,72
5	Siak	175,41	116,53	117,31	87,96
6	Kampar	83,57	58,39	58,18	45,80
7	Rokan Hulu	45,39	35,08	43,86	34,29
8	Bengkalis	249,10	151,98	93,16	68,16
9	Rokan Hilir	109,08	69,16	69,29	49,80
10	Kep Meranti	83,62	61,17	65,44	52,21
11	Pekanbaru	80,95	55,44	80,95	55,44
12	Dumai	88,64	71,50	56,76	44,69
Provinsi Riau		104,39	72,87	76,37	58,97

Sumber: BPS (PDRB Kabupaten Kota Se Provinsi Riau, 2016)



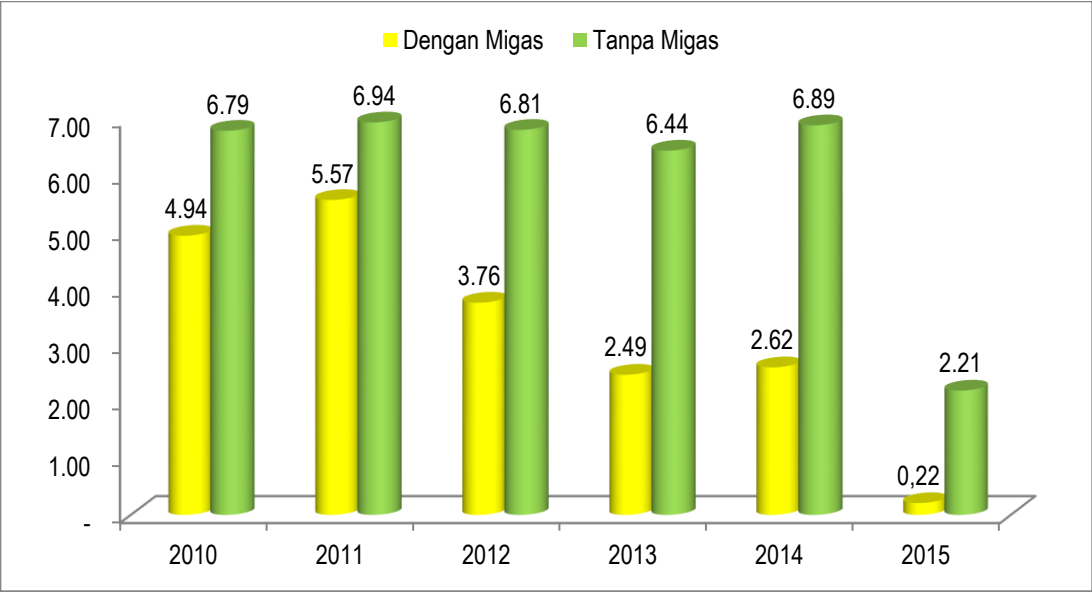
Gambar 2.25
PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,89% tanpa migas dan dengan migas terjadi pada 2011 sebesar 5,57%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,35% tanpa migas dan 0,29% dengan migas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.26.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Riau selama periode 2010-2015 mengalami penurunan yang sangat drastis sebanyak 94,03% dengan migas sedangkan tanpa migas sebanyak 21,28%. Selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (6,28%) dan Sumatera Barat (6,35%) dan Provinsi Kepulauan Riau (8,26%)

serta Jambi (8,69%). Rendahnya pertumbuhan ekonomi provinsi Riau tahun 2015 disebabkan oleh terjadinya penurunan harga komoditas utama yang dihasilkan di provinsi Riau yaitu minyak, gas, kelapa sawit dan karet. Sementara komoditas tersebut mendominasi lapangan usaha masyarakat di provinsi Riau. Rendahnya harga komoditas tersebut berakibat pada rendahnya gairah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dan berakibat pada rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan pemerintah.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan BRS, 2016

Gambar 2.26
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010-2015

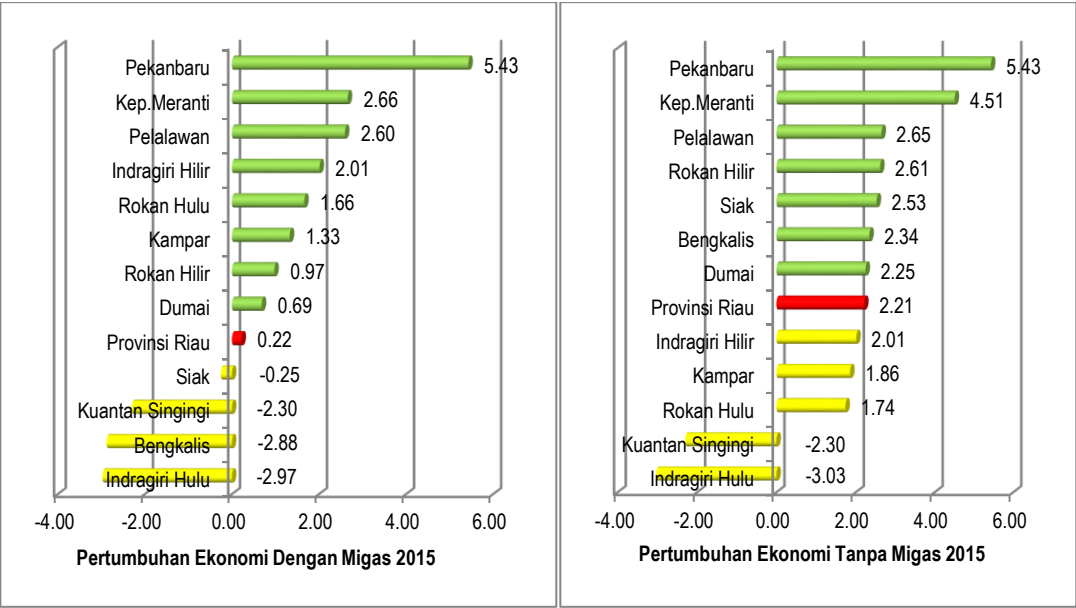
Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah harus berupaya membangun industri dalam negeri yang tangguh sehingga komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat secara umum tidak langsung berkorelasi dengan harga internasional karena secara relatif harga barang jadi tidak mengalami penurunan harga sebagaimana komoditas utama, padahal sebagian besar dari produk yang dikonsumsi masyarakat dan pemerintah merupakan barang jadi yang diimport kembali dari penjualan bahan baku.

Selama periode ini, kapasitas sektor *non tradable* (sektor jasa dan perdagangan) merupakan sektor yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi sejalan dengan letak strategis dan posisi Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian di Sumatera, Sementara itu, rata-rata pertumbuhan sektor *tradable* (pertanian dan industri) lebih rendah

dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, Sektor industri pengolahan yang diharapkan dapat memberi nilai tambah produksi sektor pertanian khususnya di sub sektor perkebunan belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan,

Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh pertumbuhan pada sektor *non tradable* di Provinsi Riau perlu mendapat perhatian karena akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya yang rendah. Dengan demikian, pertumbuhan sektor *tradable*, mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya industri hilir kelapa sawit dan kelapa serta industri pariwisata perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi Provinsi Riau ke depan.

Kabupaten Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan migas yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas pada tahun 2015 adalah Kota Pekanbaru sebesar 5,43% hingga Kota Dumai sebesar 0,68%. Sedangkan Kabupaten Kota yang pertumbuhan ekonominya dengan migas dibawah rata-rata provinsi adalah Siak, Kuansing, Bengkalis dan Inhu dan bahkan negatif masing-masing. Sementara pertumbuhan ekonomi yang positif tanpa migas di atas rata-rata provinsi adalah Dumai hingga Pekanbaru dan bawah rata-rata provinsi adalah Inhil, Kampar, Rohul Kuansing dan Inhu. Lengkapnya lihat Gambar 2.27 berikut.



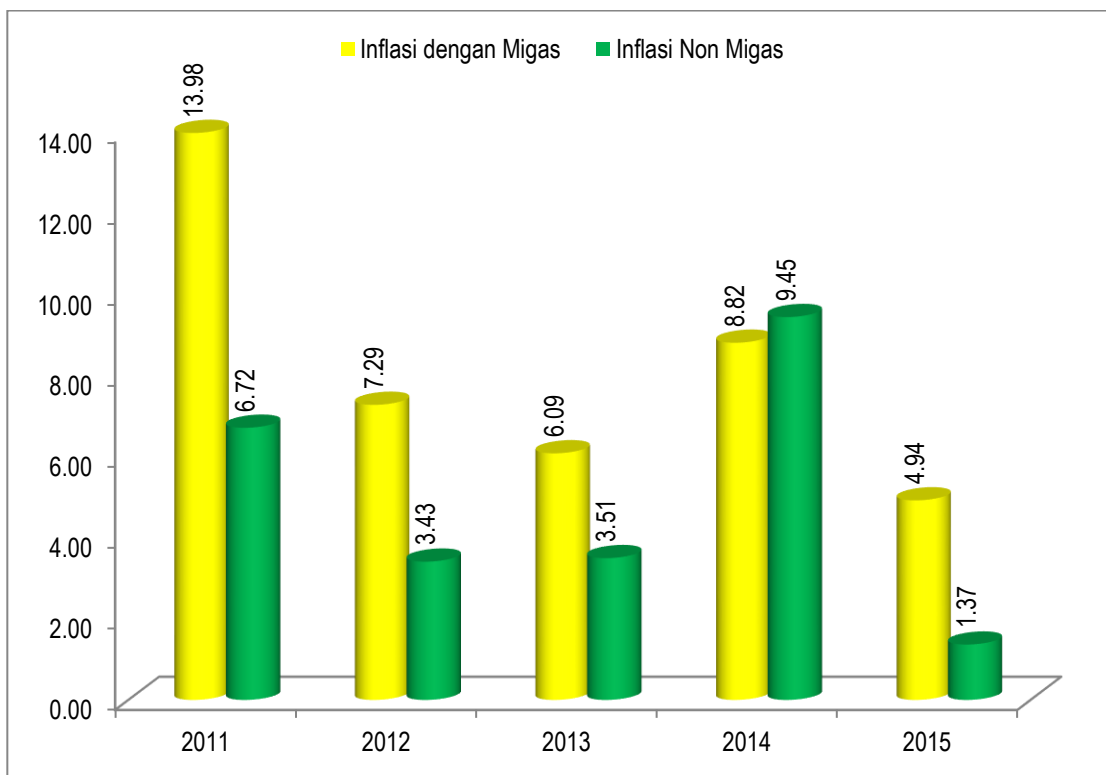
Gambar 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Secara relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir cukup baik karena ditopang oleh komoditas yang diusahakan masyarakat tidak sepenuhnya mengalami penurunan harga seperti kelapa, padi, pinang dan ikan. Sementara komoditas kelapa sawit yang penurunan harga tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini mengingat daerah ini hanya sebagian kecil masyarakatnya yang berusahatani kelapa sawit tetapi sebagian besar bersumber dari perkebunan kelapa, perikanan dan tanaman padi serta pinang. Sementara tanaman kelapa sawit tergolong wilayah yang masih memiliki kebun kelapa sawit yang sempit berbanding daerah lainnya. Untuk jelasnya pertumbuhan ekonomi per kabupaten kota se provinsi Riau 2014 baik dengan migas dan tanpa migas dapat dilihat pada Tabel 2.23 dan Gambar 2.27.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun, Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30% setahun, (iii) inflasi berat: antara 30 - 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi tahun 2011-2015 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.28. Selama periode tersebut trend inflasi di Provinsi Riau dengan migas berfluktuatif dengan trend penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 15,90 per tahun dan tanpa migas mengalami peningkatan sebesar 9,26% per tahun. Namun pada Gambar 2.28 dapat dilihat bahwa inflasi dengan migas padatahun 2011 mecapai dua digit yaitu sebesar 13,98 dan mengalami penurunan padatahun 2015 menjadi 4,94%. Sementara tanpa migas turun dari 6,72% padatahun 2011 menjadi 1,37% pada tahun 2015. Selama periode tersebut hanya pada tahun 2014 mengalami penuingkatan baik inflasi dengan migas dan non migas. Inflasi yang terjadi di Provinsi Riau selama ini terkategori inflasi ringan, dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia.



Gambar 2.28
Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Pencapaian laju inflasi di Provinsi Riau tahun 2015, khusus Kota Pekanbaru sebesar 2,71%, dibandingkan dengan inflasi di provinsi tetangga merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Medan, dimana tingkat inflasi Kota Medan sebesar 3,32%, Kota Padang sebesar 0,85%, Kota Tanjung Pinang sebesar 2,46% dan Kota Jambi sebesar 1,37% (BPS, Laporan Perekonomian Indonesia, 2016)

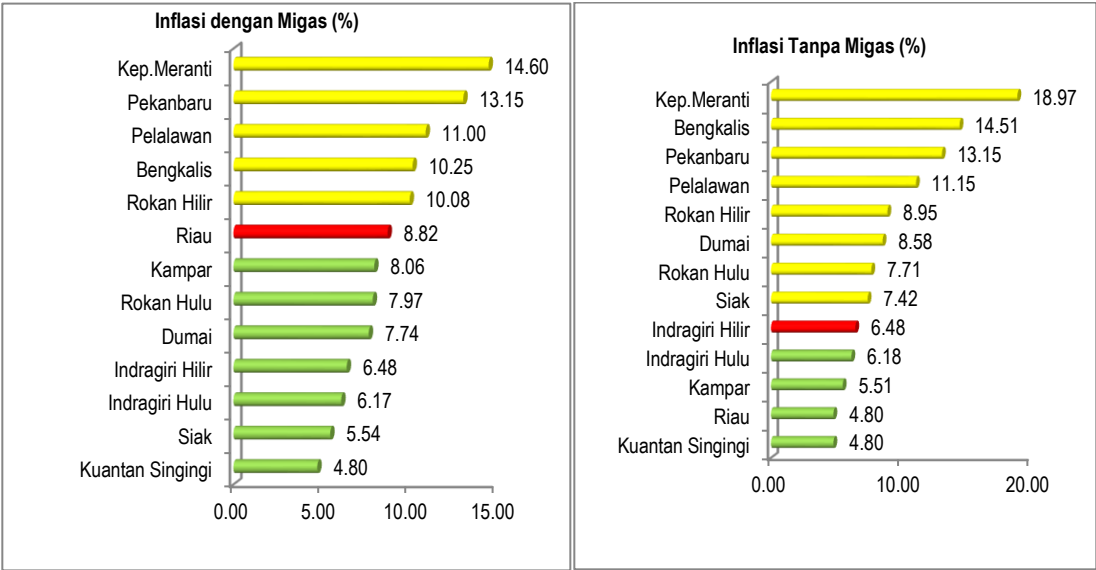
Berdasarkan data Tabel 2.24 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan inflasi per kabupaten kota dari tahun 2011-2015 terjadi pada dengan migas dan non migas. Laju pertumbuhan Inflasi tertinggi dengan migas terjadi di Kabupaten Siak sebanyak 8,68% per tahun dan penurunan laju inflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 385,27% pertahun. Sedangkan laju inflasi tertinggi pada non migas terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 165,11% pertahun dan Kep. Meranti sebesar 124,23% pertahun dan terendah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 10,76% pertahun. Berdasarkan pada data tersebut dapat dilihat bahwa wilayah yang perlu yang memerlukan kebijakan penanganan inflasi untuk non migas adalah Kabupaten Bengkalis dan Kep. Meranti.

Tabel 2.24:
Perkembangan Inflasi Perkabupaten Kota Provinsi Riau
Tahun 2011-2015

Kabupaten Kota	Tahun					+/- (%/Tahun)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Inflasi Makro Dengan Migas						
Kuantan Singingi	4,91	3,74	3,24	4,80	2,21	-10,76
Indragiri Hulu	12,11	3,36	3,32	6,17	3,13	-9,23
Indragiri Hilir	13,02	2,80	4,03	6,48	3,00	-6,91
Pelalawan	6,99	4,62	5,01	11,00	1,94	2,92
Siak	29,34	15,19	5,51	5,54	13,63	8,68
Kampar	17,81	9,15	7,02	8,06	6,25	-19,91
Rokan Hulu	6,26	3,99	3,19	7,97	1,64	3,50
Bengkalis	33,86	15,77	11,87	10,25	13,15	-15,87
Rokan Hilir	24,52	14,31	8,03	10,08	9,67	-16,01
Kep.Meranti	10,64	8,00	9,69	14,60	3,03	-8,06
Pekanbaru	7,46	7,18	4,62	13,15	1,60	14,37
Dumai	0,90	-0,65	7,59	7,74	-0,04	-385,27
Provinsi Riau	13,98	7,29	6,09	8,82	4,94	-15,90
Inflasi Mikro Riau*	-	-	8,83	8,65	2,65	-35,70
Inflasi Makro Tanpa Migas						
Kuantan Singingi	4,91	3,74	3,24	4,80	2,21	-10,76
Indragiri Hulu	10,94	2,59	2,87	6,18	2,57	-2,17
Indragiri Hilir	13,02	2,80	4,03	6,48	3,00	-6,91
Pelalawan	6,51	4,09	4,59	11,15	1,58	7,99
Siak	14,47	1,92	2,22	7,42	3,50	27,57
Kampar	4,82	3,34	1,58	5,51	1,47	22,98
Rokan Hulu	4,68	3,16	3,09	7,71	1,07	7,22
Bengkalis	4,51	1,97	1,53	14,51	-1,10	165,11
Rokan Hilir	6,89	4,92	2,80	8,95	1,86	17,18
Kep.Meranti	-2,16	1,28	9,97	18,97	-2,57	124,23
Pekanbaru	7,46	7,18	4,62	13,15	1,60	14,37
Dumai	4,65	4,12	1,60	8,58	1,27	69,49
Provinsi Riau	6,72	3,43	3,51	9,45	1,37	9,26

Sumber: Olahan PDRB Provinsi dan Perkabupaten Kota, 2015 (Angka Inflasi Per Kabupaten Kota merupakan Estimasi Tim Ahli). *Angka inflasi Rilis BPS, 2011-2015)

Sementara itu tingkat inflasi perkabupaten kota tanpa migas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tertinggi adalah kabupaten Kep. Meranti sebesar 18,87% dan terendah terdjadi di Kabupaten Kuansing hanya 4,80% per tahun. Oleh karena wilayah yang tingkat inflasinya cukup tinggi harus mendapatkan perhatian dalam penyediaan barang dan jasa untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Tingkat inflasi masing-masing Kabupaten Kota tertinggi dan terendah di provinsi Riau pada tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan Data Olahan

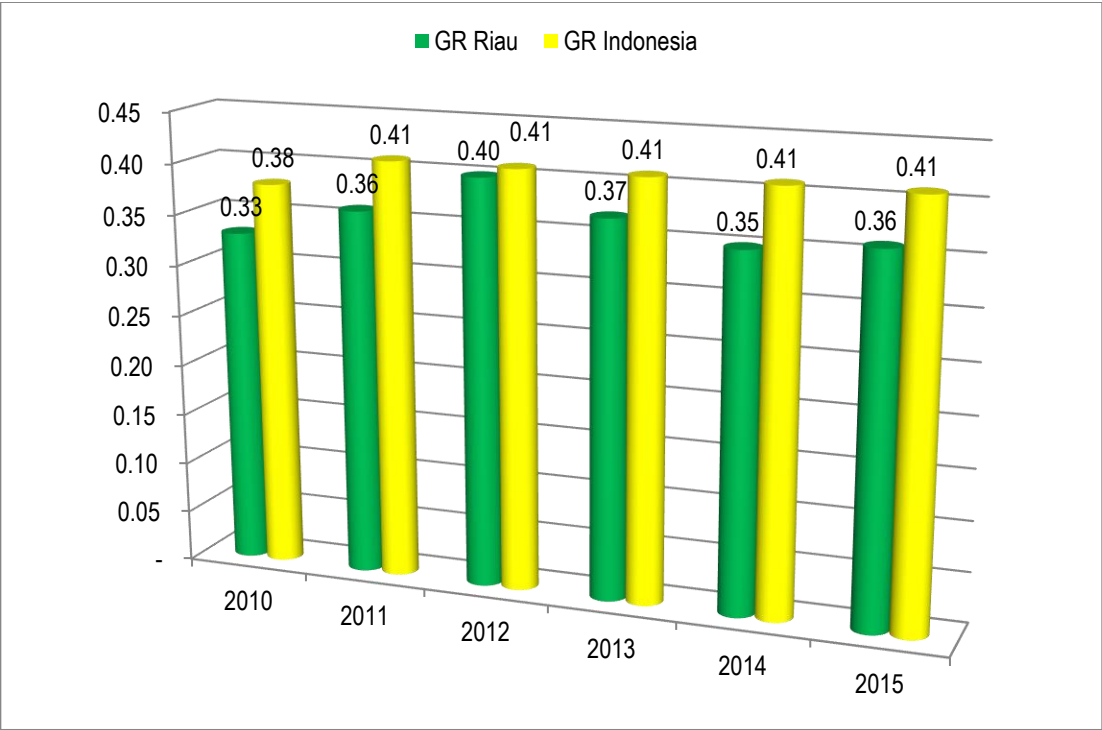
Gambar 2.29
Tingkat Inflasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.2.1.5 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Pemerataan Pendapatan

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan, Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan *sangat tidak merata* jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan *ketidakmerataan sedang* jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan *relatif merata* jika angka indeks gini antara 0,2 sampai 0,35.

Selama periode 2010-2015, angka indeks gini berkisar antara 0,36 – 0,32 dengan trend berfluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.30. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata tahun 2010 dan sedang dari tahun 2011-2015. Pergerakan kategori relatif merata menjadi tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau kedepan.

Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.



Sumber: BPS Provinsi Riau, BRS 2016

Gambar 2.30
Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau
Tahun 2010-2015

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2015 sebesar 0,32 lebih rendah dibandingkan indeks gini Indonesia (0,41) meski berada dalam kelompok yang sama yaitu ketidakmerataan sedang. Bila dibandingkan dengan Provinsi tetangga, pencapaian indeks gini Provinsi Riau lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara (0,34), Sumatera Barat (0,34), dan sama dengan Jambi (0,36) dan Kepulauan Riau (0,36), walaupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat indek gini lebih baik namun masih berada pada tingkat

pemerataan pendapatan yang sama dengan Provinsi Riau yaitu ketidakmerataan sedang. Namun selama periode 2011-2015 terjadi perbaikan pemertaan sebesar 2,37% pertahun.

Tabel 2.25:
Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Perkabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Provinsi Riau	Tahun					Pertumbuha n (%/Tahun)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Provinsi Riau	0,36	0,40	0,37	0,38	0,32	-2,37

Sumber: BPS Provinsi Riau, BRS 2016

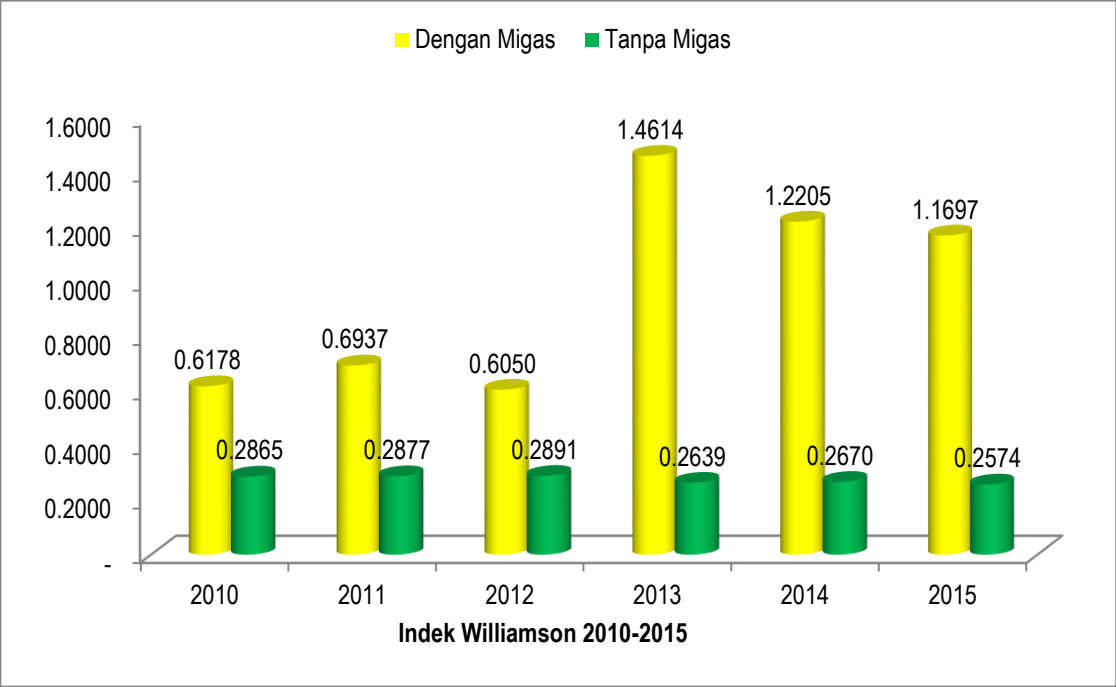
2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kabupaten dan kota. Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata. a. Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$; b. Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; c. Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Bila indeks ketimpangan Williamson diukur dari PDRB per kapita dengan migas, menunjukkan trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, indeks ketimpangannya sebesar 0,671 kemudian meningkat menjadi menjadi 1,1697 pada tahun 2015. Meskipun indeks ketimpangan yang diukur dari PDRB per kapita dengan migas ini cenderung meningkat dan lebih besar dari satu sehingga dapat dikategorikan ketimpangan distribusi pendapatan per kapita dengan

migas antar kabupaten kota di Provinsi Riau sangat timpang atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata. Hal ini dimungkinkan karena hanya sebagian Kabupaten saja yang memiliki sumber daya migas yang besar di Provinsi Riau seperti Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar sedangkan kabupaten kota lainnya relatif kurang atau tidak memiliki sumber daya migas. Selama periode 2010 – 2015, rata-rata pertumbuhan indeks ketimpangan distribusi pendapatan dengan migas antarkabupaten kota di Provinsi Riau menurun sebesar 31,14% per tahun.

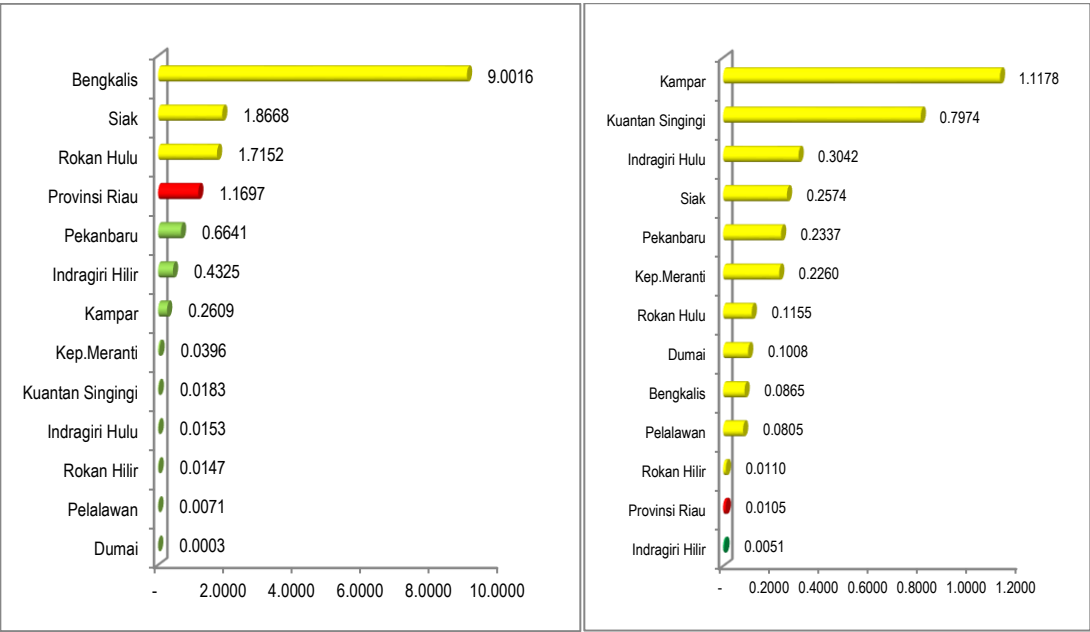


Sumber: PDRB Kabupaten Kota, 2014 dan Olahan 2016
 Keterangan: Tahun 2015 prediksi

Gambar 2.31
Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2010–2015

Selama periode 2010 – 2015, indeks ketimpangan Williamson yang diukur dari PDRB per kapita tanpa migas menunjukkan trend menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.31. Pada tahun 2010, indeks ketimpangan sebesar 0,2865 menurun menjadi 0,2574 pada tahun 2014 yang dapat dikatakan hampir mendekati nol sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas antar kabupaten kota di Provinsi Riau relatif rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata tanpa migas. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan penurunan

indeks ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas di Provinsi Riau menurun sebesar 1,66% per tahun.



Gambar 2.32
Pembentukan Indeks Williamson Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2015

2.2.1.7 Kemiskinan

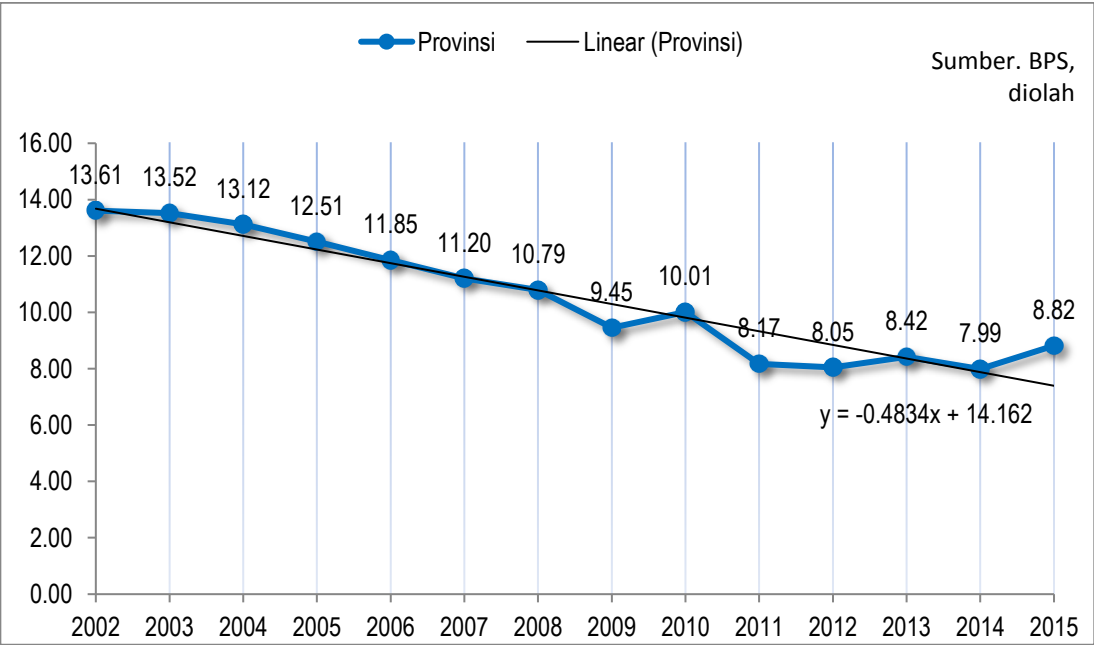
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 189 negara lainnya telah menandatangani Deklarasi Millenium yang dikenal dengan Millenium Development Goals (MDG’s). Saat ini konsep MDG’s sudah diperluas menjadi Sustainable Development Goals (SDG’s) dengan 17 tujuan utama. Salah satu tujuan utama tersebut adalah penanggulangan kemiskinan.

Kemajuan yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan selaras dengan capaian SDG’s 2015 menuju target nasional sebesar 8-10%. Namun terhadap target RPJMD Provinsi Riau sebesar 7,90% pada tahun 2014 dan 7,38% pada tahun 2015 belum tercapai. Belum terwujudnya target penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah provinsi Riau sesuai target RPJMD, hal ini menandakan tingkat capaiannya perbaikan penanggulangan angka kemiskinan di provinsi Riau tidak efektif karena belum terfokus dan lokus pada bidang-bidang determinan kemiskinan walaupun terjadi kondisi semakin membaik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Riau terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 13,61% dan terus mengalami penurunan hingga

menjadi 8,12% pada tahun 2014. Selama priode 2002-2009 tingkat kemiskinan menurun secara tajam, namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 dan sedikit meningkat ada tahun 2013. Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun-tahun tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian makro yang berpengaruh terhadap beban hidup penduduk miskin, sehingga penduduk pada posisi hampir miskin dapat jatuh menjadi miskin. Dengan kata lain, kondisi perekonomian makro seperti inflasi yang meningkat akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan makanan dan non makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat mengalami penurunan terutama pada komoditas pertanian yang berbasis eksport.

Perkembangan antar waktu tingkat kemiskinan Provinsi Riau dari tahun 2002 s/d 2015 mengalami penurunan dari 13,61% pada tahun 2002 menjadi 8,82% pada tahun 2015, dan setiap tahunnya menurun secara fluktuatif, tetapi secara umum dari tahun 2002 ke 2015 tingkat kemiskinan telah menunjukkan trend penurunan sebesar 48,30%.



Gambar 2.33:
Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%)
Provinsi Riau Tahun 2002-2015

Posisi relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 8,82% (Gambar 2.33) terhadap total kemiskinan di Indonesia dan berada pada posisi 22 dari persentase penduduk miskin terbesar diantara 33 provinsi di Indonesia. Proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih banyak yaitu 8,92% dan perkotaan sebanyak 6,90%. Jika diperhatikan bahwa tingkat beban hidup di Provinsi Riau menempati posisi ke-enam di Indonesia dengan Garis Kemiskinan Rp. 364.176 per kapita per bulan atau kebutuhan minimum bagi seorang industri untuk melangsungkan kehidupannya. Dari Gambar 2.33 terlihat persentase penduduk miskin di Provinsi Riau (8.82%) dibawah rata-rata nasional (11,13%). Provinsi Riau berada pada posisi ke 9. Jika dibandingkan terhadap Sumatera, Provinsi Riau berada pada urutan nomor empat terendah.

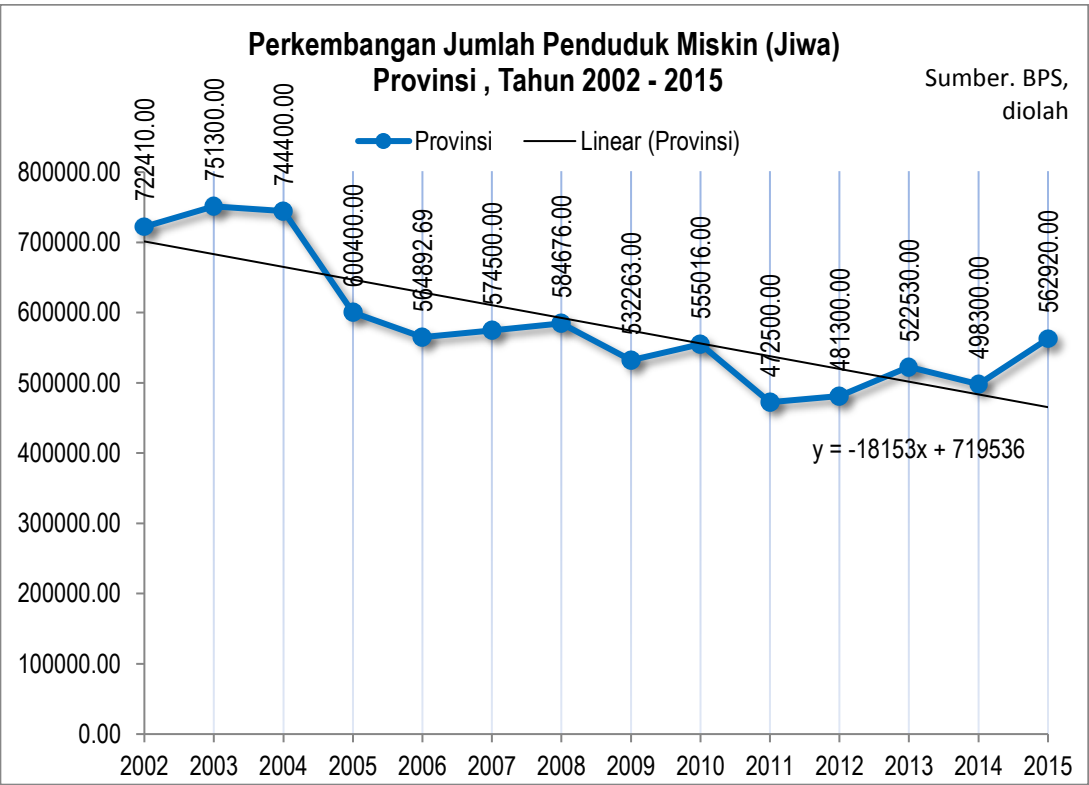
Jumlah penduduk miskin di Riau terus mengalami penurunan selama periode 2002-2015. Pada tahun 2002 sebanyak 722.410 jiwa dan menurun menjadi 562.920 jiwa pada tahun 2015. Gambar 2.34 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Riau selama periode 2002-2015. Jika diperlihatkan secara teliti adalah beberapa periode penurunan kemiskinan di Riau. Periode 2002-2004 jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan, kemudian menurun pada periode 2004-2009 disaat program K2I (pengentasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur) menjadi strategi pembangunan di Riau. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin kembali mengalami sedikit kenaikan, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2004. Tahun 2011 kembali menurun, dan sedikit menaik kembali pada tahun 2013, dan menurun lagi pada tahun 2014. Salah satu penyebab fluktuasi penurunan jumlah penduduk miskin di Riau adalah faktor penduduk migrasi masuk ke Riau yang cukup tinggi.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 migrasi masuk meningkat di Riau mencapai 8,8%. Tingkat migrasi masuk ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Riau yang hanya mencapai 3,58% per tahun. Perkembangan ekonomi Riau dan banyaknya perusahaan skala nasional dan multinasional di Riau. Hal ini memicu semakin ramainya migrasi terutama di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Data Sensus

Penduduk menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 11,00% migrasi di perkotaan Riau, sedangkan migrasi perdesaan hanya 7,3%.

Secara relatif jumlah penduduk miskin di Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin diantara provinsi di Indonesia masih dalam kategori rendah. Beberapa provinsi memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak dan Riau berada pada posisi nomor 14 daerah provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

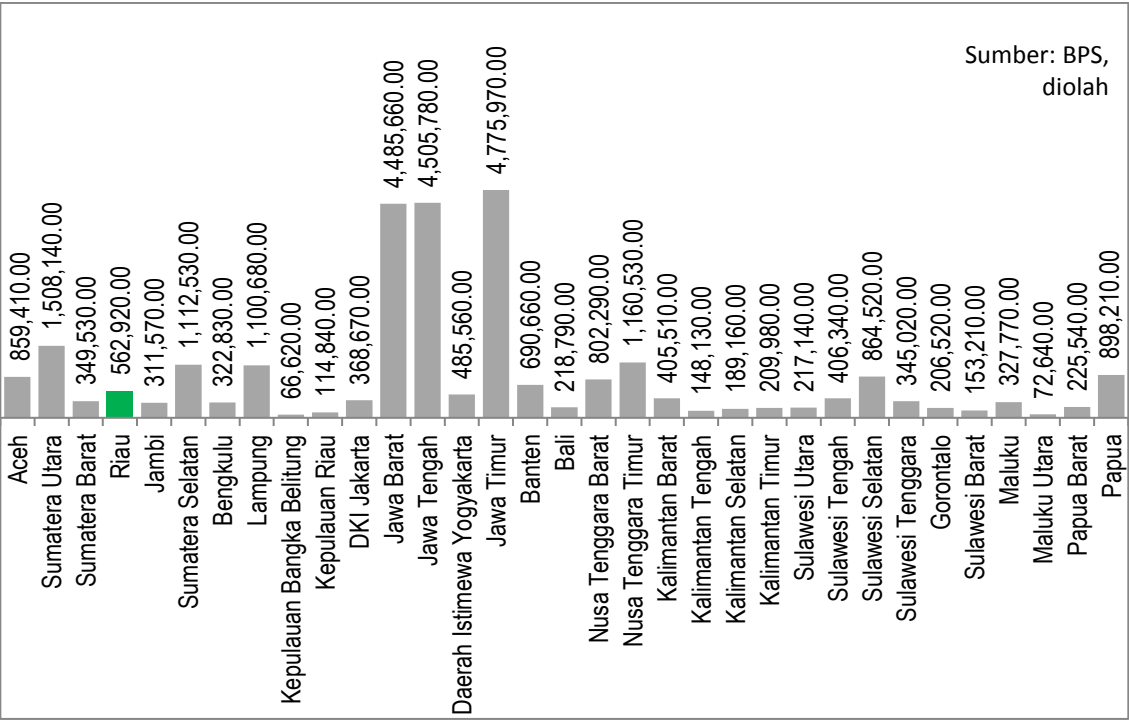
Posisi relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 562.920 jiwa (Gambar 2.34). Jumlah penduduk miskin di Riau ini berada pada posisi 14 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak diantara 33 provinsi di Indonesia, dan nomor empat terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Sumatera Utara, Lampung dan Sumatera Selatan.



Gambar 2.34:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

Analisis terhadap relevansi perkembangan capaian indikator jumlah penduduk miskin ditujukan untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan di provinsi Riau dapat mendukung

target nasional. Relevansi capaian suatu indikator kemiskinan di Riau terlihat sudah relevan dengan perkembangan capaian indikator nasional. Hal tersebut tergambar dari tingkat kemajuan capaian indikator di Provinsi Riau menunjukkan lebih besar daripada tingkat kemajuan yang terjadi secara nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di provinsi Riau sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator nasional.

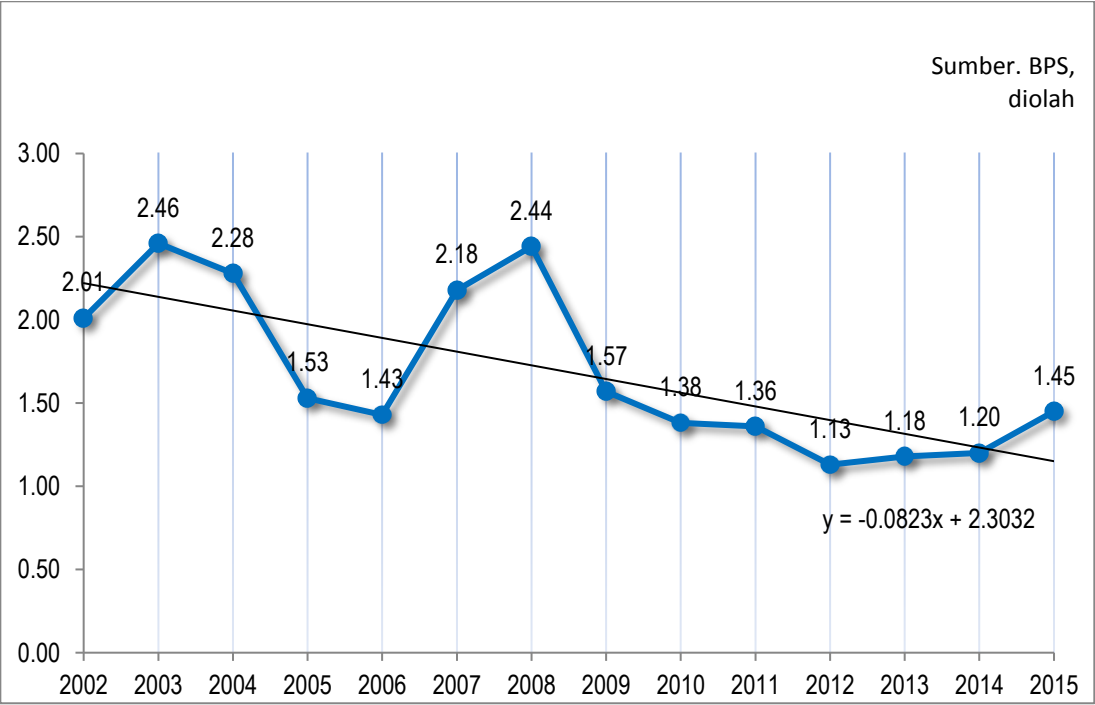


Gambar 2.35:
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau 2015

Meski Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi

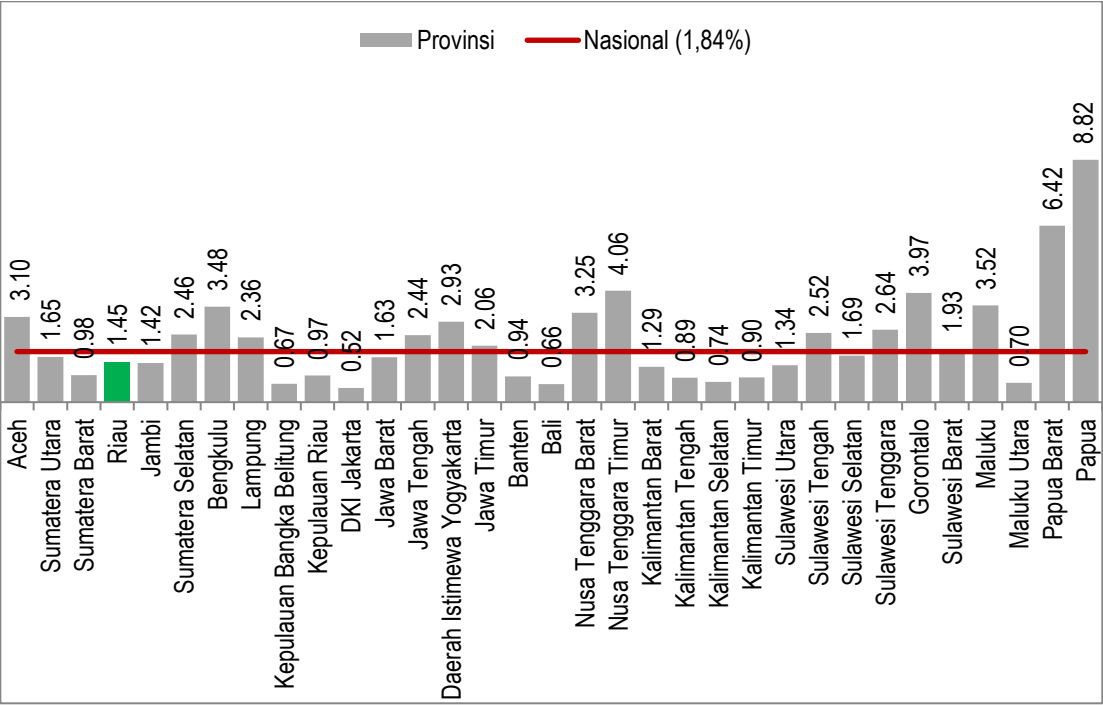
untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Perkembangan P1 di Riau terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, P1 sebesar 2,01% dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 1,45% pada tahun 2015. Selama priode tersebut, P1 hanya pada tahun 2003, 2004 dan 2007 dan 2008 yang mengalami kenaikan. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.



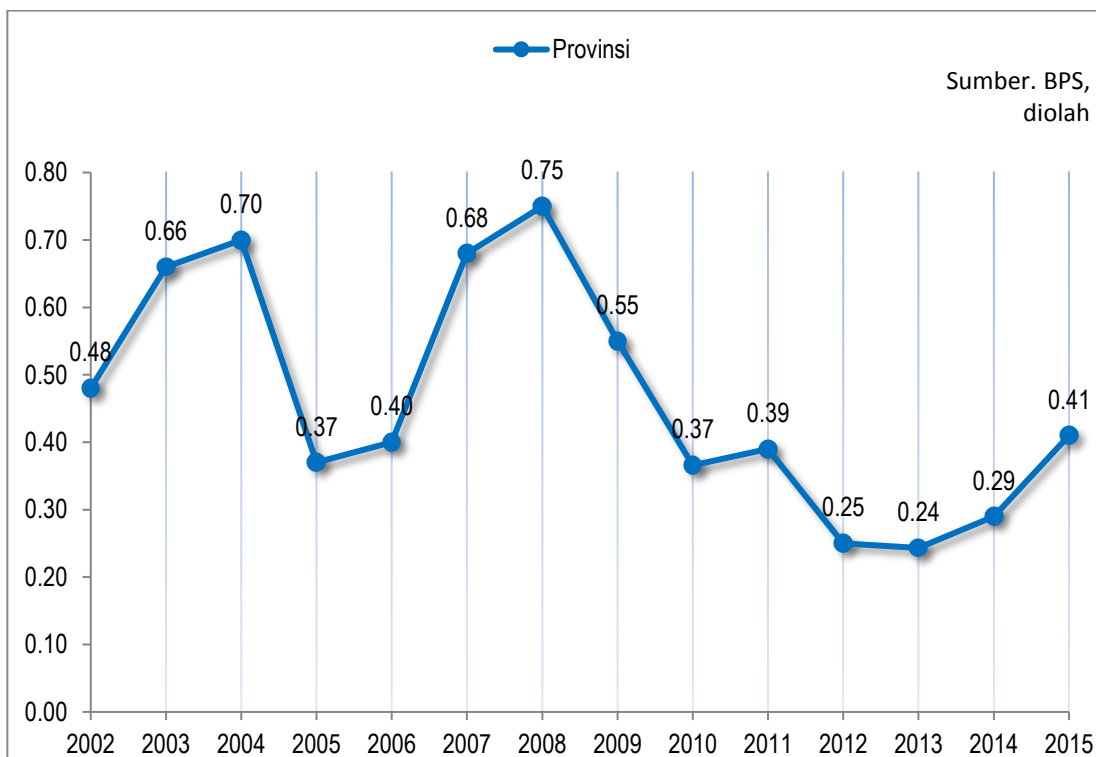
Gambar 2.36:
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

Gambar 2.36 posisi relatif indeks P1 Provinsi Riau pada tahun 2015 menunjukkan bahwa berada dibawah (P1) nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Riau berada pada posisi ke 10 terendah diantara 33 provinsi di Indonesia yaitu 1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Provinsi Riau adalah 1,45%.

Sedangkan tingkat kesenjangan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional adalah 1,84%. Tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Riau setiap tahunnya mengalami perubahan yang berfluktuasi selama periode 2002-2015. Pada tahun 2002 tingkat kedalam kemiskinan (P1) di Riau adalah 2,01% dan menurun menjadi 1,45% pada tahun 2015 (Gambar 2.37). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin membaik pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2002. Semakin tinggi P2 maka semakin ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.



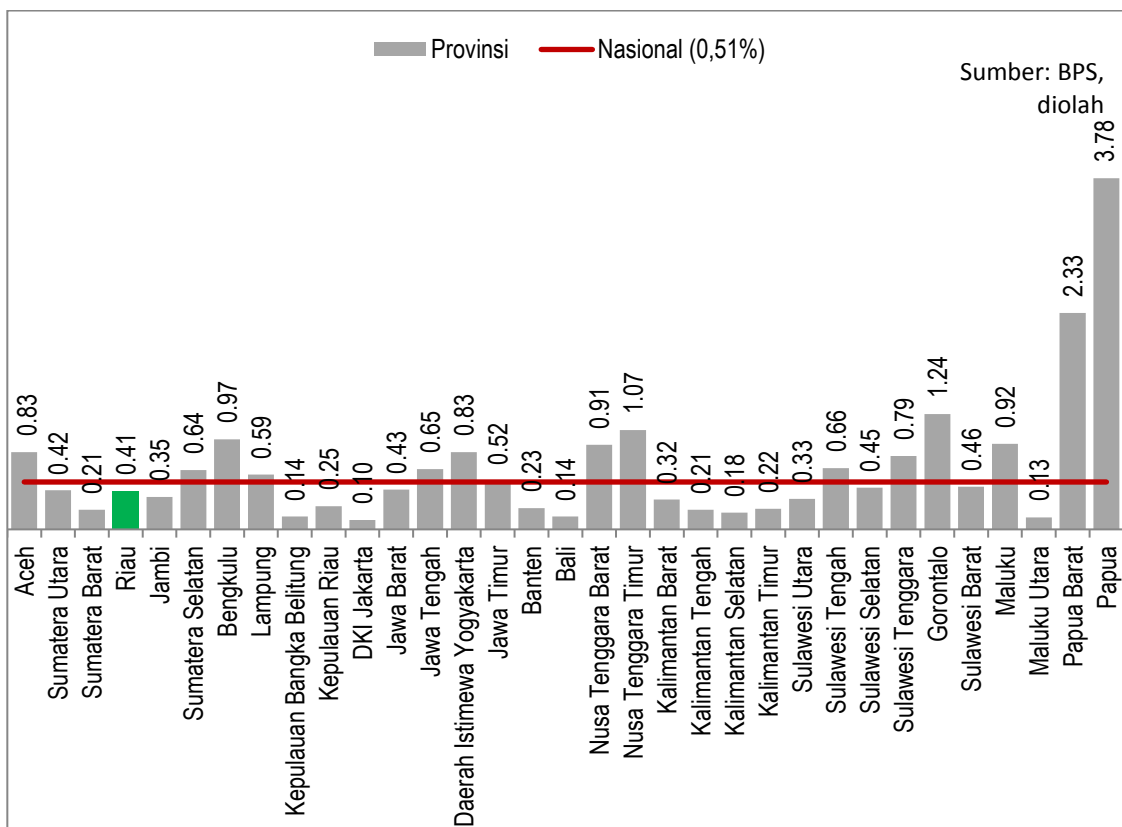
Gambar 2.37:
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau 2015



Gambar 2.38:
Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau
Tahun 2002-2015

Secara umum perkembangan P2 dari tahun 2002-2015 mengalami penurunan sebanyak 0,27% atau turun sebanyak 56,25%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.38.

Posisi relatif P2 di Riau berada dibawah P2 nasional. Pada tahun 2015, P2 Riau hanya 0,41%, sedangkan indeks P2 nasional adalah 0,51%. P2 provinsi Riau menempati urutan ke-delapan terendah dibandingkan dengan provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Riau memiliki ketimpangan yang lebih sempit daripada nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.39. Trend P2 di Riau cenderung menurun, namun penurunan P2 di Riau sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan penurunan P2 pada tingkat nasional. Hal ini dibuktikan oleh slope penurunan P2 di Riau yang hanya -0,031 sedangkan slope penurunan P2 nasional sebesar -0,037.



Gambar 2.39:
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau 2015

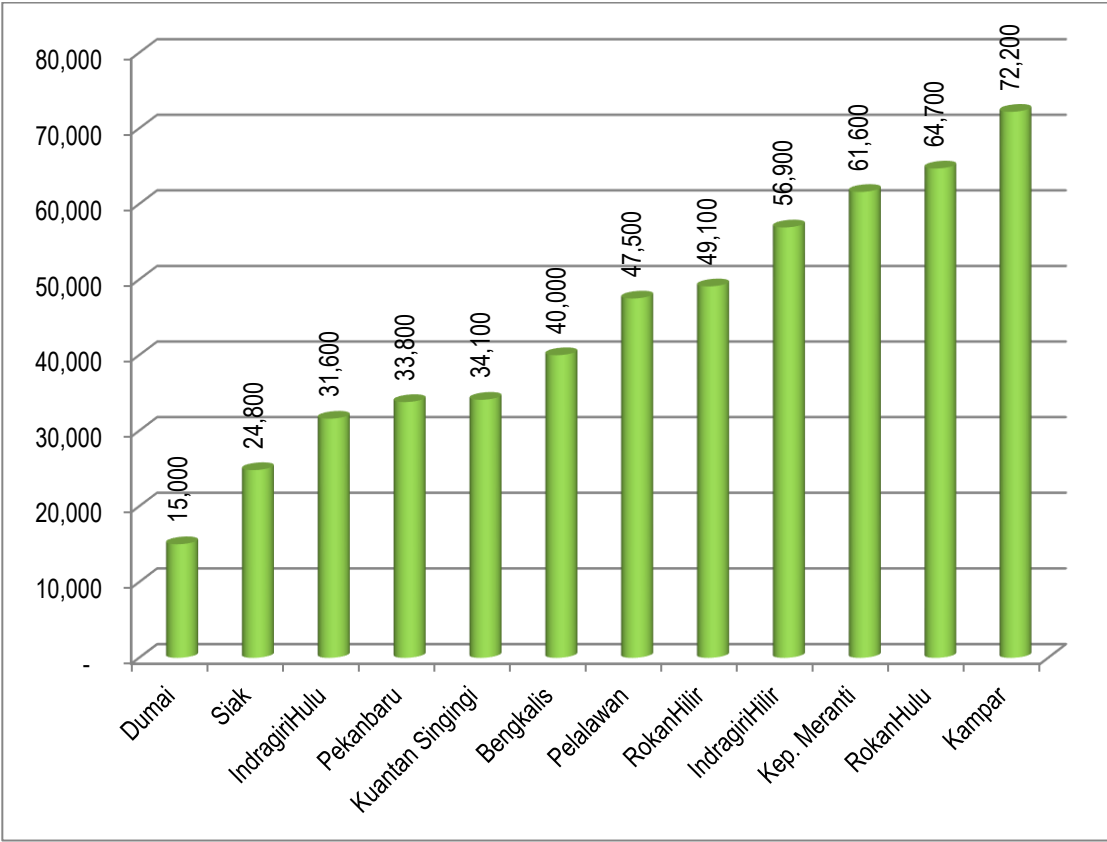
Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara kabupaten kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, persentase tingkat kemiskinan, angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi berbeda cukup signifikan antara wilayah. Pada Tabel 2.26 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru terbentuk tahun 2015 merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin maupun tingkat (persentase) kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Kampar 72.200 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kep. Meranti sebesar 34,08%. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kep. Meranti sebesar 6,63 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 2,03 serta garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 451.528.

Tabel 2.26:
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

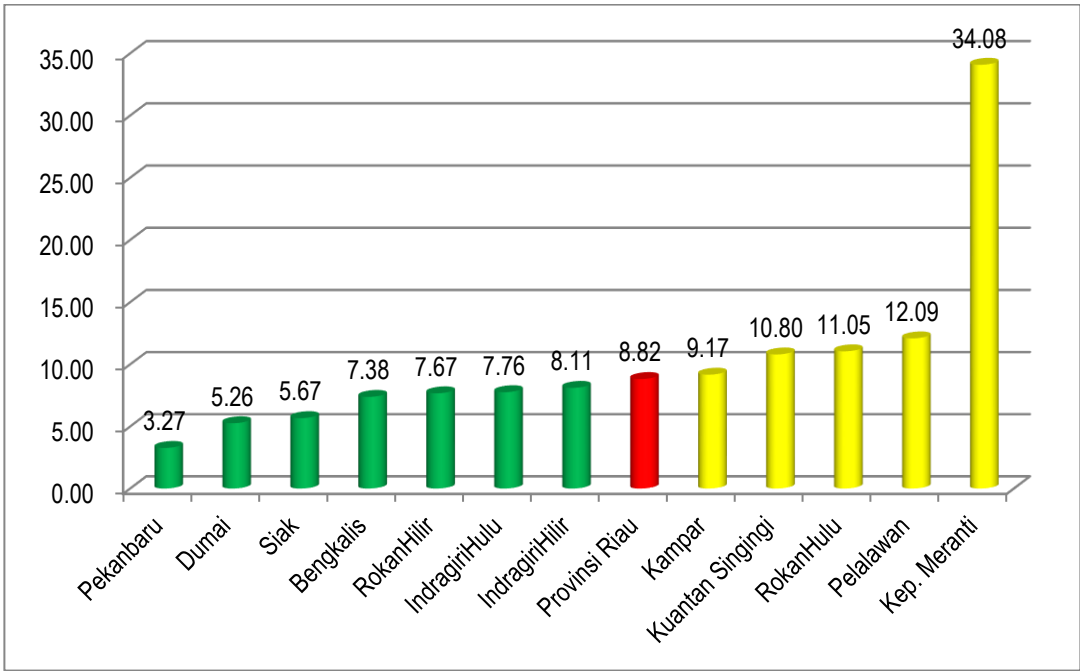
Kabupaten Kota	Indikator Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
Kuantan Singingi	34.100	10,80	1,48	0,36	441.315
Indragiri Hulu	31.600	7,76	1,22	0,36	396.088
Indragiri Hilir	56.900	8,11	1,45	0,40	295.781
Pelalawan	47.500	12,09	2,38	0,65	451.528
Siak	24.800	5,67	0,64	0,12	363.879
Kampar	72.200	9,17	1,41	0,32	360.324
Rokan Hulu	64.700	11,05	1,54	0,34	384.226
Bengkalis	40.000	7,38	1,05	0,25	420.733
Rokan Hilir	49.100	7,67	1,18	0,34	317.220
Kep.Meranti	61.600	34,08	6,63	2,03	403.535
Pekanbaru	33.800	3,27	0,36	0,08	416.479
Dumai	15.000	5,26	0,59	0,11	353.079
Provinsi Riau	562.920	8,82	1,45	0,41	417.164

Sumber: BPS Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, 2016

Secara umum jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indek kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota, yang memberi arti bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding kota. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat di wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan diwilayah pesisir. Jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indek kedalaman dan keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.40, 2.41, 2.42 dan 2.43 serta 2.44.



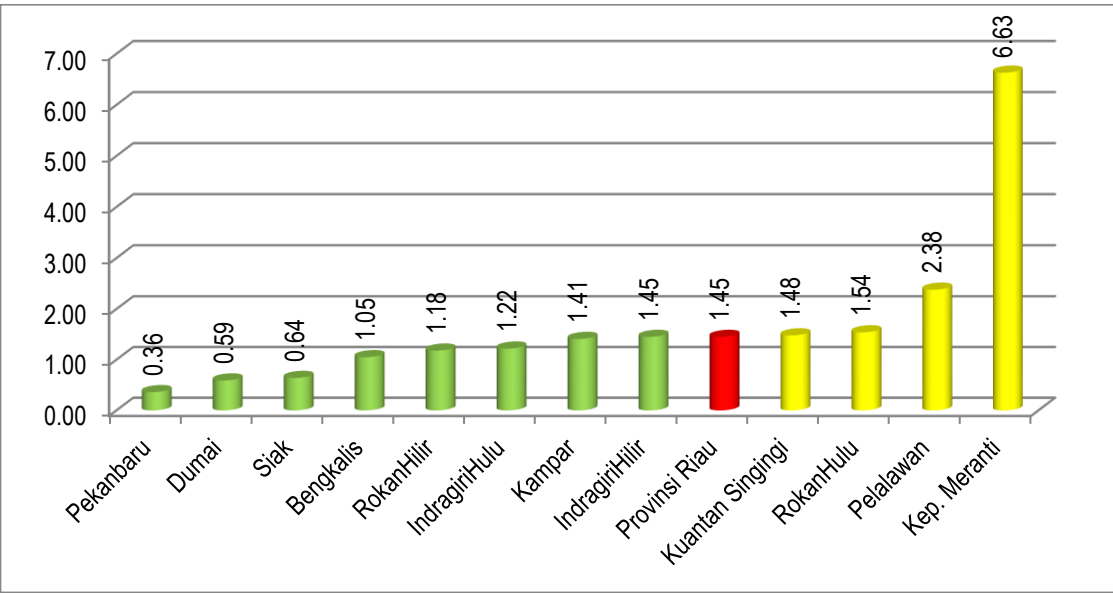
Gambar 2.40:
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015



Gambar 2.41:
Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index* (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan/ *Poverty Gaps Index* (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Pada gambar 2.42 terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi sebanyak 10 kabupaten kota dan di atas rata-rata provinsi adalah kabupaten Kep. Meranti dan Pelalawan.

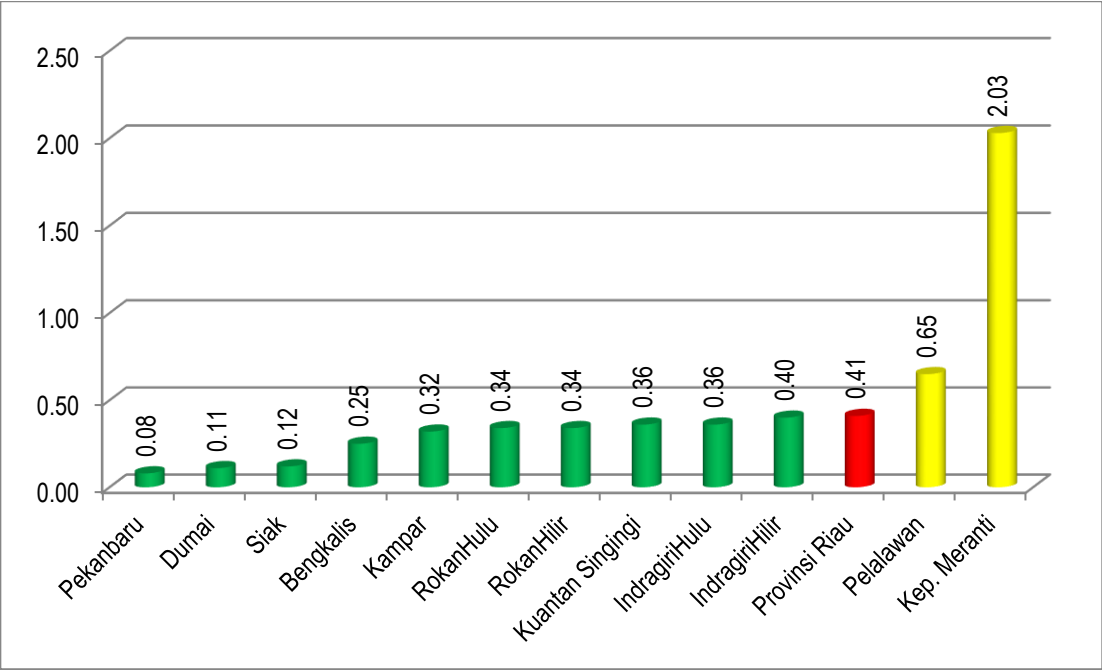


Gambar 2.42:
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

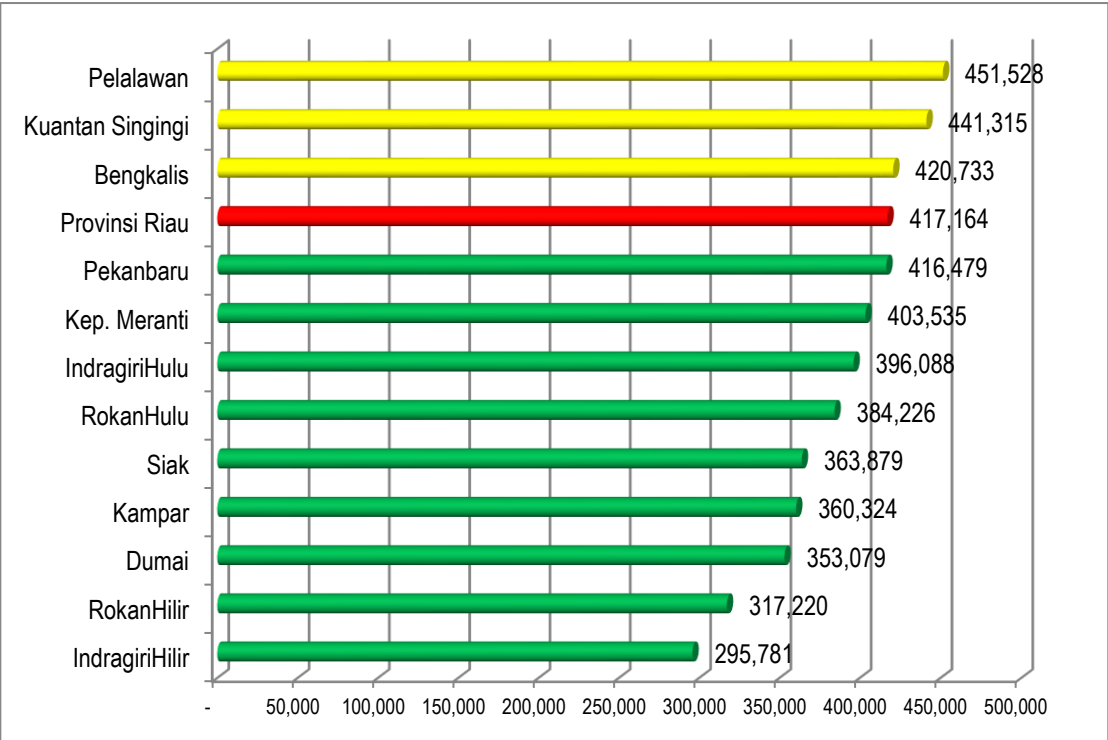
Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index* (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan/ *Poverty Gaps Index* (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Pada gambar 2.42 terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi sebanyak 10 kabupaten kota dan di atas rata-rata provinsi adalah kabupaten Kep. Meranti dan Pelalawan. Oleh karena itu kedua wilayah ini harus mendapatkan perhatian secara serius dalam mengurangi keparahan kemiskinan.

Sementara itu angka garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten pelalawan sebesar Rp. 451.528 dan terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 295.791 Gambar 2.43. Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir merupakan 2 wilayah

dengan garis kemiskinan terendah di bawah rata-rata provinsi Riau pada tahun 2015.



Gambar 2.43:
Indek Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015



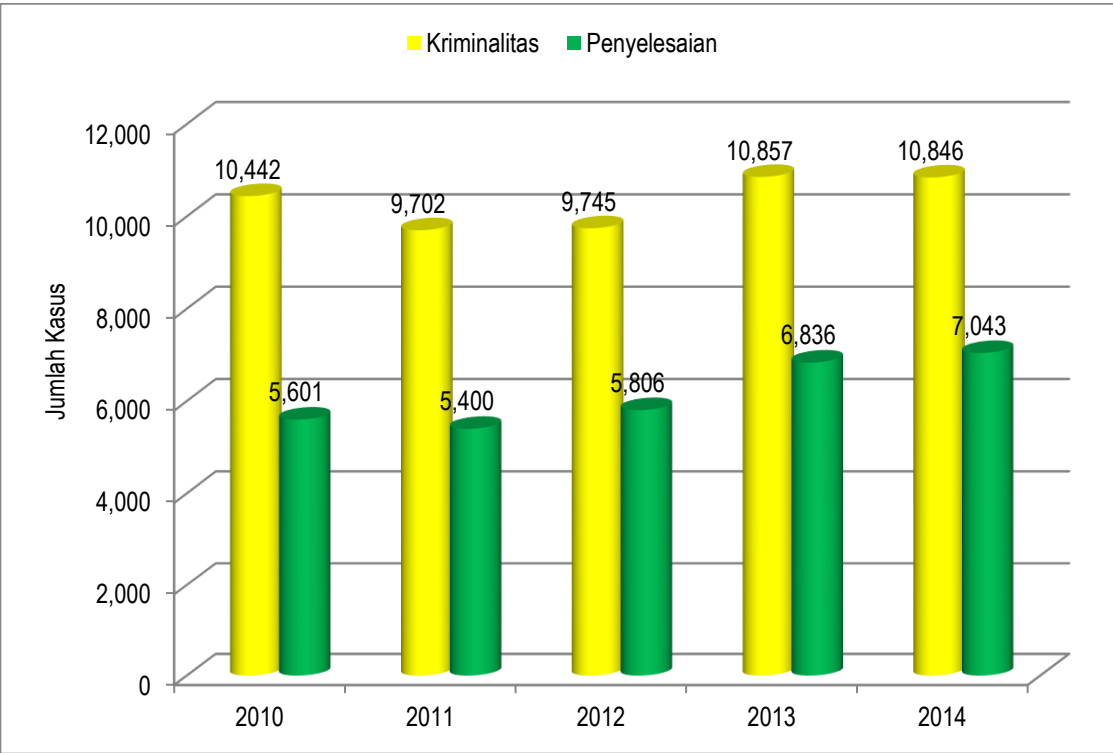
Gambar 2.44:
Garis Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.2.1.8 Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, Tindak kriminal

yang tinggi disuatu wilayah tidak saja menurunkan rasa aman dan kesejahteraan penduduk tetapi juga akan melemahkan iklim investasi, Secara teori dinyatakan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak kriminal antara lain (i) kemiskinan, (2) kesempatan, (3) Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, (4) Sifat-sifat anti-sosial bawaan, dan (5) hukuman kepada pelaku kriminal yang tidak proporsional.

Perkembangan tindak kriminalitas dan penyelesaiannya di Provinsi Riau tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.45. Selama periode ini, tindak kriminal dan penyelesaian di Provinsi Riau menunjukkan trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, tindak kriminal yang dilaporkan sebanyak 10.442 kasus, menurun menjadi 10.846 kasus pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan sebesar 1,17% per tahun, Sebaliknya, penyelesaian kasus kriminal meningkat dari 5.601 kasus (53,64%) menjadi 7.043 kasus (64,94%) dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 6,17% per tahun.



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Gambar 2.45:
Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian
Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Dari 82 jenis kriminalitas pada tahun 2014, tiga tindak kriminal yang tertinggi terjadi di Provinsi Riau berdasarkan jenis kriminalitas adalah (i) pencurian dengan pemberatan sebanyak 1.611 kasus atau 14,85%, pencurian dengan kekerasan ranmor sebanyak 1.372 kasus (12,65%), dan penggelapan sebanyak 798 kasus (7,36%). Disamping itu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian karena melibatkan generasi muda dan trend terus meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah jenis kriminalitas narkoba dan psikotropika karena meningkat dari 483 kasus pada tahun 2010 naik menjadi 649 kasus pada tahun 2014 atau naik 8,88% pertahun atau naik 34,37% dari tahun 2010 ke 2014. Dari 10.846 kasus yang mampu diselesaikan hanya 70,14% atau 29,86% belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait untuk penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja disamping penyadaran dan penegakan hukum perlu semakin ditingkatkan.

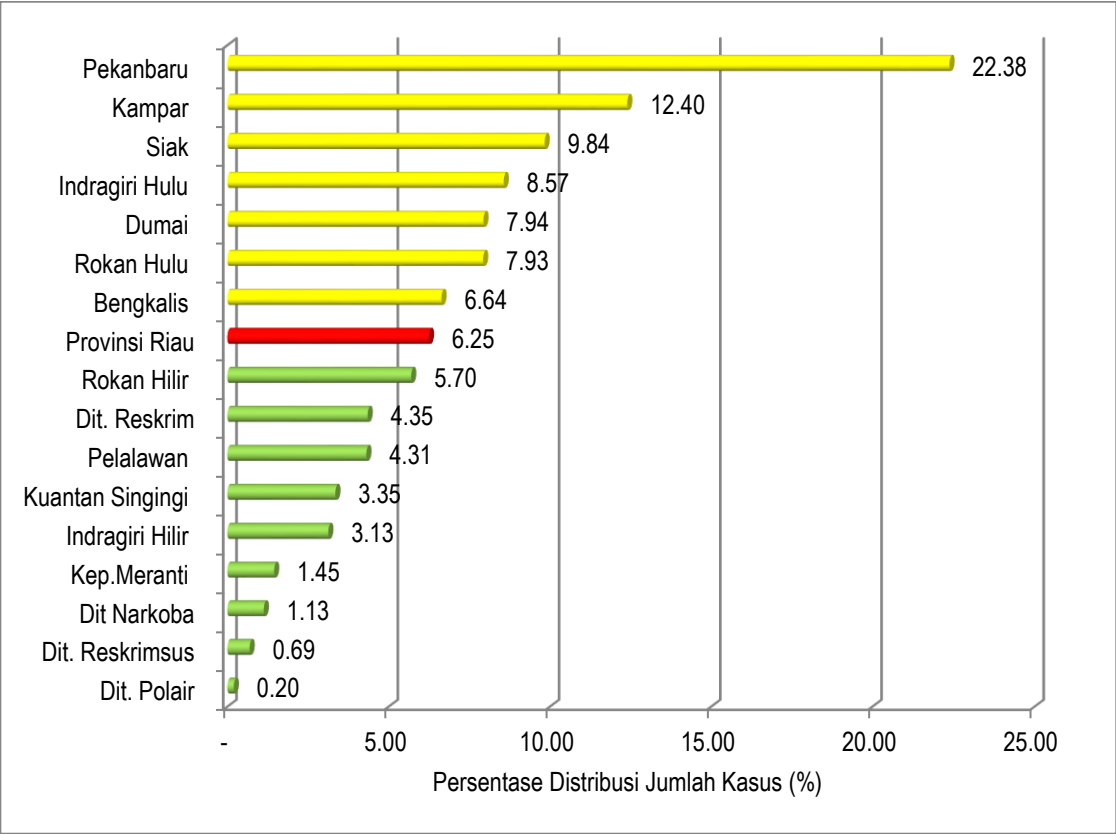
Tabel 2.27:
Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Wilayah Kejadian	Uraian				
	Jumlah Kasus	Distribusi (%) Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	Distribusi (%) Penyelesaian	Penyelesaian (%)
Dit. Reskrim	472	4,35	267	3,79	56,57
Dit. Reskrimsus	75	0,69	68	0,97	90,67
Dit. Polair	22	0,20	18	0,26	81,82
Dit Narkoba	123	1,13	90	1,28	73,17
Kuantan Singingi	363	3,35	245	3,48	67,49
Indragiri Hulu	930	8,57	415	5,89	44,62
Indragiri Hilir	339	3,13	258	3,66	76,11
Pelalawan	467	4,31	380	5,40	81,37
Siak	1.067	9,84	679	9,64	63,64
Kampar	1.345	12,40	865	12,28	64,31
Rokan Hulu	860	7,93	570	8,09	66,28
Bengkalis	720	6,64	441	6,26	61,25
Rokan Hilir	618	5,70	578	8,21	93,53
Kep.Meranti	157	1,45	113	1,60	71,97
Pekanbaru	2.427	22,38	1.459	20,72	60,12
Dumai	861	7,94	597	8,48	69,34
Provinsi Riau	10.846	100,00	7.043	100,00	70,14

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Penyebaran kasus kriminalitas menurut Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Tabel 2.27. Pada tahun 2014, Kota Pekanbaru merupakan yang tertinggi kasus kriminalitasnya yaitu sebanyak 2.427 kasus dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 22,38%, Kabupaten lainnya yang memiliki kasus kriminalitas yang tinggi adalah Kabupaten Kampar sebanyak 1.345 kasus (12,40%) dan Siak sebanyak 1.067 kasus (9,84%) dengan persentase penyelesaian masing-masingnya sebanyak 60,12%, 64,31% dan 63,64%.

Berdasarkan Gambar 2.46 dapat dilihat bahwa terdapat tujuh kabupaten kota yang memiliki kasus kriminalitas tertinggi dan lima kabupaten dengan angka kriminalitas terendah di atas dan di bawah rata-rata provinsi Riau. Sementara persentase distribusi kasus yang ditangani langsung oleh Polda Riau melalui empat direktur kriminalitas, maka penanganan tertinggi terdapat pada direktur kriminal umum sebanyak 4,35% dan terendah pada direktur polair sebanyak 0,20%. Oleh karena itu wilayah dengan angka kriminalitas tertinggi perlu mendapatkan perhatian mengingat peningkatan kasus kriminalitas di wilayah tersebut cenderung meningkat.



Gambar 2.46
Persentase Distribusi Jumlah Kasus Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2014

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator IPM, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita riil, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rasio penduduk yang bekerja.

Tabel 2.28:
Perkembangan Komponen Indikator IPM Provinsi Riau
Tahun 2010-2015

Kabupaten Kota	Tahun						+/- (%/ Tahun)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
AHH (Tahun)	70,15	70,32	70,49	70,67	70,76	70,93	0,22
HLS (Tahun)	11,74	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74	1,62
RLS (Tahun)	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49	0,58
PP (Rp. 000)	9.857	9.957	10.058	10.180	10.262	10.364	1,01
IPM	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	0,63

Sumner : BPS Provinsi Riau Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.28 menunjukkan bahwa komponen indikator pembentukan IPM selama periode 2010-2015, yang pertumbuhan sangat lambat adalah AHH hanya tumbuh 0,22% per tahun dan lama sekolah hanya tumbuh 0,58% dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar 1,01% per tahun. Oleh karena itu program perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan lama sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,63% per tahun.

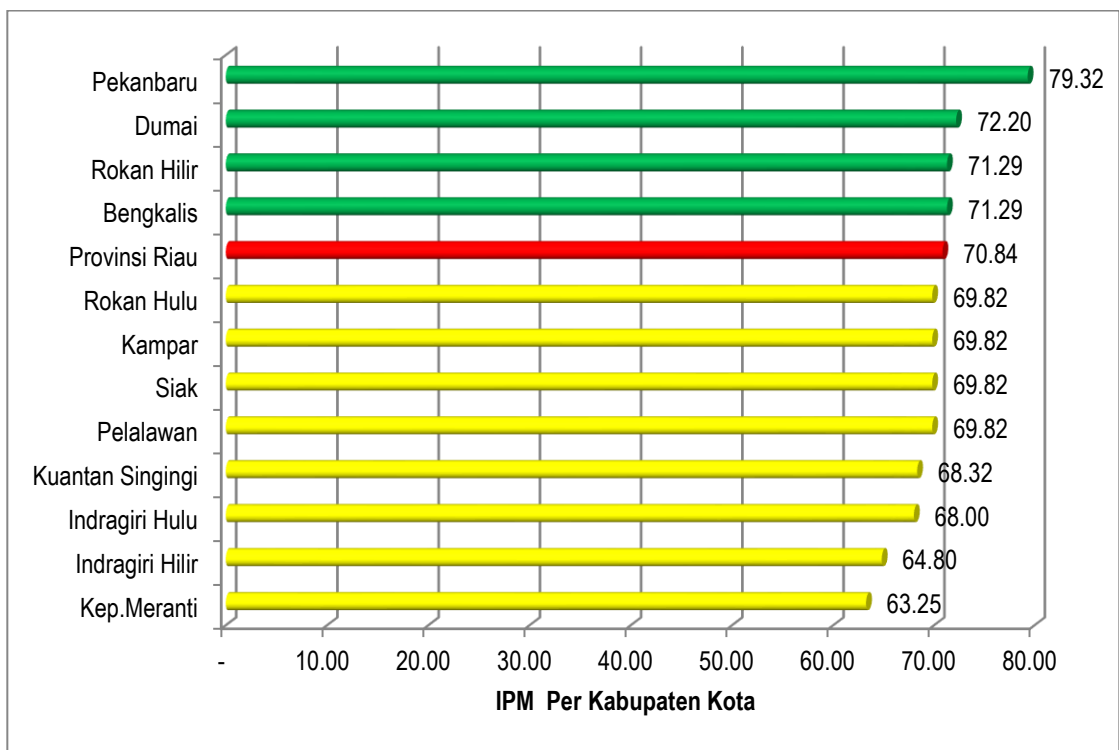
Kabupaten/kota dengan IPM melebihi IPM Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis dan Kampar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.29 dan Gambar 2.47. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Kep. Meranti diikuti Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi

dan Pelalawan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, maka kebijakan dan program yang terkait untuk peningkatan IPM lebih diprioritaskan di tujuh kabupaten yang terendah IPM nya dengan memperhatikan atau fokus pada komponen pembentukan IPM, yaitu lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita. Untuk lama sekolah yang perlu prioritas adalah kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Siak. Sedangkan untuk angka harapan hidup yang perlu perioritas utama adalah Kuantan Singingi, Kep.Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Manakala pengeluaran perkapita adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kep.Meranti, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Tabel 2.29:
IPM Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Indikator IPM				
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)	IPM
Kuantan Singingi	67,66	12,64	11,96	9.719	67,47
Indragiri Hulu	69,64	11,92	11,51	9.726	67,11
Indragiri Hilir	66,54	11,38	10,67	9.738	63,80
Pelalawan	70,13	11,56	11,02	11.391	68,67
Siak	70,54	12,26	11,81	11.531	71,45
Kampar	69,80	12,86	12,72	10.651	70,72
Rokan Hulu	68,93	12,39	12,36	8.786	67,02
Bengkalis	70,38	12,39	12,35	10.661	70,84
Rokan Hilir	69,27	11,75	11,42	9.051	66,22
Kep.Meranti	66,42	12,41	12,34	6.945	62,91
Pekanbaru	71,55	14,86	14,07	14.023	78,42
Dumai	70,05	12,46	12,40	10.870	71,86
Provinsi Riau	70,76	12,74	12,45	10.262	70,33

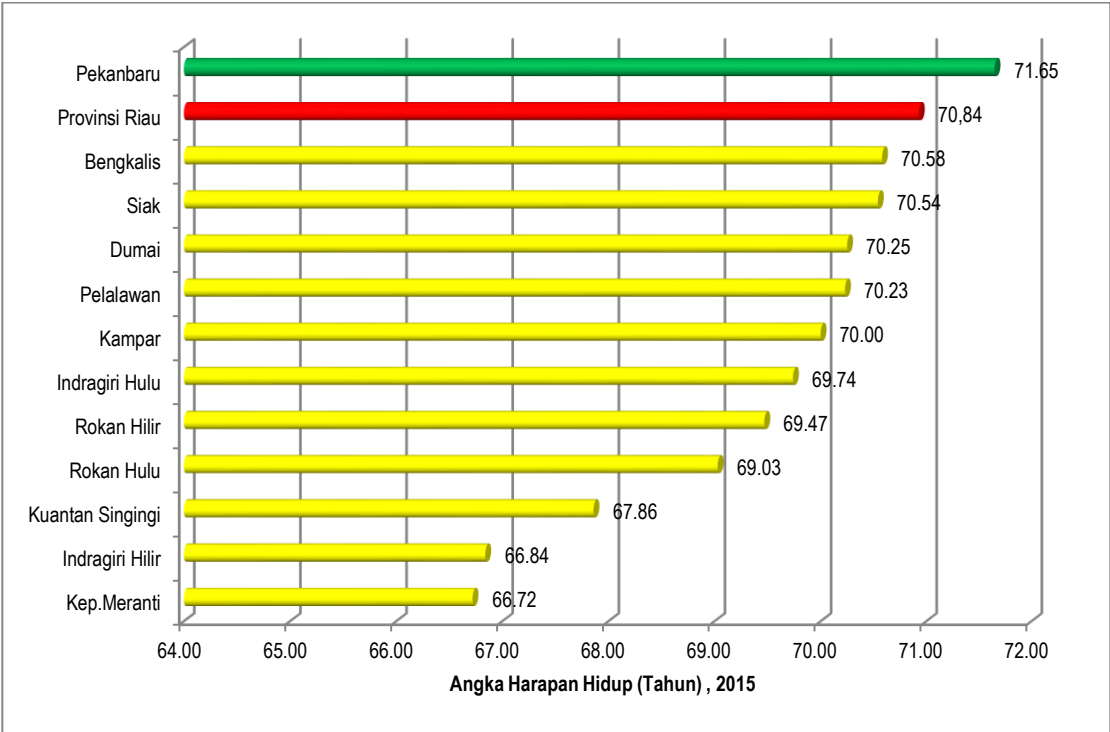
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2015



Gambar 2.47
IPM Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

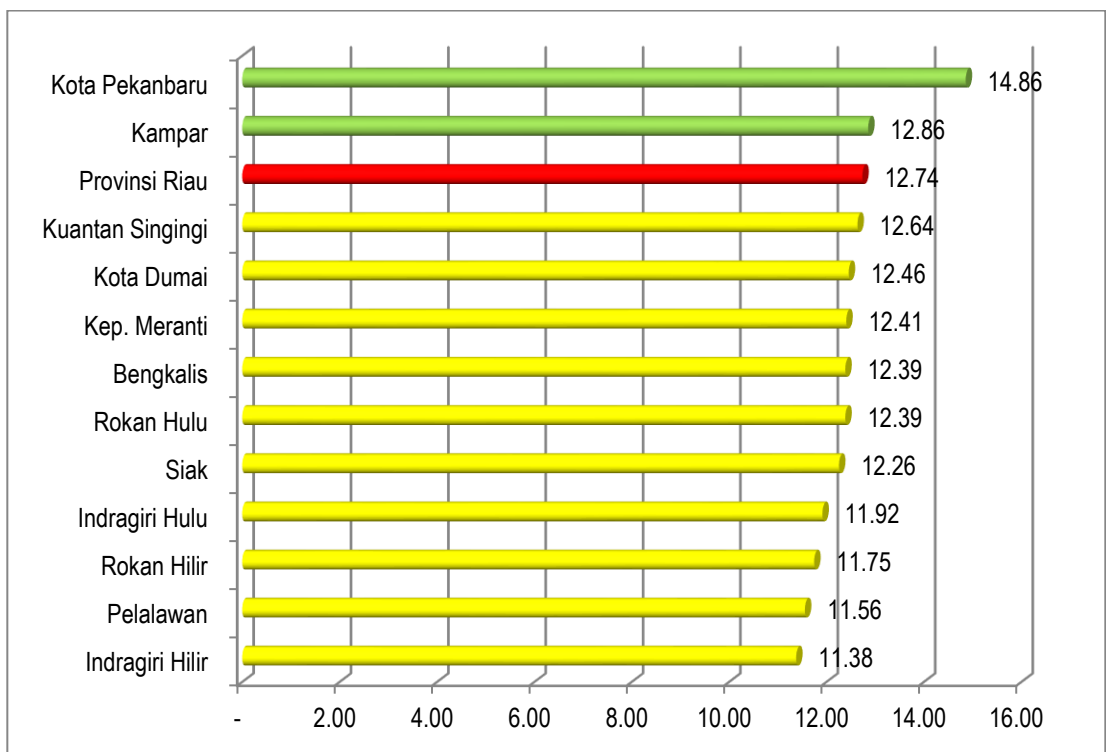
Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya, Perkembangan usia harapan hidup tahun 2010-2014 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Tabel 2.28. Selama periode ini, usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau terus meningkat dari 70,15 tahun pada tahun 2010 menjadi 70,93 tahun pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,22% per tahun. Pada tahun 2015, pencapaian usia harapan hidup (70,25 tahun) di Provinsi Riau ini masih lebih rendah dibandingkan usia harapan hidup Nasional (72,77 tahun). Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan usia harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Provinsi Riau ke depan. Terdapat 11 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan AHH adalah Kep. Meranti-Bengkalis, lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.48.



Gambar 2.48
Angka Harapan Hidup Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

b. Angka Harapan Lama Sekolah

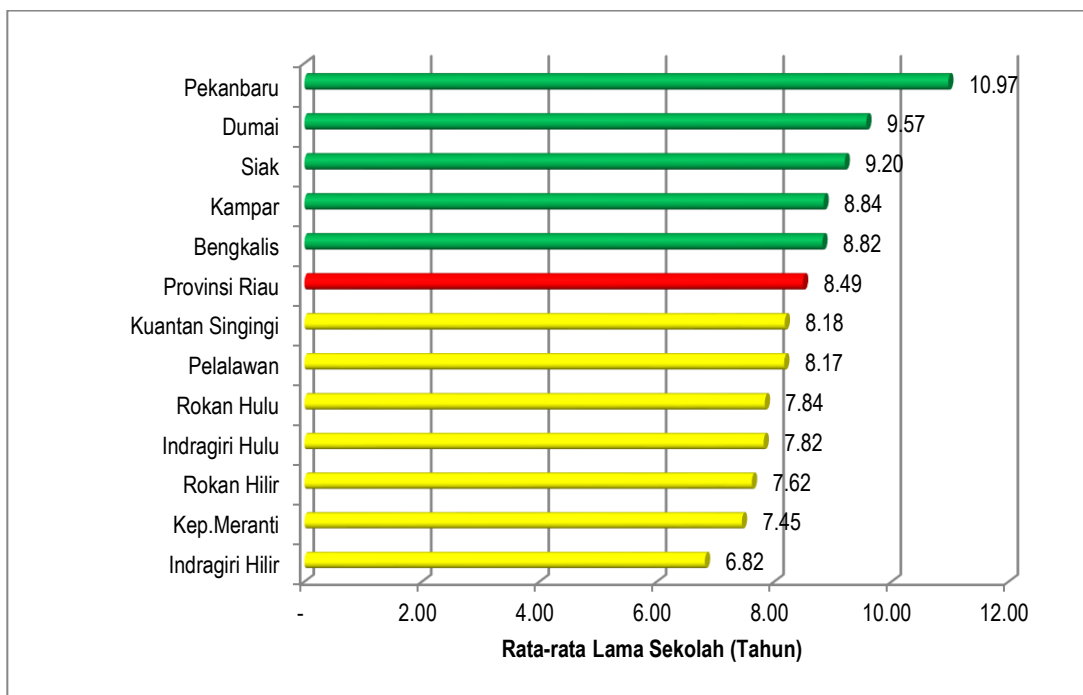
Perkembangan angka harapan lama sekolah tahun 2010-2015 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,62% per tahun. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2015 yaitu 12,74 tahun masih di atas wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan Gambar 2.49 menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang AHL nya lebih tinggi dari rata-rata AHL provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing 14,86 tahun dan 12,86 tahun. Halnya sejalan dengan jumlah penduduk yang berumur 19-24 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dimana Kota Pekanbaru dan Kampar menjadi urutan tertinggi dari jumlah penduduknya yang masuk perguruan tinggi.



Gambar 2.49
Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2010-2015 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,58% per tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2015 yaitu 8,49 tahun masih dibawah wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau lebih baik dibandingkan Nasional 7,84 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Riau kedepannya melalui program dan kegiatan peningkatan wajib belajar 12 tahun dan didukung pendidikan universal. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan perioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada dibawah rata-rata RLS Provinsi adalah Inhil-Kuansing, lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.50.

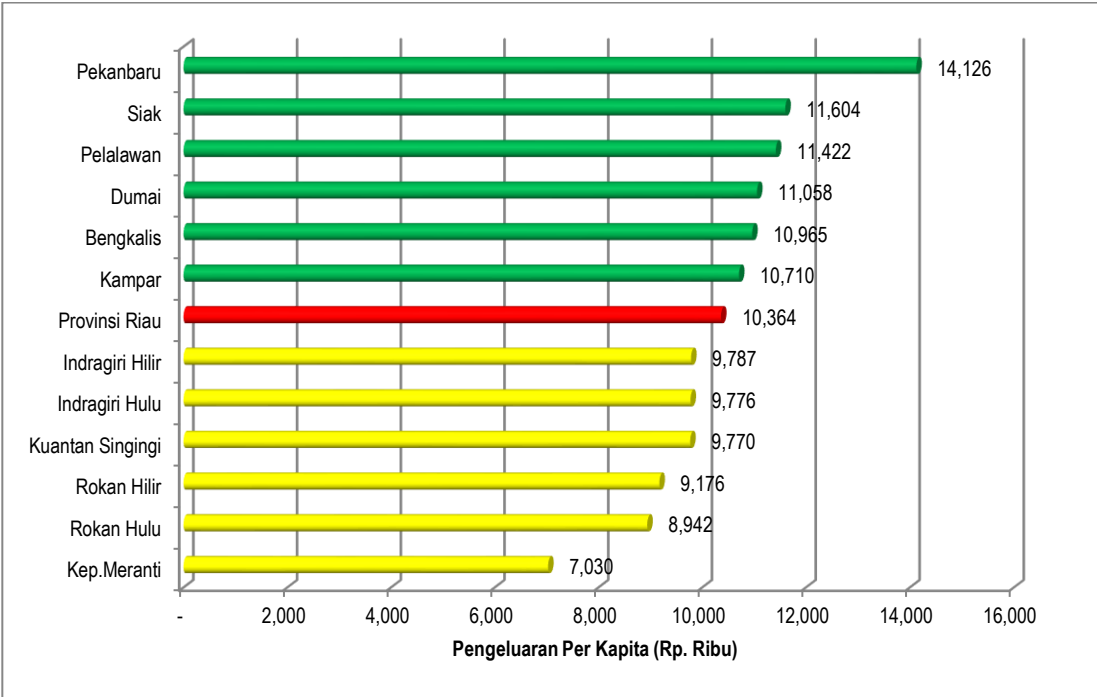


Gambar 2.50
Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

d. Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Rp. 9.857 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp. 10.354 ribu pada tahun 2015. Dari tiga komponen pembentuk IPM, pengeluaran per kapita riil merupakan komponen dengan pertumbuhan yang tertinggi per tahun sebesar 1,01% dari tiga indikator utama pembentukan IPM. Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Provinsi karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita riil.

Peningkatan pengeluaran per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita disamping berkontribusi pada peningkatan PDRB Provinsi Riau. Terdapat 6 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan pengeluaran per kapita adalah kep. Meranti hingga Inhil, lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.51. Pencapaian pengeluaran per kapita riil Provinsi Riau ini lebih tinggi dibanding pencapaian pengeluaran riil Nasional.



Gambar 2.51
Pengeluaran Per Kapita Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

2.2.2.2 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Perkembangan tenaga kerja di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.30 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, Selama periode 2011 – 2015, rata-rata pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas meingkat sebesar 3,25% per tahun dan angkatan kerja meningkat sebesar 2,03% per tahun. Pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja meningkat 1,33% per tahun sedangkan angkatan kerja yang tidak bekerja naik sebesar 14,69% per tahun.

Tabel 2.30:
Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penduduk Usia 15 ke atas	3.857.145	3.985.257	4.135.186	4.257.120	4.383.530	3,25
2	Angkatan Kerja (jiwa)	2.560.402	2.506.776	2.623.310	2.695.247	2.771.349	2,03
	a. Bekerja	2.424.180	2.399.002	2.479.493	2.518.485	2.554.296	1,33
	b. Tidak Bekerja	136.222	107.774	148.817	176.762	217.053	14,69
3	Bukan Angkatan Kerja	1.296.743	1.478.481	1.511.876	1.561.873	1.612.201	5,70
4	TPAK (%)	66,38	62,90	63,44	63,31	63,22	(1,18)
5	TPT (%)	5,32	4,30	5,48	6,56	7,83	11,83

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan Forecasted 2015

Selama periode 2011–2015, tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki trend penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar - 1,18% per tahun. Kondisi sebaliknya, tingkat pengangguran mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,83% per tahun.

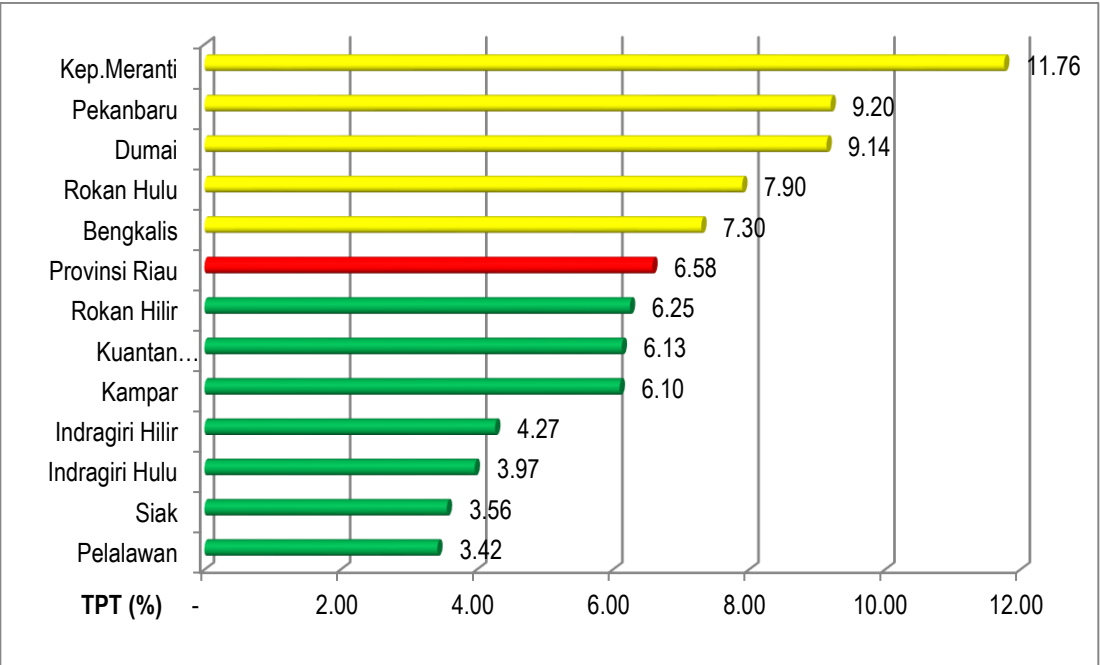
Tabel 2.31:
Persentase Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Kabupaten kota	Kondisi Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja	Pengangguran	TPT	Penduduk Usia Kerja	TPAK	Bukan AK
Kuantan Singingi	137.480,00	8.434,00	6,13	218.594,00	62,89	81.114,00
Indragiri Hulu	175.055,00	6.955,00	3,97	277.694,00	63,04	102.639,00
Indragiri Hilir	292.361,00	12.472,00	4,27	489.750,00	59,70	197.389,00
Pelalawan	172.931,00	5.915,00	3,42	255.766,00	67,61	82.835,00
Siak	175.043,00	6.235,00	3,56	284.834,00	61,45	109.791,00
Kampar	328.545,00	20.028,00	6,10	523.343,00	62,78	194.798,00
Rokan Hulu	239.138,00	18.884,00	7,90	377.390,00	63,37	138.252,00
Bengkalis	257.808,00	18.829,00	7,30	365.097,00	70,61	107.289,00
Rokan Hilir	254.261,00	15.895,00	6,25	411.662,00	61,76	157.401,00
Kep.Meranti	87.386,00	10.273,00	11,76	126.970,00	68,82	39.584,00
Pekanbaru	449.694,00	41.363,00	9,20	733.640,00	61,30	283.946,00
Dumai	125.545,00	11.479,00	9,14	192.380,00	65,26	66.835,00
Provinsi Riau	2.695.247,00	176.762,00	6,56	4.257.120,00	63,31	1.561.873,00

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2016

Sektor penyedia lapangan kerja utama masih sektor pertanian dengan persentase sebesar 46,09% dari total angkatan kerja yang bekerja (Februari 2015), Sektor penyedia lapangan kerja terbesar

kedua dan ketiga sektor jasa yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (16,040%) dan jasa-jasa (19,85%), Ke depan, seiring dengan peningkatan angkatan kerja dan semakin terbatasnya kemampuan sektor pertanian menyerap limpahan tenaga kerja maka upaya pengembangan sektor industri perlu dilakukan yang didukung dengan pelatihan peningkatan skill angkatan kerja.



Gambar 2.52
Tingkat Pengangguran Terbuka Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Angkatan kerja yang bekerja dan menganggur menurut kabupaten/ kota ditunjukkan pada Tabel 2.31. Tingkat pengangguran yang melebihi tingkat pengangguran Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (11,76%) dan terendah Kabupaten Pelalawan (3,42%). Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih disebabkan karena belum berkembangnya dan relatif terisolirnya wilayah Kepulauan Meranti. Sedangkan Pelalawan memiliki beberapa industri besar terutama pengolahan pulp dan papers. Oleh karena itu, upaya penumbuhan kesempatan kerja kedua wilayah ini (Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai) perlu menjadi prioritas. TPT dari terendah hingga tertinggi dapat dilihat pada Gambar 2.52.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga,

2.2.3.1. Seni Budaya

Seni budaya di Provinsi Riau relatif kurang berkembang, Pada tahun 2008, jumlah grup kesenian sebanyak 158 grup, Jumlah grup kesenian ini untuk tahun-tahun berikut relatif tidak terdata, Seni budaya yang terus bertahan di masyarakat antara lain rebana, gebana, kompong dan qasidah, Kurang berkembangnya seni budaya tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, Jumlah gedung kesenian hanya ada enam gedung, satu gedung megah adalah Gedung Idrus Tintin yang berlokasi di Bandar Seni Raja Ali Haji (SERAI) di Kota Pekanbaru, Gedung-gedung lainnya relatif kurang memadai dan perlu rehabilitasi atau pembangunan kembali sehingga mendukung perkembangan seni budaya khususnya seni budaya Melayu.

Jumlah grup seni budaya menurut kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.32 memperlihatkan bahwa jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar, yaitu sebanyak 76 grup diikuti Kabupaten Indragiri Hulu (24 grup), Rokan Hulu (24 grup) dan Kuantan Singingi (10 grup), Jumlah gedung kesenian sebanyak 2 gedung terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Bengkalis yang masing-masingnya sebanyak 1 gedung.

Di Provinsi Riau dan tingkat Kabupaten/Kota terdapat berbagai Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia, Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten/Kota belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh pengurus dan masyarakat, Oleh karena itu, penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu di Riau tersebut.

Begitu juga pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah dari SD sampai SMA/SMK, belum berjalan sesuai dengan perencanaan, baik aspek kurikulum, bahan ajar, guru dan sarana-

prasarana belajar lainnya, Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang dan pelaksanaan sesuai dengan rencana awal.

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu di Riau, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah, belum berjalan sesuai dengan perencanaan bertolak belakang dengan Visi Riau 2025 yaitu *“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”*. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Tabel 2.32:
Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Kuantan Singingi	10	1
2	Indragiri Hulu	24	-
3	Indragiri Hilir	3	1
4	Pelalawan	1	-
5	Siak	2	-
6	Kampar	76	-
7	Rokan Hulu	24	-
8	Rokan Hilir	3	1
9	Bengkalis	3	1
10	Kep,Meranti	3	-
11	Pekanbaru	7	2
12	Dumai	1	-
Jumlah		158	6

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

2.2.3.2. Olahraga

Pada tahun 2012, Provinsi Riau telah menjadi tuan rumah PON VIII dan membangun baru serta memperbaiki beberapa venue untuk penyelenggaraan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan. Venue PON XVIII tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau Tabel 2.33.

Ketersediaan fasilitas gedung venue eks PON XVIII yang dibangun dengan dana besar harus dapat dioptimalkan penggunaannya untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi perlu menjadi perhatian dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahragawan/atlet Riau diperlukan:

- a. Pembinaan calon atlet secara berjenjang dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi untuk semua cabang olahraga;
- b. Meningkatkan peranan Persatuan Cabang Olahraga dengan memberikan bantuan/subsidi biaya operasional, latihan dan kegiatan;
- c. Mengikutsertakan atlet Riau pada berbagai kompetisi cabang olahraga untuk semua jenjang usia dan pendidikan, baik tingkat provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
- d. Memperbanyak kompetisi cabang olahraga untuk semua jenjang usia dan pendidikan, baik tingkat provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
- e. Memberikan bonus dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi;
- f. Memberikan pekerjaan yang layak seperti pengangkatannya sebagai tenaga honorer, guru dan CPNS kepada atlet yang berprestasi.

Tabel 2.33:
Jumlah Fasilitas Olahraga Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Kabupaten Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencat Silat)	Labersa (Golf)	-	-	-
Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-
Kep.Meranti	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion–UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Sepak Bola) 3. SC Rumbai (Hockey) 4. SC Rumbai (Atletic)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olaharaga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina (Renang)

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Provinsi Riau, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan di provinsi Riau telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 8,49 tahun. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan *soft skill* lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun yang diakui cukup sukses.

Pada bidang urusan pendidikan menurut UU 23 tahun 2014, kewenangan provinsi dalam menangani bidang pendidikan yaitu hanya pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK dan MA). Dengan kewenangan ini diharapkan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah akan lebih baik, karena akan lebih fokus dalam penanganannya terutama terkait dengan determinan kinerja bidang pendidikan dan akan lebih lokus terutama terkait dengan wilayah kabupaten kota yang secara relatif tingkat pendidikan menengah atas yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya.

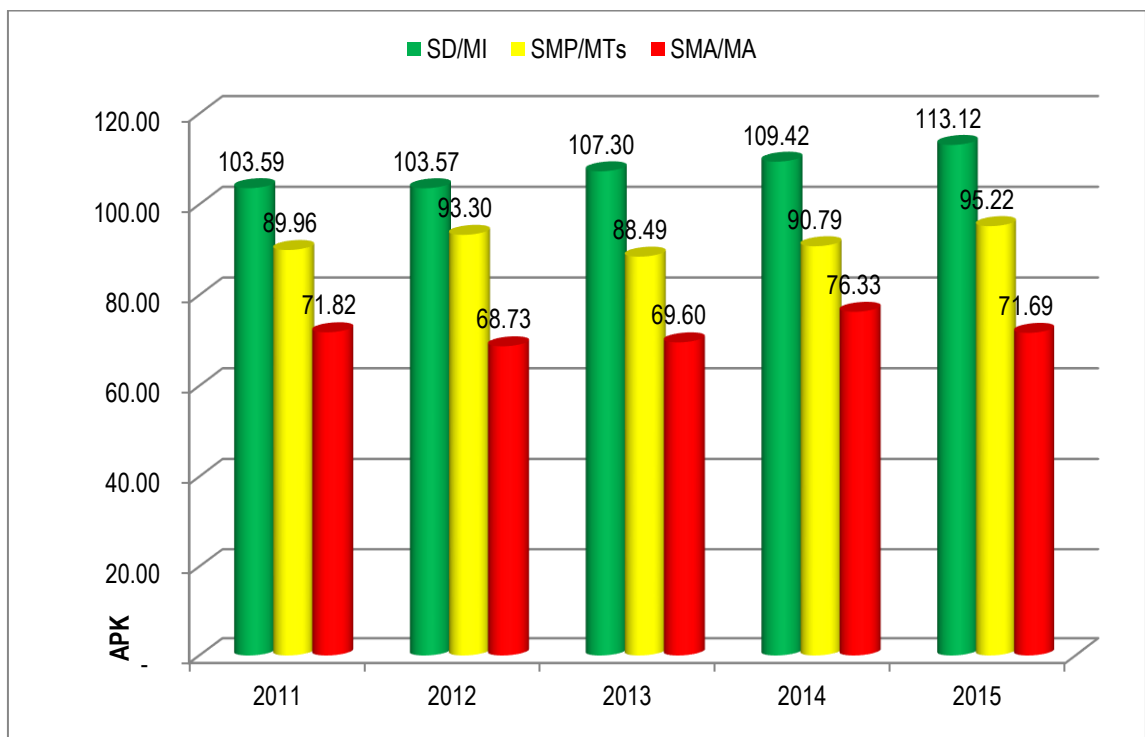
Walaupun kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi Riau hanya mengurus pendidikan jenjang menengah atas,

namun dalam uraian menyangkut bidang urusan pendidikan, akan diberikan gambaran secara umum indikator kinerja bidang pendidikan provinsi Riau mulai dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2011-2015 ditunjukkan pada Gambar 2.53 dengan peningkatan berfluktuatif dengan trend meningkat rata-rata pertumbuhan masing-masingnya sebesar 2,23%, 1,51% dan 0,14% per tahun. Sementara peningkatan APK dari tahun 2011-2014 sebesar masing-masing 9,20%, dan 5,85% serta -0,18%.

Pada tahun 2015 pencapaian APK provinsi Riau, jenjang pendidikan SD/MI sebesar 113,12% lebih baik dibanding pencapaian nasional sebesar 109,05%. Sementara pencapaian APK SMP/MTs provinsi Riau sebesar 95,22% lebih rendah dari Nasional sebesar 100,51% dan APK SMA/SMK/MA provinsi Riau sebesar 71,69% lebih rendah dari APK nasional 75,53%. Berdasarkan angka tersebut dilihat bahwa APK SMP/MTs dan APK SMA/MA provinsi Riau perlu mendapatkan perhatian karena pencapaiannya lebih rendah dibandingkan APK nasional. Meski pencapaian APK SD/MI lebih tinggi dibanding Nasional, namun upaya untuk meningkatkan APK perlu dilakukan dan menjadi prioritas dalam pembangunan SDM ke depan melalui program perbaikan manajemen pendidikan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2015

Gambar 2.53
Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau Tahun 2011-2015

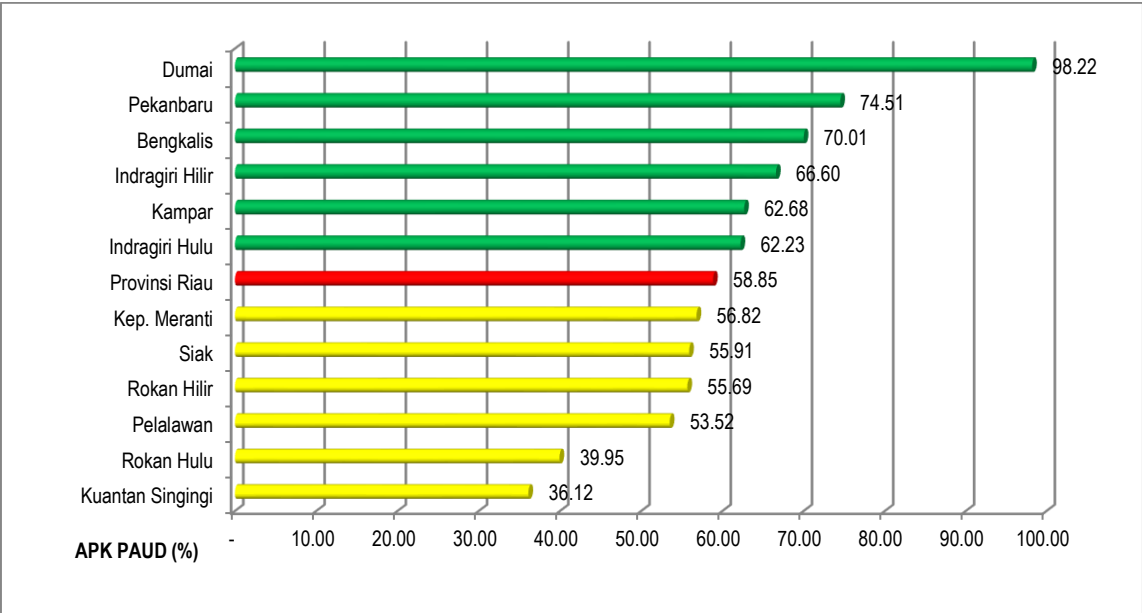
Sementara itu APK PAUD provinsi tahun 2015 menunjukkan kondisi yang masih sangat rendah yaitu hanya 58,85% berbanding nasional yang sudah mencapai 68,10%. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangga menunjukkan bahwa APK PAUD Sumatera Barat sebesar 62,27%, Jambi sebesar 73,35% dan Kepulauan Riau 78,05% serta Sumatera Utara sebesar 68,50%. Dari data tersebut menunjukkan perlunya kerja pemerintah provinsi Riau dalam pendidikan anak secara dini karena APK PAUD terendah di Sumatera.

Tabel 2.34 menjelaskan APK PAUD Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APK di bawah rata-rata provinsi 58,85% sebanyak 6 kabupaten yaitu Kuansing hingga Kep. Meranti dan di atas rata-rata APK provinsi sebanyak 6 kabupaten kota yaitu Inhu hingga Dumai, jelasnya lihat Gambar 2.54.

Tabel 2.34:
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Sederajat Menurut Kabupaten
Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Usia 3-6 th	Siswa				Jumlah Siswa	APK
		TK/RA	TPA	KB	SPS		
Kuantan Singingi	40.725	3.528	18	7.012	4.153	14.711	36,12
Indragiri Hulu	35.502	9.607	103	5.201	7.183	22.094	62,23
Indragiri Hilir	50.853	16.008	35	8.403	9.463	33.909	66,60
Pelalawan	33.046	6.603	127	3.286	7.669	17.685	53,52
Siak	39.138	8.563	139	7.573	5.606	21.881	55,91
Kampar	66.567	16.300	247	13.370	11.806	41.723	62,68
Rokan Hulu	71.742	8.842	615	10.323	8.881	28.661	39,95
Bengkalis	43.714	6.228	74	11.330	12.970	30.602	70,01
Rokan Hilir	58.197	12.688	117	3.784	15.823	32.412	55,69
Kep, Meranti	15.045	3.441	12	3.804	1.291	8.548	56,82
Pekanbaru	73.456	21.389	507	10.962	21.877	54.735	74,51
Dumai	9.515	4.351	107	2.482	2.226	9.346	98,22
Provinsi Riau	537.500	117.548	2.101	87.530	108.948	316.307	58,85
Indonesia							68,10

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



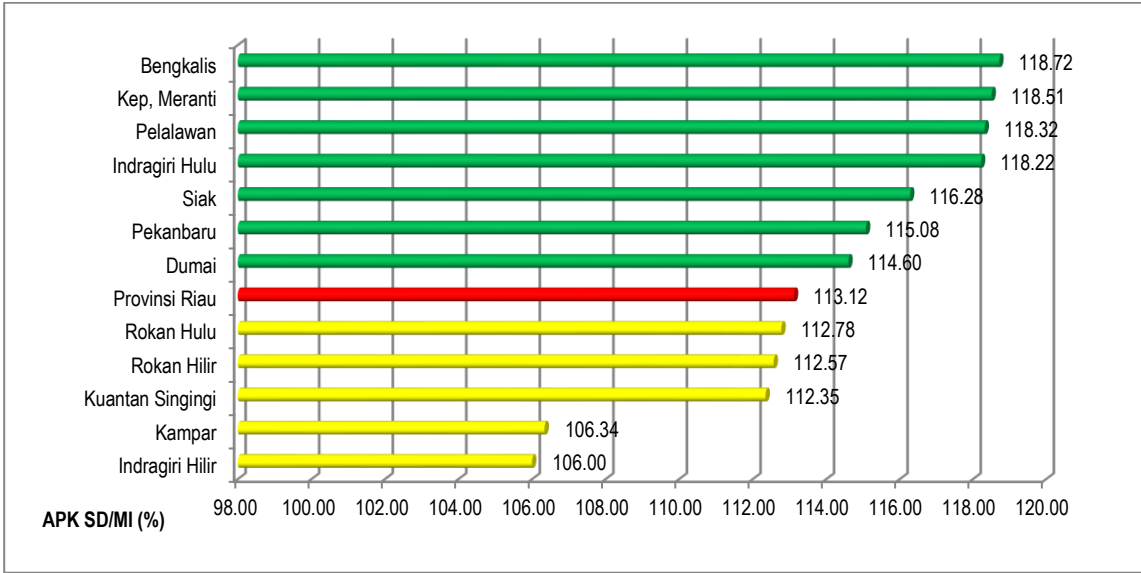
Gambar 2.54
Angka Partisipasi Kasar PAUD Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Tabel 2.35 menjelaskan APK SD/MI Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APK di bawah rata-rata provinsi 113,12% sebanyak 5 kabupaten yaitu Inhil hingga Rokan Hulu dan di atas rata-rata APK provinsi sebanyak 7 kabupaten kota yaitu Dumai hingga Bengkalis, jelasnya lihat Gambar 2.55.

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Menurut Kabupaten
Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 7-12 Th	Siswa				Jumlah	APK (%)
		SD	SDLB	MI	Salafiah		
Kuantan Singingi	37.660	40.563	13	1.735	-	42.311	112,35
Indragiri Hulu	50.106	56.809	78	2.346	-	59.233	118,22
Indragiri Hilir	89.266	78.151	94	16.375	-	94.620	106,00
Pelalawan	42.086	48.962	78	755	-	49.795	118,32
Siak	54.078	60.875	104	1.901	-	62.880	116,28
Kampar	96.162	99.960	140	2.154	-	102.254	106,34
Rokan Hulu	67.752	74.196	103	2.110	-	76.409	112,78
Bengkalis	68.604	77.730	188	3.527	-	81.445	118,72
Rokan Hilir	82.933	84.268	50	8.988	51	93.357	112,57
Kep, Meranti	20.048	22.586	87	1.085	-	23.758	118,51
Pekanbaru	103.503	113.883	451	4.327	455	119.116	115,08
Dumai	33.272	36.842	219	1.020	49	38.130	114,60
Provinsi Riau	745.470	794.825	1.605	46.323	555	843.308	113,12
Indonesia							109,05

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



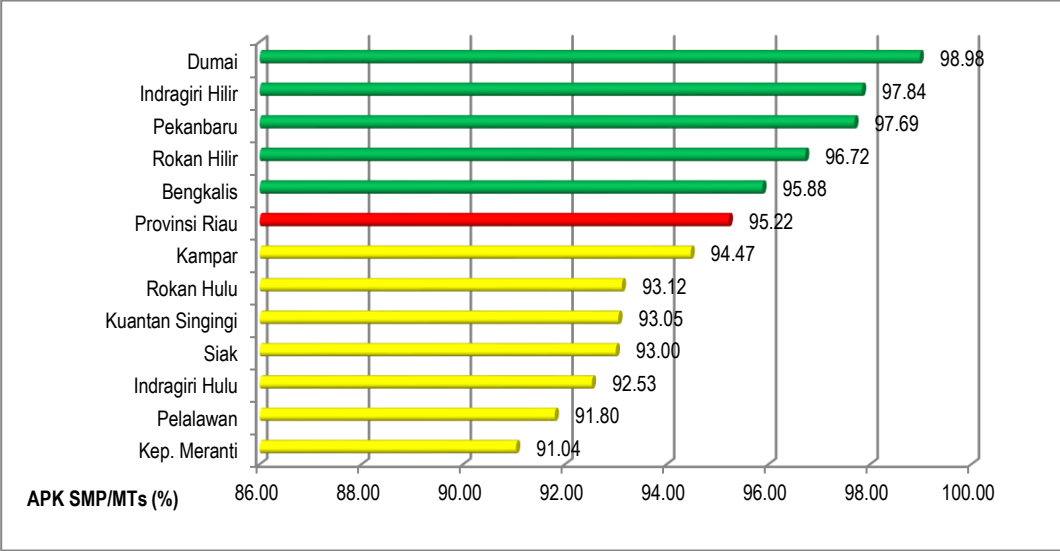
Gambar 2.55
Angka Partisipasi Kasar SD/MI Per Kabupaten Kota Provinsi Riau
Tahun 2015

Tabel 2.36 menjelaskan APK SMP/MTs Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APK di bawah rata-rata provinsi 95,22% sebanyak 7 kabupaten yaitu Kep. Meranti hingga Kampar dan di atas rata-rata APK provinsi sebanyak 5 kabupaten kota yaitu Bengkalis - Dumai, jelasnya lihat Gambar 2.56.

Tabel 2.36:
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 13-15 Th	Jumlah Siswa					Jumlah Siswa	APK (%)
		SMP	SMPLB	MTs	Paket B	Salafiah		
Kuantan Singingi	17.422	12.712	-	3.499	-	-	16.211	93,05
Indragiri Hulu	23.642	16.606	15	4.756	500	-	21.877	92,53
Indragiri Hilir	34.899	18.832	13	15.300	-	-	34.145	97,84
Pelalawan	18.004	13.489	10	3.029	-	-	16.528	91,80
Siak	26.397	20.880	31	3.639	-	-	24.550	93,00
Kampar	43.403	28.595	18	11.825	-	564	41.002	94,47
Rokan Hulu	28.891	20.644	24	6.039	-	197	26.904	93,12
Bengkalis	34.530	25.990	49	7.070	-	-	33.109	95,88
Rokan Hilir	40.322	24.844	4	12.138	1.928	87	39.001	96,72
Kep, Meranti	11.024	6.436	9	3.591	-	-	10.036	91,04
Pekanbaru	52.277	41.401	93	8.413	-	1.160	51.067	97,69
Dumai	15.039	11.978	26	2.771	-	111	14.886	98,98
Provinsi Riau	345.850	242.407	292	82.070	2.428	2.119	329.316	95,22
Indonesia								100,51

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



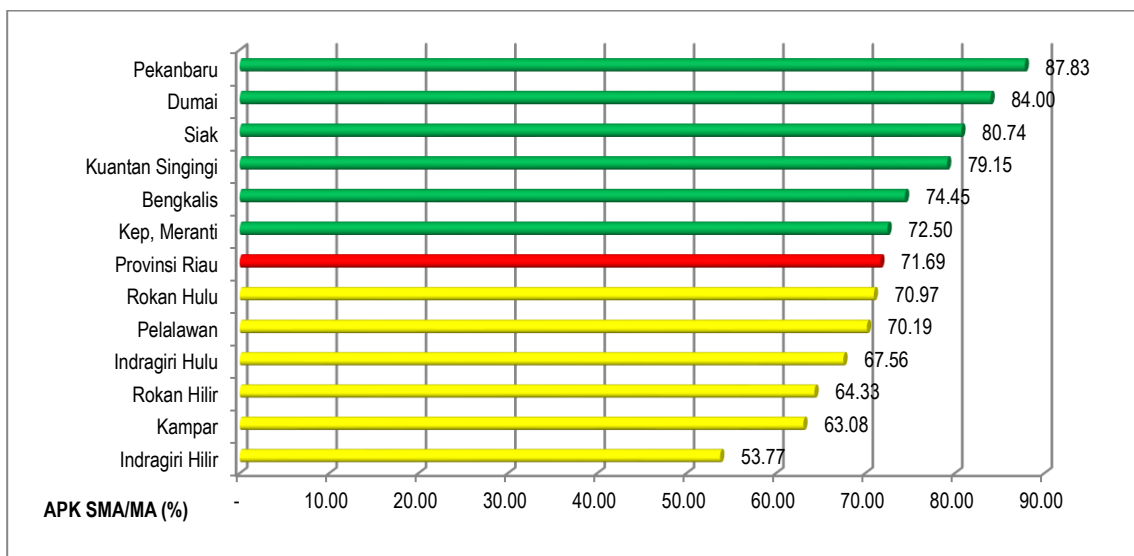
Gambar 2.56
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Tabel 2.37 menjelaskan APK SMA/MA Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APK di bawah rata-rata provinsi 71,69% sebanyak 6 kabupaten yaitu Inhil – Rokan Hulu dan di atas rata-rata APK provinsi sebanyak 6 kabupaten kota yaitu Kep. Meranti – Pekanbaru, jelasnya lihat Gambar 2.57

Tabel 2.37:
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Sederajat
Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 16-18 Th	Jumlah Siswa					Jumlah Siswa	APK (%)
		SMA	SMALB	MA	SMK	Paket C		
Kuantan Singingi	16.199	7.008	-	1.413	3.863	537	12.821	79,15
Indragiri Hulu	22.200	7.050	-	1.885	5.626	438	14.999	67,56
Indragiri Hilir	42.756	10.895	10	6.553	3.780	1.754	22.992	53,77
Pelalawan	17.267	6.532	-	286	4.279	1.022	12.119	70,19
Siak	23.635	10.351	-	1.130	6.482	1.121	19.084	80,74
Kampar	41.343	16.697	3	4.648	4.546	187	26.081	63,08
Rokan Hulu	26.582	8.939	14	1.346	6.933	1.632	18.864	70,97
Bengkalis	37.082	17.605	26	2.693	4.889	2.395	27.608	74,45
Rokan Hilir	41.796	17.155	-	2.906	5.491	1.334	26.886	64,33
Kep, Meranti	11.298	5.143	-	1.384	1.664	-	8.191	72,50
Pekanbaru	57.878	21.954	18	3.114	24.817	930	50.833	87,83
Dumai	15.134	5.645	10	785	5.601	671	12.712	84,00
Provinsi Riau	353.170	134.974	81	28.143	77.971	12.021	253.190	71,69
Indonesia								75,53

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



Gambar 2.57
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK
Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

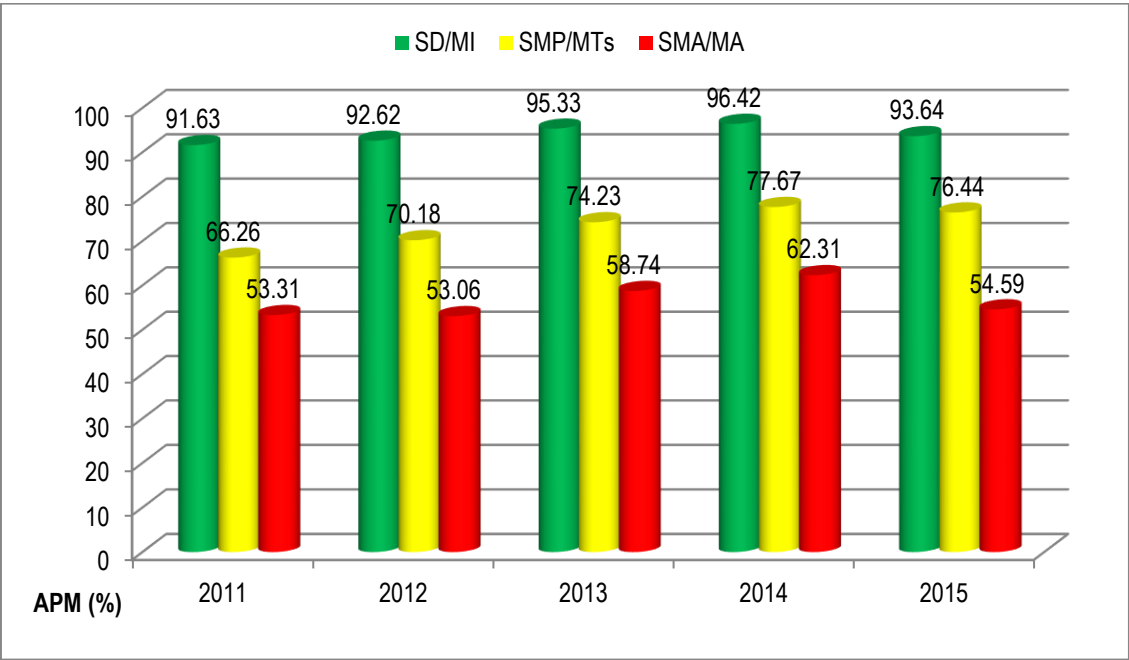
Berdasarkan data 2015, APK Riau terus meningkat, APK PAUD Riau 58,85%; APK Nasional 68,10%, berarti lebih rendah dari APK Nasional 9,25%, APK SD/MI 113,12%; APK Nasional 109,05%, berarti lebih tinggi dari APK Nasional 4,07%. APK SD/MI provinsi Riau 113,12% berarti terdapat 13,12% (97.838 orang) penduduk yang sedang bersekolah diluar usia sekolah baik yang berumur lebih muda atau lebih tua dari usia sekolah. APK SMP/MTs 95,22%; APK Nasional 100,51%, berarti lebih rendah dari APK Nasional 5,29%. Manakala APK SMA/MA/SMK 71,69%; APK Nasional 75,53%, berarti lebih rendah dari APK Nasional 3,84%, APK bidang Pendidikan Riau yang lebih tinggi daripada APK Nasional hanya APK SD/MI, sedangkan APK PAUD, SMP/MTs dan APK SMA/MA/SMK lebih rendah dari APK Nasional.

Jika diamati lebih mendalam, tingginya APK suatu jenjang pendidikan membuktikan ketidakpatuhan dalam menjalankan dan mematuhi SPM berkaitan dengan usia sekolah. Untuk mematuhi SPM berkaitan dengan usia sekolah maka di perlukan program sosialisasi wajib belajar kepada masyarakat sesuai dengan usia sekolah. Kecepatan atau keterlambatan dalam mengikuti pendidikan sesuai dengan usia sekolah menandakan pelaksanaan SPM yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang kurang atau belum efektif kepada masyarakat. Dari satu sisi tingginya APK juga dapat menggambarkan tingginya angka partisipasi sekolah tetapi secara manajerial membuktikan masih lemahnya manajemen pendidikan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Riau perlu melakukan intervensi untuk memperbaiki manajemen pendidikan sesuai SPM untuk setiap kabupaten kota, agar sumber daya manusia daerah ini memiliki kesetaraan dalam pendidikan melalui pelayanan dengan program penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan manajemen pendidikan sesuai SPM.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah. Perkembangan APM pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2011-2015 di Provinsi Riau. Selama periode 2011-2015 trend APM ditingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA mengalami perkembangan yang berfluktuatif dengan trend peningkatan. Perkembangan APM semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.58.



Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015

Gambar 2.58
Angka Partisipasi Murni Provinsi Riau Tahun 2011–2015

APM jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2011 sebesar 91,63% dan meningkat menjadi 93,64% pada tahun 2015 dan tahun 2014 merupakan tingkat pencapaian tertinggi. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan APM untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,57% per tahun, SMP/MTs sebesar 3,68% per tahun, dan SMA/MA

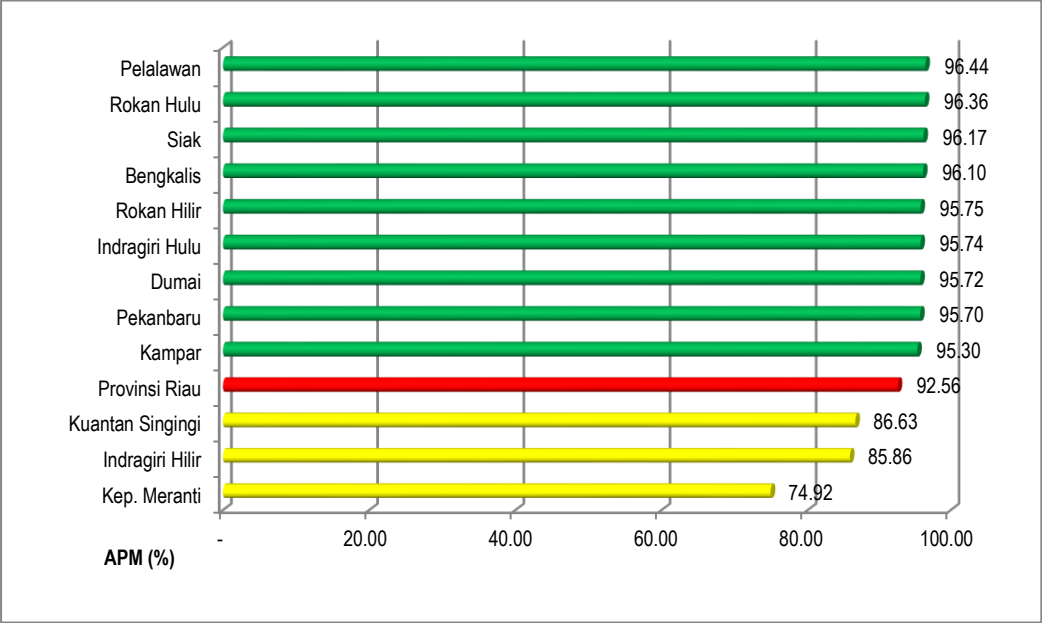
sebesar 0,98% per tahun. Sementara peningkatan APM dari tahun 2011 ke 2014 untuk tiap jenjang pendidikan masing-masing sebesar 2,19%, 15,36% dan 2,40%. Tingginya peningkatan APM jenjang pendidikan SMP/MTs di provinsi Riau menunjukkan adanya keberhasilan dalam program wajib belajar 9 tahun. Namun keberhasilan tersebut masih belum mampu persyaratan yang diatur dalam SPM memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya sesuai dengan usia sekolah. APM SMP/MTs sebesar 76,44% menunjukkan masih terdapat sekitar 23,56% penduduk yang bersekolah belum sesuai dengan usia sekolah dan bahkan sebagian diantaranya tidak sekolah atau putus sekolah.

Tabel 2.38 menjelaskan APM SD/MI Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APM di bawah rata-rata provinsi 92,56% sebanyak 3 kabupaten yaitu Kep. Meranti, Inhil dan Kuansing dan di atas rata-rata APM provinsi sebanyak 9 kabupaten kota yaitu Kampar – Pelalawan, jelasnya lihat Gambar 2.59.

Tabel 2.38:
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Menurut
Kabupaten Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 7-12 Th	Siswa				Jumlah	APM (%)
		SD	SDLB	MI	Salafiah		
Kuantan Singingi	37.660	30.963	6	1.655	-	32.624	86,63
Indragiri Hulu	50.106	45.783	36	2.152	-	47.971	95,74
Indragiri Hilir	89.266	62.402	46	14.193	-	76.641	85,86
Pelalawan	42.086	39.862	37	689	-	40.588	96,44
Siak	54.078	50.172	50	1.783	-	52.005	96,17
Kampar	96.162	89.559	60	2.028	-	91.647	95,30
Rokan Hulu	67.752	63.353	48	1.882	-	65.283	96,36
Bengkalis	68.604	62.605	86	3.239	-	65.930	96,10
Rokan Hilir	82.933	71.194	23	8.164	31	79.412	95,75
Kep. Meranti	20.048	13.961	40	1.018	-	15.019	74,92
Pekanbaru	103.503	94.697	192	3.892	274	99.055	95,70
Dumai	33.272	30.840	85	896	28	31.849	95,72
Provinsi Riau	745.470	655.391	709	41.591	333	698.024	92,56
Indonesia							93,53

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



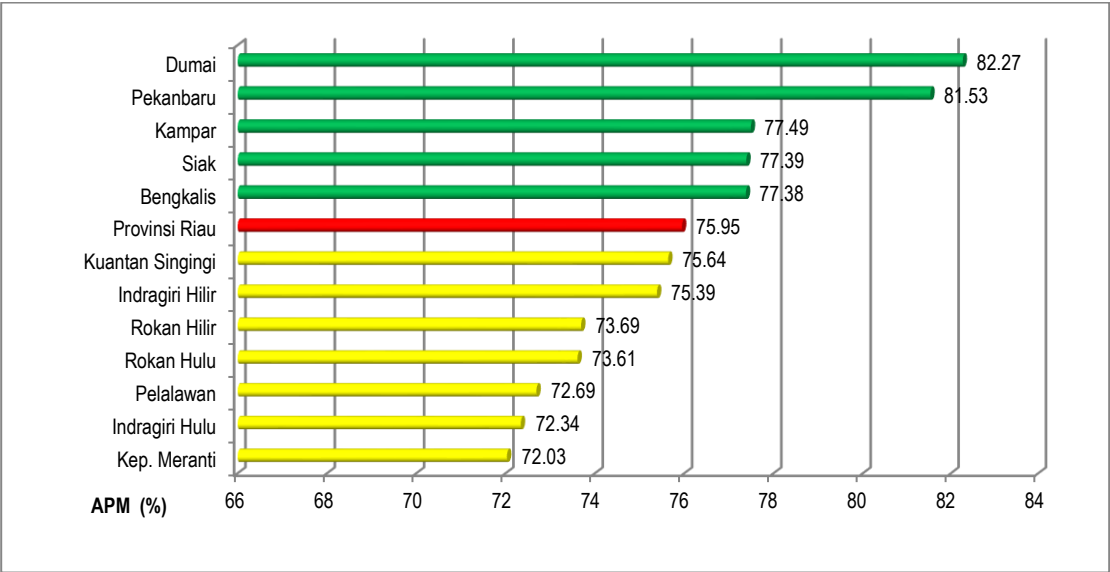
Gambar 2.59
Angka Partisipasi Murni SDS/MI Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Tabel 2.39 menjelaskan APM SMP/MTs Per Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APM di bawah rata-rata provinsi 92,56% sebanyak 7 kabupaten yaitu Kep. Meranti - Kuansing dan di atas rata-rata APM provinsi sebanyak 5 kabupaten kota yaitu Bengkalis – Dumai, jelasnya lihat Gambar 2.60.

Tabel 2.39:
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat Kabupaten/Kota
Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 13-15 Th	Jumlah Siswa					Jumlah Siswa	APM (%)
		SMP	SMPL B	MTs	Paket B	Salafiah		
Kuantan Singingi	17.422	10.281	-	2.897	-	-	13.178	75,64
Indragiri Hulu	23.642	13.322	7	3.746	27	-	17.102	72,34
Indragiri Hilir	34.899	14.874	6	11.431	-	-	26.311	75,39
Pelalawan	18.004	10.772	5	2.311	-	-	13.088	72,69
Siak	26.397	17.511	15	2.902	-	-	20.428	77,39
Kampar	43.403	23.733	8	9.549	-	341	33.631	77,49
Rokan Hulu	28.891	16.460	11	4.682	-	113	21.266	73,61
Bengkalis	34.530	20.880	23	5.815	-	-	26.718	77,38
Rokan Hilir	40.322	19.924	2	9.735	-	52	29.713	73,69
Kep. Meranti	11.024	4.990	4	2.947	-	-	7.941	72,03
Pekanbaru	52.277	34.876	41	6.975	-	730	42.622	81,53
Dumai	15.039	10.036	10	2.258	-	69	12.373	82,27
Provinsi Riau	345.850	97.659	132	65.248	27	1.305	54.371	75,95
Indonesia								80.76

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



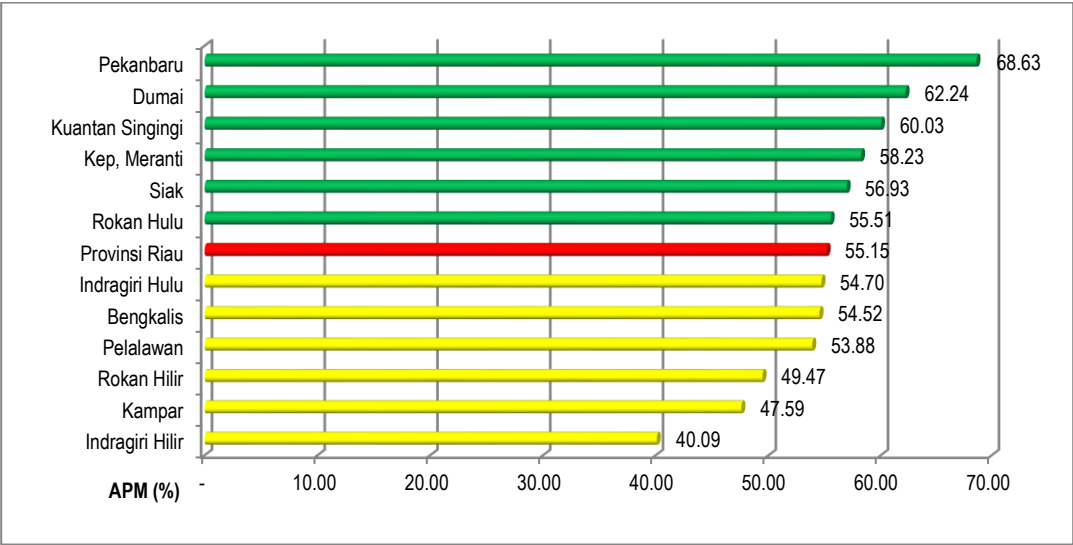
Gambar 2.60
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015

Tabel 2.40 menjelaskan APM SMA/MAPer Kabupaten Kota Tahun 2015 dapat dilihat kabupaten yang memiliki APM di bawah rata-rata provinsi 55,15% sebanyak 6 kabupaten yaitu Inhil – Inhu dan di atas rata-rata APM provinsi sebanyak 6 kabupaten kota yaitu Rokan Hulu – Pekanbaru, jelasnya lihat Gambar 2.61.

Tabel 2.40:
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015

Kabupaten Kota	Penduduk Usia 16-18 Th	Jumlah Siswa					Jumlah Siswa	APM (%)
		SMA	SMAL B	MA	SMK	Paket C		
Kuantan Singingi	16.199	5.275	-	1.165	3.059	226	9.725	60,03
Indragiri Hulu	22.200	5.754	2	1.433	4.730	224	12.143	54,70
Indragiri Hilir	42.756	8.683	-	4.931	2.999	526	17.139	40,09
Pelalawan	17.267	5.428	-	208	3.457	211	9.304	53,88
Siak	23.635	7.683	-	853	4.703	216	13.455	56,93
Kampar	41.343	12.582	4	3.636	3.330	124	19.676	47,59
Rokan Hulu	26.582	7.743	1	1.032	5.558	422	14.756	55,51
Bengkalis	37.082	13.856	6	2.104	3.767	485	20.218	54,52
Rokan Hilir	41.796	13.300	-	2.299	4.681	396	20.676	49,47
Kep, Meranti	11.298	4.244	-	1.069	1.266	-	6.579	58,23
Pekanbaru	57.878	17.986	24	2.707	18.769	234	39.720	68,63
Dumai	15.134	4.236	5	634	4.283	261	9.419	62,24
Provinsi Riau	353.170	106.770	42	22.071	60.602	3.325	192.810	54,59
Indonesia								57,15

Sumber: APK/APM Nasional PAUD, SD, SMP dan SMA, Kemendikbud Tahun 2015



Gambar 2.61
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014/2015

Berdasarkan data terakhir (2015), APM Riau terus meningkat, APM SD/MI 93,64%; APM Nasional 93,53%, berarti lebih tinggi dari APM Nasional 0,11%, APM SMP/MTs 76,53%; APM Nasional 80,76%, berarti lebih rendah dari APM Nasional 4,23%, Manakala APM SMA/MA/SMK 54,59; APM Nasional 57,15%, berarti lebih rendah dari APM Nasional 2,56%, Sebagaimana APK bidang Pendidikan Riau, APM yang lebih tinggi daripada APM Nasional hanya APM SD/MI, sedangkan APM SMP/MTs dan APM SMA/MA/SMK lebih rendah dari APK Nasional, Oleh karena itu, perlu intervensi Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan APM dan sumber daya manusia Riau, terutama di beberapa kabupaten,

Dari APK dan APM Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang perlu intervensi Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Tingkat PAUD adalah Kabupaten yang APK-nya di bawah APK Provinsi Riau seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, dan Kepulauan Meranti;
2. Tingkat SD/MI adalah Kabupaten yang APK/APM-nya di bawah APK/APM-nya Provinsi Riau/Indonesia seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi;
3. Tingkat SMP/MTs adalah Kabupaten yang APK/APM-nya di bawah APK/APM-nya di bawah Provinsi Riau/Indonesia seperti Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Rokan Hilir;

4. Tingkat SMA/MA/SMK adalah Kabupaten yang APK/APM-nya di bawah APK/APM-nya di bawah Provinsi Riau/Indonesia seperti Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Rokan Hulu,

c. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Berdasarkan pada Tabel 2.41 dapat dilihat bahwa ketersediaan gedung sekolah (ruang kelas) setingkat SD/MI meningkat dari 23.549 RK (ruang kelas) pada tahun 2011 menjadi 29.946 RK pada tahun 2015 dengan rasio jumlah Siswa per kelas yang semakin membaik dari 28 orang pada tahun 2011 membaik menjadi 25 orang per kelas pada tahun 2015. Kinerja ini sangat baik karena sudah melampaui SPM jumlah Siswa per kelas sebanyak ≤ 32 orang artinya Riau sudah melebihi dari SPM.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP/MTs jumlah ruang kelas mengalami penurunan dari 10.019 RK pada tahun 2011 menjadi 8.888 RK pada tahun 2015 dengan rasio jumlah siswa per kelas bertambah dari 24 orang pada tahun 2011 menjadi 39 orang pada tahun 2015 artinya terjadinya peningkatan beban ruang kelas yang melebihi SPM jumlah siswa per kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak ≤ 36 orang per ruang kelas. Artinya pada tahun 2015 setiap ruang menampung jumlah siswa lebih dari SPM 36 orang per kelas. Walaupun kondisi dilapangan masih dapat diatasi oleh pengelola sekolah dengan melaksanakan pergiliran waktu dengan waktu masuk sekolah (Pagi dan Siang).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA/MA jumlah ruang kelas mengalami peningkatan dari 5.888 RK pada tahun 2011 menjadi 7.921 RK pada tahun 2015 dengan rasio jumlah siswa per kelas bertambah dari 42 orang pada tahun 2011 menjadi 45 orang pada tahun 2015 artinya terjadinya peningkatan beban ruang kelas yang melebihi SPM jumlah siswa per kelas untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak ≤ 39 orang per ruang kelas.

Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius oleh kabupaten kota terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan oleh provinsi untuk tingkat pendidikan SMA/SMK dan MA. Tindakan penanganan yang lebih serius dan segera dalam beberapa tahun

kedepan, mengingat masih kurangnya ruang kelas sesuai dengan SPM sehingga berakibat padasulit dan mahalnya biaya pendidikan karena kekurangan sekolah dan ruang kelas sebagian disediakan oleh pihak swasta. Sehingga masyarakat agak kesulitan untuk memasukkan anaknya sekolah karenaketerbatasan kemampuan orang tua siswa.

Dari satu sisi penyediaan sekolah dan ruang kelas oleh pihak swasta telah memberikan dampak yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan ruang kelas dan peningkatan kualitas pendidikan terutama aspek muatan kurikulum, namun kondisi itu hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat dengan golongan pendapatan tinggi, karena biaya pembangunan sekolah dan ruang kelas serta sarana dan prasarana lainnya menjadi beban orang tua wali murid. Perkembangan ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41:
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Riau Tahun 2011–2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					Pertum buhan (%/Tahun)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	SD/MI						
1.1.	Gedung Sekolah (Ruang Kelas)	23.549	22.875	31.494	30.443	30.377	7,82
1.2.	Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	656.960	735.413	704.912	734.700	745.470	3,37
1.3.	Rasio	28	32	22	25	25	1,41
2	SMP/MTs						
2.1.	Gedung Sekolah (Ruang Kelas)	10.019	8.577	7.613	8.739	8.816	(2,49)
2.2.	Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	236.210	242.341	284.623	339.800	345.850	10,30
2.3.	Rasio	24	28	37	39	39	14,26
3	SMA/MA						
3.1	Gedung Sekolah (Ruang Kelas)	5.888	5.957	5.785	7.503	7.921	8,39
3.2	Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	248.183	262.600	277.004	335.700	353.170	9,42
3.3	Rasio	42	44	48	45	45	1,57

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Rasio ruang kelas baik SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK dan MA seluruhnya mengalami peningkatan rasio. Artinya terjadi peningkatan beban kelas setiap tahun masing-masing dengan pertumbuhan 1,41%, 14,26% dan 1,57%. Oleh karena itu Program peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan kegiatan penambahan jumlah sekolah (ruang

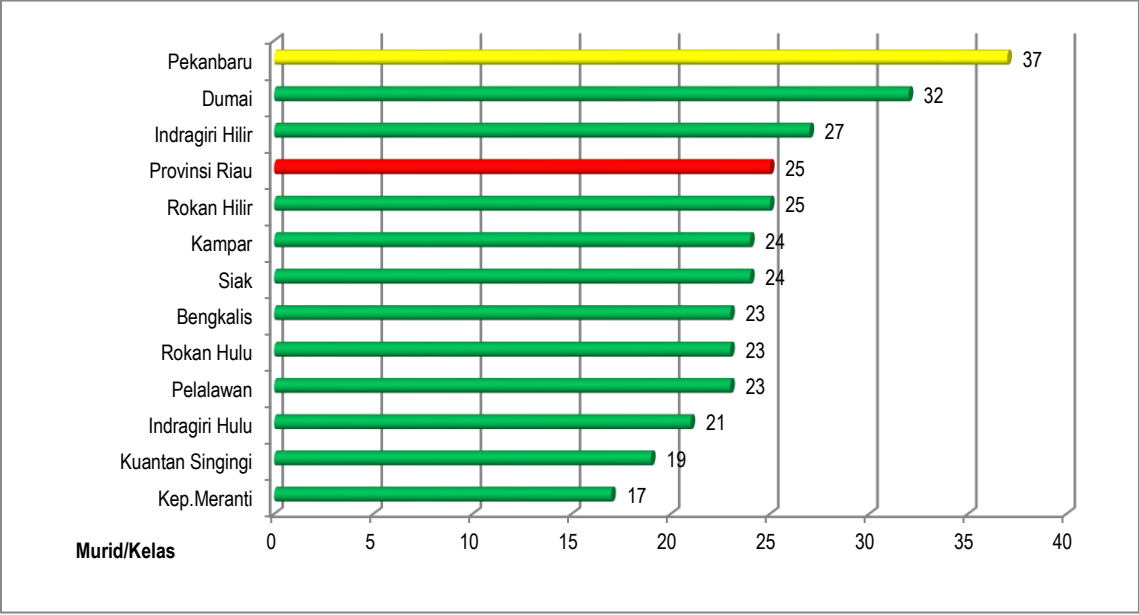
kelas) perlu mendapatkan prioritas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs oleh pemerintahan kabupaten Kota dan SMA/MA oleh pemerintah provinsi Riau.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas diharapkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan pendidikan menengah atas terkait dengan kekurangan ruang kelas secara umum, ketimpangan kekurangan ruang kelas antara kabupaten kota akan dapat teratasi dalam beberapa tahun kedepan pada periode 2017-2019.

Berdasarkan pada Gambar 2.62 hanya kabupaten Kepulauan Meranti yang mencukupi kebutuhan ruang kelas mengikut jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun selebihnya mengalami kekurangan.

Tabel 2.42:
Ketersediaan Sekolah (Ruang Kelas) dan Penduduk Usia Sekolah Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

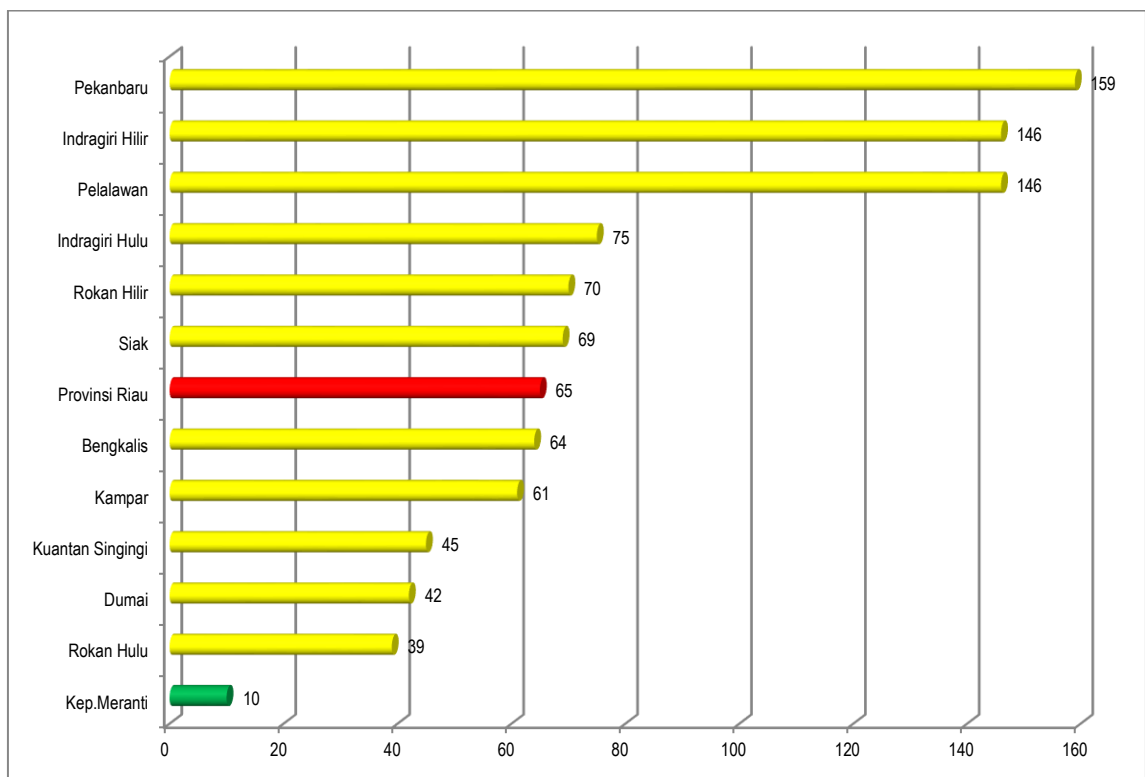
Kabupaten kota	Kondisi Pendidikan								
	Penduduk Usia 7-12	Jumlah Ruang Kelas	Rasio	Penduduk Usia 13-15	Jumlah Ruang Kelas	Rasio	Penduduk Usia 16-18	Jumlah Ruang Kelas	Rasio
Kuantan Singingi	37.660	1.940	19	17.422	598	29	16.199	363	45
Indragiri Hulu	50.106	2.387	21	23.642	604	39	22.200	296	75
Indragiri Hilir	89.266	3.351	27	34.899	773	45	42.756	293	146
Pelalawan	42.086	1.849	23	18.004	439	41	17.267	118	146
Siak	54.078	2.252	24	26.397	785	34	23.635	344	69
Kampar	96.162	3.980	24	43.403	1.050	41	41.343	680	61
Rokan Hulu	67.752	2.917	23	28.891	821	35	26.582	680	39
Bengkalis	68.604	2.941	23	34.530	966	36	37.082	577	64
Rokan Hilir	82.933	3.254	25	40.322	937	43	41.796	598	70
Kep.Meranti	20.048	1.210	17	11.024	270	41	11.298	1109	10
Pekanbaru	103.503	2.809	37	52.277	1.285	41	57.878	364	159
Dumai	33.272	1.056	32	15.039	360	42	15.134	363	42
Provinsi Riau	745.470	29.946	25	345.850	8.888	39	353.170	5.422	65



Gambar 2.62
Jumlah Penduduk Usia 7-12/Kelas Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015



Gambar 2.63
Jumlah Penduduk Usia 13-15/Kelas Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015



Gambar 2.64
Jumlah Penduduk Usia 16-18/ Kelas Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Berdasarkan pada pada gambar 2.62 menunjukkan hanya Kota Pekanbaru yang memerlukan penambahan ruang kelas untuk tingkat SD/MI karena jumlah murid perkelas sudah melebihi SPM atau sebanyak 37 orang per kelas sedangkan menurut SPM maksimal 32 orang. Sedangkkn untuk SMP/MTs hanya ada empat kabupaten yang telah memenuhi SPM yaitu Bengkalis, Rokan Hulu, Siak dan Kuansing dan selebihnya mengalami kekurangan. Oleh karena itu pemerintah proivinsi harus melakukan kordinasi dengan kabupaten kota untuk menangani kondisi tersebut, lihat Gambar 2.63.

Sementara itu, jumlah sekolah dan siswa yang terdaftar di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2015 sebagai berikut: jumlah TK berjumlah 4,414 sekolah dengan Siswa berjumlah 56,970 orang dan rasio Siswa dengan sekolah 37,67. Jumlah SD sebanyak 3.510 sekolah dengan jumlah siswa 769.031 orang dan rasio Siswa dengan sekolah 219,09. Sedangkan jumlah SMP di Riau 1.032 sekolah dengan jumlah siswa 222.816 orang dan rasio Siswa dengan sekolah 215,90. Disisi lain jumlah SMA di provinsi Riau 663 sekolah dengan jumlah siswa 192.616 orang dan rasio Siswa dengan sekolah 296,55.

d. Rasio Antara Jumlah Siswa dan Guru

Rasio antara jumlah siswa terhadap jumlah guru tingkat SD/MI mengalami perbaikan dari 16,59 pada tahun 2011 meningkat menjadi 15,53 pada tahun 2015. Kondisi ini sudah melebihi rasio SPM yaitu sebanyak 32 Siswa untuk 1 guru. Peningkatan rasio guru ini ditunjang oleh peningkatan pertumbuhan jumlah guru sebesar 4,35% per tahun dan melebihi pertumbuhan jumlah siswa yang hanya 2,42% per tahun.

Kondisi yang relatif sama terjadi pada SMP/MTs, dimana rasio antara siswa terhadap guru pada tahun 2011 yaitu sebanyak 13,49 dan mengalami penurunan rasio menjadi 16,90 pada tahun 2015 atau mengalami pengurangan sebesar 8,27% dan kondisi ini masih baik karena sudah melebihi SPM dimana rasio standar sebanyak 36 Siswa untuk 1 guru.

Sementara itu rasio antara jumlah siswa terhadap jumlah guru tingkat SMA/MA mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan perbaikan rasio sebesar 3,75% per tahun atau mengalami perbaikan dari 13,15 pada tahun 2011 meningkat menjadi 15,78 pada tahun 2015. Kondisi ini walaupun mengalami pengurangan rasio tetapi masih melebihi rasio SPM sebanyak 39 Siswa untuk 1 guru. Penurunan rasio guru ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah guru hanya sebesar 9,28% per tahun sedangkan siswa tumbuh sebesar 16,62% per tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru pada semua jenjang pendidikan tidak mengalami permasalahan dari sisi rasio terhadap jumlah siswa, melainkan distribusinya yang tidak merata baik antara wilayah maupun antara sekolah, dimana guru banyak terkonsentrasi diperkotaan dan relatif kurang di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil. Sementara antara sekolah juga terjadi hal yang sama. Oleh karena itu, upaya penyebaran/pemerataan guru diwilayah terpencil/terisolir dan antara sekolah perlu dilakukan agar kualitas pendidikan lebih merata.

Tabel 2.43:
Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					Pertumbuhan Pertahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	46.767	41.831	47.407	54.566	54.297	4,35
1.2	Jumlah Siswa	775.851	787.851	711.522	794.825	843.308	1,16
1.3	Rasio	16,59	18,83	15,01	14,57	15,53	(0,78)
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru	19.606	14.959	16.882	21.317	19.491	1,71
2.2	Jumlah Siswa	264.552	203.455	230.202	242.407	329.316	7,80
2.3	Rasio	13,49	13,60	13,64	11,37	16,90	8,27
3	SMA/MA						
3.1	Jumlah Guru	12.102	11.955	13.020	18.703	16.045	9,28
3.2	Jumlah Siswa	159.190	194.783	198.677	212.945	253.240	12,62
3.3	Rasio	13,15	16,29	15,26	11,39	15,78	7,68

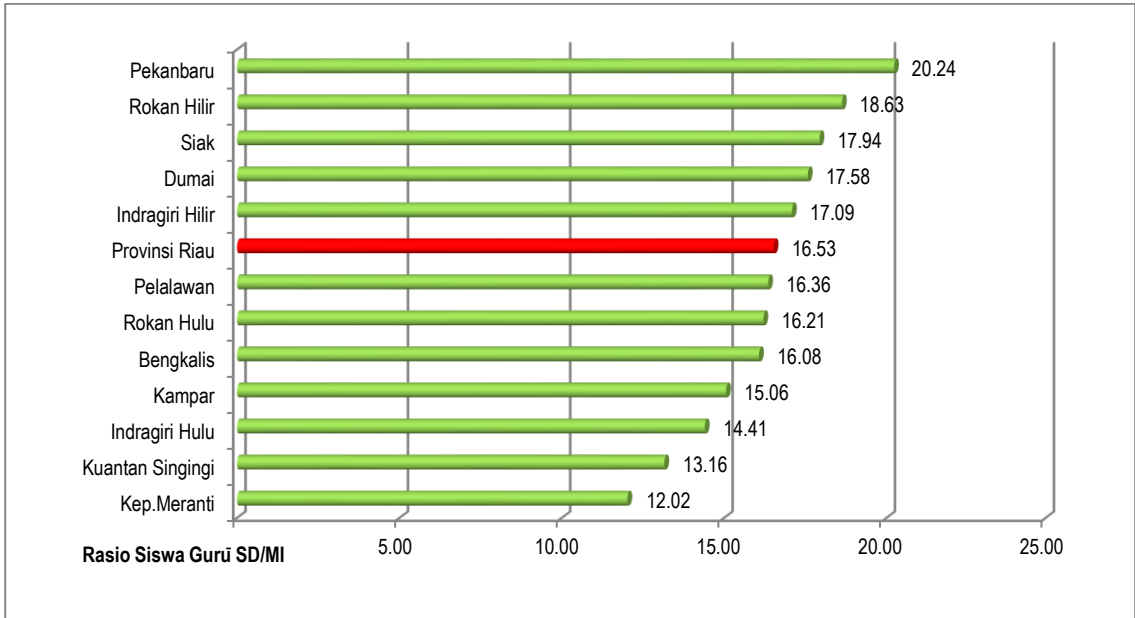
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Jumlah siswa dan guru yang terdata di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau berdasarkan Tabel 2.43 Jumlah siswa SD 843.308, jumlah guru 51,021 orang dan rasio Siswa dengan guru sebesar 16,53. Sedangkan jumlah siswa SMP 329,316 orang, jumlah guru 18,262 orang dan rasio siswa dengan guru sebesar 18,03. Manakala jumlah siswa SMA 253,240 orang, jumlah guru sebanyak 17,289 orang dan rasio siswa dengan guru sebesar 14,65.

Tabel 2.44:
Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten kota	Jenjang Pendidikan								
	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio
Kuantan Singingi	3.215	42.311	13.16	1.381	16.211	11,74	1.167	12.821	10 ,99
Indragiri Hulu	4.111	59.233	14.41	1.130	21.877	19,36	1.015	14.999	14 ,78
Indragiri Hilir	5.536	94.620	17.09	1.267	34.145	26,95	1.167	22.992	19 ,70
Pelalawan	3.044	49.795	16.36	1.040	16.528	15,89	957	12.119	12 ,66
Siak	3.505	62.880	17.94	1.516	24.550	16,19	1.282	19.084	14 ,89
Kampar	6.789	102.254	15.06	2.520	41.002	16,27	1.841	26.081	14 ,17
Rokan Hulu	4.713	76.409	16.21	1.680	26.904	16,01	1.437	18.864	13 ,13
Bengkalis	5.066	81.445	16.08	1.872	33.109	17,69	1.830	27.608	15 ,09
Rokan Hilir	5.011	93.357	18.63	1.720	39.001	22,68	1.616	26.886	16 ,64
Kep.Meranti	1.976	23.758	12.02	625	10.036	16,06	552	8.191	14 ,84
Pekanbaru	5.886	119.116	20.24	2.747	51.067	18,59	3.561	50.883	14 ,29
Dumai	2.169	38.130	17.58	764	14.886	19,48	873	12.712	14 ,56
Provinsi Riau	51.021	843.308	16.53	18.262	329.316	18,03	17.289	253.240	14 ,65

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

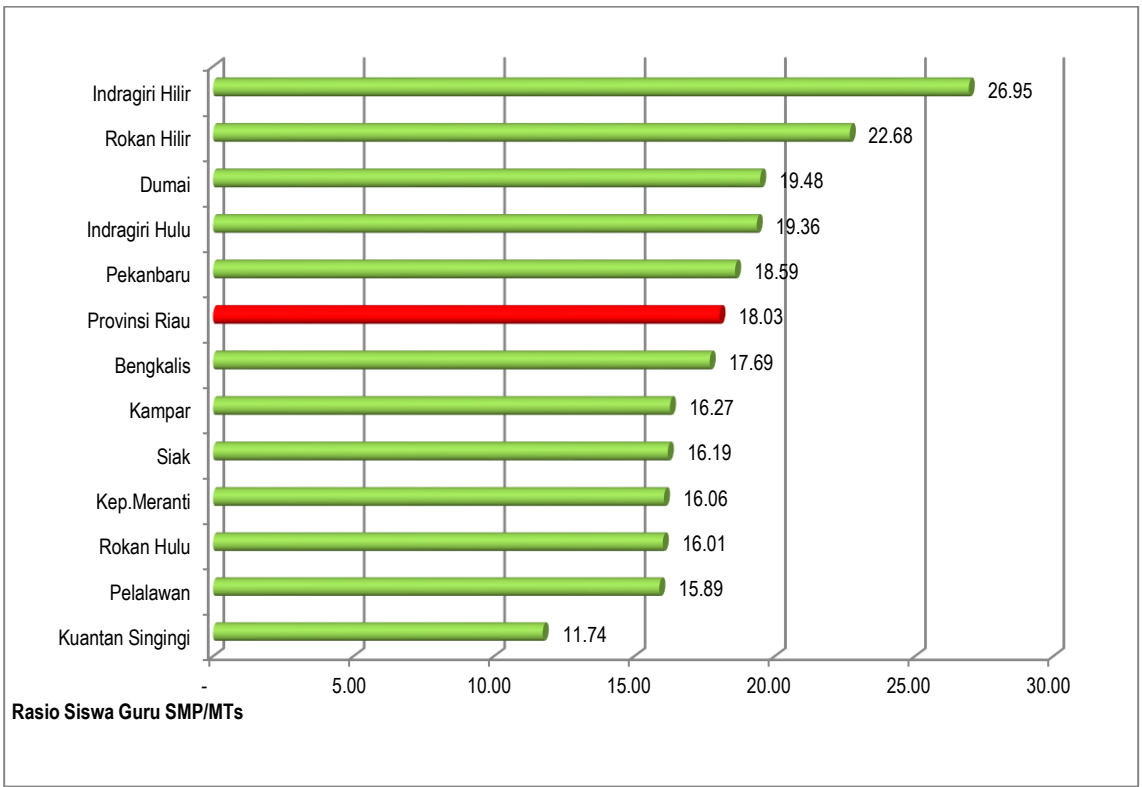


Gambar 2.65
Rasio Siswa Guru SD/MI Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Rasio Siswa terhadap guru ditingkat SD/MI menurut Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.65. Kota Pekanbaru memiliki rasio siswa guru terbanyak dengan rasio 20,24 orang siswa setiap guru dan sementara terendah Kabupaten Meranti sebanyak 12,02 siswa per satu orang guru. Kondisi ini memberikan

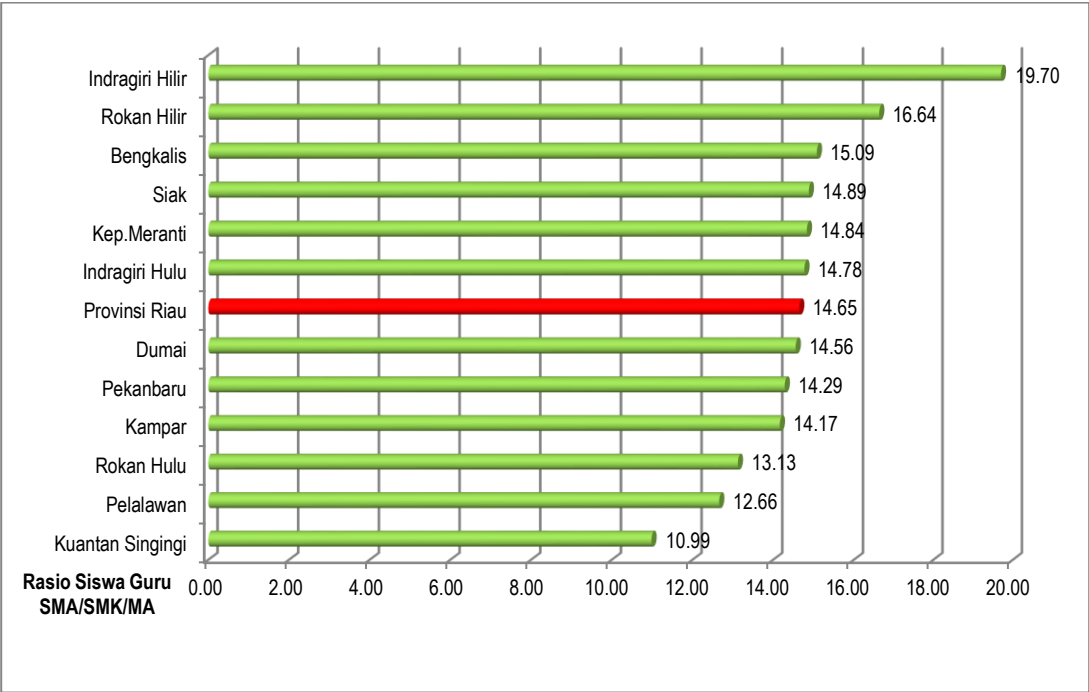
gambaran bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak dibandingkan dengan kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio siswa guru terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 26,95 orang siswa per setiap guru dan terendah di Kabupaten Kuansing sebanyak 11,74 siswa per satu orang guru. Rasio siswa guru jenjang pendidikan SMP/MTS dapat dilihat pada Gambar 2.66. Artinya kondisi rasio siswa terhadap guru kabupaten Kuansing lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 2.66
Rasio Siswa Guru SMP/MTs Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa rasio siswa terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 19,70 siswa per satu orang guru dan terendah terdapat di Kabupaten Kuansing sebanyak 10,99 siswa per satu orang guru. Rasio siswa guru jenjang pendidikan SMP/MTS dapat dilihat pada Gambar 2.67.



Gambar 2.67
Rasio Siswa Guru SMA/SMK/MA Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

Perlu dicermati bahwa meski secara keseluruhan rasio jumlah Siswa terhadap guru relatif sangat baik (di atas SPM), namun permasalahannya terletak pada distribusi guru yang tidak merata baik dari aspek wilayah, sekolah dan tingkat pendidikan guru.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan jumlah masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikannya. Khususnya angka kelulusan untuk setingkat pendidikan dasar, angkanya menunjukkan keberhasilan program pemerintah mencapai wajib belajar sembilan tahun, menunjukkan bahwa jumlah kelulusan pendidikan dasar setingkat SD dan SLTP menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,55% dan 5,66%. Angka ini juga ditunjukkan oleh rasio kelulusan untuk kedua jenjang pendidikan ini yang juga cenderung meningkat atau terjadinya perbaikan lihat Tabel 2.45.

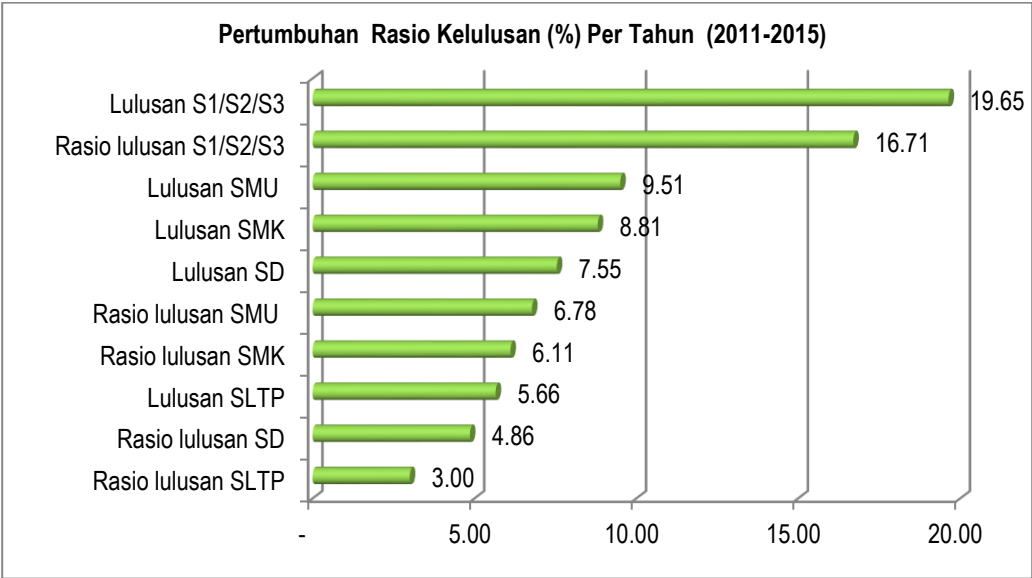
Pada tahun 2011 jumlah kelulusan SD 95.648 Siswa dan SLTP sejumlah 65.134 Siswa kemudian meningkat menjadi masing-masing sebanyak 127.272 siswa dan 80.406 siswa pada tahun 2015 dengan rasio peningkatan masing-masing sebesar 4,86% per tahun dan 3,00%

per tahun. Sedangkan lulusan SMA dan SMK mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 9,51% dan 8,81% dengan peningkatan pertumbuhan rasio masing-masing 6,78% dan 6,11% per tahun.

Tabel 2.45:
Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Penduduk	5.738.543	5.929.173	6.033.300	6.188.400	6.344.400	2,54
2	Lulusan SD	95.648	112.249	118.333	122.518	127.272	7,55
3	Rasio lulusan SD	0,017	0,019	0,020	0,020	0,020	4,86
4	Lulusan SLTP	65.134	74.118	69.973	76.424	80.406	5,66
5	Rasio lulusan SLTP	0,011	0,013	0,012	0,012	0,013	3,00
6	Lulusan SMA	33.045	37.245	38.482	38.156	46.874	9,51
7	Rasio lulusan SMA	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	6,78
8	Lulusan SMK	19.099	20.617	22.052	25.561	26.693	8,81
9	Rasio lulusan SMK	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	6,11
10	Lulusan S1/S2/S3	11.170	12.758	16.283	20.039	22.778	12,02
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	16,71

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016



Gambar 2.68
Pertumbuhan (%) Rasio Kelulusan Tahun
Tiap Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015

Dari Tabel 2.46 dapat dijelaskan bahwa rasio tertinggi antara jumlah penduduk dengan jumlah lulusan terdapat di Kabupaten

Bengkalis yang berada di atas rasio rata-rata Provinsi Riau: tingkat SD dengan rasio 0,023 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,020), tingkat SMP dengan rasio 0,018 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,015), tingkat SMA dengan rasio 0,012 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,009), kecuali tingkat SMK lulusannya hanya 0,003 sedangrasio rata Provinsi Riau sebesar 0,004.

Tabel 2.46:
Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten kota	Penduduk (Jiwa)	Kondisi Lulusan							
		Lulus n SD	Rasio	Lulus n SMP	Rasio	Lulus n SMA	Rasio	Lulus n SMK	Rasio
Kuantan Singingi	314.276	6.505	0,021	5.153	0,016	2.861	0,009	1.212	0,004
Indragiri Hulu	409.431	9.172	0,022	6.942	0,017	2.899	0,007	1.775	0,004
Indragiri Hilir	703.734	14.770	0,021	9.956	0,014	5.579	0,008	1.535	0,002
Pelalawan	396.990	7.598	0,019	5.184	0,013	2.363	0,006	1.301	0,003
Siak	440.841	9.430	0,021	7.683	0,017	3.850	0,009	1.985	0,005
Kampar	793.005	15.042	0,019	11.917	0,015	6.178	0,008	1.865	0,002
Rokan Hulu	592.278	11.984	0,020	8.518	0,014	3.627	0,006	2.061	0,003
Bengkalis	543.987	12.349	0,023	9.736	0,018	6.723	0,012	1.379	0,003
Rokan Hilir	644.680	13.059	0,020	10.250	0,016	6.081	0,009	1.780	0,003
Kep.Meranti	181.095	3.959	0,022	2.945	0,016	1.825	0,010	704	0,004
Pekanbaru	1.038.118	17.352	0,017	15.022	0,014	7.322	0,007	7.072	0,007
Dumai	285.967	6.050	0,021	4.637	0,016	2.120	0,007	1.667	0,006
Provinsi Riau	6.344.402	127.272	0,020	84.406	0,013	49.874	0,008	26.693	0,004

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Sedangkan rasio terendah pula terdapat pada lulusan Kabupaten Pelalawan karena rasio lulusannya di bawah rasio rata-rata Provinsi Riau kecuali lulusan SD yang sama yaitu 0.020. Sedangkan rasio SMP dengan rasio 0,013 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,015), tingkat SMA dengan rasio 0,006 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,009), tingkat SMK lulusannya hanya 0,003 sedang rasio rata Provinsi Riau sebesar 0,004. Sedangkan Kota Pekanbaru rasio lulusannya berada di bawah Kabupaten Pelalawan. Lulusan tingkat SD di kota Pekanbaru cukup rendah dengan rasio 0,017 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,020), malahan terendah di Provinsi Riau. Sementara tingkat SMP dengan rasio 0,014 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,015), tingkat SMA dengan rasio 0,007 (rasio rata-rata Provinsi Riau: 0,009), kecuali tingkat SMK lulusannya di atas rasio yaitu 0,006 sedang rasio rata Provinsi Riau

sebesar 0,004. Manakala rasio lulusan kabupaten/kota lain mendekati rasio lulusan Provinsi Riau.

Selanjutnya, pertumbuhan lulusan SMA berjumlah 46.874 orang tahun 2015 sementara pada tahun 2011 hanya sebanyak 38.156 orang, berarti mengalami pertumbuhan sebesar 9,01%. Selanjutnya, lulusan SMK berjumlah 26.693 orang pada tahun 2015, yang tahun 2011 berjumlah 25.561 orang, berarti tumbuh sebesar 8,81%. Pertumbuhan lulusan SD sebesar 7,55%, pada tahun 2015 menamatkan sebanyak 127.272 orang dari tahun sebelumnya 122.158 orang.

Pertumbuhan lulusan terendah terjadi di tingkat SLTP sebesar 5,66%, dari 80.406 orang tahun 2011 menjadi 76.424 orang pada tahun 2015. Dari data tersebut juga dapat dikatakan bahwa terdapat selisih yang besar antara lulusan SD dengan SLTP, antara 127.272 orang dengan 80.406 dengan selisih 46.866 orang atau 36,82%. Kesenjangan yang besar juga terjadi antara lulusan SMA/SMK dengan Perguruan Tinggi (S1, S2, S3), antara 73.567 orang dengan 22.778 orang, dengan selisih 50.789 orang atau 69,03%.

Dari Tabel 2.45 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan lulusan tertinggi terdapat pada lulusan perguruan tinggi yang pada tahun 2015 berjumlah 22.778 orang, yang sebelumnya 20.039 orang, berarti pertumbuhannya 12,02%. Sementara rasio lulusan perguruan tinggi tumbuh 16,71% per tahun. Peningkatan rasio kelulusan setiap jenjang pendidikan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas SDM provinsi Riau secara umum.

Selanjutnya periode 2010 - 2014, lulusan S1/S2/S3 semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.47. Pada tahun 2010, rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 275,21point dari total penduduk kemudian meningkat menjadi 472,97 pada tahun 2014 dari jumlah penduduk dengan pertumbuhan 15,07% per tahun.

Tabel 2.47:
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Riau

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	164,489	211,752	251,990	269,681	299,681	16,47
2	Jumlah penduduk	5,976,928	5,738,543	5,929,173	6,131,230	6,336,185	1,52
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	275,21	369,00	425,00	439,85	472,97	15,07

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2014), RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Riau 2010-2014

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menjadikan bidang kesehatan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di provnsi Riau mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48:
Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan
Provinsi Riau Tahun 2011– 2015

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	5.738.543	5.929.173	6.033.300	6.188.400	6.344.402	2,82
2	Jumlah Balita (jiwa)	667.963	682.865	698.147	712.993	719.985	7,24
3	Posyandu	4.949	5.100	4.977	5.138	4.772	2,56
4	Puskesmas	201	205	209	211	212	3,45
5	Puskesmas Pembantu	836	830	869	933	981	5,01
6	Puskesmas Keliling	207	204	192	212	185	9,49
7	Rumah Sakit	54	59	63	64	67	1,35
8	Tempat Tidur Rumah Sakit	3.727	4359	5.008	5.315	6.020	17,80
9	Tempat Tidur Puskesmas	500	622	854	935	901	1,35
10	Rasio Posyandu	141	135	136	135	-	4,81
11	Rasio Puskesmas	28.550	28.923	28.867	29.329	-	1,45
12	Rasio Puskesmas Pembantu	6.864	7.144	6.943	6.633	-	(0,52)
13	Rasio Puskesmas Keliling	27.722	29.065	31.423	29.191	-	(1,39)
14	Rasio Rumah Sakit	106.269	100.494	95.767	96.694	-	(3,31)
15	Rasio Tempat Tidur RS	1.540	1.360	1.205	1.164	-	(5,71)
16	Rasio Tempat Tidur Puskesmas	11.477	9.532	7.065	6.619	-	(11,38)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan Olahan, 2016

Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah penyediaan sarana dan prasarana posyandu, dokter, tenaga medis. Analisis terhadap perkembangan capaian suatu indikator adalah penting untuk melihat pola pencapaian target pembangunan menurut indikator tersebut. Perkembangan itu dapat diketahui dengan mengamati perubahan antar-waktu dari capaian indikator bidang kesehatan. Capaian indikator bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan.

a. Posyandu

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, Jadi, posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala

desa. Pada tahun 2011 tersedia sebanyak 4.949 posyandu dan terus meningkat menjadi 4.772 pada tahun 2015 jumlah posyandu dengan pertumbuhan sebesar 2.56% per tahun. Sedangkan rasio jumlah balita yang harus dilayani oleh posyandu semakin mengalami peningkatan beban dari 114 balita setiap posyandu pada tahun 2010 meningkat menjadi 135 balita pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 4,81%. Artinya pertumbuhan perkembangan jumlah balita lebih tinggi atau sebesar 7,24% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan pertambahan jumlah posyandu yang dibangun hanya sebesar 2,56% per tahun. Jika dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.48.

b. Puskesmas, Pustu dan Puskel

Puskesmas merupakan pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok masyarakat pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan.

Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas yang ditunjang oleh puskesmas pembantu merupakan lembaga layanan masyarakat yang sangat dekat dengan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan lembaga layanan ini cukup mudah dijangkau dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Oleh karena itu keberadaan lembaga layanan kesehatan ini menjadi sangat penting.

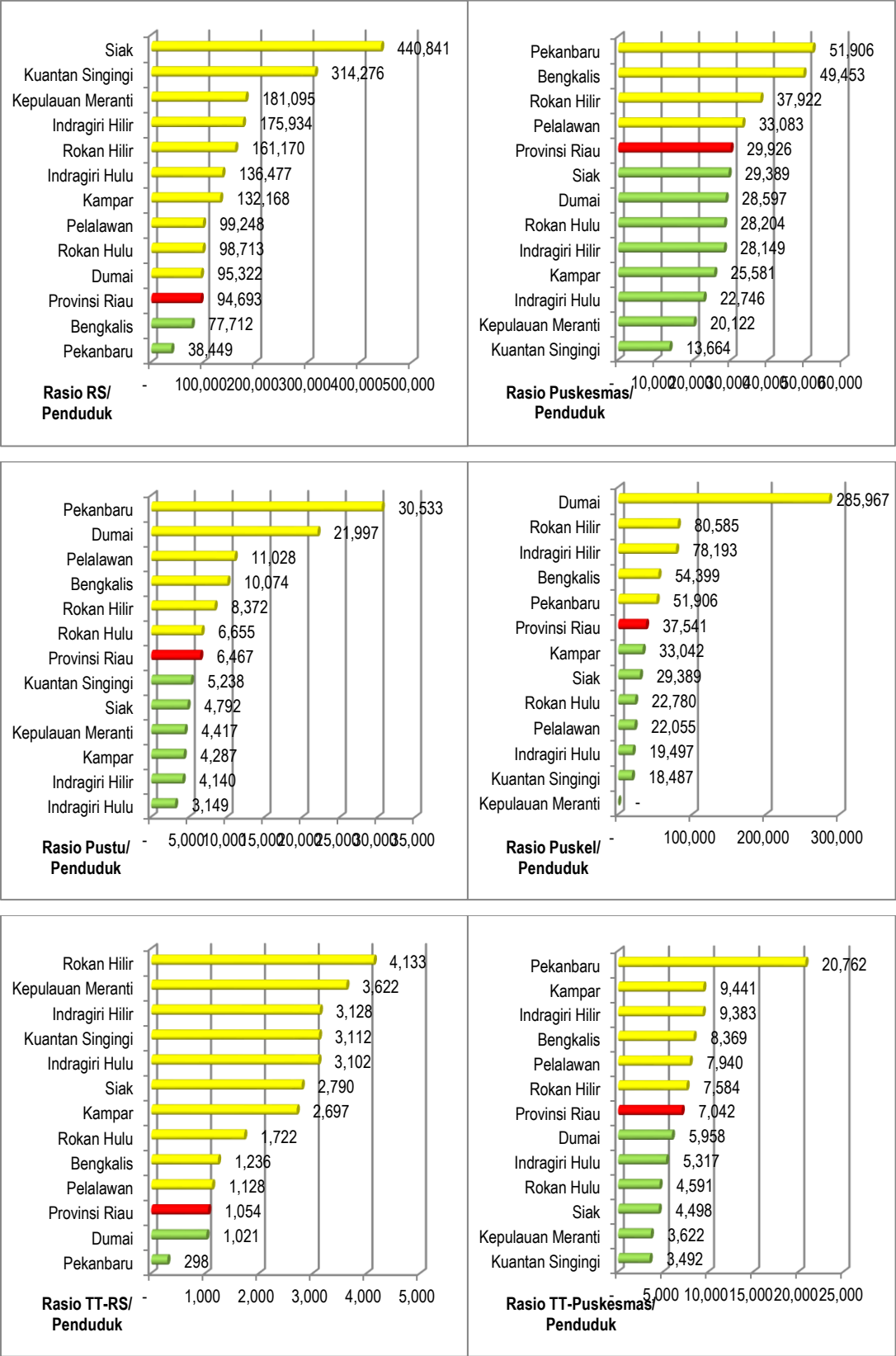
Peran Puskesmas sangat signifikan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private services*) dan pelayanan kesehatan masyarakat umum (*public services*). Terjadinya rasio pelayanan Puskesmas cenderung naik dari 27.692 orang per puskesmas pada tahun 2010 menjadi 29.926 orang per puskesmas pada tahun 2015. Rasio puskesmas menurut Kabupaten Kota tahun 2015 menunjukkan bahwa kota Pekanbaru yang paling tinggi rasionya

dimana 1 puskesmas harus melayani 51.906 penduduk dan terendah di Kabupaten Kuantan Singingi dimana 1 puskesmas hanya melayani 13.664 orang penduduk. Sementara secara umum rata-rata untuk provinsi Riau 1 puskesmas melayani 29.926 orang penduduk.

Tabel 2.49:
Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Kabupaten Kota	Fasilitas Kesehatan					
	Rumah Sakit*	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Tempat Tidur	
					Rumah Sakit*	Puskesmas
Kuantan Singingi	1	23	60	17	101	90
Indragiri Hulu	3	18	130	21	132	77
Indragiri Hilir	4	25	170	9	225	75
Pelalawan	4	12	36	18	352	50
Siak	1	15	92	15	158	98
Kampar	6	31	185	24	294	84
Rokan Hulu	6	21	89	26	344	129
Bengkalis	7	11	54	10	440	65
Rokan Hilir	4	17	77	8	156	85
Kepulauan Meranti	1	9	41	0	50	50
Pekanbaru	27	20	34	20	3488	50
Dumai	3	10	13	1	280	48
Jumlah	67	212	981	169	6020	901
Kabupaten Kota	Rasio Pelayanan Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Tempat Tidur	
					Rumah Sakit	Puskesmas
Kuantan Singingi	314,276	13,664	5,238	18,487	3,112	3,492
Indragiri Hulu	136,477	22,746	3,149	19,497	3,102	5,317
Indragiri Hilir	175,934	28,149	4,140	78,193	3,128	9,383
Pelalawan	99,248	33,083	11,028	22,055	1,128	7,940
Siak	440,841	29,389	4,792	29,389	2,790	4,498
Kampar	132,168	25,581	4,287	33,042	2,697	9,441
Rokan Hulu	98,713	28,204	6,655	22,780	1,722	4,591
Bengkalis	77,712	49,453	10,074	54,399	1,236	8,369
Rokan Hilir	161,170	37,922	8,372	80,585	4,133	7,584
Kepulauan Meranti	181,095	20,122	4,417	0	3,622	3,622
Pekanbaru	38,449	51,906	30,533	51,906	298	20,762
Dumai	95,322	28,597	21,997	285,967	1,021	5,958
Jumlah	94,693	29,926	6,467	37,541	1,054	7,042

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015 dan Profil Kesehatan, 2016)



Gambar 2.69
Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Rasio pelayanan puskesmas pembantu (pustu) cenderung turun dari 6.787 orang per pustu pada tahun 2010 menjadi 6.467 orang per pustu pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketersediaan fasilitas tersebut sehingga jumlah penduduk yang dilayani

semakin berkurang. Pengurangan jumlah penduduk yang harus dilayani memungkinkan bagi pihak pustu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Rasio pustu menurut Kabupaten/Kota tahun 2015 menunjukkan bahwa kota Pekanbaru yang paling tinggi rasionya dimana 1 pustu harus melayani 30.533 orang penduduk dan terendah di Kabupaten Inhu dimana 1 pustu hanya melayani 3.149 orang penduduk. Sementara secara umum rata-rata untuk provinsi Riau 1 pustu melayani 6.467 orang penduduk.

Rasio pelayanan puskesmas keliling (puskel) juga mengalami kenaikan dari 31.290 orang per puskel pada tahun 2010 menjadi 37.541 orang per puskel pada tahun 2015. Hal ini menunjukan terjadinya peningkatan ketersediaan fasilitas tersebut sehingga jumlah penduduk yang dilayani semakin berkurang. Pengurangan jumlah penduduk yang harus dilayani memungkinkan bagi pihak puskel memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Rasio puskel menurut Kabupaten Kota tahun 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir yang paling tinggi rasionya dimana 1 puskel harus melayani 80.585 orang penduduk dan terendah di Kabupaten Kuansing dimana 1 puskel hanya melayani 18.487 orang penduduk. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki Puskel. Sementara secara umum rata-rata untuk provinsi Riau 1 puskel melayani 37.541 orang penduduk, jelasnya rasio puskesmas, pustu dan puskel seperti terlihat pada Tabel 2.49 dan Gambar 2.69.

c. Rumah Sakit

Berdasarkan data dari *United Nations Development Program* (UNDP), yaitu laporan mengenai standar kesehatan dan pendidikan Indonesia 2010, posisi Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang disurvei. Rendahnya peringkat Indonesia ini karena rasio ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan kemudian diikuti oleh kualitas pelayanan kesehatan juga masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain termasuk di Provinsi Riau.

Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah rumah sakit di Provinsi Riau disebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Riau

terutama Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah rumah sakit ini terbanyak di Kota Pekanbaru khususnya rumah sakit swasta, hal ini sangat jauh perbandingannya dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berikut disajikan jumlah fasilitas dan rasio pelayan kesehatan menurut kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2015.

Gambaran Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dari tahun 2010-2015 cenderung mengalami peningkatan, rasio pada tahun 2010 sebesar 67,29 per 100.000 meningkat menjadi 94,89 per 100.000 penduduk pada tahun 2015. Sementara per kabupaten/kota pada tahun 2015 menunjukkan bahwa rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dimana satu RS harus melayani 4.133 orang penduduk/Tempat Tidur dan terendah di Kota Pekanbaru satu RS hanya melayani 298 orang/Tempat Tidur. Rata-rata untuk RS di tingkat provinsi hanya melayani 1.054 orang penduduk/Tempat Tidur.

Jumlah dan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan.

Tingginya rasio penduduk yang harus dilayani di RS Siak tidak berarti bahwa pelayanan kesehatan di daerah ini tidak terpenuhi dengan baik, tetapi kondisi sangat didukung oleh kedekatan wilayah ini dengan Kota Pekanbaru, sehingga sebagian masyarakat lebih cenderung ke Kota Pekanbaru. Jelasnya rasio Rumah sakit, tempat tidur RS dan tempat tidur puskesmas seperti terlihat pada Tabel 2.49 dan Gambar 2.69.

d. Dokter

Dari sisi sumber daya manusia tahun 2010 jumlah dokter sebanyak 1,583 orang kemudian menjadi 2.720 orang pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 15,52% per tahun seperti terlihat pada Tabel 2.49. Begitu juga dengan rasio dari tahun 2010-2014 relatif meningkat dari 29,83 menjadi 43,95 per 100.000 penduduk atau naik 11,11% per tahun. Berdasarkan target Indikator Indonesia Sehat dengan rasio dokter 40 per 100,000 penduduk, dan provinsi Riau sudah mampu

mencapai target tersebut hingga tahun 2014 terhadap total dokter dengan rasio 43,95 dokter per 100.000 penduduk.

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah 13,5 per 100.000 penduduk artinya pada tahun 2015 ini di Provinsi Riau untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 13 orang dokter spesialis.

Rasio dokter spesialis ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dimana untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 6 orang dokter spesialis. Jika dilihat per kabupaten/kota, hampir seluruhnya telah mampu mencapai rasio dokter dan jumlah penduduk diatas angka rata-rata nasional, bahkan ada yang diatas Indikator Indonesia Sehat (40 per 100,000 penduduk), yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan angka rasio masing-masing adalah 106,78 dan 43,55 serta 41,69 seperti terlihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50:
Jumlah dan Rasio Dokter Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Perkembangan Tenaga Medis Per Tahun					Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Total Dokter	1.858	2.002	1.946	2.720	2.496	15,52
Dokter Spesialis	592	567	555	1.163	881	27,00
Dokter Umum	939	932	1,052	1.184	1.254	11,46
Dokter Gigi	327	503	339	373	361	16,45
Rasio Dokter	33.55	34.89	32.82	43,95	-	11,11
Rasio Dokter Spesialis	10,69	9,88	9,36	18,79	-	22,08
Rasio Dokter Umum	16,95	16,24	17,74	19,13	19,1	7,23
Rasio Dokter Gigi	5,90	8,77	5,72	6,03	5,9	12,02
Seorang Dokter Thd Penduduk	2.981	2.866	3.047	2.275	-	(8,49)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Secara umum rasio dokter provinsi Riau sebanyak 43,95, berarti bahwa untuk 100,000 penduduk dapat dilayani oleh 43,95 orang dokter baik dokter umum, spesialis dan gigi. Terpenuhinya rasio dokter sesuai dengan rasio dokter untuk Indonesia sehat menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik namun masih terdapat masalah terkait dengan terdistribusinya yang tidak merata untuk wilayah kabupaten kota sehingga terdapat Kabupaten yang memiliki rasio dokter terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Inhu

dimana keempat wilayah ini belum mencapai 50% dari indikator Indonesia atau kurang dari 20 orang, jelasnya lihat Tabel 2.51.

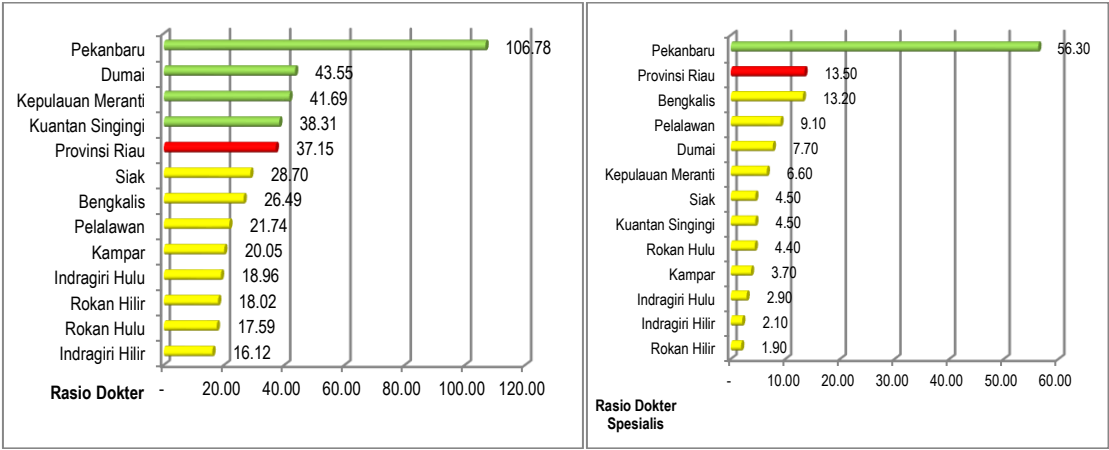
Sedangkan secara rinci dokter menurut keahlian, maka untuk dokter spesialis pada tahun 2015 hanya kota Pekanbaru yang memiliki rasio dokter spesialis terbanyak yaitu 56,30 orang per 100.000 penduduk yang berada di atas rata-rata provinsi sebanyak 13,50 orang dan dokter spesialis yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Rokan Hilir hanya memiliki rasio 1,90 orang per 100.000 penduduk. Dokter umum dan gigi secara umum kondisinya lebih merata dari dokter spesialis. Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (untuk 100.000 penduduk) di provinsi Riau 100.000 dilayani oleh 19 orang tenaga dokter umum. Rasio dokter gigi di Provinsi Riau per 100.000 penduduk tahun 2015 terbanyak di Pekanbaru 8,6 dan terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir 3 per 100.000 penduduk diikuti Kab. Rokan Hilir 4 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.51:
Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau 2014 dan 2015*

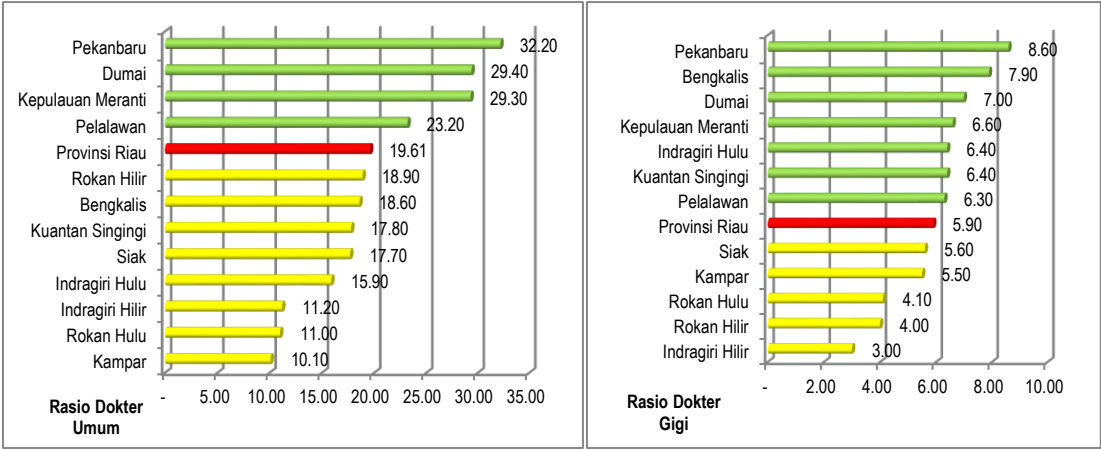
Kabupaten Kota	Penduduk (Jiwa)	Kondisi Tenaga Dokter							
		Dokter				Rasio			
		Spesialis	Umum	Gigi	Jumlah	Spesialis*	Umum*	Gigi*	Jumlah
Kuantan Singingi	310.619	24	74	21	119	4,50	17,80	6,40	38,31
Indragiri Hulu	400.901	9	49	18	76	2,90	15,90	6,40	18,96
Indragiri Hilir	694.614	15	76	21	112	2,10	11,20	3,00	16,12
Pelalawan	377.221	7	57	18	82	9,10	23,20	6,30	21,74
Siak	428.499	18	79	26	123	4,50	17,70	5,60	28,70
Kampar	773.171	20	92	43	155	3,70	10,10	5,50	20,05
Rokan Hulu	568.576	26	58	16	100	4,40	11,00	4,10	17,59
Bengkalis	536.138	35	79	28	142	13,20	18,60	7,90	26,49
Rokan Hilir	627.233	11	80	22	113	1,90	18,90	4,00	18,02
Kepulauan Meranti	179.894	10	50	15	75	6,60	29,30	6,60	41,69
Pekanbaru	1.011.467	615	357	108	1.080	56,30	32,20	8,60	106,78
Dumai	280.109	20	82	20	122	7,70	29,40	7,00	43,55
Jumlah	6.188.442	810	1.133	356	2.299	13,50	19,61	5,90	37,15

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Rasio dokter umum dan gigi yang terendah terdapat di Kabupaten Kampar masing-masing hanya 10,10 dokter umum dan rasio dokter gigi terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 3,00 orang per 100.000 penduduk. Rasio dokter tertinggi dan terendah per kabupaten kota se Riau dapat dilihat pada Gambar 2.70.



Gambar 2.70
Rasio Dokter Menurut Keahlian Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015



Lanjutan Gambar 2.70
Rasio Dokter Menurut Keahlian Per Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

e. Tenaga Medis

Sumberdaya manusia bidang kesehatan yang lain, selain dokter adalah tenaga medis seperti perawat dan bidan. Keberadaan perawat dan bidan menjadi sangat penting untuk kondisi penduduk Provinsi Riau, khususnya untuk perawatan ibu dan balita, Berdasarkan Indikator Indonesia bahwa rasio perawat adalah 117 per 100,000 penduduk dan rasio bidan adalah 100 per 100,000 penduduk. Di Provinsi Riau pada tahun 2010 rasio tenaga medis adalah 159 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 8.812 orang kemudian rasionya meningkat menjadi 203 dengan jumlah tenaga medis 12.563 orang pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 7,85% pertahun. Peningkatan rasio tenaga medis ini dimotori oleh pertambahan jumlah bidan dengan pertumbuhan 11,49% per tahun dan pertumbuhan jumlah perawat sebesar 10,77% per tahun, seperti terlihat pada Tabel 2.52.

Peningkatan ketersediaan tenaga medis yang ditandai dengan meningkatnya rasio tersebut baik tenaga bidan dan perawat membuktikan bahwa animo masyarakat dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia bidang kesehatan semakin baik, yang ditunjang oleh persepsi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang semakin bertambah.

Disi lain tingginya minat masyarakat dalam pendidikan bidang kesehatan menunjukkan bahwa besarnya prospek lapangan kerja bidang jasa kesehatan dan didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang akan memanfaatkan jasa kesehatan. Disamping sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang terkait dalam pembangunan kesehatan hal penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya penanggulangan penyakit menular, masalah gizi masyarakat dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 2.52:
Jumlah Tenaga Medis, Rasio dan Kasus DBD
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	5.738.543	5.929.173	6.033.300	6.188.400	6.344.402	2,82
2	Jumlah Kecamatan	156	158	163	164	166	2,09
3	Jumlah Desa/Kel	1.645	1.739	1.759	1.836	1.846	2,84
4	Jumlah Tenaga Medis	7.768	10.990	12.060	12.563	-	10,88
5	Jumlah Perawat	4.369	6.482	6.921	7.332	7.387	10,77
6	Jumlah Bidan	3.399	4.508	5.139	5.231	4.948	11,49
7	Rasio Tenaga Medis	135	185	200	203	-	7,85
8	Rasio Perawat	76	109	115	118	113	7,74
9	Rasio Bidan	59	76	85	85	78	8,45
10	Jumlah Kesakitan DBD	51,50	18,80	23,45	38,30	51,40	

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Berdasarkan jumlah kasus DBD padatahun 2015 sebanyak 3.261 kasus dengan *Case Fatality Rate* (CFR) atau angka kematian akibat DBD sebesar 0,61% pada tahun 2015, dimana target Nasional CFR akibat DBD dibawah 1%. Gambaran Kasus DBD dan angka kematian akibat DBD di Provinsi Riau Tahun 2015.

Tabel 2.53:
Jumlah Kasus Demam Berdarah Menurut Kabupaten Kota Di
Provinsi Riau, 2015

Kabupaten Kota	Jumlah Kasus DBD*)	Meninggal DBD	Angka Kesakitan (IR per 100.000 Penduduk)	Angka Kematian (CFR%)
Kuantan Singingi	286	0	91	-
Indragiri Hulu	176	1	43	0.57
Indragiri Hilir	12	0	1.7	-
Pelalawan	120	1	30.2	0.83
Siak	273	3	61.9	1.10
Kampar	269	5	33.9	1.86
Rokan Hulu	159	0	26.8	-
Bengkalis	678	1	124.6	0.15
Rokan Hilir	163	3	25.3	1.84
Kepulauan Meranti	254	0	140.3	-
Pekanbaru	516	4	49.7	0.78
Dumai	355	2	124.1	0.56
Provinsi Riau	3.261	20	51.4	0.61

Sementara itu jumlah kasus DBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 990 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.342 kasus pada tahun 2014 atau naik 42,34% per tahun, dengan kematian dari 25 orang pada tahun 2010 menjadi 36 orang pada tahun 2014 atau naik sebesar 41,89% dengan rasio kematian tumbuh 7,11% per tahun. Peningkatan rasio kematian ini dapat disebabkan oleh keterlambatan dalam penanganan akibat akses yang terlalu jauh dari RS, puskesmas dan pusat kesehatan lainnya. Selengkapnya lihat Tabel 2.54.

Tabel 2.54:
Jumlah Tenaga Medis dan Rasio Menurut Kabupaten Kota
Provinsi Riau, 2015

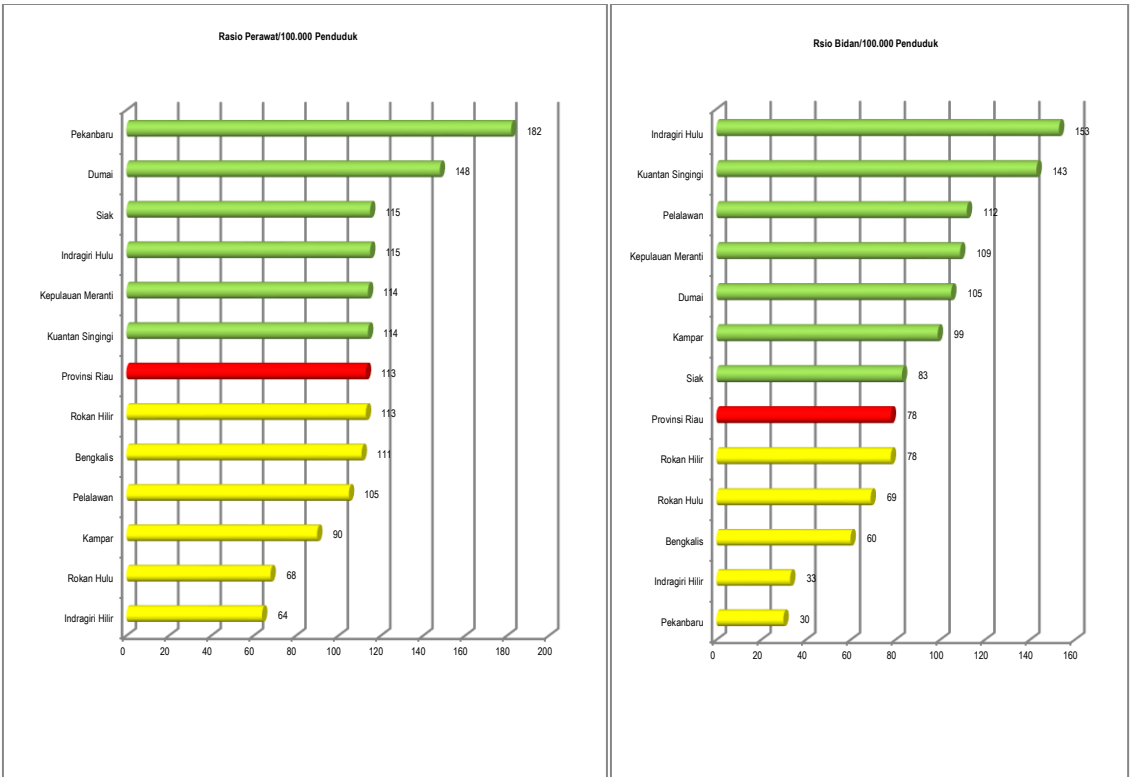
Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Medis			Rasio Tenaga Medis		
	Tenaga Medis	Perawat	Bidan	Tenaga Medis	Perawat	Bidan
Kuantan Singingi	803	379	424	258,52	114,00	143,00
Indragiri Hulu	877	406	471	218,76	115,00	153,00
Indragiri Hilir	1.081	629	452	155,63	64,00	33,00
Pelalawan	798	413	385	211,55	105,00	112,00
Siak	820	472	348	191,37	115,00	83,00
Kampar	1.159	550	609	149,90	90,00	99,00
Rokan Hulu	813	402	411	142,99	68,00	69,00
Bengkalis	777	432	345	144,93	111,00	60,00
Rokan Hilir	1.189	634	555	189,56	113,00	78,00
Kepulauan Meranti	471	268	203	261,82	114,00	109,00
Pekanbaru	3.117	2.358	759	308,17	182,00	30,00
Dumai	658	389	269	234,91	148,00	105,00
Provinsi Riau	12.563	7.332	5.231	203,01	113,00	78,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016) dan Profil Kesehatan Provinsi Riau, 2016

Tenaga perawat di ProvinsiRiau berjumlah 7.161 orang dengan rasio adalah 113 per 100.000 penduduk dan rasio tahun 2015 ini meningkatbila dibandingkan dengan tahun 2011 (90,8 per 100.000 penduduk). Rasio perawat per 100,000 penduduk kabupaten/kota di ProvinsiRiau tahun 2015 sebesar 113 per 100.000 penduduk, dengan rasio tertinggi kota Pekanbaru yaitu 182 per 100.000 penduduk dan rasio terendah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 64 per 100.000 penduduk.

Tenaga Bidan di ProvinsiRiau berjumlah 4.948 orang dengan rasio adalah 78 per 100.000 penduduk dan rasio tahun 2015 ini meningkatbila dibandingkan dengan tahun 2011 (66,2 per 100.000 penduduk). Gambaran rasio perawat 100.000 penduduk. Sementara rasio bidan tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 153 per 100.000 penduduk dan terendah di Kabupaten Pekanbaru sebanyak 30 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target Indikator Indonesia Sehat rasio bidan 100 orang per 100,000 penduduk.Dengan demikian menunjukkan bahwa Provinsi Riau belum memenuhi target tersebut karena baru mencapai 78 per 100.000 penduduk. Penyebaran rasio bidan per 100.000 penduduk.

Berdasarkan target Indikator Indonesia Sehat rasio bidan 100 orang per 100,000 penduduk. Dengan demikian menunjukkan bahwa Provinsi Riau belum memenuhi target tersebut karena baru mencapai 78 per 100.000 penduduk seperti terlihat pada Tabel 2.52. Berdasarkan target Indikator Indonesia Sehat rasio bidan 100 orang per 100,000 penduduk. Dengan demikian menunjukkan bahwa Provinsi Riau belum memenuhi target tersebut karena baru mencapai 96,03 dan bahkan terdapat 8 Kabupaten Kota yang masih dibawah rata-rata rasio bidan provinsi Riau dan hanya 4 wilayah yang telah memenuhi Indikator Indonesia yaitu Kuansing, Inhu, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. Oleh karena itu upaya peningkatan pelayanan kualitas kesehatan masih sulit tercapai dengan jumlah tenaga medis yang belum memenuhi indikator tersebut. Jelasnya lihat Gambar 2.71.



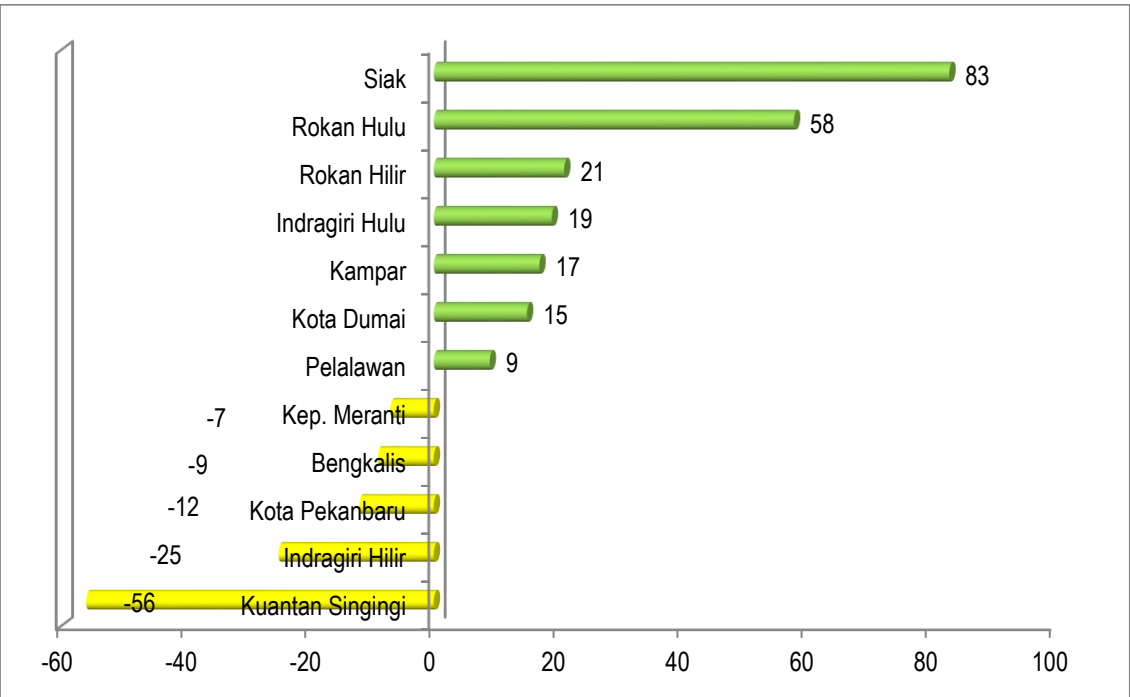
Gambar 2.71
Rasio Tenaga Medis Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

f. Cakupan Desa

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau telah mempunyai rumah sakit/rumah sakit bersalin, dan setiap kecamatan di kabupaten/kota se-Riau telah mempunyai Puskesmas/Pustu, tetapi hanya 905 desa/kelurahan (49,32%) yang telah mempunyai Poskesdes/Polindes.

Sebanyak 1.133 desa/kelurahan (61,74%) yang tidak mempunyai Poskesdes di mana kabupaten/kota dengan persentase tertinggi dan terendah yang tidak ada poskesdes yaitu Indragiri Hilir sebesar 83,47% (197 desa) dan Dumai sebanyak 21,21% (7 desa).

Untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Pustu, unit Puskesmas Keliling, dan unit bidan desa/komunitas. Poskesdes merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Berikut Gambar 2.72, disajikan wilayah desa yang masih kekurangan sarana dan prasarana kesehatan di provinsi Riau (warna hijau pustu, poskesdes dan polindes yang melebihi dari jumlah desa dan warna kuning kekurangan pustu, poskesdes dan polindes dari jumlah desa) yang terdapat di kabuapten kota provinsi Riau.



Gambar 2.72
Surplus/Defisit Pustu, Poskesdes dan Polindes Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

g. Status Gizi Balita

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan factor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Status

gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB).Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya status gizi balita dapat diukur berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U),dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Indikator BB/U memberikan indikasi secara umum, indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang.

Prevalensi gizi kurang pada periode 2011-2015 menunjukkan trends fluktuatif, dimana pada tahun 2011 prevalensi gizi kurang sebesar 0.74% meningkat menjadi 1.03% pada tahun 2013, namun sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terjadi trend penurunan sebesar 18,47% per tahun seperti pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55:
Prevalensi Gizi Kurang dan Cakupan Pertolongan Persalinan
Tenaga Kesehatan (K1 dan K4) Provinsi Riau 2011- 2015

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Prevalensi Gizi Kurang	0,74	na	1,57	1,28	1,03	-18,47

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2016*) Tahun 2012 : Tidak Dilakukan PSG

Berdasarkan prevalensi menurut Kabupaten/Kota, prevalensi balita giziKurangtertinggi di Kab. Indragiri Hulu 2,8,4%, Kabupaten Siak 1,2% dan Kabupaten Rokan Hilir 1,13%. Sedangkan prevalensi balita gizi kurang tertinggi Kabupaten Indragiri Hilir 13,6%, Kabupaten Indragiri Hulu 11,2% dan Kabupaten Rokan Hilir 10,2%. Prevalensi gizi kurang dan gizi kurang pada balita menurut Kabupaten /Kota dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56:
Status Gizi Berdasarkan Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U)
Menurut Kab/Kota, 2015

Kabupaten Kota	Anak Yang diTimbang (N)	Kondisi							
		Buruk		Kurang		Baik		Lebih	
		N	%	N	%	N	%	N	%
Kuantan Singingi	4.500	18	0,40	262	5,80	4.152	92,30	68	1,50
Indragiri Hulu	4.200	115	2,80	469	11,20	3.277	78,00	338	8,00
Indragiri Hilir	4.500	54	1,20	610	13,60	3.806	84,60	30	0,70
Pelalawan	3.600	11	0,30	175	4,90	3.314	92,10	99	2,80
Siak	4.200	79	1,90	328	7,80	3.736	89,00	57	1,40
Kampar	6.300	101	1,60	556	9,00	5.487	87,10	146	2,30
Rokan Hulu	4.800	12	030	153	3,20	4.607	96,00	28	0,60
Bengkalis	2.400	12	0,50	112	4,70	2.257	94,00	19	0,80
Rokan Hilir	3.900	42	1,10	399	10,20	3.235	82,90	224	5,70
Kepulauan Meranti	2.700	8	0,30	182	6,70	2.474	91,60	36	1,30
Pekanbaru	3.600	25	0,70	295	8,20	3.195	88,80	82	2,30
Dumai	2.100	5	0,20	70	3,30	2.010	95,70	15	0,70
Provinsi Riau	46.00	484	1,03	3.623	7,70	41.551	88,78	1.142	2,40

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2016

h. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, K1 dan K4

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Trends cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan selama periode 2011– 2015, cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2011 sebesar 82,10% meningkat sedikit pada tahun 2015 sebesar 87,1% seperti pada Tabel 2.57. Bila dilihat dari Kabupaten/Kota, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih terdapat kesenjangan. Dimana cakupan tertinggi adalah Kota Dumai sebesar 94,4% dan terendah Kab. Indragiri Hilir sebesar 76,5%.

Tabel 2.57:
Cakupan Pertolongan Persalinan
Tenaga Kesehatan(K1 dan K4) Provinsi Riau 2011- 2015

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	82,10	89,90	78,00	86,80	84,40	2,64
K1	93,50	97,00	95,20	94,90	92,10	0,52
K4	87,60	90,00	89,40	89,40	86,70	0,69

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2016*) Tahun 2012 : Tidak Dilakukan PSG

Upaya kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam pemberian antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24-36 minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran kecenderungan Cakupan K1 dan Cakupan K4 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai dapat dilihat pada Tabel 2.55 dan perkembangan per Kabupaten Kota dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Data cakupan K4 menurut distribusi kabupaten/kota menunjukkan adanya kesenjangan cakupan antar kabupaten/kota dengan capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 100%, diikuti oleh kabupaten Kepulauan Meranti sebesar

99,5% dan Kabupaten Bengkalis sebesar 97,6%. Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian terendah adalah sebesar 74,9%, Kab. Rokan Hulu 74,9%, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 86,1%, dan kabupaten Kampar sebesar 86,4% seperti pada Tabel 2.56. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal.

Gambaran persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn) di provinsi Riau pada tahun 2015 mencapai 84,4% dan Persalinan di Fasyankes (87,2%) seperti pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58:
Kunjungan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten Kota	Ibu Hamil					Ibu Bersalin				
	Total	K1		K4		Total	Persalinan ditolog Nakes		Persalinan di Fanyankes	
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
Kuantan Singingi	6.963	6.963	100,00	6.547	94,00	6.647	5.921	89,10	3.808	57,30
Indragiri Hulu	10.591	9.176	87,00	8.178	77,00	10.112	7.925	78,40	6.684	61,10
Indragiri Hilir	15.658	12.560	80,00	11.580	74,00	14.947	10.634	71,10	3.933	26,30
Pelalawan	9.007	8.726	97,00	8.264	92,00	8.598	7.711	89,70	2.504	29,10
Siak	10.522	10.077	96,00	9.997	95,00	10.046	9.046	90,00	7.814	77,80
Kampar	18.316	17.805	97,00	16.895	92,00	17.483	16.091	92,00	16.245	92,90
Rokan Hulu	14.386	14.242	99,00	13.607	95,00	13.703	12.623	92,10	3.619	26,40
Bengkalis	12.629	12.248	97,00	11.741	93,00	12.016	10.911	90,80	7.975	66,40
Rokan Hilir	18.297	13.594	74,00	12.398	68,00	17.465	11.734	67,20	5.307	30,40
Kepulauan Meranti	4.510	4.386	90,00	4.079	90,00	3.682	3.682	83,90	1.086	24,70
Pekanbaru	25.064	23.951	96,00	22.558	90,00	23.924	20.785	86,80	20.765	86,80
Dumai	9.057	9.057	94,00	8.477	94,00	7.687	7.867	91,00	7.531	87,10
Provinsi Riau	155.000	142.787	92,10	134.321	86,70	147.975	124.910	84,40	87.271	59,00

Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2016

f. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Untuk target UCI pada tahun 2015 pencapaian Provinsi Riau

tahun 2015 sebesar 60,56%. Capaian Desa UCI per Kabupaten Kota di Provinsi Riau sepeti pada Tabel 2.59 berikut ini.

Tabel 2.59:
Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunisation*) per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Cakupan Desa UCI			
	Puseksmas	Jumlah Desa Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kel UCI
Kuantan Singingi	24	229	85	37,12
Indragiri Hulu	18	194	83	42,78
Indragiri Hilir	25	236	68	28,81
Pelalawan	12	118	93	78,81
Siak	15	131	121	92,37
Kampar	31	245	150	61,22
Rokan Hulu	21	153	121	79,08
Bengkalis	16	155	139	89,68
Rokan Hilir	17	193	98	50,78
Kepulauan Meranti	9	101	73	72,28
Pekanbaru	20	58	55	95,00
Dumai	10	33	32	97,00
Provinsi Riau	202	1.846	1.118	60,56

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2016

Cakupan Desa UCI tertinggi di Kota Dumai sebesar 97% , dan Kota Pekanbaru (95%), Sedangkan yang terendah Kab. Indragiri Hilir 28,81% dan Kuantan Singingi sebesar 37,12%. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal.

2.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Menurut UU RI No, 38 Tahun 2004 tentang jalan yang didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta

(43,35%), rigid pavement 133,45 km (4,39%), krikil 751,33 km (24,77%) dan selebihnya merupakan jalan tanah. Sedangkan jika dilihat dari kondisi jalan nasional hanya 828,65 km (73,04%) baik dan jalan provinsi dalam kondisi baik hanya 931,10 km (37,95%) dan selebihnya dengan kondisi sedang, rusak ringan dan berat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.60. dan 2.61.

Tabel 2.60:
Kondisi Jalan di Provinsi Riau, 2015

No.	Kondisi	Jalan Nasional		Jalan Provinsi	
		Panjang (Km)	(%)	Panjang (Km)	(%)
1	Baik	828,65	73,04	1.151,04	37,95
2	Sedang	209,26	18,45	428,72	14,13
3	Rusak Ringan	61,28	5,40	121,50	4,01
4	Rusak Berat	35,27	3,11	1.332,06	43,91
Total		1.134,46	100,00	3.033,32	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, 2016

Tabel 2.61:
Konstruksi Jalan di Provinsi Riau, 2015

No	Konstruksi	Jalan Nasional		Jalan Provinsi	
		Panjang (Km)	(%)	Panjang (Km)	(%)
1	Aspal	1.031,14	90.89	1.295,24	42,70
2	Rigid Pavement/Semenisasi	63,17	5,57	168,56	5,56
3	Kerikil / Agregat Base	40,16	3,54	741,23	24,44
4	Tanah	0	0	828,19	27,30
Total		1.134,47	100	3.033,32	100,00

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Riau, 2016

Secara umum permasalahan infrastruktur jalan di Provinsi Riau terletak pada masih kurangnya ruas dan kualitas. Walaupun sebagian besar jalan yang melintasi daerah-daerah di Provinsi Riau sudah berhasil menghubungkan berbagai titik di Provinsi Riau dan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah sudah cukup. Tetapi, jika ditinjau dari kualitas jalan yang menghubungkan antara daerah tersebut maka keadaan yang terjadi sebaliknya. Jalan-jalan yang ada,

baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten dan kota yang dalam kondisi rata-rata mengalami kerusakan dan kurang baik.

Hal ini telah menyebabkan berbagai hal diantaranya: Waktu tempuh lebih lama, kerusakan kendaraan lebih cepat, biaya produksi dari komponen biaya transportasi menjadi lebih mahal, mempercepat kerusakan jalan pada tahap selanjutnya dan polusi udara yang berakibat pada menurunnya kesehatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut serta berakibat pada rendahnya produktivitas dan upah murah. Bila dirinci panjang jalan nasional dan provinsi yang terdapat di Kabupaten Kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.62 dan Gambar 2.74.

Tabel 2.62:
Infrastruktur Jalan Nasional dan Provinsi Melintasi Kabupaten di Provinsi Riau, 2015

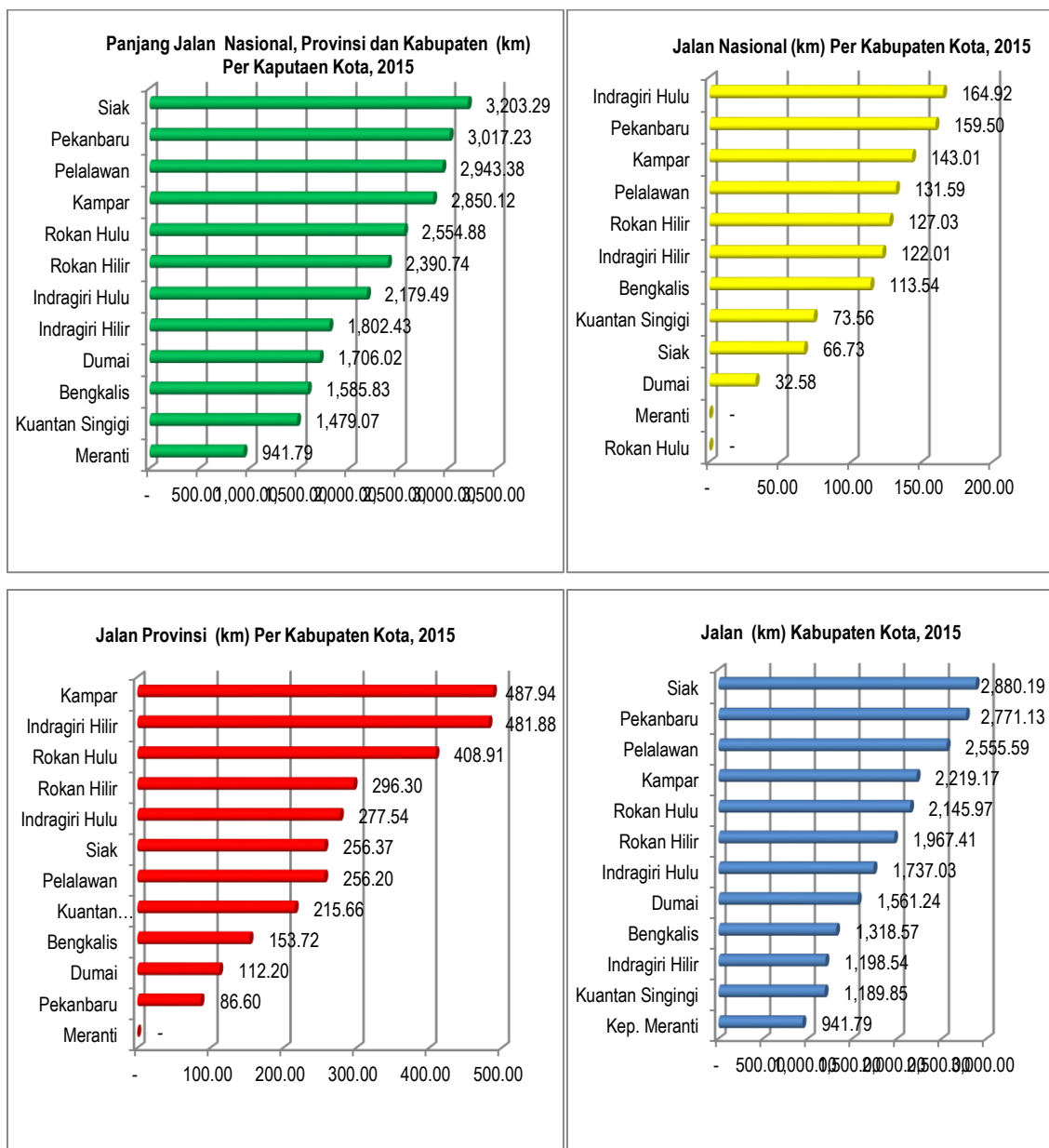
No.	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (Km)		Jumlah
		Nasional	Provinsi	
1	Kuantan Singigi	73,56	215,66	289,22
2	Indragiri Hulu	164,92	277,54	442,46
3	Indragiri Hilir	122,01	481,88	603,89
4	Pelalawan	131,59	256,20	387,79
5	Siak	66,73	256,37	323,10
6	Kampar	143,01	487,94	630,95
7	Rokan Hulu	-	408,91	408,91
8	Bengkalis	113,54	153,72	267,26
9	Rokan Hilir	127,03	296,30	423,33
10	Meranti	-	-	-
11	Pekanbaru	159,50	86,60	246,1
12	Dumai	32,58	112,20	144,78
Jumlah		1.134,47	3.033,32	4.167,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, 2015

Upaya pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas akan memerlukan dana yang cukup tinggi mengingat kondisi geografis Provinsi Riau, khususnya bagian yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera yakni tempat dimana Dumai dan Kuala Enok berada didominasi oleh tanah rawa gambut dengan ketebalan bervariasi antara 1 sampai 15 meter. Sifat tanah gambut yang labil, tidak padat, dan mengalami penurunan (konsolidasi) yang besar menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini menjadi lebih sulit dan mahal.

Oleh karena itu untuk menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas biasanya dilakukan dengan stabilisasi atau perkuatan tanah dasar, dengan membuang bagian tanah yang lunak, melapisi bagian dasar dengan struktur geotekstil, lalu mengisinya dengan tanah timbunan yang dipadatkan, kemudian *finishing* dengan struktur perkerasan pada bagian paling atas. Pilihan struktur perkerasan yang selama ini dipakai adalah perkerasan lentur (*flexible pavement*) dengan lapisan aspal seperti jalan pada umumnya.

Pengalaman menunjukkan bahwa perkerasan dengan aspal ini tidak dapat bertahan lama karena struktur tanahnya yang labil. Karena itu, perkerasan lapisan atas yang diusulkan untuk infrastruktur jalan di wilayah pesisir ini adalah perkerasan kaku (*rigid pavement*) dari beton bertulang. Tebal perkerasan dari beton bertulang ini bisa bervariasi mulai dari 30 cm sampai 50 cm, tergantung kepada keadaan tanah dasarnya. Hal ini diperlukan mengingat kendaraan pengangkut CPO dan kayu serta batubara beratnya mencapai 40,7 ton.



Gambar 2.74
Panjang Jalan Menurut Status Per Kabupaten Kota
di Provinsi Riau, 2015

Kondisi jalan-jalan yang ada saat ini di Riau adalah sudah memiliki stabilisasi perkuatan tanah dasar dan sebagian besar sudah diberi lapis permukaan dengan perkerasan lentur (aspal) namun sebagian besar mengalami kerusakan akibat kualitas pembangunannya yang rendah dan pada daerah tertentu tanahnya yang labil. Strategi perbaikan jalan kedepan adalah dengan mengganti seluruh sistem perkerasan lentur ini dengan membangun di atasnya perkerasan rigid dari beton bertulang. Walaupun biaya pembangunan jalan perkerasan kaku cukup tinggi tetapi biaya pemeliharaan yang rendah, sehingga dalam jangka panjang (di atas 10 tahun), perkerasan kaku ini akan

menguntungkan karena terjadinya penambahan volume dan intensitas penggunaan yang tinggi.

Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya migas dan industri lainnya yang besar dan menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara melalui export dan import barang, namun dapat dilihat bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding dengan jenis dan kondisi jalan yang ada. Dimana jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 untuk status jalan provinsi hanya 30,70% dan nasional 73,04% dan selebihnya mengalami kerusakan.

Tabel 2.63:
Panjang Jalan Menurut Status Per Kabupaten Kota Tahun 2015

No	Kabupaten Kota	Status Jalan (km)			
		Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah
1	Kuantan Singingi	1.189,85	215,66	73,56	1.479,07
2	Indragiri Hulu	1.737,03	277,54	164,92	2.179,49
3	Indragiri Hilir	1.198,54	481,88	122,01	1.802,43
4	Pelalawan	2.555,59	256,2	131,59	2.943,38
5	Siak	2.880,19	256,37	66,73	3.203,29
6	Kampar	2.219,17	487,94	143,01	2.850,12
7	Rokan Hulu	2.145,97	408,91	-	2.554,88
8	Bengkalis	1.318,57	153,72	113,54	1.585,83
9	Rokan Hilir	1.967,41	296,3	127,03	2.390,74
10	Kepulauan Meranti	941,79	-	-	941,79
11	Pekanbaru	2.771,13	86,6	159,50	3.017,23
12	Dumai	1.561,24	112,2	32,58	1.706,02
Total		22.486,48	3,033,32	3,033,32	23.549,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, 2015

Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan adanya industri hasil hutan dan perkebunan yang melewati jalan tersebut dan melebihi MST dari jalan yang bersangkutan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan jalan dimana 78,60% dari total panjang jalan yang ada di provinsi Riau merupakan jalan kabupaten dan yang paling banyak mengalami kerusakan adalah jalan-jalan tersebut. Memang sangat ironis kerusakakan jalan tersebut disebabkan berat tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut untuk pengangkutan bahan baku industri seperti TBS kelapa sawit, kayu HTI, dan lainnya untuk diolah dan hasil industrinya seperti CPO, Biodiesel,

Pulp dan Paper, batu bara dan sebagian besar hasil industri tersebut di ekspor.

Namun pembiayaan perbaikan jalan tersebut menjadi beban APBD kabupaten dan provinsi sesuai dengan status jalan. Akan penerimaan negara melalui pajak ekspor (bea keluar) dari hasil industri yang diekspor tidak dapat dikembalikan ke daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut karena peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan bea keluar (PNBP No 73 Tahun 1999). Kondisi tersebut menyebabkan beban anggaran APBD kabupaten kota dan provinsi semakin tinggi untuk perbaikan jalan sementara yang diterima daerah hanya pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan serta retribusi yang dibenarkan oleh peraturan per undang-undangan sehingga kondisi jalan-jalan tersebut dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 2.61.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi luas panen adalah luas tanam dimana penanaman sangat dipengaruhi oleh karakteristik lahan. Sebagian besar lahan sawah di Riau adalah lahan sawah tadah hujan, dimana dalam penanamannya sangat tergantung iklim yaitu adanya musim penghujan. Di beberapa daerah sudah ada yang mulai menanam padi sebanyak dua kali dalam setahun (Intensitas Pertanaman/IP=200) karena ditunjang dengan saluran irigasi yang mulai berfungsi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa mendatang, terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Faktor resiko pertama adalah berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air. Dalam jangka pendek dan panjang Riau menghadapi empat ancaman serius yang berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air yaitu peningkatan laju konversi lahan sawah menjadi lahan komoditas perkebunan, rusaknya jaringan irigasi, rusaknya beberapa sistem hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penguasaan lahan yang sempit. Oleh karena itu, dalam jangka pendek dan panjang diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi tekanan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan di Riau melalui pengembangan produksi komoditas yang bernilai tinggi dengan muatan teknologi yang

tinggi pula, meningkatkan alokasi fiskal untuk pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah baru, perbaikan sistem hidrologi DAS yang rusak.

c. Rasio Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan salah satu sarana pelayanan umum yang wajib diperlukan oleh masyarakat, Jumlah tempat ibadah secara umum mengalami peningkatan, namun karena jumlah pemeluk agama juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, Rasio tempat ibadah mengalami penurunan dari 5.385,36 rumah ibadah per jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi 2.017,35 rumah ibadah per jumlah penduduk pada tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64:
Rasio Tempat Ibadah Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015

No	Bangunan Rumah Ibadah	Perkembangan						Pertumbuhan (%)/Thn
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Mesjid Unit	13.269	13.958	13.718	13.626	11.287	13.438	11,12
	Pemeluk	4.953.991	5.109.346	5.086.455	5.235.931	5.151.169	5.652.344	1,00
	Rasio	373,35	366,05	370,79	384,26	456,38	420.62	24,09
2.	Gereja	1.360	1.629	1.557	1.573	1.573	2.017	4,09
	Pemeluk	433.770	502.482	507.626	388.221	425.149	507.744	0,71
	Rasio	318,95	308,46	326,03	246,80	270,28	251,73	(3,85)
3.	Pura	223	100	17	17	17	18	(8,66)
	Pemeluk	21.622	16.230	17.416	21.267	19.164	13.125	(1,35)
	Rasio	96,96	162,30	1.024,47	1.251,00	1.127,29	729.17	115,10
4.	Vihara	29	8	168	250	246	342	289,33
	Pemeluk	133.287	143.648	144.715	175.961	181.675	176.368	8,34
	Rasio	4.596,10	17.956,00	861,40	703,84	738,52	515.70	37,38
5.	Kelenteng	-	-	27	27	27	40	16,05
	Pemeluk	361	2.599	3.354	5.095	6.592	4.005	182,57
	Rasio	-	-	124,22	188,70	244,15	100,13	7,43

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau dalam Angka, 2015)

Namun jika dilihat lebih detail maka percepatan pembangunan rumah ibadah umat kristen (gereja) lebih lambat berbanding agama lainnya. Misalnya rasio satu pura terhadap jumlah umat hindu berbanding 318,95 pada tahun 2010 kemudian menurun menjadi 251,73 pada tahun 2015 artinya pembangunan rumah ibadah gereja

lebih sedikit dari pertambahan jumlah umat kristen. Sementara rasio rumah ibadah yang lainnya lebih baik artinya pembangunan rumah ibadah agama lainnya lebih lebih banyak ketimbang pertambahan jumlah penganutnya, seperti terlihat pada Tabel 2.65.

Banyaknya rumah ibadah per Kabupaten Kota sekaligus dapat menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penganutnya yang semakin bertambah baik yang diakibatkan oleh kelahiran dan migrasi atau perpindahan. Misalnya jumlah mesjid dan Mushalla terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 1.674 unit dan jumlah rumah ibadah umat nasrani terbanyak di kabupaten Rokan Hilir mencapai 381 unit berbanding kabupaten kota lainnya.

Kedua kondisi menggambarkan perkembangan jumlah penganut yang semakin ramai. Sementara untuk Rokan Hilir hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan sumatera utara dimana ramai warganya melakukan migrasi ke wilayah tersebut. Jumlah rumah ibadah menurut kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65:
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015

Kabupaten Kota	Jenis Rumah Ibadah					
	Mesjid + Mushalla + Langgar	Gereja Katholik	Gereja Protestan	Vihara	Pura	Konghucu
Kuantan Singingi	1.342	16	56	4	-	-
Indragiri Hulu	1.056	75	19	6	-	-
Indragiri Hilir	1.674	6	1	13	-	3
Pelalawan	990	16	56	4	-	-
Siak	929	14	150	19	3	4
Kampar	1.657	31	228	3	1	-
Rokan Hulu	1.157	53	257	3	-	-
Bengkalis	1.297	32	127	43	-	4
Rokan Hilir	1.203	83	381	26	4	10
Kepulauan Meranti	547	4	23	37	-	-
Pekanbaru	1.155	23	253	166	9	9
Dumai	431	21	92	18	1	10
Provinsi Riau	13.438	374	1.643	342	18	40

Sumber: Kementerian Agama Wilayah Provinsi Riau

d. Perkembangan Pembangunan Pelayanan Air Bersih dan Air minum

Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan,Sistem penyediaan air

bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dll). Sistem penyediaan air bersih perdesaan terutama untuk pemenuhan kebutuhan domestic. Penyediaan air bersih perkotaan diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) jaringan perpipaan, sedangkan untuk air bersih perdesaan diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) jaringan sederhana, Baik di perkotaan maupun perdesaan masih ditemui pemenuhan air bersih oleh penduduk secara individu-rumah tangga langsung dari sumber air baku permukaan maupun air tanah dangkal.

Sumber air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan oleh perusahaan air minum di Provinsi Riau berasal dari air sungai, waduk, mata air dan lainnya. Selama periode 2011-2015, sumber air baku terbesar yang digunakan oleh perusahaan air minum adalah air sungai, tetapai dengan tren produksi yang terus menurun sebesar 4,72% pertahun. Sumber air lainnya merupakan sumber air baku kedua terbesar dengan tren produksi yang meningkat dengan rata-rata peningkatan 71,42% per tahun. Selama periode 2011-2015, rata-rata pertumbuhan produksi air minum oleh perusahaan air minum turun sebesar 1,77% per tahun. Selengkapnya lihat Tabel 2.66.

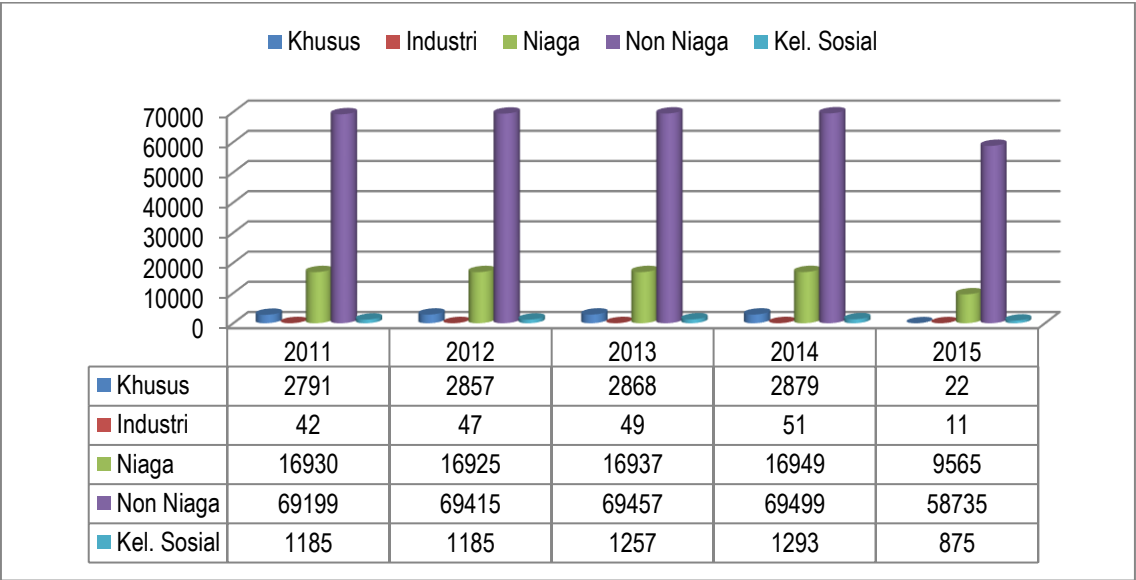
Tabel 2.66:
Produksi Perusahaan Air Minum Menurut Sumber Air Yang Digunakan di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Sumber Air (m3)	Tahun					Pertumbuhan/ Thn (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Sungai	18.379.597	18.381.882	18.400.000	13.368.558	14.483.924	-4,72
Waduk	397.333	399.764	399.800	235.057	105.457	-23,93
Mata Air	297.658	298.027	298.222	0	19.842	-24,95
Lainnya	989.700	990.986	990.991	3.803.389	3.870.271	71,42
Jumlah (m³)	20.064.288	20.186.367	20.200.004	17.407.004	18.839.494	-1,77

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2015)

Produksi perusahaan air minum ini disalurkan kepada 5 kelompok pelanggan yaitu kelompok khusus, industri, niaga, non niaga dan kelompok sosial. Kelompok pelanggan terbesar yang dilayani air minum adalah kelompok pelanggan non niaga atau rumah tangga,

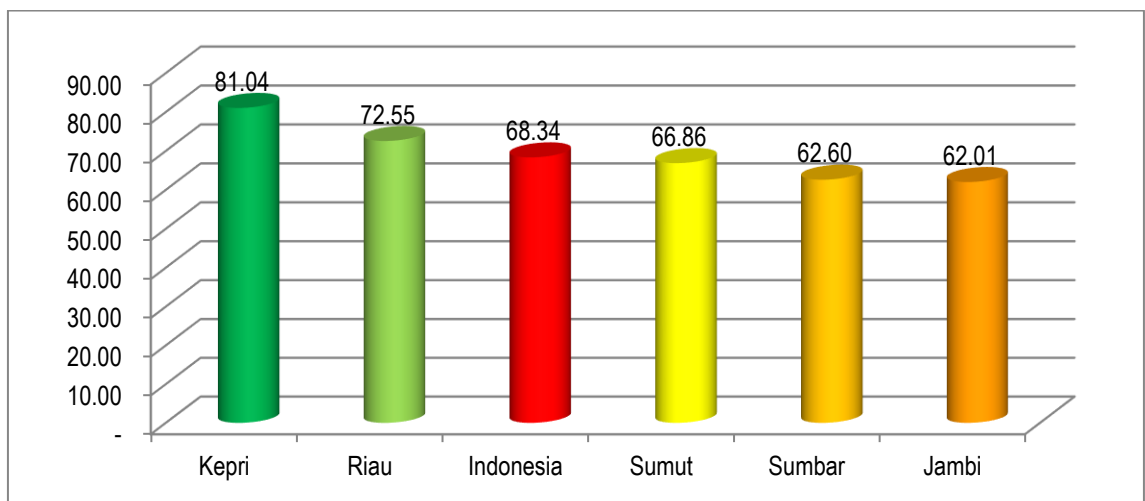
diikuti kelompok pelanggan niaga, kelompok khusus, kelompok sosial dan industri. Selama periode 2011 – 2015, rata-rata pertumbuhan pelanggan air minum menurun sebesar 5,65% per tahun.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011 – 2015)

Gambar 2.75
Jumlah Pelanggan Air Minum Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Pelayanan air minum merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan provinsi yang baik dan sehat, Kebutuhan air minum bagi masyarakat Provinsi Riau pada saat ini sebagian disediakan oleh PDAM, UPT Air minum, dan BPAM, Jumlah cakupan pelayanan air minum perpipaan masih terbatas, hanya pada Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten dan sebagian Ibu Kota Kecamatan. Persentase rumah tangga penyediaan air minum layak secara nasional mencapai 68,63 %, sementara Provinsi Riau berada diatas rata-rata Nasional (72,55 %) di masing-masing, sedangkan provinsi tetangga dengan persentase rumah tangga penyediaan sumber air minum layak diatas rata-rata nasional selain Provinsi Riau adalah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan persentase rumah tangga penyediaan sumber air minum layak dibawah rata-rata nasional terdapat pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.76.



Sumber: BPS Republik Indonesia (2015)

Gambar 2.76
Persentase Rumah Tangga Penyediaan Sumber Air Minum Layak
di Provinsi Riau, Provinsi Tetangga dan Indonesia, Tahun 2014

Pemenuhan kebutuhan air minum Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan airtanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), sungai, situ dan pelayanan PDAM.

Lebih tingginya pertumbuhan pelanggan dibanding produksi air minum menjadikan ketersediaan dan kualitas air minum yang disuplai semakin menurun. Kondisi ini terlihat dari menurun tajamnya pertumbuhan pelanggan industri yang menggunakan air yang diproduksi PDAM dan kemudian pihak industri mengambil keputusan untuk memproduksi sendiri air minumnya. Oleh karena itu, upaya meningkat produksi air minum untuk melayani kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus terus dilakukan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak hanya sebesar 83,01%, sisanya 16,99% masih mengkonsumsi air minum yang belum layak. Sedangkan ketersediaan air minum di provinsi Riau menurut kabupaten kota yang tersebar di 12 Kabupaten Kota dijelaskan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67:
Kapasitas Ketersediaan Air Minum Layak
Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau
Tahun 2011-2013 dan 2014-2015

Kabupaten Kota	Tahun			Pertumbuhan/Tahun (%)	Tahun		Pertumbuhan/Tahun (%)
	2011	2012	2013		2014	2015	
Kuantan Singingi	23,22	25,65	23,29	0,63	52,31	65,83	25,85
Indragiri Hulu	27,42	34,31	34,55	12,91	59,05	76,61	29,74
Indragiri Hilir	90,85	82,37	87,15	-1,77	85,86	95,60	11,34
Pelalawan	29,06	23,02	26,05	-3,81	59,49	75,56	27,01
Siak	34,06	26,78	24,53	-14,89	74,02	82,46	11,40
Kampar	25,74	33,39	37,81	21,48	71,15	73,83	3,77
Rokan Hulu	23,41	23,23	33,66	22,06	54,85	71,65	30,63
Bengkalis	43,37	39,18	36,94	-7,69	79,57	86,34	8,51
Rokan Hilir	46,46	47,69	43,55	-3,02	65,37	84,83	29,77
Kep.Meranti	75,89	80,39	88,32	7,90	80,21	92,98	15,92
Pekanbaru	16,28	11,96	12,81	-9,71	88,57	91,78	3,62
Dumai	25,34	21,37	19,24	-12,82	72,43	88,53	22,23
Provinsi Riau	37,56	36,27	37,43	-0,12	72,59	83,01	14,35

Sumber: Ciptada Provinsi Riau, 2016 (Susenas, 2014-2015)
 Catatan: Perhitungan Tahun 2014-2015 Menggunakan Formula Baru.

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum/masak pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.68. Di sini terlihat bahwa sumber air minum yang berasal dari leding (pipa) dan air kemasan hanya mencapai 46,50%. Jumlah ini masih didominasi oleh kawasan perkotaan Pekanbaru dan Dumai. Jumlah ini masih terlalu kecil mengingat, jangkauan air yang berasal dari leding (sistem perpipaan) masih sangat terbatas. Sumber air minum masih didominasi oleh air kemasan (galon isi ulang) yang harganya relatif mahal dan tidak efisien.

Di Riau saat ini, belum ada kota yang pelayanan air minumnya bisa diandalkan, Kota Dumai, hingga saat ini, kebutuhan air minumnya masih sangat tergantung kepada air hujan dan air yang dibeli dengan menggunakan truk dan jerigen, terutama sekali pada musim kemarau tiba, karena air tanah/sumur untuk kawasan yang dekat dengan laut/rawa tidak bisa digunakan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir adalah yang terparah dalam penyediaan air minum untuk warganya.

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera, persentase ketersediaan air minum layak di Provinsi Riau termasuk yang cukup baik dibandingkan dengan Sumut, Sumbar dan Jambi, persentase ketersediaan air minum layak di Riau adalah yang tertinggi kedua dan di atas rata-rata nasional lihat Gambar 2.76. Namun kondisi 72,55% ketersediaan air minum masih dapat ditingkatkan mengingat Riau dilintasi oleh empat sungai besar (Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengalir banyak wilayah yang dapat menjadi sumber air minum. Rencana pemenuhan air minum layak dapat terus ditingkatkan mengingat Riau dilintasi oleh empat sungai besar (Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengalir banyak wilayah yang dapat mengembangkan SPAM Regional untuk mendukung capaian air minum khususnya bagi Kabupaten/Kota yang kesulitan air baku

Masih lemahnya komitmen dan instrumen kebijakan serta strategi pembangunan air minum baik di Provinsi Riau memperparah kondisi penyediaan air minum di provinsi ini. Selain itu menurunnya persentase cakupan pelayanan air minum juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Tidak cukupnya alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur jaringan dan instalasi air minum serta tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan mengakibatkan turunnya pelayanan air minum di Provinsi Riau sehingga jauh tertinggal dari apa yang telah dicapai di skala nasional.

Persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan sumber air minum menunjukkan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dan memasak dari sumur yang tidak terlindungi. Sumber air minum yang kurang layak umumnya berasal dari air hujan, air sungai dan sumur tak terlindung. Di kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, sumber air minum didominasi oleh air hujan yaitu sebesar 72,37%, dan 76,21%.

Tabel 2.68:
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Kabupaten Kota di Provinsi Riau, Tahun 2015

KabupatenKota	SumberAir Minum					
	Leding dan Air Kemasan	Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur tak Terlindungi	Mata Air	Lainnya
Kuantan Singingi	31,55	8,20	39,76	15,87	1,70	2,93
Indragiri Hulu	46,54	7,86	25,10	17,60	0,12	2,77
Indragiri Hilir	15,13	0,52	2,03	2,19	0,17	79,95
Pelalawan	59,23	11,27	8,67	15,50	1,47	3,87
Siak	54,58	16,26	14,66	4,70	0,26	9,55
Kampar	38,20	15,52	32,08	5,67	6,25	2,28
Rokan Hulu	33,10	10,66	43,25	8,70	3,22	1,08
Bengkalis	48,87	4,38	6,68	9,23	0,00	30,85
Rokan Hilir	37,34	10,05	17,61	8,47	0,36	26,18
Kep. Meranti	9,08	0,28	2,32	4,97	1,04	82,31
Pekanbaru	79,64	16,42	3,16	0,48	0,31	0,00
Dumai	75,03	12,67	5,09	2,48	0,56	4,17
Jumlah	46,50	10,40	16,42	6,95	1,42	18,32

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

Tabel 2.69:
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Memasak Kabupaten Kota di Provinsi Riau, Tahun 2015

KabupatenKota	SumberAir Memasak					
	Leding & Air Kemasan	Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur tak Terlindungi	Mata Air	Lainnya
Kuantan Singingi	5,17	11,53	54,10	20,42	2,51	6,27
Indragiri Hulu	21,21	11,26	35,27	25,15	0,66	6,45
Indragiri Hilir	4,35	0,71	1,83	2,35	0,17	90,59
Pelalawan	22,94	26,58	18,72	19,20	3,09	9,47
Siak	23,09	28,37	21,84	7,42	0,77	18,52
Kampar	13,80	25,32	41,41	8,04	5,71	5,71
Rokan Hulu	8,06	11,87	63,63	11,42	3,88	1,13
Bengkalis	9,00	14,72	23,82	13,71	0,77	37,98
Rokan Hilir	8,77	16,99	24,04	14,25	0,55	35,39
Kep. Meranti	1,79	0,28	1,84	4,90	0,55	90,64
Pekanbaru	26,42	56,51	7,57	3,41	0,81	5,28
Dumai	23,84	50,30	9,67	4,21	0,70	11,29
Jumlah	14,84	23,97	24,95	10,16	1,80	24,27

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

2.3.1.3.2 Bidang Urusan Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Menurut rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2013–2030 yang saat ini dalam tahap proses pengesahan, berdasarkan hasil rekomendasi tim terpadu terdiri atas: (1) Kawasan Hutan seluas 4.411.648 hektar atau 48,82%; (2) Areal penggunaan lain seluas 4.505.187 hektar (49,18%); dan perairan sungai seluas 119.260 hektar (1,32%). Dari luas hutan usulan tim terpadu, seluas 3.986.475 hektar atau 44,11% dari total luas daratan Provinsi Riau merupakan luas hutan tetap (hutan lindung, hutan suaka alam/hutan pelestarian alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap) dan seluas 425.173 hektar (18,06%) merupakan hutan produksi konversi.

Rancangan RTRW ke 12 Kabupaten/kota se Provinsi Riau juga telah tersedia dan dalam proses persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70:
Ketersediaan Dokumen RTRW
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten/kota	Dokumen RTRW	Keterangan
1	Kuantan Singingi	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
2	Indragiri Hulu	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
3	Indragiri Hilir	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
4	Pelalawan	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
5	Siak	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
6	Kampar	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
7	Rokan Hulu	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
8	Rokan Hilir	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
9	Bengkalis	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
10	Kep. Meranti	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
11	Pekanbaru	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
12	Dumai	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
	Provinsi Riau	2013-2030	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2016)

Sebagai “matra ruang” dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam penyusunan RTRWP Riau 2014-2030 disusun berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat dalam wilayah dan masyarakat Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karakteristik wilayah, maka dirumukan kebijakan penataan ruang Provinsi Riau meliputi:

1. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
2. Pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui skenario riau hijau;
3. Penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan; dan
4. Pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat menghasilkan nilai tambah,

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sampai akhir

kurun RTRWP tahun 2014-2030, Rencana sistem perkotaan Provinsi Riau dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN),

Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayaran internasional jarak dekat sampai dengan menengah seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara Asean yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif masih dekat, Dari segi transportasi udara juga ditunjang oleh fasilitas bandar udara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Tersier (PPT), yang terutama untuk pelayanan domestik, Namun, untuk beberapa bandara yang lokasinya dekat ke negara tetangga yang berbatasan (terutama Singapura dan Malaysia) maka juga dimungkinkan terbuka bagi penerbangan intenasional yang bersifat lintas batas, Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas, meningkatkan pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, dikembangkan struktur sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut:

Tabel 2.71:
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Pekanbaru; Kota Dumai,	a) Bangkinang; b) Pasir Pangairan; c) Bagan Siapi-api; d) Pangkalan Kerinci; e) Teluk Kuantan; f) Bengkalis; g) Siak Sri Indrapura; h) Rengat; i) Tembilahan,	a) Selat Panjang b) Kuala Enok c) Tanjung Buton	a) Ujung Tanjung; b) Ujung Batu; c) Sungai Pakning; d) Bagan Batu; e) Duri; f) Perawang; g) Air Molek; h) Sungai Guntung; i) Sungai Apit; j) Pulau Kijang

Sumber: Hasil Kajian Tim Penyusunan RTRW Provinsi Riau

Dalam pengembangan wilayah, pusat-pusat permukiman perkotaan secara umum akan berfungsi sebagai simpul koleksi-distribusi dan sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi bagi wilayah hinterlandnya. Sebagai simpul koleksi-distribusi, pada satu sisi akan berperanan sebagai lokasi/tempat pemasaran bagi berbagai produk perekonomian yang dihasilkan wilayah hinterland (fungsi koleksi), sedangkan pada sisi sebaliknya merupakan tempat masuk dan didistribusikannya berbagai produk kawasan perkotaan yang umumnya berupa produk industri ke wilayah hinterland (fungsi distribusi),

Untuk menciptakan arus pergerakan barang dan penumpang yang efisien, efektif dan menerus dari kawasan-kawasan produksi ke lokasi-lokasi pasar di dalam wilayah maupun di luar wilayah (dan sebaliknya) maka penataan hubungan antar pusat-pusat permukiman perkotaan dan dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah merupakan hal yang sangat penting. Penataan hubungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem dan fasilitas kegiatan transportasi secara terpadu inter dan intra moda (darat, laut dan udara) sehingga mampu menghasilkan layanan angkutan yang cepat, aman dan berbiaya murah bagi wilayah. Dengan demikian, transportasi sebagai salah satu unsur biaya dalam produksi diharapkan mampu mendukung upaya penciptaan daya saing bagi produk-produk daerah di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional, utamanya di dalam rangka menyongsong era global sebagaimana gambar berikut.

pendidikan tinggi, pusat pelayanan wisata, pusat alih muat angkutan laut nasional & internasional dll.

3. Mengembangkan permukiman perkotaan baru secara terarah, terencana dan terprogram, khususnya perkotaan yang memiliki arti penting dan strategis bagi wilayah (provinsi maupun kabupaten) seperti: Tanjung Buton di Kabupaten Siak, Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis, Tugau di Kabupaten Pelalawan dll.
4. Mengembangkan permukiman perkotaan ukuran menengah (jenjang fungsi PKL) di sekitar perkotaan Pekanbaru yang diproyeksikan berkembang pesat menjadi “metropolis” berdasarkan konsep “dekonsentrasasi planologis”, mencakup perkotaan-perkotaan: Minas dan Perawang di Kabupaten Siak, serta Pangkalan Baru, Tambang dan Petapahan di Kabupaten Kampar.
5. Melaksanakan peningkatan pengembangan dan/atau pembangunan baru fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara secara terarah, terencana dan terprogram pada semua jenjang fungsi untuk menunjang permukiman perkotaan utama (PKN, PKW dan PKL) yang telah direncanakan, seperti: pengembangan Bandara Pinang Kampai (Pusat Penyebaran Sekunder) di Kota Dumai, Pelabuhan Tanjung Buton (Pelabuhan Internasional) di Kabupaten Siak dll.
6. Mengupayakan percepatan pembangunan dan/atau operasionalisasi fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara di permukiman perkotaan jenjang PKN dan PKW yang mengalami hambatan dalam pengembangannya, yaitu: Pelabuhan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan Nasional).

Meningkatkan pengembangan dan/atau pembangunan baru prasarana dan sarana jaringan jalan, serta fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan interaksi ruang dan ekonomi antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan kawasan-kawasan produksi (wilayah hinterland), dan antara pusat-pusat permukiman perkotaan dan kawasan-kawasan produksi dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah (Pelabuhan Laut utama dan Bandara Pusat Penyebaran),

Selanjutnya Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan kawasan

lindung, perwujudan kawasan budidaya dan perwujudan kawasan strategis provinsi, Sedangkan Arahan perizinan merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Tabel 2.72:
Ketentuan Umum Zonasi

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
A	Pola Ruang	
1	Kawasan Lindung	
	a. Kawasan Hutan Lindung	1) Dalam kawasan hutan lindung masih dimungkinkan melakukan kegiatan lain sepanjang tidak merusak fungsi hutan lindung dan bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung. 2) Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka (open pit), tidak berdampak luas terhadap lingkungan dan kawasan bawahannya, harus dilakukan reklamasi pada areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung serta telah memenuhi ketentuan perundangundangan lain yang berlaku. 3) Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pembangunan prasarana wilayah diupayakan untuk tidak melewati kawasan hutan lindung dan apabila harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan: a) Harus adanya jaminan bahwa kegiatan dimaksud tidak menyebabkan terjadinya pengembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. b) Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
	b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
	1) Kawasan Resapan Air	1) Meminimalisir adanya kegiatan budidaya di atas kawasan resapan air, Apabila telah terdapat kegiatan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		budidaya di areal tersebut, maka harus menerapkan budidaya yang mendukung dan selaras dengan fungsi kawasan serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat: a) Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%), b) Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi. c) Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
	2) Kawasan Gambut	1) Meminimalisir adanya kegiatan budidaya di atas lindung gambut dan penelitian gambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter, Apabila telah terdapat kegiatan budidaya di areal tersebut, maka harus menerapkan budidaya yang mendukung dan selaras dengan fungsi kawasan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi lindung gambut dan penelitian gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan: a) Harus adanya jaminan bahwa kegiatan dimaksud tidak menyebabkan terjadinya pengembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. b) Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	c. Kawasan Perlindungan Setempat	
	1) Jalur Hijau Penahan Intrusi Air Laut dan Sempadan Pantai	1) Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam wilayah yang tingkat abrasi dan intrusi air laut yang tinggi, tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system). 2) Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona budidaya dan zona lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2) Sempadan Sungai	1) Dalam kawasan sempadan sungai dapat dilakukan kegiatan budidaya sepanjang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi sungai, 2) Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan: a) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut, b) Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
	3) Sempadan Waduk/Danau	1) Kegiatan budidaya masih diperkenankan sepanjang tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi danau/waduk. 2) Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang: a) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut yang dapat merusak fungsi danau/waduk. b) Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
	4) Sempadan Mata Air	1) Pada kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air. 2) Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
	5) RTH	1) Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya. 2) Dalam kawasan ruang terbuka hijau dilarang dibangun fasilitas ekonomi, SPBU dan kegiatan lain yang berorientasi ekonomi. 3) Dalam kawasan ruang terbuka hijau

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
	d. Kawasan Hutan Suaka Alam	
	1) Cagar Alam	1) Dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terancamnya keutuhan kawasan, pada kondisi tertentu dapat dilakukan kegiatan penunjang budidaya yang meliputi kegiatan pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan plasma nutfah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 2) Dalam kawasan cagar alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata alam.
	2) Suaka Margasatwa	1) Dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas. 2) Dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan. 3) Dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan mendirikan bangunan secara terbatas yang khusus ditujukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam, Pendirian bangunan tersebut harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. 4) Melarang adanya perubahan bentang alam yang mengusik atau mengganggu kehidupan satwa. 5) Memanfaatkan kawasan suaka margasatwa untuk kegiatan pengawetan satwa langka
	e. Kawasan Pelestarian Alam	
	1) Kawasan Taman Nasional	1) Dalam kawasan taman nasional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata terbatas, budidaya penunjang, dan jasa lingkungan terbatas. 2) Pemanfaatan kawasan dalam taman nasional disesuaikan dengan masing – masing sistem zonasi yang terdapat pada taman nasional.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		3) Masyarakat tradisional yang telah lebih dahulu bermukim sebelum taman nasional ditetapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam secara terbatas untuk mendukung kehidupan mereka pada zona yang ditetapkan.
	2) Kawasan Taman Hutan Raya	1) Dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi dan kekhasan kawasan taman hutan raya sebagai pembentuk ekosistem. 2) Kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan. 3) Dalam kawasan taman hutan raya diperbolehkan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Dalam kawasan taman hutan raya diperkenankan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata. 5) Dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Melarang adanya pengurangan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan.
	3) Kawasan Taman Hutan Wisata	1) Tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan hutan wisata. 2) Dalam kawasan hutan wisata dilarang dilakukan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam. 3) Dalam kawasan hutan wisata diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan taman nasional. 4) Dalam kawasan hutan wisata masih diperbolehkan dilakukan pendirian bangunan secara terbatas dan hanya ditujukan semata-mata untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam dan sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan. 5) Melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata 6) Meningkatkan kualitas lingkungan dikawasan hutan wisata dan sekitarnya

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
	4) Kawasan Buffer Areal Konservasi	1) Dilarang dilakukan pembangunan yang dapat menurunkan fungsi kawasan penyangga dan merubah bentang alam serta mempengaruhi fungsi kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 2) Kegiatan budidaya pada kawasan penyangga masih dimungkinkan sepanjang kegiatan tersebut dikelola mampu mendukung fungsi dan keberadaan kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 3) Pada kawasan buffer yang dibebani hak milik, maka hak tersebut tetap berada pada pemegang hak dan dalam pengelolaan harus memperhatikan fungsi kawasan suaka alam atau cagar alam yang dilindungi tersebut serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
	5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	1) Kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai. 2) Tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
	f. Kawasan Rawan Bencana	1) Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi. 2) Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana. 3) Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (early warning system).
2	Kawasan Budidaya	
	a. Kawasan Hutan Produksi	1) Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya diluar kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi, Pemanfaatan hutan produksi untuk kepentingan diluar sektor kehutanan masih dimungkinkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam peraturan di sektor kehutanan. 2) Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan, Pemilik perijinan pengelolaan hutan produksi bertanggungjawab terhadap upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya. 3) Mengendalikan neraca sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang 4) Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan kecuali telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. 5) Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
	b. Kawasan Hutan Rakyat	1) Pengusahaan hutan rakyat harus mampu mendorong peningkatan perkembangan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. 2) Pengusahaan hutan rakyat dilakukan tanpa mengurangi fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air, dan lingkungan. 3) Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 4) Pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
	c. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta	1) Kawasan perkebunan swasta (PbS/N) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar negara dan swasta yang memiliki badan hukum.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		2) Kegiatan budidaya perkebunan swasta tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. 3) Jenis tanaman yang dibudidayakan pada kawasan perkebunan swasta merupakan jenis tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan agroklimat dan seusia dengan perijinan yang diberikan, Perubahan jenis tanaman dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pemilik perijinan dalam kawasan perkebunan swasta tidak diperkenankan untuk menambah luasan areal perkebunan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. 5) Diperkenankan adanya bangunan pendukung yang bersifat menunjang kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. 6) Alih fungsi kawasan perkebunan besar menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7) Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. 8) Kegiatan perkebunan swasta harus diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan, Pemilik perijinan pengelolaan perkebunan swasta bertanggungjawab terhadap upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya. 9) Perkebunan Swasta besar berkewajiban melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai dan sekitar mata air serta kubah-kubah gambut (peat dome) yang berada dalam areal perizinannya dengan menerapkan manajemen tata air yang baik dan mengalokasikannya sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi. 10) Pemilik perijinan perkebunan swasta/nasional berkewajiban membangun kebun untuk

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		masyarakat sekitar dan atau melakukan kemitraan pembangunan kebun dan pengolahan dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	d. Kawasan Perkebunan Rakyat	1) Kawasan perkebunan rakyat (PbR) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat tempatan/tradisional serta koperasi yang dibentuk oleh masyarakat tempatan/tradisional. 2) Dalam pengelolaan perkebunan rakyat, harus memperhatikan kesesuaian jenis tanaman, prinsip – prinsip budidaya yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan, terutama kawasan perkebunan rakyat yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air perlu mengintegrasikan dengan prinsip – prinsip perlindungan. 3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membina masyarakat yang terdapat dalam kawasan perkebunan rakyat guna menciptakan tertib pemanfaatan ruang.
	e. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	1) Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi. 2) Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air. 3) Peruntukan budidaya pertanian pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. 4) Pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian. 5) Dalam kawasan pertanian tanaman pangan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas,

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		penelitian, dan pendidikan. 6) Kegiatan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
	f. Kawasan Perikanan	1) Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif. 2) Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. 5) Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
	g. Kawasan Pertambangan	1) Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. 2) Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang. 3) Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. 4) Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan. 5) Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan. 6) Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
	h. Kawasan Industri	1) Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		aspek ekologis. 2) Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman 3) Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. 6) Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas. 7) Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
	i. Kawasan Pariwisata	1) Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam. 2) Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata. 3) Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. 5) Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam. 6) Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.
	j. Kawasan Permukiman	1) Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		2) Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. 3) Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 4) Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. 5) Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan. 6) Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis. 7) Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. 8) Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman. 9) Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
	k. Kawasan Peruntukan Lainnya	1) Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Pada kawasan pelabuhan, bandara, peruntukan infrastruktur umum lainnya diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. 3) Dalam peruntukan kawasan masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 4) Alokasi untuk infrastruktur umum adalah lahan terbuka yang belum secara khusus ditetapkan fungsi

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
		pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia. 5) Kriteria peruntukan lokasi disesuaikan dengan kriteria pelabuhan, bandara, dan infrastruktur umum yang akan dikembangkan. 6) Lokasi kawasan pelabuhan dan bandara tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman. 7) Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah pelabuhan, bandara, dan infrastruktur umum lainnya yang akan dikembangkan. 8) Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi pelabuhan dan bandara, serta fasilitas pendukungnya.
B	Struktur Ruang	
1	Sistem Perkotaan	
2	Sistem Jaringan Transportasi	
	a. Transportasi Darat	1) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi dan hambatan lalu lintas regional. 2) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan. 3) Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1. 4) Lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
	b. Transportasi Laut	1) Pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut. 2) Pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.
	c. Transportasi Udara	1) Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). 2) Pelabuhan udara diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

NO	ZONA/KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
3	Sistem Jaringan Prasarana Energi	3) Tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dan bangunan lain yang akan mengganggu dan merusak system jaringan. kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi	4) Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; 5) Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider)

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Pada tahun 2010, jumlah rumah layak huni yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau sebanyak 800 unit yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota kemudian pada tahun 2014 hanya mencapai 417 unit. Pada tahun 2010 hingga 2014, jumlah unit pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin berfluktuatif menurun. Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun selama ini jauh lebih rendah dibanding jumlah keluarga miskin yang menempati rumah yang belum layak.

Pada tahun 2015, dengan jumlah penduduk miskin 499.890 jiwa, setidaknya masih perlu dibangun sebanyak 30,000 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin harus menjadi prioritas karena pembangunan rumah layak huni merupakan bagian bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memiliki standart pelayanan minimum (SPM). Jika dilihat pertumbuhan pembangunan perumahan di provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 15% per tahun dan penurunan tertinggi terdapat di Kota Dumai Lengkapnya lihat Tabel 2.73.

Tabel 2.73:
Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)
Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

No	Kabupaten/kota	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kuantan Singingi	60	20	30	26	11	-22
2	Indragiri Hulu	80	20	45	52	35	8
3	Indragiri Hilir	80	40	50	60	45	-8
4	Pelalawan	60	30	24	78	60	33
5	Siak	80	30	30	39	14	-24
6	Kampar	60	30	60	111	111	34
7	Rokan Hulu	60	20	45	26	19	-3
8	Rokan Hilir	55	20	30	31	19	-13
9	Bengkalis	70	30	25	81	59	31
10	Kep. Meranti	60	30	45	60	53	5
11	Pekanbaru	85	20	10	30	(8)	-13
12	Dumai	50	20	26	13	1	-43
Jumlah		800	320	400	640	417	-15

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2016)

Keterangan: *Estimasi

Program pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk kurang mampu atau miskin. Upaya pembangunan RSLH diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan dibidang infrastruktur karena salah satu indikator yang digunakan untuk mengkategorikan masyarakat miskin adalah terkait dengan kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga miskin.

2.3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan

bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pada Tahun 2015, beberapa kejadian di Provinsi Riau yang berpotensi dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 2.74 di bawah:

Tabel 2.74:
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Provinsi Riau Tahun 2015

No	Materi Unjuk Rasa	Kasus	
		Jumlah	Persentase
1	Masalah pendidikan	8	4.00
2	Pemerintah Pusat dan Daerah	17	8.50
3	Terkait dengan politik dan hukum	106	53.00
4	Masalah lainnya	34	17.00
5	Masalah lahan	31	15.50
6	Masalah tenaga kerja	4	2.00
Jumlah		200	100,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (2016)

Dengan perkembangan globalisasi dan dinamika kehidupan masyarakat di daerah, berdampak terjadinya potensi-potensi konflik dan kerawanan sosial lainnya di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik yang bersifat anarkis, SARA dan disamping konflik-konflik lainnya yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum seperti demonstrasi kelompok masyarakat, konflik masyarakat dengan perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan Ormas pelaku unjuk rasa dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75:
Rekapitulasi Nama OKP pada Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa di Provinsi Riau Tahun 2015

No.	Nama OKP	Tahun
1	FISIP UR	2015
2	Perhimpunan PKL Pasar Pagi Arengka	2015
3	BEM FKIP UR	2015
4	Himpunan Mahasiswa OCU Kampar	2015
5	LSM Penjara	2015
6	Aliansi Masyarakat Berjuang	2015
7	Satma PP	2015
8	Fakultas Hukum UIR	2015
9	Forum Masyarakat Sidomulyo	2015
10	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) RIAU	2015
11	UKM Islam Riau	2015
12	BEM Pekanbaru	2015
13	BEM RIAU	2015
14	Wawana Lingkungan Hidup (WALHI) RIAU	2015
15	Front Perjuangan Rakyat (FPR)	2015
16	SPSI, SPTI	2015
17	DPC Federasi Serikat Pekerja Bangunan (FSPB)	2015
18	BEM UIN SUSQA	2015
19	GREENPEACE	2015
20	Masyarakat disekitar PT. Gandaerah Cendana	2015
21	Paguyuban Ormas dan LSM Se-Provinsi Riau	2015
22	Barisan Muda Riau (BMR)	2015
23	Forum Guru Pekanbaru	2015
24	Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau (GMPWR)	2015
25	BEM UR	2015
26	Mahasiswa Kehutanan Riau	2015
27	Fakultas Hukum UR Peduli Asap	2015

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (2016)

2.3.1.6 Bidang Urusan Sosial

Tingginya migrasi penduduk dari luar provinsi ke Provinsi Riau menjadikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) cenderung meningkat. PMKS yang meningkat selama periode 2010 – 2015 adalah wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, penyandang cacat, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, keluarga berumah tidak layak huni, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS dan keluarga rentan.

Jumlah penyandang PMKS pada tahun 2010 sebanyak 379.027 kemudian turun menjadi 277.982 pada tahun 2015 dengan pertumbuhan penurunan sebesar -9,96%. Oleh Walaupun PMKS mengalami penurunan namun, permasalahan PMKS perlu mendapat perhatian dalam pembangunan provinsi Riau ke depan.

Tabel 2.76:
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015

No	Jenis PMKS	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Anak Balita Terlantar	1.867	2.767	1.711	1.662	1736	1.083	-5,20
2	Anak Terlantar	31.315	34.246	27.013	25.715	19.200	5.892	-22,24
3	Anak Nakal	1.309	1.161	1.297	1.293	458	119	-27,70
4	Anak Jalanan	769	758	791	798	888	827	1,64
5	Wanita Rawan Sosek	15.502	15.054	15.712	15.783	14.097	8.978	-9,01
6	Lanjut Usia Terlantar	22.651	17.766	16.337	14.661	20.896	15.203	-4,92
7	Korban Tindak Kekerasan	626	741	1.025	1.208	476	439	1,24
8	Penyandang Cacat	16.064	16.064	16.064	16.064	11.838	7.937	-11,85
9	Tuna Susila	2.051	2.201	1.229	1.036	1.166	1.144	-8,38
10	Pengemis	424	445	478	497	379	353	-2,85
11	Gelandangan	186	185	181	179	132	150	-3,29
12	Bekas BWBLK	719	857	1.616	2.117	891	1.462	28,99
13	Korban Napza	592	644	561	551	185	530	22,83
14	Keluarga Fakir Miskin	160.358	112.758	113.053	100.619	142.291	176.081	4,95
15	Keluarga Rumah Tak Layak Huni	26.065	34.811	29.323	29.410	0	0	0
16	Keluarga Bermasalah Psikologis	560	570	596	609	900	557	3,64
17	Komunitas Adat Terpencil	21.771	13.874	19.876	19.282	19.219	8.519	-10,40
18	Korban Bencana Alam	58.867	43.464	95.720	112.559	83.633	44.295	7,78
19	Korban Bencana Sosial	11.553	262	13.644	14.422	1.298	2.692	1006,40
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	811	1.110	1.704	2.182	445	352	3,59
21	HIV/AIDS (ODHA)	186	601	1.704	2.182	390	286	65,18
22	Keluarga Renran	4.781	4.073	8.126	9.698	1736	1.083	-3,13
Jumlah		379.027	304.412	367.761	372.527	318.782	277.982	-9,96

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2015)

Disisi lain, kuantitas dan kualitas panti sosial yang tersedia masih relatif kurang, Jumlah panti sosial anak telantar yang tersebar di Kabupaten/kota berjumlah 60 buah dan menampung sebanyak 1.970 orang anak. Disisi lain, jumlah anak telantar, anak balita telantar, anak nakal dan anak jalanan sekitar 30,000 orang. Oleh karena itu, sesuai amanat undang-undang, maka penanganan anak dan balita telantar, anak jalanan dan anak nakal perlu mendapat perhatian lebih baik lagi. Jumlah Panti Sosial Anak terlantar per kabupaten kota sebagaimana Tabel 2.77.

Tabel 2.77:
Jumlah Panti Sosial Anak Terlantar Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Panti	Jumlah Klien /Anak
1	Kuantan Singingi	-	-
2	Indragiri Hulu	2	70
3	Indragiri Hilir	5	150
4	Pelalawan	4	112
5	Siak	2	60
6	Kampar	8	270
7	Rokan Hulu	7	210
8	Rokan Hilir	3	90
9	Bengkalis	7	210
10	Kep. Meranti	-	-
11	Pekanbaru	13	568
12	Dumai	9	230
Jumlah		60	1.970

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2015)

Pada Tahun 2013, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau sebanyak 432 dan terus meningkat hingga Tahun 2015 sebesar 2.011 PMKS. Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat yang kurang baik, tetapi pada Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Riau terus menekan jumlah PMKS menjadi 1.307 PMKS sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.78. Sedangkan untuk lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping yang diberdayakan di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 29,81% sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78:
Jumlah PMKS dan PSKS Provinsi Riau

No	Jenis PMKS	Tahun				Pertumbuhan /Tahun (%)
		2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	432	1524	2011	1307	83,24
2	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan PSKS serta pendamping yang diberdayakan	736	1073	675	1220	29,81

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2016)

2.3.2.Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau terjadi peningkatan dari 2.560.402 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.762.170 orang pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 yang berjumlah 3.857.145 orang, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau pada tahun tersebut sebesar 66,38 persen kemudian menurun menjadi 63,22% pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan -1,18%. Data tentang ketenagakerjaan ini dapat dilihat pada Tabel 2.79. Sementara itu pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja mengalami peningkatan sebesar 15,99% per tahun artinya bahwa penyerapan angkatan kerja tidak mengalami perbaikan dengan penambahan penduduk yang bekerja walaupun jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 2,02% per tahun. Tetapi peningkatan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja per tahun.

Tabel 2.79:
Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Penduduk Usia 15 ke atas	3.857.145	3.985.257	4.135.186	4.257.120	4.390.690	3,29
Angkatan Kerja (jiwa)	2.560.402	2.506.776	2.623.310	2.695.247	2.762.170	1,94
a. Bekerja	2.424.180	2.399.002	2.479.493	2.518.485	2.623.818	2,02
b. Tidak Bekerja	136.222	107.774	148.817	176.762	138,352	-15,99
Bukan Angkatan Kerja	1.296.743	1.478.481	1.511.876	1.561.873	1.628.520	5,96
TPAK (%)	66,38	62,91	63,44	63,31	63,22	-1,18
TPT (%)	5,32	4,3	5,48	6,58	7,83	11,83

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2011 sebesar 5,32% kemudian meningkat menjadi 7,83% pada tahun 2015. Namun tren pertumbuhan TPT terjadi peningkatan sebesar 11,83% per tahun.

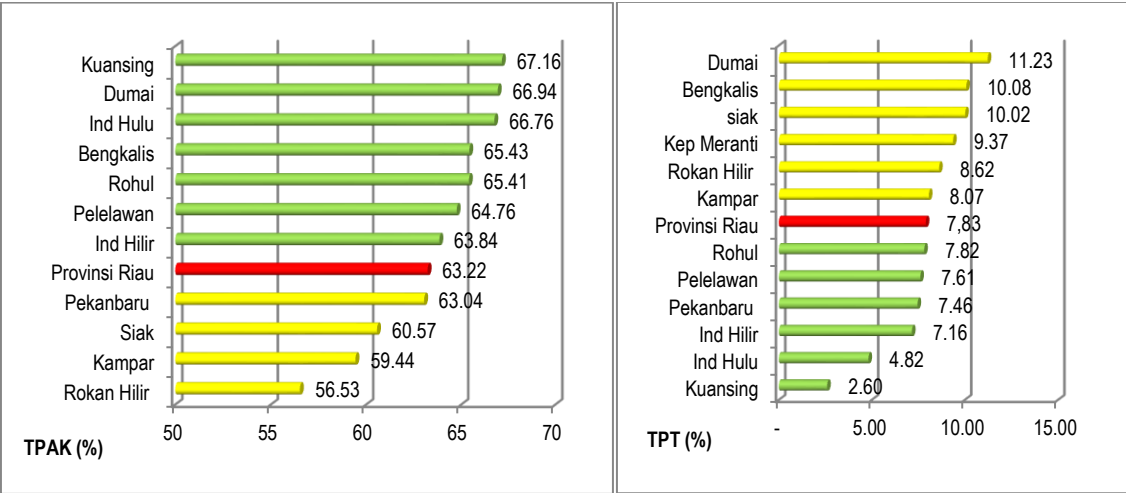
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Persamaan ini terlihat pada nilai persentase angkatan

kerja yang tidak jauh berbeda dengan persentase bukan angkatan kerja, berkisar diantara 50%. Kabupaten dengan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja terbesar adalah Kepulauan Meranti, Kuansing dan Dumai, masing-masing sebesar 69,29%, 67,16% dan 66,94%. Sedangkan nilai persentase partisipasi angkatan kerja terkecil adalah Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pekanbaru masing-masing sebesar 56,53%, 59,44%, 60,57% dan 63,04%. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.78. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (49,30%), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 17,58% dan 13,50%.

Tabel 2.80:
Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015

Kabupaten kota	Kondisi Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja	Pengangguran	TPT	Penduduk Usia Kerja	TPAK	Bukan AK
Kuantan Singingi	149.357	3.882	2,60	145.475	67,16	73.028
Indragiri Hulu	190.247	9.177	4,82	181.070	66,76	94.722
Indragiri Hilir	318.233	22.782	7,16	295.451	63,84	180.254
Pelalawan	175.037	13.313	7,61	161.724	64,76	95.251
Siak	178.326	17.870	10,02	160.456	60,57	116.100
Kampar	320.491	25.853	8,07	294.638	59,44	218.698
Rokan Hulu	258.412	20.205	7,82	238.207	65,41	136.665
Bengkalis	243.440	24.542	10,08	218.898	65,43	128.650
Rokan Hilir	240.323	20.716	8,62	219.607	56,53	184.822
Kep.Meranti	88.950	8.333	9,37	80.617	69,29	39.422
Pekanbaru	476.420	35.547	7,46	440.873	63,04	279.339
Dumai	132.113	14.833	11,23	117.280	66,94	65.250
Provinsi Riau	2.771.349	217.053	94,86	2.554.296	769,17	1.612.201

Sumber BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016)



Gambar 2.78
TPAK dan TPT Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.3.2.2.Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender merupakan isu yang terus berkembang. Secara keseluruhan, tingkat kesetaraan gender di Provinsi Riau sudah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio APM perempuan terhadap laki-laki disemua tingkatan pada tahun 2010-2014 sudah diatas 100.

Jika dibandingkan jumlah siswa antara perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan bahwa dari tahun 2011/2012 ke 2015/2016 mengalami penurunan dari 92,60% menjadi 91,07% atau turun 0,83% per tahun. Sementara tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 0,71% per tahun yaitu dari 96,28% pada tahun 2011/2012 menjadi 97,44% pada tahun 2015/2016 bahkan pada tahun 2013/2014 jumlah siswa perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki mencapai 101,46:100. Demikian halnya dengan tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2015/2016 jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki masing-masing 100,41:100 dan 100,29:100 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel 2.81. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kesetaraan gender pada lembaga pendidikan semakin baik. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran kaum perempuan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia terkait pendidikan semakin tinggi.

Tabel 2.81:
Rasio Kesetaraan Gender di Setiap Jenjang Pendidikan
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Rasio	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011/2012	2013/2014	2015/2016	
1	Jumlah Siswa Pr/Lk di SD/MI	92,60	91,37	91,07	-0,83
2	Jumlah Siswa Pr/Lk di SMP/MTs	96,28	101,46	97,44	0,71
3	Jumlah Siswa Pr/Lk di SMA/SMK/MA	94,61	80,18	100,41	4,99
4	Jumlah Siswa Pr/Lk di Perguruan Tinggi	98,39	98,98	100,29	(0,83)

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (2015)

Tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan di provinsi Riau menunjukkan masih relatif lebih rendah hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS perempuan lebih sedikit dibandingkan kaum laki-laki yaitu 1 laki-

laki berbanding 0,77 perempuan. Artinya pegawai laki-laki lebih banyak 23% dari pegawai perempuan. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kesetaraan gender bidang pemerintahan di provinsi Riau kedepan, jelasnya lihat Tabel 2.82.

Berdasarkan Tabel 2.82 menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin per kabupaten/kota, dimana hanya Kota Pekanbaru yang jumlah pegawai laki-laknya yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Sedangkan di kabupaten Kota lainnya lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki seperti Bengkalis 1:1,5 artinya terdapat 10 pegawai laki-laki dengan 15 pegawai perempuan. Oleh karena tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan menunjukkan bahwa peran kaum perempuan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki di setiap kabupaten/kota, kecuali Kota Pekanbaru dan provinsi Riau. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek managerial kepegawaian agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

Tabel 2.82:
Rasio Kesetaraan Gender di Setiap Status Kepegawaian Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten kota	Kesetaraan Gender Lembaga Pemerintah			
	PNS		Rasio (%)	Keterangan
	Laki-Laki	Perempuan		
Kuantan Singingi	2.904	3.317	114,22	Pr > Lk
Indragiri Hulu	3.011	3.671	121,92	Pr > Lk
Indragiri Hilir	3.773	4.250	112,64	Pr > Lk
Pelalawan	2.510	2.978	118,65	Pr > Lk
Siak	2.912	3.757	129,02	Pr > Lk
Kampar	5.052	5.873	116,25	Pr > Lk
Rokan Hulu	-	-	-	-
Bengkalis	3.318	4.902	147,74	Pr > Lk
Rokan Hilir	2.743	3.611	131,64	Pr > Lk
Kep.Meranti	1.646	1.742	105,83	Pr > Lk
Pekanbaru	6.528	2.942	45,07	Pr < Lk
Dumai	1.699	3.003	176,75	Pr > Lk
Provinsi Riau	4.468	3.462	77,48	Pr < Lk

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015, Kabupaten Kota Dalam Angka, 2015)

2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Selama periode 2010-2014, produksi padi (gabah kering giling/GKG) dikonversi menjadi beras (0,63) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.83. Pada tabel tersebut menunjukkan tren penurunan dengan pertumbuhan negatif sebesar 9,41% per tahun. Sementara konsumsi beras (104 kg/kapita/tahun) mengalami tren peningkatan dengan pertumbuhan 2,79% per tahun dengan perimbangan defisitnya

terus meningkat dengan tren meningkat dengan pertumbuhan 16,91% per tahun. Secara keseluruhan, rasio produksi terhadap konsumsi beras di Provinsi Riau terkategori defisit. Produksi beras Provinsi Riau tahun 2010 hanya mencukupi kebutuhan konsumsi sebesar 62,61% dan tahun 2014 hanya mampu memenuhi sebanyak 37,612% dengan penurunan rasio ketersediaan sebesar 11,87% per tahun. Secara tradisional, defisit beras Provinsi Riau sebagian besar disuplai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Tabel 2.83:
Perkembangan Rasio Produksi dan Kebutuhan Beras dan Jagung Di Provinsi Riau, 2010-2014

Komoditas	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Produksi (ton)						
1. Beras	373.662	348.262	332.899	282.194	250.559	(9,41)
2. Jagung	41.862	33.197	31.433	28.052	28.651	(8,66)
Konsumsi (ton)						
1. Beras	596.808	616.634	633.493	649.786	666.162	2,79
2. Jagung	52.814	58.699	64.831	71.209	77.832	10,18
Perimbangan (ton)						
1. Beras	(223.146)	(268.372)	(300.594)	(367.593)	(415.603)	16,91
2. Jagung	(10.952)	(25.502)	(33.398)	(43.157)	(49.181)	51,75
Rasio						
1. Beras	62,61	56,478	52,55	43,429	37,612	(11,87)
2. Jagung	79,263	56,555	48,485	39,394	36,811	(17,06)

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2015 dan Data Olahan

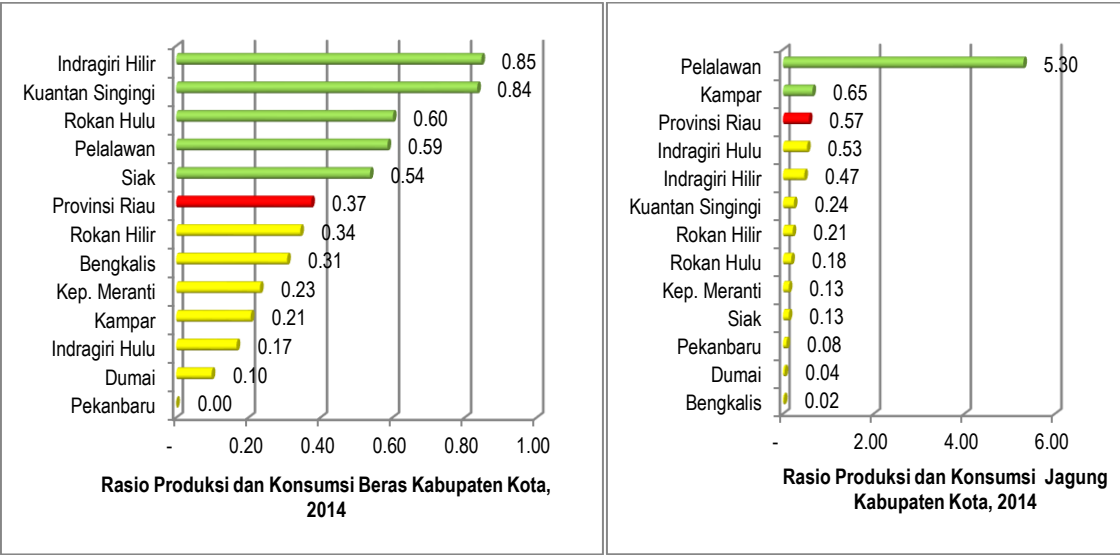
Apabila rasio produksi dan konsumsi beras dianalisis menurut kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.84 memperlihatkan bahwa hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuansing yang rasionya hampir berimbang. Kedua kabupaten inilah yang selama ini menjadi lumbung padi Provinsi Riau, namun dalam beberapa tahun terakhir cenderung luas panen dan produksi terus menurun. Rasio produksi terhadap konsumsi beras untuk kabupaten/kota lainnya terkategori defisit. Oleh karena itu, upaya pencapaian rasio berimbang dan/atau surplus beras di Provinsi Riau ke depannya lebih ditekankan pada upaya peningkatan produktivitas (intensifikasi) melalui peningkatan jaringan irigasi di lahan sawah yang sudah eksis dengan dukungan penggunaan sarana produksi sehingga produktivitas optimal tercapai dan pendapatan petani padi meningkat.

Selama periode 2010 – 2014, rasio produksi terhadap konsumsi jagung Provinsi Riau terkategori defisit jika diasumsikan rata-rata konsumsi jagung pada tahun 2014 sebanyak 8,1 kg/kapita. Pada tahun 2014, rasio produksi terhadap konsumsi kabupaten kota menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Pelalawan yang terkategori surplus selain itu terkategori defisit. Upaya untuk pencapaian rasio berimbang dan/atau surplus jagung di Provinsi Riau, selain perluasan areal tanam jagung (ekstensifikasi), harus diikuti upaya peningkatan produktivitas (intensifikasi) dan dukungan sarana produksi sehingga produktivitas dan pendapatan petani jagung meningkat.

Tabel 2.84:
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Beras dan Jagung
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten kota	Produksi (Ton)		Konsumsi (Ton)		Rasio	
	Beras	Jagung	Beras	Jagung	Beras	Jagung
Kuantan Singingi	27.168,75	609,00	32.521,81	2.516,01	0,84	0,24
Indragiri Hulu	7.040,88	1.729,00	41.974,33	3.247,30	0,17	0,53
Indragiri Hilir	61.598,25	2.658,00	72.726,09	5.626,37	0,85	0,47
Pelalawan	23.161,95	16.205,00	39.495,04	3.055,49	0,59	5,30
Siak	24.123,96	446,00	44.863,85	3.470,84	0,54	0,13
Kampar	16.739,10	4.068,00	80.951,00	6.262,69	0,21	0,65
Rokan Hulu	35.802,90	845,00	59.529,91	4.605,47	0,60	0,18
Bengkalis	17.287,83	94,00	56.133,65	4.342,72	0,31	0,02
Rokan Hilir	22.629,60	1.090,00	65.671,30	5.080,59	0,34	0,21
Kep.Meranti	4.381,65	188,00	18.834,90	1.457,14	0,23	0,13
Pekanbaru	23,31	633,00	105.900,59	8.192,88	0,00	0,08
Dumai	2.891,07	86,00	29.327,41	2.268,88	0,10	0,04
Provinsi Riau	242.849,25	28.651,00	647.929,88	50.126,38	0,37	0,57

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)



Gambar 2.79
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Beras dan Jagung Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa rasio produksi dan konsumsi beras hanya Kabupaten Inhil, Kuansing, Rokan Hulu dan Pelalawan yang berada diatas rata-rata provinsi. Sedangkan untuk rasio produksi dan konsumsi jagung hanya Kabupaten Pelalawan dan Kampar di atas rata-rata Provinsi.

Tabel 2.85:
Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditi Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan
	2010	2011	2012	2013	2014	/Tahun (%)
Produksi (ton)						
1. Sayuran	74.173	81.323	85.759	101.247	88.767	5,21
2. Buah-Buahan	104.446	205.548	185.292	189.931	206.119	24,49
Konsumsi (ton)						
1. Sayuran	255.873	269.712	286.972	293.822	243.206	(0,76)
2. Buah-Buahan	166.151	175.599	186.769	190.049	120.675	(5,67)
Perimbangan (ton)						
1. Sayuran	-181.700	-188.389	-201.213	-192.575	-154.439	(3,40)
2. Buah-Buahan	-61.705	29.949	-1.477	-118	-12.671	2.573,16
Rasio						
1. Sayuran	0,29	0,3	0,3	0,34	0,36	5,67
2. Buah-Buahan	0,63	1,17	0,99	1	0,94	16,33

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Perkembangan rasio produksi sayur-sayuran terhadap konsumsi selama periode 2010 – 2014 ditunjukkan pada Tabel 2.85, terkategori defisit, Rasio sebesar 0,36 pada tahun 2014 memberi makna bahwa Provinsi Riau hanya mampu memproduksi 36% dari kebutuhan sayuran

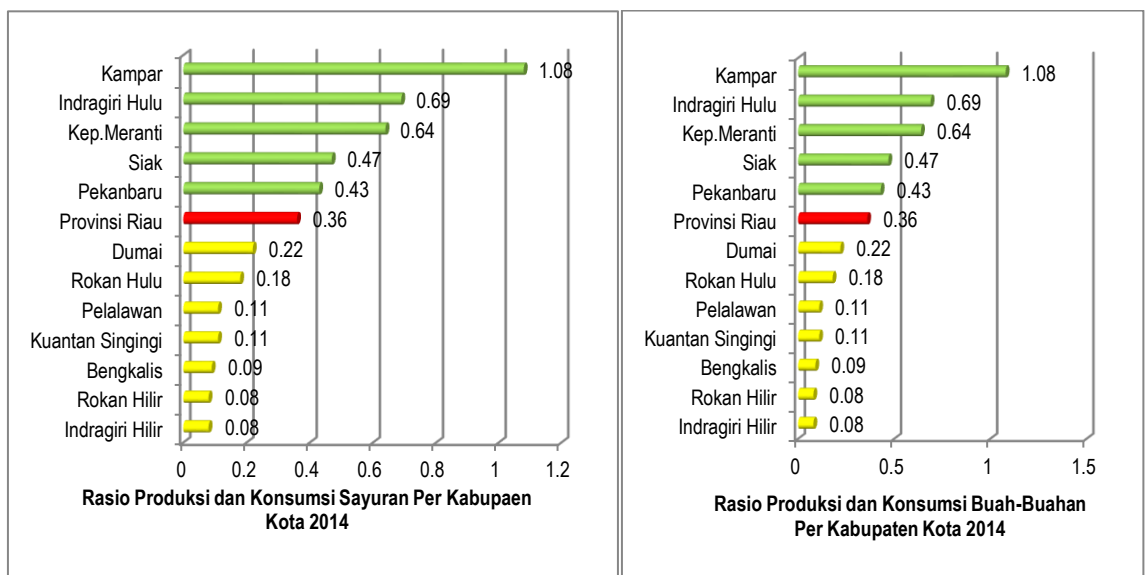
yang dianjurkan FAO yaitu sebesar 66,37 kg/kapita/tahun. Kekurangan suplai sayur-sayuran di Provinsi Riau di datangkan dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara khususnya untuk sayur-sayuran dataran tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan luas areal tanam dan produktivitas tanaman sayuran dataran rendah seperti cabe, bayam, kangkung, petai, dan sawi serta sayuran lainnya harus terus dilakukan agar ketergantungan dengan wilayah lain dapat terus dikurangi.

Rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.86 terkategori defisit. Rasio sebesar 0,94 pada tahun 2014 memberi makna bahwa produksi buah-buahan Provinsi Riau tahun 2014 hanya mencukupi 94% dari kebutuhan konsumsi buah-buahan penduduk Riau sesuai anjuran FAO sebesar 73 kg/kapita/tahun. Kekurangan suplai buah-buahan di Provinsi Riau dipasok dari Provinsi tetangga dan Impor.

Tabel 2.86:
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten kota	Produksi (Ton)		Konsumsi (Ton)		Rasio	
	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan	Sayuran	Buah-Buahan
Kuantan Singingi	1.315	7.752	12.207	6.057	0,11	1,28
Indragiri Hulu	10.939	8.700	15.755	7.818	0,69	1,11
Indragiri Hilir	2.194	38.596	27.298	13.545	0,08	2,85
Pelalawan	1.569	3.156	14.825	7.356	0,11	0,43
Siak	7.860	15.467	16.840	8.356	0,47	1,85
Kampar	32.762	51.857	30.386	15.077	1,08	3,44
Rokan Hulu	4.120	10.959	22.345	11.087	0,18	0,99
Bengkalis	1.929	6.681	21.070	10.455	0,09	0,64
Rokan Hilir	1.961	6.606	24.650	12.231	0,08	0,54
Kep.Meranti	4.504	3.094	7.070	3.508	0,64	0,88
Pekanbaru	17.193	4.786	39.751	19.724	0,43	0,24
Dumai	2.421	48.465	11.008	5.462	0,22	8,87
Provinsi Riau	88.767	206.119	243.205	120.675	4,18	23,13

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)



Gambar 2.80
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Sementara itu produksi dan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan hanya kabupaten Kampar yang memiliki rasio di atas satu artinya jumlah produksi yang dihasilkan sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Oleh karena itu peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan buah-buahan perkabupaten kota harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan rasio produksi dan konsumsi terutama wilayah-wilayah yang berada dibawah rata-rata rasio produksi dan konsumsi sayur-sayuran maupun buah-buahan provinsi, jelasnya lihat Gambar 2.80.

Rata-rata pertumbuhan produksi meningkat, akan tetapi bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi daging belum seimbang. Namun pertumbuhan produksi ruminansia menurun sebesar 1,36% per tahun dan unggas mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 174,88% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.87. FAO merekomendasikan konsumsi daging ternak besar dan kecil sebesar 3,14 kg/kapita/tahun dan daging unggas sebesar 6,83 kg/kapita/tahun.

Berdasarkan rekomendasi FAO. Provinsi Riau masih kekurangan suplai daging dari ternak besar dan kecil untuk pemenuhan konsumsi daging sehingga perimbangannya terkategori defisit sebesar 27% dari kebutuhan konsumsi. Kekurangan suplai terbak besar dan kecil didapatkan dari Provinsi Lampung, Sumatera Barat dan Provinsi tetangga lainnya.

Tabel 2.87:
Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia dan Unggas Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Produksi (ton)						
1. Ruminasia	10.322	11.328	13.582	7.608	8.285	(1,36)
2. Unggas	8.357	7.000	5.554	46.107	48.985	174,88
Konsumsi (ton)						
1. Ruminasia	17.385	18.013	18.612	9.419	10.102	(8,80)
2. Unggas	37.802	39.168	40.470	46.080	48.290	6,40
Perimbangan (ton)						
1. Ruminasia	-7,062	-6,685	-4,985	1.812	1.817	(9.118,52)
2. Unggas	-10,549	-12,049	-511	(27,84)	(695,10)	1.614,28
Rasio						
1. Ruminasia	0,59	0,63	0,73	1,06	1,34	23,58
2. Unggas	0,72	0,69	0,99	0,88	0,02	(17,39)

Sumber: Angka Konsumsi Berdasarkan Survey Konsumsi BKP Riau

Provinsi Riau yang defisit suplai daging ternak besar dan kecil ini sebagaimana halnya Indonesia, tidak perlu terjadi, bahkan Provinsi Riau dapat mensuplai untuk wilayah lain, Provinsi Riau mempunyai sumberdaya yang memadai untuk pengembangan ternak khususnya ternak sapi, kerbau dan kambing. Areal kelapa sawit seluas 2,73 juta hektar menyediakan pakan hijauan yang besar. Diasumsikan per hektar lahan sawit dipelihara 1 ekor sapi atau kerbau atau kambing, perkebunan kelapa sawit setidaknya akan dicapai populasi sebesar 2,37 juta ekor, lebih dari 540% dari populasi ternak sapi, kerbau dan kambing tahun 2012 (438,717 ekor).

Tabel 2.88:
Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia dan Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten kota	Produksi (Ton)		Konsumsi (Ton)		Rasio	
	Ruminansia	Unggas	Ruminansia	Unggas	Ruminansia	Unggas
Kuantan Singingi	686	905	1.895	1.895	0,36	0,48
Indragiri Hulu	692	4.642	2.445	2.445	0,28	1,90
Indragiri Hilir	432	1.288	4.237	4.237	0,10	0,30
Pelalawan	555	4.846	2.301	2.301	0,24	2,11
Siak	1.537	1.855	2.614	2.614	0,59	0,71
Kampar	2.918	2.499	4.716	4.716	0,62	0,53
Rokan Hulu	2.209	5.359	3.468	3.468	0,64	1,55
Bengkalis	306	2.773	3.270	3.270	0,09	0,85
Rokan Hilir	723	462	3.826	3.826	0,19	0,12
Kep.Meranti	326	351	1.097	1.097	0,30	0,32
Pekanbaru	3.320	18.185	6.170	6.170	0,54	2,95
Dumai	193	1.894	1.709	1.709	0,11	1,11
Provinsi Riau	13.899	45.058	37.749	37.749	0,37	1,19

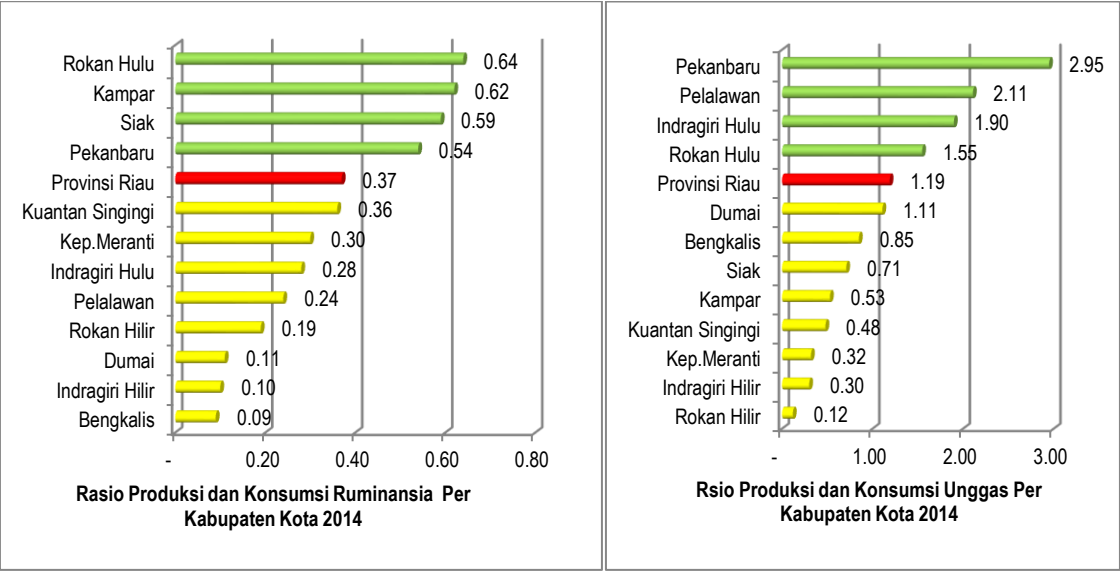
Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Dianalisis menurut Kabupaten/Kota, rasio perimbangan antara produksi dan konsumsi berada pada kategori berimbang dan/atau surplus untuk kedua sumber daging terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru, Kabupaten yang hanya surplus daging ternak besar dan kecil adalah Kabupaten Siak sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.88.

Jika dilihat rasio produksi dan konsumsi ruminansi perkabupaten kota menunjukkan bahwa tidak ada satupun wilayah yang memiliki rasio produksi dan konsumsi yang lebih beasr dari satu, artinya semua wilayah mengalami defisit. Sementara rasio produksi dan konsumsi unggas terdapat enam kabupaten kota yang telah memiliki rasio lebih dari satu dan enamnya kurang dari satu. Oleh karena itu wilayah yang memerlukan pengembangan produksi ternak unggas mulai dari Rokan Hilir hingga bengkalis seperti yang terdapat pada Gambar 2.81.

Oleh karena itu, upaya pengembangan ternak besar dan kecil (ruminansia) perlu menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau kedepan karena selain upaya pengembangan pertanian beroreantasi *zero waste*, peningkatan sumber pendapatan alternatif petani kelapa sawit, karet dan kelapa juga mendukung program nasional untuk pencapaian swasembada daging. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan populasi ternak besar dan kecil ini perlu dilakukan

dengan daya dorong yang besar dan berkelanjutan sehingga laju pemotongan lebih kecil dari laju pertambahan ternak.



Gambar 2.81.
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Ruminansai dan Unggas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Produksi perikanan Provinsi Riau ternyata belum mencukupi kebutuhan konsumsi ikan yang direkomendasikan FAO sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.89. Konsumsi ikan rekomendasi FAO sebesar 31,86 kg/kapita/tahun, sehingga produksi ikan Provinsi Riau selama periode ini masih lebih rendah dibanding kebutuhan konsumsi sehingga rasio perimbangannya terkategori defisit. Selama ini, kekurangan suplai ikan di Provinsi Riau umumnya didatangkan dari Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Selama priode 2010-2014 menunjukan bahwa terjadinya peningkatan produksi perikanan Riau dari 133.001,60 ton pada tahun 2010 menjadi 180.561,96 ton pada tahun 2014 atau tumbuh 8,05% per tahun.

Tabel 2.89:
Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Produksi (Ton)	133.001,60	149.939,80	150.788,00	161.672,20	180.561,96	8,05
Konsumsi (Ton)	179.477,30	182.855,77	188.930,16	111.480,15	112.630,00	(8,69)
Perimbangan (Ton)	(43.475 ,70)	(32.915,97)	(38.142,16)	(18.200,95)	67.932	(133,48)
Rasio	0,80	0,73	0,75	0,84	1,60	24,12

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Sementara rasio konsumsi mengalami penurunan sebesar 8,69% per tahun. Penurunan konsumsi perikanan Riau dapat disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap komoditas perikanan yang kemungkinan disebabkan oleh keterjangkaun harga oleh masyarakat yang rendah atau menurunnya daya beli masyarakat untuk komoditas perikanan. Sehingga menyebabkan rasio produksi dan konsumsi mengalami peningkatan 24,12% per tahun, walaupun masih terjadinya defisit perimbangan antara produksi dan konsumsi kecuali pada tahun 2014, jelasnya lihat Tabel 2.89.

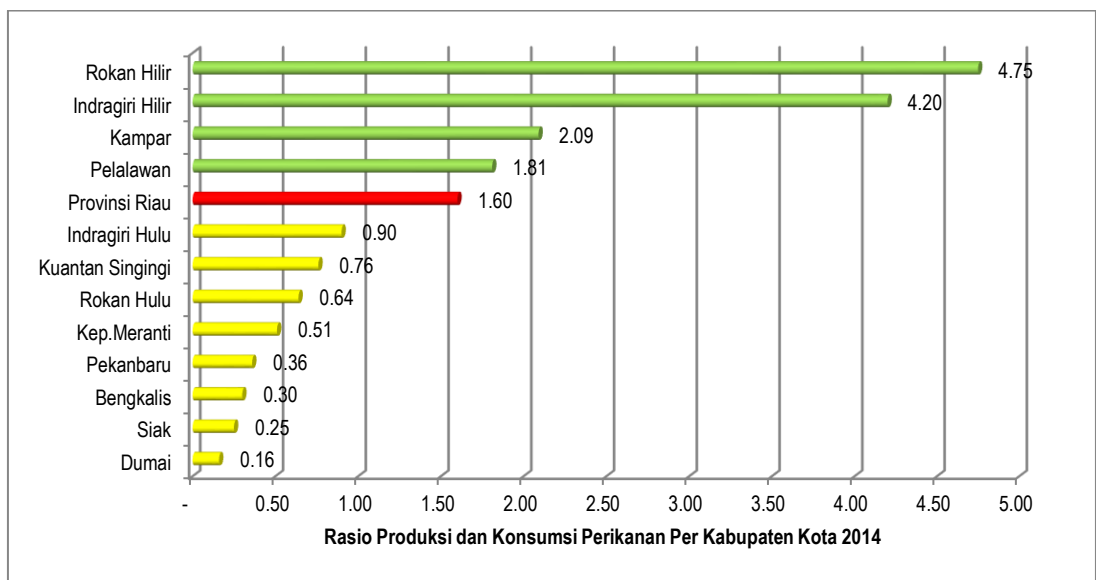
Kabupaten kota yang rasio perimbangannya terkategori surplus hanya Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kampar. Sedangkan Kabupaten/kota lainnya rasio perimbangannya terkategori defisit (Tabel 2.90).

Tabel 2.90:
Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten kota	Indikator			
	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
Kuantan Singingi	4,269.40	5.653	(1.384)	0,76
Indragiri Hulu	6,580.74	7.296	(716)	0,90
Indragiri Hilir	53,109.58	12.642	40.468	4,20
Pelalawan	12,409.25	6.865	5.544	1,81
Siak	1,988.01	7.799	(5.811)	0,25
Kampar	29,371.10	14.072	15.299	2,09
Rokan Hulu	6,621.61	10.348	(3.726)	0,64
Bengkalis	2,914.84	9.758	(6.843)	0,30
Rokan Hilir	54,194.64	11.416	42.779	4,75
Kep.Meranti	1,659.58	3.274	(1.614)	0,51
Pekanbaru	6,636.70	18.409	(11.772)	0,36
Dumai	806.51	5.098	(4.291)	0,16
Provinsi Riau	180,561.96	112.630	67.932	1,60

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Berdasarkan Gambar 2.82 menunjukan bahwa secara umum rasio produksi perikanan Riau sebesar 1,60 dan terdapat hanya kabupaten kota yang memiliki rasio produksi dan konsumsi yang lebih besar dari satu adalah kabupaten Pelalawan, Kampar, Inhil dan Rokan Hilir selebihnya memerlukan perioritas dalam pembangunan perikanan karena masih mengalami defisit terutama wilayah yang memiliki perairan yang luas seperti kabupaten Bengkalis, Meranti dan Dumai. Jelasnya lihat Gambar 2.88 berikut.



Gambar 2.82
Rasio Produksi dan Konsumsi Komoditas Perikanan Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Kondisi terkini terkait bidang urusan pertanahan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar di Provinsi Riau antara lain:

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Gubernur melaksanakan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan Sekretariat di Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan Umum, Sub Bagian Pertanahan;

Bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan Pembebasan Tanah/Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, kegiatan ini merupakan implementasi dari Tahapan Pelaksanaan pasca dilaksanakannya Tahapan Persiapan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh Gubernur, sebagaimana di atur dengan Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa Gubernur telah membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Antara Dumai-Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, dan saat ini Tim Persiapan telah melaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Pertama dan dalam persiapan untuk melaksanakan Konsultasi Publik Kedua dan persiapan penyusunan Draf Surat Keputusan Penetapan Lokasi;

Bahwa Biro Administrasi Pemerintahan Umum sedang memfasilitasi Pra Tahapan Persiapan untuk Rencana Pengadaan tanah Pembangunan Saluran Interkoneksi DI.OSAKA di Kabupaten Rokan Hulu;

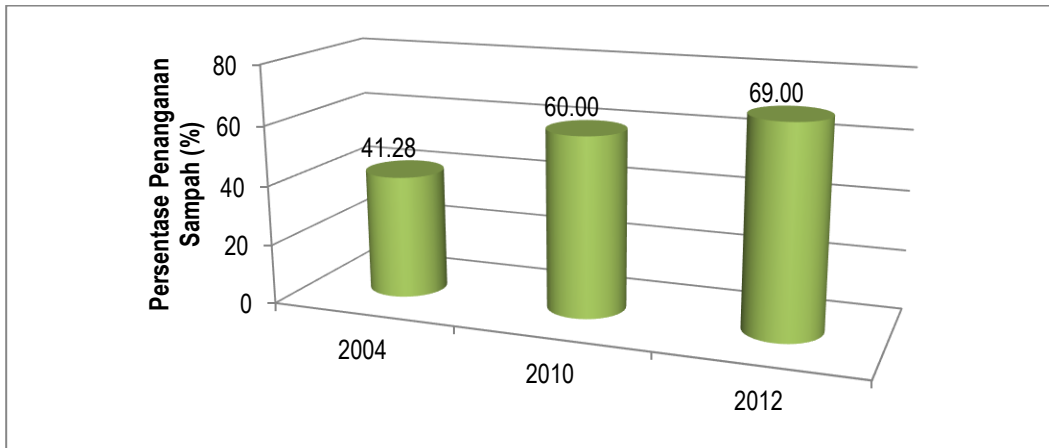
Bahwa Biro Administrasi Pemerintahan Umum sedang memfasilitasi Pra Tahapan Persiapan untuk Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Proyek *Asset Integrity Program* (AIP) Koridor Utara di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau.

2.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Dari total timbunan sampah yang terangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berjumlah sekitar 41,28%, dibakar 35,59%, dikubur 7,97%, dibuang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, dan sebagainya) 14,01% dan yang terolah (dikompos dan didaur ulang) hanya 1,15% (BPS, 2004). Jumlah sampah yang telah dikelola dan terangkut sampai ke TPA di Kota Pekanbaru baru mencapai 120 m³/hari atau sekitar 60% pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan tahun 2012 sebesar 69% (Gambar 2.83). Sedangkan dari hasil studi yang dilakukan KLH di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur 10%, dikompos dan didaur ulang 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak terkelola 7%. Diperkirakan persentase ini relatif tidak banyak berubah hingga tahun 2014.

Berdasarkan prediksi KLH (2000), jumlah sampah rata-rata yang dihasilkan per kapita per hari adalah 1 kg. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Dengan jumlah penduduk saat ini, diperkirakan volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Riau mencapai 6 ribu ton per hari (180 ribu ton per bulan atau 2,16 juta ton per tahun). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa, maka diperkirakan jumlah timbunan sampah nasional mencapai 220 ribu ton per hari. Jadi, volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Riau mencapai 2,73% dari volume sampah nasional.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau dalam Angka, 2004) dan KLH (2012)

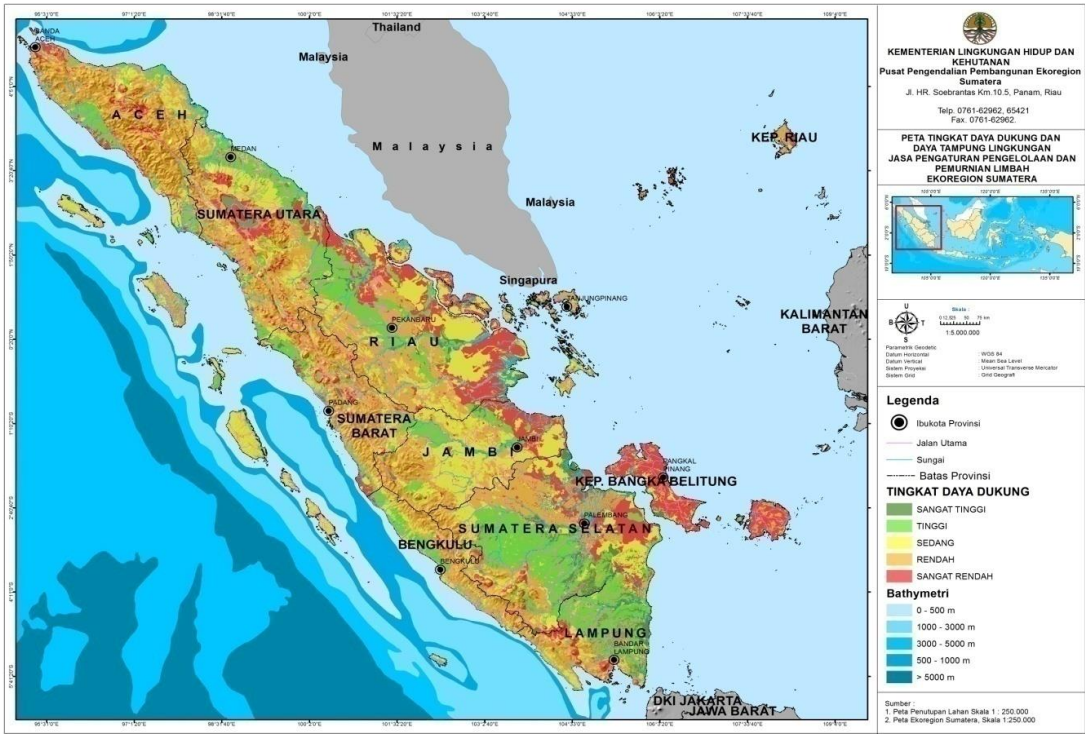
Gambar 2.83
Persentase Penanganan Sampah Kota Pekanbaru

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan (*regulating*), salah satunya pengolahan dan penguraian limbah. Potensi lahan dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91:
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengelohan dan Penguraian Limbah Provinsi Riau (P3ES, 2015)

Jasa Ekosistem	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pengolahan dan Penguraian Limbah	4.278.869,52	47,90	2.487.456,01	27,84	2.166.978,20	24,26

Berdasarkan data pada Tabel 2.91 tersebut, dapat diketahui potensi lahan dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah Provinsi Riau. Secara umum potensi lahan Provinsi Riau dalam penguraian dan pengolahan limbah rendah (47,90%), sedangkan lahan tergolong memiliki persentase besar lahan potensial atau paling tinggi hanya 24,26% dari keseluruhan luas Provinsi ini. Sebaran lokasi yang menunjukkan tingkat daya dukung tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.84.



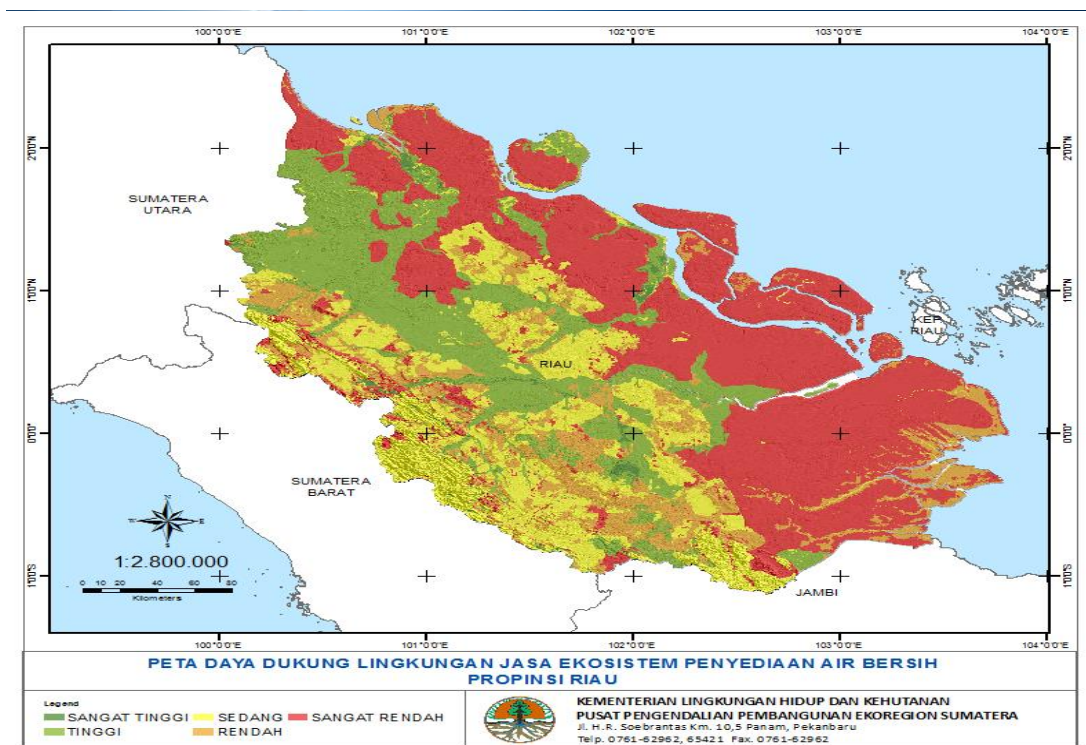
Gambar 2.84
**Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Pengolahan dan Penguraian Limbah (P3ES, 2015)**

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan, salah satunya penyediaan air bersih. Profil daya dukung lingkungan dan potensi lahan dalam penyediaan air bersih Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92:
**Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
Provinsi Riau (P3ES, 2015)**

Jasa Ekosistem	Sangat Rendah- Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Air bersih	5.146.916,02	57,61	1.758.485,86	19,68	2.027.901,86	22,70

Berdasarkan data pada Tabel 2.92 dapat diketahui daya dukung jasa eksositem penyediaan jasa rendah-sangat rendah air bersih (>50%). Sebaran lokasi yang menunjukkan tingkat daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia air bersih dapat dilihat pada Gambar 2.85.



Gambar 2.85
Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (P3ES, 2015)

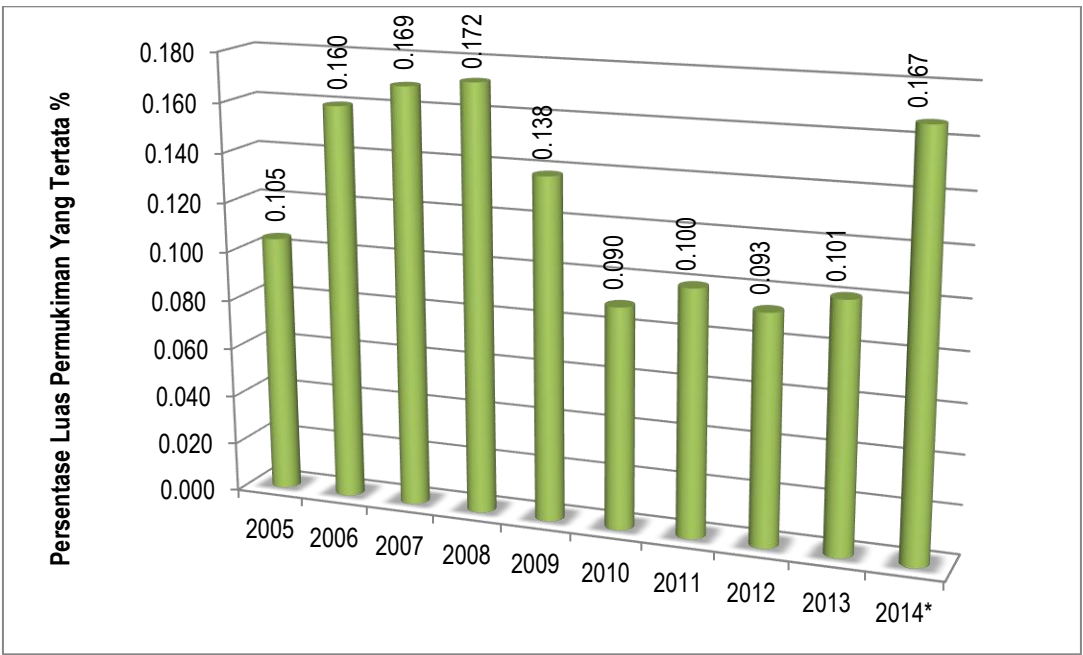
Pada Tabel 2.92 dan Gambar 2.85 dapat dilihat bahwa daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia air bersih Provinsi Riau tergolong rendah sampai sangat sangat rendah (57,61%) atau 5.146.916,02 ha dan dominan terdapat pada dataran rendah arah pesisir. Sebaliknya hanya sebagian kecil lahan yang mempunyai daya dukung tinggi sampai sangat tinggi (22,70%) atau 2.027.901,86 ha, ditemukan pada daratan agak tinggi. Sedangkan pada daratan tinggi khusus yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara dan Jambi, daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia air bersih tergolong sedang (19,69%) atau 1.758.485,86 ha.

b. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau cenderung berfluktuatif hingga tahun 2014 seperti yang terlihat pada Gambar 2.86. Permukiman yang tertata meliputi perumahan yang dibangun oleh pemerintah, perumahan yang dibangun oleh pihak swasta, dan rumah sederhana layak huni yang dibangun oleh pemerintah. Persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau sebesar 0,105 % pada tahun 2005 dan terus meningkat hingga tahun 2008 menjadi 0,172 %. Tahun 2009 dan 2010, persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau

mengalami penurunan menjadi 0,138 % dan 0,090 %. Persentase luas permukiman yang tertata di Provinsi Riau mengalami sedikit peningkatan tahun 2011 menjadi 0,100 %. Tahun 2012, persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau kembali menurun menjadi 0,093 % dan meningkat hingga tahun 2014 menjadi 0,167 %.

Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga di Sumatera, pembangunan Rumah Siap Huni (RSH) oleh perumnas Provinsi Riau masih sangat kecil. Pembangunan RSH di Provinsi Riau tahun 2013 sebanyak 38 unit dari total pembangunan RSH di Sumatera 1.349 unit dan Indonesia 8.464 unit (Data Annual Provinsi Riau, 2014).



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (2014); Keterangan *: Data prediksi

Gambar 2.86
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Provinsi Riau
Tahun 2005-2014

Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah secara nasional. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) mengalami peningkatan dari 4,3 juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unit pada akhir 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi di masa yang akan datang akibat adanya

pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata sebesar 820.000 unit rumah per tahun (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010).

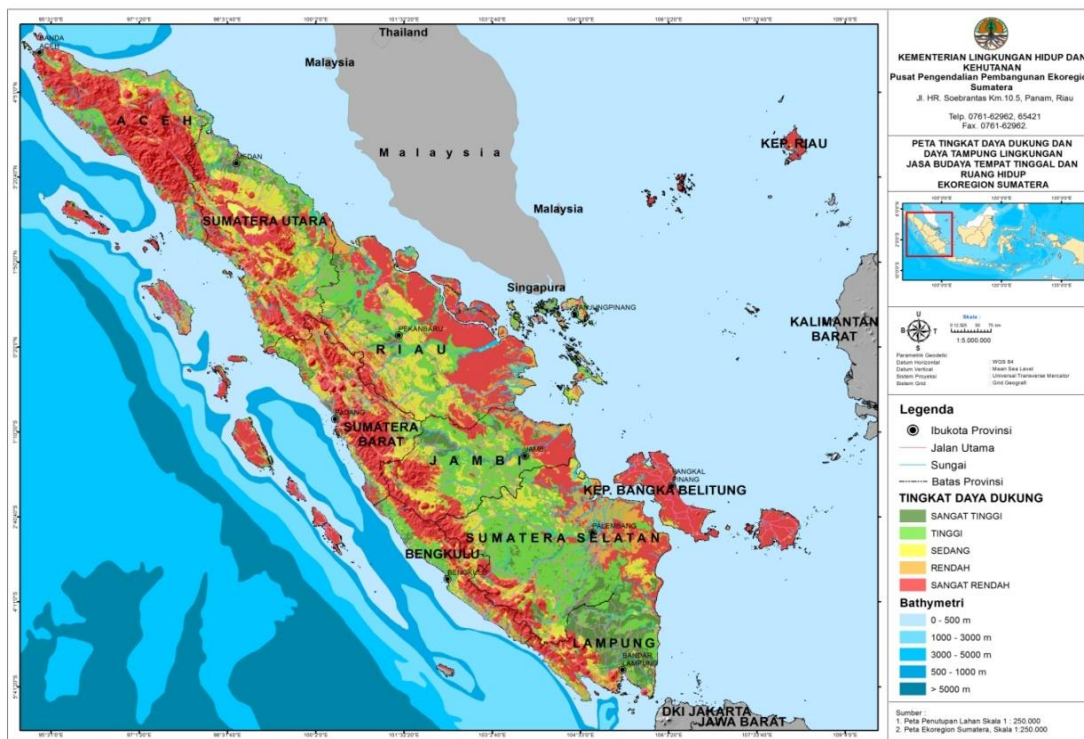
Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Profil daya dukung lingkungan Provinsi Riau menurut jasa ekosistem budaya dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93:
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Provinsi Riau (P3ES, 2015)

Jasa Ekosistem	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	4.495.593,97	50,32	1.750.777,22	19,60	2.686.932,54	30,08

Pada Tabel 2.93 dapat diketahui potensi tempat tinggal dan ruang hidup pada Provinsi Riau tidak besar. Luas lahan, topografi dan ketersediaan air merupakan faktor dominan yang menentukan manusia dalam memilih tempat tinggal dan ruang hidup. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup Provinsi Riau dan perbandingan dengan provinsi lain di sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.87.

Provinsi Riau memiliki lahan potensi tidak begitu besar (30,08%) sebagai tempat tinggal dan ruang hidup, dimana sebagian besar wilayah Provinsi ini merupakan lahan berpotensi rendah (50,32%). Hal yang paling mendasar yang menjadi penyebabnya adalah luasan wilayahnya yang didominasi lahan gambut dan hutan yang dilindungi dan dibatasi aktivitasnya. Pada Gambar 2.87 dapat dilihat lahan yang mempunyai daya dukung tinggi terdapat pada bagian barat dan daya dukung rendah sebagai penyedia jasa tempat tinggal dan ruang hidup terdapat pada bagian timur Provinsi Riau.



Gambar 2.87
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (P3ES,2015)

c. Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air dipantau dari dua aspek, yaitu kualitas lingkungan baku mutu air sungai Provinsi Riau dan pengawasan yang dilakukan melalui Koordinasi Program Kali bersih dengan sasaran industri-industri yang membuang limbah ke badan air. Dari ke empat sungai besar yang ada di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan kualitas mutu air. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan industri di kabupaten/kota masih ada perusahaan yang membuang limbahnya ke badan air yang melebihi baku mutu yang ditetapkan di dalam peraturan yang ada dan yang tertuang dalam izin yang dimiliki. Penurunan kualitas mutu air disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sungai terutama masyarakat dipinggiran sungai. Selain itu permasalahan perizinan yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota belum terlaksana/ditaati oleh perusahaan (BLH Provinsi Riau, 2015).

Perairan Sungai Indragiri-Kuantan bagian hulu berdasarkan kriteria PP No 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II, maka (i) COD

dan BOD nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (iii) Nitrat, fosfat dan sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulannya adalah daya tampung beban cemaran air sungai Indragiri-Kuantan bagian hulu berdasarkan parameter COD dan BOD sudah melampaui, dan nitrat, fosfat serta sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, namun untuk DO masih rendah.

Perairan Sungai Indragiri-Kuantan dibagian hilir berdasarkan kriteria PP No 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD dan BOD nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) Nitrat, fosfat, dan sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (iii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air sungai Indragiri-Kuantan bagian hilir berdasarkan parameter COD dan BOD sudah melampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. Begitu juga dengan DO yang rendah. Sedangkan nitrat, fosfat serta sianida masih belum melampaui. COD dan BOD yang tinggi dan DO yang rendah mengindikasikan kawasan ini sangat tinggi menerima beban cemaran.

Perairan Sungai Kampar hulu berdasarkan kriteria PP No 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi persyaratan. (ii) COD, BOD, NO₃N dan fosfat nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi persyaratan. (iii) CN nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak dipersyaratkan. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air Sungai Kampar bagian hulu berdasarkan parameter COD, BOD, nitrat, dan fosfat masih belum dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, namun untuk DO sudah dilampaui.

Perairan Sungai Kampar bagian hilir dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, BOD, nitrat, dan fosfat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi persyaratan. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi persyaratan. (iii)

Cl tidak dipersyaratkan. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air Sungai Kampar bagian hilir berdasarkan parameter COD, BOD, nitrat, dan fosfat sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. Sedangkan DO masih sangat rendah.

Tabel 2.94:
Sifat Kimia Air Empat Sungai Utama Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Bulan	Indikator	2009		2010		2011		2012		2013		Baku Mutu	
		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Kelas 1	Kelas 2
DAS Indragiri													
Bulan Kering	BOD	1,76	1,75	5,58	12,26	4,98	7,30	3,87	13,93	7,55	9,34	2,00	3,00
	COD	7,25	10,25	19,61	29,41	17,58	25,94	20,35	39,25	72,19	87,53	10,00	25,00
	P Total	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,12	0,01	0,20	0,20
	NO3	0,93	1,12	0,83	0,69	1,62	1,54	7,38	7,61	18,27	7,77	10,00	10,00
	DO	4,38	4,33	4,31	4,37	3,99	4,00	3,67	3,25	4,32	2,77	6,00	4,00
	pH	7,48	6,91	6,76	6,68	7,43	7,00	6,19	6,29	6,27	6,60	6-9	6-9
	SO4	2,43	0,06	6,09	6,68	0,09	2,88	5,64	21,79	31,81	16,90	400,00	-
Bulan Basah	BOD	9,46	8,44	6,26	7,28	4,51	5,16	8,68	15,17	8,92	13,47	2,00	3,00
	COD	36,22	33,46	20,09	27,50	20,63	26,94	40,00	64,00	28,41	50,03	10,00	25,00
	P Total	0,17	0,13	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,04	0,20	0,20
	NO3	0,69	25,17	0,84	0,96	5,13	2,64	8,89	9,71	8,42	9,17	10,00	10,00
	DO	5,21	5,30	3,03	3,01	3,81	3,39	3,44	3,08	3,93	3,58	6,00	4,00
	pH	6,72	6,54	6,44	6,26	6,69	6,33	5,90	6,23	6,67	6,54	6-9	6-9
SO4	8,26	9,52	6,70	9,86	4,66	8,93	10,63	10,37	21,52	20,51	400	-	
DAS Kampar													
Bulan Kering	BOD	4	8,5	1,94	2,37	6,04	15,3	1,41	5,43	6,19	4,74	2,00	3,00
	COD	25	42,5	12,19	12,19	19,84	49,6	18,3	52,83	29,79	43,9	10,00	25,00
	P Total	0,03	0,01	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	Na	Na	Na	0,20	0,20
	NO3	0,71	0,99	0,67	0,36	1,55	1,53	6,7	3,21	2,91	15,9	10,00	10,00
	DO	4,33	2,38	2,9	4,05	4,82	4,52	3,38	3,31	3,04	2,87	6,00	4,00
	pH	6,32	5,06	6,07	6,07	5,83	5,02	6,47	5,4	6,64	5,92	6-9	6-9
	SO4	4,03	14,12	2,49	2,26	2,33	5,95	2,37	7,07	Na	Na	400,00	-
Bulan Basah	BOD	3,07	4,35	2,58	2,77	10,52	16,5	7,88	7,68	0,82	6,29	2,00	3,00
	COD	22,36	31,7	9,71	12,14	27,42	66,48	48	40	2,77	20,27	10,00	25,00
	P Total	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,009	Na	Na	0,20	0,20
	NO3	0,38	0,53	0,21	0,26	1,28	4,53	6,06	6,61	4,83	7,04	10,00	10,00
	DO	4,25	4,15	4,08	3,62	2,27	2,62	3,46	3,11	3,55	2,05	6,00	4,00
	pH	5,59	5,37	6,11	6,77	5,51	5,14	6,61	5,52	6,61	5,38	6-9	6-9
SO4	3,25	4,37	3,18	2,22	1,16	6,6	4,92	8,84	Na	Na	400,00	-	
DAS Rokan													
Bulan Kering	BOD	1,5	16,5	3,01	5,52	5,85	10,05	13,24	13,05	4,23	7,26	2	3
	COD	9,8	63,53	44,55	93,72	23,04	42,33	49,6	57,6	25,6	40	10	25
	P Total	0,02	0,09	0,09	0,06	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05	0,05	0,2	0,2
	NO3	0,45	0,53	0,56	0,62	1,06	4,81	6,72	6,59	4,68	4,11	10	10
	DO	3,51	3,39	4,67	4,77	4,81	4,78	4,21	4,39	5,3	4,11	6	4
	pH	7,21	6,73	6,64	5,58	5,79	5,39	7,28	6,25	7,24	6,25	6-9	6-9
	SO4	2,24	8,7	2,57	12,07	3,06	9,24	3,13	13,85	7,23	15,04	400	-
Bulan Basah	BOD	13,89	24,77	12,07	10,67	13,24	13,05	10,92	20,69	8,82	10,97	2	3
	COD	22,05	39,21	34,48	47,61	49,6	57,6	46,89	86,24	30,91 2	33,5	10	25
	P Total	0,03	0,13	0,06	0,08	0,02	0,01	0,006	0,03	0,09	0,1	0,2	0,2
	NO3	0,65	0,93	1,88	1,87	6,72	6,59	7,41	4,71	10,52	10,49	10	10
	DO	3,32	3,35	3,7	3,82	4,21	4,39	3,74	2,25	4,34	2,97	6	4
	pH	6,54	5,97	6,28	5,66	7,28	6,25	6,56	5,84	6,3	5,37	6-9	6-9
SO4	32,81	10,39	9,22	11,55	3,13	13,85	4,55	5,92	10,01	9,05	400	-	
DAS Siak													
Bulan Kering	BOD	5,50	12,50	1,62	16,21	12,17	27,61	5,36	14,80	4,28	4,33	2,00	3,00
	COD	25,00	44,30	9,80	58,80	25,90	62,60	26,40	68,90	39,20	40,80	10,00	25,00
	P Total	0,53	0,09	0,02	0,19	0,01	0,10	0,01	0,02	-	-	0,20	0,20
	NO3	0,73	0,90	0,34	1,02	1,21	3,02	15,42	19,35	18,80	22,32	10,00	10,00
	DO	5,62	4,92	4,40	4,31	3,34	1,38	4,57	2,97	2,69	1,41	6,00	4,00
	pH	5,22	5,11	5,90	4,79	6,76	6,33	6,01	4,90	5,81	6,28	6-9	6-9
	SO4	8,50	14,50	3,77	20,37	4,96	42,47	3,84	20,79	-	-	400,00	-
Bulan Basah	BOD	3,78	21,11	10,38	17,97	13,69	21,45	3,78	22,65	3,20	14,45	2,00	3,00
	COD	27,00	75,10	42,90	64,30	38,20	51,70	24,00	99,80	12,00	48,30	10,00	25,00
	P Total	0,06	0,11	0,03	0,09	0,03	0,02	0,02	0,06	-	-	0,20	0,20
	NO3	0,64	0,78	2,41	3,57	3,01	3,71	4,42	5,70	4,65	9,59	10,00	10,00
	DO	4,88	4,96	4,02	3,09	4,59	1,82	3,37	1,34	3,22	1,55	6,00	4,00
	pH	5,78	5,12	5,65	5,02	5,76	4,82	4,96	4,70	6,18	6,47	6-9	6-9
SO4	29,56	11,88	9,83	16,84	9,91	7,43	3,55	21,77	-	-	400,00	-	

Sumber: Bappeda Riau, 2014

Perairan Sungai Rokan berdasarkan kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) BOD nilainya lebih rendah dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) COD, nitrat, fosfat, dan sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (iii) DO nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau memenuhi dan (iv) CN hasilnya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air Sungai Rokan bagian hulu berdasarkan parameter COD, nitrat, fosfat, dan sianida masih belum melampaui serta DO memenuhi. Sedangkan BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

Perairan Sungai Rokan bagian hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, BOD, dan nitrat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi dan (iii) fosfat dan sianida nilainya lebih rendah dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air sungai Rokan bagian hilir berdasarkan parameter COD, BOD, dan nitrat dilampaui. Nilai DO rendah, sedangkan fosfat dan sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

Perairan Sungai Siak bagian hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, nitrat, dan fosfat nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (ii) BOD nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (iii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi dan (iv) klorin (Cl) bebas tidak dipersyaratkan untuk air kelas II. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air Sungai Siak bagian hulu sampai Pekanbaru berdasarkan parameter COD, nitrat, dan fosfat belum dilampaui. BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Perairan Sungai Siak bagian hilir digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) BOD, COD, dan nitrat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (iii) Klorin bebas tidak dipersyaratkan untuk air kelas II. Kesimpulannya daya tampung beban cemaran air Sungai Siak bagian Pekanbaru sampai hilir berdasarkan parameter BOD,COD, dan nitrat sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Parameter kualitas air diatas digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diantaranya TSS, DO, COD, BOD, total fosfat, fecal coli dan total coliform, selain itu juga digunakan parameter tanah dan tutupan lahan, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95:
Indikator dan Parameter IKLH Provinsi Riau

Indikator	Parameter	Bobot (%)	Keterangan
Kualitas Udara	SO ₂	30	
	NO ₂		
Kualitas Air Sungai	TSS	30	Dihitung berdasarkan Indek Pencemaran Air (IPA)
	BO		
	BOD		
	COD		
	Total Fosfat		
	Fecal-Coli		
	Total Coliform		
Tutupan Hutan	Luas Hutan	40	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

IKLH adalah indikator untuk mengetahui penurunan kualitas lingkungan hidup dan merupakan instrumen sederhana yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup per provinsi setiap tahunnya dan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal: membantu perumusan kebijakan; Membantu dalam mendisain program lingkungan; dan Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

BLH Provinsi Riau (2015), permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau dibedakan berdasarkan tiga indikator tersebut dan hasilnya sebagai berikut:

1. Masalah kualitas air:

Status mutu air 4 sungai besar yaitu Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Sungai Kampar dalam kondisi cemar berat. Keempat sungai ini mempunyai luas daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda tetapi permasalahan kualitas lingkungan yang sama yaitu kritis dan pencemaran.

2. Masalah tutupan lahan:

Pada tahun 1990, luas tutupan hutan Riau ± 5.446.007 ha (60,22%) dan pada tahun 2011 luas tutupan hutan Riau tersisa ± 2.638.113 ha (29,17%). Dalam waktu 21 tahun, tutupan hutan Riau berkurang sebesar 31,01% atau 1,48% per tahun. Tutupan hutan dibawah 30% (batas Minimal) dan lahan kritis terjadi di 4 DAS utama (Indragiri, Siak, Rokan, Kampar) serta kebakaran hutan/lahan yang terjadi setiap tahun.

3. Masalah kualitas udara:

Permasalahan kualitas udara berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dan emisi udara sumber bergerak/tdk bergerak).

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau mengalami perubahan setiap tahun dan katagori/level tergantung dari kualitas 3 (tiga) komponen diatas. Kecendrungan dan pola perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.96.

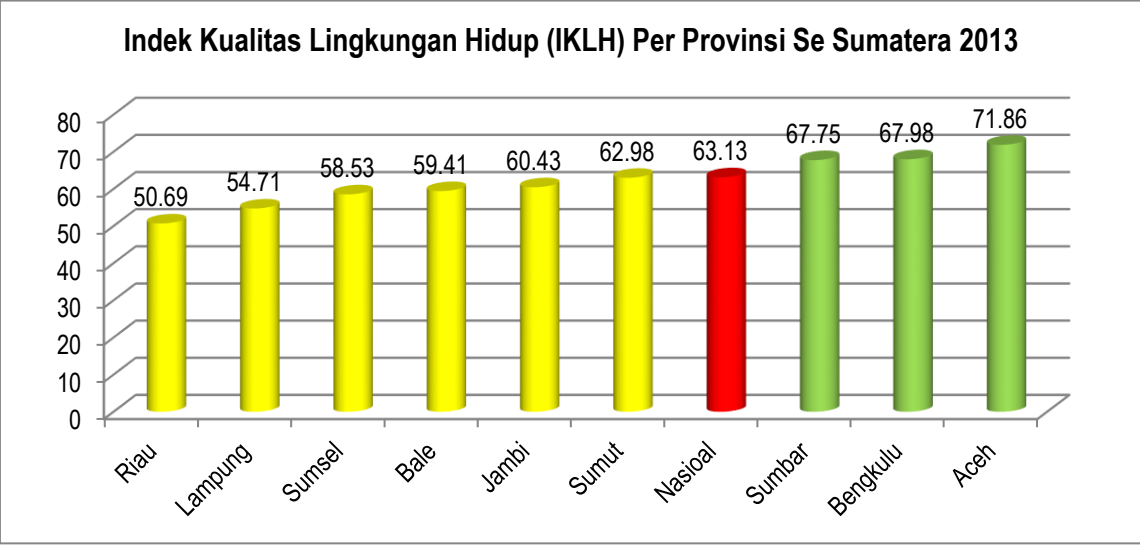
Tabel 2.96:
Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2014

INDEKS	Tahun				Pertumbuh an/Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	
Udara	67,06	51,91	52,89	60,30	(2,23)
Air	55,60	54,30	48,71	47,53	(5,02)
Tutupan Hutan	60,49	50,65	50,60	50,60	(5,46)
IKLH	61,00	52,12	50,72	52,59	(4,52)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terjadi fluktuasi IKLH secara signifikan meskipun pada tahun 2014 indeks naik dari tahun 2013, mengindikasikan adanya kecendrungan kualitas udara, air dan tanah membaik. IKLH Provinsi Riau tahun 2013 sebesar 50,72 merupakan yang

terendah di Pulau Sumatera dan kualitas lingkungan hidupnya masuk dalam katagori sangat kurang (Gambar 2.88). IKLH Provinsi Riau jauh dibawah IKLH rata-rata secara nasional yaitu 63,13.



Gambar 2.88
Perbandingan Indek Kualitas Lingkungan Hidup per Provinsi di Sumatera (BLH Provinsi Riau, 2015)

Kecendrungan kualitas udara, air dan tanah membaik pada tahun 2014 sehingga IKLH Provinsi Riau naik menjadi 52,59 tetapi masih tergolong dalam katagori sangat kurang. IKLH ini masih terendah di Pulau Sumatera (Gambar 2.88) dan jauh dibawah IKLH rata-rata secara nasional yaitu 63-64.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

Gambar 2.89
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera menggambarkan posisi Provinsi Riau Tahun 2013 (BLH Provinsi Riau, 2015)

**Tabel 2.97: Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau
Tahun 2014 dan Sasaran Tahun 2019**

Pembangunan	Baseline 2014 (%)	Sasaran 2019 (%)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15,50	
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	63,00-64,00	66,50-68,50
Tambahahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha dalam dan luar kawasan	750 ribu ha dalam kawasan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

Walaupun IKLH Provinsi Riau meningkat pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya, peningkatan ini belum menunjukkan perbaikan kulaitas lingkungan yang signifikan karena masih tergolong dalam katagori “sangat kurang”. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah/rencana strategis yang berisi penjabaran dari program pembangunan dalam bidang lingkungan hidup.

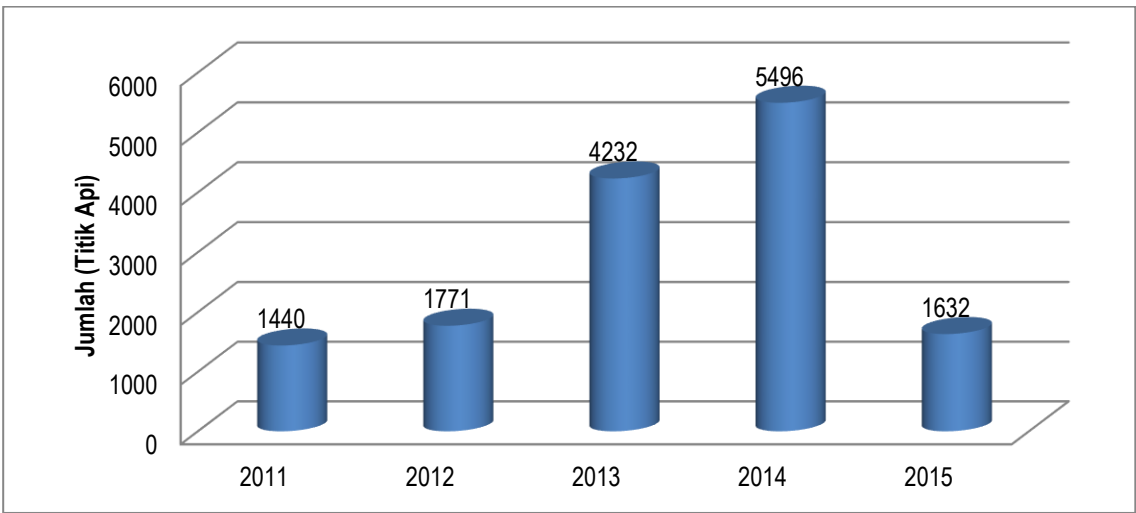
IKLH tidak mempunyai korelasi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tetapi IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kontribusi pertambangan dan industri pengolahan dalam PDRB, artinya jika kontribusinya semakin besar maka nilai IKLH semakin kecil. Kegiatan pertambangan dan industri pengolahan cenderung akan berpengaruhpada kualitaslingkungan. Selain sektor pertambangan dan industri pengolahan, sektor demografi khususnya kepadatan penduduk juga mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Kepadatan penduduk di suatu wilayah cenderung akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga, dan pembukaan lahan akan semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Adanya korelasi antara kepadatan penduduk dengan nilai IKLH, jika penduduk di suatu wilayah semakin padat penduduknya maka kualitas lingkungan diwilayah tersebut cenderung semakin buruk, Kementerian Lingkungan Hidup (2010).

d. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air

Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dilakukan di Provinsi Riau meliputi kawasan resapan air, bantaran sungai, dan danau. Selama ini, permasalahan yang menyebabkan rawan longsor dan berkurangnya sumber mata air yang bersih antara lain perambahan hutan, ilegal logging, kebakaran hutan dan lahan (Gambar

2.90), alih fungsi lahan/konversi lahan, dan tambang galian C. Selain itu, permasalahan lainnya yang menyebabkan menurunnya kualitas sumber mata air yaitu keberadaan industri/hotel/restoran/ rumah sakit dan rumah penduduk (BLH Provinsi Riau, 2015).

Salah satu permasalahan yang menyebabkan rawan longsor dan berkurangnya sumber mata air sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selama 2011 – 2015, jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau meningkat secara berfluktuatif seperti pada Gambar 2.90. Pada tahun 2011, jumlah titik api mencapai 1.440 titik api. Pada tahun 2012 jumlah titik api mengalami peningkatan menjadi 1.771 titik api dan jumlahnya menaik pada tahun 2013 yaitu sebanyak 4.232 titik api dan tahun 2014 sebanyak 5.496. Pada tahun 2015 menurun menjadi 1.632 titik api.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011- 2012) dan BMKG Riau (2012 - 2015)

Gambar 2.90
Jumlah Titik Api Tahun 2010 – 2015 di Provinsi Riau

Jumlah penduduk yang terus meningkat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rawan longsor dan berkurangnya sumber mata air. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan semakin berkurangnya lahan hijau karena difungsikan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal dan peningkatan permintaan lahan untuk kebutuhan budidaya pertanian. Provinsi Riau juga memiliki presentase paling besar lahan potensial atau paling tinggi dalam jenis jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari banjir (Tabel 2.98).

Tabel 2.98:
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pencegahan dan
Perlindungan Banjir Provinsi Riau (P3ES, 2015)

Jasa Ekosistem	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pencegahan dan Perlindungan Banjir	1.424.322,95	15,94	3.783.303,57	42,35	3.725.677,22	41,71

Provinsi Riau memiliki presentase luas lahan potensial atau tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana mencapai 41,71% atau seluas 3.725.677,22 hektar, dan didominasi oleh lahan berpotensi sedang. Kawasan hutan memiliki kemampuan untuk mengurangi kerawanan terhadap bahaya banjir dan longsor. Vegetasi di hutan mampu mengikat tanah dengan kuat, sehingga tidak mudah tererosi oleh air hujan. Vegetasi juga mengurangi jumlah air hujan yang langsung jatuh ke dalam tanah. Dua fungsi tersebut akan mengurangi bahaya longsor di pegunungan dan perbukitan. Sedimentasi juga akan berkurang karena tanah tidak mudah tererosi. Hal ini akan mengurangi endapan sedimen di dataran rendah (P3ES, 2015).Sebaran lokasi yang menunjukkan tingkat daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat dilihat pada Gambar 2.91.



Gambar 2.91
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (P3ES, 2015)

e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Jumlah perusahaan wajib amdal yang telah diawasi hingga tahun 2014 sebanyak 220 usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan jumlah seluruh perusahaan wajib amdal yang ada di Provinsi Riau hingga tahun 2014 sebanyak 221 usaha dan/atau kegiatan. Sehingga persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal sebesar 99,55 %. Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal ini dinilai sangat baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya dokumen amdal yang digunakan hanya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan izin usaha tetapi belum menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan, masih ditemukannya perubahan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak didahului dengan perubahan dokumen dan/atau izin lingkungan, umumnya dokumen lingkungan amdal mutunya masih rendah, belum seluruh dokumen lingkungan amdal dapat diawasi, dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati amdal dan/atau izin lingkungan (BLH Provinsi Riau, 2015).

f. Tempat Pembuangan Sampah Per Penduduk

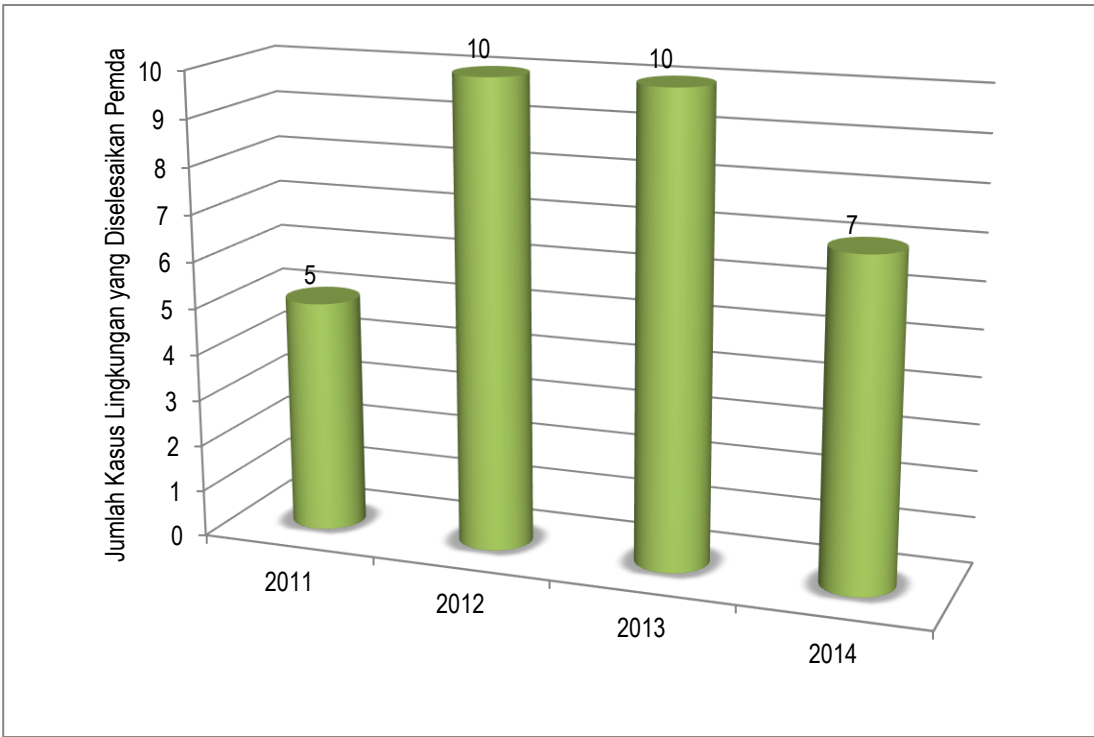
Pekanbaru hanya memiliki 16 Tempat Pembuangan Sampah hingga tahun 2015. Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Idealnya untuk lingkungan dua RW diperlukan satu TPS. Saat ini di Pekanbaru terdapat sebanyak 600 RW. Dengan demikian idealnya dibutuhkan sebanyak 300 TPS (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, 2015). Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Pekanbaru, terdapat di dua lokasi dengan luas total 8 hektar. Keterbatasan TPA sampah ini juga terjadi di kabupaten lainnya. Kabupaten Kampar hanya memiliki TPA sampah dengan luas 5 hektar pada tahun 2012 (Riau Terkini, 2012) dan Kabupaten Kepulauan Meranti hanya memiliki TPA sampah seluas 2 hektar. Jumlah TPS yang ada di kota Dumai saat ini sebanyak 4 TPS permanen yang tersebar di beberapa Kelurahan yakni Kelurahan Bintan, Kelurahan Bukit Datuk, Buluh Kasap dan kelurahan Ratu Sima yang tepatnya berada di Jalan Siderejo. Sampah yang telah diangkut dari TPS akan dibuang ke TPA milik Pemerintah Kota Dumai seluas 11 hektar (Riau Green, 2014).

Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Rata-rata volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta ton/tahun. Namun dari total timbunan sampah tersebut, proporsi sampah terangkut hanya mencapai 20,63%. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah menjadikan belum tercapainya profil dan rencana penanganan sampah di tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penanganan sampah belum terintegrasi utuh mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA.

Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill atau mengalami perubahan sistem dari *sanitary landfill* dan/atau *controlled landfill* menjadi *open dumping*. Sementara jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan *sanitary landfill* mencapai 10 TPA dan yang *menerapkan controlled landfill* sebanyak 55 TPA, sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis *Clean Development Mechanism* di 2 lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi. Dari sisi regulasi, pada tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara *sanitary landfill* sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang tersebut masih terkendala karena belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya. Hal ini terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1.886,99 hektar, sebanyak 80,6 % masih menerapkan metode *open dumping*, 15,5 % menggunakan metode *controlled landfill* dan hanya 2,8 % yang menerapkan metode *sanitary landfill* (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010).

g. Penegakan Hukum Lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang telah diselesaikan pemerintah selama tahun 2011-2014 meliputi pengaduan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disampaikan oleh masyarakat dan sengketa lingkungan antara masyarakat dengan perusahaan. Rata-rata jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah tiap tahunnya yaitu 8 kasus. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2011 sebanyak 5 kasus dan meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada Gambar 2.92. Tahun 2013, jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah daerah Provinsi Riau tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 10 kasus dan kemudian menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2014.



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau (2015)
Keterangan *: Angka prediksi

Gambar 2.92
Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2014

2.3.2.6. Bidang Urusan Adminsittrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Riau telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan di Sumatera. Kondisi ini memberikan konsekwensi pada tingginya migrasi dari luar provinsi. Hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan penduduk

dibanding pertumbuhan penduduk alami yang rata-rata sekitar 2,60% selama periode 2011-2015 (lihat Tabel 2.99).

Tingginya migrasi penduduk luar provinsi menjadikan beban tersendiri yaitu bertambahnya beban anggaran untuk pembangunan terkait dengan mandat biaya pendidikan dan kesehatan terutamaterhadap pendidikan dan kesehatan penduduk miskin serta kemungkinan peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, upaya pengendalian penduduk migrasi perlu mendapat perhatian pada revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019.

Jika dilihat secara detail menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih cepat berbanding penduduk laki-laki, dimana penduduk laki-laki hanya tumbuh sebesar 2,56% dan perempuan tumbuh sebesar 2,63% atau lebih 0,07% per tahun. Pertumbuhan penduduk perempuan yang lebih cepat dari laki-laki mengindikasikan terjadinya perbaikan konsumsi protein masyarakat secara umum. Hal ini dapat disebabkan terjadinya perbaikan pendapatan keluarga masyarakat sehingga terjadinya peningkatan belanja pada konsumsi pangan yang berprotein sehingga tingkat kesuburan kaum perempuan semakin bertambah baik.

Tabel 2.99:
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau
Tahun 2011 – 2015

Investasi	Perkembangan					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Penduduk	5.726.241	5.879.109	6.033.268	6.188.442	6.344.402	2,60
Laki-Laki	2.943.836	3.021.494	3.099.760	3.178.486	3.257.561	2,56
Perempuan	2.782.405	2.857.615	2.933.508	3.009.956	3.086.841	2,63

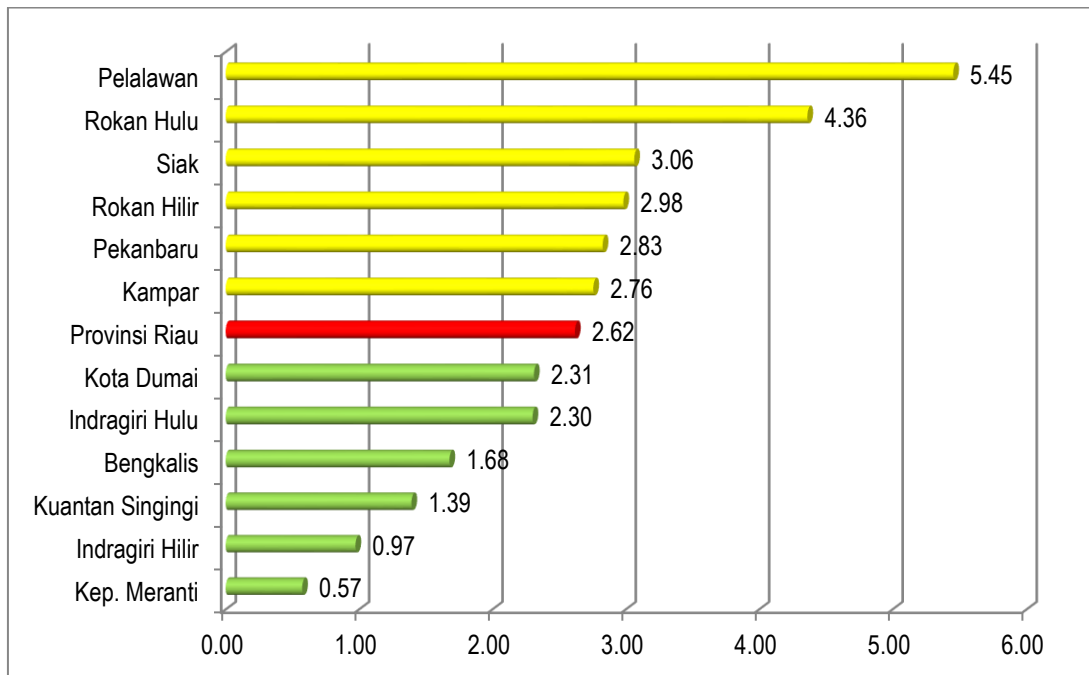
Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Tabel 2.100:
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Per kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Penduduk (Jiwa)	Jenis Kelamin		Rasio	Pertumbuhan (%) 2010-2015	Ber NIK Jiwa (Sumber Ditjen Disdukcapil Kemendagri)
		Laki-Laki	Perempuan			
Kuantan Singingi	314.276	161.377	152.899	105,54	1,39	734.512
Indragiri Hulu	409.431	210.219	199.212	105,53	2,30	417.436
Indragiri Hilir	703.734	361.315	342.419	105,52	0,97	527.457
Pelalawan	396.990	203.753	193.237	105,44	5,45	611.966
Siak	440.841	226.311	214.530	105,49	3,06	361.678
Kampar	793.005	407.228	385.777	105,56	2,76	549.835
Rokan Hulu	592.278	304.050	288.228	105,49	4,36	626.817
Bengkalis	543.987	279.255	264.732	105,49	1,68	408.034
Rokan Hilir	644.680	331.027	313.653	105,54	2,98	323.409
Meranti	181.095	93.017	88.078	105,61	0,57	204.569
Pekanbaru	1.038.118	533.217	504.901	105,61	2,83	858.328
Kota Dumai	285.967	146.792	139.175	105,47	2,31	265.831
Jumlah	6.344.402	3.257.561	3.086.841	105,53	2,62	5.889.872

Sumber: BPS Provinsi Riau (Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Sementara itu kabupaten kota yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya selama periode 2010-2015 (lihat Tabel 2.100 dan Gambar 2.93) adalah kabupaten Pelalawan dan terendah Kabupaten Kep. Meranti masing-masing sebesar 5,45% dan 0,57%. Sementara dependensi rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru masing-masing sebesar 105,61 dan terendah terdapat di Kabupaten Pelalawan 105,44. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa 6 kabupaten kota yang memiliki pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2015 diatas rata-rata provinsi adalah Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Rokan Hilir dan Pekanbaru serta Kampar dan dibawah rata-rata provinsi adalah Kota Dumai, Inhu, Bengkalis, Kuansing dan Inhil serta Kep. Meranti. Oleh karena itu upaya dan program penanganan permasalahan penduduk harus diprioritas pada wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi terutama terkait dengan migrasi.



Gambar 2.93
Pertumbuhan Penduduk Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode 2010-2015, jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau mengalami perkembangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.101, Pada tahun 2010, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan masing-masingnya sebanyak 151 kecamatan dan 1,643 desa/kelurahan. Pada tahun 2014, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan masing-masingnya meningkat menjadi 163 kecamatan dan 1.846 desa/kelurahan.

Tabel 2.101:
Jumlah Desa dan Kelurahan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa & Kelurahan Menurut Status					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kuantan Singingi	209	209	229	229	229	229
2	Indragiri Hulu	194	194	194	194	194	194
3	Indragiri Hilir	192	236	236	236	236	236
4	Pelalawan	118	118	118	118	118	118
5	Siak	126	129	129	129	131	131
6	Kampar	245	245	245	245	245	245
7	Rokan Hulu	153	153	153	153	153	153
8	Rokan Hilir	140	161	161	161	193	193
9	Bengkalis	102	102	102	102	155	155
10	Kep. Meranti	73	101	101	101	101	101
11	Pekanbaru	58	58	58	58	58	58
12	Dumai	33	33	33	33	33	33
Jumlah		1.643	1.739	1.759	1.759	1.846	1.846

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau hingga tahun 2015, sebanyak 276 desa atau 15,76% merupakan desa eks tranmigrasi. Berdasarkan tingkat perkembangan desa, sebanyak 1.213 desa atau 69,35% dari total desa tahun 2013 terkategori desa swadaya, Desa yang terkategori desa swakarya sebanyak 520 desa atau 29,73% dari total desa tahun 2013 dan desa yang terkategori desa swasembada sebanyak 16 desa atau 0,91% dari total desa tahun 2013.

Mulai tahun 2005, Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan Program Pemberdayaan Desa dengan tujuan (1) mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan; (2) meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah; (3) meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan; (4) mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir; (5) meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dana usaha desa/kelurahan; (6) meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib; (7) meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan; dan (8) memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan. Salah satu kegiatan adalah UED/K-SP (Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam), dimana pemerintah

Provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota (sharing lokasi) menghibahkan dana usaha desa/kelurahan.

Tabel 2.102:
Jumlah Desa dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Desa
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Wilayah	Tahun					Keterangan
	2011	2012	2013	2014	2015	
Provinsi						Tahun 2014 dan 2015 tidak dialokasikan dana program pemberdayaan desa
Desa dan Kelurahan	25	40	60	NA	NA	
Dana (Rp. Juta)	12.5	20	30	NA	NA	
Kabupaten						
Desa dan Kelurahan	76	83	81	NA	NA	
Dana (Rp. Juta)	28.3	34.6	35.1	NA	NA	
Jumlah						
Desa dan Kelurahan	101	123	141	NA	NA	
Dana (Rp. Juta)	40.8	54.6	65.1	NA	NA	

Sumber: Bapemades Provinsi Riau (2015)

Selama periode 2005 – 2009, jumlah desa/kelurahan cakupan sebanyak 501 desa kelurahan dari 1,641 desa/kelurahan se Provinsi Riau, Pada periode ini, jumlah desa/kelurahan yang didanai oleh APBD Provinsi Riau sebanyak 237 desa/kelurahan dengan jumlah dana Rp 118,500,000,000, dimana setiap desa dibantu sebesar Rp 500,000,000, Jumlah desa yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota sebanyak 264 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp 11,485,000,000, dimana setiap desa/kelurahan dibantu sebesar Rp 250,000,000 – Rp 500,000,000. Hingga tahun 2013, jumlah desa cakupan Program Pemberdayaan Desa (PPD) mencapai 985 desa/kelurahan dari 1,759 desa/kelurahan dengan total dana Rp 455,785,000,000, Hingga akhir 2013, dari total dana bantuan Rp 455,785,000,000 di 985 desa/kelurahan telah berkembang menjadi Rp 1,715,425,000,000, Oleh karena besarnya manfaat Program Pemberdayaan Desa bagi masyarakat desa/kelurahan sesuai tujuannya maka upaya semua desa/kelurahan tercakup pada PPD perlu menjadi prioritas pada RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019.

2.3.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi, Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk,

Tabel 2.103:
Jumlah Penduduk Peserta KB Provinsi Riau
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	PUS	901.263	996.535	862.334	822.286	931.409	1,43
2	Perserta KB	600.763	673.357	552.870	561.056	638.015	2,35
3	Tidak KB	300.500	323.178	309.464	261.230	293.394	0,01

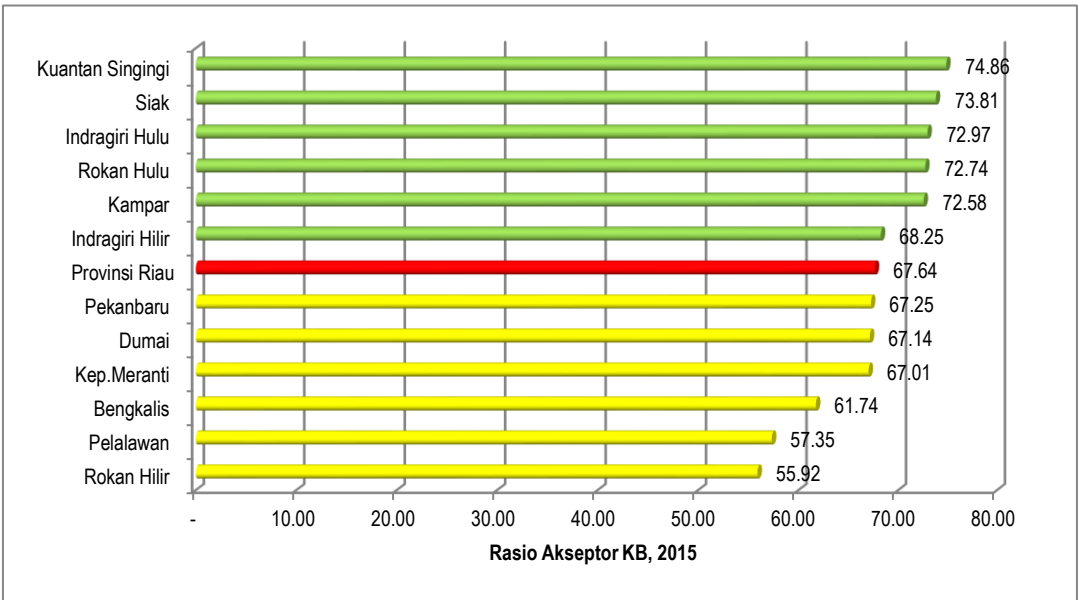
Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Riau tahun 2010 mencapai 901.263pasangan kemudian meningkat menjadi 931.409 pasangan pada tahun 2014 atau naik sebesar 9,24% per tahun. Jumlah PUS yang paling banyak adalah di Kota Pekanbaru yaitu 172.276 PUS dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 30.170 PUS. Dari jumlah PUS yang ada di Provinsi Riau 67,64 % merupakan rasio akseptor KB. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mulai menyadari pentingnya merencanakan jumlah anak untuk kesejahteraan.

Jika dilihat dari rasio jumlah akseptor KB, rata-rata rasio akseptor KB Provinsi Riau yaitu 67.64% sudah berada diatas rata-rata rasio akseptor KB Nasional yaitu 61,90. Rasio akseptor KB per tingkat kabupaten paling rendah adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 55,92% dan paling tinggi terdapat di Kabupaten Kuansing sebesar 74,86%. Hal ini dapat menunjukkan masih rendahnya rasio akseptor KB di kabupaten/kota karena semua kabupaten/kota lebih kurang 30%dan bahkan terdapat 6 kabupten kota dibawah rata-rata RAKB provinsi, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.104 dan Gambar 2.94.

Tabel 2.104:
Jumlah Penduduk Peserta KB Provinsi Riau Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Peserta KB			
		PUS	Tidak KB	Jumlah akseptor KB	Rasio akseptor KB
1	Kuantan Sengingi	58.333	9.642	43.669	74.86
2	Indragiri Hulu	74.658	12.343	54.478	72.97
3	Indragiri Hilir	112.497	21.127	76.785	68.25
4	Pelalawan	44.093	12.192	25.290	57.35
5	Siak	69.876	9.642	51.576	73.81
6	Kampar	142.366	25.093	103.328	72.58
7	Rohul	56.974	8.288	41.446	72.74
8	Bengkalis	48.160	12.151	29.734	61.74
9	Rohil	76.874	20.451	42.981	55.92
10	Kep. Meranti	30.170	7.523	20.218	67.01
11	Pekanbaru	172.276	40.291	115.860	67.25
12	Dumai	45.133	4.907	30.301	67.14
Provinsi Riau		931.409	183.650	635.666	67.64

Sumber: BKKBN Provinsi Riau, 2015



Gambar 2.94
Rasio Akseptor KB Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

Kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang merupakan salah satu indikator dari urusan perhubungan. Jumlah keberangkatan sarana transportasi serta jumlah penumpang dan barang pada suatu pelabuhan udara bisa menjadi ukurannya. Selama periode 2011 – 2015, jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat, jumlah penumpang (datang, berangkat dan transit), jumlah bagasi (bongkar dan muat) dan jumlah barang (bongkar dan muat) di 6 (enam) pelabuhan udara di Provinsi Riau terus meningkat. Pada tahun 2011, jumlah

pesawat yang datang dan berangkat masing-masingnya sebanyak 12.928 pesawat dan 12.908 pesawat sementara pada tahun 2015 jumlah pesawat yang datang dan berangkat meningkat menjadi masing-masingnya sebanyak 11.118 dan 11.088 pesawat. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah pesawat yang datang dan berangkat turun masing-masingnya sebesar 2,26% per tahun dan 2,23% per tahun. Penurunan jumlah pesawat yang datang dan berangkat hanya terjadi pada penerbangan domestik sementara penerbangan internasional naik masing-masing sebesar 0,66% dan 0,05% per tahun. Pertumbuhan pesawat yang datang lebih tinggi dari yang berangkat.

Seiring dengan peningkatan jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat maka jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit juga meningkat. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang pesawat udara yang datang, berangkat dan transit meningkat lebih tinggi dibanding jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat. Rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang domestik yang datang dan berangkat masing-masingnya meningkat sebesar 2,93% per tahun 2,84% per tahun. Namun jumlah penumpang internasional baik datang dan berangkat mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 12,74% dan 12,55% per tahun. Kondisi yang relatif sama pada jumlah bagasi secara umum mengalami peningkatan pertumbuhan. Sedangkan kargo mengalami penurunan pertumbuhan secara umum dengan rata-rata 14,16% per tahun. Penurunan pertumbuhan tertinggi terjadi pada bongkar untuk kedatangan internasional sebesar 45,91% per tahun dan muat juga mengalami kondisi yang hampir sama yaitu turun sebesar 19,42% per tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terjadi penurunan kapasitas kargo atau ekspor dan import yang cukup signifikan selama periode tersebut. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105:
Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang
Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian		Tahun					Pertumbuha n/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
Pesawat (unit)							
Domestik	Datang	11.821	12.422	14.975	11.881	10.117	(2,47)
	Berangkat	11.787	12.446	14.940	11.949	10.096	(2,47)
Internasional	Datang	1.107	1.454	1.714	1.200	1.001	0,66
	Berangkat	1.121	1.466	1.691	1.162	992	0,05
Jumlah	Datang	12.928	13.876	16.689	13.081	11.118	(2,26)
	Berangkat	12.908	13.912	16.631	13.111	11.088	(2,32)
Penumpang (Orang)							
Domestik	Berangkat	1.197.201	1.307.758	1.460.703	1.359.981	1.328.393	2,93
	Datang	1.221.703	1.326.039	1.499.278	1.389.444	1.348.777	2,84
Internasional	Berangkat	172.159	87.614	100.624	88.793	84.389	(12,74)
	Datang	169.704	87.807	105.817	87.585	83.025	(12,55)
Jumlah	Berangkat	1.369.360	1.395.372	1.561.327	1.448.774	1.412.782	1,02
	Datang	1.391.407	1.413.846	1.605.095	1.477.029	1.431.802	1,02
Bagasi (kg)							
Domestik	Bongkar	10.064.509	10.731.662	11.015.921	10.231.528	10.064.053	0,13
	Muat	8.649.576	9.570.418	9.955.348	8.989.003	8.964.348	1,17
Internasional	Bongkar	605.926	751.373	854.126	719.872	770.624	7,25
	Muat	483.716	627.940	702.208	592.751	556.686	4,99
Jumlah	Bongkar	10.670.435	11.483.035	11.870.047	10.951.400	10.834.677	0,55
	Muat	9.133.292	10.198.358	10.657.556	9.581.754	9.521.034	1,36
Kargo (kg)							
Domestik	Bongkar	10.448.478	10.991.592	10.131.651	9.100.654	7.031.128	(8,89)
	Muat	2.973.275	2.684.854	2.903.925	2.044.530	2.620.466	(0,74)
Internasional	Bongkar	26.848	19.640	14.805	9.180	534	(45,91)
	Muat	44.094	32.523	62.032	23.744	4.642	(19,42)
Jumlah	Bongkar	10.475.326	11.011.232	10.146.455	9.109.834	7.031.662	(8,94)
	Muat	3.017.369	2.717.377	2.965.957	2.068.274	2.625.108	(1,03)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2012 – 2016)

Di Provinsi Riau terdapat 6 pelabuhan udara, dimana lima pelabuhan udara dimiliki oleh Pemerintah dan satu pelabuhan udara ‘Sultan Syarif Harun Setia Negara’ di Pelalawan dimiliki oleh swasta. Dari kelima pelabuhan udara, pebuan udara ‘Sultan Syarif Kasim II’ di Pekanbaru merupakan pelabuhan udara utama dengan kualifikasi pelabuhan udara internasional, Pelabuhan udara ‘Pinang Kampai’ di Dumai merupakan pelabuhan udara yang relatif beroperasi. Sedangkan pelabuhan udara ‘Japura’ di Rengat relatif kurang beroperasi, Sementara, pelabuhan udara ‘Tempuling’ di Tembilahan dan ‘Pasir Pengaraian’ juga relatif kurang beroperasi karena kondisi pelabuhan

udara yang belum standar dengan dukungan peralatan yang masih minim.

Tabel 2.106:
Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang
Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pesawat Datang	11.883	11.288	16.689	28.185	10.276	12,05
2	Pesawat Berangkat	11.895	11.316	16.631	28.184	10.251	11,98
3	Penumpang Datang	1.234.932	1.300.071	1.561.327	3.007.266	1.567.293	17,52
4	Penumpang Berangkat	1.246.181	1.425.803	1.605.095	3.002.440	1.285.567	68,47
5	Penumpang Transit	30.233	127.064	21.799	5.902	1.859	24,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 2.106 menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap jumlah pesawat dan penumpang yang datang dan berangkat pada lima bandara yang terdapat di Riau. Jumlah pesawat yang datang pada tahun 2011 hanya 11.883 kemudian meningkat menjadi 28.185 pada tahun 2014, kembali menurun pada tahun 2015 sebesar 10.276 atau tumbuh sebesar 12,05% per tahun. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang sangat drastis adalah jumlah penumpang berangkat sebesar 68,47% per tahun.

Tabel 2.107:
Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang
Menurut Pelabuhan Udara Provinsi Riau Tahun 2015

Bandara	Pesawat		Penumpang		
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit
SSK II Pekanbaru	8.629	8.613	1.542.567	1.260.210	1.755
Pinang Kampai Dumai	540	540	20.762	21.476	89
Japura Rengat	399	398	20	20	15
SSH Setia Negara Pelalawan	656	648	3.776	3.561	-
Tempuling Tembilahan	37	37	167	286	-
Pasir Pengaraian	15	15	1	14	-
Jumlah	10.276	10.251	1.567.293	1.285.567	1.859

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2016.

Sedangkan jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dan penumpang menurut bandara dapat dilihat pada Tabel 2.107. Jumlah kedatangan pesawat yang paling banyak pada tahun 2015 adalah Bandara SSK II Pekanbaru yaitu 8.629 kedatangan dan paling sedikit adalah Tempuling Tembilahan hanya 15 kedatangan.

Sementara itu di Provinsi Riau, jumlah pelabuhan umum sebanyak 33 buah, terbanyak ada di kabupaten Indragiri Hilir, Pelabuhan Tersus sebanyak 11 buah, terbanyak ada di Kabupaten Bengkalis. Pelabuhan TUKS berjumlah 96 buah, terbanyak ada di Dumai. Pelabuhan Utama sebanyak satu buah yaitu di Kota Dumai. Pelabuhan pengumpul sebanyak 13 buah, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelabuhan pengumpan sebanyak 19 buah, terbanyak 2 unit terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Pelabuhan yang diusahakan sebanyak 9 terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Terdapat 24 buah pelabuhan yang tidak diusahakan terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kondisi objektif pembangunan infrastruktur sektor perhubungan di Provinsi Riau hingga saat ini, yaitu masih dijumpainya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, baik pada moda angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara, baik untuk transportasi manusia dan barang. Keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi tersebut akan berdampak intensitas tingkat pelayanan yang rendah. Namun demikian, berbagai upaya sedang dan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur perhubungan. Jumlah pelabuhan menurut jenisnya per kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Provinsi Riau memiliki tujuh pelabuhan skala nasional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Pekanbaru serta Kota Dumai. Jumlah pelabuhan terbanyak memang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 12 buah dengan status umum dan hanya 3 berstatus khusus. Sisanya untuk kepentingan sendiri. Hal ini mengisyaratkan pentingnya Kabupaten Indragiri sebagai pintu gerbang menuju jalur pelayaran nasional atau bahkan peluang di skala internasional. Tiga kabupaten dengan kepemilikan pelabuhan yang vital adalah Kabupaten Bengkalis dengan empat pelabuhan, Dumai tiga pelabuhan dan Siak satu pelabuhan. Kabupaten Bengkalis memiliki satu pelabuhan dengan nilai ekspor cukup besar yakni di Pelabuhan Sungai Pakning.

Tabel 2.108:
Jumlah Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Jenis				Status			
		Umum	Tersus	TUKS	Utama	Pengum pul	Pengum pan	Diusaha kan	Belum diusahakan
1	Kuansing	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	1		4	-	1	-	1	-
3	Indragiri Hilir	12	3	15	-	4	8	2	10
4	Pelalawan	1			-	1	-	-	1
5	Siak	5		15	-	2	3	-	5
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	6	7	7	-	2	4	2	4
9	Rokan Hilir	3	-	2	-	1	2	1	2
10	Kep.Meranti	3	-	8	-	1	2	1	2
11	Pekanbaru	1	-	15	-	1	-	1	-
12	Dumai	1	1	30	1	-	-	1	-
Jumlah		33	11	96	1	13	19	9	24

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2016.

Pembangunan pelabuhan laut harus terus dilakukan baik kuantitas maupun kualitasnya, karena pelabuhan laut merupakan pintu masuk dan keluar utama barang dari/ke Provinsi Riau sekaligus membuka keterisoliran wilayah kepulauan, Upaya Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Dumai untuk mendorong Pelindo meningkatkan fasilitas pelabuhan Dumai dan membangun pelabuhan peti kemas akan sangat mempercepat arus masuk/keluar barang. Hal yang sama untuk meneruskan pembangunan pelabuhan Samudra Kuala enok juga akan mempercepat bongkar/muat barang untuk Riau bagian selatan.

2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Kepemilikan dan penguasaan peralatan komunikasi dan informatika merupakan salah satu indikator kemajuan masyarakat suatu daerah.Selama periode 2011-2015, persentase rumah tangga yang memiliki telepon mengalami pertumbuhan sebesar -8,55% per tahun dan HP tumbuh sebesar 1,39% per tahundan komputer desktop dan Laptop tumbuh masing-masing sebesar -6,61% per tahun dan 0,27% per tahun. Total rumah tangga yang memiliki sarana telekomunikasi pada tahun

2015 sebesar 98,87%, Persentase rumah tangga yang memiliki telepon, HP, desktop dan Laptop menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau ditunjukkan pada Tabel 2.109.

Pelayanan PT. Telkom Divisi 1 Regional Sumatera tercakup di 12 kabupaten dan kota, sedangkan untuk hubungan luar negeri dilakukan oleh PT. Indosat Cabang Batam. Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi berbasis kabel dapat diketahui dari jumlah pelanggan telepon PT. Telkom serta keberadaan warung telekomunikasi.

Tabel 2.109:
Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi
di Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Telepon	5,40	3,72	3,51	3,60	3,60	8,55
2	Telepon Selular (HP)	91,40	93,09	94,66	95,27	n/a	1,39
3	Komputer Desktop	5,60	4,84	4,77	4,54	4,54	-6,61
4	Komputer Laptop	10,90	14,84	16,72	8,74	n/a	0,27

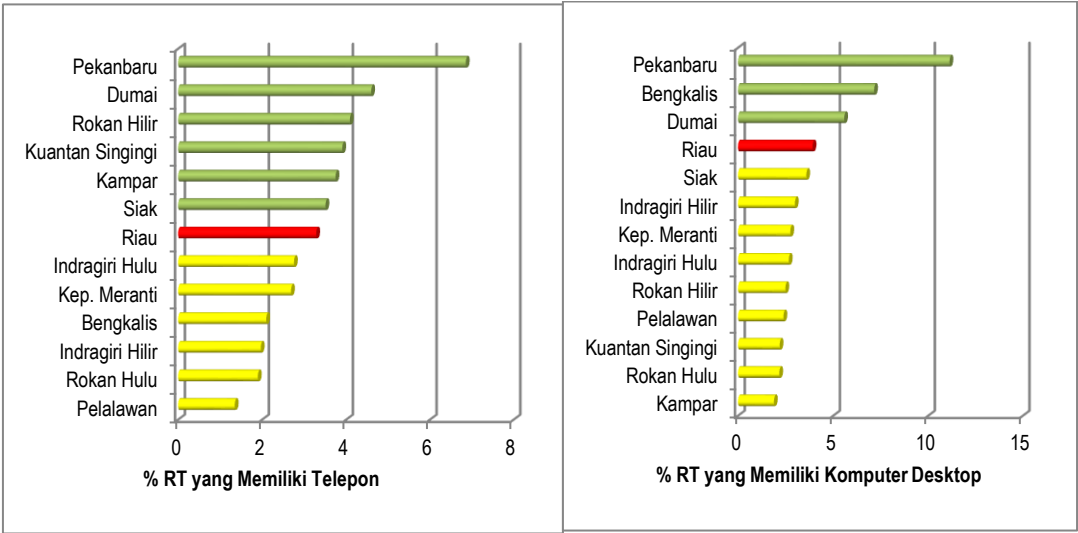
Sumber: BPS Prov. Riau (Riau Dalam Angka, 2016)

Pada tahun 2015 hanya sekitar 3.60% saja dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang terlayani oleh fasilitas telepon berbasis kabel. Rendahnya persentase jumlah pelanggan telepon sambungan rumah ini salah satunya disebabkan oleh berkembangnya prasarana telekomunikasi nirkabel. Untuk memaksimalkan pelayanan telepon kabel, PT. Telkom membangun 24 Sentral Telepon Otomatis (STO), dimana 11 diantaranya berada di masing-masing ibukota kabupaten dan kota, serta sisanyadi wilayah yang sudah berkembang. Dari data yang ada diketahui bahwa di ibukota kabupaten yang baru, kapasitas SST yang terpasang pada STO yang sudah ada secara umum masih rendah. Ibukota kabupaten baru tersebut antara lain : Siak Sri Indrapura (Kab. Siak), Ujung Tanjung (Rokan Hilir), Pasir Pangairan (Rokan Hulu), Taluk Kuantan (Kuantan Singingi).

Tabel 2.110:
Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi
Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2015

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki	
	Telepon	Komputer Desktop
Kuantan Singingi	3,91	2,19
Indragiri Hulu	2,76	2,67
Indragiri Hilir	1,97	2,99
Pelalawan	1,35	2,39
Siak	3,51	3,59
Kampar	3,75	1,89
Rokan Hulu	1,90	2,17
Bengkalis	2,10	7,15
Rokan Hilir	4,09	2,49
Kep. Meranti	2,69	2,75
Pekanbaru	6,86	11,13
Dumai	4,60	5,58
Jumlah	3,29	3,92

Sumber: BPS Prov. Riau (Riau Dalam Angka, 2016)



Gambar 2.95
Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2015

Persentase kepemilikan alat komunikasi dan Komputer Desktop tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru dan terendah di Kabupaten Pelalawan dan Kampar. Penguasaan penduduk terhadap teknologi informasi khususnya internet di Provinsi Riau relatif masih rendah. Pada tahun 2012, penduduk Provinsi Riau yang pernah mengakses internet masih sebesar 14,50%. Sisanya sebesar 85,50% belum pernah mengakses internet. Diperlukan upaya dalam mendorong masyarakat pedesaan untuk dapat akses internet dalam rangka peningkatan

pengetahuan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode 2014 – 2019.

2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Jumlah koperasi di Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan 3,47%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 4.792 meningkat menjadi 5.271 unit seperti terlihat pada Tabel 2.111. Sementara jumlah anggota mengalami penurunan dari 610.749 orang pada tahun 2011 menjadi 541.731 orang pada tahun 2015 atau turun sebanyak 2,73%.

Tabel 2.111.
Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Investasi	Perkembangan					Pertumbuhan (%/Thn)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah koperasi	4.792	5.013	6.125	4.993	5.271	3,47
	Koperasi Aktif	-	-	-	-	3.099	
	Anggota	610.749	608.468	629.567	545.025	541.731	(2,73)
	Modal Sendiri (Rp. Juta)	641.052	726.108	842.723	1.152.374	1.103.553	15,46
	Modal Luar (Rp. Juta)	1.609.952	1.715.236	1.636.660	1.905.988	2.389.091	10,94
	Volume Usaha (Rp. Juta)	2.279.604	2.348.918	2.379.019	3.314.885	2.960.121	8,24
	SHU (Rp. Juta)	106.564	129.150	138.253	182.829	173.534	13,85
2	Jumlah UMKM	484.289	490.396	-	156.689	156.689	(16,70)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

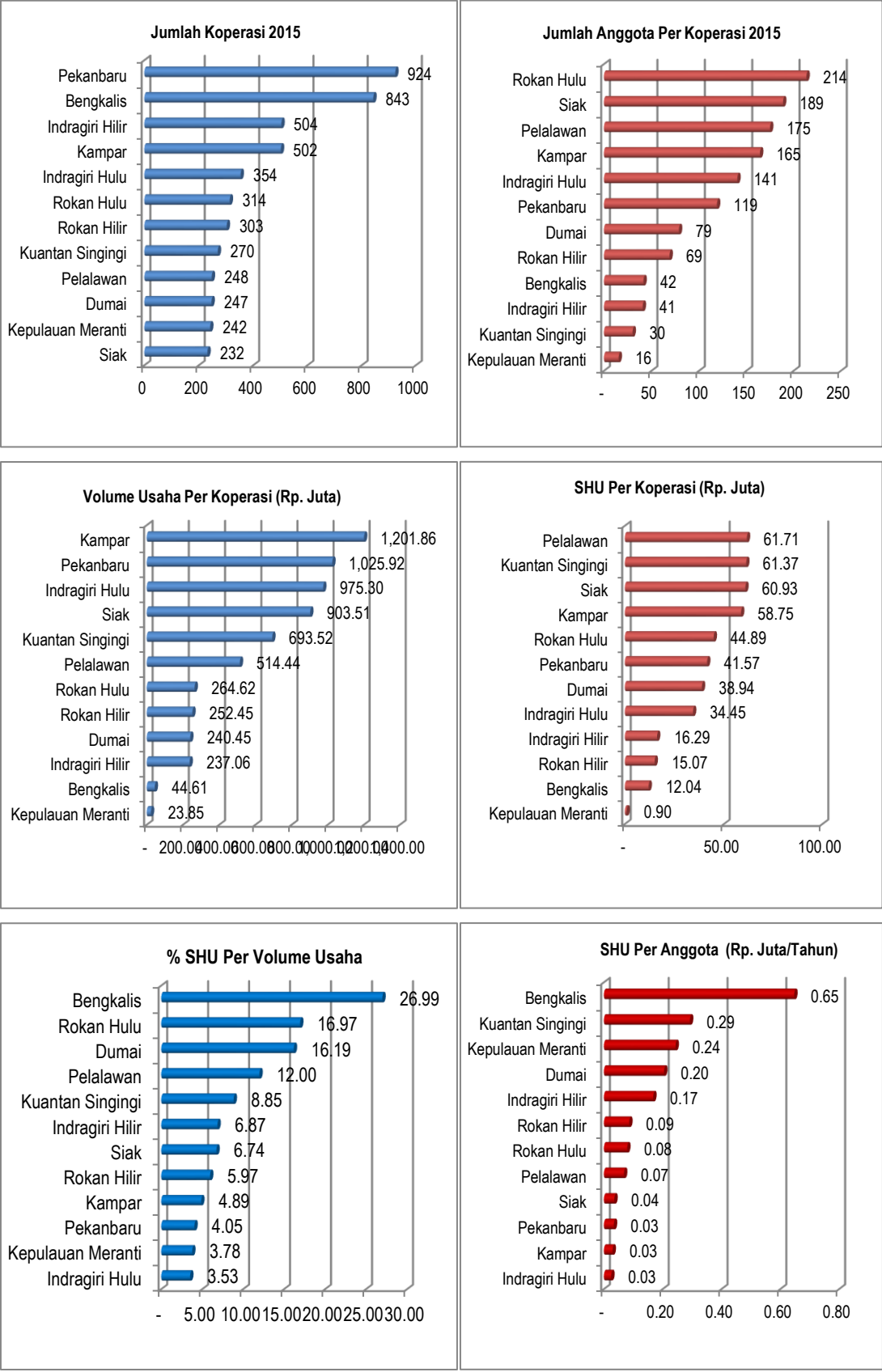
Namun demikian terjadi peningkatan nilai volume usaha sebesar 8,24% per tahun dari Rp. 2.279.604 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 2.960.121 juta pada tahun 2015, dengan peningkatan pertumbuhan nilai SHU sebesar 13,85% pertahun. Koperasi yang dibentuk belum mampu menjadi koperasi aktif, Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan, karena koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat langsung menyentuh masyarakat.

Tabel 2.112:
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Kinerja Koperasi					
	Jumlah Koperasi	Anggota	Modal Sendiri (Rp.Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp.Juta)	SHU (Rp. Juta)
Kuantan Singingi	270	8.160	28.618,12	26.230,22	187.249,30	16.570,76
Indragiri Hulu	354	49.785	32.740,69	184.531,92	345.257,86	12.196,97
Indragiri Hilir	504	20.621	39.814,72	147.496,73	119.478,37	8.208,71
Pelalawan	248	43.452	74.103,01	166.279,48	127.582,10	15.304,43
Siak	232	43.842	80.091,03	319.079,33	209.614,40	14.135,03
Kampar	502	82.620	190.283,00	195.544,00	603.336,00	29.493,00
Rokan Hulu	314	67.118	79.287,03	122.422,53	83.091,16	14.096,49
Bengkalis	843	35.149	11.087,42	22.982,08	37.605,47	10.150,94
Rokan Hilir	303	20.952	39.014,40	749,20	76.491,37	4.565,18
Kepulauan Meranti	242	3.755	11.390,26	4.639,52	5.770,89	218,36
Pekanbaru	924	110.089	374.503,37	954.957,74	947.947,16	38.414,98
Dumai	247	19.526	45.071,67	36.859,15	59.392,21	9.618,10
Provinsi Riau	4.983	505.069	1.006.004,72	2.181.771,90	2.802.816,28	172.972,95

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Sementara itu jika dilihat kinerja koperasi, dimana jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru dan paling sedikit di Kabupaten Siak. Jumlah anggota terbanyak setiap koperasi terdapat di Kabupaten Rokan Hulu dengan anggota sebanyak 214 orang dan anggota paling sedikit terdapat di Kabupaten Kep. Meranti sebanyak 16 anggota. Manakala kinerja usaha koperasi dari aspek volume usaha dan nilai SHU menunjukkan bahwa volume usaha setiap koperasi yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar dengan nilai volume usaha sebesar Rp. 1.201,86 juta dan terendah terdapat di Kep. Meranti dengan nilai volume usaha sebesar Rp. 23,85 juta. Sementara nilai SHU per koperasi tertnggi terdapat di kabupaten Pelalawan dengan nilai SHU sebesar Rp. 61,71 juta dan terendah di kabupaten Kep. Meranti dengan nilai SHU Rp. 0,90 juta/ koperasi.



Gambar 2.96
Perkembangan Kinerja Koperasi Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2015

Jika dilihat dari kinerja usaha koperasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi di Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya manajemen yang baik terlihat dari nilai SHU per anggota yang

tertinggi sebanyak 0,65 juta/anggota dan terendah di Kabupaten Inhu sebanyak Rp.0,03 juta/anggota. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan, karena koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat langsung menyentuh masyarakat.

Jumlah UKM di Provinsi Riau menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah UKM sejumlah 484.289 meningkat menjadi 490,396 UKM pada tahun 2012. Jumlah UKM paling tinggi ada di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan juga bahwa peluang usaha di Kota Pekanbaru sangat besar untuk pengembangan usaha. Kota Pekanbaru memang dikenal sebagai kota perdagangan yang telah dikembangkan oleh Walikota Pekanbaru. Jumlah UKM paling sedikit di Kabupaten Meranti, pada tahun 2012 dengan jumlah 11,016. Hal ini mungkin disebabkan oleh fokus pemerintah setempat ke pembenahan wilayah karena Kabupaten Meranti belum lama dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.

2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

a. Investasi PMDN

Perkembangan jumlah investor di Provinsi Riau selama periode 2011–2015 cenderung berfluktuatif meningkat baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.113. Pada tahun 2011 jumlah investor PMDN sebanyak 64 investor meningkat menjadi 243 investor pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 49,78% per tahun. Sedangkan nilai investasi pada tahun 2011 sebanyak 212,34 milyar dan meningkat menjadi 653,40 milyar pada tahun 2015 atau 102,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi PMDN di Riau terjadinya peningkatan skala usaha karena pertumbuhan nilai investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah proyek.

Walaupun terjadi peningkatan yang cukup signifikan namun hal ini masih dianggap rendah karena hingga tahun 2015 investasi PMDN masih kurang dari satu triliun rupiah. Dengan kondisi potensi investasi yang sangat tinggi tetapi PMDN masih cukup rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dasar yang dapat mendukung

kegiatan investasi. Perkembang investasi PMDN dan PMA di Riau dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113:
Jumlah Investor PMDN dan PMA Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Investasi	Perkembangan					Pertumbuhan (%/Thn)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	PMDN						
	Proyek (Unit)	56	51	64	76	180	43,04
	Nilai (Rp. Milyar)	7.462,59	5.450,43	4.874,27	7.707,55	9.943,04	12,40
	Penyerapan TK	15.769	12.865	33.284	-	-	
2	PMA						
	Proyek (Unit)	56	81	168	129	243	54,30
	Nilai (US\$. Juta)	212,34	1.152,85	1.304,94	1.369,56	653,39	102,19
	Penyerapan TK	3.038	12.194	26.095	-	-	

Sumber: BPMD Provinsi Riau (2016)

b. Investasi PMA

Sementara itu jumlah investasi PMA di Provinsi Riau tahun 2011 sebanyak 56 proyek dan meningkat menjadi 180 proyek pada tahun 2015 atau naik 43,04%. Sedangkannilai pada tahun 2011 sebanyak 212,34 juta US dollar kemudian meningkat menjadi 653,39 juta US dollar pada tahun 2015 atau naik 102.19% per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa skala investasi PMA mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai proyek lebih rendah dari pertumbuhan jumlah proyek. Penurunan skala investasi ini dapat disebabkan oleh investor yang melakukan investasi terutama pada bidang industri di kawasan industri hanya menjalankan investasi pada pengembangan produk industri, karena mereka tidak lagi melakukan investasi pada pembangunan infrastruktur sebab infrastruktur kebutuhan investor sudah disediakan oleh badan pengelola kawasan industri.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Selama periode 2011–2015, jumlah proyek dan nilai investasi terbesar adalah di sektor Perkebunan diikuti sektor industri pengolahan makanan, Untuk daya serap tenaga kerja walaupun juga terjadi peningkatan, namun cenderung berfluktuatif seperti terlihat pada Tabel 2.113. Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN adalah 15.769 dan perusahaan PMA sebanyak 3.038 tenaga kerja. Kondisi daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA meningkat

masing-masing menjadi 32.050 orang dan 11,989 orang pada tahun 2015 atau tumbuh 103 % dan 295 %. Hal ini menggambarkan bahwa pada periode ini selain terjadinya kenaikan nilai investasi juga terjadi perubahan investasi dari usaha perkebunan kelapa sawit menjadi pengolahan hasil perkebunan (pabrik kelapa sawit),

Tabel 2.113 menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Riau. Tahun 2011 Kabupaten Rokan Hilir memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu 5,185 orang; diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 4,661 orang; Kota Dumai sebanyak 3,402 orang; dan Kabupaten Siak sebanyak 2,686 orang.

d. Penanaman Modal Per Kabupaten Kota

Perkembangan realisasi investasi Provinsi Riau dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 sejumlah Rp. 7,462.60 (Milyar) dan jumlah nilai realisasi PMA sejumlah US\$ 212.34 (juta) sedangkan nilai realisasi investasi Provinsi Riau tahun 2015 PMDN sebesar Rp. 9,943.04 (milyar) dan nilai realisasi investasi Provinsi Riau tahun 2015 PMA sebesar US\$ 653.39 (juta). Jumlah investasi per kabupaten/kota sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114:
Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Kota Provinsi Riau
Tahun 2011-2015

Kabupaten Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA
Kuantan Singingi	6,94	-	0,23	8,13	96,96	2,09	739,60	59,12	245,83	23,22
Indragiri Hulu	74,51	5,76	79,07	5,51	33,11	0,90	388,66	38,21	188,63	0,06
Indragiri Hilir	-	29,29	84,44	0,00	407,75	65,23	14,13	62,94	528,93	21,98
Pelalawan	6.537,58	-	833,89	225,78	219,04	33,94	48,80	7,01	823,30	316,38
Siak	410,72	102,35	1.195,68	754,86	681,17	647,94	2.395,75	501,24	527,65	6,91
Kampar	316,96	17,59	2.548,90	19,62	143,50	74,84	105,27	17,56	977,24	29,57
Rokan Hulu	27,24	-	45,14	34,75	372,90	0,13	83,41	-	275,10	16,10
Bengkalis	-	9,69	75,44	12,36	208,02	53,76	12,72	15,81	205,11	23,69
Rokan Hilir	-	-	-	-	-	2,86	-	1,78	-	63,39
Kep. Meranti	-	14,86	-	6,12	-	1,88	22,65	2,75	-	0,69
Pekanbaru	60,41	7,77	4,76	7,08	1.322,63	5,46	2.658,32	18,92	4.463,50	69,55
Kota Dumai	28,24	25,02	582,87	78,64	1.389,18	415,93	1.238,23	644,23	1.707,76	81,88
Jumlah	7.462,60	212,34	5.450,43	1.152,85	4.874,27	1.304,95	7.707,55	1.369,56	9.943,04	653,39

Sumber: BPMPD Provinsi Riau, 2016
Note: * PMDN Milyar Rupiah; ** PMA Juta USD

2.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

Organisasi kemasyakatan pemuda (OKP) yang terdaftar sebanyak 14 ormas. Masa kepengurusan terhadap 14 ormas tersebut berlaku dari 2015-2020. Sedangkan jenis ormas yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.115. Jumlah organisasi dilapangan jauh lebih banyak. Oleh karena pentingnya peran pemuda dimasa depan maka pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga perlu mendapat perhatian khusus dalam pembanguna lima tahun ke depan.

Tabel 2.115:
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda/Ormas
Provinsi Riau Tahun 2015

No	Nama OKP	Periode Kepengurusan
1	Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara RI (P.P. POLRI)	Tahun 2015-2020
2	DPD.Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Provinsi Riau (LSM Penjara Indonesia)	Tahun 2015-2020
3	Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Riau-Kepulauan Riau	Tahun 2015-2020
4	LSM. Forum Pemberdayaan Masyarakat Riau (LSM FPMR).	Tahun 2015-2020
5	LSM Nusantara Jaya	Tahun 2015-2020
6	Resam Warisan Kerajaan Siak Sri Indrapura	Tahun 2015-2020
7	DPP Forum Komunitas Perindo Riau	Tahun 2015-2020
8	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Riau	Tahun 2015-2020
9	DPP. LSM Aman RI	Tahun 2015-2020
10	DPP LSM PeninjauanKembali	Tahun 2015-2020
11	Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Riau (ASPEKPIR RIAU)	Tahun 2015-2020
12	LSM. Forum KomunikasiPeduliNagari	Tahun 2015-2020
13	DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Riau	Tahun 2015-2020
14	Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan (LBH-BK)	Tahun 2015-2020

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2016

2.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

Bidang urusan statistik dilakukan dengan kerjasama antara Bappeda dengan BPS selama periode 2011-2015. Publikasi yang dilakukan kerjasama antara Bappeda dengan BPS terutama terkait dengan publikasi Riau Dalam Angka, PDRB Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB untuk masing-masingnya selalu disediakan atau 100% dilaksanakan.

Dalam kerjasama publikasi ini masih terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang disajikan antara data provinsi Riau dengan data Kabupaten Kota. Apabila dijumlahkan atau dikompilasi antara data

Kabupaten/Kota tidak sama jumlahnya dengan data provinsi. Hal ini dapat disebabkan karena data provinsi lebih dahulu dipublikasikan sehingga data kabupaten kota yang termasuk dalam data provinsi belum sepenuhnya merupakan akumulasi data akhir tahun. Sementara data kabupaten kota sudah merupakan data akhir tahun. Maka ketika dijumlahkan antara data kabupaten kota se Riau lebih besar nilainya dibandingkan data Riau dalam Angka yang dipublikasikan. Sisi lain format penyusunan data antara kabupaten Kota tidak seragam. Oleh karena itu Bappeda dan BPS baik provinsi dan Kabupaten Kota sebaiknya melakukan kordinasi dan sinkronisasi terkait dengan data yang disajikan.

Tabel 2.116:
Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB
Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau
Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB
1	Kuantan Singingi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Indragiri Hulu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Indragiri Hilir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pelalawan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Siak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Kampar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Rokan Hulu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Rokan Hilir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Bengkalis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Kep Meranti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Pekanbaru	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Dumai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Provinsi Riau		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2015

2.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

Kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang antara lain diukur dari indeks efektifitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi, indeks integritas daerah. Pada penilaian kinerja administrasi keuangan daerah dinilai dari Opini BPK dan nilai akuntabilitas.

Efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) merupakan salah satu komponen dari enam komponen *worldwide government index* (WGI) yang dikeluarkan oleh World Bank, Selama periode 2010-2015,

indeks efektivitas pemerintah Provinsi Riau terus mengalami peningkatan yang menggambarkan semakin mengarah ke *good governance*.

Nilai keterbukaan informasi juga terus meningkat. Pada tahun 2012, peringkat nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau berada pada peringkat 10 dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2013, nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau menurun, termasuk peringkatnya menurun menjadi peringkat 15 dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Tabel 2.117:
Penilaian Kinerja Pemerintahan Umum Provinsi Riau
Tahun 2010 – 2015

Deskripsi	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Efektifitas Pemerintahan	5,59	5,89	6,13	6,18	na	na
Nilai Keterbukaan Informasi	2,23	2,20	2,16	2,13	17,40	30,57
Indeks Integritas Daerah	na	na	na	8,00	Na	na

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2015)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan survey integritas sektor publik untuk mengukur persepsi tentang pelayanan publik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan. Survey KPK tersebut terbagi kedalam 6 indikator yaitu pengalaman, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi.

Indeks integritas pemerintah Indeks integritas pemerintah Provinsi Riau tahun 2013 sebesar 8,00 dimana nilai yang diperoleh lebih tinggi dibanding indeks integritas pemerintah pusat tahun 2013 dan rata-rata instansi daerah.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualaian (WDP), opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini.

Tabel 2.118:
Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas	57,29	59,97	61,91	61,45	54,73	(0,94)
Kategori Nilai Akuntabilitas	CC	CC	CC	CC	CC	CC

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2015)

Selama periode 2011 – 2015, pemerintah Provinsi Riau hanya sekali yaitu pada tahun 2011 mendapat opini WDP, selainnya WTP. Keberhasilan pemerintah Provinsi Riau mendapat opini WTP perlu terus ditingkatkan untuk mendapat kategori yang lebih baik walaupun nilai akuntabilitas terus mengalami perbaikan dari 57,29 pada tahun 2011 menjadi 61,91 pada tahun 2013 dan menurun sampai dengan tahun 2015 menjadi 54,73 dengan rata-rata pertumbuhan nilai akuntabilitas per tahun sebesar -0.94%.

2.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

Pengembangan budaya melayu di Provinsi Riau baik dalam tatanan pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah kehidupan sehari-hari belum memberikan kemajuan yang berarti hal ini dapat kita lihat masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Demikian juga halnya dalam dunia pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis terutama dalam kurikulum pendidikan dapat kita lihat dari Tabel 2.119.

Tabel 2.119:
Rekapitulasi Implementasi Budaya Melayu dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah (MI, MTS dan MA) Provinsi Riau 2013

No	Madrasah	Alternatif Jawaban				
		Inti	Muatan Lokal	Ekstrakurikuler	Insidentil	Belum Ada
1	MI	131 (7,10%)	15 (0,9%)	162 (10%)	4 (0,2%)	1.368 (81,10%)
2	MTs	292 (17,4%)	25 (1,5%)	342 (20%)	1 (0,1%)	1.020 (61,00%)
3	MA	256 (15,2%)	1 (0,1%)	245 (14,6%)	0(0,0%)	1.178 (70,10%)
	Jumlah (%)	679 (13,3%)	41(0,8%)	749 (14,8%)	5(0,1%)	3.566 (71,00%)

Sumber: Implementasi Visi Riau 2020 Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah Se- Provinsi Riau (BALITBANG PROVINSI RIAU 2013)

Tabel 2.119 menunjukkan bahwa implementasi budaya melayu dalam pendidikan madrasah (madrasah ibtdaiyah, madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah), Dalam kurikulum inti, muatan lokal, ekstrakurikuler, maupun yang bersifat insidentil, Di Provinsi Riau terdapat 1.197 madrasah (MI, MTS, dan MA) dimana terdapat 850 madrasah belum mengakomodir budaya melayu dalam kurikulum pendidikan dan 370 madrasah yang sudah mengakomodir budaya melayu dalam kurikulum pendidikan, Hal ini merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dimana Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki kultur budaya melayu tetapi belum mengakomodir budaya melayu pada madrasahnyha sehingga perlu di upayakan agar budaya melayu masuk dalam kurikulum pendidikan pada semua jenjang pendidikan sehingga bisa diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan kebudayaan di Provinsi Riau pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan beraklaq mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budayasecara terus menerus.

Untuk menjadikan *Riau of Malay Homeland* dan mewujudkan Visi Riau 2025 yaitu “*Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025*” perlu upaya untuk menumbuh kembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019. Oleh

karena itu, untuk mengembangkan budaya Melayu Riau, perlu memperhatikan permasalahan, isu strategis untuk melaksanakan program Pengembangan Budaya Melayu Riau.

Jumlah pengunjung ke museum selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -11,18% pertahun. Menurunnya daya minat masyarakat dalam mengunjungi museum disebabkan oleh kurang tertariknya masyarakat terhadap benda-benda peninggalan sejarah yang tidak ada penambahan atau pembaharuan sehingga diperlukan usaha bagi Pemerintah Daerah untuk menambah dan melakukan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dalam mengunjungi museum. Sedangkan jumlah pertgelaran seni di taman budaya mengalami peningkatan sebesar 22,92% pertahun yang merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian seni budaya seperti yang terlihat pada Tabel 2.120 dibawah ini.

Tabel 2.120:
Jumlah Pengunjung ke Museum dan dan Pertgelaran Seni di Taman Budaya

No	Jenis PMKS	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah kunjungan ke Museum	35,142	36,199	33,798	29,808	21,081	-11.18
2	Jumlah pertgelaran seni ditaman budaya	8	6	10	15	15	22.92

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (2016)

2.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

Perpustakaan daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau pada tahun 2010 masing-masing satu perpustakaan kecuali Kabupaten Kuansing yang belum memiliki perpustakaan daerah dan tidak terjadi penambahan hingga pada tahun 2015. Jumlah pengunjung pada perpustakaan Soeman HS sebanyak 437.236 orang pada tahun 2011 dan mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2015 menjadi 334.318 orang. Penurunan jumlah pengunjung ke perpustakaan dapat disebabkan oleh semakin berkembangnya perpustakaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, ditambah lagi dengan akses internet yang semakin mudah sehingga untuk mendapatkan referensi buku, prosiding dan jurnal untuk bahan bacaan semakin mudah.

Jumlah Koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (per Judul) pada tahun 2011 sebanyak 80.090 judul dan mengalami penurunan menjadi sebanyak judul 54.235 pada tahun 2015. Jumlah Koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (Per Eks) pada Tahun 2011 sebanyak 657.049 eks mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 312.244 eks. Peningkatan jumlah judul dan ekslampar akan mempermudah bagi pengunjung untuk mendapatkan referensi yang sesuai dengan bidang keilmuan pengunjung. Jumlah pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman H.S tahun 2010-2015 Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121:
Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					Pertumb uhan /Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Pengunjung (orang)	437.236	442.896	342.896	303.630	334.318	(5,66)
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Riau (Per Judul)	80.090	83.935	84.428	86.825	54.235	(7,33)
3	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Riau (eks)	657.049	720.156	720.586	758.183	312.244	(10,98)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

2.3.3.Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Provinsi Riau yaitu bidang urusan pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta kelautan dan perikanan,.

2.3.3.1 Bidang Urusan Pariwisata

Provinsi Riau memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Namun demikian, daya tarik wisata yang ada di Provinsi Riau belum dikembangkan dengan baik, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga belum menjadi tujuan wisata dan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau.

Sementara itu jumlah objek wisata di Provinsi Riau (Tabel 2.122) menunjukkan penyebaran lokasi di setiap kabupaten Kota, dimana kabupaten yang memiliki objek wisata paling banyak adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan enam objek wisata dan yang paling sedikit adalah Dumai, Meranti dan Pelalawan.

Objek wisata alam dan wisata budaya yang ada di Provinsi Riau perlu program pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana yang baik, agar dapat memudahkan wisatawan domestik dan mancanegara untuk menuju dan menikmatinya objek wisata tersebut. Dengan terbangunnya sarana dan prasarana wisata tersebut secara signifikan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau. Selain daya tarik wisata alam dan budaya, Provinsi Riau juga berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi daerah tujuan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition*) dan wisata minat khusus, dengan memanfaatkan keunikan alam, sarana dan prasarana olah raga yang telah dibangun dalam rangka PON XVIII Tahun 2012, serta sarana MICE yang telah dimiliki pihak swasta.

Tabel 2.122:
Objek Wisata Yang Terdapat di Provinsi Riau, 2015

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jarak Pekanbaru ke Lokasi (KM)	Objek Wisata
1	Kuantan Singing	Kuantan Tengah	Kota Taluk Kuantan	133,95	1. Pacu Jalur
		Kuantan Mudik	Bukit Padusunan	150,90	2. Kawasan Wisata Kebun Nopi
		Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	163,27	3. Air Terjun Guruh Gemurai
		Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	169,90	4. Air Terjun Tujuh Tingkat
2	Indragiri Hulu	Batang Gangsal	Sanglap	280,39	1. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
		Rengat Barat	Kota Lama	192,42	2. Makam Raja-raja Indragiri Kota Lama
		Rengat	Kampung Dagang	206,84	3. Danau Raja
		Rengat Barat	Kota Lama	192,42	4. Danau Menduyan
3	Indragiri Hilir	Mandah	Pulau Cawan	Darat = 399,24 dan Laut = 371,35	1. Pantai Solop
		Kemuning	Batu Ampar	284,76	2. Bukit Berbunga
		Kuindra	Teluk Dalam, Sapat	32,67	3. Wisata Religi Syech Abdurrahman Siddiq
		Mandah	Bekawan	Darat = 420,12 dan Laut = 393,31	4. Wisata Sampan Leper dan Manongkah
4	Pelalawan	Teluk Meranti	Teluk Meranti	194,91	1. Wisata Bono
		Ukui	Lubuk Kembang Bunga	177,02	2. Taman Nasional Tesso Nillo
		Kerumutan	Kerumutan	179,27	3. Kawasan Lindung Kerumutan
5	Siak	Siak	Siak Sri Indra Pura	117,48	1. Istana Siak Sri Indrapura
		Mempura	Mempura	112,13	2. Desa Mempura
		Siak	Siak Sri Indra Pura	118,50	3. Event Siak Bermadah
		Siak	Siak Sri Indra Pura	115,00	4. Tour De Siak
6	Kampar	XIII Koto Kampar	Muara Takus	116,65	1. Candi Muara Takus
		Kuok	Merangin	79,45	2. PLTA Koto Panjang
		Kuok	Pulau Belimbing	68,60	3. Desa Pulau Belimbing
		Kampar Kiri Hulu	Gema & Tanjung Belit	99,47	4. Kawasan Wisata Kampar Kiri Hulu
7	Rokan Hulu	Tambusai	Dalu-dalu	214,00	1. Benteng Tujuh Lapis
		Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	223,00	2. Wisata Rohani di Binuang Sakti
		Rambah	Gunung Bongsu	190,70	3. Air Panas Hapanasan
		Bangun Purba	-	196,77	4. Air Terjun Aek Matua

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jarak Pekanbaru ke Lokasi (KM)	Objek Wisata
8	Bengkalis	Rokan IV Koto	-	170,00	5. Kawasan Hulu Sungai Rokan
		Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	204,35	6. Bukit Tungkuhih Nasi
		Rupat Utara	Tik Rhu	294,14	1. Kawasan Wisata Pulau Rupat
		Bantan	Selat Baru	218,20	2. Pantai Selat Baru
		Bengkalis	Meskom	215,66	3. Pantai Prapat Tunggal Meskom
		Bukit Batu	Sukajadi	211,30	4. Kawasan Biosfir Giam Siak Kecil
9	Rokan Hilir	Bangko	Bagan Tengah	243,50	1. Festival Bakar Tongkang
		Tanah Putih	Rantau Bais	174,47	2. Kawasan Wisata Rantau Bais
		Pasir Limau Kapas	-	257,46 darat + 85,6 Laut	3. Kawasan Wisata Pulau Jemur
10	Kep, Meranti	Rangsang Barat	Bokor	225,10	1. Event Wisata Bokor
		Rangsang Barat	Anak Setatah	211,26	2. Kawasan Mangrove
		Tebing Tinggi Barat	Lalang Tanjung	226,3	3. Kawasan Wisata Tasik
11	Pekanbaru	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	2,30	1. Kawasan Pekanbaru <i>Water Front City</i>
		Bukit Raya	Simpang Tiga	7,60	2. Kawasan Bandar Serai
		Rumbai Pesisir	Lembah Sari	10,80	3. Danau Bandar Kayangan
		Marpoyan Damai	Maharatu	10,46	4. Kawasan Agro Wisata Marpoyan
		Rumbai	Muara Fajar	22,87	5. Kawasan Wisata Tahura SSH
12	Dumai	Medang Kampai	Teluk Makmur	203,92	1. Pantai Teluk Makmur
		Dumai Barat	Purnama	203,97	2. Kawasan Mangrove
		Medang Kampai	Bukit Batrem	191,66	3. Danau Bunga Tujuh

Provinsi Riau memiliki potensi objek-objek pariwisata yang banyak sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.122. Dari potensi objek-objek wisata yang ada, hanya beberapa objek wisata yang mulai dikembangkan seperti (1) Wisata Fenomena Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan, (2) Candi Muara Takus yang terletak d Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, (3) Benteng Tujuh Lapis dan sumber air panas di Kabupaten Rokan Hulu, (4) Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, (5) Festival Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, (6) Danau Buatan di Kota Pekanbaru dan (7) Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Sebagian besar objek wisata belum dikembangkan dan belum menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara, Kondisi ini menjadi pariwisata belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau. Lokasi dan Jarak Objek wisata di Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.97
Peta Lokasi Objek Wisata di Provinsi, 2015

Apabila objek-objek wisata alam, sejarah, budaya dan lainnya yang ada di Provinsi Riau dikembangkan dan didukung dengan

sarana/prasarana serta pengembangan industri kreatif berupa cendera mata spesifik Provinsi Riau akan dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara, Akomodasi hotel di Provinsi Riau tersedia dengan kuantitas dan kualitas yang semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.123 akan terisi optimal. Apabila industri pariwisata Provinsi Riau dapat dikembangkan secara optimal, diyakini memberikan multiplier efek yang besar dan kontribusinya akan signifikan dalam perekonomian di Provinsi Riau.

Tabel 2.123:
Jumlah Objek Wisata
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten dan Kota	Objek Wisata								
	Alam	Sejarah	Budaya	Religi	Bahari	Tirta	Rekreasi	Minat Khusus	Jumlah
Kuantan Singingi	14	6	4	2	0	12	0	3	41
Indragiri Hulu	15	9	2	0	0	3	0	0	29
Indragiri Hilir	10	10	5	4	5	2	1	0	37
Pelalawan	2	3	1	1	0	1	0	2	10
Siak	4	19	0	2	0	2	0	1	28
Kampar	5	5	3	4	0	5	3	3	28
Rokan Hulu	10	4	0	1	0	2	0	0	17
Bengkalis	1	3	3	0	3	5	0	0	15
Rokan Hilir	5	9	0	1	1	0	1	2	19
Kep. Meranti	2	-	0	0	0	0	0	4	6
Pekanbaru	1	2	2	2	2	1	4	7	21
Dumai	6	3	0	0	0	1	1	3	14
Provinsi Riau	75	73	20	17	11	34	10	25	265

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

Di Riau baru terdapat beberapa Festival Budaya Melayu yang dilaksanakan secara konsisten seperti Festival Pacu Jalur di Taluk Kuantan dan Festival Siak Bermadah di Siak Sri Indrapura. Oleh karena itu, perlu diadakan beberapa festival budaya Melayu, baik di Pekanbaru maupun ibukota kabupaten/kota lainnya yang dapat dijadikan objek wisata budaya baru dan dapat meningkatkan apresiasi seni budaya masyarakat Riau dan bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sarana prasarana pada objek wisata harus juga didukung dengan pengembangan pada daerah yang menjadi pintu masuk utama para wisatawan seperti Pekanbaru, Dumai, Bengkalis dan Selat Panjang serta Indragiri Hilir.

Berkenaan dengan hal di atas, pengembangan industri pariwisata perlu menjadi prioritas termasuk pengembangan industri kreatif yang mendukung industri pariwisata sudah harus menjadi isu strategis pembangunan Provinsi Riau dalam RPJMD 2014 – 2019. Hal ini penting dilakukan agar ketergantungan agar sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Provinsi Riau yang sangat tergantung dari migas harus segera dicarikan solusi alternatif penggantinya yaitu dari sumber lain yang tidak habis seperti industri pariwisata.

Tabel 2.124:
Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau menurut
Pintu Masuk Utama Provinsi RiauTahun 2011-2015

Pintu Masuk	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Dumai	15.632	16.147	12.370	14.739	13.100	-3,02
2. Pekanbaru	25.227	25.065	18.986	25.757	27.810	4,68
3. Bengkalis	5.640	6.108	5.954	7.162	7.301	7,00
4. Selat Panjang	1.378	1.499	1.274	276	6.226	517,81
Jumlah	47.877	48.819	38.584	47.934	54.437	4,70

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

Jumlah tamu asing atau wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau pada periode tahun 2011-2015 sebanyak 54.437 orang meningkat sebanyak 4,70% per tahun. Tamu asing tersebut datang ke Provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 51,09% atau 27.810 orang, diikuti oleh kota Dumai 24,04% atau 13.100 orang, kota Bengkalis 13,41%. Jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Riau melalui kota utama setiap bulannya pada tahun 2015 dapat dilihat Tabel 2.124. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah tamu asing yang datang ke Provinsi Riau melalui pintu masuk utama cenderung meningkat meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2013.

Tamu asing tersebut datang ke Provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 51,09% atau sebanyak 27.810 orang. Sebagian besar tamu asing, yakni 80,94% berasal dari negara-negara ASEAN dan 19,06% berasal dari negara lain. Sementara itu dari empat pintu wisatawan dimana distribusi pintu masuk wisatan asing paling sedikit melalui Selat Panjang hanya sebanyak 6.226 orang atau 11,44%.

Jika jumlah wisatawan asing yang masuk ke Provinsi Riau setiap tahun menurut bulan maka kedatangan tamu asing tertinggi terjadi

pada bulan Juli sebesar 5,20% atau sebanyak 6.247 orang. Kondisi ini dapat dimaklumi bahwa pada bulan tersebut merupakan bulan liburan sekolah secara umum. Oleh karena itu perlu upaya antisipasi dalam pelayanan tamu terutama di pintu-pintu masuk tamu asing tersebut. Jumlah tamu asing yang masuk melalui empat pintu utama, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125:
Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau Per Bulan
Menurut Pintu Masuk Utama Provinsi Riau Tahun 2015

Bulan	Lokasi Pintu Masuk Wisatawan					
	Dumai	Pekanbaru	Bengkalis	Selat Panjang	Jumlah	Distribusi
Jan	772	2.606	531	-	3.909	7,18
Feb	1.016	2.234	540	-	3.790	6,96
Mar	844	2.300	427	-	3.571	6,56
Apr	658	2.312	510	-	3.480	6,39
May	796	2.764	491	-	4.051	7,44
Jun	962	2.152	625	-	3.739	6,87
Jul	2.289	2.934	1.024	-	6.247	11,48
Aug	1.072	2.876	621	-	4.569	8,39
Sep	869	2.118	724	-	3.711	6,82
Oct	1.081	591	583	-	2.255	4,14
Nov	1.082	2.445	646	-	4.173	7,67
Dec	1.659	2.478	579	-	4.716	8,66
Jumlah	13.100	27.810	7.301	6.226	54.437	100
Distribusi (%)	24,06	51,09	13,41	11,44	100.00	-

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016

Jika dilihat dari asal negara para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Riau, sebagian besar wisatawan tersebut yakni 76,51% berasal dari negara-negara ASEAN dan sisanya 23,49% berasal dari negara lain seperti Asia, Eropa, Amerika, Oceania dan Afrika. Namun selama periode 2011-2015 jumlah kunjungan wisatan Amerika dan Eropa mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,51% dan 5,82% per tahun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Berdasarkan gambaran diatas, Provinsi Riau mempunyai peluang besar untuk menarik para wisatawan asing terutama yang berasal dari negara tetangga (ASEAN) karena Riau diuntungkan dari aspek letak geografis dan budaya yang tidak berbeda secara mencolok karena satu rumpun dengan negara tetangga. Peluang tersebut dapat diraih dengan cara meningkatkan sarana prasarana, keamanan dan rasa nyaman

terutama sekali pada objek wisata dan kota-kota yang menjadi pintu masuk utama wisatawan. Selain itu, tipologi ekosistem objek wisata harus tetap dijaga kealamiahannya sehingga wisata studi dan penelitian bisa berkembang disamping rekreasi dan bisnis.

Tabel 2.126:
Tamu Asing yang Datang ke Provinsi Riau menurut Kebangsaan
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Pintu Masuk	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Asean	38.917	38.891	31.074	38.797	41.650	3,01
2. Asia (Non ASEAN)	4.117	4.269	4.785	6.608	10.589	28,53
3. Eropa	1.999	3.171	1.606	1.464	1.117	-5,82
4. Amerika	2.378	1.783	698	644	693	-21,50
5. Oceania	380	585	354	339	312	0,56
6. Afrika	86	120	67	82	76	2,61
Jumlah	47.877	48.819	38.584	47.934	54.437	4,70

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016

Jumlah akomodasi hotel dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 350 unit pada tahun 2011 menjadi 411 unit pada tahun 2015 atau naik sebesar 4,14% per tahun yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sedangkan jumlah kamar meningkat dari 10.763 pada tahun 2011 menjadi 13.604 pada tahun 2015 atau naik 6,11% per tahun dan tempat tidur tersedia sebanyak 16.841 pada tahun 2011 kemudian meningkat sebanyak 21.618 tempat tidur atau naik 6,53% per tahun. Kondisi memberikan gambaran terjadinya peningkatan skala usaha bidang perhotelan karena persentase peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur yang lebih tinggi di bandingkan jumlah hotel. Peningkatan skala ini memberikan indikasi adanya peningkatan kemampuan investor dan daya beli masyarakat terhadap jasa perhotelan dan peningkatan lapangan pekerjaan pada sektor jasa perhotelan.

Tabel 2.127:
Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Yang tersedia
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Fasilitas Hotel	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Akomodasi	350	355	377	407	411	4,14
Kamar	10.763	11.480	12.925	13.369	13.604	6,11
Tempat Tidur	16.841	18.025	20.418	21.193	21.618	6,53

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016

Jumlah hotel terbanyak di kota Pekanbaru, tersedia 6.082 kamar (44,71%) dan 9.142 tempat tidur (42,29%) dengan 105 unit hotel atau sekitar 25,55%. Sedangkan jumlah akomodasi hotel yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kampar hanya 2,68% atau sebanyak 11 unit hotel, sedangkan jumlah kamar hotel yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dan jumlah tempat tidur paling sedikit terdapat di Kabupaten Kep. Meranti. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa skala hotel di Kabupaten Kuantan Singingi lebih kecil dibandingkan dengan Kampar dan skala kamar di Kabupaten Kep. Meranti lebih kecil daripada di Kabupaten Kuantan Singingi. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128:
Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Yang tersedia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Fasilitas Hotel					
	Akomodasi (Unit)	Distribusi (%)	Kamar (Unit)	Distribusi (%)	Tempat Tidur (Unit)	Distribusi (%)
Kuantan Singingi	19	4,62	340	2,50	727	3,36
Indragiri Hulu	35	8,52	642	4,72	1.200	5,55
Indragiri Hilir	64	15,57	1.002	7,37	1.553	7,18
Pelalawan	20	4,87	488	3,59	700	3,24
Siak	20	4,87	656	4,82	1.147	5,31
Kampar	11	2,68	410	3,01	680	3,15
Rokan Hulu	17	4,14	553	4,06	1.074	4,97
Bengkalis	46	11,19	1.277	9,39	2.058	9,52
Rokan Hilir	25	6,08	850	6,25	1.278	5,91
Kep. Meranti	22	5,35	372	2,73	554	2,56
Pekanbaru	105	25,55	6.082	44,71	9.142	42,29
Dumai	27	6,57	932	6,85	1.505	6,96
Provinsi Riau	411	100,00	13.604	100,00	21.618	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016

2.3.3.2 Bidang Urusan Pertanian

a. Tanaman Pangan

Perkembangan tanaman tanaman pangan dan palawija di Provinsi Riau dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan pertumbuhan luas panen dan produksi rata-rata masing-masing sebesar 7,21% pertahun dan 5,17% per tahun. Selama periode tersebut pertumbuhan luas panen padi sawah turun 8,23% dari 123.038 hektar tahun 2011 menjadi 86.218 hektar pada tahun 2015 dan produksi turun sebanyak 7-75% per tahun dari 481.911 ton pada tahun 2011 menjadi 345.411 ton pada tahun 2015. Komoditas yang mengalami penurunan luas

panen paling banyak adalah kedelai dari 6.425 hektar pada tahun 2011 turun menjadi 1.516 hektar pada tahun 2015 atau turun sebanyak 27,73% per tahun dengan penurunan produksi dari 7.100 ton pada tahun 2011 menjadi 2.145 ton pada tahun 2015 atau turun sebanyak 22,69% per tahun.

Tabel 2.129:
Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Di Provinsi Riau, 2011-2015

Komoditas	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Luas Panen (ha)						
1. Padi Sawah	123.038	117.649	97.796	85.062	86.218	-8,23
2. Padi Ladang	22.204	26.366	20.722	20.975	21.328	0,06
3. Jagung	14.139	13.284	11.748	12.057	12.425	-2,98
4. Ubi Kayu	4.144	3.642	3.863	4.038	3.578	-3,23
5. Kacang Tanah	1.819	1.732	1.325	1.194	1.081	-11,93
6. Ubi Jalar	1.203	1.137	1.028	981	793	-9,70
7. Kacang Kedelai	6.425	3.686	1.949	2.030	1.516	-27,73
8. Kacang Hijau	938	865	585	598	576	-10,40
Jumlah	173.910	168.361	139.016	126.935	127.515	-7,21
Produksi (ton)						
1. Padi Sawah	481.911	453.294	387.849	337.233	345.441	-7,75
2. Padi Ladang	53.877	58.858	46.295	48.242	48.476	-1,85
3. Jagung	33.197	31.433	28.052	28.651	30.870	-1,55
4. Ubi Kayu	79.480	88.577	103.070	117.287	103.599	7,48
5. Kacang Tanah	1.692	1.622	1.243	1.134	1.036	-11,23
6. Ubi Jalar	9.912	9.424	8.462	8.038	6.562	-9,63
7. Kacang Kedelai	7.100	4.182	2.211	2.332	2.145	-22,69
8. Kacang Hijau	995	920	619	645	598	-10,84
Jumlah	668.164	648.310	577.801	543.562	538.727	-5,17
Produktivitas (ton/ha)						
1. Padi Sawah	3,92	3,85	3,97	3,96	4,01	0,56
2. Padi Ladang	2,43	2,23	2,23	2,3	2,27	-1,57
3. Jagung	2,35	2,37	2,39	2,38	2,48	1,42
4. Ubi Kayu	19,18	24,32	26,68	29,05	28,95	11,26
5. Kacang Tanah	0,93	0,94	0,94	0,95	0,96	0,76
6. Ubi Jalar	8,24	8,29	8,23	8,19	8,27	0,11
7. Kacang Kedelai	1,11	1,13	1,13	1,15	1,41	6,65
8. Kacang Hijau	1,06	1,06	1,06	1,08	1,04	-0,50

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Sementara peningkatan produktivitas padi hanya naik 0,56% per tahun dari 3,92 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 4,01 ton/ha pada tahun 2015. Lambatnya perkembangan peningkatan produktivitas tersebut karena rendahnya kemajuan dan aplikasi teknologi pada komoditas tersebut. Terdapat dua komoditas yang mengalami

penurunan produktivitas yaitu padi ladang dan kacang hijau. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat padaTable 2.140 berikut.

Tabel 2.130:
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2015

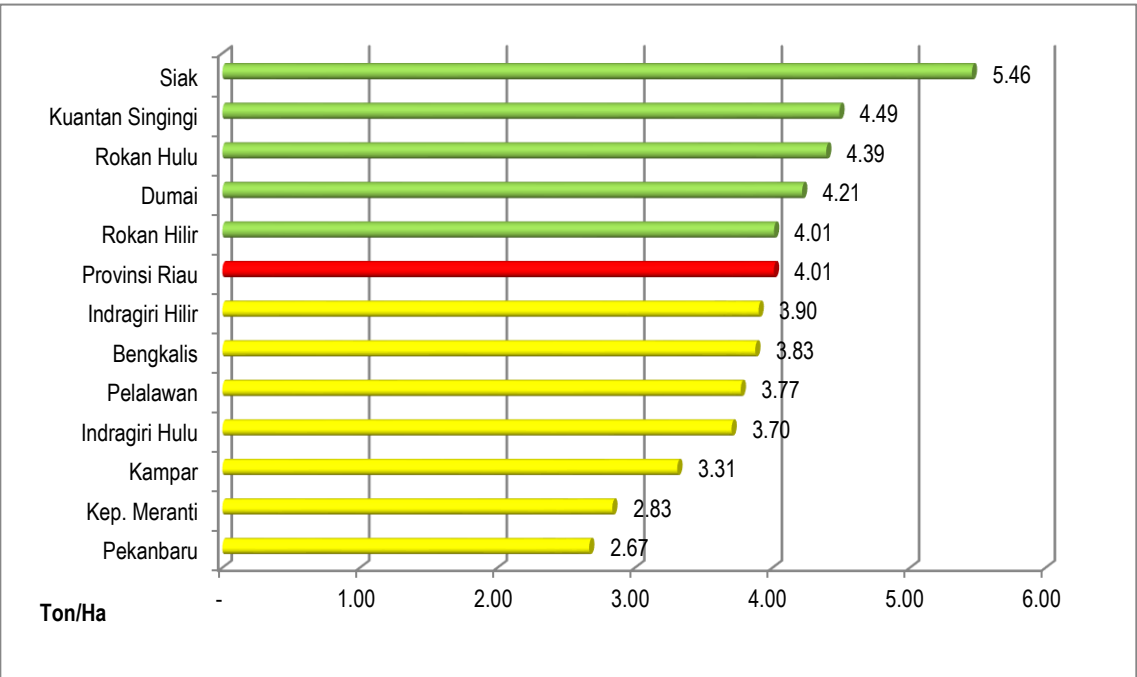
Kabupaten Kota	Padi				
	Luas Panen (ha)	Kontribusi (%)	Produksi Gabah (ton)	Kontribusi (%)	Produktivitas (Ton/ha)
Kuantan Singingi	11.175	12,96	50.125	14,51	4,49
Indragiri Hulu	2.495	2,89	9.236	2,67	3,70
Indragiri Hilir	28.553	33,12	111.315	32,22	3,90
Pelalawan	4.764	5,53	17.955	5,20	3,77
Siak	5.554	6,44	30.306	8,77	5,46
Kampar	7.038	8,16	23.277	6,74	3,31
Rokan Hulu	4.263	4,94	18.715	5,42	4,39
Bengkalis	6.014	6,98	23.031	6,67	3,83
Rokan Hilir	12.481	14,48	50.056	14,49	4,01
Kep. Meranti	3.568	4,14	10.115	2,93	2,83
Pekanbaru	6	0,01	16	0,00	2,67
Dumai	307	0,36	1.294	0,37	4,21
Provinsi Riau	86.218	100,00	345.441	100,00	4,01

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Tingginya penurunan luas panen dan produksi tanaman padi dan palawija selama periode tersebut, maka diperlukan upaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan melalui program pengembangan komoditas tersebut secara intensif dengan meningkatkan kapasitas penggunaan lahan. Peningkatan kapasitas penggunaan lahan tentunya harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur (energi, pengairan dan teknologi input baik peralatan, benih unggul dan pupuk dan perbaikan manajemen usahatani) pertanian yang dapat mendukung berjalannya program tersebut.

Walaupun terjadi penurunan luas panen dan produksi, tetapi produktivitas komoditas tanaman pangan dan palawija mengalami peningkatan, kecuali pada padi ladang dan kacang hijau yang mengalami penurunan produktivitas sebanyak 1,57% per tahun dan 0,50% per tahun selebihnya mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan kecuali pada ubi kayu. Sementara itu, khusus tanaman padi menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi di Provinsi

Riau pada tahun 2015 baru mencapai 4.01 ton/ha dan masih tergolong rendah.



Gambar 2.98
Produktivitas Padi Sawah Per Kabupaten Kota
Di Provinsi Riau, 2015

Rendahnya produktivitas tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya produktivitas di 7 kabupaten kota, dimana produktivitasnya hanya berkisar antara 2,67-3,90 ton/ha dan dibawah rata-rata provinsi. Sedangkan kabupaten yang mampu mencapai produktivitas yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi adalah Siak, Kuansing, Rokan Hulu, Dumai dan Rokan Hilir dengan kisaran 4,01-5,46 ton/ha. Untuk itu diperlukan program peningkatan produktivitas tanaman padi melalui peningkatan penggunaan teknologi input berupa benih unggul, pupuk yang cepat direspon oleh tanaman dan pemupukan yang berimbang atau kombinasi optimal dalam penggunaan teknologi input, penggunaan peralatan tepat guna dan peningkatan infrastruktur pengairan serta perbaikan manajemen usaha tani. Capaian produktivitas tanaman padi per kabupaten kota tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.98.

Berdasarkan data produksi padi konversi ke beras menunjukkan bahwa Provinsi Riau mengalami defisit sebanyak 63,36%. Wilayah yang mengalami defisit paling rendah adalah Kabupaten Indargiri Hilir sebesar 7,03% dan Kuansing sebesar 7,14%. Defisit tersebut sebenarnya dapat diatasi jika insitas penggunaan lahan dan teknologi

input dengan kobinasi terbaik dapat dilakukan maka defisit tersebut dapat diminimalisir. Defisit kebutuhan beras per kabupaten Kota dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131:
Kebutuhan dan Kemampuan Beras Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Riau, 2015

Kecamatan	Kelebihan dan Kekurangan					Keterangan
	Jumlah Penduduk Jiwa	Kebutuhan Beras Ton/Tahun	Kemampuan Produksi Ton/Tahun	Kelebihan/ Kekurangan		
				Beras Ton/Tahun	(%)	
Kuantan Singingi	314.276	35.100	32.594	-2.506	-7,14	Defisit
Indragiri Hulu	409.431	45.302	8.334	-36.968	-81,60	Defisit
Indragiri Hilir	703.734	78.491	72.972	-5.519	-7,03	Defisit
Pelalawan	396.990	42.626	11.723	-30.903	-72,50	Defisit
Siak	440.841	48.420	19.699	-28.721	-59,32	Defisit
Kampar	793.005	87.368	18.873	-68.495	-78,40	Defisit
Rokan Hulu	592.278	64.249	32.365	-31.884	-49,63	Defisit
Bengkalis	543.987	60.584	17.517	-43.067	-71,09	Defisit
Rokan Hilir	644.680	70.877	32.536	-38.341	-54,09	Defisit
Kep. Meranti	181.095	20.328	6.575	-13.753	-67,66	Defisit
Pekanbaru	1.038.118	114.296	10	-114.286	-99,99	Defisit
Dumai	285.967	31.652	3.024	-28.628	-90,45	Defisit
Jumlah	6.344.402	699.294	256.222	-443.072	-63,36	Defisit

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Program peningkatan produktivitas tanaman padi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan beras, mengingat setiap tahunnya terjadi penurunan luas tanam, panen dan produksi. Sementara kebutuhan pangan beras senantiasa mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa program peningkatan produksi padi melalui peningkatan intensitas penggunaan lahan dan peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi wilayah kabupaten kota yang memiliki lahan sawah permanen dan tersedia infrastruktur pengairan yang cukup memadai. Ketersediaan data dan informasi tersebut sangat membantu dalam peningkatan penggunaan lahan yang lebih intensif (2-3 tanam/tahun). Berikut Tabel 2.132 tentang gambaran potensi luas lahan per kabupaten kota yang dapat ditanami padi sekali setahun, 2-3 setahun dalam rangka peningkatan produksi dan kapasitas penggunaan lahan di Provinsi Riau.

Tabel 2.132:
Potensi Peningkatan Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Riau, 2015

Kecamatan	Potensi Penggunaan Lahan Pertanian (Lahan Sawah)				
	Tanam (Ha)		Tidak Ditanami Padi (Ha)	Sementara Tidak Diusahakan (Ha)	Total Lahan (Ha)
	2-3 Kali Per tahun	1 Kali Per tahun			
Kuantan Singingi	365	6.002	10.931	-	17.298
Indragiri Hulu	687	1.760	948	-	3.395
Indragiri Hilir	2.381	20.629	3.753	-	26.763
Pelalawan	139	6.408	846	-	7.393
Siak	2.968	1.646	1.606	-	6.220
Kampar	2.024	2.915	1.906	-	6.845
Rokan Hulu	1.621	561	815	-	2.997
Bengkalis	74	5.564	1.152	-	6.795
Rokan Hilir	1.295	11.418	7.534,9	-	20.247,9
Kep. Meranti	-	3.147	1.094	-	4.241
Pekanbaru	7	3	5	-	15
Dumai	46	250	35	-	331
Jumlah	11.607	60.303	30.625,9	-	102.535,9

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
 (Statistik Pertanian 2015)

Tanaman pangan lain yang juga dibudidayakan di Provinsi Riau adalah tanaman sayur-sayuran. Berdasarkan data tahun 2011-2015, secara umum perkembangan luas panen komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan sebanyak 10,33% per tahun dari 21.972 hektar pada tahun 2011 menjadi 13.584 pada tahun 2015.

Tabel 2.133:
Perkembangan Luas Panen Sayur-Sayuran Di Provinsi Riau, 2011-2015

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Luas Panen (ha)						
1. Cabe	3.523	3.488	3.105	3.222	3.088	(3,09)
2. Ketimun	2.316	2.255	1.913	1.969	1.675	(7,45)
3. Terong	1.709	1.681	1.483	1.553	1.321	(5,91)
4. Kacang Panjang	3.098	2.878	2.546	2.584	2.194	(8,06)
5. Bayam	2.401	2.592	2.447	2.507	2.226	(1,60)
6. Kangkung	2.617	2.768	2.531	2.534	2.361	(2,38)
7. Petsai dan Sawi	442	614	597	553	573	8,10
8. Labu	68	101	106	62	29	(10,31)
9. Sayuran Lainnya	5.798	5.252	138	102	117	(29,54)
Jumlah	21.972	21.629	14.866	15.086	13.584	(10,33)
Produksi (ton)						
1. Cabe	15.832	15.906	15.509	15.608	11.956	(6,20)
2. Ketimun	15.667	13.545	20.726	19.332	14.175	1,52
3. Terong	14.424	13.861	17.257	14.883	12.102	(2,96)
4. Kacang Panjang	12.827	11.573	12.447	12.787	8.795	(7,68)
5. Bayam	6.463	7.804	8.381	7.984	7.258	3,58
6. Kangkung	10.155	12.556	13.955	13.884	9.587	0,83
7. Petsai dan Sawi	2.424	3.266	3.484	3.190	1.540	(25,29)
8. Labu	333	251	515	522	53	(1,98)
9. Sayuran Lainnya	3.198	4.747	8.973	577	1.017	30,04
Jumlah	81.323	83.509	101.247	88.767	66.483	(3,38)
Produktivitas (ton/ha)						
1. Cabe	4,49	4,56	4,99	4,84	3,87	(3,02)
2. Ketimun	6,76	6,01	10,83	9,82	8,46	11,50
3. Terong	8,44	8,25	11,64	9,58	9,16	4,19
4. Kacang Panjang	4,14	4,02	4,89	4,95	4,01	0,23
5. Bayam	2,69	3,01	3,43	3,18	3,26	5,24
6. Kangkung	3,88	4,54	5,51	5,48	4,06	2,98
7. Petsai dan Sawi	5,48	5,32	5,84	5,77	0,27	(34,20)
8. Labu	4,90	2,49	4,86	8,42	1,83	10,31
9. Sayuran Lainnya	0,55	0,90	65,02	5,66	8,69	1780,03

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 dan Data Olahan

Sedangkan perkembangan produksi komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan sebanyak 3,38% per tahun atau turun dari 81.323 ton pada tahun 2011 menjadi 66.483 ton pada tahun 2015. Sedangkan produktivitas komoditas sayuran mengalami peningkatan diatas 1%, kecuali pada sayuran petsai dan sawi produktivitasnya mengalami penurunan sebanyak 34,20% serta cabe produktivitasnya mengalami penurunan sebanyak 3,02%.

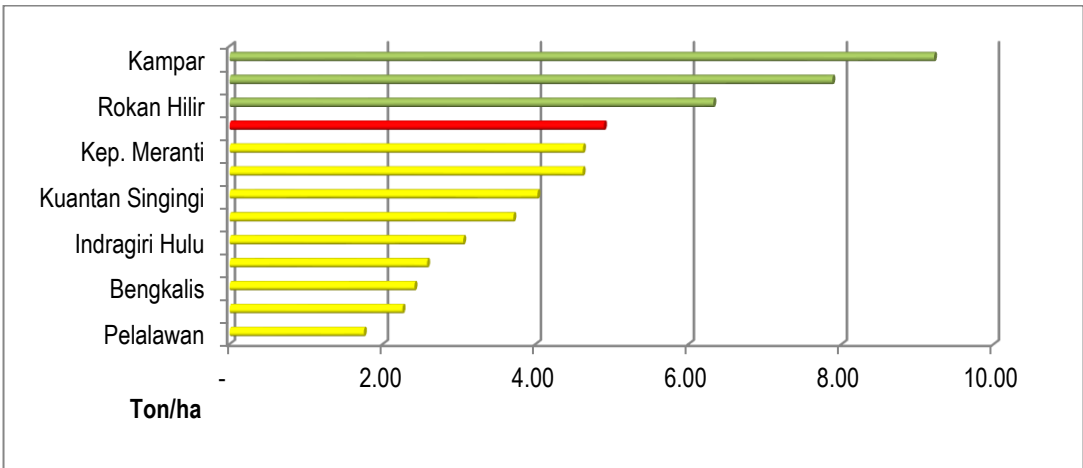
Berikut Tabel 2.134 disajikan perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas komoditas sayur-sayuran di Provinsi Riau tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, maka perlu program pengembangan sayur-sayuran agar produksi sayur-sayuran dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Riau. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melaksanakan suatu sistem budidaya dengan model agribisnis terpadu (*integrated agribusiness*) di mana kegiatan budidaya yang pada umumnya dilaksanakan oleh para petani kecil terpadu dengan kegiatan proses penanganan hasil dan distribusi yang dilaksanakan secara bersama terintegrasi.

Tabel 2.134:
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur- Sayuran
Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015

Kabupaten Kota	Sayur-Sayuran				
	Luas Panen (ha)	Kontribusi (%)	Produksi (ton)	Kontribusi (%)	Produktivitas (Ton/ha)
Kuantan Singingi	649	4,78	2.612	3,93	4,02
Indragiri Hulu	1.347	9,92	4.115	6,19	3,05
Indragiri Hilir	1.181	8,69	2.670	4,02	2,26
Pelalawan	761	5,60	1.336	2,01	1,76
Siak	1.191	8,77	9.385	14,12	7,88
Kampar	2.492	18,35	22.967	34,55	9,22
Rokan Hulu	1.492	10,98	3.853	5,80	2,58
Bengkalis	898	6,61	2.171	3,27	2,42
Rokan Hilir	815	6,00	5.154	7,75	6,32
Kep. Meranti	639	4,70	2.952	4,44	4,62
Pekanbaru	1.553	11,43	7.168	10,78	4,62
Dumai	566	4,17	2.100	3,16	3,71
Provinsi Riau	13.584	100,00	66.483	100,00	4,89

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.134 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi pada luas panen sayur-sayuran, dimana Kabupaten Kampar mendominasi dengan 18,35 % dari luas lahan sayuran di Provinsi Riau atau seluas 2.492 hektar. Sedangkan luas lahan sayuran yang paling sempit terdapat di Kota Dumai hanya 4,17% atau seluas 566 hektar. Sedangkan produktivitas tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 9,22 ton/hektar dan produktivitas terendah di Kabupaten Pelalawan hanya 1,76 ton/hektar. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.99.



Gambar 2.99
Produktivitas Sayuran Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau, 2015

Tingkat konsumsi sayuran masyarakat Riau cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, dan orang semakin perhatian terhadap makanan yang sehat (*healthy food*) dan semakin perhatian terhadap lingkungan dengan memilih sayuran organik (*Back to Nature*).

Terjadinya penurunan luas panen dan produksi tanaman sayur-sayuran selama ini diperlukan upaya program pengembangan komoditas tersebut secara intensif dengan meningkatkan kapasitas penggunaan teknologi terkini misalnya dengan model fertigasi dan hidroponik. Untuk menjalankan program tersebut maka perlu penyediaan infrastruktur (lokasi yang permanen, energi, pengairan, teknologi input peralatan, benih unggul dan pupuk dan perbaikan manajemen usahatani) pertanian yang dapat mensukseskan berjalannya program tersebut.

b. Hortikultura

Pengembangan tanaman buah-buahan diarahkan pada lahan yang memiliki kemiringan di bawah 8%. Lahan untuk budidaya buah buahan akan mengalami perlakuan pengolahan lahan yang cukup intensif sehingga akan mudah terjadi erosi apabila dilakukan di lahan yang berkemiringan curam. Berikut gambaran perkembangan jumlah pohon dan rumpun dan produksi tanaman buah-buahan untuk 10 komoditas Provinsi Riau tahun 2011-2015. Pengembangan buah-buahan di Provinsi Riau memiliki potensi, namun tetap terdapat daerah yang sangat potensial untuk pengembangan buah buahan agar berproduksi secara optimal. Dilihat dari kondisi saat ini perkembangan

luas tanam, produksi dan produktivitas komoditas buah buahan di Provinsi Riau khususnya masih sangat fluktuatif. Namum pertumbuhan jumlah pohon tanaman buah-buahan di Provinsi Riau dari 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan sebanyak 2,15% per tahun dari 24.459.368 pohon pada tahun 2011 menjadi 25.922.336 pohon pada tahun 2015.

Tabel 2.135:
Perkembangan Jumlah Pohon, Rumpun dan Produksi Buah Buahan
Provinsi Riau, 2011-2015

Komoditas	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pohon/Rumpun						
1. Pisang	945.647	703.379	753.543	740.667	633,107	(8.68)
2. Durian	146.232	180.385	171.229	144.328	180,989	6.99
3. Duku	26.367	53.232	43.229	42.428	29,828	12.89
4. Mangga	72.287	74.222	79.636	88.872	126,398	15.95
5. Jeruk	82.079	88.513	120.580	142.175	177,225	21.66
6. Rambutan	238.691	322.371	323.047	221.749	304,699	10.33
7. Pepaya	226.804	228.562	214.372	216.115	184,518	(4.81)
8. Nenas	22.279.868	20.608.349	22.714.807	27.195.997	23,696,176	2.39
9. Jambu	77.882	75.499	102.691	75.958	92,858	7.29
10. Buah Lainnya	363.511	363.366	454.218	396.325	496,538	9.38
Jumlah	24.459.368	22.697.878	24.977.352	29.264.614	25,922,336	2.15
Produksi (ton)						
1. Pisang	26.498	20.644	19.685	22.758	21,314	(4.37)
2. Durian	11.787	13.250	7.951	10.201	12,366	5.49
3. Duku	2.029	3.383	2.645	2.372	1,369	(1.92)
4. Mangga	6.005	7.337	6.210	9.785	10,248	17.28
5. Jeruk	4.586	5.057	5.195	7.249	10,243	23.46
6. Rambutan	10.381	9.223	7.604	9.839	9,963	0.49
7. Pepaya	7.391	12.965	19.517	7.379	7,038	14.78
8. Nenas	109.374	92.444	96.173	107.438	74,389	(7.62)
9. Jambu	4.215	3.783	3.882	3.407	4,523	3.22
10. Buah Lainnya	23.282	20.788	21.069	25.621	23,257	0.75
Jumlah	205.548	188.874	189.931	206.049	174,710	(3.57)

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 dan Data olahan

Sementara jika dilihat dari aspek produksi buah buahan di Provinsi Riau secara umum mengalami penurunan sebanyak 3,57% pertahun, dari 205.548 ton pada tahun 2011 menjadi 174.710 ton pada tahun 2015. Komoditas buah-buahan yang paling tinggi mengalami peningkatan produksi adalah jeruk sebanyak 23,46% per tahun atau

naik dari 4.586 ton pada tahun 2011 menjadi 5.057 ton pada tahun 2015.

Tabel 2.136:
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah Buahan
Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Riau, 2015

Kabupaten Kota	Buah Buahan				
	Pohon/ Rumpun	Kontribusi (%)	Produksi (ton)	Kontribusi (%)	Produktivitas (Kg/Pohon)
Kuantan Singingi	141,220	0.54	9,806	5.60	14.40
Indragiri Hulu	2,382,967	9.19	24,535	14.02	97.13
Indragiri Hilir	3,212,177	12.39	18,210	10.41	176.40
Pelalawan	93,542	0.36	3,210	1.83	29.14
Siak	5,475,756	21.12	13,448	7.68	407.18
Kampar	4,656,426	17.96	34,009	19.43	136.92
Rokan Hulu	237,187	0.91	12,883	7.36	18.41
Bengkalis	597,008	2.30	7,252	4.14	82.32
Rokan Hilir	222,521	0.86	5,952	3.40	37.39
Kep. Meranti	71,223	0.27	2,375	1.36	29.99
Pekanbaru	110,456	0.43	3,576	2.04	30.89
Dumai	8,722,579	33.65	39,740	22.71	219.49
Provinsi Riau	25,923,062	100.00	174,996	100.00	148.14

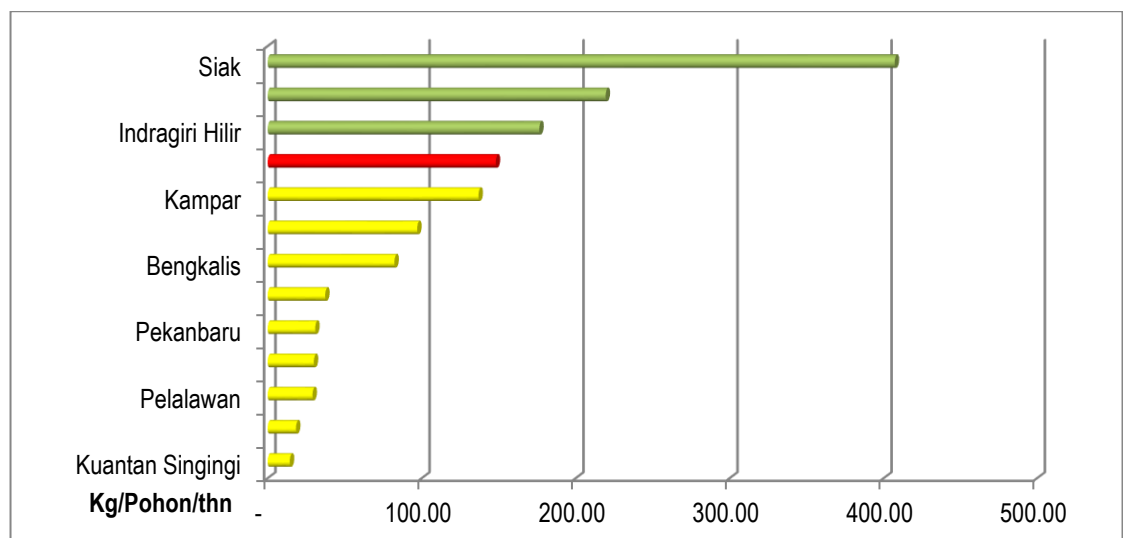
Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.136 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi pada jumlah pohon, Kota Dumai menyumbang 33,65% dari jumlah buah-buahan di Provinsi Riau. Sedangkan jumlah pohon paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 0,27% atau sebanyak 71.223 pohon.

Sedangkan jumlah produksi buah-buahan terbanyak terdapat di Kota Dumai yaitu 22,71% atau 39.740 ton dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebanyak 2.375 ton atau 1,36%. Sedangkan produktivitas buah-buahan tertinggi terdapat di Kabupaten Siak sebanyak 407,18 kg/pohon/tahun dan produktivitas terendah di Kabupaten Kuantan Singingi hanya 14,40 kg/pohon/tahun, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.100.

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi peningkatan produksi buah-buahan di beberapa wilayah melalui peningkatan produktivitas masih sangat memungkinkan jika usahatani tanaman buah-buahan dikelola secara efektif dan efisien serta menggunakan teknologi input berkualitas. Peningkatan produktivitas tanaman buah-buahan akan menambah jumlah produksi sehingga pemenuhan

kebutuhan buah-buahan lokal yang sebagian besar saat ini masih didatangkan dari daerah lain dapat terpenuhi secara mandiri.



Gambar 2.100
Produktivitas Buah-Buahan Per Kabupaten Kota
Di Provinsi Riau, 2015

c. Perkebunan

Dari 3.560.189 hektar luas tanaman komoditas perkebunan pada tahun 2015, merupakan akumulasi peningkatan sebanyak 1,15% sejak tahun 2011 atau dari 3.401.712 hektar. Komoditas utama yang mengalami peningkatan pertambahan luas tanaman adalah kelapa sawit dari 2.258.553 hektar tahun 2011 menjadi 2.424.545 hektar pada tahun 2015 atau tumbuh sebanyak 1,81% (lihat Gambar 2.101 warna merah jambu) kemudian di ikuti komoditas kakao, pinang, gambir dan sagu. Sedangkan luas tanaman perkebunan karet, kelapa, kakao, enau dan Lada mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebanyak 0,12%, 0,28%, 2,88%, 4,01 dan 17,19%. Peningkatan pertambahan luas lahan komoditas perkebunan tersebut diikuti oleh peningkatan produksi hasil perkebunan, dimana pada tahun 2011 produksi hasil komoditas perkebunan sebanyak 8.166.179 ton meningkat menjadi 9.021.447 ton pada tahun 2015 atau naik sebanyak 2,54%.

Komoditas yang menghasilkan produksi terbanyak adalah kelapa sawit dengan produksi sebanyak 7.047.221 ton pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 7.841.947 ton pada tahun 2015 atau sebanyak 2,71% per tahun diikuti oleh kelapa dan karet masing-masing sebanyak 421.465 ton dan ton pada tahun 2015. Sementara empat komoditas lainnya mengalami pertumbuhan produksi yang negatif yaitu kelapa,

pinang, kakao dan gambir serta lada. Produktivitas hasil perkebunan hanya kelapa sawit, karet, kopi, enau, lada dan sagu yang mengalami pertumbuhan positif selebihnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Jelasnya lihat Tabel 2.137.

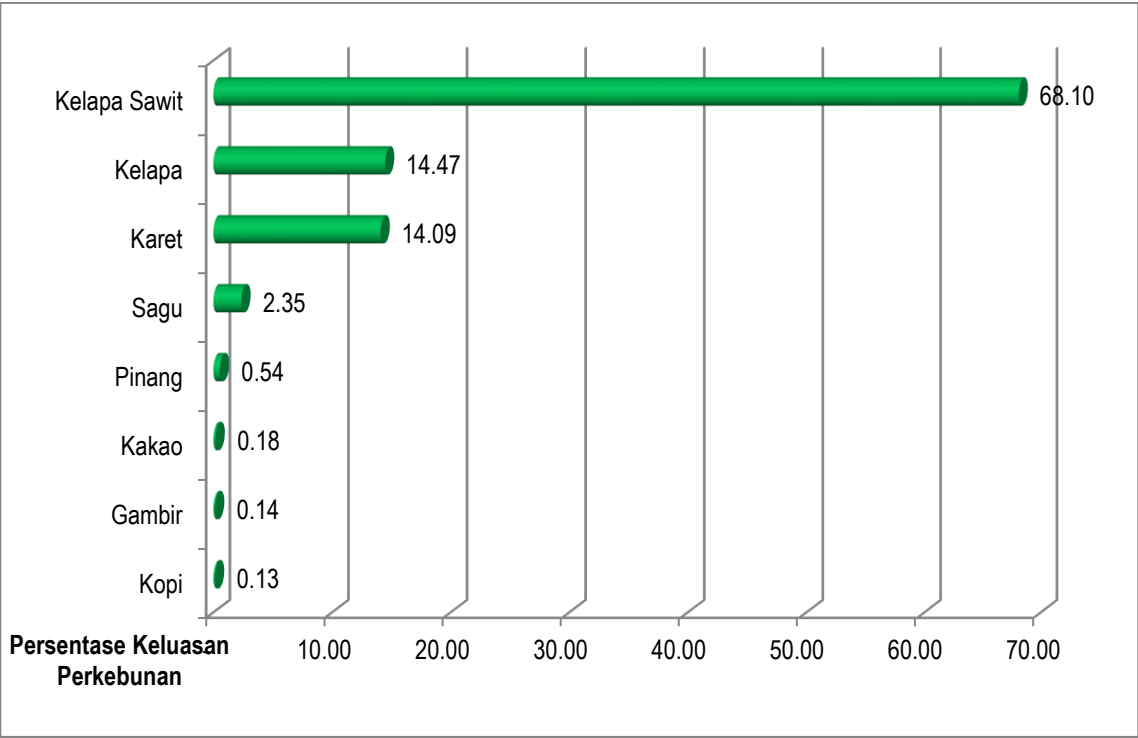
Pengurangan luas lahan, penurunan produksi dan produktivitas tanaman kelapa tidak terlepas dari terjadinya konversi komoditas dari tanaman kelapa ke tanaman kelapa sawit, diperparah dengan tanaman kelapa yang sudah tua serta trio tata air yang mengalami kerusakan.

Tabel 2.137:
Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas
Perkebunan Provinsi Riau, 2011-2015

Komoditas	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Luas Lahan (Ha)						
1. Kelapa Sawit	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411.820	2.424.545	1,81
2. Kelapa	521.038	521.792	520.260	516.895	515.168	(0,28)
3. Karet	504.139	500.851	505.264	502.906	501.788	(0,12)
4. Pinang	18.795	19.005	19.284	19.145	19.156	0,48
5. Kakao	7.215	7.401	6.179	6.368	6.327	(2,88)
6. Gambir	4.828	4.931	4.848	4.824	4.846	0,10
7. Kopi	4.725	4.862	5.415	5.713	4.640	0,25
8. Enau	29	35	29	22	23	(4,01)
9. Lada	12	13	7	6	5	(17,19)
10. Sagu	82.378	82.713	83.256	83.513	83.691	0,40
Jumlah	3.401.712	3.514.005	3.543.714	3.551.212	3.560.189	1,15
Produksi (Ton)						
1. Kelapa Sawit	7.047.221	7.343.498	7.570.854	7.761.293	7.841.947	2,71
2. Kelapa	481.087	473.221	427.080	421.654	421.465	(3,18)
3. Karet	333.069	350.476	354.257	367.261	374.901	3,01
4. Pinang	10.700	10.817	8.762	8.597	9.825	(1,38)
5. Kakao	3.544	3.505	1.552	1.437	1.641	(12,51)
6. Gambir	4.312	4.230	4.145	4.022	2.770	(9,50)
7. Kopi	1.913	2.520	2.603	2.465	2.843	11,26
8. Enau	11	19	22	22	22	22,13
9. Lada	3	1	1	1	1	(16,67)
10. Sagu	284319	281704	126145	340196	366.032	30,29
Jumlah	8.166.179	8.469.991	8.495.421	8.906.948	9.021.447	2,54
Produktivitas (Ton/ha)						
1. Kelapa Sawit	3,12	3,10	3,16	3,22	3,23	0,91
2. Kelapa	0,92	0,91	0,82	0,82	0,82	(2,90)
3. Karet	0,66	0,70	0,70	0,73	0,75	3,14
4. Pinang	0,57	0,57	0,45	0,45	0,51	(1,79)
5. Kakao	0,49	0,47	0,25	0,23	0,26	(11,44)
6. Gambir	0,89	0,86	0,85	0,83	0,57	(9,55)
7. Kopi	0,40	0,52	0,48	0,43	0,61	13,13
8. Enau	0,38	0,54	0,76	1,00	0,96	27,58
9. Lada	0,25	0,08	0,14	0,17	0,20	13,29
10. Sagu	3,45	3,41	1,52	4,07	4,37	29,85

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan.

Share keluasan lahan masing-masing komoditas perkebunan tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa dari 3.560.189 hektar luas perkebunan di Provinsi Riau, kelapa sawit mendominasi luas perkebunan sebanyak 69,57% atau seluas 2.424.545 hektar, kelapa 14,91% atau seluas 515.168 hektar dan karet 14,51% atau seluas 501.788 hektar. Sedangkan komoditas perkebunan lainnya kurang dari satu%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.101.



Gambar 2.101
Persentase keluasan Komoditas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2015

Luas, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet per kabupaten Kota di Provinsi Riau tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.138. Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit paling luas terdapat di Kabupaten Rokan hulu seluas 422.850 hektar (17,53%), sedangkan tanaman kelapa di kabupaten indragiri Hilir seluas 439.955 hektar (85,11%) dan tanaman karet terluas terdapat dikabupaten Kuantan Singingi seluas 145.388 hektar (28,91%).

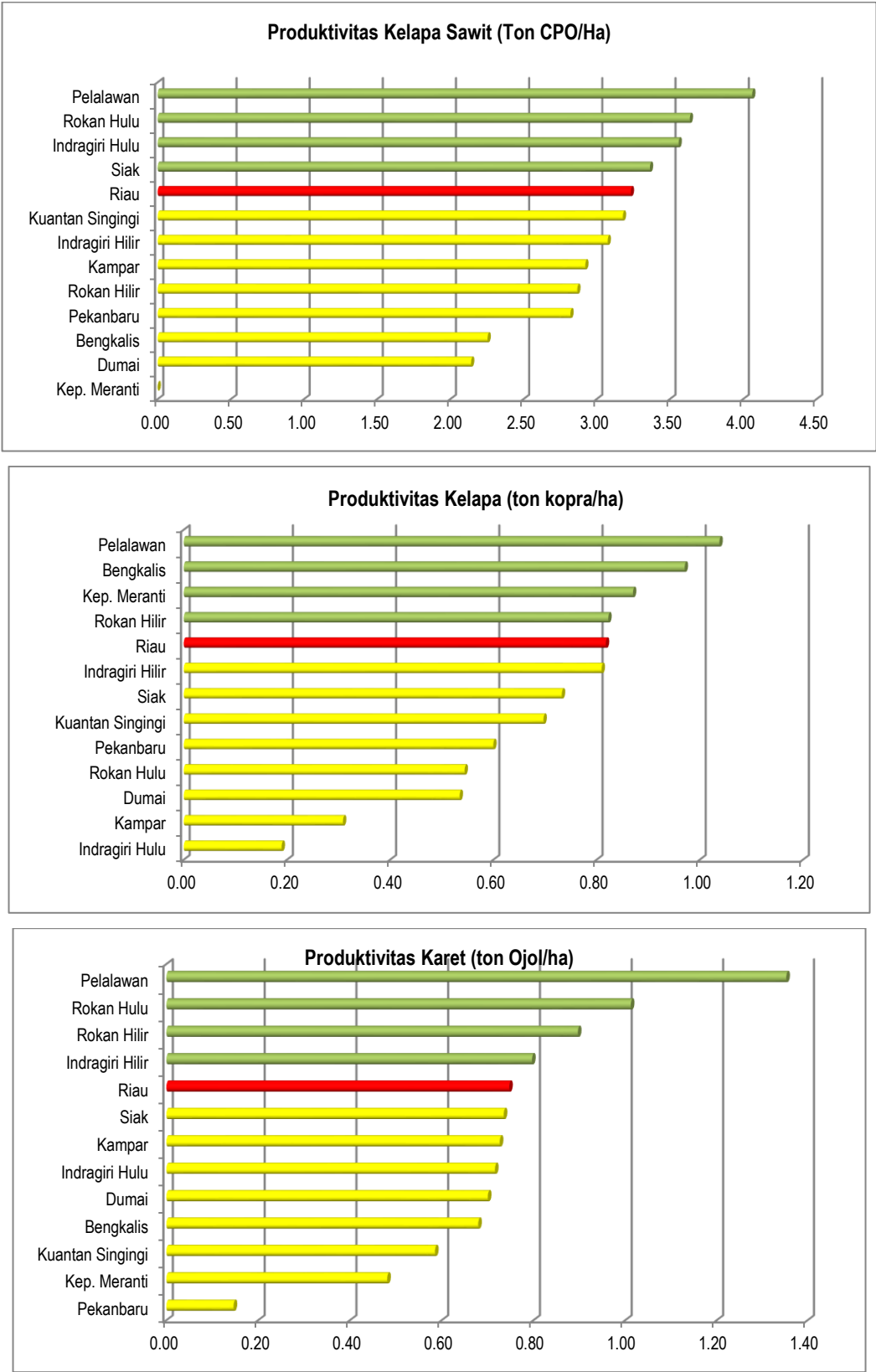
Sementara produktivitas tertinggi kelapa sawit, kelapa dan karet terdapat dikabupaten Pelalawan yaitu 4,07 ton CPO/ha, kelapa 1,04 ton kopra/ha dan karet 1,36 ton/ha. Produktivitas tertinggi dan terendah untuk tiga komoditas utama dapat dilihat pada tabel 2.138.

Tabel 2.138:
Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Per kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2014

No	Kabupaten Kota	Komoditas Utama								
		Kelapa Sawit			Kelapa			Karet		
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton PO/ha)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kuantan Singingi	129.320	411.262	3,18	2.761	1.925	0,70	145.364	85.100	0,59
2	Indragiri Hulu	118.969	423.636	3,56	1.828	347	0,19	61.372	43.951	0,72
3	Indragiri Hilir	228.052	701.544	3,08	440.821	357.012	0,81	5.378	4.286	0,80
4	Pelalawan	306.977	1.247.072	4,06	16.789	17.430	1,04	30.009	40.609	1,35
5	Siak	288.362	970.269	3,36	1.628	1.193	0,73	15.477	11.380	0,74
6	Kampar	416.393	1.217.174	2,92	1.714	529	0,31	102.234	74.285	0,73
7	Rokan Hulu	422.861	1.538.092	3,64	1.139	620	0,54	56.710	57.399	1,01
8	Rokan Hilir	281.474	807.413	2,87	5.362	4.412	0,82	25.830	23.165	0,90
9	Bengkalis	183.687	414.263	2,26	10.020	9.728	0,97	33.433	22.724	0,68
10	Kep. Meranti	-	-	-	31.453	27.384	0,87	20.481	9.858	0,48
11	Pekanbaru	10.929	30.834	2,82	15	9.0	0,60	3.085	452	0,15
12	Dumai	37.521	80.388	2,14	1.638	876	0,53	2.415	1.692	0,70
Jumlah		2.424.545	7.841.947	3,23	515.168	421.465	0,82	501.788	374.901	0,75

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 dan Data olahan

Kabupaten Rokan Hulu memiliki lahan perkebunan kelapa sawit paling luas dengan produktivitas komoditas sebesar 3,64 ton CPO/ha dan berada diatas ata-rata produktivitas provinsi sebesar 3,23 ton CPO/ha. Program peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas, mengingat penambahan luas lahan tanaman kelapa sawit ke depan makin terbatas. Demikian hal dengan komoditas kelapa dan karet. Capaian produktivitas komoditas utama per kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 2.102.



Sumber: Riau Dalam Angka, 2015 dan Data Olahan

Gambar 2.102
Produktivitas Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Khusus untuk komoditas kelapa sawit, strategi dan program yang tepat dan terencana dengan baik harus menjadi prioritas, karena tanpa ini semua maka dikhawatirkan pemanfaatan sumber daya alam kelapa

sawit tidak mencapai nilai yang optimal dan akan berakhir sama dengan yang terjadi pada komoditas sumber daya alam lainnya yang secara perlahan mulai ditinggalkan oleh petani dan beralih ke komoditas lainnya termasuk kelapa sawit akibat tidak adanya program yang terencana dengan baik dalam pengembangannya dan bahkan sebagian besar industri yang terkait dengan komoditas tersebut telah tutup.

Keberhasilan strategi pengembangan industri berbasis kelapa sawit memerlukan integrasi dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha terkait, pihak lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan pemerintah dan swasta agar semua aspek yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan komoditas tersebut dapat terpenuhi.

Untuk mensinergikan hal tersebut, maka program pemetaan luas lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan umur tanaman dan pabrik kelapa sawit (PKS) baik dari aspek jumlah existing, kapasitas terpasang serta utilisasi diperlukan untuk mengetahui secara tepat dan akurat produksi dan rencana kebutuhan pengembangan produksi dan kebutuhan input kelapa sawit dan PKS.

Laju perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit dan produksi TBS di Provinsi Riau yang cukup signifikan telah memacu perkembangan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS). Pada tahun 2014, jumlah PKS sebanyak 220 yang tersebar di 10 kabupaten dengan kapasitas produksi keseluruhan 6.521 ton per jam. Oleh itu jika PKS tersebut beroperasi selama 20 jam perhari dan 300 hari setahun, maka jumlah TBS yang terolah sebanyak 39,126 juta ton dengan produksi CPO sebanyak 7.825.200 ton atau 1:5 dengan arti bahwa 5 ton TBS dapat menghasilkan CPO 1 ton atau OER 20%.

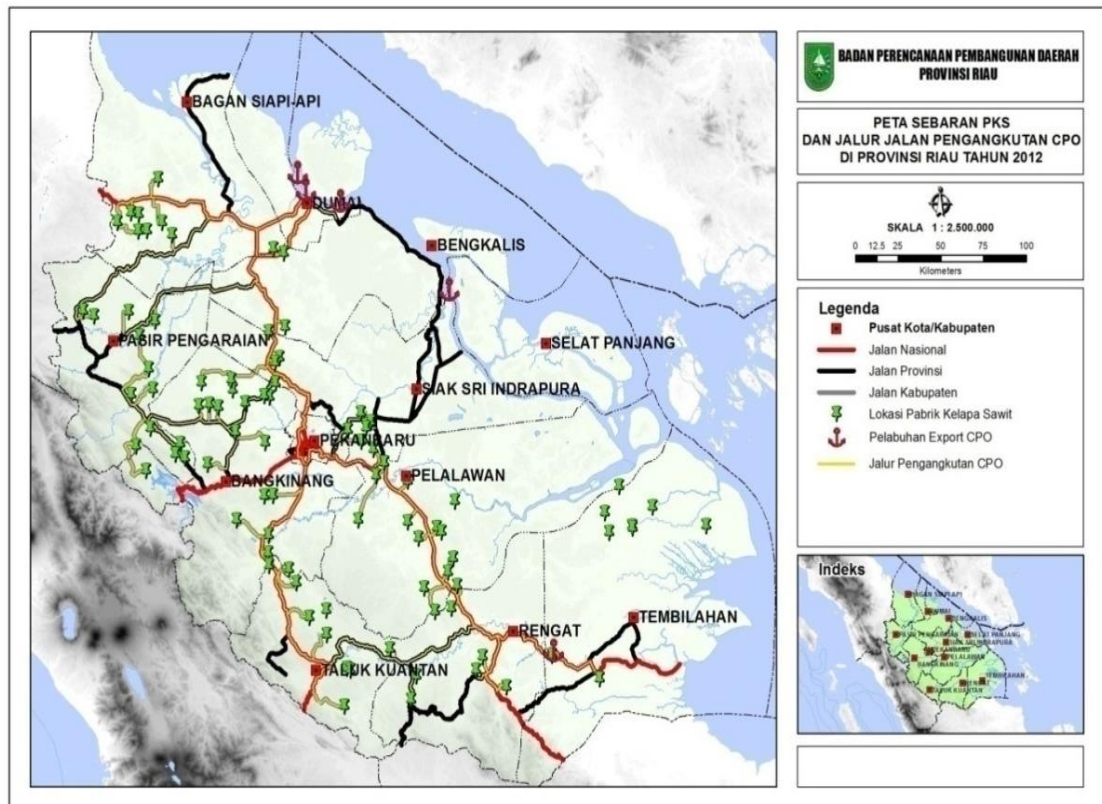
Dari kapasitas terpasang PKS sebanyak 6.521 ton TBS per jam, dan jika dibanding dengan rata-rata produktivitas kelapa sawit Provinsi Riau sebanyak 3,23 ton TBS/ha/thn, maka diperlukan luas panen sebanyak 2.019 ha/jam atau 48.453 ha/hari. Sementara itu satu PKS masih mengolah TBS dari 15.692 hektar perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2.139:
Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Provinsi Riau Tahun 2014

No	Kabupaten Kota	Luas Kebun Kelapa Sawit (Ha)	Jumlah PKS Unit	Kapasitas (Ton/Jam)	Luas Kebun/PKS (Ha/PKS)
1	Kuantan Singingi	129.320	11	465	11.756
2	Indragiri Hulu	118.969	11	420	10.815
3	Indragiri Hilir	228.052	9	415	25.339
4	Pelalawan	306.977	17	715	18.057
5	Siak	288.362	15	685	19.224
6	Kampar	416.393	36	1.485	11.566
7	Rokan Hulu	422.861	22	966	19.221
8	Rokan Hilir	281.474	22	915	12.794
9	Bengkalis	183.687	9	395	20.410
10	Kep. Meranti	-	-	-	-
11	Pekanbaru	10.929	1	30	10.929
12	Dumai	37.521	2	120	18.761
Jumlah		2.411.819	155	6.521	15.642

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2016

Sebaran pabrik PKS di 10 kabupaten 2 kota tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.139. Jika diamati dari angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat PKS yang tidak memaksimal utilisasi penggunaan pabriknya, hal tersebut tergambar dari jumlah produksi CPO pada tahun 2015 sebanyak 7.841.947 ton. Jika memasukkan potensi pengembangan lahan dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit ke depan maka masih dibutuhkan sejumlah PKS untuk mengolah produksi TBS dari potensi tersebut. Jumlah yang dibutuhkan dengan dari potensi produksi TBS tersebut adalah sebanyak 44 unit dengan asumsi bahwa PKS yang ada saat ini beroperasi dengan kapasitas penuh. Berdasarkan sebaran lokasi pabrik PKS tersebut maka cakupan penyediaan bahan baku industri oleokimia untuk daerah kawasan industri Dumai sebanyak 122 unit. Sedangkan yang menjadi cakupan kawasan industri Kuala Enok sebanyak 31 unit. Sebaran pabrik kelapa sawit (PKS) ini dapat dilihat pada Gambar 2.103.



Gambar 2.103
Sebaran PKS di Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014

Sementara itu perkebunan kelapa berdasarkan data potensi industri kelapa rakyat di Provinsi Riau dimana daerah memiliki perkebunan kelapa antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Berdasarkan pada Gambar 2.102 menunjukkan rendahnya produktivitas kelapa, hal tersebut tidak terlepas dari lemah dan minimnya sentuhan teknologi produksi kelapa di daerah ini. Sentuhan teknologi yang di maksud adalah bibit tanam yang kurang berkualitas, kuantitas dan kualitas penggunaan input pupuk yang minim dan perbaikan unsur hara tanah yang kurang serta kurangnya pengetahuan berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam proses produksi dan trio tata air yang mengalami kerusakan serta kemampuan menejerial petani kemudian tanaman yang sudah tua.

Penurunan produksi kelapa yang terus terjadi karena pengaruh lahan yang sebagian besar sudah kritis akibat tergenang air laut ketika air pasang, pH tanah yang rendah, drainase yang kurang memadai dan pendangkalan parit dan sungai. Ditambah lagi dengan pengaruh umur tanaman yang sudah tua. Disisi lain petani juga tidak dapat lagi memperluas lahan perkebunannya karena ketersediaan lahan

semakin terbatas serta tidak adanya temuan teknologi baru yang mampu mempertahankan kondisi komoditas tersebut sebagaimana sebelumnya.

Komplikasi permasalahan yang dihadapi petani tersebut membuat para petani kelapa semakin sulit dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan merecovery (perbaikan kembali) kebun-kebun petani yang rusak melalui menginventarisir (membuat database) luas kebun yang telah rusak dan menentukan titik lokasi kebun kelapa yang telah rusak dan program perbaikan kebun kelapa yang rusak dengan tepat dan efisien sehingga hasil recovery dapat memulihkan kebun petani.

d. Peternakan

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian Provinsi Riau atau sebanyak 2,76% dari sektor pertanian dan 0,55% dari jumlah PDRB Provinsi Riau atau nilai rata-rata Rp. 8.323.432.794.000,- selama periode 2010-2014. Jenis ternak yang diusahakan di Provinsi Riau meliputi ternak besar dan ternak besar yang tercatat diusahakan di Provinsi Riau antara lain terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba serta babi. Sedangkan ternak kecil yang diusahakan adalah ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Jika dilihat dari aspek lokasi penyebaran wilayah yang menjadi sentra pengembangan peternakan di Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru, kabupaten Indragiri Hulu, Siak dan Kampar.

Populasi ternak besar yang paling dominan diusahakan adalah sapi. Jumlah populasi ternak besar selama periode 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan jumlah populasi dari 164.707 ekor pada tahun 2011 menjadi 229.634 ekor pada tahun 2015 atau tumbuh sebanyak 9,29%. Sedangkan jumlah populasi ternak kecil pada tahun 2011 sebanyak 41.165.800 ekor meningkat menjadi 43.310.203 ekor pada tahun 2015 atau tumbuh sebanyak 1,37% dan secara umum populasi ternak baik besar dan kecil bertambah dari 41.568.907 ekor pada tahun 2011 menjadi 43.782.385 ekor pada tahun 2015 atau tumbuh sebanyak 1,40%.

Sedangkan jumlah produksi daging dari kedua klasifikasi ternak ini adalah sebanyak 37.366.328 ton pada tahun 2011 meningkat

menjadi 62.368.127 ton pada tahun 2015 atau naik sebanyak 17,26%. Peningkatan produksi ternak besar selama periode tersebut disumbang oleh ternak sapi sebanyak 23,48% atau dari 8.773.682 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 8.676.703 ton pada tahun 2015.

Sedangkan produksi telur secara umum mengalami pertumbuhan negatif sebanyak 40,55% atau produksi telur menurun dari 6.999.802 butir pada tahun 2010 menjadi 4.161.488 butir pada tahun 2014. Jika dilihat pertumbuhan pertahun maka selama periode 2010-2014 hanya pada tahun 2011 yang mengalami pertumbuhan positif sebanyak 19,40% sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 32,62% pada tahun 2012. Sedangkan jika ditinjau dari aspek ayam petelur maka telur dari ayam ras mengalami penurunan produksi yang paling signifikan sebanyak 66,57% atau produksi turun dari 3.980.172 butir pada tahun 2010 menjadi 1.330.651 butir pada tahun 2014. Dan hanya telur itik yang mengalami peningkatan sebanyak 3,43% selama periode 2010/2011 atau naik dari 1.644.896 butir pada tahun 2010 menjadi 1.701.276 butir pada tahun 2014. Untuk jelasnya perkembangan produksi telur dapat dilihat pada Tabel 2.140 berikut.

Provinsi Riau yang defisit suplai daging ternak besar dan kecil ini sebagaimana halnya Indonesia, tidak perlu terjadi, bahkan Provinsi Riau dapat mensuplai untuk wilayah lain, Provinsi Riau mempunyai sumberdaya yang memadai untuk pengembangan ternak khususnya ternak sapi, kerbau dan kambing, Areal kelapa sawit seluas 2,73 juta hektar menyediakan pakan hijauan yang besar, Diasumsikan per hektar lahan sawit dipelihara 1 ekor sapi atau kerbau atau kambing, perkebunan kelapa sawit setidaknya akan dicapai populasi sebesar 2,37 juta ekor, lebih dari 540% dari populasi ternak sapi, kerbau dan kambing tahun 2012 (438,717 ekor),

Tabel 2.140:
Populasi Ternak dan Produksi Daging Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Ternak	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Populasi (Ekor)						
	Sapi	164.707	189.060	175.431	217.652	229.634	9,29
	Kerbau	38.300	41.229	32.237	43.163	39367	2,73
	Kambing	196.115	208.428	175.832	184.899	195.827	0,43
	Domba	3.985	4.583	4.739	8.242	7.354	20,39
	Ayam Broiler	38.084.855	38.165.987	36.930.599	39.987.136	39.304.056	0,89
	Ayam Kampung	2.806.912	3.377.652	3.163.705	3.327.820	3.746.784	7,94
	Itik	274.033	289.564	243.483	289.238	259.363	(0,45)
2	Produksi (Kg)						
	Sapi	8.773.682	11.317.359	8.242.781	9.297.618	8.676.703	1,99
	Kerbau	1.021.748	1.607.797	1.367.217	1.839.676	1.813.239	18,88
	Kambing	446.970	465.571	550.139	620.342	648.242	9,90
	Domba	4.268	6.386	10.174	13.462	15.779	39,62
	Ayam Broiler	25.618.229	37.034.456	26.609.747	40.731.586	45.307.621	20,18
	Ayam Kampung	1.255.545	2.702.121	3.302.202	4.043.996	5.613.968	49,68
	Itik	245.886	231.651	245.625	282.502	292.575	4,71

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2011 - 2016)

Oleh karena itu, upaya pengembangan ternak besar dan kecil (ruminansia) perlu menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau kedepan karena selain upaya pengembangan pertanian beroreantasi *zero waste*, peningkatan sumber pendapatan alternatif petani kelapa sawit, karet dan kelapa juga mendukung program nasional untuk pencapaian swasembada daging. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan populasi ternak besar dan kecil ini perlu dilakukan dengan daya dorong yang besar dan berkelanjutan sehingga laju pemotongan lebih kecil dari laju pertambahan ternak.

e. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Selama periode 2011 – 2015, perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada harga konstan dengan migas maupun tanpa migas cenderung menurun, Selama periode ini, rata-rata

pertumbuhan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada harga konstan dengan migas maupun tanpa migas menurun masing-masingnya sebesar -0,27% dan -2,79% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.141, Kondisi ini sesuai dengan teori dan pengalaman negara-negara maju yang bergerak dari negara agraris ke industri, Namun bila dicermati, rata-rata penurunan kontribusi sektor pertanian ini belum diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor industri, dimana pertumbuhan kontribusi sektor industri dengan migas ternyata mengalami menurun sebesar -1,2% per tahun dan tanpa migas hanya meningkat 1,84% per tahun.

Kondisi di atas menunjukkan ada yang kurang serasi dan sinkron dalam pergerakan pembangunan di Provinsi Riau. Secara sederhana kondisi ini menyatakan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan hasil pertanian di Provinsi Riau lambat dan Provinsi Riau hanya memproduksi serta mengekspor hasil pertanian yang bernilai tambah rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dari ekspor minyak sawit dalam bentuk CPO (sekitar 70%), kelapa dalam bentuk kelapa bulat dan *crude coconut oil*, karet dalam bentuk SIR, Kayu dalam bentuk kayu gergajian dan pulp.

Apabila bahan baku hasil pertanian yang tersedia dalam jumlah besar ini di olah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi oleh sektor industri maka diyakini penurunan kontribusi sektor pertanian dapat diambil alih oleh sektor industri sehingga pertumbuhan PDRB akan lebih tinggi dan perkembangan ekonomi Provinsi Riau akan *on the track*. Hal ini juga menjadi solusi dalam mengantisipasi penurunan harga komoditas unggulan karena produk industri secara relatif tidak elastis terhadap penurunan harga komoditas internasional.

Tabel 2.141:
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap
PDRB Dengan Migas Provinsi RiauTahun 2015 – 2015

No	LAPANGAN USAHA	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,46	22,99	23	23,43	24,28	24,27	0,88

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan Olahan

2.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan menurut fungsi pokoknya dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak yang mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat, sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya.

Luas hutan Menurut BPS 2016 adalah 9.020.232,00 hektar. Bila dirinci menurut fungsinya sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 633.420,00 hektar (7,02%) adalah hutan suaka alam/taman wisata, hutan lindung seluas 234.015,00 hektar (2,59%), kemudian hutan produksi tetap seluas 2.331.891,00 hektar (25,85%) dan hutan produksi terbatas seluas 1.031.600,00 hektar (11,44%). Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.142 berikut.

Tabel 2.142:
Luas Hutan Menurut Fungsi Tahun 2015
Berdasarkan TGHK Update SK Nomor: 878/Menhut II/2014

No	Fungsi	Distribusi	
		Luas (Ha)	%
1	Hutan Suaka Alam/Taman Wisata	633.420,00	7,02
2	Hutan lindung	234.015,00	2,59
3	Hutan Produksi	-	0,00
	- Tetap	2.331.891,00	25,85
	- Terbatas	1.031.600,00	11,44
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.268.767,00	14,07
5	Hutan Mangrove/Bakau	120.123,00	1,33
6	Areal Penggunaan Lain (APL) Non Kawasan Hutan	3.400.416,00	37,70
Jumlah		9.020.232,00	100,00

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2016

Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2011 kerusakan kawasan hutan seluas 1.253.799,40 hektar meningkat menjadi 4.793.369,09 hektar pada tahun 2015. Terdapat tiga kondisi lahan kritis yaitu sangat kritis seluas 142.081,57 hektar, agak kritis seluas 2.998.285,94 hektar dan kritis seluas 1.653.001,58 hektar.

Tabel 2.143:
Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Provinsi Riau Tahun 2011 -2015

No	Keterangan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kerusakan Kawasan Hutan	1.253.799,40	1.195.807,75	1.536.653,99	1.039.531,17	4.793.369,09	88,16
	a. Sangat Kritis	-	-	-	-	142.081,57	-
	b. Agak Kritis	-	-	-	-	2.998.285,94	-
	c. Kritis	-	-	-	-	1.653.001,58	-
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	61.000,00	85.000,00	95.000,00	-	-	-

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2012; 2013; 2014; 2015 dan 2016

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) di Provinsi Riau per kabupaten kota tahun 2014 tercatat seluas 1.039.531,17 hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 195.702,02 hektar (18,83%), Kabupaten Kampar seluas 159.786,38 hektar (15,37%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 127.019,19 hektar (12,22%) dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 124.512,53 hektar (11,98%) dengan total kerusakan pada empat wilayah tersebut seluas 607.020,12 hektar (58,39%). Sementara kabupaten kota lainnya kurang dari 10%. Lihat Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144:
Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan
Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)					
	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Hutan Prod Terbatas	Hutan Prod Tetap	Jumlah (ha)	Distribusi (%)
Kuantan Singingi	19.738,21	5.037,97	38.002,69	-	62.778,87	6,04
Indragiri Hulu	4.151,86	62,69	51.774,48	9.209,26	65.198,29	6,27
Indragiri Hilir	1.849,53	-	83.275,19	110.577,30	195.702,02	18,83
Pelalawan	-	2.016,75	84.112,57	4.208,97	90.338,28	8,69
Siak	-	2.217,48	24.259,44	63.583,34	90.060,26	8,66
Kampar	11.924,72	15.482,05	120.994,04	11.385,56	159.786,38	15,37
Rokan Hulu	11.317,16	-	60.627,53	22.013,55	93.958,23	9,04
Bengkalis	-	15.346,72	91.231,14	20.441,33	127.019,19	12,22
Rokan Hilir	27.456,05	146,96	47.473,31	49.436,21	124.512,53	11,98
Kepulauan Meranti	-	-	50,29	42,58	92,87	0,01
Pekanbaru	-	-	8.436,11	-	8.436,11	0,81
Dumai	-	-	5.709,39	15.938,75	21.648,14	2,08
Provinsi Riau	76.437,53	40.310,62	615.946,17	306.836,85	1.039.531,17	100,00

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2015

Seiring dengan meningkatnya luas lahan kritis dan semakin tegasnya pemberantasan *illegal logging* maka produksi produk kayu olahan khususnya yang bersumber dari kayu alam cenderung semakin menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.145. Produksi kayu

gergajian, kayu lapis dan chip yang bersumber dari kayu alam sebagian besar dihasilkan di Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Kep. Meranti dan Pekanbaru. Sedangkan produksi pulp yang bersumber dari HTI cenderung berfluktuatif meningkat yang dihasilkan di Kabupaten Siak dan Pelalawan.

Tabel 2.145:
Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kayu Gergajian	36.963,62	51.601,91	12.686,63	10.676,33	6.670,51	-22,29
Kayu lapis	206.144,05	105.079,16	91.137,12	81.234,41	78.956,47	-18,99
Serpih Kayu	72.243,74	42.751,20	119.324,64	109.422,24	17.598.027,00	7,50
Pulp	4.652.843,46	3.875.287,80	3.822.455,02	4.283.425,12	4.218.947,00	-22,92

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka; 2014; 2015 dan 2016

Tabel 2.146:
Produksi Kayu Olahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Kayu Gergajian	Kayu lapis	Serpih Kayu	Pulp	Jumlah (M3)	Kontribusi (%)
	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)		
Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-
Pelalawan	5.133,04	-	8.492.864,10	1.463.589,54	9.961.586,78	45,31
Siak	25.872,96	22.058,61	9.105.162,63	2.755.357,19	11.908.451,39	54,16
Kampar	19.222,94	-	-	-	19.222,94	0,09
Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-
Rokan Hilir	514,06	35.500,16	-	-	36.014,22	0,16
Kepulauan Meranti	508,95	-	-	-	508,95	0,00
Pekanbaru	2.036,06	58.772,95	-	-	60.809,01	0,28
Dumai	-	-	-	-	-	-
Provinsi Riau	53.288,11	116.331,72	17.598.026,73	4.218.946,73	21.986.593,29	100,00

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan data di atas dan bencana alam banjir yang kuantitas dan kualitas semakin meningkat, maka isu pengelolaan hutan perlu menjadi prioritas dalam RPJM Provinsi Riau ke depan, Upaya rehabilitasi lahan kritis di dalam hutan khususnya hutan lindung dan suaka alam beserta pengamanannya dari illegal logging dan kebakaran serta tidak mengkonversi hutan untuk penggunaan lain.

2.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut, Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, pelalawan dan Indragiri Hulu, Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 triliun *standart cubic feet* (TSCF) terdapat di kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis, Potensi/cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar, Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir,

Tabel 2.147:
Produksi Hasil Tambang Provinsi Tahun 2011-2015

Jenis Tambang	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Minyak Bumi	140.049.484,00	135.474.058,00	126.556.611,67	119.433.077,73	83.033.801,58	-11,49
Gas Bumi	6.083.885,00	5.716.756,00	10.960.321,71	14.983.802,05	14.563.561,47	29,90
Batu Bara	1.952.958,00	1.885.041,00	2.057.139,59	585.812,67	240.511,32	-31,20

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2016

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2011-2015 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Selama periode ini, produksi minyak bumi cenderung menurun dengan rata-rata penurunan pertumbuhan produksi sebesar -11,49 per tahun. Penurunan pertumbuhan produksi ini lebih dikarenakan jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Produksi pertambangan gas bumi adalah satu-satunya yang memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produksi meningkat sebesar 29,90% per tahun.

Selama periode 2011-2015, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam PDRB Provinsi Riau yaitu 24,18% dari total PDRB Provinsi Riau pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.148. Meski

kontribusi sektor pertambangan dan penggalian merupakan yang terbesar namun trend kontribusinya terus menurun, Penurunan kontribusi sektor pertambangan ini disebabkan karena penurunan produksi minyak mentah dan gas bumi,

Tabel 2.148:
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

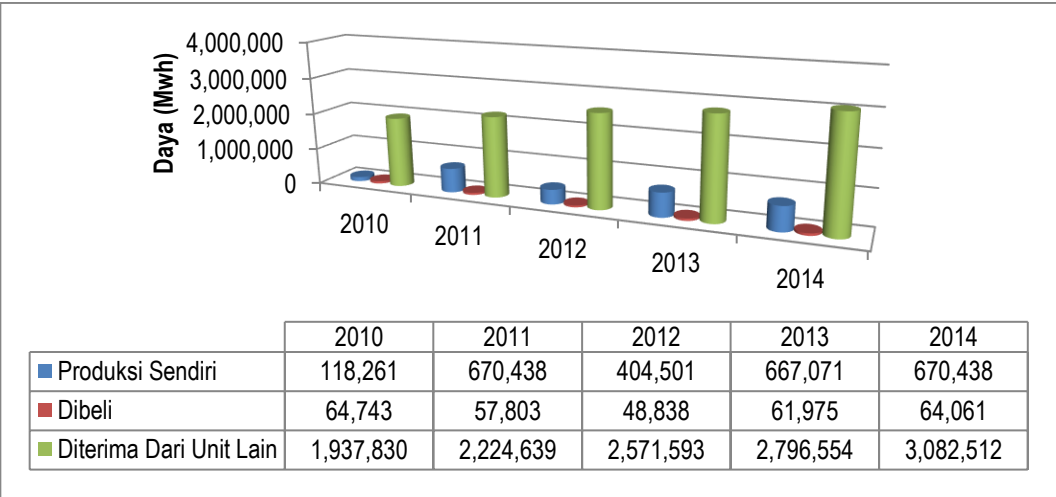
Uraian	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Minyak dan Gas Bumi	31,86	30,27	28,22	26,00	24,18	-6,66
Pertambangan dan Penggalian Non Migas	9,03	8,93	8,82	8,80	8,01	-2,89

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian disektor pertambangan dan penggalian ini adalah produksi minyak mentah Provinsi Riau besar ini hanya sebagian kecil saja yang diolah di Provinsi Riau yaitu sebesar yaitu 1,235,261 liter atau setara 0,88% dari total produksi minyak mentah Provinsi Riau tahun 2011. Sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor, Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 492,223 ton dari luar. Oleh karena itu, potensi produksi minyak mentah yang dimiliki Provinsi Riau seharusnya dapat dikembangkan dengan meningkatkan jumlah dan/atau kapasitas terpasang pabrik pengolahan minyak mentah yang ada di Provinsi Riau sehingga nilai produksi minyak akan semakin meningkatkan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Riau.

Selama periode 2010 – 2014, penyediaan listrik oleh PT, PLN di Provinsi Riau terus meningkat dan dilakukan dengan 3 cara yaitu (i) produksi sendiri, beli dan diterima dari unit lain, Sumber listrik terbesar dengan jumlah yang terus meningkat diterima dari unit lain, Jumlah energi listrik yang diterima dari unit lain melalui Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau, melalui (i) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak dengan kapasitas 4 X 43,5 MW, di Sumatera Barat; (ii) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin dengan kapasitas 2 X 100 MW, di Sumatera Barat; dan (iii) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dengan kapasitas 3 X 38 MW, di

Riau, Pada tahun 2008. Provinsi Riau menerima suplai sebesar 1,773,914 Mwh dengan porsi sebesar 89,99% dari total energi listrik PT, PLN di Provinsi Riau. Pada tahun 2014, Provinsi Riau menerima suplai sebesar 3,082,512 Mwh dengan porsi 80,76% dari total energi listrik PT. PLN di Provinsi Riau, Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan suplai energi listrik melalui sistem interkoneksi meningkat sebesar 12,47% per tahun.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011 – 2015)

Gambar 2.104
Jumlah Energi Listrik Yang Diproduksi, Dibeli dan Diterima Dari Unit Lain di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

Energi listrik yang diproduksi sendiri dilakukan oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk Provinsi Riau terus meningkat seiring upaya menutup kekurangan pasokan listrik di Provinsi Riau, Produksi listrik sendiri dilakukan oleh PT, PLN Area Rengat dengan kapasitas terpasang tahu 2013 sebesar 94,258 KW, area Dumai sebesar 83,806 KW dan area Pekanbaru sebesar 43,196 KW, Pada tahun 2014, produksi sendiri meningkat menjadi 670,438 Mwh sehingga porsinya meningkat menjadi 17,56% dari total energi listrik di Provinsi Riau, Upaya menutupi kekurangan energi listrik di Provinsi Riau, PT, PLN wilayah Riau juga melakukan pembelian energi listrik dari pihak lain, Pada tahun 2010, jumlah energi listrik yang dibeli dari pihak lain sebesar 64,743 Mwh, Pada tahun 2014, jumlah energi listrik yang dibeli dari pihak lain meningkat menjadi 64,061 Mwh.

Secara keseluruhan, selama periode 2011 – 2015 rasio elektrifikasi provinsi Riau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,91% per tahun, dengan wilayah pertumbuhan tertinggi terjadi di

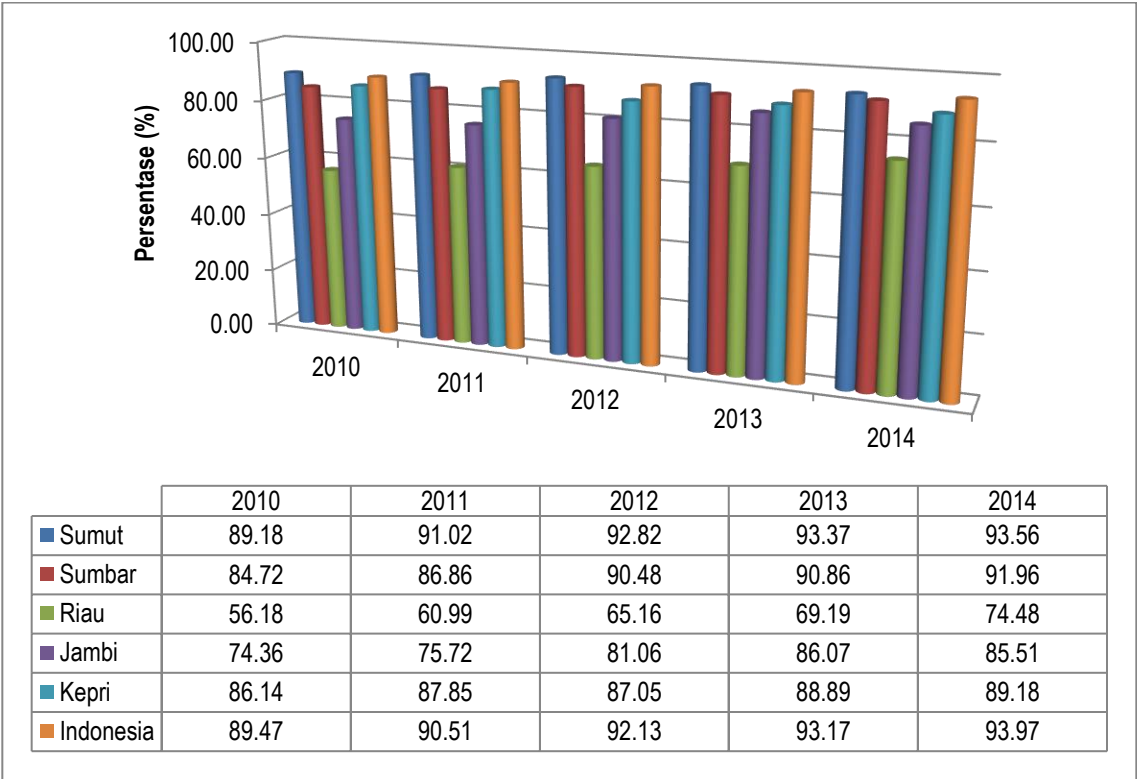
Kabupaten Rokan Hilir sebesar 50,92% per tahun dan Kabupaten Kampar dengan rata-rata pertumbuhan terendah 2,44% per tahun. Pertumbuhan yang rendah wilayah tersebut disebabkan oleh rasio pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi berbanding laju pertumbuhan pembangunan energi listrik. RE per kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 2.149 dan Gambar 2.105.

Tabel 2.149:
Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Kabupaten Kota	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kuantan Singingi	47,81	69,71	72,40	86,3	94,84	19,69
2	Indragiri Hulu	66,00	93,63	99,00	99,16	98,04	11,66
3	Indragiri Hilir	26,09	68,47	69,42	75,04	70,72	41,54
4	Pelalawan	28,18	62,1	69,76	67,19	71,59	33,89
5	Siak	37,71	62,85	67,44	54,93	77,94	24,33
6	Kampar	80,05	71,88	76,68	83,93	87,89	2,66
7	Rokan Hulu	36,82	52,55	57,81	57,63	61,83	14,93
8	Bengkalis	67,72	77,48	80,93	106,11	98,69	10,75
9	Rokan Hilir	28,73	84,69	90,74	85,79	91,97	50,92
10	Kep. Meranti	39,17	95,45	95,48	100,42	96,64	36,28
11	Pekan Baru	65,95	108,33	115,71	105,41	104,97	15,44
12	Dumai	73,58	90,19	95,38	97,25	100	8,28
Provinsi Riau		53,06	78,88	83,73	85,19	87,81	14,91

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Riau, 2016

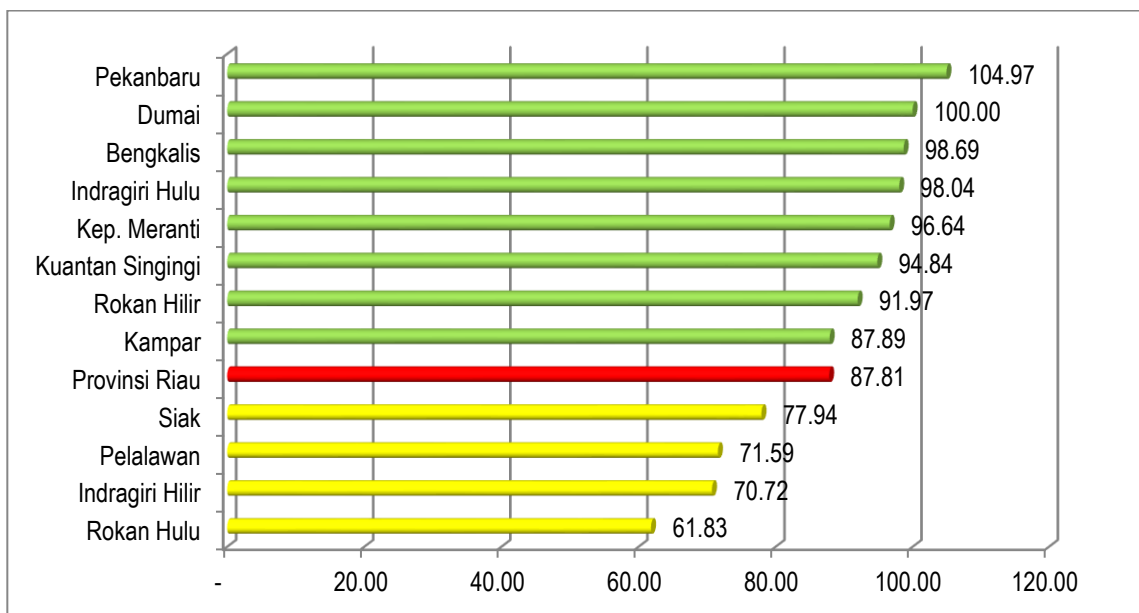
Persentase rumah tangga yang mendapat layanan listrik PLN di Provinsi Riau adalah yang terendah dibanding provinsi tetangga dan bahkan dibanding nasional, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.105.



Sumber: BPS Republik Indonesia (2015)

Gambar 2.105
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Provinsi Riau dan Provinsi Tetangga Tahun 2010 – 2014

Berdasarkan pada Gambar 2.106 menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi dibawah rata-rata provinsi terdapat 4 kabupaten dan 8 kabupaten di atas rata-rata provinsi. Wilayah terendah rasio elektrifikasi di bawah provinsi yaitu Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu (warna kuning). Dengan perpindahan kewenangan dalam pengurusan energy dan sumberdaya mineral ke provinsi maka wilayah-wilayah terendah rasio elektrifikasinya harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan energy kedepan.



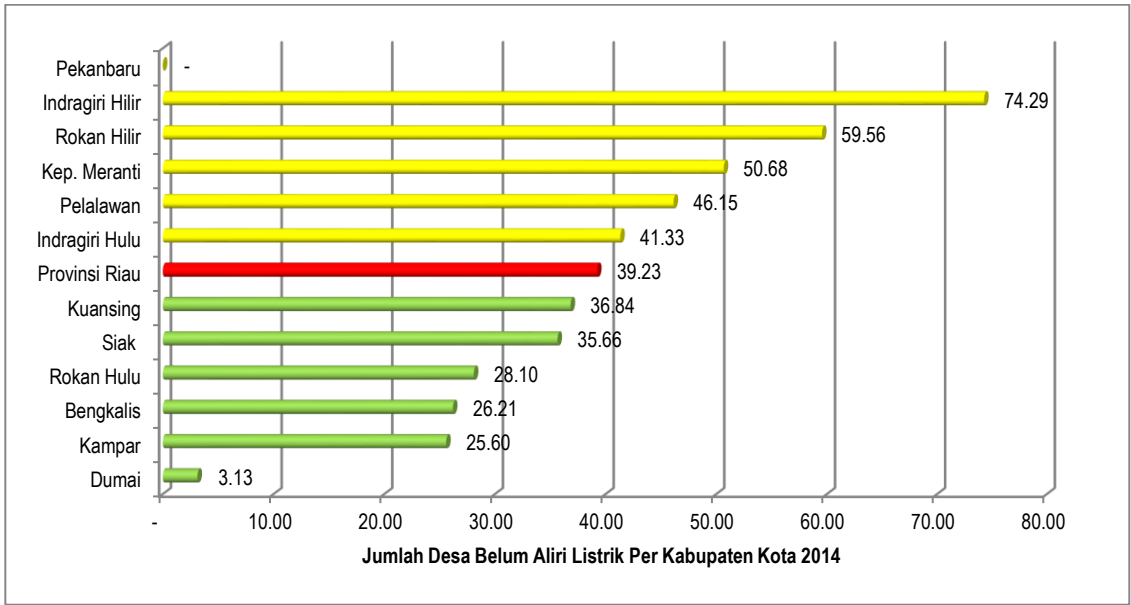
Gambar 2.106
Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Sedangkan jumlah desa yang sudah terlayani listrik di provinsi Riau hingga tahun 2014 baru mencapai 60,77% dan yang belum terlayani 39,23%. Kabupaten yang belum terlayani listrik yang paling rendah adalah Indragiri Hilir yang desanya tersedia listrik baru mencapai 25,71% dan yang belum tersedia listrik sebesar 74,29%. Jika dilihat rata-rata desa yang belum terlayani listrik di provinsi Riau masih terdapat sebanyak 39,23% dari jumlah desa yang ada sebanyak 1.634desa dan kelurahan atau sebanyak 641 desa yang belum terlayani listrik dan yang terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dari 175 desa masih terdapat 130 desa yang belum terlayani listrik. Sementara jumlah kelurahan yang mendapatkan aliran listrik terdapat di Kota Dumai sebanyak satu kelurahan dari 32 kelurahan yang ada. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah daerah mengingat hal ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi Riau sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.

Tabel 2.150:
Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Yang Terlayani Listrik
di Provinsi Riau 2014

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah				Jumlah Desa Berlistrik			
		Penduduk	Kepala Keluarga	Kecamatan	Desa	Telah		Belum	
						Desa	(%)	Desa	(%)
1	Kuansing	314.140	76.094	12	209	132	63,16	77	36,84
2	Inhu	247.306	92.405	14	196	115	58,67	81	41,33
3	Inhil	555.701	166.164	20	175	45	25,71	130	74,29
4	Pelalawan	152.949	82.583	12	117	63	53,85	54	46,15
5	Siak	238.786	95.983	14	129	83	64,34	46	35,66
6	Kampar	447.157	173.936	20	250	186	74,40	64	25,60
7	Rokan Hulu	265.686	65.573	16	153	110	71,90	43	28,10
8	Bengkalis	520.241	121.329	8	103	76	73,79	27	26,21
9	Rokan Hilir	352.299	134.253	13	136	55	40,44	81	59,56
10	Pekanbaru	585.440	237.896	12	61	61	100,00	-	-
11	Dumai	173.188	61.878	5	32	31	96,88	1	3,13
12	Kep. Meranti	216.329	40.319	7	73	36	49,32	37	50,68
Jumlah		4.069.222	1.348.413	153	1.634	993	60,77	641	39,23

Sumber: PLN Riau, 2014.



Gambar 2.107
Jumlah Desa Belum Aliri Listrik Per Kabupaten Kota 2014

Salah satu alternatif energi selain penyediaan listrik oleh PLN adalah melalui biomassa dan cocopeat. Berdasarkan Potensi Investasi Riau 2013, potensi biomassa yang sangat besar dan belum banyak dimanfaatkan adalah pelepah sawit. Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan limbah biomassa sawit tersebut.

Upaya mencukupi suplai dan menjamin tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan

peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Riau dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), Pembangunan PLTG bisa dilaksanakan sehubungan dengan dibangunnya Jaringan Transmisi Gas Bumi “TRANS SUMATERA TENGAH” (Asamera Corridor Block - Duri - Batam) oleh PT Gas Negara, sedangkan PLTU dengan dibangunnya PLTU Peranap oleh PT Bukit Asam menggunakan bahan bakar batu bara, Untuk PLTU Peranap ini pembangunannya direncanakan dalam dua tahap, masing-masing dengan kapasitas 2 X 600 MW.

Tabel 2.151:
Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Yang Terlayani Listrik di Provinsi Riau 2014

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah				Jumlah Desa Berlistrik			
		Penduduk	Kepala Keluarga	Kecamatan	Desa	Telah		Belum	
						Desa	(%)	Desa	(%)
1	Kuansing	310.619	76.094	12	209	132	63,16	77	36,84
2	Inhu	400.901	92.405	14	196	115	58,67	81	41,33
3	Inhil	694.614	166.164	20	175	45	25,71	130	74,29
4	Pelalawan	377.221	82.583	12	117	63	53,85	54	46,15
5	Siak	428.499	95.983	14	129	83	64,34	46	35,66
6	Kampar	773.171	173.936	20	250	186	74,40	64	25,60
7	Rokan Hulu	568.576	65.573	16	153	110	71,90	43	28,10
8	Bengkalis	536.138	121.329	8	103	76	73,79	27	26,21
9	Rokan Hilir	627.233	134.253	13	136	55	40,44	81	59,56
10	Kep. Meranti	179.894	40.319	7	73	36	49,32	37	50,68
11	Pekanbaru	1.011.467	237.896	12	61	61	100,00	-	-
12	Dumai	280.109	61.878	5	32	31	96,88	1	3,13
Jumlah		6.188.442	1.348.413	153	1.634	993	60,77	641	39,23

Sumber: PLN Riau, 2014.

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sektor listrik di Provinsi Riau secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun demikian, tingkat elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Riau tahun 2012 (65,16 persen) masih jauh di bawah rata-rata nasional (92,13 persen) seperti terlihat pada Tabel 2.151, Bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, persentase elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Riau masih

jauh di bawah, Bila dibandingkan elektrifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan, maka kawasan perdesaan memiliki tingkat elektrifikasi yang jauh lebih rendah di Provinsi Riau dengan perbandingan perkotaan dan perdesaan yaitu 94,88 persen berbanding 46,08 persen.

Perbandingan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.151. Kabupaten dengan tingkat elektrifikasi yang bersumber dari PLN yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (38,39%), Pelalawan (34,69%), Rokan Hulu (43,39%), Indragiri Hulu (46,70%), dan Kepulauan Meranti (55,20%).

Permasalahan listrik masih terjadi dengan masih seringnya pemadaman listrik, Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk dicarikan solusinya, mengingat pengguna listrik tidak hanya rumah tangga saja, namun terkait dengan pelaku ekonomi yang juga dapat berpengaruh terhadap ekonomi daerah.

Kekurangan pasokan listrik PLN di Provinsi Riau telah mencapai 109 MW, Beban puncak listrik di Riau mencapai 273 MW, Namun seluruh pembangkit di Riau hanya mampu memasok 140 Mw, Bahkan dalam kondisi normal, pembangkit yang ada di Riau hanya menghasilkan 164 MW, Kekurangan daya 109 MW saat situasi normal disubsidi jaringan interkoneksi, Namun, ketika pembangkit sedang dalam mengalami gangguan seperti menurunnya air waduk PLTA Koto Panjang, daya yang dihasilkan bisa berkurang hingga 40 Mw, maka kekurangan akan bertambah menjadi 149 MW, jumlah kekurangan yang relatif besar ini sangat mempengaruhi aktifitas pengguna PLN baik masyarakat maupun sektor industri, jasa dan perkantoran melalui proses pemadaman bergilir.

2.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

Letak Provinsi Riau yang strategis dan didukung dengan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan menjadikan posisi ekspor netto berada dalam posisi surplus. Perkembangan ekport migas dan migas dari 2011-2015 menunjukkan trend penurunan, dimana ekport migas turun dari 6.775.013,70 ton pada tahun 2011 nmenjadi 3.530.979,82 ton pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan penurunan sebesar 11,97% per tahun. Demikian halnya eksport non

migas yang juga mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 2,81% per tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152:
Perkembangan Eskpor Migas dan Migas Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Perdagangan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/Ta hun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Migas	6.775.013,70	6.556.107,80	5.895.893,47	6.596.203,17	3.530.979,82	-11,97
Non Migas (NM)	13.364.967,70	12.588.796,86	11.661.263,62	15.268.961,97	10.840.754,12	-2,81
Komposisi NM (%)	66,36	65,76	66,42	69,83	75,43	3,31

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Pada tahun 2015, ekspor netto komoditas migas defisit sebesar US\$ 360.489.061ribu yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak mentah. Eskpor netto komoditas non migas juga surplus sebesar US\$ 44.790.375ribu, dimana sebagian besar ekspor non migas ini dari industri kelapa sawit, kelapa dan karet, Ekspor netto hasil pertanian dan hasil tambang relatif defisit.

Pada Tabel 2.153 dapat dilihat perkembangan perdagangan luar negeri baik ekspor maupun impor di Provinsi Riau. Nilai Ekspor non migas pada tahun 2015 (sebesar USD 52.257.512 Ribu lebih besar dari ekspor migas yaitu USD 24.109.347 Ribu. Nilai ekspor non migas, relatif tinggi 9 kali lipat dibanding impor namun migas ini adalah *non-renewable resources* yang tidak *sustainable* dalam jangka panjang.

Tabel 2.153:
Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2015

No	Komoditas	Eskpor		Impor		Ekspor Netto	
		Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)
1	Migas	-	24.109.347	-	390.280.739	-	(360.489.061)
2	Non Migas	80.918.023	52.257.512	12.122.084	7.467.137	28.660.511	44.790.375

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan ini selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas, Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas. Strategi peningkatan ekspor yang dilakukan

pada dasarnya dibagi atas 2 program sistemik yang saling berkaitan, yaitu dalam dan luar negeri, Di dalam negeri, kita mutlak perlu melakukan pembinaan industri sehingga memiliki kapasitas produksi dan peningkatan serta diversifikasi baik mutu maupun jenis-jenis produk yang ditawarkan.

Usaha lain yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan daya saing produk melalui program peningkatan citra merek dagang, diversifikasi produk dan pengembangan produk dan jasa, Pembinaan pelaku ekspor, di samping untuk menguasai teknis-teknis perdagangan internasional juga dipandang perlu untuk memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional. Dalam kaitan dengan luar negeri, melakukan akses dengan pasar melalui perundingan-perundingan ditingkat multilateral, regional, dan bilateral, melakukan promosi ekspor ke luar negeri dan dalam negeri serta melakukan diversifikasi pasar ke pasar non tradisional dengan tetap mempertahankan pasar tradisional.

Seiring dengan peningkatan nilai ekspor dan ekspor netto, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan pertumbuhan 3,08% per tahun. Dimana pada tahun 2011 sebesar 7,65% kemudian meningkat menjadi 8,65% pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.154. Kontribusi sektor perdagangan dari komoditas migas dan non migas akan meningkat tajam apabila ekspor bukan merupakan produk mentah atau setengah jadi seperti minyak mentah, CPO, Kelapa bulat, CCO dan SIR, Bila produk ekspor yang selama ini berupa produk mentah atau setengah jadi terlebih dahulu diolah seperti minyak mentah menjadi bensin dan minyak tanah, CPO menjadi biodiesel, kelapa menjadi DC (*desicated coconut*), SIR menjadi ban. Agar kontribusi sektor perdagangan ini meningkat maka pengembangan industri pengolahan migas, industri hilir kelapa sawit, kelapa dan karet perlu prioritas dalam pembangunan dibidang perdagangan kedepan. Lebih lanjut kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154:
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	8,19	8,43	8,48	8,65	3,08

2.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Provinsi Riau pada harga berlaku dengan migas sebesar 23,87% dan harga konstan dengan migas sebanyak 28,26% menempati urutan kedua pada harga berlaku dan urutan pertama dari pada harga konstan dari 17 sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Kontribusi tersebut karena potensi sumberdaya alam sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, kelapa dan karet serta sagu sebagai sumber bahan baku sektor industri pengolahan. Lebih lanjut kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.155 berikut.

Tabel 2.155:
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/T ahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Industri Pengolahan	24,73	25,46	26,57	27,35	28,26	3,25

Namun selama periode 2011-2015 sektor industri pengolahan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3.25% pertahun dan nasional sebesar 4,48% dengan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Provinsi Riau dengan rata-rata sebanyak 28,26% pada tahun 2015 menempati urutan pertama setelah industri pertambangan dan sektor pertanian. Walaupun menempati urutan pertama pada tahun 2015 tetapi hal ini belum dapat melampaui kontribusi nasional yang berada di atas 30%. Masihnya rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian di Provinsi Riau tidak terlepas dari kurangnya jenis industri yang berkembang di Provinsi Riau.

Pada tahun 2013, dari 359 (KBLI 5 Digit) jenis industri yang berkembang di Indonesia dimana hanya terdapat 32 jenis industri yang berkembang di Riau dan 29 jenis industri diantaranya merupakan industri berbasis industri agro, Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Jumlah unit usaha pada industri sedang dan besar mencapai pada tahun 2009 hanya 191 unit kemudian meningkat menjadi 217 unit usaha pada tahun 2013 atau naik sebanyak 13,61% selama periode 2009-2013, Sedangkan jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 48,202 orang pada tahun 2009 menjadi 64,002 orang pada tahun 2013 atau naik sebanyak 32,78%,

Sementara itu nilai output rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 60.488.084.355 pada tahun 2009 menjadi Rp. 223.553.742.033 pada tahun 2013, Persentase peningkatan nilai output per tenaga sebanyak 178,35% atau naik dari Rp.1.254.887 pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.492,918 pada tahun 2013. Sedangkan persentase peningkatan nilai tambah per tenaga sebanyak naik 23,74% atau bertambah dari Rp. 704.598 pada tahun 2009 menjadi Rp. 871.836 padatahun 2013. Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013 lebih lanjut dapat dilihat Tabel 2.156.

Tabel 2.156:
Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unit Usaha	191	183	205	202	217
Tenaga Kerja (Org)	48,202	51,015	72,903	59,470	64,002
Nilai Output (Rp)	60.488.084.355	99.115.947.081	154.563.118.879	172.022.759.137	223.553.742.033
Nilai Tambah (Rp)	33.963.066.298	34.765.145.740	51.517.303.820	45.848.556.289	55.799.271.875
NO/Tenaga Kerja	1.254.887	1.942.879	2.120.120	2.892.597	3.492.918
NT/Tenaga Kerja	704.598	681.469	706.655	770.952	871.836

Sumber Data Olahan, 2015

Jika dilihat jenis industri yang berkembang di Provinsi Riau pada tahun 2014, dua digit maka terdapat 13 jenis industri dengan konsentrasi pada industri KBLI-10; 5 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI-17; 6 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 20; 2 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 21; 4 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 24; 3Jenis industri dengan konsentrasi

pada industri KBLI-27; dan 1 Jenis industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 11,18,19 dan 25 dan 28.

Tabel 2.157:
Jenis Industri Pengolahan Yang Berkembang Menurut KBLI 5 Digit di Provinsi Riau, 2013

No	KBLI	Nama Jenis Industri
1	10211	Industri Penggaraman dan Pengerangan Ikan
2	10421	Industri Kopra
3	10422	Industri Minyak Makan Kelapa
4	10423	Industri Minyak Makan Kelapa
5	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa
6	10431	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit
7	10432	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit
8	10433	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit
9	10618	Industri Berbagai Macam Tepung dari PBKUSejenisnys
10	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
11	10779	Industri Produk Masak Lainnya
12	10780	Industri Produk Masak Lainnya
13	10792	Industri Kue Basah
14	11040	Industri Minuman Ringan
15	16101	Industri Penggergajian Kayu
16	16211	Industri Kayu Lapis
17	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
18	17012	Industri Kertas
19	17013	Industri Kertas dan kertas karton yang diproses
20	17021	Industri Kertas dan kertas Bergelombang
21	17091	Industri Kertas Tissue
22	18112	Industri Percetakan Khusus
23	19291	Industri dari Produk Hasil Kilang Minyak Bumi
24	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian
25	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
26	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
27	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
28	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
29	20299	Industri Barang Kimia Lainnya
30	21011	Industri Bahan Farmasi
31	21022	Industri Produk Obat Tradisional
32	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
33	24204	Industri Ekstruksi Bukan Besi
34	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian
35	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik
36	27113	Industri Pengubah Tegangan
37	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
38	28292	Industri Suku cadang untuk barang

Sedangkan jumlah jenis yang berkembang pada KBLI lima digit sebanyak 33 jenis industri dan sedangkan dari data hasil ekspor sebanyak 38 jenis industri berikut disajikan jenis industri yang dianalisis mengikut data ekport hasil industri.

Pada tahun 2010, dengan semakin menurunnya produksi hasil hutan (kayu), beberapa perusahaan industri pengolahan kayu dan industri kapal kayu mengalami stagnasi dan sebagian perusahaan tersebut harus tutup karena kekurangan bahan baku. Secara jumlah perusahaan di Provinsi Riau pada tahun sebelumnya sebanyak 204 perusahaan kemudian turun menjadi 183 perusahaan pada tahun 2010 atau turun sebanyak 10,29% akibatnya adanya perusahaan kayu yang tutup. Namun sejak tahun 2011 sebaliknya terjadi peningkatan jumlah industri pengolahan yang berbasis perkebunan seperti industri pengolahan kelapa sawit tumbuh dengan pesat.

Jenis industri yang mendominasi kelompok industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani dengan kode 104 adalah pabrik kelapa sawit (PKS). Jumlah PKS yang berskala industri besar dan sedang di Riau pada tahun 2010 adalah sebanyak 118 perusahaan atau mencapai 64,48% terhadap total perusahaan industri berskala besar dan sedang di Riau, bahkan pada tahun 2014 jumlah PKS sudah mencapai 220 perusahaan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada semua perusahaan yang ada juga mengalami penurunan selama periode 2010-2014, yaitu dari 55,820 orang pada tahun 2010 kemudian menurun menjadi 21,020 orang pada tahun 2014 atau turun sebanyak 8,60%, Walaupun dari aspek jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan, akan tetapi nilai produksi mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari 41,52 triliun pada tahun 2010 menjadi 54,97 triliun pada tahun 2014 atau meningkat sebanyak 54,97%. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, khususnya industri kelapa sawit, kelapa dan karet penting menjadi perhatian dan menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019 agar produk pertanian yang diproduksi dan diekspor bernilai lebih tinggi serta berdaya saing tinggi, *The Competitiveness Pyramid* telah menerangkan bahwa peningkatan PDRB khususnya PDRB per kapita suatu wilayah harus diawali dengan peningkatan investasi (teknologi, peralatan, infrastruktur dan sumberdaya manusia), Investasi ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan perdagangan serta daya saing wilayah tersebut.

Tabel 2.158:
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Kota
Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten Kota	Kinerja Industri					
	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Output (Rp.000)	Nilai Tambah (Rp.000)	NO/Tenaga Kerja (Rp.000)	NT/Tenaga Kerja (Rp.000)
Kuantan Singingi	-	2.428	1.267.493.926	395.282.338	522.032	162.802
Indragiri Hulu	29	3.155	1.874.413.580	68.787.025	594.109	21.803
Indragiri Hilir	-	-	2.023.198.240	655.984.069	-	-
Pelalawan	-	-	5.159.034.170	8.905.874.501	-	-
Siak	-	-	15.981.109.050	4.737.329.624	-	-
Kampar	-	5.732	1.541.248.940	605.641.169	59.896	23.537
Rokan Hulu	-	-	2.217.540.726	943.478.241	-	-
Bengkalis	-	8.601	-	-	-	-
Rokan Hilir	-	-	484.097.240	95.035.409	-	-
Kep.Meranti	12	-	-	-	-	-
Pekanbaru	22	3.602	1.516.324.977	359.912.643	420.968	99.920
Dumai	-	-	53.006.961.139	688.199.314	-	-
Provinsi Riau	217	64,002	223,553,742	55,799,272	3,493	872

Sumber: BPS Provinsi Riau, (Riau Dalam Angka, 2015)

Potensi ketersediaan bahan baku CPO, kelapa dan minyak mentah yang tersedia dalam jumlah yang besar di Provinsi Riau, selama ini sebagian besar di ekspor dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa serta pengolahan minyak serta komoditas karet dan sagu perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh oleh Provinsi Riau. Pengembangan industri pengolahan ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riautetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit, kelapa dan sagu) di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13/M-IND/PER/I/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, telah menetapkan Provinsi Riau sebagai klaster industri hilir kelapa sawit. Sasaran jangka menengah (2010–2014) adalah (1) terbentuknya klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Riau dan (2) terciptanya iklim usaha dan investasiyang kondusif, Sasaran jangka panjang (2015–2025) adalah (1) memperluas pengembangan produk akhir, (2)

terbentuknya *centre of excellent* industri oleokimia, (3) penguasaan pasar, (4) pemantapan industri berwawasan lingkungan, dan (5) terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Riau. Implementasi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit untuk pencapaian sasaran jangka menengah (2010 – 2014) dan sasaran jangka panjang (2015 – 2025) perlu menjadi perhatian khusus dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019.

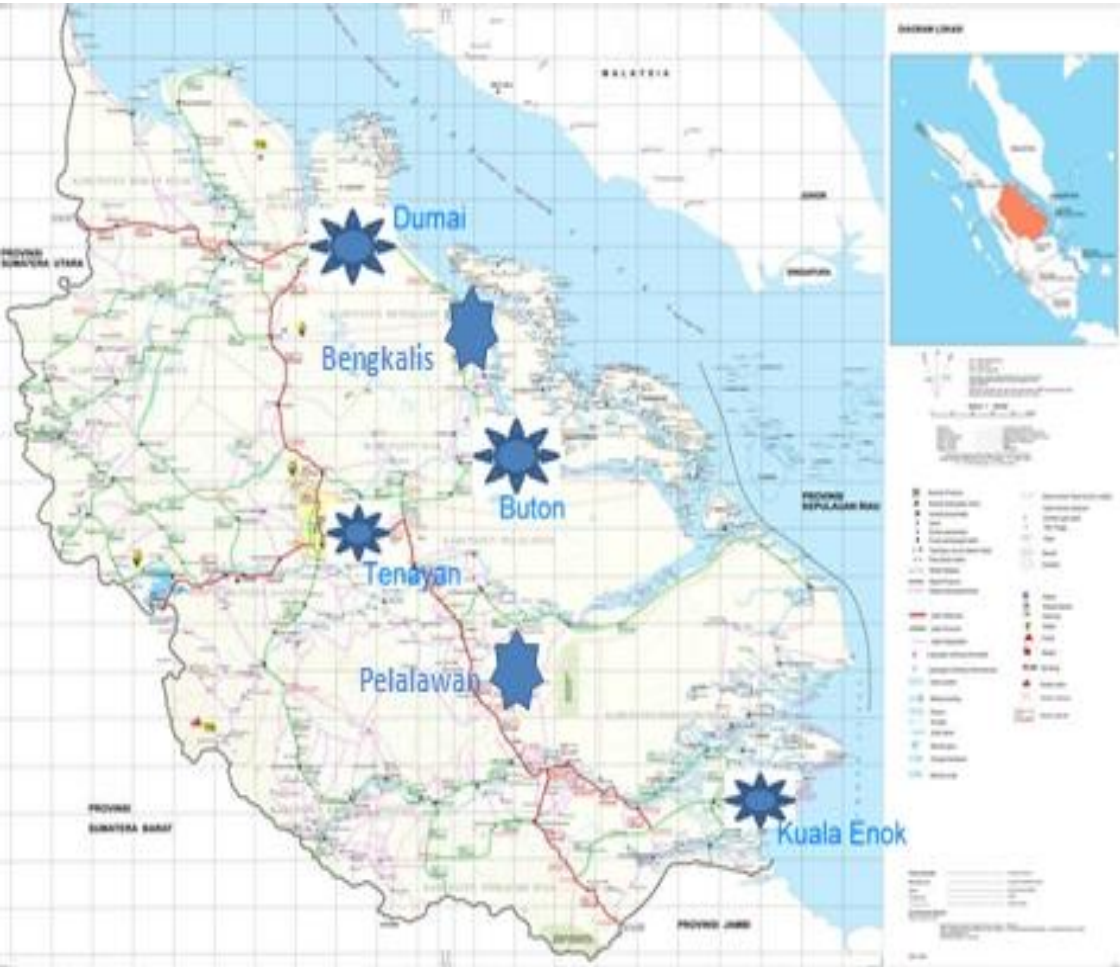
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga menetapkan Provinsi Riau menjadi wilayah pengembangan industri pengolahan kelapa melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 131/M-IND/PER/12/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Industri Pengolahan Kelapa. Implementasi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa untuk pencapaian sasaran jangka panjang (2015 – 2025) perlu menjadi perhatian khusus dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019.

Tabel 2.159:
Lokasi Kawasan Industri Provinsi Riau, 2015

No	Wilayah Industri	Luas (ha)	Lokasi
1	Kawasan Industri Dumai - Pelintung - Lubuk Gaung - Dock Yard - Pelindo (BK)	5.084,53 2.158,00 300,00 115,00	Kota Dumai
2	Kawasan Indutri Tanjung Buton	5.789,90	Kab. Siak
3	Kawasan Industri Buruk Bakul	3.220,00	Kab. Bengkalis
4	Kawasan Industri Kuala Enok	5.203,95	Kab. Indragiri Hilir
5	Kawasan Industri Tenayan Raya	3.247,54	Kota Pekanbaru
6	Kawasan Teknopolitan	3.754,00	Kab. Pelalawan
Jumlah		23.652,92	Provinsi Riau

Pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Provinsi Riau hingga tahun 2015 sebanyak 6 Wilayah yaitu di Kota Dumai (KI Pelintung, Lubuk Gaung dan Pelindo); Siak (KI-Tanjung Buton); Bengkalis (KI-Buruk Bakul); Inhil (KI-Kuala Enok); dan Kota Pekanbaru (KI-Tenayan Raya); Pelalawan (Teknopolitan). Namun dari 6 wilayah WPPI yang ada dan yang mendapatkan prioritas oleh pemerintah pusat ada 3 wilayah yaitu Kota Dumai (KI Pelintung, Lubuk Gaung dan Pelindo); Siak (KI-Tanjung Buton); Bengkalis (KI-Buruk Bakul). Enam dari wilayah tersebut hanya Kota Dumai (KI Pelintung, Lubuk Gaung dan Pelindo) yang sudah beroperasi. Peta lokasi WPPI

Provinsi Riau dengan keluasan masing-masing sebagaimana Tabel 2.159 dan Gambar 2.108.



Gambar 2.108
Peta Lokasi Kawasan Industri Yang Terdapat di Provinsi, 2015

2.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

Pengembangan trasmigrasi bertujuan untuk pemerataan pembangunan dibidang kependudukan disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki lahan sebagai aset produksi. Pembangunan trasmigrasi sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melakukan sinkronisasi pembangunan melalui pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pendapatan petani di lokasi transmigrasi.

Tabel 2.160:
Target dan Realisasi Penempatan Transmigran
Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target (KK)	Realisasi		% Target thd Realisasi
		Kepala keluarga	Jiwa	
2010	18	18	73	100
2011	70	70	262	100
2012	16	16	69	100
2013	30	30	115	100
2014	29	29	113	100

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun2015)

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi penerima transmigran terbesar di Indonesia, Namun mulai tahun 2000-an, jumlah penempatan transmigran di Provinsi Riau menurun drastis. Selama periode 2010 – 2014, antara target dan realisasi penempatan transmigran mencapai 100%.

Tabel 2.161:
Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal
Provinsi RiauTahun 2011 – 2014

No	Daerah Asal	2011		2012		2013		2014	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Jawa Timur	15	52	-	-	-	-	-	-
2	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengungsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
7	APPDT	55	210	16	69	30	115	-	-
8	Banten	15	52	-	-	-	-	-	-
Jumlah		85	314	16	69	30	115	-	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Daerah asal transmigran dari luar Provinsi Riau hanya dari Jawa Timur yaitu pada tahun 2011 sebanyak 15 KK dengan 52 Jiwa. Sedangkan pada trasmigrasi APPDT berjalan hingga tahun 2013 dengan jumlah KK sebanyak 30 dengan jumlah penduduk sebanyak 115 orang. Pembangunan transmigrasi lokal oleh pemerintah daerah juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan diwilayah terisolir dan marginal. Pembangunan trasmigrasi juga membantu pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan wilayah dan sektoral sehingga anggaran pembangunan nasional dapat terserap dan membantu pembangunan didaerah yang tertinggal. Perkembangan transmigrasi dari 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.161.

2.3.3.8 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Selama periode 2011-2015 menunjukkan bahwa produksi perikanan Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 149,93 ribu ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 178,24 ribu ton pada tahun 2015 atau naik sebanyak 4,55% per tahun. Jenis usaha perikanan yang mengalami peningkatan produksi adalah perairan umum sebanyak 9,44% per tahun diikuti oleh perikanan laut sebanyak 4,09% per tahun dan kolam naik sebanyak 8,60% per tahun%, namun perikanan tambak mengalami penurunan produksi sebanyak 49,98% per tahun atau turun dari 5,75 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 0,13 ribu ton pada tahun 2015.

Berdasarkan data tersebut maka upaya peningkatan produksi perikanan tambak harus menjadi prioritas mengingat perikanan tambak merupakan salah jenis usaha perikanan yang secara umum manajemennya dapat diatur sesuai kebutuhan teknologinya sehingga untuk melakukan perencanaan peningkatan produksi akan lebih mudah untuk dilakukan dan memilih jenis ikan yang dikembangkan.

Tabel 2.162:
Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau
Tahun 2011-2015

Jenis Usaha Perikanan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perikanan Laut	90.505,30	95.611,00	93.279,20	107.306,20	105.296,30	4,09
Perairan Umum	12.285,70	16.068,60	17.455,90	18.384,10	17.097,80	9,44
Tambak	5.753,00	645,90	329,30	311,20	134,98	-49,98
Kolam	41.395,90	38.462,50	50.607,80	54.560,50	55.709,16	8,60
Jumlah	149.939,90	150.788,00	161.672,20	180.562,00	178.238,24	4,55

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari sejumlah 178.238,24 ton total produksi ikan, sebanyak 105.296,30 ton atau 59,07% merupakan hasil perikanan laut, sedangkan 72.941,94 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, keramba, sawah, tambak dan jaring apung. Di samping itu diperoleh juga informasi bahwa kabupaten/ kota sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2015 adalah Kabupaten Rokan Hilir

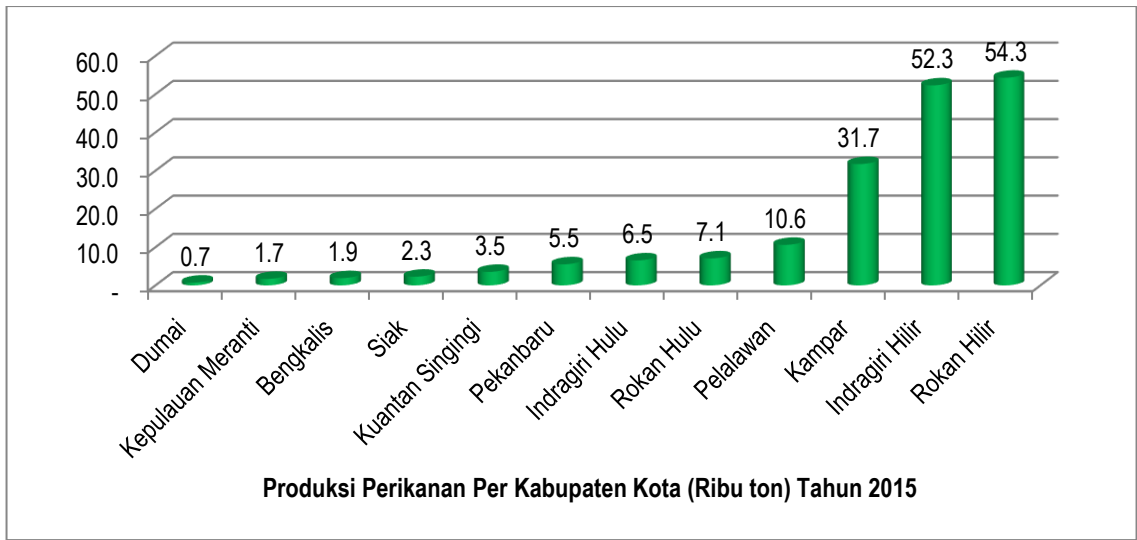
54.237,7 ton (30,46%), Kabupaten Indragiri Hilir 52.294,70 ton (29,34%) dan Kabupaten Kampar 31.722,75 ton (17,80 %), sisanya sebanyak 39.927,57 ton (22,40%) tersebar di kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.163:
Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten Kota	Jenis Usaha Perikanan					Kontribusi (%)
		Perikanan Laut	Perairan Umum	Tambak	Kolam	Jumlah	
1	Kuantan Singingi	-	347,20	-	3.190,03	3.537,23	1,98
2	Indragiri Hulu	-	2.729,40	-	3.803,48	6.532,88	3,67
3	Indragiri Hilir	45.442,40	6.343,90	85,77	422,63	52.294,70	29,34
4	Pelalawan	4.584,60	193,60	-	5.820,11	10.598,31	5,95
5	Siak	444,30	584,90	-	1.242,64	2.271,84	1,27
6	Kampar	-	2.326,70	-	29.396,05	31.722,75	17,80
7	Rokan Hulu	-	1.885,70	-	5.177,19	7.062,89	3,96
8	Bengkalis	1.479,70	-	36,70	378,18	1.894,58	1,06
9	Rokan Hilir	51.101,50	2.292,00	-	899,72	54.293,22	30,46
10	Kep. Meranti	1.650,00	-	1,55	48,52	1.700,07	0,95
11	Pekanbaru	-	394,40	-	5.215,60	5.610,00	3,15
12	Dumai	593,80	-	10,96	115,01	719,77	0,40
Riau		105.296,30	17.097,80	134,98	55.709,16	178.238,24	100,00

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Jika dilihat kabupaten kota yang produksi perikanannya produksi tertinggi provinsi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kampar. Kontribusi sub sektor perikanan dari ketiga wilayah tersebut mencapai 77,64% dari produksi perikanan Provinsi Riau Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.109 berikut.



Gambar 2.109
Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

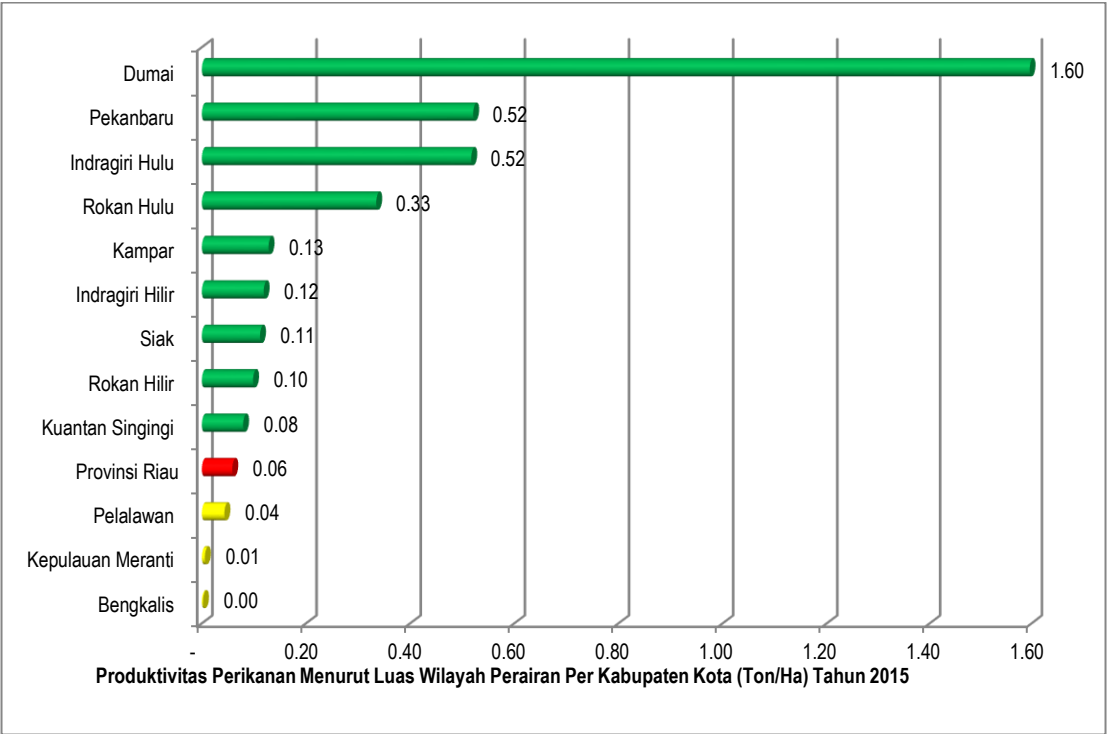
Munculnya kabupaten Kampar sebagai produsen ikan terbanyak ketiga di Provinsi Riau harus diapresiasi karena sebagian besar atau sebanyak 29.396,05 ton (52,60%) produksi perikanan diperoleh melalui budidaya dan hanya sebanyak 2.326,70 ton (13,61%) yang diperoleh melalui perikanan tangkap dari perairan umum.

Tabel 2.164:
Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2015

Kabupaten Kota	Luas Perairan		Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
	(ha)	Persentase		
Kuantan Singingi	4.384	0,21	347,2	0,0792
Indragiri Hulu	5.277	0,25	2.729	0,5172
Indragiri Hilir	436.297	20,82	51.786	0,1187
Pelalawan	110.313	5,26	4.778	0,0433
Siak	9.216	0,44	1029,2	0,1117
Kampar	18.173	0,87	2.327	0,1280
Rokan Hulu	5.631	0,27	1.886	0,3349
Bengkalis	677.472	32,33	1.480	0,0022
Rokan Hilir	542.880	25,91	53.394	0,0984
Kepulauan Meranti	284.727	13,59	1.650	0,0058
Pekanbaru	757	0,04	394,4	0,5210
Dumai	372	0,02	593,8	1,5962
Provinsi Riau	2.095.497	100,00	122.394	0,0584

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Berpedoman pada data tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat dua kabupaten yang memiliki perairan laut dan umum yaitu kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah perairan sebanyak 677.472 ha (32,33%) dan Kep. Meranti seluas 284.727 ha (13,59%). Namun wilayah tersebut produksi perikanannya lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang memiliki wilayah perairan yang lebih sempit. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.110 rendahnya produktivitas wilayah tersebut dan perlunya peningkatan produktivitas perikanan bagi kedua wilayah tersebut.



Gambar 2.110
Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Selama ini, kekurangan suplai ikan di Provinsi Riau umumnya didatangkan dari Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Rendahnya produksi perikanan dibanding konsumsi yang selama ini dialami Provinsi Riau perlu menjadi perhatian serius dan menjadi isu strategis ke depan. Pada perikanan laut dan budidayanya, permasalahan terbatasnya kemampuan jelajah kapal penangkapan ikan nelayan dan *over fishing* disekitar pantai perlu diantisipasi melalui modernisasi kapal dan peralatan tangkap serta pengembangan budidaya perikanan laut. Pada perikanan perairan umum, upaya penegakan peraturan tentang pencemaran sungai perlu ditingkatkan disamping pengaturan penangkapan ikan diperairan umum. Khusus perikanan kolam keramba yang saat ini menjadi andalan produksi perikanan Provinsi Riau perlu diikuti pengembangan industri pengolahan ikan oleh UKM atau perusahaan besar sehingga harga ikan (patin) dapat stabil.

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan

2.3.4.1 Bidang Urusan Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

RPJPD Provinsi Riau disusun untuk jangka waktu 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Riau saat ini merupakan RPJMD tahap ke ketiga sejak era otonomi daerah dengan masa periode 2014-2019. Namun pada tahun 2016 dilakukan perubahan RPJMD dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah, RPJMN dan nawacita serta undang-undang 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan dalam urusan pemerintah. Setiap tahunnya RPJMD dijabarkan kedalam RKPD. Semua dokumen perencanaan ini selalu disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.165:
Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
Tahun 2012-2016 Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/kota	RPJPD	Periode RPJMD	RKPD				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Kuantan Singingi	-	2016-2021	√	√	√	√	√
2	Indragiri Hulu	√	2016-2021	√	√	√	√	√
3	Indragiri Hilir	√	2013-2018	√	√	√	√	√
4	Pelalawan	-	2016-2021	√	√	√	√	√
5	Siak	√	2016-2021	√	√	√	√	√
6	Kampar	√	2011-2016	√	√	√	√	√
7	Rokan Hulu	√	2016-2021	√	√	√	√	√
8	Rokan Hilir	-	2016-2021	√	√	√	√	√
9	Bengkalis	√	2016-2021	√	√	√	√	√
10	Kep, Meranti	√	2016-2021	-	-	-	√	√
11	Pekanbaru	√	2012-2017	√	√	√	√	√
12	Dumai	-	2016-2021	√	√	√	√	√
Provinsi Riau		2005-2025	2014-2019	√	√	√	√	√

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2016)

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD dan RKPD per kabupaten kota di sajikan pada Tabel 2.165. untuk dimaklumi bahwa dengan Pilkada serentak pada tahun

2015, pada tahun 2016 ini beberapa daerah yang telah mengikuti Pilkada serentak yakni Kuansing, Inhu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan dan Kota Dumai serta Kabupaten Kep. Meranti sedang melakukan penyusunan RPJMD untuk periode 2016-2021.

Jika dilihat aspek ketersediaan maka dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpetakaan persoalan dan isu strategis menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus dan lokus sesuai persoalan dan isu strategis yang ada. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan belum memperlihatkan perbaikan terhadap indikator pembangunan secara signifikan. Oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan pembangunan yang telah jalan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat maka kegiatan pembangunan harus fokus dan lokus sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah.

2.3.4.2 Bidang Urusan Keuangan

Perkembangan penerimaan keuangan daerah sangat penting karena merupakan faktor penting dalam pendanaan pembangunan. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan keuangan daerah harus terus dilakukan. Kewenangan daerah terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

- a. Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Berdasarkan kewenangan yang ada tersebut, maka dapat dilihat perkembangan penerimaan keunagn daerah Provinsi Riau dari kompnen PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapat yang sah dapat dilihat pada Tabel 2.166 berikut:

Tabel 2.166:
Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Ribu Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pendapatan Asli Daerah	1.732.696.559	2.181.221.661	2.481.635.421	2.946.911.680	3.407.516.235	18,51
2	Dana Perimbangan	2.888.346.651	3.793.934.763	3.797.458.032	3.805.272.167	3.127.803.926	3,46
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.473.322	664.273.709	658.627.308	648.436.030	871.739.480	4.764,27
Total		4.624.516.532	6.639.430.133	6.937.720.762	7.400.619.878	7.407.059.641	13,71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Riau (2016)

Pendapatan Daerah Provinsi Riau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 2.166 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih lebih kecil. Pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 13,71% per tahun dengan masing-masing pertumbuhan komponen pembentuk penerimaan seperti PAD sebesar 18,51% per tahun, Dana perimbangan menurun sebesar 3,46% per tahun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara meningkat sebesar 4.764,27% per tahun. Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik. Sementara dana perimbangan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu pemerintah provinsi Riau harus mencari terus dan berusaha meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3.4.3 Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Diklat

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang handal dalam memberikan pelayanan umum yang terbaik kepada masyarakat pemerintah Provinsi Riau telah menempatkan pegawai di semua instansi pemerintah Provinsi Riau.

Jumlah pegawai pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 8.057 orang dengan status 8.041 PNSD, 16 orang PNS dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 24 orang PNS yang dipekerjakan dan Titipan di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai pemerintah Provinsi Riau menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 1,35% yang berpendidikan SD dan SMP sebanyak 1,44%. Tingkat pendidikan terbanyak ialah sarjana strata satu (S1) sebesar 42,10% diikuti oleh tingkat pendidikan SMA sebanyak 30,21%. Sedangkan yang berpendidikan pasca sarjana strata tiga hanya 0,10% dapat dilihat pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167:
Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 2015

No	Tingkat Pendidikan	Orang	Distribusi (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	109	1,35
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	116	1,44
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.434	30,21
4	Diploma Satu (DI)	32	0,40
5	Diploma Dua (DII)	33	0,41
6	Diploma Tiga (DIII)	992	12,31
7	Diploma Empat (DIV)	16	0,20
8	Sarjana S1	3.392	42,10
9	Pasca Sarjana S2	925	11,48
10	Pasca Sarjana S3	8	0,10
Jumlah		8.057	100,00

Sumber: BKP2D Provinsi Riau, 2016

Selama periode 2014-2015, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sebanyak 1.078 orang dan menurun menjadi 872 orang pada tahun 2015. Berikut disajikan jenis, jumlah dan lama pegawai mengikuti Diklat spada tahun 2014-2015, sebagaimana Tabel 2.168.

Tabel 2.168:
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur (Diklat) Provinsi Riau Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Pembinaan fisik dan mental aparatur	200 kali	-
2	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	130 Orang	-
3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1 Orang Pejabat	-
4	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	6 Orang Pejabat	-
5	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	30 orang/ 93 hari	-
6	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	40 orang / 49 hari	-
7	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	40 orang / 24 hari / 1 kelas	-
8	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	80 orang / 19 hari / 2 kelas	-
9	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	-	17 Orang Widyaiswara
10	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	16 Orang PNS	-
11	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	22 Orang, Dokumen
12	Assessment Center Provinsi Riau	650 Orang	-
13	Diklat TOT Widyaiswara	-	15 Orang/8 Hari
14	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1 Kegiatan	-
15	Diklat Training of Fasilitator (TOF)	-	30 Orang / 10 Hari
16	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	Bahan-bahan Sosialisasi	-
17	Diklat Training Officer Course (TOC)	-	30 Orang / 13 Hari
18	Diklat Management of Training (MOT)	-	30 Orang / 10 Hari
19	Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	85 Orang	-
20	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	11 Orang
21	Diklat analisis kebutuhan diklat	-	60 Orang / 6 Hari
22	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	-	40 Orang / 7 Hari
23	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	-	30 Orang / 6 Hari
24	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	-	60Orang / 10 Hari
25	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	-	30 Orang/8 Hari
26	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	-	30 Orang / 5 Hari
27	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	-	30 Orang / 6
28	Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	-	30 Orang / 7 Hari
29	Diklat penata usahaan keuangan daerah	-	30 Orang / 10 Hari
30	Diklat bendahara keuangan daerah	-	30 Orang / 15 Hari
31	Diklat pengelolaan aset daerah	-	60 Orang/ 15 Hari
32	Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance	-	30 Orang / 7 Hari
33	Diklat Pengembangan e-government	-	30 Orang / 10 Hari
34	Diklat perencanaan tingkat dasar	-	30 Orang / 18 Hari
35	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	30 orang / 10 hari
36	Diklat bahasa inggris (TOEFL)	-	60 orang / 6 Hari
37	Diklat pengembangan potensi akademik	-	30 Orang
38	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	-	77 Orang

Sumber: BKP2D Provinsi Riau, 2016

2.3.4.4 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh karena itu kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa tidak bisa dilepaskan

dari peran penelitian. Berapa negara maju di dunia dewasa ini merupakan negara-negara maju di dalam penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian rekayasa. Jepang dan Skandinavia misalnya adalahdua negara meskipun miskin dalam sumber daya alam, tetapi merupakan negara paling makmur dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia karena kemajuan IPTEK yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Sebaliknya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi karena masih rendah pengembangan IPTEK menyebabkan Indonesia termasuk salah satu negara yang masih berkategori pendapatn rendah demikian halnya dengan Provinsi Riau.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dalam bidang R&D menunjukkan perkembangan baik dari aspek jumlah dan bidang keilmuan. Selama periode 2010-2016 penelitian yang telah dilakukan sebanyak 12 bidang keilmuan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169:
Bidang dan Jumlah Penelitian dan Pengembangan (R&D) Provinsi Riau
Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, 2010-2016

No	Penelitian Bidang	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendidikan	5	2	1	8	7	0	1
2	Pariwisata	-	1	2	3	7	0	1
3	Pertanian	10	4	8	7	5	1	0
4	Perikanan	-	-	3	2	1	4	1
5	Peternakan	-	-	1	4	0	0	1
6	Kehutanan	1	-	1	-	1	1	1
7	Industri	-	-	2	1	4	0	1
8	Teknologi	1	-	6	8	9	3	4
9	Kebudayaan	1	-	4	1	3	0	0
10	Kesehatan	1	-	-	-	0	0	1
11	SDM	9	4	3	3	3	3	0
12	Lainnya	6	6	25	25	8	6	7
Jumlah		34	34	19	56	62	48	18

Sumber: Balitbang Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penelitian terbanyak dilakukan pada tahun 2013 sebanyak 62 judul dan terendah tahun 2015 dan 2016 sebanyak 18 judul dengan judul penelitian terbanyak adalah bidang lainnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penelitian sebesar 53,78% per tahun. Namun yang juga dapat dicermati

adalah tidak adanya konsistensi jumlah per bidang penelitian. Sebaiknya penelitian dilakukan secara konsisten dengan melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan sumberdaya dan prospek yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau kedepan.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari penelitian ini adalah seberapa banyak dari jumlah dan bidang penelitian tersebut yang sudah diterapkan oleh masyarakat atau dunia usaha sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan jasa serta perbaikan sosial budaya masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4.5 Bidang Urusan Pengawasan

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah Inspektorat mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2015 secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Riau sebesar 95%. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Provinsi Riau memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih guna untuk keberhasilan dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian kedepan terkait dengan beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain: Keterbatasan waktu dan Keterlambatan penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga tidak semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat diperiksa tidak semua pengaduan dapat ditangani/dilakukan pemeriksaan; Kurangnya tenaga pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor; Kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan;

Kurangnya jumlah SDM di lingkungan Inspektorat, sehingga tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan.

Untuk penyelesaian masalah diatas maka diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain: Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri; Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan; Melakukan Pembinaan pada setiap obyek yang diperiksa; Mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional

2.4.1. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tabel 2.170 memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Selama periode 2011-2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan, Misalnya pada tahun 2011, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku sebesar Rp 93,54 juta/RT/tahun meningkat menjadi Rp 146,58 juta/RT/tahun pada tahun 2015. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran RT sebesar 14,80% per tahun. Sedangkan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 22,44 juta/kapita/tahun meningkat menjadi Rp 35,18 juta/kapita/tahun pada tahun 2015 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 27,34% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi pada harga konstan juga meningkat selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011, rasio pengeluaran konsumsi harga konstan terhadap jumlah rumah tangga sebesar Rp 83,76 juta/RT/tahun dan meningkat menjadi Rp 97,76 juta/RT/tahun pada tahun 2015. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Provinsi Riau meningkat sebesar 3,94% per tahun. Sedangkan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada harga konstan pada tahun 2011 sebesar Rp 20,10 juta/kapita/tahun meningkat menjadi Rp 23,48 juta/kapita/tahun pada tahun 2015 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 18,08% per tahun, Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi terhadap konsumsi pangan dan non pangan per kapita RT sebesar 10,85% per tahun atau tingkat kenaikan harga pada konsumsi pangan lebih tinggi dari non pangan.

Tabel 2.170 :
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita Provinsi
Riau Tahun 2011 – 2015

No ,	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
A	Harga Beraku (Milyar Rupiah)						
1	Total Pengeluaran RT	128.523.814,32	149.001.458,78	171.473.394,95	197.162.815,61	222.173.095,96	14,670
2	Jumlah RT	1.374.024	1.410.674	1.447.823	1.485.232	1.522.673	2,60
3	Rasio (Juta Rp/RT)	93,54	105,62	118,44	132,75	145,91	11,76
4	Rasio (Juta Rp/Kapita)	22,44	52,14	28,42	32,02	35,18	27,34
B	Harga Konstan (Milyar Rupiah)						
1	Total Pengeluaran RT	115.084.788,48	122.841.589,61	131.131.818,39	140.479.393,08	148.856.385,60	6,65
2	Jumlah RT	1.374.024	1.410.674	1.447.823	1.485.232	1.522.673	2,60
3	Rasio (Juta Rp/RT)	83,76	87,08	90,57	94,58	97,76	3,94
4	Rasio (Juta Rp/Kapita)	20,10	42,99	21,73	22,72	23,48	18,08

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015 dan Olahan)

Sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku per kabupaten kota tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi di Provinsi Riau sebesar Rp. 169,48 juta/RT/Tahun dan Rp. 40,35 juta/kapita/tahun atau lebih tinggi 27,88% dari pengeluaran konsumsi RT/tahun dan 27,17% dari pengeluaran konsumsi per kapita/tahun Provinsi Riau, Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga terendah pada harga berlaku per kabupaten kota tahun 2014 adalah Kabupaten Rokan Hulu dimana pengeluaran konsumsi rumah tangganya sebesar Rp. 102,37 juta/tahun atau lebih rendah 22,76% per RT/tahun dari Provinsi Riau dan Rp. 25,09 juta/kapita/tahun atau 20,93% per kapita/tahun lebih rendah dari Provinsi Riau.

Sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan harga konstan per kabupaten kota tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru masih merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi di Provinsi Riau sebesar Rp. 118,02 juta/RT/Tahun dan Rp. 28,10 juta/kapita/tahun atau lebih tinggi 24,98% dari pengeluaran konsumsi RT/tahun dan 22,39% dari pengeluaran konsumsi per kapita/tahun Provinsi Riau, Sedangkan

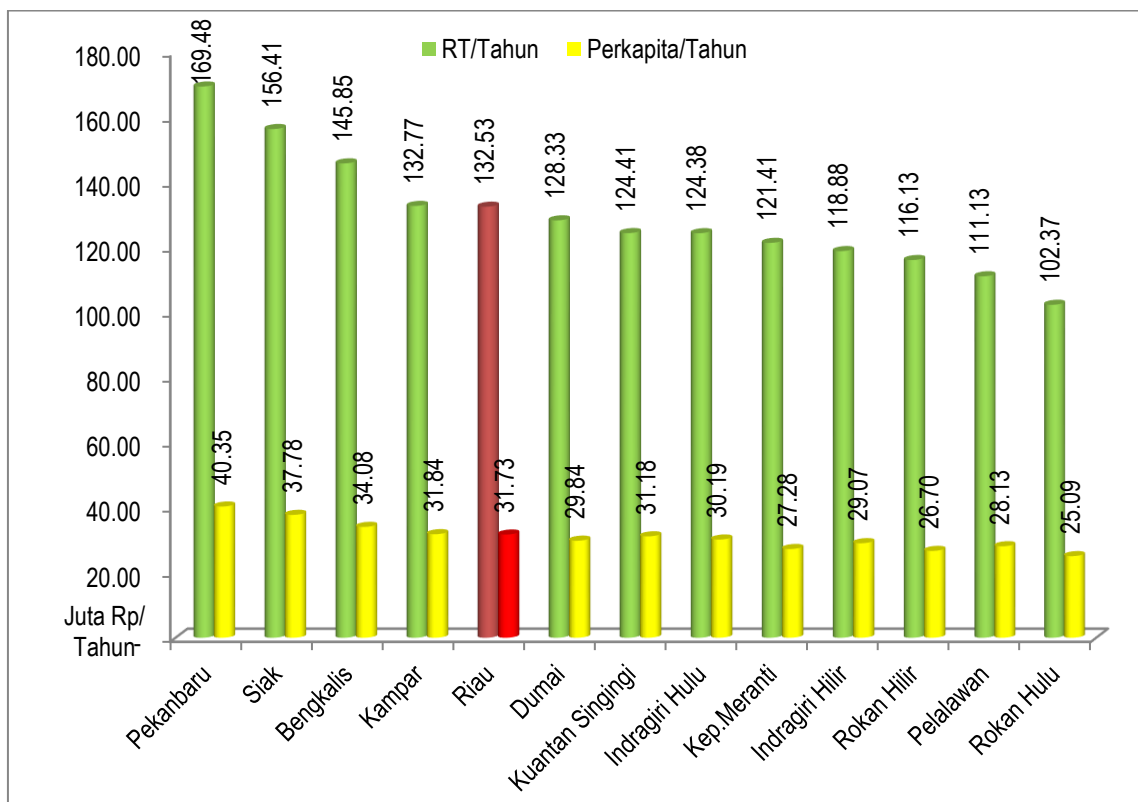
pengeluaran konsumsi rumah tangga terendah pada harga konstan per kabupaten kota tahun 2014 adalah Kabupaten Rokan Hulu dimana pengeluaran konsumsi rumah tangganya lebih rendah 17,30% per RT/tahun dan untuk perkapita/tahun dimana Rokan Hilir lebih rendah 17,16% dari Provinsi Riau.

Tabel 2.171:
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT)
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten/ Kota	Jumlah RT	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita	Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita
Kuantan Singingi	77,905	9,691,807	124,41	31,18	6,893,101	88,48	22,18
Indragiri Hulu	97,254	12,096,876	124,38	30,19	9,000,359	92,54	22,46
Indragiri Hilir	169,946	20,203,417	118,88	29,07	14,751,895	86,80	21,22
Pelalawan	95,554	10,618,651	111,13	28,13	7,659,379	80,16	20,29
Siak	103,408	16,174,457	156,41	37,78	10,687,338	103,35	24,96
Kampar	185,609	24,643,486	132,77	31,84	17,412,643	93,81	22,50
Rokan Hulu	139,516	14,282,108	102,37	25,09	10,894,742	78,09	19,14
Bengkalis	125,307	18,276,505	145,85	34,08	12,693,496	101,30	23,67
Rokan Hilir	144,274	16,755,121	116,13	26,70	11,935,167	82,73	19,02
Kep,Meranti	40,399	4,904,988	121,41	27,28	3,638,233	90,06	20,24
Pekanbaru	240,889	40,826,024	169,48	40,35	28,429,597	118,02	28,10
Dumai	65,171	8,363,601	128,33	29,84	6,249,278	95,89	22,30
Riau	1,485,232	196,837,040	132,53	31,73	140,245,229	94,43	22,96

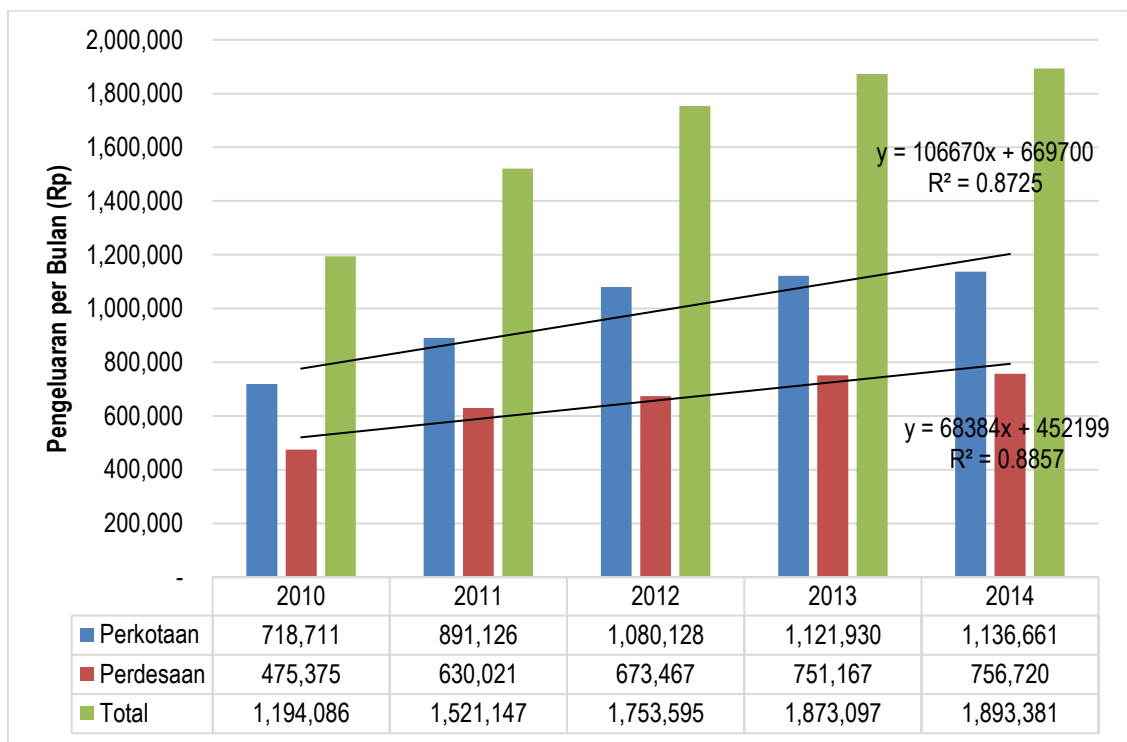
Sumber: BPS Provinsi Riau (PDRB Provinsi Riau 2010-2014, Riau Dalam Angka, 2015 dan Olahan)

Gambar 2.111 menunjukkan bahwa terdapat 4 kabupaten Kota yang pengeluaran konsumsi RT/tahun dan Perkapita/Tahun lebih tinggi dari Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan Kampar dan 8 Kabupaten Kota yang yang pengeluaran konsumsi RT/tahun dan Perkapita/Tahun lebih rendah dari Provinsi Riau antara lain Dumai, Kuansing, Inhu, Kep, Meranti, Inhil, Rohil, Pelalawan dan Rohul.



Gambar 2.111
Pengeluaran Konsumsi Per Rumah Tangga dan Per Kapita
Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014

Demikian halnya dengan pengeluaran konsumsi pada perkotaan dan pedesaan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.111, Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2010 sampai 2014 di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 9,60% dengan slope kenaikan Rp. 66,970, sedangkan di wilayah pedesaan juga mengalami peningkatan sebesar 9,74% dengan slope kenaikan hanya Rp. 45,219. Ini berarti bahwa secara nominal kenaikan pengeluaran konsumsi RT perkotaan per tahun lebih tinggi Rp. 21,751 dari pengeluaran konsumsi RT pedesaan per tahun. Secara keseluruhan perkembangan waktu dari tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa di pedesaan lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan perkotaan dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 88,50% sementara perkotaan hanya 87,20%.



Sumber: BPS Provinsi riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015)

Gambar 2.112
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan Per Kapita/Bulan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan). Berdasarkan Tabel 2.172 dapat dilihat bahwa selama periode 2010-2014, rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT harga berlaku sebesar 13,96% per tahun atau naik dari Rp. 45,69 juta/RT/tahun pada tahun 2010 menjadi Rp. 77,04 juta/RT/tahun pada tahun 2014, Sedangkan konsumsi non pangan per kapita/tahun naik dari Rp. 11,42 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 18,47 juta pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,24% per tahun

Selama periode yang sama rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT harga konstan sebesar 4,51% per tahun atau naik dari Rp. 45,69 juta/RT/tahun pada tahun 2010 menjadi Rp. 54,51 juta/RT/tahun pada tahun 2014, Sedangkan konsumsi non pangan per kapita/tahun naik dari Rp. 11,42 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 13,07 juta pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

17,47% per tahun, Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi terhadap konsumsi non pangan per kapita RT sebesar 10,77% per tahun.

Tabel 2.172:
Perkembangan Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) dan Per Kapita/Tahun Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
A	Harga Beraku (Milyar Rupiah)						
1,	Total Pengeluaran RT	60,698,19	72,804,29	84,918,58	98,345,08	114,416,87	17,18
2,	Jumlah RT	1,328,461	1,374,024	1,410,674	1,447,823	1,485,232	2,83
3,	Rasio (Juta Rp/RT)	45,69	52,99	60,20	67,93	77,04	13,96
4,	Rasio (Juta Rp/Kapita)	11,42	12,71	29,65	16,29	18,47	28,24
B	Harga Konstan (Milyar Rupiah)						
1,	Total Pengeluaran RT	60,698,19	65,575,59	70,116,38	75,291,59	80,966,61	7,47
2,	Jumlah RT	1,328,461	1,374,024	1,410,674	1,447,823	1,485,232	2,83
3,	Rasio (Juta Rp/RT)	45,69	47,73	49,70	52,00	54,51	4,51
4,	Rasio (Juta Rp/Kapita)	11,42	11,44	24,48	12,47	13,07	17,47

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015 dan Olahan)

Sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan pada harga berlaku per kabupaten kota tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan tertinggi di Provinsi Riau sebesar Rp. 104,10 juta/RT/tahun dan Rp. 24,79 juta/kapita/tahun atau lebih tinggi 35,12% dari pengeluaran konsumsi non pangan RT/tahun dan 34,44% dari pengeluaran konsumsi non pangan per kapita/tahun Provinsi Riau, Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan terendah pada harga berlaku per kabupaten kota tahun 2014 adalah Kabupaten Rokan Hulu dimana pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangganya lebih rendah 26,25% per RT/tahun dan 24,46% per kapita/tahun lebih rendah dari Provinsi Riau,

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan pada harga konstan per kabupaten kota tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan tertinggi di Provinsi Riau sebesar Rp. 70,91 juta/RT/tahun dan Rp. 16,88 juta/kapita/tahun atau lebih tinggi 30,09% dari pengeluaran konsumsi non pangan RT/tahun dan 29,35% dari pengeluaran konsumsi non pangan per kapita/tahun Provinsi

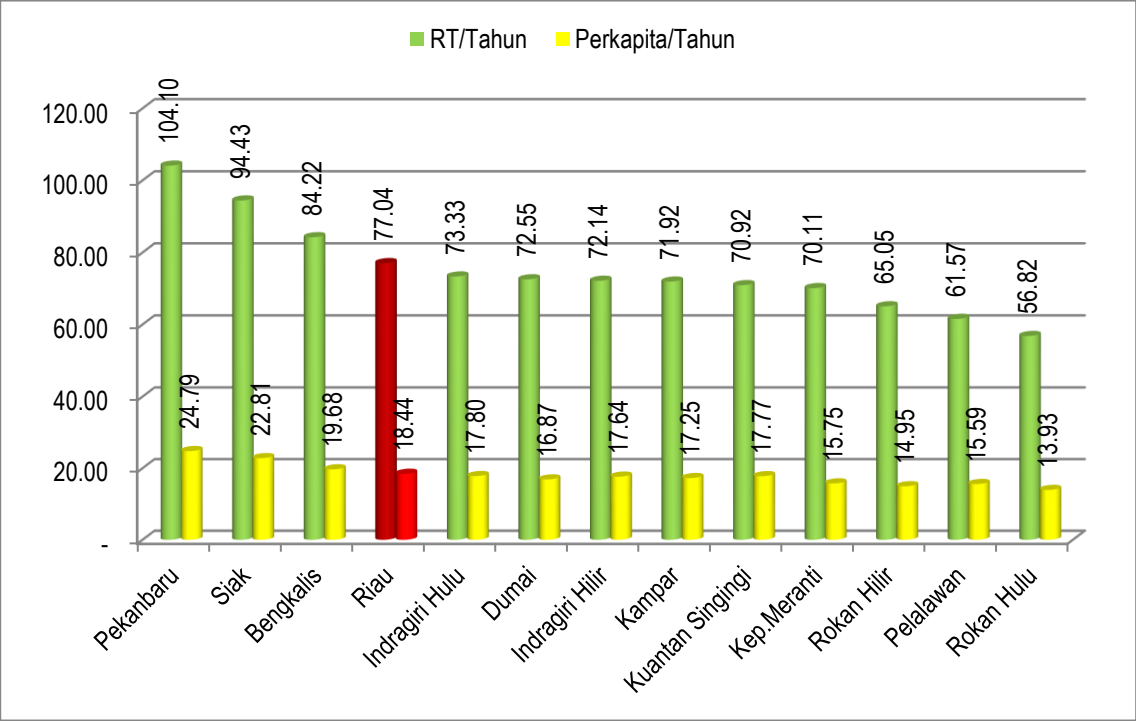
Riau, Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan terendah pada harga berlaku per kabupaten kota tahun 2014 adalah di Kabupaten Rokan Hulu dimana pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangganya lebih rendah 20,11% per RT/tahun dan 18,24% per kapita/tahun lebih rendah dari Provinsi Riau.

Tabel 2.173 :
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) dan Per Kapita/Tahun Menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten/ Kota	Jumlah RT	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita	Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita
Kuantan Singingi	77,905	5,524,739	70,92	17,77	3,898,852	50,05	12,54
Indragiri Hulu	97,254	7,132,058	73,33	17,80	5,218,211	53,66	13,02
Indragiri Hilir	169,946	12,260,241	72,14	17,64	8,852,527	52,09	12,74
Pelalawan	95,554	5,883,473	61,57	15,59	4,245,502	44,43	11,25
Siak	103,408	9,764,438	94,43	22,81	6,403,045	61,92	14,96
Kampar	185,609	13,349,224	71,92	17,25	9,742,066	52,49	12,59
Rokan Hulu	139,516	7,927,634	56,82	13,93	6,075,808	43,55	10,67
Bengkalis	125,307	10,552,888	84,22	19,68	7,272,222	58,04	13,56
Rokan Hilir	144,274	9,384,789	65,05	14,95	6,514,851	45,16	10,38
Kep,Meranti	40,399	2,832,211	70,11	15,75	2,038,619	50,46	11,34
Pekanbaru	240,889	25,077,335	104,10	24,79	17,081,631	70,91	16,88
Dumai	65,171	4,727,840	72,55	16,87	3,623,277	55,60	12,93
Riau	1,485,232	114,416,870	77,04	18,44	80,966,611	54,51	13,05

Sumber: BPS Provinsi Riau (PDRB Provinsi Riau 2010-2014, Riau Dalam Angka, 2015 dan Olahan)

Gambar 2.113 menunjukkan bahwa terdapat 3 kabupaten Kota yang pengeluaran konsumsi RT/tahun dan Perkapita/Tahun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan 8 Kabupaten Kota yang yang pengeluaran konsumsi RT/tahun dan Perkapita/Tahun lebih rendah dari Provinsi Riau antara lain Dumai, Kuansing, Inhu, Kep, Meranti, Inhil, Rohil, Pelalawan dan Rohul. Tinggi rendahnya pengeluaran tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan inflasi dimasing-masing wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu arah kebijakan pembangunan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan inflasi dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta pengurangan biaya logistik dengan perbaikan infrastruktur dasar.

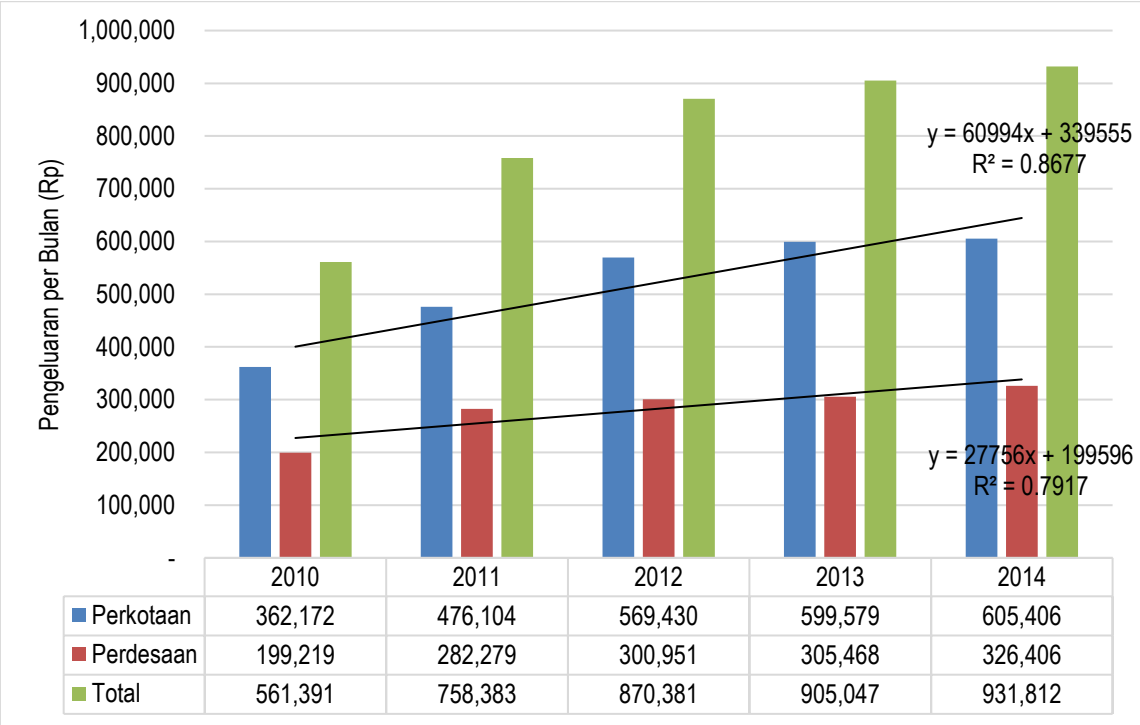


Gambar 2.113
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga dan Per Kapita Tertinggi dan Terendah Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2014

Gambar 2.114 menyajikan tentang perkembangan pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkotaan dan perdesaan per kapita/bulan tahun 2010-2014 di Provinsi Riau, Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita/bulan rumah tangga perkotaan maupun rumah tangga perdesaan di Provinsi Riau cenderung meningkat. Secara total pengeluaran per kapita/bulan rumahtangga di perdesaan meningkat dari Rp 561,391 per bulan pada tahun 2010 menjadi 931,812 juta per bulan pada tahun 2014, Pengeluaran per kapita/bulan rumah tangga perkotaan meningkat dari Rp 362,172 per bulan menjadi Rp 605,406 per bulan. Sedangkan untuk rumah tangga perdesaan meningkat dari Rp199,219 per bulan menjadi Rp 326,406 per bulan.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan di wilayah perkotaan mengalami peningkatan dengan slope kenaikan Rp. 33.955, sedangkan di wilayah pedesaan juga dengan slope kenaikan hanya Rp. 19.959. Secara keseluruhan perkembangan waktu dari tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa di perdesaan lebih rendah pengaruhnya dibandingkan perkotaan dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 79.10% sementara pekotaan hanya 86,70%. Hal ini dapat dimaklumi karena kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap konsumsi non pangan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan

seiring dengan kemajuan perkotaan dan kebutuhan masyarakat perkotaan seperti sektor jasa dan lainnya.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015)

Gambar 2.114
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkotaan dan Pedesaan Per Kapita/Bulan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

2.4.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total dan sektoral daerah menggambarkan tentang tingkat kemampuan daerah dengan menggunakan rumus nilai tambah total (PDRB Total) atau nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) dibagi dengan jumlah angkatan kerja pada suatu daerah. Tabel 2.174 menyajikan tentang produktivitas total dan produktivitas sektoral di Provinsi Riau.

Tabel 2.174 memperlihatkan bahwa produktivitas total Provinsi Riau berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 produktivitas total Provinsi Riau sebesar Rp 189,68 per jiwa (angkatan kerja), meningkat menjadi Rp 234,96 per jiwa pada tahun 2015, Produktivitas tertinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, namun kondisinya mengalami penurunan dari Rp 74,17 juta per jiwa pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 52,47 juta per jiwa pada tahun 2015.

Walaupun produktivitas tertinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, tetapi dengan tetap menggandalkan sektor perekonomian ini dalam jangka panjang bukanlah kebijakan yang tepat. Sebagai sektor yang bersifat *unrenewable resources*, sektor ini pada suatu saat akan habis dieksplorasi. Oleh karenanya upaya pengembangan sektor-sektor yang bersifat *renewable resources* perlu digalakkan seperti sector pertanian dan industri pengeolahan.

Lebih lanjut dari Tabel 2.175 dapat dilihat bahwa sektor perekonomian yang juga memperlihatkan peningkatan yang tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, sektor perdagangan, konstruksi, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Dengan kata lain upaya untuk mengembangkan kelima sektor ini, khususnya sektor industri pengolahan, sebagai sektor andalan pada masa depan akan lebih menjanjikan untuk mendorong perekonomian Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi.

Tabel 2.174 :
Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)
1	PDRB HB Sektoral Dengan Migas	485,649,34	189,68	558,492,71	222,79	607,498,58	231,58	679,692,19	252,18	652,386,43	234,96
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	99,561,48	38,89	106,538,79	42,50	115,444,55	44,01	133,769,94	49,63	145,693,53	52,47
B	Pertambangan dan Penggalian	189,902,42	74,17	235,437,55	93,92	256,395,34	97,74	268,570,84	99,65	199,857,88	71,98
C	Industri Pengolahan	107,243,25	41,89	115,048,88	45,90	124,879,98	47,60	141,859,68	52,63	155,756,42	56,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	180,73	0,07	182,19	0,07	180,49	0,07	258,78	0,10	287,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,95	0,02	63,38	0,03	62,20	0,02	65,79	0,02	72,06	0,03
F	Konstruksi	30,647,06	11,97	34,843,61	13,90	38,268,20	14,59	45,437,97	16,86	51,673,30	18,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,895,93	12,85	37,354,93	14,90	40,289,00	15,36	53,063,66	19,69	57,993,24	20,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2,875,28	1,12	3,311,21	1,32	3,760,84	1,43	4,457,96	1,65	5,177,49	1,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,669,57	0,65	1,991,79	0,79	2,356,06	0,90	3,273,31	1,21	3,342,15	1,20
J	Informasi dan Komunikasi	2,558,18	1,00	2,990,13	1,19	3,148,73	1,20	3,539,38	1,31	4,077,41	1,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,416,36	1,33	4,253,65	1,70	4,925,50	1,88	5,442,51	2,02	5,674,55	2,04
L	Real Estate	3,306,69	1,29	3,694,45	1,47	4,057,17	1,55	4,658,53	1,73	5,404,85	1,95
M,N	Jasa Perusahaan	16,66	0,01	20,59	0,01	23,42	0,01	28,44	0,01	32,29	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,182,55	2,81	8,282,74	3,30	8,777,01	3,35	9,246,79	3,43	10,076,89	3,63
P	Jasa Pendidikan	1,997,69	0,78	2,121,22	0,85	2,271,82	0,87	2,755,17	1,02	3,267,19	1,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	612,05	0,24	705,87	0,28	787,62	0,30	955,16	0,35	1,176,04	0,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,524,49	0,60	1,651,73	0,66	1,870,65	0,71	2,308,28	0,86	2,824,03	1,02
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2,560,402,00	-	2,506,776,00	-	2,623,310,00	-	2,695,247,00	-	2,776,614,95	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015)

Tabel 2.175 :
Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

No	Uraian	Kuantan Singingi		Indragiri Hulu		Indragiri Hilir		Pelalawan	
		(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)
1	PDRB HB Sektoral Dengan Migas	23,982,72	174,45	33,805,08	193,11	47,842,72	163,64	37,864,19	218,96
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,557,11	84,06	9,296,68	53,11	24,380,65	83,39	14,282,17	82,59
B	Pertambangan dan Penggalian	2,381,27	17,32	6,198,69	35,41	226,20	0,77	1,267,25	7,33
C	Industri Pengolahan	6,030,42	43,86	8,665,67	49,50	11,440,37	39,13	18,765,91	108,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,30	0,04	9,02	0,05	16,98	0,06	6,29	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,04	0,04	14,70	0,08	8,29	0,03	2,90	0,02
F	Konstruksi	1,731,06	12,59	4,277,28	24,43	2,445,04	8,36	725,74	4,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	836,35	6,08	2,856,43	16,32	6,296,77	21,54	1,431,14	8,28
H	Transportasi dan Pergudangan	102,57	0,75	341,72	1,95	511,30	1,75	79,15	0,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,74	0,34	251,94	1,44	204,04	0,70	64,45	0,37
J	Informasi dan Komunikasi	83,39	0,61	190,62	1,09	282,75	0,97	161,12	0,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	157,71	1,15	319,63	1,83	315,72	1,08	214,77	1,24
L	Real Estate	165,05	1,20	382,29	2,18	343,07	1,17	210,71	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,00	1,00	0,01	1,29	0,00	0,43	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,23	4,48	533,14	3,05	898,54	3,07	402,09	2,33
P	Jasa Pendidikan	130,19	0,95	217,55	1,24	237,46	0,81	111,20	0,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,79	0,28	55,37	0,32	57,87	0,20	44,51	0,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	96,27	0,70	193,34	1,10	176,39	0,60	94,38	0,55
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	137,480,00	-	175,055,00	-	292,361,00	-	172,931,00	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015, Kabupaten dan Kota Dalam Angka 2011-2015)

**Sambungan Tabel 2.175 :
Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014**

No	Uraian	Siak		Kampar		Rokan Hulu		Bengkalis	
		(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)
1	PDRB HB Sektoral Dengan Migas	85,443,59	488,13	67,958,92	206,85	25,163,55	105,23	162,706,05	631,11
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,997,67	74,25	15,008,23	45,68	13,817,48	57,78	9,052,11	35,11
B	Pertambangan dan Penggalian	40,907,66	233,70	31,806,99	96,81	1,873,68	7,84	129,876,47	503,77
C	Industri Pengolahan	24,949,15	142,53	12,713,53	38,70	5,164,03	21,59	12,607,25	48,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,06	0,03	32,39	0,10	16,74	0,07	15,80	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	0,02	3,59	0,01	1,82	0,01	10,70	0,04
F	Konstruksi	2,985,73	17,06	3,837,04	11,68	874,15	3,66	2,525,58	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,450,72	8,29	1,921,93	5,85	1,345,70	5,63	5,786,96	22,45
H	Transportasi dan Pergudangan	67,15	0,38	156,83	0,48	120,57	0,50	234,80	0,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,18	0,17	48,05	0,15	91,98	0,38	296,45	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	137,78	0,79	226,22	0,69	220,68	0,92	310,03	1,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	275,76	1,58	222,75	0,68	274,10	1,15	293,94	1,14
L	Real Estate	276,43	1,58	549,26	1,67	165,91	0,69	264,82	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	3,78	0,02	1,98	0,01	1,24	0,01	3,13	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	575,84	3,29	934,75	2,85	929,08	3,89	927,41	3,60
P	Jasa Pendidikan	341,32	1,95	261,17	0,79	113,27	0,47	250,43	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,44	0,69	91,50	0,28	46,28	0,19	68,02	0,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	315,21	1,80	142,70	0,43	106,83	0,45	182,17	0,71
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	175,043,00	-	328,545,00	-	239,138,00	-	257,808,00	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015, Kabupaten dan Kota Dalam Angka 2011-2015)

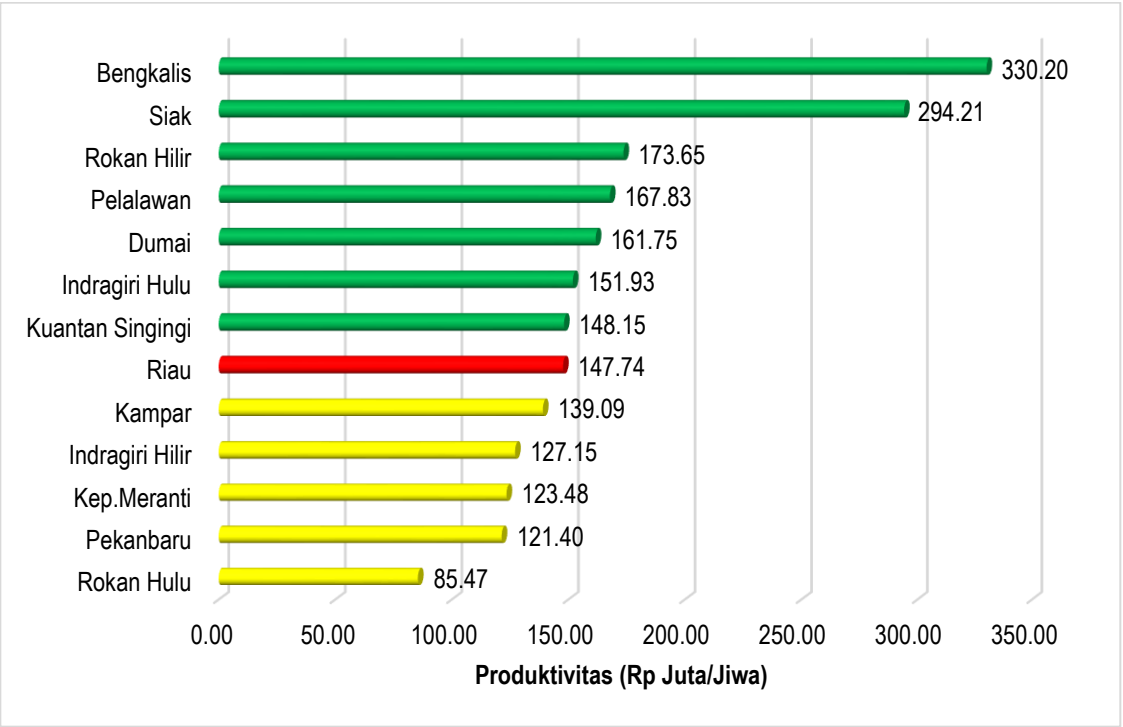
Sambungan Tabel 2.175 :
Perkembangan Produktivitas Total dan Sektoral Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

No	Uraian	Rokan Hilir		Kep, Meranti		Pekanbaru		Dumai	
		(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)	(Milyar Rp)	Produktivitas (Juta Rp)
1	PDRB HB Sektoral Dengan Migas	74,736,82	293,94	16,206,90	185,46	74,434,46	165,52	23,595,35	187,94
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,186,30	71,53	5,198,31	59,49	1,156,51	2,57	1,437,57	11,45
B	Pertambangan dan Penggalian	42,140,58	165,74	4,552,07	52,09	13,76	0,03	108,90	0,87
C	Industri Pengolahan	10,006,25	39,35	2,966,48	33,95	14,714,05	32,72	12,409,08	98,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,06	0,03	6,84	0,08	125,11	0,28	13,19	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,75	0,01	0,60	0,01	11,68	0,03	3,65	0,03
F	Konstruksi	498,11	1,96	616,54	7,06	22,534,97	50,11	2,512,18	20,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,443,00	9,61	1,919,64	21,97	21,368,00	47,52	4,689,15	37,35
H	Transportasi dan Pergudangan	70,85	0,28	310,49	3,55	1,793,56	3,99	727,11	5,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	161,84	0,64	43,35	0,50	1,864,16	4,15	207,38	1,65
J	Informasi dan Komunikasi	144,62	0,57	116,89	1,34	1,583,79	3,52	234,99	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	185,07	0,73	50,36	0,58	2,763,21	6,14	366,93	2,92
L	Real Estate	194,93	0,77	59,77	0,68	2,092,80	4,65	113,12	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,00	0,28	0,00	13,54	0,03	1,22	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	418,54	1,65	282,85	3,24	2,554,75	5,68	494,47	3,94
P	Jasa Pendidikan	134,00	0,53	34,42	0,39	819,22	1,82	122,92	0,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,62	0,14	9,21	0,11	329,49	0,73	37,78	0,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	105,17	0,41	38,78	0,44	695,87	1,55	115,70	0,92
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	254,261,00	-	87,386,00	-	449,694,00	-	125,545,00	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015, Kabupaten dan Kota Dalam Angka 2011-2015)

Sementara itu jika dilihat dari dari 12 Kabupaten Kota, dimana produktivitas tertinggi diatas Provinsi Riau adalah Kabupaten Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir, Tingginya produktivitas ketiga daerah tersebut disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian masing 79,82% untuk kabupaten Bengkalis, 56,39% untuk kabupaten Rokan Hilir dan 47,88% untuk Kabupaten Siak, Manakala 9 daerah lainnya memiliki produktivitas dibawah Provinsi Riau dan yang paling rendah produktivitasnya adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan perkembangan data terkini (tahun 2015) dapat dilihat perbandingan produktivitas total kabupaten/kota dibandingkan dengan produktivitas Provinsi Riau.

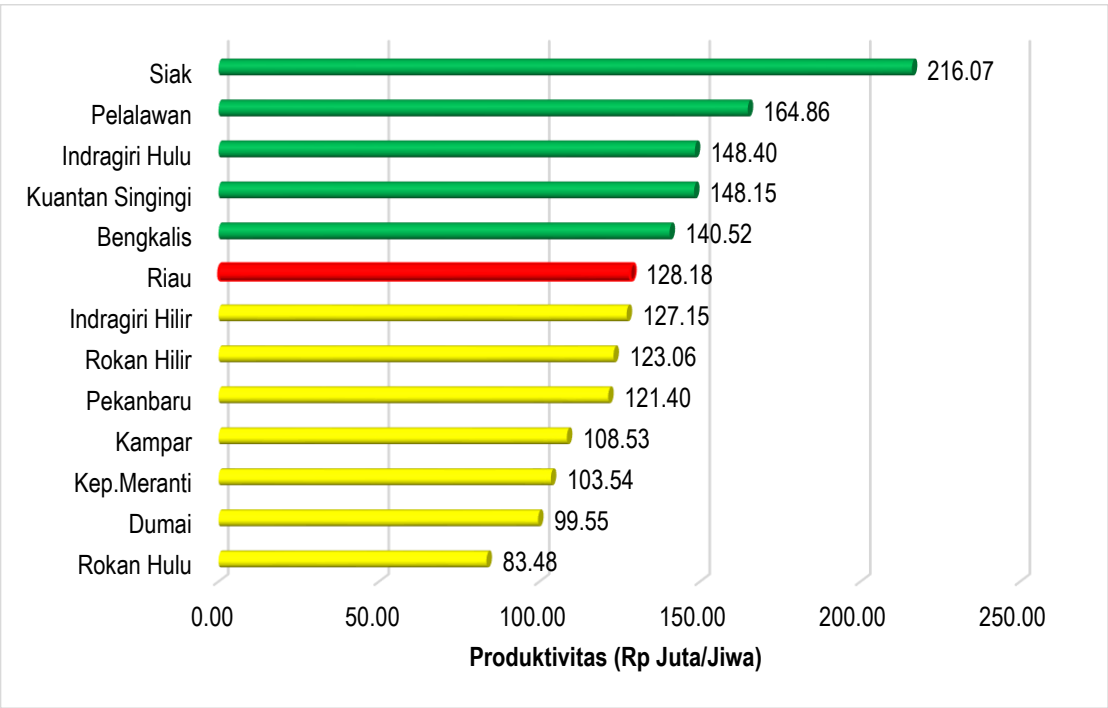


Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Gambar 2.115
Produktivitas (PDRB Dengan Migas Terhadap Angkatan Kerja)
Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 2.115 dapat dilihat bahwa Produktivitas Total Provinsi Riau dengan migas sebesar Rp 147.74 juta/angkatan kerja. Terdapat tujuh kabupaten/kota dengan produktivitas total lebih tinggi dari Produktivitas Total Provinsi Riau, berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Sengingi.

Sementara itu kabupaten/kota dengan produktivitas total yang lebih rendah dari Produktivitas Total Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Gambar 2.116
Produktivitas Total Berdasarkan PDRB Tanpa Migas Tahun 2015
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Produktivitas Total Provinsi Riau tanpa migas sebesar Rp 128.18 juta/jiwa angkatan kerja (Gambar 2.116). Terdapat lima kabupaten dengan produktivitas total lebih tinggi dari Produktivitas Total Provinsi Riau, berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Bengkalis. Sementara itu kabupaten/kota dengan produktivitas total yang lebih rendah dari Produktivitas Total Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu.

2.4.4. Nilai Tukar Petani

Harga yang diterima petani merupakan harga tertimbang dari harga setiap komoditas pertanian yang diproduksi/dijual petani,

Penimbang yang digunakan adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas, Harga komoditas pertanian merupakan harga rata-rata yang diterima petani atau "Farm Gate", Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani, Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petani,

Konsep NTP dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani, NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya, Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani,

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani, Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar, Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar,

Nilai tukar petani selama periode 2011-2015 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani (IT) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.176 terus menurun. Pada tahun 2011

indek harga yang diterima petani (IT) 142,67 menurun menjadi 115,48 pada tahun 2015. Begitu juga indek yang dibayar petani (IB) selalu mengalami penurunan setiap tahun yatu 134,91 tahun 2011 menjadi 121,52 pada tahun 2015. Secara keseluruhan terdapat penurunan ratio nilai tukar petani dari tahun 2011 ke tahun 2015, yakni dari rata-rata 105,05 menjadi 95,03. Hal ini didorong oleh anjloknya harga TBS dan ojol (karet) yang diproduksi petani. Meski IT yang diterima terus menurun, sementara indeks harga yang dibayar petani (IB) lebih tinggi dibandingkan IT. Dengan demikian kondisi petani pada tahun 2015 mengalami defisit dimana pengeluaran petani lebih besar dari penerimaannya.

Tabel 2.176 :
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau
Tahun 2010 – 2015

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuh an/Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	142,67	134,24	106,1	112,58	115,48	(4,55)
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	134,91	130,92	109,23	118,48	121,52	(2,12)
3.	NTP	105,05	102,54	97,14	95,02	95,03	(2,46)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015) dan BRS, 2016

Pada Tabel 2.177 dapat dilihat bahwa nilai tukar petani sub sektor pangan mengalami penurunan setiap tahun yaitu 112,69 tahun 2011 turun menjadi 107,27 pada tahun 2015. Begitu juga sub sektor hortikultura mengalami penurunan dari 114,75 tahun 2011 menjadi 96,05 pada tahun 2015, Selain itu nilai tukar petani sub sektor peternakan juga mengalami penurunan dari 101,05 pada tahun 2011 menjadi 101,03 pada tahun 2015. Nilai Tukar Petani pada sub sektor perkebunan, hortikultura NTP kurang dari 100, yang menunjukkan bahwa indeks beli petani ke 2 sub sektor tersebut lebih kecil. Sub sektor yang memiliki NTP yang cenderung meningkat adalah sub sektor perikanan, meningkat dari 92,19 pada tahun 2011 menjadi 110,43 pada tahun 2015. Pertumbuhan nilai NTP dapat dilihat pada Tabel 2.177.

Dengan didasarkan kepada konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani, maka perlu upaya perbaikan NTP terutama pada tiga sub sektor hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan peningkatan kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan

pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya dimasa yang akan datang. Peningkatan kesejahteraan identik dengan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/ meningkatkan kebutuhan konsumsinya, Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.177:
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Sub Sektor
Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pangan	112,69	113,60	109,66	100,44	107,27	(1,07)
2.	Hortikultura	114,75	117,25	112,36	97,26	96,05	(4,17)
3.	Perkebunan	103,57	99,87	95,47	95,03	89,92	(3,45)
4.	Peternakan	101,05	101,11	101,01	98,88	101,03	0,01
5.	Perikanan	92,19	90,91	90,66	105,13	110,43	4,83

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015) dan BRS, 2016

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian (*on-farm*) dipengaruhi oleh besarnya asset produksi pertanian (terutama pemilikan lahan usaha), jenis komoditas yang diusahakan, produktivitas, dan harga produksi. Besarnya pendapatan dari *off-farm* dipengaruhi oleh kesempatan/peluang berusaha dan tingkat upah. Tingkat pendapatan *non farm* juga dipengaruhi oleh aset dan kemampuan untuk dapat akses terhadap layanan, iklim usaha, produktivitas usaha dan harga produk yang dihasilkan.

2.4.5. Kriminalitas

Secara keseluruhan angka kriminalitas di Provinsi Riau relatif kecil sehingga suasananya relatif aman di dibandingkan dengan wilayah sekiranya, Meskipun rendah adanya kecendrungan angka kriminalitas semakin meningkat sejalan dengan semakin tinggi nya jumlah penduduk dan terbukanya wilayah Riau, Tindak kriminal yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan penipuan, Sedangkan tindak kriminal yang lainnya dengan frekuensi yang relatif kecil. Perlu dicatat bahwa kasus-kasus kriminalitas ini umumnya dapat di tangani oleh pihak kepolisian.

Tabel 2.178:
Angka Kriminalitas Tahun 2010-2014 di Provinsi Riau

No	Kriminalitas	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kasus Narkoba	532	642	823	880	831	12,56
2	Kasus Pembunuhan	36	29	33	37	28	(4,46)
3	Kejahatan Sosial	214	111	128	365	328	35,55
4	Kasus Penganiayaan	1.238	1.189	1.045	1.090	1.076	(3,26)
5	Kasus Pencurian	4.064	3.348	3.626	3.813	4.187	1,41
6	Kasus Penipuan	626	413	381	444	435	(6,82)
7	Jumlah Kasus	6.710	5.732	6.036	6.629	6.885	1,10
8	Jumlah Penduduk	5.538.367	5.726.241	5.879.109	6.033.268	6.188.442	2,81
9	Angka Kriminalitas (7) / (8)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2015)

Angka kriminalitas selalu di upayakan untuk dieleminir, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat,memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti penurian,penipuan dan perampokan,maupun kekerasan dan kejahatan susila,masih sering terjadi, Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini,keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegitaannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujtkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dengan baik apabila pemerintahan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kualitas dan kuantitas, tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Selama tahun 2010-2014, pertumbuhan kriminalitas meningkat sebesar 0,52% per tahun, Pertumbuhan kriminalitas yang tinggi, berturut-turut adalah kasus narkoba, kasus kejahatan sosial, dan kasus pencurian, masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 9,33%, 8,92%, dan 0,60%, Meskipun kasus-kasus kriminalitas di Riau jumlahnya relatif kecil dan umumnya dapat di tangani,namun upaya pencegahan harus terus mendapat perhatian sehingga iklim investasi Provinsi Riau dapat terus meningkat.

Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat juga mulai menular ke Provinsi Riau meski

dengan frekuensi yang relatif sedikit, Sepanjang tahun 2013, jumlah demonstrasi di Provinsi Riau sebanyak 162 demonstrasi, Penyebab demonstrasi dengan frekuensi terbanyak adalah masalah tenaga kerja yaitu sebanyak 53 demonstrasi diikuti masalah lahan sebanyak 34 demonstrasi, terkait politik dan hukum 23 demonstrasi, masalah pemerintah daerah dan pusat 21 demonstrasi dan masalah pendidikan 2 demonstrasi, serta masalah lainnya 29 demonstrasi. Dengan frekuensi yang relatif kecil, pelaksanaan demonstrasi umum dilakukan dengan damai.

Tabel 2.179:
Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar
Pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014

Lembaga	Tahun					Pertumbuh an/Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Ormas	105,00	78,00	4,00	7,00	8,00	(7,83)
LSM	26,00	110,00	2,00	3,00	6,00	93,72
LNL	7,00	2,00	-	-	-	(71,43)
Jumlah	138,00	190,00	6,00	10,00	14,00	11,88

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (2015)

Selama periode 2011-2015, jumlah Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau cenderung berfluktuatif menurun yaitu dari 105 Ormas pada tahun 2011 menjadi 8 Ormas pada tahun 2015. Kondisi yang relatif sama pada jumlah LSM dan LNL, Kondisi ini berbeda dengan kondisi lapangan dimana jumlah Ormas, LSM dan LNL terus meningkat. Oleh karena itu pembinaan Ormas, LSM dan LNL perlu terus ditingkatkan lembaga-lembaga tersebut dapat tetap berperan dalam pembangunan masyarakat provinsi Riau.

2.4.6. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan satu indikator kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Riau dimana kelompok yang tidak produktif masih cukup tinggi ketergantungannya terhadap kelompok usia yang produktif, Hal itu, menimbulkan kesulitan bagi kelompok produktif untuk melepaskan diri terhadap kelompok yang tidak produktif (lansia), Usaha-usaha

pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ini belum terukur secara jelas untuk mengurangi beban kehidupan kelompok usia yang tidak produktif lagi, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.180 berikut ini.

Angka ketergantungan atau tingkat ketergantungan adalah rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun), dimana rasio ini menggambarkan beban tanggungan setiap 100 orang penduduk produktif terhadap tidak produktif.

Tabel 2.180:
Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2011– 2015

No	Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2.015	
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	1.902.108	1.965.299	2.039.917	1.948.699	1.981.101	1,08
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	145.757	15.062	155.483	167.427	177.103	214,02
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	2.047.865	2.115.919	2.195.400	2.116.126	2.158.204	1,36
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	3.690.678	3.813.254	3.935.830	4.072.316	4.186.198	3,20
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	53,45	52,89	52,40	51,96	51,56	(0,90)

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2016)

Secara umum, rasio ketergantungan di Provinsi Riau berfluktuasi yaitu dari 100 penduduk produktif mengnanggung beban 53,45 jiwa tidak produktif pada tahun 2011 menjadi 51,56 jiwa pada tahun 2015, Tingkat ketergantungan yang ada di Provinsi Riau masih di bawah ideal, sehingga pendapatan keluarga masih tersedot untuk kebutuhan keluarga. Hal lain yang perlu dicermati adalah usia produktif yang laju pertumbuhannya diduga merupakan penduduk pendapatan yang bekerja di Riau dan umumnya tidak membawa keluarga, Dengan demikian, gambaran peningkatan tingkat ketergantungan sedikit bias berdasarkan fakta lapangan yang ada.

2.4.7. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan)

Meskipun secara kuantitas angka tenaga kerja di Provinsi Riau (lulusan S1/S2/S3) cenderung meningkat namun tingkat kesiapakaian ketenagakerjaan tersebut masih rendah, Hal itu ditandai oleh banyaknya lowongan-lowongan yang tidak terisi sesuai

dengan kualifikasi dan kompetensinya, Dilain pihak, jumlah tenaga kerja yang tersedia terus bertambah dari tahun ke tahun dari lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau dan yang datang dari luar Provinsi Riau, Tabel berikut ini menggambarkan rasio lulusan S1/S2/S3 dalam kurun waktu 2005-2014.

Selama periode 2010 hingga 2014, kualitas tenaga kerja di Provinsi Riau yang ditunjukkan dari lulusan S1/S2/S3 semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.181. Pada tahun 2010, rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 275,21point dari total penduduk kemudian meningkat menjadi 472,97 pada tahun 2014 dari jumlah penduduk dengan pertumbuhan 15,07% per tahun.

Meski kualitas tenaga kerja di Provinsi Riau relatif meningkat, namun hal ini perlu dicermati secara mendalam, karena peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ini umumnya didorong oleh penduduk migrasi dari daerah yang mempunyai daya saing yang lebih baik sehingga memiliki peluang kerja lebih baik dibandingkan tenaga kerja lokal. Salah satu sebab rendahnya daya saing SDM Riau dalam memenuhi pasar tenaga kerja lokal adalah belum terdesainnya dengan baik pengembangan SDM yang mengarah pada pengembangan potensi ekonomi daerah seperti industri hilir komoditas unggulan. Sehingga dengan perkembangan industri hilir komoditas unggulan belum berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap ketersediaan SDM lokal yang dapat merebut peluang pekerjaan pada industri tersebut. Keadaan ini perlu mendapat perhatian agar kesenjangan yang terjadi dan gap antara pendatang dengan penduduk tempatan tidak semakin melebar yang akan memberikan dampak sosial dikemudian harinya. Perlu ketegasan Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk konsisten dalam pengembangan SDM yang mengarah pada pengembangan perekonomian daerah serta menegakkan peraturan daerah yang mengatur tentang prioritas penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi SDM yang sudah tersedia.

Tabel 2.181:
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Riau

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	164,489	211,752	251,990	269,681	299,681	16,47
2	Jumlah penduduk	5,976,928	5,738,543	5,929,173	6,131,230	6,336,185	1,52
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	275,21	369,00	425,00	439,85	472,97	15,07

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011-2014), RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Riau 2010-2014

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.182
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KONDISI UMUM							
1.1	Aspek Geografi							
1.1.1	Luas Wilayah (ha)	10,982,659.00	10,982,659.00	10,982,659.00	10,982,659.00	10,982,659.00	N/A	
	a. Luas Daratan (ha)	8,887,162.46	8,887,162.46	8,887,162.46	8,887,162.46	8,887,162.46	N/A	
	b. Luas Lautan (ha)	2,095,496.54	2,095,496.54	2,095,496.54	2,095,496.54	2,095,496.54	N/A	
1.1.2	Hidrologi							
	a. Penyediaan Sumber Air Baku (M ³)	39,138,876	39,150,332	39,187,035	31,010,619	33,088,717	N/A	
1.1.3	Klimatologi							
	a. Jumlah Hari Hujan (hari)	211.00	217.00	118.00	137.25	170.53	N/A	
	b. Jumlah Curah Hujan (mm)	2,404.00	2,636.00	1,462.00	2,032.67	2,414.09	N/A	
	c. Suhu (°C)							
	1. Maksimum	34.70	32.90	33.60	32.40	34.15	N/A	
	2. Minimum	21.70	23.60	23.40	24.10	22.45	N/A	
	d. Kelembaban Udara (%)	74.50	76.08	77.96	78.08	76.71	N/A	
1.1.4	Penggunaan Lahan							
1.1.5	Potensi Pengembangan Wilayah							
1.1.6	Wilayah Rawan Bencana							
	a. Frekwensi Bencana	12.00	27.00	29.00	44.00	20.00	N/A	
	b. Korban Meninggal (orang)	-	2.00	4.00	2.00	4.00	N/A	
	c. Korban Menderita (orang)	7,669.00	16,134.00	46,900.00	15,642.00	18,425.00	N/A	
	d. Rumah Hancur (Unit)	315.00	188.00	267.00	359.00	290.00	N/A	
	e. Rumah Rusak (Unit)	-	-	-	127.00	-	N/A	
1.2	Demografi							
	a. Jumlah Penduduk	5,574,928	5,726,241	5,879,109	6,033,268	6,188,442	N/A	
	b. Pertumbuhan Penduduk							
	c. Kepadatan Penduduk							
II	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
2.1.1	Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)							
	a. Harga Konstan Tanpa Migas (Rp Miliar)	296,159.65	314,580.26	331,787.20	351,413.42	358,490.27	N/A	

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Milyar)	410,215.84	425,626.00	436,187.51	447,951.61	448,936.60	N/A	<
	c. PDRB Per Kapita (Rp. Juta)							
	1. Harga Berlaku Dengan Migas	172.16	196.25	195.86	199.40	220.65		
	2. Harga Berlaku Tanpa Migas	97.97	99.74	103.49	113.08	116.73		
	3. Harga Konstan Dengan Migas	133.11	131.72	124.59	120.19	117.04		
	4. Harga Konstan Tanpa Migas	85.59	85.49	86.77	88.26	88.03		
2.1.2	Pertumbuhan Ekonomi (%)							
	a. Pertumbuhan Ekonomi - Tanpa Migas (%)	6.96	6.22	5.47	5.92	2.01		
	b. Pertumbuhan Ekonomi - Dengan Migas (%)	5.57	3.76	2.48	2.70	0.22	4.79	<
2.1.3	Inflasi (%)	5.09	3.35	8.83	8.65	2.65	3.40	<
2.1.4	PDRB per kapita HK (Rp)							
	a. Harga Konstan Tanpa Migas (Rp Juta)	51.72	53.51	54.99	56.79	55.38		
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Juta)	71.64	72.39	72.29	72.39	70.76		
2.1.5	Indek Gini Ratio	0.36	0.40	0.37	0.38	0.37	0.40	<
2.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson - TM (Indeks)	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	N/A	
2.1.7	ICOR	5.11	7.86	12.06	11.35	N/A	N/A	
2.1.8	Persentase Penduduk Miskin (%)							
	c. Penduduk Miskin (Jiwa)	472,450.00	481,310.00	511,470.00	498,280.00	562,920.00	28,432,887	<
	d. Tingkat Kemiskinan (%)	8.17	8.05	8.42	7.99	8.82	11.13	<
	e. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun)	296,379.00	310,603.00	350,129.00	379,223.00	417,164.00		
	f. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.36	1.13	1.18	1.20	1.45		>
	g. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.39	0.25	0.24	0.29	0.45		>
2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.24	71.76
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.32	70.49	70.67	70.76	70.93	71.05	71.20
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11.78	11.79	12.27	12.45	12.74	12.96	13.19
	c. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.29	8.34	8.38	8.47	8.49	8.56	8.61
	d. Pengeluaran Per Kapita Riil (Rp 000)	9,957.00	10,058.00	10,180.00	10,262.00	10,364.00	10,452.67	10,544.67
2.2.2	Angka Partisipasi Kasar							
	a. SD/MI (%)	103.59	103.57	115.20	113.40	113.12	111.02	115.80
	b. SMP/MTS (%)	89.96	93.30	106.24	119.33	95.22	89.73	107.50
	c. SMA/SMK/MA (%)	71.82	68.73	90.84	74.92	71.69	71.06	92.37
2.2.3	Angka Partisipasi Murni							
	a. SD/MI (%)	91.63	92.62	94.13	95.27	93.64	94.79	95.09

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. SMP/MTS (%)	66.26	70.18	83.08	88.44	76.44	71.45	90.67
	c. SMA/SMK/MA (%)	53.31	53.06	67.82	57.33	54.59	54.96	69.38
2.2.4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)							
	a. Gizi kurang	0.74	na	1.57	1.28	1.03	1.15	1.30
	b. Gizi baik	na	na	9.05	6.60	7.70	6.43	6.74
	c. Gizi lebih	na	na	2.90	2.00	2.40	1.93	1.68
2.2.5	AKB/AKABA/AKI							
	a. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (Persen)	82.1	89.9	91.00	92.30	89.80	89.83	89.23
	b. Persalinan di fasilitas kesehatan (Persen)	93.5	97	78,01*	86,80*	59,00**	65.00	72.00
	c. Kunjungan Antenatal (K4) (Persen)	87.6	90	89.40	92.40	86.70	86.80	74.00
	d. Persentasi kunjungan pasien ke Rumah Sakit							
2.2.6	Angka Kesakitan DBD dan Malaria							
	a. Angka Kesakitan DBD (Per 100.000 Penduduk)	54.40	18.40	23.45	38.20	51.40	49.50	48.00
	b. Angka Kesakitan Malaria (Per 1000 Penduduk)	0.38	3.40	0.24	0.14	0.10	0.15	0.15
2.2.7	Jumlah Gedung Kesenian	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2.2.8	Ketenagakerjaan							
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%)	66.38	62.90	63.44	63.31	63.22	63.39	63.52
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5.32	4.30	5.48	6.56	7.83	7.66	7.53
2.2.8	Jumlah PMKS dan PSKS							
	a. Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	N/A	N/A	432.00	1,524.00	2,011.00	1,307.00	1,307.00
	b. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan PSKS serta pendamping yang diberdayakan	N/A	N/A	736.00	1,073.00	675.00	1,220.00	1,220.00
III	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
3.1	Pendidikan							
3.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	a. SD/MI (Sekolah/Penduduk 7 - 12 Tahun)	253.00	226.00	206.00	204.00	223.00	32.00	
	b. SMP/MTS (Sekolah/Penduduk 13 - 15 Tahun)	214.00	239.00	239.00	238.00	228.00	36.00	
	c. SMA/SMK/MA(Penduduk 16 - 18 Tahun/Ruang Kelas)	42.00	44.00	48.00	45.00	45.00	39.00	
3.1.2	Rasio murid terhadap guru							
	a. SD/MI (Murid/Guru)	16.59	18.83	16.00	16.00	15.00		
	b. SMP/MTS (Murid/Guru)	13.49	13.60	15.00	14.00	11.00		
	c. SMA/SMK/MA (Murid/Guru)	13.15	16.29	14.00	14.00	12.00		
3.1.3	Rasio murid terhadap kelas							

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. SD/MI (Jumlah Murid/Kelas)	28.00	32.00	25.00	22.00	24.00		
	b. SMP/MTS (Jumlah Murid/Kelas)	24.00	28.00	30.00	28.00	28.00		
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Murid/Kelas)	42.00	44.00	30.00	28.00	30.00		
3.1.4	Rasio guru terhadap kelas							
	a. SD/MI (Jumlah Guru/Kelas)	1.99	1.83	1.51	1.79	1.79		
	b. SMP/MTS (Jumlah Guru/Kelas)	1.96	1.74	2.22	2.44	2.21		
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Guru/Kelas)	2.06	2.01	2.25	2.49	2.03		
3.1.5	Tingkat kelulusan menurut jenjang pendidikan (%)							
	a. SD			98.64	99.84	99.84		
	b. SLTP			99.77	99.29	99.19		
	C. SLTA			99.88	98.25	98.92		
3.1.6	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)			na	na	na		
	Jumlah Gedung Kesenian	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00		
3.2	Kesehatan							
3.2.1	Persentase Balita Gizi Buruk (%)							
	a. Gizi kurang	0.74	na	1.57	1.28	1.03		
	b. Gizi baik	na	na	9.05	6.60	7.70		
	c. Gizi lebih	na	na	2.90	2.00	2.40		
3.2.2	AKB/AKABA/AKI							
	a. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (Persen)	82.1	89.9	91.00	92.30	89.80		
	b. Persalinan di fasilitas kesehatan (Persen)	93.5	97	78,01*	86,80*	59,00**		
	c. Kunjungan Antenatal (K4) (Persen)	87.6	90	89.40	92.40	86.70		
	d. Persentasi kunjungan pasien ke Rumah Sakit							
3.2.3	Angka Kesakitan DBD dan Malaria							
	a. Angka Kesakitan DBD (Per 100.000 Penduduk)	54.40	18.40	23.45	38.30	51.40		
	b. Angka Kesakitan Malaria (Per 1000 Penduduk)	0.38	3.40	0.24	0.14	0.10		
3.2.4	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk							
	a. Rasio Puskesmas (Per 100.000 Penduduk)	3.50	3.46	3.46	3.41	3.34		
	b. Rasio Pustu (Per 100.000 Penduduk)	14.57	14.00	14.40	15.08	14.71		
	c. Rasio Puskesmas Keliling (Per 100.000 Penduduk)	3.61	3.44	3.18	3.43	3.34		
	d. Rasio Total Puskesmas/Pustu/keliling (Per 100.000 Penduduk)	21.68	20.90	21.05	21.91	21.22		
3.2.5	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (100.000 Penduduk)	0.94	1.00	1.04	1.03	0.97		
3.2.6	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk							
	a. Dokter Spesialis (Per 100.000 Penduduk)	10.69	9.88	9.36	18.79	13.50		

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. Dokter Umum (Per 100.000 Penduduk)	16.95	16.24	17.74	19.13	19.10		
	c. Dokter Gigi (Per 100.000 Penduduk)	5.90	8.77	5.72	6.03	5.90		
3.2.7	Rasio Tenaga Paramedis Per satuan penduduk							
	a. Perawat (Per 100.000 Penduduk)	76.00	109.00	115.00	118.00	113.00		
	b. Bidan (Per 100.000 Penduduk)	59.00	76.00	85.00	85.00	78.00		
3.2.8	Cakupan Puskesmas (Per Kecamatan)	1.29	1.30	1.28	1.29	1.28		
3.2.9	Cakupan Puskesmas Pembantu + Keliling (Per Desa/Kelurahan)	0.63	0.59	0.60	0.62	0.63		
3.2.10	Prevalensi Balita Gizi Buruk							
	a. Gizi kurang			1.57	1.28	1.03		
	b. Gizi baik			9.05	6.60	7.70		
	c. Gizi lebih			2.90	2.00	2.40		
3.3	Pekerjaan Umum							
3.3.1	Panjang Jalan Provinsi (Km)	3,033.32	3,033.32	3,033.32	3,033.32	3,033.32		>
3.3.2	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi baik (Km)	483.80	503.80	931.10	931.10	1,151.04		>
3.3.3	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Sedang (Km)	1143.32	1163.32	936.10	936.10	428.72		>
3.3.4	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Ringan (Km)	693.57	693.57	544.90	544.90	121.50		>
3.3.5	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Berat (Km)	712.63	672.63	621.22	621.22	1,332.06		>
3.3.6	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Ringan - Berat (Km)	1,406.20	1,366.20	1,166.12	1,166.12	1,453.56		>
3.3.7	Panjang Jembatan Provinsi (m)	10,292.30	10,292.30	10,292.30	10,292.30	10,292.30		>
3.3.8	Panjang Irigasi/rawa (Km)	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00		>
3.3.9	Banjir (Frekuensi)			27.00	29.00	27.00		>
III	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
3.1	Ketenagakerjaan							
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%)	66.38	62.90	63.44	63.31	63.22		
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5.32	4.30	5.48	6.56	7.83	6.18	>
3.2	Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.00	52.12	50.69	52.59	54.49		
3.3	Penanaman Modal							
	PMDN (Rp Miliar)	7,462.60	5,450.40	4,874.27	7,707.50	9,943.04	179,465.87	<
	PMA (US\$ Juta)	212.34	1.152.85	1,304.94	1,369.53	653.39	29,275.94	<
3.4	Koperasi dan UKM							
	Jumlah Koperasi (Unit)	4,792.00	5,013.00	5,125.00	4,993.00	5,271.00		>
	Jumlah Anggota Koperasi (Jiwa)	610,749.00	608,468.00	629,567.00	545,025.00	506,614.00		>
3.5	Kependudukan dan Catatan Sipil							

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5,726,241.00	5,879,109.00	6,033,268.00	6,188,442.00	6,344,402.00		>
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3.39	2.67	2.62	2.57	2.52	1.31	>
3.6	Ketahanan Pangan							>
	a. Rasio Produksi Beras thd Konsumsi Penduduk Riau	0.57	0.27	0.43	0.37	0.38		>
	b. Rasio Produksi Jagung thd Konsumsi Penduduk Riau	0.29	0.26	0.58	0.53	0.48		>
	c. Rasio Produksi Sayur-Sayuran thd Konsumsi Penduduk Riau	0.46	0.39	0.34	0.58	0.51		>
	d. Rasio Produksi Buah-Buahan thd Konsumsi Penduduk Riau	0.46	0.39	1.00	1.18	1.17		>
	e. Rasio Ketersediaan Pangan Utama terhadap Konsumsi penduduk Riau							>
	f. Rasio Produksi Daging Ruminansia thd Konsumsi Penduduk Riau	0.63	0.73	0.81	0.82	0.84		>
	g. Rasio Produksi Daging Unggas thd Konsumsi Penduduk Riau	0.69	0.99	0.98	1.01	1.06		>
	h. Rasio Produksi Ikan thd Konsumsi Penduduk Riau	0.82	0.80	1.37	1.26	0.91		>
3.7	Kebudayaan							
	a. Jumlah kunjungan ke Museum	n/a	35,142.00	36,199.00	33,798.00	29,808.00		<
	b. Jumlah pertunjukan seni ditaman budaya	n/a	8.00	6.00	10.00	15.00		>
IV	Pelayanan Urusan Pilihan							
4.1	Perikanan							>
	a. Produksi perikanan (ton)	149,939.90	150,788.00	161,672.20	180,562.00	178,238.24		>
	b. Rasio Produksi Ikan thd Konsumsi Penduduk Riau	0.82	0.80	1.45	1.60	2.00		>
4.2	Pariwisata							>
	a. Kunjungan Wisata Asing (Jiwa)	47,877.00	48,819.00	38,584.00	47,934.00	54,437.00		>
	b. Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan (Destinasi)	na	na	2.00	2.00	3.00		>
4.3	Pertanian							
4.3.1	Tanaman Pangan							
	a. Luas Panen (Hektar)							
	- Padi Sawah (Hektar)	123,038.00	117,649.00	97,796.00	85,062.00	86,218.00		>
	- Padi Ladang (Hektar)	22,204.00	26,366.00	20,722.00	20,975.00	21,328.00		>
	- Jagung (Hektar)	14,139.00	13,284.00	11,748.00	12,057.00	12,425.00		>
	b. Produksi							>
	- Padi Sawah (Ton GKG)	481,911.00	453,294.00	387,849.00	337,233.00	345,441.00		>
	- Padi Ladang (Ton GKG)	53,877.00	58,858.00	46,295.00	48,242.00	48,476.00		>
	- Jagung (Ton)	33,197.00	31,433.00	28,052.00	28,651.00	30,870.00		>
	c. Produktivitas							>
	- Padi Sawah (Ton GKG/Hektar/Tahun)	3.92	3.85	3.97	3.96	4.01		>
	- Padi Ladang (Ton GKG/Hektar/Tahun)	2.43	2.23	2.23	2.30	2.27		>

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Jagung (Ton/Hektar/Tahun)	2.35	2.37	2.39	2.38	2.48		>
	d. Produksi Beras (Ton Beras/Tahun)	348,262.00	332,899.00	276,138.00	245,625.00	256,970.00		>
	e. Produksi Sayur-Sayuran (Ton/Tahun)	81,323.00	83,509.00	101,247.00	88,767.00			>
	f. Produksi Buah-Buahan (Ton/Tahun)	205,548.00	188,874.00	189,931.00	206,049.00			>
4.3.2	Perkebunan							>
	a. Luas Areal							>
	- Kelapa Sawit (Hektar)	2,258,553.00	2,372,402.00	2,399,172.00	2,411,820.00	2,424,545.00		>
	- Kelapa (Hektar)	521,038.00	521,792.00	520,260.00	516,895.00	515,168.00		>
	- Karet (Hektar)	504,139.00	500,851.00	505,264.00	502,906.00	501,788.00		>
	b. Produksi							>
	- Kelapa Sawit (Ton CPO)	7,047,221.00	7,343,498.00	7,570,854.00	7,761,293.00	7,841,947.00		>
	- Kelapa (ton Kopra)	481,087.00	473,221.00	427,080.00	421,654.00	421,465.00		>
	- Karet (Ton KKK)	333,069.00	350,476.00	354,257.00	367,261.00	374,901.00		>
	c. Produktivitas							>
	- Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar/Tahun)	3.12	3.10	3.16	3.22	3.23		>
	- Kelapa (Ton Kopra/Hektar/Tahun)	0.92	0.91	0.82	0.82	0.82		>
	- Karet (Ton KKK/Hektar/Tahun)	0.66	0.70	0.70	0.73	0.75		>
4.3.3	Peternakan							>
	Produksi Daging							>
	a. Produksi Daging Ruminansia	10,246,668.00	13,397,113.00	10,170,311.00	11,771,098.00	11,153,963.00		>
	b. Produksi Daging Unggas	9,039,886.67	13,322,742.67	10,052,524.67	15,019,361.33	17,071,388.00		>
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB							>
	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Harga Konstan Dengan Migas (%)	22.99	23.00	23.43	24.28	24.27		>
	b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Harga Konstan Tanpa Migas (%)	31.84	31.12	30.81	30.89	30.39		>
4.3.4	Kehutanan							>
	a. Luas Hutan Produksi Terbatas (Hektar)	1,815,949.74	2,952,179.00	1,729,622.00	1,031,600.00	1,031,600.00		>
	b. Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar)	1,253,799.40	1,195,807.75	1,536,653.99	1,039,531.17	4,793,369.09		>
	c. Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis (Hektar)	61,000.00	85,000.00	95,000.00	-	-		>
	d. Kebakaran Hutan dan Lahan (Titik Api)	na	na	5,281.00	4,400.00	1,916.00		>
	e. Produksi (ton)							>
	- Kayu Gergajian (M3)	36,963.62	51,601.91	12,686.63	10,676.33	6,670.51		>
	- Kayu Lapis (M3)	206,144.05	105,079.16	91,137.12	81,234.41	78,956.47		>
	- Chip (Ton)	72,243.74	42,751.20	119,324.64	109,422.24	17,598,027.00		>

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Pulp (Ton)	4,652,843.46	3,875,287.80	3,822,455.02	4,283,425.12	4,218,947.00		>
4.3.5	Pertambangan							>
	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	40.89	39.20	42.21	39.57	30.63		>
	a. Minyak dan Gas Bumi (%)	31.86	30.27	28.22	26.00	24.18		>
	b. Pertambangan Tanpa Migas (%)	9.03	8.93	8.82	8.80	8.01		>
4.3.6	Perdagangan							>
	a. Ekspor Bersih Termasuk Minyak Bumi (Ribu US\$)	6,775,013.70	6,556,107.80	5,895,893.47	6,596,203.17	3,530,979.82		>
	b. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	7.65	8.19	8.43	8.48	8.65		>
4.3.7	Industri							>
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)							>
	a. Industri Migas (%)	24.73	25.46	26.57	27.35	28.26		>
	b. Industri Tanpa Migas (%)	30.84	31.17	30.66	29.74	29.66		>
V	DAYA SAING DAERAH							>
5.1	Fokus Kemampuan Ekonomi							>
5.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							>
5.1.2	Pengeluaran konsumsi RT harga konstan terhadap total pengeluaran per tahun (%)	20.10	42.99	21.73	22.72	23.48		>
5.1.3	Pengeluaran konsumsi non pangan per bulan (Rp.)	379,191.50	435,190.50	420,784.00	435,740.00	510,187.00		>
5.1.4	Nilai Tukar Petani	105.05	102.54	97.14	95.02	95.03		>
	a. Pangan	112.69	113.60	109.66	100.44	107.27		>
	b. Hortikultura	114.75	117.25	112.36	97.26	96.05		>
	c. Perkebunan	103.57	99.87	95.47	95.03	89.92		>
	d. Peternakan	101.05	101.11	101.01	98.88	101.03		>
	e. Perikanan	92.19	90.91	90.66	105.13	110.43		>
5.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							>
5.2.1	Jumlah Energi Listrik Yang di Produksi (Mwh) (Hal 280)	670,438.00	404,501.00	667,071.00	670,438.00	753,859.00		>
5.2.2	Persentase RT akses listrik PLN (%)	60.99	65.16	69.19	74.48	78.06		>
5.2.3	Persentase RT akses air minum (%)			37.43	72.59	83.01		>
5.2.4	Panjang Irigasi/rawa (Km)			na	na	154.70		>
5.3	Fokus Iklim Berinvestasi							>
5.3.1	Angka Kriminalitas	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00		>
5.3.2	Jumlah Potensi Konflik (Konflik)	-	-	100.00	124.00	113.00		>
5.3.3	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama			-	-	-		>
5.4	Fokus Sumberdaya Manusia							>

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.4.1	Rasio ketergantungan (%)	53.45	52.89	52.40	51.96	51.56		>
5.4.2	Rasio lulusan (S1, S2 dan S3) per jumlah penduduk	275.21	369.00	425.00	439.85	472.97		>
5.4.3	Rasio Ketergantungan Penduduk Non Produktif Per 100 penduduk Produktif	67.21	68.54	52.40	51.96	51.56		>
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							>
	a. Indeks Pembangunan Gender (%)	na	na	86.74	87.62	97.30		>
5.5	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							>
	a. Rasio Akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur (%)	0.68	0.64	0.68	0.68	0.72		>
5.6	Pemerintahan Umum							>
	a. Indeks Efektifitas Pemerintahan			2.02	2.50	2.60		>
	b. Nilai keterbukaan Informasi			-	17.40	30.57		>
5.7	Administrasi Keuangan Daerah							>
	a. Opini BPK			WTP	WTP	WTP		>
	b. Nilai Akuntabilitas			CC	CC	CC		>
	c. Skor LPPD			2.02	2.50	2.60		>
	d. Nilai Reformasi Birokrasi					37,66 (C)		>
5.8	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	na	na	na	21.00		>

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengandung prinsip dasar yakni: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan perimbangan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan memegang prinsip: (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas Pembantuan.

Menurut Kaho (1997), ada empat faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: (1) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (2) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (3) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; dan (4) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Menurut Mulyanto (2002), faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada *self supporting* dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya

secara tepat (lokus dan focus) dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (1) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (2) investasi Pemerintah Daerah, baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota; dan (3) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah akan diikuti dengan pemberian pembiayaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Artinya pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan ataupun pelimpahan wewenang lainnya selalu diikuti dengan penyerahan pembiayaan. Demikian juga halnya dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota harus diikuti dengan penyerahan pembiayaan.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan maka dalam rangka penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 diperlukan analisis kinerja keuangan Provinsi Riau. Analisis kinerja keuangan masa lalu dan proyeksinya ke depan perlu dilakukan untuk merumuskan pengelolaan keuangan Provinsi Riau yang lebih akurat untuk masa mendatang, yakni dalam periode tiga tahun ke depan untuk tahun keempat dan kelima (2017-2019) dari 5 tahun (2014-2019).

3.1. Kinerja Keuangan Provinsi Riau Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah

melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau sangat erat kaitannya dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Riau dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari realisasi pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta belanja daerah yang meliputi belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL). Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Provinsi Riau, kondisi kewajiban Pemerintah Provinsi Riau serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Provinsi Riau mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program melalui kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Provinsi Riau, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Provinsi Riau tahun 2011-2015. Secara berturut-turut pada sub-bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan Provinsi Riau, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah harus disertai oleh suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan sumber pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tanpa adanya sumber penerimaan tersebut mustahil Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Tabel 3.1 menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 7.29 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12,42 persen per tahun, diikuti oleh PAD sebesar 12,12 persen sedangkan Dana Perimbangan menurun sekitar 2,66 persen.

Tabel 3.1
Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,210.13	2,588.69	2,725.62	3,245.09	3,471.93	12.12
1.1.	Pajak Daerah	1,773.62	2,058.60	2,111.00	2,496.77	2,572.76	9.98
1.2.	Retribusi Daerah	8.49	12.17	24.36	16.99	20.50	33.47
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131.61	139.60	146.46	154.21	178.22	7.96
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	296.41	378.32	443.80	577.11	700.45	24.09
2	DANA PERIMBANGAN	3,226.84	3,618.84	3,610.18	4,231.81	2,548.63	(2.66)
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,789.96	3,067.17	2,844.81	3,367.09	1,831.05	(6.14)
2.2.	Dana Alokasi Umum	380.05	489.18	726.63	820.98	654.22	17.48
2.3.	Dana Alokasi Khusus	56.82	62.49	38.74	43.74	63.36	7.43
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.47	639.78	658.84	655.51	883.58	12.42
3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	2.67	-
3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.47	639.78	636.22	655.51	880.91	12.29
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	-	-	22.62	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	5,440.44	6,847.32	6,994.65	8,132.41	6,904.13	7.29

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Walaupun dari sisi pertumbuhan, komponen PAD memperlihatkan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah daripada komponen Dana Perimbangan, namun dilihat dari proporsinya, Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2011-2014, proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari

Dana Perimbangan masih lebih besar dari 50 persen. Namun setelah ada rasionalisasi bagi hasil pada tahun 2015 akibat penurunan harga minyak mentah dunia penerimaan dari Dana Perimbangan hanya sekitar 36,91 persen.

Tabel 3.2
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau

No.	Uraian	Proporsi (%) Pertahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.62	37.81	38.97	39.90	50.29
1.1.	Pajak Daerah	32.6	30.06	30.18	30.70	37.26
1.2.	Retribusi Daerah	0.16	0.18	0.35	0.21	0.30
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.42	2.04	2.09	1.90	2.58
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.45	5.53	6.34	7.10	10.15
2	DANA PERIMBANGAN	59.31	52.85	51.61	52.04	36.91
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.28	44.79	40.67	41.40	26.52
2.2.	Dana Alokasi Umum	6.99	7.14	10.39	10.10	9.48
2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.04	0.91	0.55	0.54	0.92
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.06	9.34	9.42	8.06	12.80
3.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0.04
3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	0
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.06	9.34	9.1	8.06	12.76
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	0	0	0.32	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	100	100	100	100.00	100.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Lebih lanjut, kinerja Pendapatan Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Selaras dengan penerapan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Rp. 4,6 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 7,4 triliun pada tahun 2015. Namun realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan karena adanya rasionalisasi bagi hasil sumberdaya alam akibat turunnya harga minyak mentah dunia (*international crude oil price* atau ICP) dan penurunan *lifting* minyak. Secara rinci perkembangan Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	4,624.52	5,440.44	117.64	815.92	17.64
2012	6,639.43	6,847.32	103.13	207.89	3.13
2013	6,937.72	6,994.65	100.82	56.93	0.82
2014	7,400.62	8,132.41	109.89	731.79	9.89
2015	7,407.06	6,904.13	93.21	-502.93	(6.79)
Jumlah	33,009.35	34,318.95	103.97	1,309.60	3.97

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebesar Rp 33,009 triliun dengan realisasi Rp. 34,318 triliun atau realisasi telah melebihi Anggaran 103,97persen atau bertambah 3,97persen. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, namun secara keseluruhan pada tahunanggaran tersebut kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau menghimpun pendapatan daerah cukup baik.

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (%)

No	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	40.62	37.81	38.97	39.90	50.29
2	Dana Perimbangan	59.31	52.85	51.61	52.04	36.91
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.06	9.34	9.42	8.06	12.80
4	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diolah

Pendapatan Daerah Provinsi Riau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan.Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian

pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik.

Tabel 3.5
Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	2,210.13	2,588.69	2,725.62	3,245.09	3,471.93
2	Dana Perimbangan	3,226.84	3,618.84	3,610.18	4,231.81	2,548.63
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.47	639.78	658.84	655.51	883.58
Total		5,440.44	6,847.32	6,994.65	8,132.41	6,904.13

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015

Untuk memperoleh gambaran yang detail tentang Pendapatan Daerah maka perlu dijelaskan tentang rincian dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah. Secara berturut-turut berikut ini dijelaskan tentang komponen dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan, namun kontribusi PAD secara persisten semakin meningkat. Selama Tahun Anggaran 2011-2015, secara kumulatif realisasi PAD melebihi Anggaran, dengan realisasi mencapai 111,70 persen atau bertambah sebesar 11.70 persen. Tabel 3.6 menyajikan tentang perkembangan Anggaran dan realisasi PAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,732.70	2,210.13	127.55	477.43	27.55
2012	2,181.22	2,588.69	118.68	407.47	18.68
2013	2,481.64	2,725.62	109.83	243.99	9.83
2014	2,946.91	3,245.09	110.12	298.18	10.12
2015	3,407.52	3,471.93	101.89	64.41	1.89
Jumlah	12,749.98	14,241.46	111,70	1,491.48	11.70

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Komponen PAD terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari empat komponen PAD tersebut Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti oleh komponen Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 3.7 menyajikan tentang Anggaran dan realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Perlu diinformasikan bahwa Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dinyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2011-2015 realisasi Pajak Daerah melebihi Anggaran yang telah ditetapkan.Secara kumulatif Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp. 10,385 triliun dengan realisasi mencapai Rp. 11,012 triliun. Dengan demikian realisasi mencapai106,04 persen, atau bertambah Rp. 626,95 milyar (6,68 persen). Untuk tahun 2015 realisasi penerimaan pajak daerah tidak memenuhi target dari yang dianggarkan dengan sekitar 96,32 persen.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,403.23	1,773.62	126.40	370.39	26.40
2012	1,839.78	2,058.60	111.89	218.82	11.89
2013	2,025.22	2,111.00	104.24	85.78	4.24
2014	2,446.65	2,496.77	102.05	50.12	2.05
2015	2,670.92	2,572.76	96.32	(98.16)	(3.68)
Jumlah	10,385.80	11,012.75	106.04	626.95	6.04

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diolah

Selanjutnya Tabel 3.8 menyajikan Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	6.56	8.49	129.38	1.93	29.38
2012	10.65	12.17	114.30	1.52	14.30
2013	16.82	24.36	144.84	7.54	44.84
2014	18.75	16.99	90.62	(1.76)	(9.38)
2015	32.95	20.50	62.22	(12.45)	(37.78)
Jumlah	85.74	82.52	96.25	(3.21)	(3.75)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diolah

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah secara kumulatif dan per tahun rata-rata masih kurang dari Anggaran yangditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, kecuali tahun 2013 dan sebelumnya. Penurunan ini terjadi disebabkan perubahan regulasi yang memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota terhadap sejumlah objek retribusi yang pada awalnya menjadi kewenangan provinsi dan beberapa objek retribusi yang sudah dibekukan. Selama Tahun Anggaran 2011-2015, Anggaran Retribusi Daerah secara kumulatif sebesar Rp. 85,74 milyar dengan realisasi yang kurang dari Anggarannya, yakni sebesar Rp. 82,52 atau 96,25 persen. Dengan kata lain realisasi Retribusi Daerah menurun Rp. 3,21 milyar (3,75 persen) dari Anggaran yang telah ditetapkan.

Komponen PAD berikutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2011-2015, Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara kumulatif sebesar Rp. 808,35 milyar, sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp. 750,10 milyar (92,79 persen). Dengan kata lain realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih rendah Rp. 58,25 milyar (7,21 persen) dari target.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	154.16	131.61	85.37	(22.55)	(14.63)
2012	139.30	139.60	100.22	0.30	0.22
2013	139.60	146.46	104.92	6.86	4.92
2014	166.75	154.21	92.48	(12.53)	(7.52)
2015	208.54	178.22	85.46	(30.33)	(14.54)
Jumlah	808.35	750.10	92.79	(58.25)	(7.21)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Bila dicermati lebih jauh pada periode 2011-2015, realisasi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selalu lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan. Namun demikian pada tahun 2012 dan 2013, realisasi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sudah melampaui Anggaran. Oleh karenanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan milik daerah perlu terus dilakukan. Kebijakan pemberian *reward* bagi perusahaan yang berhasil mencapai/melampaui Anggaran dan *punishment* bagi perusahaan yang tidak mencapai/kurang dari Anggaran perlu dilakukan.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran
2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	168.74	296.41	175.66	127.67	75.66
2012	191.49	378.32	197.57	186.83	97.57
2013	300.00	443.80	147.93	143.80	47.93
2014	648.44	655.51	101.09	7.08	1.09
2015	871.74	883.58	101.36	11.84	1.36
Jumlah	2,180.41	2,657.62	121.89	477.21	21.89

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Tabel 3.10 menyajikan Anggaran dan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h)

Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari Tabel 3.10 dapat dinyatakan bahwa selama Tahun Anggaran 2011-2015, secara kumulatif Anggaran Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 2.180 milyar sedangkan realisasinya mencapai Rp. 2.657 milyar (121,89 persen) dengan demikian realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 477,21 milyar (21,89 persen).

(2) Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah terbesar bagi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Riau adalah dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Secara kumulatif, Anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp.17,413 triliun.Sementara itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 17,236 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Dana Perimbangan sebesar 98,88 persen dari Anggaran atau berkurang 1,01 persen dari Anggaran. Secara detail Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	2,888.35	3,226.84	111.72	338.49	11.72
2012	3,793.93	3,618.84	95.38	-175.09	-4.62
2013	3,797.46	3,610.18	95.07	-187.28	-4.93
2014	3,805.27	4,231.81	111.21	426.54	11.21
2015	3,127.80	2,548.63	81.48	-579.18	-18.52
Jumlah	17,412.82	17,236.30	98.99	-176.52	-1.01

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Komponen Dana Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana

Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan, diikuti oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaranpenerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama Tahun Anggaran 2011-2015 adalah sebesar Rp. 14,061 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 13,900 triliun. Dengan demikian realisasinya hanya sebesar 98,86 persen persen dari Anggaran yang telah ditetapkan atau berkurang 1,41 persen.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	2,451.47	2,789.96	113.81	338.49	13.81
2012	3,242.26	3,067.17	94.60	-175.09	-5.40
2013	3,032.09	2,844.81	93.82	-187.28	-6.18
2014	2,940.55	3,367.09	114.51	426.54	14.51
2015	2,394.38	1,831.05	76.47	-563.34	-23.53
Jumlah	14,060.76	13,900.08	98.86	-160.68	-1.14

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Sementara itu anggaran dan realisasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana AlokasiKhusus dimulai selama Tahun Anggaran relatif sama. Untuk Dana Alokasi Umum (Tabel 3.13), secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015.Anggaran dan realisasinya adalah sama, yakni sebesar Rp. 3,071 trilun.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	380.05	380.05	100.00	0.00	0.00
2012	489.18	489.18	100.00	0.00	0.00
2013	726.63	726.63	100.00	0.00	0.00
2014	820.98	820.98	100.00	0.00	0.00
2015	654.22	654.22	100.00	0.00	0.00
Jumlah	3,071.07	3,071.07	100.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015,diolah

Sementara itu Anggaran Dana Alokasi Khusus (Tabel 3.14) secara kumulatif sebesar Rp. 280,99 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 265,15 milyar. Dengan demikian capaian realisasi hanya 94,36 persen atau berkurang Rp. 15,84 milyar (5,64 persen). Rendahnya realisasi anggaran DAK hanya terjadi pada tahun 2015 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya anggaran dan realisasi sama besar.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	56.82	56.82	100.00	0.00	0.00
2012	62.49	62.49	100.00	0.00	0.00
2013	38.74	38.74	100.00	0.00	0.00
2014	43.74	43.74	100.00	0.00	0.00
2015	79.20	63.36	80.00	-15.84	-20.00
Jumlah	280.99	265.15	94.36	-15.84	-5.64

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

(3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Selain PAD dan Dana Perimbangan, komponen Pendapatan Daerah juga bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah secara kumulatif tidak dapat dipenuhi. Selama Tahun Anggaran 2011-2015,Lain-lainPendapatanyangSah dianggarkan sebesar Rp. 2,847 trilion sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 2,841 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar 99,81 persen atau berkurang 0,19 persen. Secara rinci Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun
Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	3.47	3.47	100.00	0.00	0.00
2012	664.27	639.78	96.31	-24.49	-3.69
2013	658.63	658.84	100.03	0.21	0.03
2014	648.44	655.51	101.09	7.08	1.09
2015	871.74	883.58	101.36	11.84	1.36
Jumlah	2,846.55	2,841.19	99.81	-5.36	-0.19

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015,diolah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:(a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota/Lainnya, (d) Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Selama Tahun Anggaran 2011-2015, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Permerintah Pusat.

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2011-2015, secara kumulatif Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 2,844 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,816 trilun atau sekitar 99,02 persen.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	3.47	3.47	100.00	0.00	0.00
2012	664.27	639.78	96.31	-24.49	-3.69
2013	658.63	636.22	96.60	-22.41	-3.40
2014	648.44	655.51	101.09	7.08	1.09
2015	869.07	880.91	101.36	11.84	1.36
Jumlah	2,843.88	2,815.90	99.02	-27.98	-0.98

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Sementara itu Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Riau hanya diberikan pada tahun 2009, namun dalam jumlah yang relatif kecil. Sementara itu pada periode berikutnya hingga 2011 hingga 2015, tidak ada Bantuan

Kuangan dari Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Riau.

3.1.2. Neraca Daerah

Disamping mengatur tentang Pendapatan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjelaskan tentang Belanja Daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Tabel 3.17
Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,726.94	3,245.05	3,292.87	3,431.47	4,133.74	28.51
1.1.	Belanja Pegawai	701.02	790.43	877.50	937.26	979.66	8.78
1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0	0	5.00	0	0	0.00
1.4.	Belanja Hibah	230.63	1,459.57	1,251.68	751.85	936.85	125.82
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	197.81	20.05	20.89	13.02	0.86	-54.21
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	511.02	796.73	874.71	1,614.63	1,233.31	31.67
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	86.37	178.27	263.09	114.71	983.05	213.64
1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.10	0	0	0	0	0.00
2	BELANJA LANGSUNG	2,538.19	3,425.71	4,232.41	2,170.60	3,614.87	19.08
2.1.	Belanja Pegawai	235.12	247.36	319.82	188.19	215.31	1.94
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.89	1,216.68	1,667.28	1,358.77	1,385.13	11.77
2.3.	Belanja Modal	1,342.18	1,961.67	2,245.31	623.64	2,014.44	52.85
	Jumlah Belanja	4,265.13	6,670.77	7,525.28	5,602.07	7,748.61	20.49

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Tabel 3.17 menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah sebesar 20,49 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar bersumber dari pertumbuhan

Belanja Tidak Langsung sebesar 28,51 per tahun, diikuti oleh Belanja Langsung sebesar 19,08 per tahun.

Dilihat dari proporsinya, proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung (Tabel 3.18). Pada periode 2011-2015 proporsi belanja tidak langsung cenderung meningkat, sedangkan proporsi belanja langsung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Berdasarkan data ini maka diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan biaya langsung dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Provinsi Riau.

Tabel 3.18
Proporsi Sumber Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau

No.	Uraian	Proporsi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.49	48.65	43.76	61.25	53.35
1.1.	Belanja Pegawai	16.44	11.85	11.66	16.73	12.64
1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0.00	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0	0	0.07	0.00	0.00
1.4.	Belanja Hibah	5.41	21.88	16.63	13.42	12.09
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.64	0.3	0.28	0.23	0.01
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.98	11.94	11.62	28.82	15.92
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.02	2.67	3.5	2.05	12.69
1.8.	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0.00	0.00
2	BELANJA LANGSUNG	59.51	51.35	56.24	38.75	46.65
2.1.	Belanja Pegawai	5.51	3.71	4.25	3.36	2.78
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.53	18.24	22.16	24.25	17.88
2.3.	Belanja Modal	31.47	29.41	29.84	11.13	26.00
Jumlah Belanja		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, maka pendapatan daerah hendaklah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya Belanja Daerah haruslah dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang menjadi skala prioritas berupa pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum/sosial yang layak. Prinsip belanja daerah yang transparan dan akuntabel hendaknya diterapkan untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Disamping melihat trend pertumbuhan dan proporsi belanja daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah dapat dilihat dengan

membandingkan antara realisasi dan anggaran belanja daerah. Tabel 3.19 menyajikan Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Daerah Provinsi Riau secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp. 42,324 triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31,812 triliun. Dengan demikian realisasi Belanja Daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yakni hanya 75,16 persen atau berkurang 24,84 persen. Apabila dilihat lebih lanjut, realisasi Belanja Daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah dan kebutuhan bagi pelayanan masyarakat.

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	4,797.60	4,265.13	88.90	-532.47	-11.10
2012	8,373.81	6,670.77	79.66	-1703.05	-20.34
2013	8,915.52	7,525.28	84.41	-1390.24	-15.59
2014	8,848.30	5,602.07	63.31	-3246.22	-36.69
2015	11,388.48	7,748.61	68.04	-3639.87	-31.96
Jumlah	42,323.71	31,811.86	75.16	-10511.85	-24.84

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Berikut ini secara berturut-turut dipaparkan tentang kinerja masa lalu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta komponen-komponennya.

(1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.20 menyajikan Anggaran dan realisasi Biaya Tidak Langsung Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Selama Tahun Anggaran tersebut, secara kumulatif Anggaran Belanja Tidak Langsung 2011-2015 sebesar Rp. 20,737 dengan nilai realisasinya sebesar Rp. 15,830 atau

sekitar 76,34 persen dari Anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Riau berkurang Rp. 4,907 triliun atau sekitar 23,66 persen. Pada tahun 2015 realisasi belanja tidak langsung paling rendah, hanya 61,94 persen dengan pengurangan sebesar Rp. 2,540 triliun.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,876.26	1,726.94	92.04	-149.32	-7.96
2012	4,070.94	3,245.05	79.71	-825.89	-20.29
2013	3,981.93	3,292.87	82.70	-689.06	-17.30
2014	4,133.45	3,431.47	83.02	-701.98	-16.98
2015	6,674.25	4,133.74	61.94	-2,540.51	-38.06
Jumlah	20,736.84	15,830.08	76.34	-4,906.76	-23.66

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Secara kumulatif, Anggaran komponen Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp. 4,883 trilion, lebih besar dari realisasinya, yakni Rp. 4,286 trilion. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Belanja Pegawai hanya sebesar 87,77 persen atau berkurang 12,23 persen dari yang dianggarkan. Apabila diamati lebih lanjut dari Tabel 3.21, realisasi Belanja Pegawai walaupun lebih rendah dari yang dianggarkan, namun dengan kecenderungan menurun. Secara detail Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	785.80	701.02	89.21	-84.78	-10.79
2012	869.52	790.43	90.90	-79.09	-9.10
2013	989.12	877.50	88.72	-111.62	-11.28
2014	1,071.79	937.26	87.45	-134.53	-12.55
2015	1,166.89	979.66	83.95	-187.23	-16.05
Jumlah	4,883.13	4,285.88	87.77	-597.24	-12.23

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk realisasi Belanja Subsidi, baik secara kumulatif maupun dari tahun ke tahun lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan. Dari Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2011-2015 realisasi

belanja subsidi sebesar Rp. 5 milyar 38,34 (13,04 persen) dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 38,34 atau berkurang 86,96 persen. Bahkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada Belanja Subsidi yang direalisasikan oleh PemerintahProvinsi Riau.

Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	14.17	0.00	0.00	-14.17	-100.00
2012	14.17	0.00	0.00	-14.17	-100.00
2013	5.00	5.00	99.99	0.00	-0.01
2014	5.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	38.34	5.00	13.04	-33.34	-86.96

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Demikian juga halnya dengan Belanja Hibah, realisasinya lebih rendah dari Anggaran yang telah ditetapkan, baik secara kumulatif maupun per tahun. Dari Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 4,6 triliun (81,24 persen) masih jauh di bawah Anggarannya sebesar Rp. 5,7 triliun atau kurang 18,76 persen. Belanja Hibah Provinsi Riau cenderung menurun mulai tahun 2013 hingga 2015.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	242.00	230.63	95.30	-11.37	-4.70
2012	1,830.50	1,459.57	79.74	-370.93	-20.26
2013	1,541.92	1,251.68	81.18	-290.24	-18.82
2014	1,061.18	751.85	70.85	-309.33	-29.15
2015	1,024.49	936.85	91.45	-87.64	-8.55
Jumlah	5,700.09	4,630.58	81.24	-1,069.51	-18.76

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Riau Selama Tahun Anggaran 2011-2015 cenderung menurun, dariRp. 197,89 milyar pada tahun 2011 menjadi hanya Rp. 7,18 milyar pada tahun 2015 Tabel 3.24). Lebih lanjut dari Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Riau sebesar Rp. 252,62 (88,72 persen) yang lebih rendah dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 284,74 atau kurang 11,28 persen.

Tabel 3.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	197.89	197.81	99.96	-0.08	-0.04
2012	26.65	20.05	75.25	-6.60	-24.75
2013	30.84	20.89	67.73	-9.95	-32.27
2014	22.18	13.02	58.68	-9.16	-41.32
2015	7.18	0.86	11.92	-6.32	-88.08
Jumlah	284.74	252.62	88.72	-32.12	-11.28

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.25.Dari Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa realisasi belanja tersebut berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa di Provinsi Riau sebesar Rp. 531,72 meningkat menjadi Rp. 1,435 triliun pada tahun 2015. Secara kumulatif, realisasi anggaran belanja tersebut sebesar Rp. 5,030 triliun (86,27 persen) lebih rendah dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8,831 trilun atau kurang 13,73 persen.

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	531.72	511.02	96.11	-20.70	-3.89
2012	1,024.15	796.73	77.79	-227.42	-22.21
2013	989.32	874.71	88.42	-114.61	-11.58
2014	1,850.67	1,614.63	87.25	-236.04	-12.75
2015	1,435.41	1,233.31	85.92	-202.10	-14.08
Jumlah	5,831.28	5,030.40	86.27	-800.88	-13.73

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Anggaran 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.26. Dari Tabel 3.26 dapat dilihat bahwa realisasi belanja tersebut berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 hingga 2014 bantuan keuangan dianggarkan masih di bawah satu triliun rupiah, namun pada tahun 2015 dianggarkan Rp. 2,831. Realisasi terkecil terjadi pada tahun

2015 hanya 34,72 persen. Secara kumulatif, realisasi anggaran belanja tersebut sebesar Rp. 1,625 triliun (43,14 persen) lebih rendah dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3,768 triliun atau kurang sekitar 56,86 persen.

Tabel 3.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	103.18	86.37	83.71	-16.81	-16.29
2012	295.17	178.27	60.40	-116.90	-39.60
2013	420.23	263.09	62.61	-157.14	-37.39
2014	117.63	114.71	97.52	-2.91	-2.48
2015	2,831.38	983.05	34.72	-1,848.32	-65.28
Jumlah	3,767.58	1,625.49	43.14	-2,142.08	-56.86

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya Anggaran Belanja Tidak Terduga secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp. 231,68 milyar dengan realisasi hanya sebesar Rp. 0,1 milyar atau berkurang 94,85 persen. Kecilnya realisasi Belanja Tidak Terduga disebabkan pencairan dana tersebut mensyaratkan kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Lebih detail Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1.50	0.10	6.77	-1.40	-93.23
2012	10.78	-	-	-10.78	-100.00
2013	5.50	-	-	-5.50	-100.00
2014	5.00	-	-	-5.00	-100.00
2015	208.90	-	-	-208.90	-100.00
Jumlah	231.68	0.10	0.04	-231.58	-99.96

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

(2) Belanja Langsung

Tabel 3.28 menyajikan Anggaran dan realisasi Biaya Langsung Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Selama Tahun Anggaran

tersebut, secara kumulatif Anggaran Belanja Langsung 2011-2015 sebesar Rp. 21,587 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 15,982 triliun atau hanya sekitar 74,03 persen dari Anggaran. Dengan kata lain realisasi Belanja Langsung Provinsi Riau kurang sebesar Rp. 5,6 triliun atau sekitar 25,97 persen.

Tabel 3.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	2,921.34	2,538.19	86.88	-383.15	-13.12
2012	4,302.87	3,425.71	79.61	-877.16	-20.39
2013	4,933.59	4,232.41	85.79	-701.18	-14.21
2014	4,714.84	2,170.60	46.04	-2,544.24	-53.96
2015	4,714.23	3,614.87	76.68	-1,099.36	-23.32
Jumlah	21,586.88	15,981.78	74.03	-5,605.09	-25.97

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Secara kumulatif, Anggaran komponen Belanja Langsung untuk Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp. 1,412 triliun lebih besar dari realisasinya, yakni sebesar Rp. 1,206. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Belanja Pegawai hanya sebesar 85,41 atau kurang 14,59 persen dari yang dianggarkan. Apabila diamati lebih lanjut dari Tabel 3.29, realisasi Belanja Pegawai walaupun lebih rendah dari yang dianggarkan, namun dengan kecenderungan menurun. Secara detail anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	247.63	235.12	94.95	-12.52	-5.05
2012	267.28	247.36	92.55	-19.92	-7.45
2013	348.20	319.82	91.85	-28.38	-8.15
2014	263.40	188.19	71.45	-75.21	-28.55
2015	285.24	215.31	75.48	-69.94	-24.52
Jumlah	1,411.76	1,205.79	85.41	-205.96	-14.59

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Riau, baik secara kumulatif maupun dari tahun ke tahun lebih rendah dari anggaran yang

ditetapkan. Dari Tabel 3.30 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2011-2015 realisasi belanja Barang dan Jasa Provinsi Riau sebesar Rp.9,781 triliun (67,36 persen) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6,589 triliun (kurang 32,64 persen). Tahun 2014 dan 2015 kurangnya realisasi anggaran sangat besar sehingga pencapaian belanjanya rendah.

Tabel 3.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,126.25	960.89	85.32	-165.36	-14.68
2012	1,578.46	1,216.68	77.08	-361.78	-22.92
2013	1,987.57	1,667.28	83.89	-320.29	-16.11
2014	2,996.58	1,358.77	45.34	-1,637.80	-54.66
2015	2,092.24	1,385.13	66.20	-707.11	-33.80
Jumlah	9,781.10	6,588.76	67.36	-3,192.35	-32.64

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya dari Tabel 3.31 dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Modal Provinsi Riau secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp. 10,394 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 8,187 triliun (78,77 persen) atau kurang 21,23 persen. Apabila diamati lebih jauh, Anggaran dan realisasi belanja modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun dalam jumlah yang masih relatif kecil, namun dengan meningkatnya anggaran dan realisasi Belanja Modal menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui peningkatan Belanja Modal cukup baik. Pada masa mendatang, jumlah belanja modal hendaknya terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Tabel 3.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,547.45	1,342.18	86.73	-205.27	-13.27
2012	2,457.13	1,961.67	79.84	-495.46	-20.16
2013	2,597.81	2,245.31	86.43	-352.51	-13.57
2014	1,454.86	623.64	42.87	-831.22	-57.13
2015	2,336.76	2,014.44	86.21	-322.32	-13.79
Jumlah	10,394.02	8,187.23	78.77	-2,206.78	-21.23

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Sehubungan dengan Neraca Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Dari Tabel 3.32 dapat dilihat bahwa Total Aset Daerah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Total Aset Daerah Provinsi Riau sebesar Rp 21,447,952,855,887.70, meningkat menjadi Rp 27,888,624,999,707.80 pada tahun 2015, atau tumbuh sebesar 7,51 persen setiap tahun. Seiring dengan peningkatan Aset Daerah, Kewajiban Daerah Provinsi Riau juga mengalami peningkatan, dari Rp 739,093,124,920.17 pada tahun 2011 menjadi Rp 425,238,902,642.04 pada tahun 2015 atau menurun rata-rata 0.11 persen. Kewajiban Daerah jauh lebih kecil dari Aset Daerah yang berarti bahwa pengalokasian dana bagi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Riau masih sangat aman untuk dapat meningkatkan pengeluaran pembangunan melalui peningkatan kewajiban.

Lebih lanjut dari Tabel 3.32 yang menarik untuk diulas adalah komponen ekuitas. Secara total ekuitas dana Provinsi Riau mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 13,64 persen selama tahun 2011 hingga 2015. Ekuitas dana investasi cenderung mengalami peningkatan, yakni sebesar 9.82 persen dan ekuitas dana lancar mengalami tumbuh hingga 167,73 persen, sedangkan ekuitas dana cadangan meningkat hampir 17 kali. Dengan demikian, kemampuan daerah Provinsi Riau untuk

dapat mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 3.32
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Neraca Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertum- buhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	ASET	21,447.95	24,122.32	26,156.05	29,935.13	27,888.63	7.51
1.1.	Aset Lancar	1,395.26	2,623.59	1,805.57	4,711.91	3,461.69	37.03
1.1.1.	Kas	1,342.44	1,981.62	1,468.08	3,985.02	3,135.73	33.40
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Piutang	11.57	583.32	79.42	491.73	65.16	115.80
1.1.4.	Persediaan	41.25	53.66	253.53	235.98	262.49	134.08
1.1.5.	Belanja Bayar di Muka	-	4.98	4.54	1.72	1.65	-
1.2.	Investasi Jangka Panjang	1,049.64	1,316.79	1,321.75	1,433.74	1,417.34	8.76
1.2.1.	Investasi Nonpermanen	78.82	102.49	25.42	20.93	5.59	(23.23)
1.2.2.	Investasi Permanen	970.82	1,214.29	1,296.33	1,412.81	1,411.75	11.35
1.3.	Aset Tetap	18,239.88	19,973.47	22,338.53	23,532.60	22,770.32	6.21
1.3.1.	Tanah	6,731.14	6,387.06	6,411.17	23,532.60	22,770.32	59.57
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	923.73	1,066.33	1,181.44	1,352.82	1,648.41	19.61
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	2,433.36	3,406.89	3,816.22	3,805.09	4,959.95	25.96
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,280.87	6,659.32	8,520.67	9,241.67	10,499.28	16.79
1.3.5.	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,727.43	1,538.74	1,485.46	1,771.49	833.28	(12.94)
1.3.6.	Aset Tetap Lainnya	143.35	915.13	923.56	992.79	1,078.26	163.05
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	(2,651.10)	-
1.4.	Dana Cadangan	567.51	-	-	-	-	-
1.5.	ASET LAINNYA	195.65	208.48	232.82	256.87	239.28	5.58
2	KEWAJIBAN	739.09	1,268.70	1,291.47	753.89	425.24	(10.62)
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	739.09	1,268.70	1,291.47	753.89	425.24	(10.62)
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
3	EKUITAS DANA	20,708.86	22,853.62	24,309.76	29,181.24	-	13.64
3.1.	Ekuitas Dana Lancar	656.17	1,354.89	416.67	3,958.02	-	167.73
3.2.	Ekuitas Dana Investasi	19,485.17	21,498.74	23,893.09	25,223.21	-	9.82
3.3.	Ekuitas Dana Cadangan	567.51	-	-	29,181.24	-	1,680.66
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21,447.95	24,122.32	25,601.24	29,935.13		13.19

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kegunaan dari masing-masing perhitungan rasio tersebut adalah: (a) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi rasio lancar, dan rasio cepat; (b) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, meliputi rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal; (c) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Tabel

3.34 menyajikan hasil analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015.

Dari Tabel 3.33 dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau secara keseluruhan dinilai sangat baik dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas menunjukkan nilai rasio lancar maupun rasio cepat seluruhnya di atas 100 persen dan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat tinggi dan mengalami peningkatan, yakni di atas 100 persen.

Tabel 3.33
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (current ratio)	162.01	188.78	206.79	625.01	814.06
2	Rasio cepat (quick ratio)	151.60	183.2	202.56	600.11	752.33
B.	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	1.46	3.45	5.26	39.71	65.58
2	Rasio hutang terhadap modal	1.48	3.57	5.55	38.71	-
C.	Rasio Aktivitas					
1	Rata-rata umur piutang (Hari)	1	1	1	1	1
2	Rata-rata umur persediaan (Hari)	365	365	365	365	365

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya juga sangat baik. Rasio total hutang terhadap total asset masih sangat kecil, yakni berkisar antara 1.46 pada tahun 2011 dan 39,71 persen pada tahun 2015. Rasio hutang terhadap modal sebesar 1.48 persen pada tahun 2011 dan 38,71 pada tahun 2014.Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Riau masih memungkinkan memperbesar pinjamannya guna memacu pertumbuhan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan aktivitas pelayanan Pemerintah Provinsi Riau juga sangat baik. Rata-rata umur piutang Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2011-2015hanya 1 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu penagihan hutang (piutang) Pemerintah Provinsi Riau sangat cepat.Rata-rata umur persediaan mencapai 365 hari (satu tahun), yang berarti persediaan sangat aman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator pendapatan daerah perkapita dilihat berdasarkan rasio total pendapatan daerah Provinsi Riau terhadap jumlah penduduk. Rasio ini menunjukkan besarnya jumlah pendapatan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk melayani sejumlah penduduk daerah tersebut sehingga merupakan ukuran riil dari pendapatan daerah. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehingga harus diiringi oleh peningkatan pendapatan daerah.

Rasio pendapatan daerah Provinsi Riau perkapita tahun 2011 hanya Rp. 950 ribu dan meningkat menjadi Rp. 1,314 juta pada tahun 2014 namun kembali menurun menjadi Rp. 1,087 juta pada tahun 2015, lebih rendah berbanding tahun 2012. Rasio ini masih di bawah rata-rata nasional di mana pada tahun 2014 mencapai Rp. 2,510 juta.

Indikator kemandirian keuangan daerah dilihat berdasarkan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah Provinsi Riau pada tahun 2015 semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena menurunnya ketergantungan atas dana bagi hasil sumberdaya.

Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut bisa diartikan terdapat peningkatan dana Pemerintah Daerah yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan.

Tabel 3.34
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2011-2015

No.	Indikator Kesehatan Fiskal	Tahun					Nasiona 1 2014
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pendapatan Daerah Per Kapita	0.950	1.165	1.159	1.314	1.087	2.510
2.	Kemandirian Keuangan Daerah	40.62	37.81	38.97	39.90	50.29	23,08
3.	Ruang Fiskal Daerah	40.69	47.15	48.06	47.96	63.05	47,51
4.	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah (Tax Ratio) dengan Migas	0.37	0.37	0.35	0.37	0.40	5,04
	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah (Tax Ratio) tanpa Migas	0.57	0.60	0.57	0.58	0.58	5,04
5.	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	129.62	129.19	119.24	171.07	140.49	100,00
6.	Rasio Belanja Modal	31.47	29.41	29.84	11.13	26.00	24,83
7.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung	16.44	11.85	11.66	16.73	12.64	33,82
8.	Optimalisasi SILPA	9.49	20.06	26.28	25.90	51.38	7,89
9.	Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah	0.46	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Indikator ruang fiskal daerah dilihat berdasarkan rasio antar ruang fiskal terhadap pendapatan daerah. Ruang fiskal dalam APBD daerah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari dana alokasi khusus, hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana darurat; yang dapat digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah selain belanja pegawai tidak langsung dan belanja bunga. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki oleh APBD maka semakin leluasa dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggunakan dananya untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas masing-masing daerah. Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Riau meningkat dari 40,69 pada tahun 2011 menjadi 63,05 tahun 2015. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2014, di mana peranan dana transfer meningkat dibanding tahun2013.

Kemampuan daerah dalam memungut pajak daerah dari seluruh potensi penerimaan pajak daerah merupakan cerminan secara tidak langsung dari peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan potensi penerimaan pajak daerah tercermin dari besarnya PDRB dari masing-masing daerah.Semakin besar rasio peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB maka kemampuan daerah tersebut dalam mengkonversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah menjadi pajak daerah yang bisa dipungut juga semakin besar.

Rasio peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB secara nasional (akumulasi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia) sebesar 5,04 persen yang menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah

dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Semakin besar nilai rasionya maka daerah tersebut semakin mampu menggali potensi pajak dan retribusi daerah menjadi penerimaan daerah. Rasio pajak dan retribusi daerah dalam APBD Provinsi Riau hingga tahun 2015 masih dibawah 1 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.

Kemampuan keuangan daerah tercermin dalam seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dalam APBD yang digunakan untuk mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan secara nasional (akumulasi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia) sebesar 100,90 persen yang menunjukkan tingkat kemampuan dalam mendanai belanja daerah sangat tinggi karena penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan masih melebihi keperluan untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Di dalam APBD Provinsi Riau kemampuan mendanai belanja daerah melebihi rata nasional selama periode 2011 hingga 2015.

Porsi belanja modal yang semakin besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipotensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal terhadap keseluruhan belanja yang semakin besar, maka kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan porsi belanjanya pada belanja modal semakin besar sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah secara nasional (akumulasi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia) sebesar 24,83 persen yang menunjukkan besaran daerah mengalokasikan seluruh belanjanya untuk belanja modal dalam hal ini berarti secara nasional, belanja modal dialokasikan sebesar 24,83 persen dan sisanya untuk belanja lainnya. Selama periode 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi di dalam rasio belanja daerah, di mana rata-rata sudah sangat baik hanya pada tahun 2014 sangat rendah yaitu sebesar 11,13 sedangkan nasional sebesar 24,83.

Kualitas belanja daerah semakin baik dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD yang menunjukkan semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga APBD lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Asumsinya jika belanja pegawai tidak langsung semakin berkurang maka dana APBD dapat direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.

Indikator optimalisasi SILPA dilihat berdasarkan rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. SILPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya. Daerah mampu mengoptimalkan penggunaan SILPA jika SILPA tahun sebelumnya mampu dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan. Semakin besar rasio optimalisasi SILPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SILPA juga semakin besar.

Rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah secara nasional (akumulasi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia) sebesar 7,89 persen yang merupakan proporsi optimalisasi SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan. Pada tahun 2011 rasio SILPA pada APBD Provinsi Riau hanya 9,49 namun di tahun-tahun berikutnya menjadi semakin besar atau tidak efektif pada tahun berjalan dengan rasio 51,38. Pemerintah Provinsi Riau lebih optimal dalam memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk membiayai belanja daerahnya dibanding Pemerintah Daerah secara nasional.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komperabilitas, akurat, efisien dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki 6 fungsi, yakni:

1. Fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang berarti anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau selama Periode 2011-2015 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengatur kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah diuntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau

senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2011 hingga tahun 2015, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (*one day service*).
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Penyempurnaan tarif untuk perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari 5% menjadi 10% yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-KB.
6. Merumuskan dan menyarankan perbaikan formula perhitungan, melalui Pembentukan Tim Verifikasi perhitungan PBB Migas dengan melibatkan instansi pusat seperti Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Kementerian ESDM, BP-Migas dan Kementerian Dalam Negeri.
7. Penambahan Kantor-kantor Pelayanan seperti di UP Kuantan Singingi Hilir, UP Kuantan Mudik, UP Kandis, UP Pangkalan Kuras, dan UP Ujung Batu dan Penyediaan Pelayanan Samsat Keliling.
8. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan

tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

9. Verifikasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersama dengan BPKP.
10. Penegakkan Hukum terhadap kendaraan-kendaraan non BM, agar mendaftarkan pajaknya di Provinsi Riau.
11. Meningkatkan SDM aparatur melalui pelatihan-pelatihan, antara lain meningkatkan pengawasan penerimaan pendapatan bekerjasama dengan BPKP; Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Kesamsatan.
12. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Biro Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Dipenda.

(2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian formula DAU yang lebih akomodatif terhadap kondisi dan kepentingan masyarakat Riau sebagai daerah penghasil SDA.
2. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
3. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI (khususnya yang berasal dari Provinsi Riau) untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
4. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan (CPO) bersama dengan Universitas Riau.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2011-2015 rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 7,29 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12,42 persen per tahun, diikuti oleh PAD sebesar 12,12 persen dan pendapatan dari Dana Perimbangan mengalami penurunan sekitar 2,66 persen (lihat Tabel 3.1).

Selanjutnya dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dinyatakan

bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2015 kurang dari 100 persen, padahal pada tahun-tahun sebelumnya realisasinya lebih besar dari 100 persen (Tabel 3.35). Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pencapaian realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2011-2015 lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan tahun 2015 tidak mencapai target.

Lebih lanjut dari Tabel 3.35 dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah yang konsisten memberikan proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah yang lebih besar dari 100 persen adalah komponen Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah dari komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah berfluktuatif dan cenderung kurang dari 100 persen, kecuali tahun 2014.

Tabel 3.35
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 Provinsi Riau

No.	Uraian	Proporsi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.55	118.68	109.83	110.12	101.89
1.1.	Pajak Daerah	126.40	111.89	104.24	102.05	96.32
1.2.	Retribusi Daerah	129.38	114.3	144.84	90.62	62.22
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.37	100.22	104.92	92.48	85.46
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.66	197.57	147.93	183.35	141.48
2	DANA PERIMBANGAN	111.72	95.38	95.07	111.21	81.48
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113.81	94.6	93.82	114.51	76.47
2.2.	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	96.31	100.03	101.09	101.36
3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100.00	96.31	96.6	101.09	101.36
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		117.64	103.13	100.82	109.89	93.21

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013,2014 dan 2015 diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang lebih besar daripada Dana Perimbangan perlu terus dilakukan.Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerahnya.

Apabila Pemerintah Provinsi Riau secara konsisten menerapkan

kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah, maka diproyeksikan Pendapatan Daerah akan meningkat menjadi Rp. 8,190,306.20 juta pada tahun RKPD 2017 dan Rp. 8,798,005.92 juta tahun 2018 dan Rp. 8,898,504.09 juta di tahun 2019. Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan komponen-komponennya disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36
Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2019
Provinsi Riau (Rp. Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2013	Pertumbuhan (%)	Existing			Proyeksi		
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,725,623.91	15.21	3,049,490.02	3,476,732.49	3,495,548.89	3,666,100.00	3,760,356.54	3,860,854.70
1.1.	Pajak Daerah	2,110,997.53	13.93	2,496,771.21	2,572,759.00	2,765,548.89	3,000,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00
1.2.	Retribusi Daerah	24,359.50	15.70	16,992.12	20,504.63	11,000.00	7,000.00	15,731.23	16,229.40
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146,463.62	15.70	154,214.51	178,216.27	218,000.00	155,300.00	218,000.00	218,000.00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	443,803.27	22.19	381,512.18	705,252.59	501,000.00	503,800.00	526,625.30	526,625.30
2	DANA PERIMBANGAN	3,610,182.23	5.87	4,231,808.63	2,548,627.47	3,729,334.42	4,516,231.20	5,027,174.39	5,027,174.39
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,844,812.99	5.23	3,367,086.54	1,831,045.03	1,694,678.66	1,895,254.07	2,099,445.85	2,099,445.85
2.2.	Dana Alokasi Umum	726,630.92	7.92	820,984.58	654,220.25	604,165.43	1,424,804.74	1,434,458.15	1,434,458.15
2.3.	Dana Alokasi Khusus	38,738.32	7.92	43,737.51	63,362.19	1,430,490.34	1,196,172.40	1,493,270.39	1,493,270.39
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	658,840.06	30.89	655,513.51	883,578.33	7,825.00	7,975.00	10,475.00	10,475.00
3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	-	0.00	2,665.08	2,825.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00
3.2.	Dana Darurat	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	636,219.96	30.89	655,513.51	880,913.25	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	22,620.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	6,994,646.20	12.87	7,936,812.17	6,908,938.29	7,232,708.31	8,190,306.20	8,798,005.92	8,898,504.09

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Hasil Proyeksi Tahun 2017-2019

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.37 menyajikan Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011–2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Provinsi Riau pada tahun 2011 sebesar Rp 1,208,942.58 juta, meningkat menjadi Rp 2,126,872.32 juta pada tahun 2015. Dilihat dari komponen pembentukannya, Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Riau lebih besar pada komponen Biaya Langsung hingga tahun 2013, namun pada tahun 2014 belanja langsung untuk aparatur porsinya mulai menurun dibandingkan dengan belanja tidak langsung aparatur.

Tabel 3.37
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No	Belanja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	700,689.55	790,114.36	965,392.46	937,258.18	1,269,409.22
1	Gaji dan Tunjangan	1,980.35	1,031.27	7,305.09	430,721.06	583,362.51
2	Tambahan Penghasilan PNS	307,717.47	349,949.54	433,584.43	425,297.89	576,017.45
3	Belanja Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9,845.08	13,723.40	10,911.64	9,417.35	12,754.73
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	47,905.93	60,377.75	67,332.19	71,508.39	96,849.95
5	Belanja Penghasilan Lainnya	0.00	0.00	0.00	178.5	241.76
6	Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	135	182.84
B.	BELANJA LANGSUNG	1,812,215.52	2,517,570.53	831,317.11	633,101.04	857,463.09
1	Honorarium PNS	29,125.47	21,239.76	38,030.66	19,370.71	26,235.42
2	Honorarium Non PNS	7,801.74	10,726.29	16,661.83	95,404.19	129,214.09
3	Uang Lembur	1,870.64	2,547.31	4,247.46	4,678.17	6,336.05
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9,333.30	15,665.24	23,952.18	6,733.72	9,120.06
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi& Bimtek PNS	9,421.27	11,392.46	3,049.59	6,335.07	8,580.13
6	Belanja Pegawai pada BLUD	0.00	0.00	0.00	54,328.82	73,582.19
7	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0.00	0.00	0.00	197.4	267.36
8	Belanja Uang Saku	0.00	0.00	0.00	14,208.56	19,243.87
9	Belanja Premi Asuransi	702.02	305.73	523.08	1,713.15	2,320.27
10	Belanja makanan dan minuman	71,539.95	90,360.02	118,990.92	93,465.20	126,587.94
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3,845.47	3,888.23	2,621.86	2,898.40	3,925.55
12	Belanja Pakaian Kerja	1,801.59	3,061.72	2,891.68	4,347.20	5,887.79
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	11,572.31	15,673.37
14	Belanja Perjalanan Dinas	168,274.30	224,123.17	344,658.99	249,255.05	337,587.51
15	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0.70	0.79	0.97	0.00	0.00
16	Belanja Pemulangan Pegawai	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor	0.31	0.35	0.43	10,819.90	14,654.32
18	BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,758.21	3,315.46	3,584.80	3,048.92	4,129.41
19	BM Pengadaan Komputer	0.05	0.06	0.07	27,315.55	36,995.79
20	BM Pengadaan Mebeulair	11,628.70	9,414.47	9,417.47	16,274.67	22,042.18
21	BM Pengadaan Peralatan Dapur	0.03	0.02	0.04	643.6	871.68
22	BM Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,148.17	6,360.33	5,033.25	3,611.50	4,891.36
23	BM pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	0.00	0.00	0.00	6,878.95	9,316.75
TOTAL		1,208,942.59	1,395,695.23	1,796,709.57	1,570,359.23	2,126,872.32

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya Tabel 3.38 menyajikan hasil Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur pada tahun 2011 sebesar 26.73 persen dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar 20.60 persen, 23.88 persen, 28,03 persen dan 24.81 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa alokasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur lebih kecil dibandingkan dengan belanja pelayanan publik dan belanja pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau secara konsisten melakukan efisiensi dan menerapkan kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Tabel 3.38
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Rasio Persentase
1	2011	1,208,942.59	4,522,579.37	26.73
2	2012	1,395,695.23	6,776,195.03	20.60
3	2013	1,796,709.57	7,525,282.51	23.88
4	2014	1,570,359.23	5,602,074.50	28.03
5	2015	2,126,872.32	8,572,641.37	24.81

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Disamping pembahasan tentang belanja kebutuhan pemenuhan aparatur, sangat penting untuk dibahas tentang belanja pendidikan. Sesuai amat peraturan perundang-undangan yang berlaku, belanja pendidikan dimandatkan minimal 20% dari total anggaran yang tersedia. Tabel 3.39 menyajikan Realisasi Belanja Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011–2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2011 sebesar Rp 340,328.05 juta, meningkat menjadi Rp 330,382.31 juta pada tahun 2015. Dilihat dari komponen pembentukannya, Realisasi Belanja Pendidikan Provinsi Riau lebih besar pada komponen Biaya Langsung daripada belanja tidak langsung.

Selanjutnya Tabel 3.40 menyajikan hasil Analisis Proporsi Belanja Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Dari Tabel tersebut

dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Pendidikan pada tahun 2011 sebesar 7.53 persen dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar 5.07 persen, 5.04 persen, 4.97 persen dan 3.85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau untuk masa-masa mendatang perlu meningkatkan proporsi belanja pendidikan sehingga terpenuhinya mandatori bahwa belanja pendidikan setidaknya 20 persen dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.39
Realisasi Belanja Pendidikan
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No	Belanja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37,795.67	42,382.69	49,791.85	59,080.18	68,797.53
1	Belanja Pegawai	37,795.67	42,382.69	49,791.85	59,080.18	68,797.53
B.	BELANJA LANGSUNG	302,532.37	300,907.54	329,468.07	219,442.72	261,584.78
1	Dinas Pendidikan	296,744.57	275,004.57	306,111.13	198,684.07	252,079.79
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,787.80	25,902.96	23,356.94	20,758.65	9,504.99
TOTAL		340,328.05	343,290.23	379,259.92	278,522.90	330,382.31

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Tabel 3.40
Analisis Proporsi Belanja Pendidikan
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pendidikan	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Rasio Persentase
1	2011	340,328.05	4,522,579.37	7.53
2	2012	343,290.23	6,776,195.03	5.07
3	2013	379,259.92	7,525,282.51	5.04
4	2014	278,522.90	5,602,074.50	4.97
5	2015	330,382.31	8,572,641.37	3.85

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjelaskan tentang Pembiayaan Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah.

Dari Tabel 3.41 dapat dilihat bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau jauh lebih besar dari Pengeluaran Pembiayaannya, sehingga Pembiayaan Netto bernilai positif. Pembiayaan Netto pada tahun 2011 kecil karena pemanfaatan pendapatan daerah relatif lebih efektif yang ditunjukkan SILPA yang paling kecil pada periode 2011-2015. Disamping itu, pengeluaran pembiayaan daerah yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah lebih besar pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan daya ungkit pembangunan Provinsi Riau pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau tumbuh 211.16 persen per tahun pada periode 2011-2015. Ada empat komponen yang memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada periode tersebut, yakni: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran.

Kontribusi utama Penerimaan Pembayaran Daerah bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, yang tumbuh lebih dari 100 persen. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, idealnya SILPA hendaknya mendekati nol. Namun demikian dengan adanya berbagai persoalan, antara lain keterlambatan dalam pencairan dana, menyebabkan SILPA yang positif tidak dapat dihindarkan. Terlepas dari berbagai persoalan yang menyebabkan SILPA yang bernilai positif dengan kecenderungan meningkat, upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah perlu dilakukan. Dengan kata lain Penerimaan Pembiayaan Daerah sebaiknya dimanfaatkan dalam bentuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang produktif.

Tabel 3.41
Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau

No .	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	421.52	1,906.68	1,978.31	1,451.09	3,981.83
1.1 .	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	404.71	1,338.16	1,977.90	1,451.09	3,981.42
1.2 .	Pencairan Dana Cadangan	0.00	567.51	0.00	0.00	0.00
1.3 .	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 .	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 .	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	16.81	0.82	0.41	3.41	0.41
1.6 .	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 .	Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
1.8 .	Penghematan Belanja	0.00	0.00	0.00	1,447.67	0.00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	257.45	105.43	0.00	0.00	0.00
2.1 .	Pembentukan Dana Cadangan	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 .	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2.3 .	Pembayaran Pokok Utang	24.86	0.43	0.00	0.00	0.00
2.4 .	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 .	Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 .	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembiayaan Netto		164.07	1,801.25	0.00	0.00	3,981.83

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selain dari penjelasan di atas, kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Riau dari aspek Pembiayaan Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara Anggaran dan Realisasinya. Berikut ini secara berturut-turut menjelaskan tentang kinerja masa lalu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Riau.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Dari Tabel 3.42 dapat dilihat bahwa secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015, Anggaran Penerimaan Pembiayaan Provinsi Riau sebesar Rp. 9,637 triliun dengan realisasi Rp. 9, 739 triliun yang berarti realisasi (101,06 persen) lebih besar dari anggaran atau lebih 1,06 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan selalu lebih besar dari yang dianggarkan dan secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk menghimpun Penerimaan Pembiayaan relatif optimal.

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), (b) Koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,(e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan (g) Penerimaan Piutang Daerah. Selama Tahun Anggaran 2011-2015, Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Perimaan Piutang Daerah.

Tabel 3.42
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	390.61	421.52	107.91	30.91	7.91
2012	1,839.38	1,906.68	103.66	67.30	3.66
2013	1,977.80	1,978.31	100.03	0.51	0.03
2014	1,447.68	1,451.09	100.24	3.41	0.24
2015	3,981.42	3,981.83	100.01	0.41	0.01
Jumlah	9,636.89	9,739.43	101.06	102.54	1.06

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Dari Tabel 3.43 dapat dilihat bahwa secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015, estimasi SILPA Provinsi Riau sebesar Rp 9,917 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 9,150 triliun atau realisasi sekitar 100.14 persen, lebih besar dari Anggaran atau lebih 0.14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran di Provinsi Riau dilihat dari SILPA cukup baik.

Tabel 3.43
Estimasi dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2011-2015
Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	390.61	404.71	103.61	14.10	3.61
2012	1,339.38	1,338.16	99.91	-1.22	-0.09
2013	1,977.80	1,977.90	100.01	0.10	0.01
2014	1,447.68	1,447.67	100.00	0.00	0.00
2015	3,981.42	3,981.42	100.00	0.00	0.00
Jumlah	9,136.89	9,149.87	100.14	12.98	0.14

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk Anggaran dan realisasi Pencairan Dana Cadangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.44. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pencairan Dana Cadangan hanya terdapat pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 567,5 milyar.

Tabel 3.44
Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	500.00	567.51	113.50	67.51	13.50
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	500.00	567.51	113.50	67.51	13.50

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk Anggaran dan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.45. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman secara kumulatif sebesar Rp. 21,46 milyar namun tidak pernah dianggarkan.

Tabel 3.45
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	0.00	16.81	-	16.81	-
2012	0.00	0.82	-	0.82	-
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	3.41	-	3.41	-
2015	0.00	0.41	-	0.41	-
Jumlah	0.00	21.46	-	21.46	-

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya untuk Anggaran Penerimaan Piutang Daerah Provinsi Riau tidak pernah lagi ditetapkan selama periode 2011 – 2015 dan tidak ada realisasinya.

Tabel 3.46
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Piutang Daerah
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 3.47 menyajikan Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Dari Tabel 3.43 dapat dilihat bahwa secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2011-2015, Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Riau sebesar Rp. 329,92 milyar dengan realisasi Rp. 362,88 milyar yang berarti realisasi (109,99 persen) lebih besar dari Anggaran ataulebih 9,99 persen. Bertambahnya realisasi pengeluaran ini dibandingkan dengan Anggaran yang telah ditetapkan terjadi pada periode 2011 dan 2012, sedangkan setelahnya tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

Tabel 3.47
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	224.92	257.45	114.46	32.53	14.46
2012	105.00	105.43	100.41	0.43	0.41
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	329.92	362.88	109.99	32.96	9.99

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Riau selama Tahun Anggaran 2011-2015 terdiri dari: (a) Pembentukan Dana Cadangan, (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, (c) Pembayaran Pokok Utang,

dan (d) Tuntutan Ganti Rugi. Berikut ini secara berturut-turut dijelaskan tentang kineja masa lalu masing-masing komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Dari Tabel 3.48 dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasi Pembentukan Dana Cadangan Provinsi Riau sebesar Rp. 132,59 milyar (132,59 persen) lebih besar daripada Anggaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 100 milyar. Dengan kata lain realisasi Pembentukan Dana Cadangan bertambah Rp. 32,59 atau 32,59 persen daripada Anggaran yang telah ditetapkan. Selama Tahun Anggaran 2011-2015, Pembentukan Dana Cadangan Provinsi Riau hanya terjadi pada tahun 2011. Perlu diinformasikan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ini khusus diperuntukkan untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012.

Tabel 3.48
Anggaran dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	100.00	132.59	132.59	32.59	32.59
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	100.00	132.59	132.59	32.59	32.59

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dari Tabel 3.49 dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasinya samadengan yang dianggarkan sebesar Rp. 205. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Riau sejak tahun 2013 hingga 2015 tidak dianggarkan lagi di dalam APBD dan juga tidak ada realisasinya.

Tabel 3.49
Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2012	105.00	105.00	100.00	0.00	0.00
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	205.00	205.00	100.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Selanjutnya Tabel 3.50 menyajikan Anggaran dan realisasi Pembayaran Pokok Utang Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasinya sebesar Rp. 25,29 milyar (101,47 persen) lebih besar berbanding Anggaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 24,92 milyar Dengan demikian realisasi Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Provinsi Riau lebih Rp. 0,37 milyar atau 1,47 persen daripada Anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.50
Anggaran dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	24.92	24.86	99.74	-0.06	-0.26
2012	0.00	0.43	-	0.43	-
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	24.92	25.29	101.47	0.37	1.47

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Untuk Anggaran dan realisasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.51. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Piutang Tuntutan Ganti Rugi tidak pernah lagi dianggarkan dan juga tidak ada realisasinya.

Tabel 3.51
Anggaran dan Realisasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta alokasi belanja diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung didasarkan atas kebijakan mengalokasikan belanja wajib/mengikat meliputi belanja pegawai, belanja bunga yang dialokasikan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman, menganggarkan bantuan biaya produksi tertentu agar harga jual yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat, serta belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersifat spesifik dan telah ditetapkan peruntukannya. Sedangkan Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilaksanakan secara terukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana perlu dilakukan analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan analisis Pembiayaan Daerah. Berturut-turut berikut ini akan dijelaskan analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan analisis Pembiayaan Daerah.

3.2.2.1. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang

dilakukan meliputi: (a) analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, (b) analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, (c) analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan (d) analisis proyeksi belanja daerah.

Tabel 3.52 menyajikan hasil analisis proporsi realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015.Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi realisasi baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan di bawah 100 persen.Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan.Untuk proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Sementara itu proporsi realisasi Belanja Langsung terhadap Anggaran yang telah ditetapkan cenderung menurun.

Tabel 3.52
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011– 2015 Provinsi Riau

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	92.04	79.71	82.7	83.02	61.94
1.1.	Belanja Pegawai	89.21	90.9	88.72	87.45	83.95
1.2.	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
1.4.	Belanja Hibah	95.3	79.74	81.18	70.85	91.45
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	99.96	75.25	67.73	58.68	11.92
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	96.11	77.79	88.42	87.25	85.92
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	83.71	60.4	62.61	97.52	34.72
1.8.	Belanja Tidak Terduga	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA LANGSUNG	86.88	79.61	85.79	46.04	76.68
2.1.	Belanja Pegawai	94.95	92.55	91.85	71.45	75.48
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.32	77.08	83.89	45.34	66.20
2.3.	Belanja Modal	86.73	79.84	86.43	42.87	86.21
	Jumlah Belanja	88.90	79.66	84.41	63.31	68.04

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, maka pendapatan daerah hendaklah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya Belanja Daerah haruslah dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang menjadi skala

prioritas berupa pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum/sosial yang layak. Prinsip belanja daerah yang transparan dan akuntabel hendaknya diterapkan untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Analisis Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah yang juga penting dilakukan adalah analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah. Hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun Anggaran 2011–2015 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertum- buhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,212,141.60	1,587,160.70	1,529,856.23	1,377,873.34	1,780,732.56	11.66
1	Belanja Pegawai	701,024.53	790,433.93	965,770.46	827,596.43	1,012,730.80	10.75
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota & Pemerintah Desa	511,015.53	796,726.77	553,585.77	543,827.27	763,713.78	16.02
3	Belanja Tidak Terduga	101.55	0.00	10,500.00	6,449.63	4,287.98	-57.36
B.	BELANJA LANGSUNG	279,881.65	306,805.33	405,517.50	400,576.98	565,267.21	20.42
1	Belanja Pegawai	235,117.02	247,361.89	324,437.11	290,072.72	372,012.28	13.51
2	Belanja Bahan Pakai Habis	33,969.49	43,012.02	57,792.23	62,348.29	94,436.53	30.08
3	Belanja Premi Asuransi	2,495.76	5,780.18	6,540.48	20,098.75	45,097.40	119.11
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,299.38	10,651.23	16,747.68	28,057.22	53,721.00	61.14
C.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	257,449.71	105,429.89	0.00	0.00	0.00	-14.76
1	Pembentukan Dana Cadangan	132,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pembayaran Pokok Utang	24,858.05	429.89	0.00	0.00	0.00	-24.57
Total (A + B + C)		1,749,472.96	1,999,395.93	1,935,373.73	1,778,450.32	2,345,999.77	8.72

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Dari Tabel 3.53 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Riau tumbuh sebesar 8,72 persen. Pertumbuhan terbesar pada alokasi Belanja Langsung, yakni sebesar 20,42 persen. Sementara itu pertumbuhan alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar 11,65 persen. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Provinsi

Riau secara konsisten melakukan efisiensi dan menerapkan kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut maka dapat diproyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengingat serta Prioritas Utama Provinsi Riau. Hasil proyeksi disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun Anggaran 2017-2019 Provinsi Riau (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,445,045.10	3,771,710.42	3,815,818.20
1	Belanja Pegawai	2,088,441.38	2,374,176.46	2,444,284.24
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa	1,346,603.72	1,361,533.96	1,361,533.96
3	Belanja Tidak Terduga	10,000.00	36,000.00	10,000.00
B.	BELANJA LANGSUNG	770,470.63	797,527.95	872,678.25
1	Belanja Pegawai	507,060.25	524,867.15	574,324.89
2	Belanja Bahan Pakai Habis	128,718.90	133,239.24	145,794.24
3	Belanja Premi Asuransi	61,468.67	63,627.32	69,622.86
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73,222.81	75,794.24	82,936.26
C.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00
Total (A + B + C)		4,215,515.73	4,569,238.37	4,688,496.45

Sumber: Hasil Proyeksi

3.2.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sementara, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya

jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dipaparkan: (a) Hasil Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, (b) Hasil Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, (c) Hasil Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, dan (d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah.

Hasil analisis penutup defisit riil anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2013 disajikan pada Tabel 3.55. Defisit riil diperoleh dari realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Defisit Riil Provinsi Riau pada tahun 2011 sebesar Rp 917,86 milyar (surplus) dan tetap surplus sebesar Rp 71,12 milyar pada tahun 2012 bahkan tahun 2014 surplus meningkat menjadi Rp. 2,530.34 milyar, namun pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp 530,64 milyar demikian juga tahun 2015 sebesar Rp. 844.47 milyar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwapengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau belumlah mantap namun masih bersifat situasional atau tergantung pada keadaan.

Tabel 3.55
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5,440.44	6,847.32	6,994.65	8,132.41	6,904.13	6.73
2	Belanja Daerah	4,265.13	6,670.77	7,525.28	5,602.07	7,748.61	20.42
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	257.45	105.43	0.00	0.00	0.00	-25.00
A.	Defisit riil	917.86	71.12	-530.64	2,530.34	-844.47	-48.00
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	404.71	1,338.16	1,977.90	1,451.09	3,981.42	220.94
5	Pencairan Dana Cadangan	0.00	567.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	16.81	0.82	0.00	3.41	0.41	-24.39
9	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	421.52	1,906.68	1,977.90	1,451.09	3,981.83	211.16
A+B	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	1,339.38	1,977.80	1,447.26	3,981.42	3,137.36	33.56

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Lebih lanjut dari Tabel 3.55 dan juga Tabel 3.56 dapat dilihat bahwa surplus/defisit Anggaran Provinsi Riau yang diikuti dengan realisasi penerimaan yang cenderung mengalami peningkatan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan juga mengalami peningkatan. Peningkatan Total Penerimaan Pembiayaan Daerah terutama sekali disebabkan oleh peningkatan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya, diikuti dengan peningkatan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 3.56
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2011-2015 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	404.71	1,338.16	1,977.90	1,451.09	3,981.42	220.94
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	567.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	16.81	0.82	0.00	3.41	0.41	-24.39
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	1,339.38	1,977.80	1,447.26	3,981.42	3,137.36	43.69

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Disamping analisis di atas, sebagai bagian dari analisis Pembiayaan Daerah juga perlu analisis realisasi SILPA. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran.Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.Hasil analisis realisasi SILPA Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.57.

Dari Tabel 3.57 dapat dilihat bahwa jumlah SILPA Provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ini terjadi sebagai sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. SILPA yang besar ini terjadi sebagai akibat dari penghematan belanja dan peningkatan Pendapatan Daerah yang jauh melebihi target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk masa yang akan datang pengalokasian belanja, khususnya untuk Belanja Modal dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang memberikan daya ungkit dalam pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

Tabel 3.57
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Jumlah SILPA	404,707.16	100.00	1,338,164.11	100.00	1,977,900.61	100.00	1,447,673.57	100.00	3,981,422.30	99.99
2	Pelampauan penerimaan PAD	477,434.22	117.97	407,466.78	30.45	243,988.49	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	338,489.73	83.64	-175,092.03	-13.08	-187,275.80	-9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	-24,489.07	-1.83	212.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	404,707.16	100.00	1,338,164.11	100.00	1,977,900.61	100.00	1,447,673.57	100.00	0.00	0.00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	751.79	0.19	787.90	0.06	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.51	0.01

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Tabel 3.58 menyajikan hasil analisis Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2013. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.58
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2015 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Pert. (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Saldo kas neraca daerah	1,340,133.36	1,978,589.17	1,447,325.03	3,985,016.54	3,135,730.00	33.50
	Dikurangi:						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	751.79	787.9	60.72	753,888.38	425,238.90	14,115.88
3	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	1,339,381.57	1,977,801.27	1,447,264.31	3,231,128.16	2,710,491.10	25.59

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Dari Tabel 3.58 dapat dilihat bahwa salo kas neraca Provinsi Riau meningkat dari Rp 1,340,133,36 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 3,135.730 juta pada tahun 2013. Demikian juga kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan cenderung mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 751,79juta pada tahun 2011 menjadi Rp 425.238,90 juta. Dengan mengurangi saldo kas neraca dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan diperoleh Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Riau. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Riau berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari Rp 1,339,381,57 juta pada tahun 2011 menjadi Rp

2.710.491,10 juta pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa sisa anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Provinsi Riau untuk tahun berikutnya cukup besar.

Mengacu pada data historis pada Tabel 3.59 dapat dihitung tingkat pertumbuhan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran. Hasil perhitungan pertumbuhan dan proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 – 2019 disajikan pada Tabel 3.59. Dari Tabel 3.59 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Riau diusahakan untuk turun sehingga diproyeksikan sebesar Rp. 1,614,074.59 juta pada tahun 2017, Rp. 1,089,571.78 juta dan pada tahun 2019 sebesar nol rupiah.

Tabel 3.59
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 -2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Saldo kas neraca daerah	1,614,074.59	1,089,571.78	0.00
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00
3	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00
4	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	1,614,074.59	1,089,571.78	0.00

Sumber: Hasil Proyeksi

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas, berikutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut ke pos-pos belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pengalokasian masing-masing sumber penerimaan memiliki sejumlah kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain: (a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan retribusi pajak dipungut; (b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan

kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; (c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah; (d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan, dan (e) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Dengan mempertimbangkan sejumlah kebijakan tersebut dilakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Hasil penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai
Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pendapatan	8,190,306.202	8,798,005.92	8,898,504.09
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1,614,074.59	1,089,571.78	0.00
	Total penerimaan	9,804,380.79	9,887,577.70	8,898,504.09
	Dikurangi:			
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3,591,747.08	2,861,127.55	2,476,688.46
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	6,212,633.71	7,026,450.15	6,421,815.63

Sumber: Hasil Proyeksi

Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan Daerah diperkirakan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebesar Rp. 8,190,306.20 juta pada tahun 2017 dan terus meningkat sehingga menjadi Rp. 8,898,504.09 juta pada tahun 2019. Sementara itu pencairan dana cadangan diperkirakan sebesar Rp 00,00 pada tahun 2019. Dengan kondisi SILPA tahun sebelumnya dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,614,074.59 juta dan diasumsikan SILPA pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 0 maka total Penerimaan Daerah diperkirakan sebesar Rp. 9,804,380.79 juta pada tahun 2017 dan menurun menjadi Rp. 8,898,504.09 juta pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil proyeksi, Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Riau pada tahun 2017 sebesar Rp 3,591,747.08 juta dan menurun menjadi Rp. 2,476,688.46 juta pada tahun 2019. Dengan mengurangi Penerimaan Daerah dengan Belanja dan

Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama diperoleh Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Riau. Dengan demikian, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Riau pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 6,212,633.71 juta dan meningkat menjadi Rp 6,421,815.63 juta pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 3.60 disusun rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Tahun Anggaran 2017-2019. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019 disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Kapasitas Keuangan Daerah	9,804,380.79	9,887,577.70	8,898,504.09
	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	4,215,515.73	4,569,238.37	4,688,496.45
1.1	Belanja Tidak Langsung	3,445,045.10	3,771,710.42	3,815,818.20
1.2	Belanja Langsung	770,470.63	797,527.95	872,678.25
1.3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	5,588,865.06	5,318,339.33	4,210,007.64
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	4,141,957.72	3,287,129.39	2,887,597.74
2.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH	2,620,847.20	1,453,019.10	1,329,573.42
2.2	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	970,899.88	1,408,108.45	1,147,115.04
2.3	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya	550,210.65	426,001.84	410,909.28
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	1,446,907.34	2,031,209.94	1,322,409.91
3.1	Belanja Hibah	1,293,607.02	1,466,411.10	1,067,696.33
3.2	Belanja Subsidi	-	-	-
3.3	Bantuan Sosial	10,000.00	36,400.00	10,000.00
3.4	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	143,300.31	528,398.85	244,713.58
4	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0.00	0.00	0.00

Sumber: Hasil Proyeksi

Dari Tabel 3.61 dapat dilihat bahwa kapasitas riil digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran prioritas, diawali dengan pengalokasian anggaran untuk Prioritas I, yang kemudian diikuti dengan Prioritas II dan Prioritas III. Total rencana pengeluaran Prioritas I pada tahun 2017 sebesar Rp 4,215,515.73 juta, kemudian terus meningkat menjadi Rp 4,688,496.45 pada tahun 2019. Sedangkan total rencana pengeluaran Prioritas II memiliki pola yang menurun, dari Rp 5,588,865.06 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 4,210,007.64 juta pada tahun 2019. Selanjutnya pengeluaran Prioritas III mengalami tren naik dan kemudian turun dari Rp 1,446,907.34 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 2,031,209.94 juta pada tahun 2018 dan Rp 1,322,409.91 pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019 dapat ditentukan kerangka pendanaan kapasitas riil keuangan daerah. Kerangka pendanaan diwujudkan dalam bentuk pola pengeluaran berdasarkan skala prioritas, yakni prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk belanja wajib, mengikat dan prioritas utama. Belanja prioritas ini merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintahan daerah yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu Prioritas II juga memuat program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Sementara itu, Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.62 menyajikan Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017-2019. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa secara nominal alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Prioritas I dan Prioritas III cenderung menurun.

Sementara itu, alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Prioritas II cenderung mengalami peningkatan. Secara keseluruhan persentase alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Prioritas I dan II lebih besar dari alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Prioritas III.

Tabel 3.62
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 – 2019

No.	Jenis Dana	2017		2018		2019	
		Rp. Jutaan	%	Rp. Jutaan	%	Rp. Jutaan	%
1	Prioritas I	43.00	4,215,515.73	46.21	4,569,238.37	52.69	4,688,496.45
2	Prioritas II	42.25	4,141,957.72	33.25	3,287,129.39	32.45	2,887,597.74
3	Prioritas III	14.76	1,446,907.34	20.54	2,031,209.94	14.86	1,322,409.91
		100.00	9,804,380.79	100.00	9,887,577.70	100.00	8,898,504.09

Sumber: Hasil Proyeksi

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah pada bab sebelumnya dan Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan UU tersebut telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan hingga tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari semakin memburuknya indikator pembangunan daerah terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan harga komoditas utama seperti minyak bumi dan komoditas perkebunan yang selama ini telah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi provinsi Riau.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi, semakin menghadapi banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal maupun eksternal serta perlunya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Permasalahan dan persoalan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi Kapasitas dan kualitas masyarakat serta pemerintahan yang masih rendah, ketahanan sosial budaya, hasil produk sumberdaya alam yang senantiasa mengalami penurunan harga sementara sektor lain yang seharusnya menjadi basis pertumbuhan ekonomi seperti industri dan inovasi belum mampu menggantikan kontribusi sumberdaya alam pertambangan dan pertanian. Belum mampunya sektor industri dan inovasi untuk menjadi pengganti basis ekonomi akibat dari belum tersrukturnya dengan baik dan mendalam sektor industri tersebut, padahal dengan penurunan harga komoditas utama baik hasil migas dan pertanian seharusnya akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi sektor industri karena sektor industri akan mendapatkan bahan baku yang lebih murah.

Persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas SDM karena belum terdesainnya pembangunan SDM yang dapat mendukung perkembangan sektor industri; kondisi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas akibat sumber-sumber ekonomi yang masih tergantung pada sumber daya alam, dan rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah sehingga kemampuan ekonomi daerah yang terus mengalami penurunan serta kerjasama regional yang belum optimal dan bersinergi. Kondisi tersebut dihipunkan pada 3 aspek yaitu :

- (1) Kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga;
- (2) Pelayanan umum yang terdiri dari:
 - (a) 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi; Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.
 - (b) 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi & informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
 - (c) 8 (Delapan) Urusan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
 - (d) 6 (Enam) Fungsi Penunjang Urusan meliputi: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Diklat, Litbang dan Fungsi lain
- (3) Daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia.

4.1.1.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Permasalahan utama adalah: (1) Kontribusi sektor dengan migas dimana sektor pertambangan dan penggalian harga konstandi dalam PDRB Riaumengalami penurunan dari 31,86% pada tahun 2011 menjadi 24,18% pada tahun 2015dan turun sebanyak 7,68% atau turun 5,53% per tahun. Sementara kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas harga konstan turun sebanyak 1,02% atau turun dari 9,03 pada tahun 2011 menjadi 8,01%;(2) Rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian pada semua sub sektor(tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kehutanan; (3) Belum berkembangnya industri pengolahanhal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut dengan migas harga konstan pada tahun 2011 sebesar 24,73% dan pada tahun 2015 sebesar 28,26% atau hanya naik sebesar 3,53% atau 2,71% per tahun;Sementara sektor pertanian yang menjadimata pencaharian sebagian penduduk provinsi Riau dalam sektor ini hanya memberikan peningkatan kontribusi sebesar 1,10% per tahun;(4) Rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian *non-tradable*, hal initergambar dari kontribusi sektor jasa hanya 1,70% pada tahun 2011 menjadi 2,06% pada tahun 2015 atau hanya naik 0,36% selama periode tersebut atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,38% per tahun, jelasnya dapat dilihat pada Bab II Tabel 2.19-2.45; (5) Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif, namun sudah terjadi perbaikan pengendalian angka inflasi dari 8,83% tahun 2013 menjadi 2,65% pada tahun 2015 atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 35,70%, lihat Bab II Tabel 2.24 dan Gambar 2.29. Namum penurunan angka inflasi tersebut bukan terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa tetapi karena memang daya beli masyarakat yang mengalami penurunan hal tersebut tergambar dari nilai PDRB per kapita harga konstan yang juga mengalami penurunan dari 71,64 juta per kapita pada tahun 2011 menjadi 70,76 juta per kapita pada tahun 2015. Kondisi ini memberikan gambaran terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum selama periode tersebut;(6) Terjadinya peningkatan angka kemiskinan dimana pada tahun 2011 hanya sebesar 8,17% dan meningkat menjadi 8,82% pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan sebesar 0,05% atau

jumlah orang miskin bertambah sebanyak 90.420 orang dengan tingkat keparahan kemiskinan yang semakin tinggi dimana pada tahun 2011 hanya 0,39 kemudian meningkat menjadi 0,45 pada tahun 2015, lihat Bab II Tabel 2.26 dan Gambar 2.33-2.44, hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang semakin tinggi antara penduduk miskin. Kondisi ini terjadi karena penanganan kemiskinan belum berjalan secara efektif hal tersebut tergambar dari belum fokus dan lokusnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap determinan indikator kemiskinan.

4.1.1.2. Kesejahteraan Sosial

Permasalahannya adalah: (1) Masih rendahnya IPM provinsi Riau dimana pada tahun 2015 yaitu 70,84 dan hanya mengalami pertumbuhan 0,63% per tahun sejak tahun 2011. Disisi lain tingginya ketimpangan IPM antar kabupaten dan kota pada tahun 2015. Hanya 5 kabupaten kota yang memiliki IPM yang berada di atas rata-rata IPM Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, Siak, Dumai, Bengkalis dan Kampar dan tujuh Kabupaten yang memiliki IPM dibawah rata-rata IPM provinsi Riau dan yang paling rendah adalah kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebesar 62,91, jelasnya lihat Tabel 2.29 dan Gambar 2.47 pada Bab II; (2) Belum optimalnya perluasan jaringan dan perluasan lapangan kerja terdidik/terampil. Kondisi dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2015 hanya mencapai 63,22% dan masih terdapat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,83% dan mengalami peningkatan sebesar 11,83% per tahun sejak tahun 2011-2015, dan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 11,76% jelasnya lihat pada Bab II di Tabel 2.30 dan 2.31.

4.1.1.3. Seni Budaya dan Olahraga

Permasalahan: (1) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya melayu belum optimal dimana hanya ada 158 jumlah grup seni budaya di seluruh Provinsi Riau; (2) Belum semua wilayah memiliki sarana dan prasarana pendukung pengembangan budaya melayu, hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan gedung kesenian hanya 6 gedung kesenian serta tidak berkembangnya pegelaran seni dan budaya di wilayah kabupaten kota; (3) Penerapan nilai-nilai

melayu yang Islami belum melembaga karena belum teringrasinya antara pendidikan agama dengan kurikulum yang memasukkan unsur budaya melayu dalam pembelajaran; (4) Prestasi olahraga yang belum menunjukkan pengaruh yang signifikan karena belum optimalnya pemanfaatan fasilitas olahraga (gedung/venue eks PON XVIII) lihat pada Bab II Tabel 2.33, sebagai sarana tempat pembinaan bakat dan peningkatan prestasi olahraga dan kepemudaan.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Urusan Pendidikan

Permasalahan utama bidang pendidikan di provinsi Riau adalah masih terdapat 1,33% penduduk yang berumur 7-12 tahun (SD) yang belum dan atau tidak berskolah, penduduk umur 13-15 tahun (SMP) 5,64% yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 16-18 tahun (SMA) 24,70% belum dan atau tidak bersekolah. Sehingga kondisi ini menyebabkan APM SD/MI yang masih kurang dari 100%. Sementara APM-SMP/MTs baru mencapai 76,44% dan APM-SMA/MA sebesar 54,59%. Masih rendahnya APM pada jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/MA telah menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 8,49 tahun dan terdapat tujuh kabupaten dimana rata-rata lama sekolahnya di bawah rata-rata lama sekolah provinsi yaitu Kabupaten Kuansing, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kep. Meranti dan yang paling rendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir hanya selama 6,82 tahun.

Namun secara umum Provinsi Riau belum mencapai sasaran wajib belajar sembilan tahun. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah tersebut disebabkan oleh aksesibilitas terhadap sekolah belum meratabaik sarana dan prasarana (ruang kelas dan ruang guru yang layak, laboratorium, perpustakaan dan pendukungnya) serta ketersediaan guru yang merata baik dari aspek jumlah dan kualifikasi per mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan serta masih rendahnya kualitas dalam proses pembelajaran akibat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah, terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan);.

Pengelolaan pendidikan belum terdesain dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Belum optimalnya pendataan terkait dengan kondisi sekolah secara menyeluruh menurut indikator SPM, misalnya berapa persen capaian indikator dari 24 indikator SPM tingkat pendidikan SD, 26 indikator SPM tingkat pendidikan SMP dan 28 indikator SPM tingkat pendidikan SMA serta termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah. Kondisi pendidikan provinsi Riau tersebut dapat dilihat pada Bab II Tabel 2.30-2.59 dan Gambar 2.59-2.73.

2) Bidang Urusan Kesehatan

Permasalahan utamanya adalah: (1) Masih timpangnya angka harapan hidup (AHH) antara wilayah, dimana pada tahun 2015 terdapat 11 kabupaten kota yang AHH yang lebih rendah dari rata-rata AHH provinsi Riau sebesar 70,84 tahun, dan AHH terendah terdapat di Kabupaten Kep. Meranti yaitu 66,72 tahun, lihat pada Bab II. Gambar 2.47. Rendahnya AHH tersebut akibat aksesibilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama bagi kelompok penduduk miskin, dimana Kabupaten Kep. Meranti memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Riau sebesar 34,08%, hal menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dengan pelayanan akses kesehatan yang masih rendah sehingga berakibat pada rendah AHH tersebut; (2) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota dimana rata-rata 1 puskesmas harus melayani 29.329 penduduk dan 1 rumah sakit melayani 96.964 penduduk; (3) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang tercermin dari belum meratanya sebaran dokter dimana Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki 16,12 dokter untuk 100.000 penduduk yang jauh di bawah standar nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk; (4) Persalinan yang difasilitasi terjadi penurunan dimana pada tahun 2015 hanya 59,00% akibat dari adanya perubahan dalam indikator perhitungan. (5) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif masih rendah; (6) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal.

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah: (1) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah, dimana pada tahun 2015 hanya 37,95% kondisi jalan yang baik dari 3.033 km; (2) Tingginya tingkat kerusakan jalan dimana jalan provinsi dimana kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat mencapai 47,92%, lihat Bab II Tabel 2.72.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) Menurunnya daya tampung sungai; (4) kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 1 sampai 2,5 m; (5) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim *sewerage*), (6) Sistem hidrologi lahan basah/gambut belum dioptimalkan.

Permasalahan terkait dengan tata ruang adalah belum disahkannya RTRW provinsi dan areal penggunaan lain seluas 4.505.187 hektar (49,18%) sebagian besar sudah habis dimanfaatkan, sehingga pengembangan perekonomian dengan pola ekstensifikasi pada pemanfaatan lahan sudah tidak mungkin dilakukan oleh karena itu upaya pengembangan perekonomian kedepan harus berbasis orientasi input secara optimal, permasalahan terhadap penataan ruang antara lain : (1) Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan didaerah; (2) Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang; (3) Menurunnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan (untuk tanaman padi mengalami penurunan luas panen sebesar 8,23% per tahun) dan tanaman sayuran mengalami penurunan luas panen sebesar 10,33% per tahun lihat Bab II Tabel 2.143, ruang terbuka hijau (RTH) publik akibat dari alih fungsi lahan; dan (4) Belum optimalnya perwujudan ruang peruntukan investasi di kawasan metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian yang sudah ditetapkan seperti kawasan industri sehingga berakibat pada tingginya biaya logistik dalam pengembangan usaha.

Permasalahan utama pada aspek keciptakaryaan adalah Terjadinya penurunan produksi air minum menurut sumber air minum sebesar 1,77% per tahun (lihat Bab II Tabel 2.6), Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum dimana sumber air minum yang berasal dari ledeng (pipa) dan air kemasan hanya mencapai 46,50%; .

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah adalah: (1) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase); (2) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional; (3) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin serta terjadinya penurunan pembangunan rumah layak huni dengan rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar 15% per tahun lihat Bab II Tabel 2.85.

5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masih tingginya gangguan ketertiban dan keamanan, dimana pada tahun 2015 terdapat 200 kasus dengan enam jenis kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum misalnya terkait dengan politik dan hukum terdapat 106 kasus atau 53% dari enam kasus yang ada, yang diikuti oleh kasus lainnya sebanyak 34 kasus atau 17,00%, lihat Bab II pada Tabel 2.86. Permasalahan utama adalah: (1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah; (2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6) Bidang Urusan Sosial

Permasalahan utama adalah: (1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada sembilan jenis PMKS termasuk keluarga miskin meningkat sebesar 4,95% per tahun (lihat Bab II Tabel 2.88); (2) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan; (3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; dan (4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan dana

zakat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan RT miskin.

4.1.2.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Bidang Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan utama adalah: (1) Meningkatnya angka pengangguran terbuka (TPT) sebesar 11,83% per tahun dan tingkat pengangguran terbuka terjadi terutama pada usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah. TPAK yang mengalami penurunan 1,18% per tahun (lihat Bab II Tabel 2.90 dan Gambar 2.84); (2) Kualitas tenaga kerja masih rendah akibat rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,49 (lihat Bab II Tabel 2.28) dan mutu pendidikan yang masih rendah; (3) Belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha; (4) Persebaran dan penyediaan tenaga kerja yang tidak merata; (5) belum berjalannya dengan baik *teaching factory* terutama pada SMK dalam penyiapan tenaga kerja melalui pembelajaran yang berorientasi bisnis dan produksi, dimana keahlian dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar dan konsumen; (6) belum optimalnya sekolah berbasis industri atau keunggulan wilayah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan unit produksi berbasis keunggulan wilayah.

2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan, dan (2) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3) Bidang Urusan Pangan

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2010-2014, seperti beras turun sebesar 11,87% per tahun, jagung turun sebesar 17,06% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk; (2) Rendahnya rasio produksi

dan konsumsi daging ruminansia hanya mencapai 0,37 (lihat Bab II Tabel 2.87); (3) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (4) Tingginya ketergantungan impor pangan; (5) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; dan (6) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

4) Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama adalah rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan mengalami penurunan 4,52% per tahun. Rendahnya IKLH tersebut akibat; (1) Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan, pada tahun 2015 merupakan bencana terlama karena jumlah titik api (hot spot) ditemukan sejak bulan Januari sampai Desember 2015 sebanyak 8.452 titik api; (2) Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi; (3) Degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut, (4) Daerah aliran sungai (DAS) dalam kondisi kritis mengakibatkan status mutu air 4 sungai besar yaitu Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Sungai Kampar dalam kondisi cemar berat, sehingga daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia air bersih tergolong rendah sampai sangat rendah (57,61%); (5) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil serta tingginya abrasi pantai, (6) Tingginya emisi GRK dan rendahnya pemahaman tentang perubahan iklim, dan (7) Belum tersedianya IPAL Komunal sebagai bentuk infrastruktur sanitasi lingkungan di perkotaan dan pedesaan.

5) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk sebesar 2,60% dengan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 2,63% per tahun dan laki-laki sebesar 2,56% per tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi harus dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja terutama terkait dengan pengembangan industri agro, karena kemajuan sub sistem industri agro sangat

ditentukan oleh keterlibatan kaum perempuan dalam industri tersebut; (2) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP dan susahnya mengakses data kependudukan, sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya; dan (3) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan; (4) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal terutama terkait dengan migrasi.

6) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya persentase desa dalam kategori swasemda yang baru mencapai 0,91% atau 16 desa dari jumlah desa sebanyak 1.846. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan seperti listrik dari 1.846 desa tersebut masih terdapat 641 desa yang belum terdapat akses listrik (39,23%) dan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 74,29% atau 130 desa dari 175 desa yang ada. Keterbatasan akses listrik di pedesaan tersebut berakibat pada lambatnya pelayanan dan proses administrasi pemerintahan desa; (2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan seperti kantor desa dalam pemberdayaan masyarakat; (3) Rendahnya kualitas aparatur desa; dan (4) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi wilayah dan mengakses kesempatan berusaha akibat keterbatasan sarana dan prasarana.

7) Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama adalah: (1) Kualitas pelayanan KB belum maksimal; (2) Belum optimalnya ketahanan keluarga; dan (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, hingga tahun 2015 rasio akseptor provinsi Riau baru mencapai 67,64% dan terendah terdapat di kabupaten Rokan Hilir baru dengan rasio akseptor KB hanya 55,92%. Rendahnya rasio akseptor KB tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaat program keluarga berencana tersebut.

8) Bidang Urusan Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah: (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; (3) Masih tingginya *overloading* angkutan barang berakibat pada tingginya kerusakan jalan dimana kondisi jalan rusak ringan dan berat sepanjang 47,92% lihat Bab II Tabel 2.72; dan (4) Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau, meskipun Riau memiliki 205 pelabuhan umum dan khusus. Dari 205 pelabuhan tersebut, 24 pelabuhan diantaranya belum dimanfaatkan termasuk pelabuhan Samudra Kuala Enok yang terletak di Kawasan Industri Kuala Enok (KIKE); (5) Rendahnya pemanfaatan pelabuhan udara Japura Rengat, Tempuling Tembihan dan Pasir Pengaraian karena kondisi pelabuhan udara ketiganya yang masih minim peralatan dalam mengoperasikan pelabuhan udara tersebut.

9) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan (2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik dan menyebabkan nilai keterbukaan informasi hingga tahun 2015 baru mencapai skor 30,57 (C); (3). Sebagian besar sistem informasi (*website*) yang terdapat pada SKPD belum memuat data perkembangan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi SKPD tersebut sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; (4) Belum dimanfaatkannya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya; (5). Belum ada data terkait dengan SKPD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat; (6). Masih terdapat 6,73% penduduk yang belum mendapatkan akses informasi melalui jasa telekomunikasi nirkabel.

10) Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi dimana hanya 62,19% yang aktif pada tahun 2015 lihat Bab II Tabel 2.122; (2). Rendahnya kemampuan managerial pengelola koperasi hal dapat dilihat dari rendahnya rata-rata SHU per anggota hanya sebesar Rp. 172.000/tahun lihat Bab II Gambar 2.102. (3) Rendahnya kapasitas SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (4) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (5) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk; (6). Belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi oleh *stakeholders* terkait.

11) Bidang Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama adalah: (1) Masihnya rendah pertumbuhan nilai investasi PMDN selama periode 2011-2015 yang hanya tumbuh sebesar 12,40% pertahun berbanding PMA yang tumbuh sebesar 102,19% per tahun lihat Bab II Tabel 2.111. (2) Tidak terjadinya pemerataan investasi diwilayah kabupaten kota selama periode 2011-2015, kabupaten Rokan Hilir investasi PMDN hanya pada tahun 2014 dan PMA pada tahun 2013 lihat Bab II Tabel 2.124. Rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN tersebut akibat infrastruktur pendukung yang masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas; (2) Kurang kondusifnya iklim & minat investasi hal tersebut dapat dilihat dari adanya konflik terkait dengan persolan lahan sebesar 15,50% dan masalah ketenagakerjaan sebesar 2,00% pada tahun 2015; (4) Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi menurut peruntukan tata ruang yang dapat diakses oleh investor secara *online*.

12) Bidang Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya lihat Bab II Tabel 2.126; (2) Minimnya sarana

dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya; (3) Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri karena belum bersinerginya OKP dengan pemerintah dan perguruan Tinggi dalam memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana eks vanue PON XVIII; (4) Rendahnya kualitas atlit karena tidak maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga vanue PON XVIII; (5) Rendah pembinaan manajemen OKP.

13) Bidang Urusan Statistik

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik; dan (2) Referensi data pembangunan yang berbeda-beda pada objek data yang sama; (3) *Updating* data oleh instansi terkait yang lambat sehingga data yang disajikan *out of date*; (4) Tidak seragamnya format dalam penyajian data yang oleh BPS kabupaten Kota dengan BPS provinsi; (5) Belum sinkronnya penyajian data kabupaten kota dengan provinsi; (6). Belum terbangunnya sistem data yang baik sehingga membolehkan masyarakat atau pelaku usaha mengupload data secara mandiri; (7) Belum dijadikannya data *update* sebagai pertimbangan oleh pemerintah sebagai referensi dalam memberikan insentif dalam pembinaan dan pemberdayaan.

14) Bidang Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; dan (2) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pembelajaran Budaya Melayu Riau di sekolah/madrasah dari tingkat SD/MI sampai ke tingkat bahkan perguruan tinggi; (3) Belum maksimalnya apresiasi dan pemahaman masyarakat Riau terhadap adat-istiadat dan budaya Melayu; (4) Belum maksimalnya apresiasi dan pemahaman masyarakat Melayu Riau terhadap seni dan Budaya Melayu Riau; (5) Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga, organisasi kebudayaan, perguruan tinggi dan media massa baik dalam Provinsi Riau, di Indonesia, dan Negara-negara Melayu Serumpun serta Negara-negara lainnya; (6) Kurang tersedianya buku-buku tentang Budaya

Melayu Riau di berbagai perpustakaan mulai dari perpustakaan umum, sekolah, madrasah sampai perguruan tinggi; (7) Kurangnya festival seni budaya Melayu di Riau yang dapat dijadikan sebagai event budaya dan pariwisata; (8) Kurangnya penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada budayawan, seniman dan tokoh adat Melayu Riau; (9) Kurang maksimalnya pengelolaan situs sejarah dan budaya Melayu, dan museum untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman budaya masyarakat di Riau dan wisatawan; (10) belum melekatnya nilai-nilai budaya melayu dalam pembelajaran disemua jenjang pendidikan.

15) Bidang Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama adalah: (1) Keterbatasan sarana dan prasarana; dan (2) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan; (3) buku refensi yang terkait pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam unggulan yang masih terbatas; (4) Kerjasama perpustakaan daerah dengan perpustakaan yang memiliki refensi budaya melayu dan refensi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam unggulan baik nasional dan internasional serta perguruan tinggi yang belum terjalin dengan baik (terkoneksi).

4.1.2.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya produktivitas perikanan dari wilayah kabupaten Kota yang memiliki periaran laut dan umum yang luas seperti Kabupaten Bengkalis dan Kep. Merant Lihat Bab II Gambar 2.115; (2) Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum; (3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi terutama pada perikanan jenis tambak; (4) tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan; (5) Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah; dan (6) Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur, lihat Bab II Tabel 2.167 dimana industri pengolahan ikan

baru pada tahapan Industri Penggaraman dan Pengeringan Ikan dengan kode ISIC-10211.

2) Bidang Urusan Pariwisata

Permasalahan utama adalah: (1) Menurunnya jumlah tamu atau wisatawan asing selama periode 2011-2015; (2) Rendahnya peningkatan jumlah tamu asing dengan hanya pertumbuhan 4,70% per tahun lihat Bab II Tabel 2.134; (3) Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata; (4) Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata (seperti hotel berbintang) dan fasilitas pendukung kepariwisataan; (5) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing; (6) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana; (7) Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan; (8) Mahalnya kuliner pada beberapa lokasi objek wisata terutama kuliner lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut; (9) Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata dimasing-masing daerah.

3) Bidang Urusan Pertanian

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya laju penurunan luas panen sebesar 7,21% per tahun atau 60.686 hektar dari tahun 2011 ke tahun 2015 dan produksi turun sebesar 5,17% per tahun atau 172.965 ton dari tahun 2011 ke tahun 2015 pada tanaman pangan khusus komoditas padi dan palawija, dan rendahnya peningkatan produktivitas dan bahkan terjadinya penurunan produktivitas komoditas padi ladang dan kacang hijau (lihat Bab II Tabel 2.139); (2) Lambatnya perkembangan teknologi pada komoditas padi dan palawija tercermin dari rendahnya produktivitas komoditas tersebut; (3) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan; (4) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain seperti Sumatera Barat dan Utara; Tingginya alih fungsi lahan terutama untuk perkebunan kelapa sawit dari komoditas perkebunan lainnya dan pangan serta palawija; (5) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (6) Rusaknya infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi di daerah sentra produksi; (7) Tingginya konversi lahan pertanian ke sektor lainnya; (8) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; (9)

Terbatasnya rumah potong hewan (RPH) modern yang berstandar SNI; (10) kontribusi sektor pertanian hanya tumbuh 0,88% per tahun.

4) Bidang Urusan Kehutanan

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya kerusakan hutan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 88,16% lihat Bab II Tabel 2.152; (2) Penurunan produksi kayu olahan dengan rata-rata pertumbuhan 23,06% per tahun; (3) Tingginya kerusakan kawasan hutan pada wilayah kabupaten Indragiri Hilir, Kampar Bengkalis dan Rokan Hilir yang mencapai 58,39% atau seluas 607.020,12 hektar lihat Bab II Tabel 2.144; (4) Belum optimalnya konservasi hutan dan lahan dimana rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya terjadi hingga tahun 2013 seluas 95.000 hektar lihat Bab II Tabel 2.153; dan (5) Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan.

5) Bidang Urusan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan utama adalah: (1) Penurunan produksi hasil tambang khususnya minyak bumi dengan rata-rata pertumbuhan penurunan sebesar 11,49% per tahun lihat Bab II Tabel 2.157. Penurunan pertumbuhan ini diperparah dengan turunnya harga komoditas utama tersebut sehingga berakibat pada turunnya penerimaan DBH migas dan dividen dari perusahaan BUMD yang bergerak pada usaha tersebut. Demikian halnya hasil tambang batubara yang mengalami penurunan sebesar 31,20% per tahun; (2) belum adanya hilirisasi migas dari hasil produksi migas sehingga memiliki nilai tambah yang rendah; (3) Belum optimalnya cakupan pelayanan energi listrik dimana masih terdapat sebanyak 12,19% RT yang belum terlayani oleh PLN dan Non PLN dan yang tertinggi terdapat di kabupten Rokan Hulu sebesar 38,17%; (5) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (6) Belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral serta pendayagunaannya.

6) Bidang Urusan Perdagangan

Permasalahan utama adalah: (1) Penurunan ekspor migas sebesar -11,97% dan non migas sebesar -2,81% per tahun lihat Bab II Tabel 2.162; (2) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurang memadainya jumlah maupun

kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

7) Bidang Urusan Perindustrian

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional (2) Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan, sekitar 3,25% per tahun; (3) Rendahnya nilai tambah produk industri; (4). Kurang jenis industri pengolahan yang berkembang di daerah ini, yaitu hanya lebih kurang 10% dari industri nasional; (5) Jumlah dan kualitas SDM industri pengolahan yang masih rendah; (6) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (7) Penguasaan teknologi dalam industri pendukung produksi dan operasional yang masih rendah; dan (8) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (9) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik produksi dan operasional; (10) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (10) Rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (11) Rendahnya kualitas SDM IKM dalam perencanaan dan pengembangan usaha; (12) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM.

8) Bidang Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama adalah: (1) Ketersediaan tempat/lahan transmigran tidak dapat dipenuhi; dan (2) Kesiapan dan kualitas SDM transmigran yang masih rendah; (3) belum sinkronnya kebijakan pembangunan transmigrasi lokal dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; (4) sinergitas pembangunan transmigrasi lokal dengan pemerintah pusat yang berjalan secara optimal; (5) Program transmigrasi lokal belum dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah upaya pemerataan pembangunan di wilayah terisolir dan terpencil; (6)

Belum bersinerginya pengembangan transmigrasi dengan pembangunan UMKM dan IKM.

4.1.2.3. Fokus Penunjang Urusan

1) Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama adalah: (1) Posisi strategis Provinsi Riau belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi, sosial, budaya, politik dan investasi; (2) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal; (3) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan; (4) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan; (5) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah; (6) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan; (7) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah; (8) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada.

2) Bidang Urusan Keuangan

Permasalahan utama urusan keuangan adalah: (1) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara optimal akibat data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik; (2) Tingginya ketergantungan daerah terhadap pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,66% per tahun Lihat Bab II Tabel 2.176; (3) belum adanya insentif daerah terkait dengan pemberian dana bagi daerah yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; (4) belum optimalnya Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) oleh daerah atau lembaga yang mendapatkan dana tersebut; (5) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.

3) Bidang Urusan Kepegawaian Serta Diklat

Permasalahan utama urusan Kepegawaian dan Diklat adalah; (1) Masih terdapat 46,32% pegawai berpendidikan S1 kebawah; (2). Dari 36 indikator pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator terkait dengan pelatihan dalam bidang perencanaan dasar tetapi belum terdapat pelatihan dalam perencanaan pembangunan yang *advance*. (3) Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan komptensinya sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Pelayanan yang prima dan handal kepada masyarakat pemerintah belum berjalan secara baik dan optimal.

4) Bidang Urusan Litbang

Permasalahan utama urusan Litbang adalah; (1) Belum sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan misalnya pembangunan hilirisasi industri tetapi penelitian dan pengembangan bidang industri hanya ada tiga kegiatan selama periode 2010-2014; (2) Dari 12 bidang penelitian dimana penelitian terkait dengan pengembangan SDM mengalami pertumbuhan negatif sebesar 26,85% per tahunlihat Bab II Tabel 2.179.

5) Bidang Urusan Lainnya (Otonomi Daerah)

Permasalahan utama adalah: (1) Penanganan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan stabilitas pertahanan serta keamanan masih belum optimal; (2) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (3) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (4) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (5) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (6) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; (7) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (8) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (9) Belum tuntasnya batas administrasi daerah; (10) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (11) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman,

Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah

1) Kemampuan Ekonomi Daerah

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan; (2) Tingginya ketimpangan produktivitas antara wilayah; sehingga berakibat kontribusi antara wilayah terhadap PDRB tanpa migas yang tidak merata. (3) Tingginya ketimpangan kesejahteraan antara petani sawit dengan sektor pertanian lainnya; dan (4) Nilai Tukar Petani masih rendah terutama pada komoditas unggulan; (5) tingginya angka inflasi pada wilayah yang berada di pesisir dan kepulauan lihat Bab II Gambar 2.29; (6) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya non migas dalam pembangunan perekonomian seperti sektor pariwisata dan agroindustri serta industri kreatif.

2) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya kualitas dan masih terbatasnya infrastruktur dasar yang dapat mendukung pengembangan ekonomi sektor unggulan; (2) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan dan jembatan; (3) Pemenuhan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri pengolahan dan industri unggulan lainnya masih sangat terbatas; dan (4) Aksesibilitas air bersih yang belum memadai terutama dalam pembangunan industri baik skala IKM dan besar..

3) Iklim Berinvestasi

Permasalahan utama adalah: (1) Daya dukung dalam pengembangan investasi sektor unggulan belum optimal, karenaterbatasnyaketersediaan infrastruktur; (2) Masih adanya angka kriminalitas dan unjuk rasa terkait dengan lahan dan ketenagakerjaan; dan (3) Belum optimalnya stabilitas keamanan social; (4) Belum fokus dan lokusnya dalam perencanaan pembangunan yang menjadi tujuan wilayah investasi.

4) Sumberdaya Manusia

Permasalahan adalah: (1) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja bidang industri unggulan; (2) Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap usia produktif; (3) belum sinkronnya penyiapan SDM lokal dengan potensi ekonomi dan investasi terutama bidang industri pengolahan; (4) Masih tingginya ketergantungan investor terhadap tenaga kerja luar.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis Isu strategis meliputi isu strategis Provinsi Tetangga yang Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Isu strategis Provinsi Riau:

4.2.1 Isu Strategis Provinsi Tetangga yang Berbatasan dengan Provinsi Riau

Daratan Provinsi Riau terdapat 4 (empat) sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan. Provinsi Riau berbatasan dengan 4 (empat) Provinsi Tetangga antara lain Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Isu strategis Provinsi tetangga yang berbatasan dengan Provinsi Riau adalah:

4.2.1.1 Provinsi Jambi

Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia, Singapura dan provinsi lain selain itu dapat mendukung pengembangan kewilayahan terutama pembangunan kawasan industri Kuala Enok dalam penyediaan bahan baku dan bahan pendukung produksi serta operasional lainnya.

4.2.1.2 Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi yang paling besar distribusi barang dan orangnya terhadap Provinsi Riau. Karena itu, provinsi ini memegang peranan penting bagi kemajuan perekonomian Riau. Berdasarkan Litbang Kemenhub 2011, distribusi barang dari Riau ke Sumatera Utara adalah yang terbesar di antara Provinsi yang ada di Sumatera yaitu sebesar 31.592.822 ton/tahun atau sebesar 34%. Demikian pula, distribusi perjalanan orang dari Riau ke Sumatera Utara adalah yang terbesar di Sumatera yaitu sebesar 13.340.620 orang/tahun atau sebesar 35%.

Untuk meningkatkan kontribusi antara wilayah dalam pembangunan perekonomian kedua daerah maka diperlukan adanya perhatian terkait dengan isu perdagangan, produktivitas komoditas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata serta pembangunan infrastruktur kedua daerah. Disamping itu peningkatan kualitas SDM terutama bagi tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Riau, peningkatan investasi Sumatera Utara ke Provinsi Riau serta adanya saling memanfaatkan antara potensi daerah satu dengan lainnya sehingga pemerataan pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat kedua daerah. Isu terkait dengan kerjasama pembangunan Provinsi

Sumatera Utara dengan Provinsi Riau dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pembangunan Infrastruktur, Sumatera Utara diharapkan akan menjadi penggerak pertama Trans Sumatera Railway yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Adanya megaprojek infrastruktur pembangunan jalur kereta api dari Sumatera Utara ke Riau atau Rantau Prapat-Duri-Dumai sepanjang 249 kilometer (Km) harus masuk sinergitas yang saling mendukung antara Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 21 kilometer dari Bukit Kapur-Dumai di Kota Dumai, Provinsi Riau merupakan bagian dari kereta api Trans Sumatera dengan anggaran bersumber dari APBN. Kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang masuk dalam rencana strategis nasional. Penetapan lokasi itu dilakukan berdasarkan surat keterangan resmi dari Kemenhub tentang trase jalur kereta api di Riau. Selain itu, pemerintah daerah yang terlibat harus perlu menyelesaikan analisis dampak lingkungan untuk setiap jalur yang sudah siap dibangun yaitu jalur antara Rantau Prapat sampai Kota Pinang. Adanya dukungan yang sinergitas dalam pembangunan jalan tol ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumut.

Bidang Perekonomian, adanya Kawasan Ekonomi Khusus bagi Provinsi Sumut harus mempunyai ketegasan antara batas administrasi dan investasi seperti Daerah Aliran Sungai yang berbatasan dengan Provinsi Riau. Pengembangan program “Sei Mangke” oleh Presiden RI dan diresmikan pada awal tahun 2012 sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Industri Sei Mangke telah dicanangkan di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia.

Selain itu KEK Sei Mangke karena memiliki beberapa keunggulan mulai lokasinya yang berada di areal perkebunan yang jauh dari pemukiman, tidak jauh dari Pelabuhan Kuala Tanjung dan termasuk sudah adanya sumber bahan baku yakni pabrik kelapa sawit dan sumber air yang melimpah dari Sungai Bah Bolon.

Tujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut sangat mendukung kawasan itu bukan hanya meningkatkan perekonomian

tetapi juga untuk masa depan perkelapasawitan Nasional. Sehingga dukungan Pemerintah Provinsi Sumut antara lain dengan berupaya meminta kepada Provinsi Riau untuk tidak bergerak dalam komoditi penghasilan Kelapa Sawit juga karena akan memperkecil pemasokkan hasil produktifitas sawit bagi Provinsi Sumut. Mengingat jumlah luas perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau melebihi KEK Sei Mangke seluas 2,4 hektar.

Hortikultura, Sumut memiliki daerah dataran tinggi sehingga pengembangan tanaman sayur sayuran dan buah buahan sangat sesuai untuk dikembangkan. Tanaman sayur sayuran dan buah buahan dari Sumatera Utara sebagian dipasarkan di provinsi Riau dan bahkan ke Provinsi Kepulauan Riau melalui provinsi Riau dan jalur darat dan laut.

Karakteristik dari sektor pariwisata berbeda antara Provinsi Sumut dan dan Provinsi Riau. Provinsi Riau saat ini telah memiliki semboyan baru untuk Bumi Lancang Kuning "*The Homeland Of Melayu*" yang artinya "Tanah Tumpah Darah Melayu, Takkan Hilang Melayu di Bumi". Namun sektor Pariwisata yang ada di Provinsi Riau saat ini lebih menekankan sektor pariwisata yang berbasis budaya, dengan memanfaatkan even ataupun perayaan seperti halnya di Kabupaten Rohil yaitu Pembakaran Tongkang yang dilaksanakan setahun sekali dan telah terjadwal secara International sebagai destinasi Pariwisata. Dimana dalam hal ini Provinsi Riau belum memiliki Kawasan Pariwisata Nasional (KPN). Walaupun Provinsi Riau tidak masuk KPN diharapkan diantara Provinsi yang saling berdekatan menjadi satu komponen dan saling mendukung antara wilayah perbatasan dari sektor Pariwisata.

Kawasan Industri, Sementara Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam memaparkan adanya pengembangan potensi Kawasan Industri Dumai menyimpan potensi sebagai kluster industri sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Unggul dari lokasinya yang strategis untuk perdagangan ekspor dan lokal. Tetapi, butuh dukungan infrastruktur dan regulasi pengembangan kawasan industri. Pengembangan kluster dan industri hilir kelapa sawit di kota Dumai, sangatlah sesuai dan didukung letak geografis wilayah tersebut. Dengan berada di dekat Selat Malaka dan Singapura, Dumai sangatlah cocok untuk dijadikan kota perdagangan dan industri. Pembangunan kawasan industri sawit di Pelintung-Riau, yang telah berjalan semenjak

lima tahun terakhir merupakan bukti dengan pencapaian sekarang ini. Kawasan Industri Dumai dapat dikatakan sebagai kluster industri sawit pertama di Indonesia yang terintegrasi antara hulu dan hilir.

Peternakan, Provinsi Sumut telah menargetkan peningkatan populasi untuk sepuluh komoditas terutama sapi potong, kambing, ayam pedaging, dan sebagainya. Selain itu, sudah dapat meningkatkan produksi susu, telur dan daging. Oleh karena itu dapat melakukan kerjasama dengan Provinsi Riau dalam hal pengembangan sector peternakan.

Perikanan, upaya pemecahan masalah yang diderita akibat maraknya pencurian ikan di wilayah perairan Rokan Hilir (Rohil). Para nelayan Sumatera Utara kerap kali memasuki perairan dan mengambil ikan di laut Rokan Hilir di wilayah Perbatasan. Wilayah perbatasan yang dekat dengan Provinsi Sumut adalah Rokan Hilir daerah Tanjung Balai Asahan. Harus adanya kebijakan Pemerintah yang mengikat antara kedua daerah tetangga ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dengan membuat kebijakan pemerintah dalam menentukan kewilayah dan kewenangan bersama.

4.2.1.3 Provinsi Kepulauan Riau

Menjadikan Pulau Batam, Pulau Bintan dan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi internasional khususnya dengan Singapura dan Malaysia untuk kegiatan ekspor dan impor, serta menghubungkan Pulau Bintan dengan Kabupaten Pelalawan dengan membangun infrastruktur penghubung untuk peningkatan pengembangan potensi unggulan setempat agar bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan pengamanan dan keamanan di laut, serta kelembagaan di daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

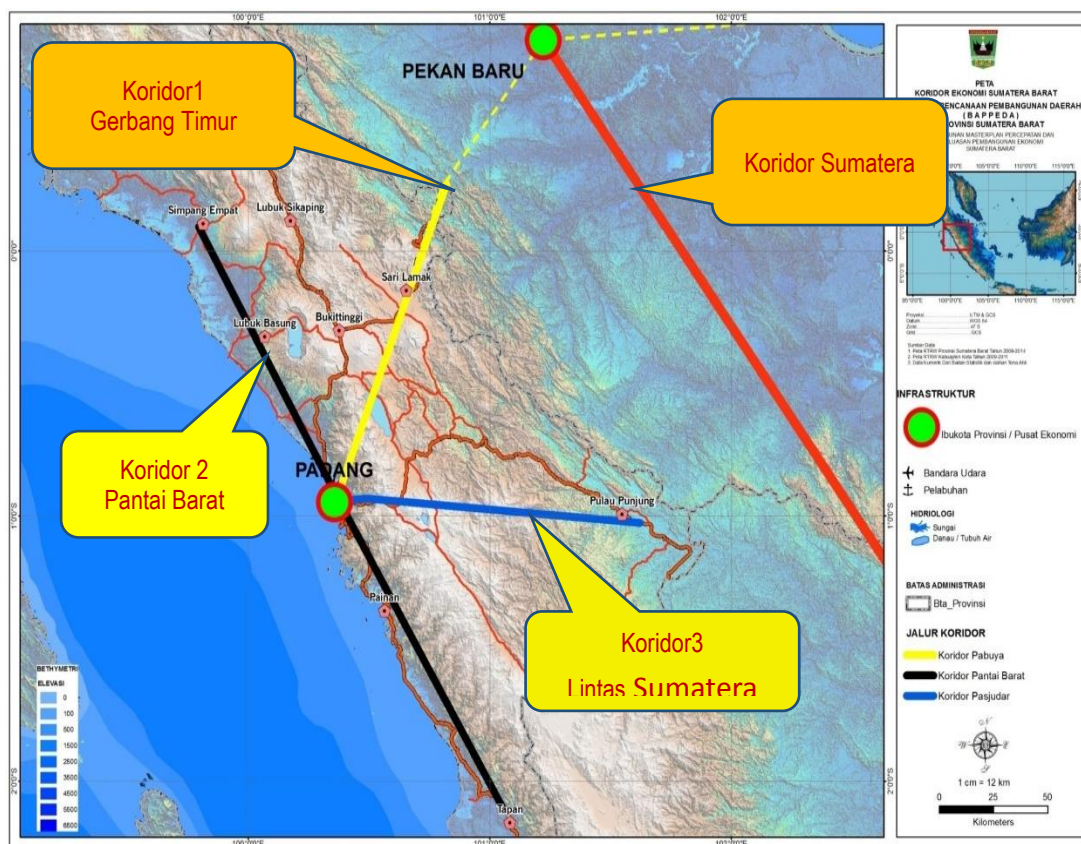
Isu kewilayahan yang harus mendapatkan perhatian di kawasan perbatasan provinsi Kepulauan Riau adalah eksplorasi sumberdaya alam, maraknya illegal fishing, maraknya penambangan pasir laut dan kerawanan bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan karena berada di jalur pelayaran internasional, adanya pelintas batas jalur penyeludupan dan relative rendahnya tingkat kesejahteraan

masyarakat meskipun terdapat potensi migas yang sangat besar di Natuna.

Pengembangan sektor wisata provinsi Riau juga sangat dipengaruhi oleh provinsi kepulauan Riau, mengingat sebagian tamu asing yang datang melalui pintu masuk Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya harus melalui wilayah provinsi Kepulauan Riau. Demikian juga halnya dengan perdagangan luar negeri dimana distribusi barang ekspor dan import akan melalui kepulauan Riau terutama sebagian dari wilayah pesisir provinsi Riau.

4.2.1.4 Provinsi Sumatera Barat

Kerjasama pembangunan antara provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau sangat diperlukan mengingat kedua wilayah memiliki saling ketergantungan terutama terkait dengan Provinsi Sumatera Barat menempati posisi strategis sebagai daerah resapan air (*catchment area*) bagi sungai-sungai utama dan Waduk PLTA Kotopanjang di Provinsi Riau. Karena itu, pelestarian lingkungan hutan dan lahan di sekitar pegunungan Bukit Barisan menjadi sangat penting demi keseimbangan hidrologi di Provinsi Riau. Provinsi Sumatera Barat juga memberikan kontribusi yang besar dalam sektor perdagangan barang terutama komoditas pangan dan palawija serta bahan bangunan seperti semen. Sementara itu provinsi Sumatera Barat berkepentingan terhadap adanya peluang usaha tingginya kesempatan kerja di provinsi Riau terutama pada sektor perekonomian berbasis SDM.



Gambar 4.1
Koridor Ekonomi Sumatera Barat

Selain itu kaitannya dengan distribusi barang dan perjalanan orang. Distribusi barang dari Sumatera Barat ke Riau sebesar 17.063.477 ton/tahun, atau sebesar 23% dari total distribusi barang dari Sumatera Barat ke Pulau Sumatera. Sebaliknya, distribusi barang dari Riau ke Sumbar sebesar 25.725.418 ton/tahun, atau sebesar 28% dari total distribusi barang dari Riau ke Pulau Sumatera.

Sementara itu, distribusi perjalanan orang dari Sumbar ke Riau sebesar 10.513.138 orang/tahun, atau sebesar 21% dari total distribusi perjalanan orang dari Sumbar ke Pulau Sumatera. Sebaliknya, distribusi perjalanan orang dari Riau ke Sumbar sebesar 10.784.354 orang/tahun, atau sebesar 28% dari total distribusi perjalanan orang dari Riau ke Pulau Sumatera.

Pada Koridor Ekonomi Sumatera Barat, akses jalan ke Provinsi Riau masuk ke dalam Koridor 1 Gerbang Timur, seperti terlihat pada Gambar 4.1 Posisi Riau yang koridornya melewati Kota Pekanbaru merupakan koridor Sumatera, yang terhubung dengan Provinsi Sumbar melewati Koridor 1 Gerbang Timur. Karena itu, menjadi sangat penting untuk akses jalan yang baik menuju Koridor 1.

Tabel 4.1
Rencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkaitan dengan Konektivitas Provinsi Sumatera Barat-Riau

RENCANA PERCEPATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Jaringan Jalan					
Percepatan Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer	Jalan Payakumbuh–Sarilamak–Batas Provinsi Riau		√		
Percepatan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Padang–Bukit Tinggi–Batas Provinsi Riau	√	√		
Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer	Jalan Kiliranjao–Batas Provinsi Riau				√
Pembangunan Jaringan Jalan Arteri Primer	Jalan Buluh Kasok–Batas Provinsi Riau				√
Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer	Jalan Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur–Batas Provinsi Riau				√
Jaringan Perkeretaapian					
Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Muaro Kalaban–Muaro–Integrasi Jaringan Kereta Api Riau (Muaro–Logas–Teluk Kuantan Dan Logas–Lipan Kain–Pekanbaru)			√	
Bandar Udara					
Percepatan Pembangunan Bandar Udara	Bandara Di Kab. Lima Puluh Kota	√			
	Bandara Di Kab. Kep. Mentawai				√
	Bandara Di Kab. Pasaman Barat	√			
Jaringan Energi Kelistrikan					
Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Gas	Batusangkar–Cerinti–Batam		√	√	
Sistem Jaringan Telekomunikasi					
Pengembangan Serat Optik	Kabupaten/Kota		√	√	√

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Infrastruktur Koridor Ekonomi Sumatera Barat
Yang Berbatasan Dengan Provinsi Riau (Konektivitas)

No	Uraian	Ket
1	Kawasan Poros Barat – Timur, Koridor Jalan Nasional, dari Kota Padang sampai Batas Provinsi Riau	RTRW 2012-2032
2	Kawasan Tapus, Rao dan Mapat Tunggul, yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumut dan Provinsi Riau di Kabupaten Pasaman	RTRW 2012-2032
3	Kawasan Pangkalan Koto Baru di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Raiu di Kabupaten 50 kota.	RTRW 2012-2032
4	Kawasan Kamang Baru yang berada di Perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten Sijunjung	RTRW 2012-2032

Dari berbagai permasalahan pembangunan daerah yang disajikan diatas, sesuai dengan dinamika pembangunan serta kondisi objektif yang ada, isu strategis memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa datang, maka isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau perlu dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepanyang meliputi aspek-aspek pembangunan daerah serta memperhatikan isu-isu global dan nasional.

Perumusan isu strategis pembangunan Provinsi Riau dilakukan melalui beberapa kriteria antara lain:(a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;(b) Janji politik yang diwujudkankepala daerah; (c) Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;(d) Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;(e) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan (f)Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

4.2.2 Isu Strategis Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari Daratan dan Lautan dengan luas 90.128,76 Km2, dimana terdiri dari 89.083,57 Km2 luas daratan dan 1.045,19 Km2 luas lautan atau perairan, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Provinsi Riau yang terdiri dari:

4.2.2.1 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi berkorelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM dalam bidang pelayanan pendidikan menjadi salah satu hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan provinsi Riau. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam bidang pelayanan pendidikan diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan dan pengelolaan sistem pendidikan yang merata serta perlunya desain dalam pengembangan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM yang mampu meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dari bahan mentah menjadi produk akhir (barang) dan jasa pelayanan.

Demikian halnya dengan pembangunan bidang kesehatan yang juga harus dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas kelembagaan, sumberdaya, tata kelola meliputi antara lain peningkatan prasarana sarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis, serta perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dengan sistem pelayanan kesehatan berorientasi promotif dan preventif.

4.2.2.2 Peningkatan Kuantitas Infrastruktur yang Berkualitas

Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau merupakan sumber bahan baku atau input utama dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi yang berbasis industri dan inovasi unggulan. Namun potensi sumberdaya alam tersebut tentunya harus ditopang oleh sistem pendistribusian yang cepat dan lancar sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam unggulan wilayah dimaksud. Untuk itu, dukungan

infrastruktur jaringan transportasi dan konektivitas jalan antar wilayah kabupaten kota, provinsi dan nasional yang dalam kondisi baik sangat diperlukan. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur baik jaringan maupun integrasi jaringan transportasi jalan, angkutan sungai, laut, dan udara serta masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga belum dapat mempercepat dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Selain infrastruktur jaringan transportasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan infrastruktur pelabuhan, energi listrik dan gas, air bersih dan sanitasi lingkungan serta perumahan layak huni dan kawasan permukiman serta irigasi sangat dibutuhkan oleh semua sektor dalam memproduksi barang dan jasa serta masyarakat. Oleh karena itu dengan kondisi infrastruktur yang belum baik tersebut sangat memerlukan pembangunan dan perbaikan untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi Riau kedepan.

Disisi lain terkait dengan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih juga belum terseleggara secara merata dengan baik sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang berkualitas antara wilayah masih terjadi dispersi yang tinggi. Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan belum tertata dengan baik akibat manajemen inventaris yang masih lemah. Oleh karena itu memerlukan perbaikan dalam manajemen inventaris untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dimaksud.

Dengan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang terbatas serta belum terkelola secara optimal tersebut telah menimbulkan disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dengan Provinsi Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat. Sehingga terjadinya pemusatan perkembangan ekonomi pada wilayah tertentu terutama wilayah yang terdapat usaha skala besar. Terjadinya pemusatan pada wilayah yang memiliki usaha skala besar tersebut karena mereka yang mampu membangun infrastruktur sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan industri.

4.2.2.3 Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan

Menurunnya produksi, harga minyak bumi dan gas alam serta komoditas unggulan (kelapa sawit, karet dan pulp) dan komoditas unggulan lainnya telah mempengaruhi perkembangan ekonomi provinsi Riau. Kondisi tersebut telah menyebabkan penurunan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di Provinsi Riau. Penyebab utama kondisi tersebut adalah penurunan nilai sumberdaya alam yang ada (bahan mentah). Penurunan nilai sumberdaya tersebut akibat pengaruh harga yang berfluktuatif, karena memang secara umum dipahami bahwa harga komoditas bahan mentah sangat rentan dengan fluktuasi harga pasar dunia, dan sangat berbeda produk akhir (hasil hilirisasi) dimana harga pasar dunia secara relatif tidak elastis terhadap permintaan. Oleh karena perlunya pengelolaan secara maksimal komoditas unggulan dari sumberdaya alam tersebut melalui peningkatan nilai tambah dengan penciptaan produk akhir yang dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat secara umum agar jika terjadi penurunan harga komoditas secara global tidak terlalu memberikan tekanan terhadap nilai produk tersebut sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap perkembangan perekonomian daerah khususnya provinsi Riau.

Disisi lain perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat alih fungsi lahan produktif pertanian ke lahan perkebunan khususnya kelapa sawit di lokasi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) telah berakibat pada penurunan luas tanam dan panen tanaman pangan ditambah lagi dengan rendahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alsintan) yang sesuai dengan waktu kebutuhan telah melengkapi terjadinya alih fungsi lahan. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan luasan sawah irigasi dan non irigasi berupa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu upaya-upaya pengendalian untuk menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pertumbuhan penduduk provinsi Riau selama periode 2010-2015 sebesar 2,89% pertahun tentunya berkorelasi positif terhadap

peningkatan permintaan pertahun terhadap bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai, daging dan ikan yang menjadi kebutuhan pokok pangan masyarakat. Sementara sebagian produksi komoditas pangan tersebut seperti beras dan palawija terus mengalami penurunan dengan 23,62% per tahun sehingga menjadi beban tersendiri bagi daerah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Penurunan produksi pangan dan palawija tersebut disebabkan pengurangan luas lahan pangan senantiasa mengalami degradasi dan miskin unsur hara, tidak tersedia infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi teknis dan pengaturan air pada lahan pasang-surut sangat terbatas, rendahnya *input* pertanian berupa pupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak optimal mengakibatkan berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian. Pemasaran hasil pertanian masih terkendala oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk, dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan pasar.

Oleh karena itu dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

Peningkatan Ketahanan Energi, minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Indonesia sepanjang lima tahun terakhir ini, mengalami penurunan produksi rata-rata minyak bumi dibawah 1 (satu) juta barel per hari. Tingkat produksi yang cukup rendah ini terutama disebabkan oleh sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*), di mana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (*natural depletion*). Sementara kondisi yang sama terjadi di provinsi Riau ladang atau sumur minyak yang sudah lama memproduksi terutama yang berlokasi di Minas dan Duri juga mengalami

penurunan produksi setiap tahunnya. Penurunan produksi minyak dan gas tersebut di perparah dengan penurunan harga komoditas utama tersebut dua tahun terakhir. Oleh karena itu diperlukan upaya pencarian sumber-sumber baru migas dan gas serta penetapan regulasi DMO (*domestic market obligation*) terhadap gas dan batubara, kemudian pemanfaatan energi terbarukan dengan mengupayakan terwujudnya *mandate* energi biofuel sebesar 20% serta melakukan efisiensi penggunaan energi.

Dengan bentang alam Provinsi Riau yang juga memiliki keindahan alam yang potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sangat strategis berada pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, pengembangan sektor non migas terutama sektor jasa berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka perekonomian Regional ASEAN yang semakin terintegrasi.

4.2.2.4 Pengoptimalisasian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Sebagian besar dari luas wilayah Riau merupakan kawasan pesisir dan lautan. Potensi SDA di wilayah pesisir dan lautan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah terutama potensi perikanan, wisata, pertambangan, perhubungan dan jasa lingkungan. Dengan kondisi yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun sebagian potensi yang besar tersebut telah mengalami degradasi dan kerusakan seperti terjadinya abrasi pantai akibat rusaknya hutan mangrove dan terumbu karang, menurunnya produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut serta pencemaran di selat malaka. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan untuk mengurangi degradasi dan kerusakan sumberdaya alam pesisir tersebut.

4.2.2.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau digambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Provinsi Riau merupakan terendah di Pulau Sumatera dan kualitas lingkungan hidupnya masuk dalam katagori sangat kurang, disebabkan oleh

menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem air, tanah dan udara sehingga indeks kualitas ketiga ekosistem tersebut rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya permasalahan kualitas udara berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dan emisi udara sumber bergerak/tidak bergerak. Selain itu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut cukup tinggi, termasuk perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi, dimana lokasinya berada dalam empat (4) daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Siak, Rokan, Indragiri dan Kampar. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab status mutu air 4 sungai besar yaitu Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Sungai Kampar dalam katagori cemar berat.

Isu Strategis lingkungan terkait dengan pengelolaan hutan, pencemaran air, tanah dan udara, efek gas rumah kaca, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan, bencana geologi, terjadinya kerusakan lahan dilahan gambut lahan kritis. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4.2.2.6 Perbaikan Iklim Usaha, Investasi dan Peningkatan DayaSaing Perekonomian

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Pembangunan ekonomi kedepan disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RPJMN dengan Nawacita melalui dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan dan pemerataan dan kewilayahan.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan keberpihakan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis industri dan jasa termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. Iklim usaha dan investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan usaha dan investasi di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perbaikan iklim investasi melalui kestabilan politik, penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, pembenahan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi, keterbukaan informasi terutama bisnis, peningkatan pelayanan terpadu, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung terkait usaha dan investasi terutama pada usaha dan investasi sektor industri barang dan jasa yang dapat meningkatkan nilai tambah.

Untuk mendukung hal tersebut, maka pembiayaan pembangunan perlu diarahkan untuk menunjang terwujudnya kondisi perbaikan iklim usaha dan investasi tersebut. Dengan APBD Provinsi Riau cenderung menurun, maka pembiayaan pembangunan harus fokus agar lebih efektif terutama yang dapat mendukung perkembangan usaha dan investasi sehingga akan menggerakkan pembangunan yang mengarah kepada perbaikan perekonomian Provinsi Riau.

Seiring dengan penerapan prinsip *good governance* dengan perbaikan akuntabilitas keuangan daerah dan perbaikan iklim usaha dan investasi dimungkinkan untuk berkembangnya usaha dan investasi, sehingga peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya.

Dengan perbaikan iklim usaha dan investasi, maka pemantapan peran dan fungsi kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah dalam rangka pemerataan serta terciptanya pusat pertumbuhan baru dapat berkembang cepat secara terintegrasi dan dapat segera tercapai.

Sebagai Provinsi yang berada pada segitiga kutub perdagangan dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional Riau seharusnya merupakan wilayah yang memiliki iklim usaha dan investasi yang baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan lingkup global sehingga Provinsi Riau dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan)*, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, dan *Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

4.2.2.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Peningkatan tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibat masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan menyebabkan potensi sumberdaya alam yang ada belum dapat berkembang secara maksimal dan optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah serta lebih baik untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi sehingga terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek perencanaan, kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga sumberdaya alam yang ada yang dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perekonomian daerah.

4.2.2.8 Peningkatan Penerapan Nilai Budaya Melayu dan Agama Pada Masyarakat

Kota-kota dan wilayah strategis Provinsi Riau yang berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi

ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Riau yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Riau yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerpatan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di provinsi Riau.

4.2.2.9 Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan terwujudnya kondisi tersebut dapat mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Provinsi Riau. Disamping itu program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dengan Pendekatan klustering (pengelompokan) yang membagi program-program penanggulangan menjadi 4 klaster, dan penyerpunaan pendekatan *Quick Wins* pada daerah-daerah yang merupakan lokasi kantong kemiskinan dapat diadopsi dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya transformasi menjadi 3 strategi utama, yaitu: (i) perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, dan (iii) pengembangan penghidupan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan. Oleh karena itu mengintegrasikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan melakukan sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah dan SKPD kedalam proses perencanaan pembangunan.

Strategi secara umum yang dapat dilakukan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut meliputi: Mengurangi beban pengeluaran

masyarakat miskin (PKH, KIS, KIP dan Raskin) melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah; infrastruktur kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar terkait dengan ketersediaan jalan, listrik, air bersih, sanitasi layak, dan akses pasar dan bersinergi antara stakeholders terkait. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin yang berumur lanjut dan memungkinkan lagi untuk berusaha dan tidak memiliki aset yang dapat dikembangkan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dengan Program Peningkatan Usaha dan pemberdayaan Masyarakat Miskin, UMKM dan IKM dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan Program peningkatan kesempatan dan perluasan kerja. Meningkatkan ketahanan pangan dengan program peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan, diversifikasi pangan, peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna yang selama ini belum optimal akan terus dimantapkan.

4.2.3 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

UU no 23 tahun 2014 pasal 269 ayat 1 menyatakan Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teknis bentuk penyelarasan mengacu pada surat edaran bersama Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019. Adapun hasil penyelarasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Keselaran Isu Strategis Pembangunan Daerah

NO .	ISU STRATEGIS	
	RPJMD Provinsi Riau	RPJMN 2015 – 2019
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan : - Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan - Sarana dan prasarana - Tenaga pendidik - Pembiayaan dan pengelolaan sistem pendidikan - Desain dalam pengembangan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas kelembagaan : - Peningkatan prasarana sarana kesehatan. - Tenaga medis dan paramedis - Perbaikan system pelayanan	Pendidikan - Peningkatan kualitas pembelajaran. - Peningkatkan akses , kualitas dan relevansi pendidikan tinggi - Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan - Penguatan tata kelola pendidikan Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas - Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan - Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
2	Peningkatan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkualitas. - Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur baik jaringan maupun integrasi jaringan transportasi jalan, angkutan sungai, laut, dan udara serta masih dalam kondisi yang kurang baik. - Ketersediaan infrastruktur pelabuhan, energi listrik dan gas, air bersih dan sanitasi lingkungan serta perumahan layak huni dan kawasan permukiman.	Infrastruktur dan Ekonomi - Meningkatkan aksesibilitas akibat ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi - Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan - Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman

NO .	ISU STRATEGIS	
	RPJMD Provinsi Riau	RPJMN 2015 - 2019
(1)	(2)	(3)
	- Sarana dan prasarnaa pendidikan dan kesehatan masih belum terseleggara secara merata dengan baik.	- Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik
3	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan. - Peningkatan nilai tambah dengan penciptaan produk akhir yang dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat secara umum. - Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. - Berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian - Peningkatan Ketahanan Energi.	Penguatan Investasi - Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas
4	Pengoptimalisasian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. - Potensi SDA di wilayah pesisir dan lautan belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. - Menurunnya produksi perikanan tangkap diwilayah pesisir dan laut serta pencemaran di selatmalaka.	Tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera - Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industry perikanan, pariwisata bahari, industry perkebunan dan industry pertambangan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup - Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan
5	Peningkatan Kualitas LingkunganHidup. - Menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem air, tanah dan udara.	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup - Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS

NO .	ISU STRATEGIS	
	RPJMD Provinsi Riau	RPJMN 2015 - 2019
(1)	(2)	(3)
	- Masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan. - Terjadinya kerusakan lahan dilahan gambut lahan kritis.	
6	Perbaikan Iklim Usaha, Investasi dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian. - Keberpihakan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis industri dan jasa. - Perbaikan iklim investasi melalui kestabilan politik, penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi.	Peningkatan Daya Saing Ekspor - Masih rendahnya daya saing ekspor jasa Penguatan Investasi - Proses perijinan yang belum efisien - Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif - Kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi dan sering perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor
7	Peningkatan Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. - Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan - Reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek perencanaan, kelembagaan, aparatur, dan tata laksana.	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah - Akuntabilitas dan tata pemerintahan - Peningkatan pelayanan publik Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah - Manajemen sumberdaya aparatur pemerintah daerah
8	Peningkatan Penerapan Nilai Budaya Melayu dan Agama Pada Masyarakat.	Kebudayaan - Penguatan karakter dan jati diri bangsa Agama

NO .	ISU STRATEGIS	
	RPJMD Provinsi Riau	RPJMN 2015 - 2019
(1)	(2)	(3)
	- Mewujudkan kehidupan masyarakat Riau yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama	- Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama - Peningkatan kerukunan umat beragama
9	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran. - Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (PKH, KIS, KIP dan Raskin). - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar. - Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin yang berumur lanjut. - Menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. - mengurangi tingkat pengangguran terbuka. - Meningkatkan ketahanan pangan.	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja - Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan - Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah - Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai - Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.

Tabel 4.4.

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi				RPJMN
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur	1) Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	1) Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
			a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	Akses Air Minum Layak
			b. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	Kondisi mantap jalan nasional
			c. Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi (%)
	2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1) Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
			a. Angka rata-rata lama sekolah	
			b. Angka harapan lama sekolah	
	3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1) Meningkatnya kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
			a. Angka harapan hidup	
	4) Menurunkan Kemiskinan	Menurunkan Kemiskinan	1) Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

RPJMD Provinsi				RPJMN
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kesenjangan pendapatan masyarakat	
			a. Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
			b. Gini Rasio	Indeks Gini
			2) Menurunnya angka pengangguran	
			a. Tingkat pengangguran terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
	5) Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	1) Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
			a. Opini BPK	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L
			b. Nilai akuntabilitas	Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)
			c. Skor LPPD	Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi
			d. Nilai keterbukaan informasi	Kualitas Pelayanan Publik
			e. Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)

RPJMD Provinsi				RPJMN
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6) Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	1) Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	
			a. Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	
			b. Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	
			2) Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Pembangunan Masyarakat
	7) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan)	a. Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)
			1) Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Produksi Dalam Negeri

RPJMD Provinsi				RPJMN
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Produksi Padi, Jagung Kedele, Gula, Daging Sapi, Ikan
			b. Nilai Tukar Petani (NTP)	
	8) Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			2) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Devisa (triliun rupiah)
			a. Jumlah kunjungan wisatawan asing	Wisatawan manca negara (orang)
	9) Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan	1) Meningkatnya nilai investasi	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar
			a. Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	Kontribusi terhadap PDB Pertumbuhan sektor industri
			b. Nilai investasi PMA (juta USD)	
			2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
			a. Pertumbuhan ekonomi (%)	Pertumbuhan ekonomi

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 merupakan tahap ketiga RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke-2 dimana Visi RPJMD Provinsi Riau 2009-2013 yaitu:

“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”

RPJMD ke-3 (2014-2019) ini ditujukan untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan sasaran pertumbuhan perekonomian yang berdayasaing melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang berkualitas dan teknologi dengan dukungan sistem informasi yang handal. Selanjutnya dilakukan upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu dan pengamalan agama sebagai ruh kehidupan masyarakat, dimana nilai-nilai budaya Melayu dan agama tersebut menjadi refensi etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, penyelenggaraan pembangunan, pelestarian lingkungan, asimilasi kultural dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah dengan potensi yang ada, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dengan peluang yang tersedia serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan

misi RPJMD tahun 2014-2019 sesuai dengan visi misi Gubernur terpilih sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja”.

Sejalan dengan pembahasan penyusunan RPJMD, Visi tersebut diatas mengalami beberapa perubahan dan penambahan antara lain; Terhapusnya kemiskinan dirubah menjadi menurunkan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi angka dan jumlah kemiskinan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir. Maka visi menuntaskan kemiskinan hanya baru dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya melalui hasil penajaman terhadap visi misi, kebijakan program serta indikasi pembiayaan dalam rapat bersama pimpinan daerah dengan seluruh forum SKPD dan *Stakeholder* (Pemangku kepentingan) visi tersebut ditambah menjadi:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Penambahan “Pemantapan Aparatur” dalam visi misi tersebut di atas adalah upaya meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah sejalan dengan agenda reformasi birokrasi. Pemantapan aparatur sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menjalankan dan menuntaskan arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.

Visi misi tersebut di atas juga mengalami perubahan dan penambahan sesuai dengan hasil rapat Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DPRD Provinsi Riau. Penambahan tersebut terdapat pada kata “Berbudaya Melayu”. Adapun penambahan kata ini mengacu kepada visi RPJPD Provinsi Riau 2020. Dengan demikian visi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Terminologi dari visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Maju : Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.
- Berbudaya Melayu : Merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya melayu.
- Berdayasaing : Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya melayu, tatanan sosial yang agamis.
- Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- Lapangan kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pemantapan Aparatur : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- 4) Menurunkan Kemiskinan
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
- 6) Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa
- 7) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
- 8) Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata
- 9) Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai lihat Tabel 5.1. Tujuan dan sasaran pada setiap misi tersebut akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat

outcome dan atau *impact*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah.

Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN, maka terkait dengan berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan dalam RPJMN telah pula diacu dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 meski terdapat beberapa penyesuaian terhadap target pencapaian terutama indikator ekonomi makro.

Penyesuaian target indikator ekonomi makro dilakukan karena adanya pergeseran perkembangan ekonomi makro baik di tingkat nasional maupun di daerah. Pergeseran perkembangan ekonomi makro tersebut disebabkan karena adanya perubahan variabel harga jual migas dan komoditas unggulan lainnya saat ini yang turun signifikan. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil migas dan komoditas unggulan lainnya di Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan khususnya terkait transfer dana bagi hasil migas dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Riau dan hal ini tentunya sangat mempengaruhi kekuatan fiskal daerah dalam mencapai target pembangunan. Sementara pendapatan daerah dari pajak dan retribusi terkait komoditas unggulan juga mengalami penurunan akibat penurunan harga komoditas unggulan tersebut.

Dari sembilan misi, telah ditetapkan sebanyak 24 sasaran indikator dan 10 sasaran indikator diantaranya memerlukan dukungan kabupaten kota. Adapun target pencapaian yang telah dicapai dan yang telah disesuaikan dari masing-masing tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi Provinsi Riau diuraikan dalam Tabel 5.1 dan dukungan target pencapaian kabupaten Kota dijelaskan pada Tabel 5.2 s/d Tabel 5.11 :

TABEL 5.1
TUJUAN DAN SASARAN PELAKSANAAN MASING-MASING MISI

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDIS I AWAL 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	72,59	83,01	84,00	89,16	91,65	93,84
				2	Panjang jalan dalam kondisi baik	931,10	1.151,04	1.330,97	1.486,68	1.615,08	1.665,93
				3	Rasio Elektrifikasi	85,19	78,62	80,99	82,33	85,83	87,33
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah	8,47	8,49	8,56	8,61	8,67	8,72
				2	Angka harapan lama sekolah	12,45	12,74	12,86	13,19	13,43	13,66
3	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka harapan hidup	70,76	70,93	70,97	71,20	71,33	71,47
4	Menurunkan Kemiskinan	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	1	Tingkat kemiskinan (%)	7,99	8,82	7,67	6,65	6,35	6,20
				2	Gini Rasio	0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,34
			Menurunnya angka pengangguran	3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,56	7,83	7,43	6,85	6,68	6,60
5	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan	Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2	Nilai akuntabilitas	CC	CC	B	BB	BB	A
				3	Skor LPPD	2,50	2,60	2,95	3,24	3,53	3,82
				4	Nilai keterbukaan informasi	17,40	30,57	35,16	40,43	46,49	53,47

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDIS I AWAL 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kehidupan Politik	Kehidupan Politik		5	Nilai Reformasi Birokrasi	na	37,66	37,69	38,63	39,60	40,59
6	Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	21,00	na	30,00	60,00	100,00
				2	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na	na	50,00	150,00	300,00
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	1	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100	100	100	100
7	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24,22	24,27	24,68	24,65	24,88	25,12
				2	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,02	95,03	102,23	103,95	105,55	107,86
8	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,59	54,49	56,36	58,23	60,10	61,99
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	47.934	52.971	61.742	70.509	79.227	88.044
9	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatnya nilai investasi	1	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	7.707,50	9.943,04	6.613,75	10.955,61	11.200,31	11.523,46
				2	Nilai investasi PMA (juta USD)	1.369,56	653,39	869,11	1.015,53	1.067,21	1.119,90
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,70	0,22	2,23	3,39	3,73	3,91

Guna pencapaian 24 sasaran indikator RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 pada Tabel 5.1, sepuluh sasaran indikator diantaranya memerlukan dukungan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau untuk mencapainya, karena pencapaian target indikator Provinsi merupakan akumulasi dari pencapaian target indikator kabupaten kota. Sehingga pencapaian target indikator kabupaten kota diarahkan untuk memenuhi capaian target indikator provinsi Riau. Sepuluh sasaran indikator dengan lima bidang yang ditetapkan bagi kabupaten kota antara lain: (1) Bidang ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi PMDN dan PMA; (2) bidang infrastruktur terkait persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum dan rasio elektrifikasi; (3) bidang pendidikan terkait angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah jenjang pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs; (4) Bidang kesehatan terkait angka harapan hidup; (5). Bidang kependudukan terkait tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Capaian target indikator kabupaten kota yang ditetapkan dari tahun 2014-2019 secara rinci tertuang pada Tabel 5.2 - 5.11 berikut:

TABEL 5.2
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	5,47	5,14	-2,14	3,88	3,96	4,06	4,16
2	Indragiri Hulu	6,21	5,53	-2,94	3,68	3,75	3,84	3,94
3	Indragiri Hilir	7,17	6,88	2,04	4,84	4,96	5,09	5,22
4	Pelalawan	5,55	6,20	2,46	2,96	3,06	3,13	3,21
5	Siak	-2,33	-0,97	-0,21	0,35	0,91	1,47	2,03
6	Kampar	6,31	3,43	1,09	2,80	2,94	3,02	3,09
7	Rokan Hulu	5,99	6,50	1,98	4,94	5,09	5,22	5,35
8	Bengkalis	-3,27	-3,85	-2,74	-2,44	-2,03	-1,62	-1,21
9	Rokan Hilir	2,38	4,81	0,52	2,30	2,37	2,43	2,49
10	Kep Meranti	4,24	4,45	2,85	3,22	3,32	3,40	3,49
11	Pekanbaru	5,59	6,90	5,57	5,96	6,10	6,25	6,41
12	Dumai	3,68	2,69	1,91	4,64	4,72	4,84	4,96

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

- * Target Tahun Transisi
- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	23,29	52,31	65,83	69,35	74,54	78,06	82,08
2	Indragiri Hulu	34,55	59,05	76,61	79,17	82,40	85,96	88,82
3	Indragiri Hilir	87,15	85,86	95,60	96,34	97,08	98,32	99,56
4	Pelalawan	26,05	59,49	75,56	81,63	84,73	89,54	94,97
5	Siak	24,53	74,02	82,46	90,90	94,34	96,78	98,92
6	Kampar	37,81	71,15	73,83	76,51	79,19	81,87	84,55
7	Rokan Hulu	33,66	54,85	71,65	78,45	81,92	83,72	85,52
8	Bengkalis	36,94	79,57	86,34	93,11	95,88	97,65	99,22
9	Rokan Hilir	43,55	65,37	84,83	88,29	90,42	92,88	94,52
10	Kep Meranti	88,32	80,21	92,98	94,75	96,83	98,10	99,64
11	Pekanbaru	12,81	88,57	91,78	94,99	96,20	98,41	99,22
12	Dumai	19,24	72,43	88,53	94,63	96,40	98,50	99,10

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

* Target Tahun Transisi

- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing

- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.4
RASIO ELEKTRIFIKASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Elektrifikasi						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	72,40	86,30	94,84	96,95	98,17	99,38	99,60
2	Indragiri Hulu	99,00	99,16	98,04	98,77	98,29	98,11	97,93
3	Indragiri Hilir	69,42	70,00	71,00	72,00	73,00	74,33	74,98
4	Pelalawan	69,76	67,19	74,23	74,86	77,38	80,53	83,68
5	Siak	67,44	54,93	77,94	78,27	83,52	89,07	94,62
6	Kampar	76,68	83,93	87,89	89,04	92,65	95,15	98,52
7	Rokan Hulu	57,81	57,63	61,83	63,11	65,12	67,13	69,14
8	Bengkalis	80,93	106,11	98,69	99,00	101,88	102,76	103,91
9	Rokan Hilir	90,74	85,79	91,97	92,73	93,34	94,56	95,78
10	Kep Meranti	95,48	100,42	87,13	89,13	91,13	95,13	97,13
11	Pekanbaru	115,71	105,41	104,97	105,96	106,95	107,94	108,93
12	Dumai	95,38	97,25	100,00	101,16	101,47	101,68	102,02

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

* Target Tahun Transisi

- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing

- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.5
ANGKA RATA - RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Angka Rata – rata lama Sekolah						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	7,70	8,17	8,18	8,50	8,74	8,98	9,22
2	Indragiri Hulu	7,46	7,55	7,62	7,77	7,93	8,09	8,25
3	Indragiri Hilir	6,74	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	6,99
4	Pelalawan	7,74	7,82	8,17	8,34	8,56	8,77	8,99
5	Siak	8,81	9,05	9,20	9,24	9,26	9,28	9,32
6	Kampar	8,62	8,62	8,84	8,91	9,02	9,13	9,24
7	Rokan Hulu	7,38	7,83	7,84	8,14	8,37	8,60	8,83
8	Bengkalis	8,76	8,80	8,82	8,85	8,88	8,91	8,94
9	Rokan Hilir	7,42	7,62	7,62	7,75	7,85	7,95	8,05
10	Kep Meranti	7,33	7,44	7,45	7,53	7,59	7,65	7,71
11	Pekanbaru	10,93	10,95	10,97	10,99	11,01	11,03	11,05
12	Dumai	9,54	9,56	9,57	9,59	9,60	9,62	9,63

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi
 Keterangan:
 * Target Tahun Transisi
 - Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
 - Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.6
ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Angka harapan lama sekolah						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	11,79	11,96	12,64	12,98	13,41	13,83	14,26
2	Indragiri Hulu	11,29	11,51	11,66	11,75	11,85	11,95	12,04
3	Indragiri Hilir	10,50	10,67	11,40	12,00	12,50	13,00	13,05
4	Pelalawan	10,84	11,02	11,56	11,86	12,22	12,58	12,94
5	Siak	11,64	11,81	12,26	12,52	12,83	13,14	13,45
6	Kampar	12,51	12,72	12,86	13,05	13,22	13,40	13,57
7	Rokan Hulu	12,09	12,36	12,39	12,58	12,73	12,88	13,03
8	Bengkalis	12,22	12,35	12,39	12,49	12,58	12,66	12,75
9	Rokan Hilir	11,06	11,42	11,75	12,10	12,45	12,79	13,14
10	Kep Meranti	12,23	12,34	12,41	12,51	12,60	12,69	12,78
11	Pekanbaru	13,93	14,07	14,86	15,22	15,68	16,15	16,61
12	Dumai	12,27	12,40	12,46	12,57	12,66	12,76	12,85

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi
 Keterangan:
 * Target Tahun Transisi
 - Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
 - Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.7
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Angka harapan hidup						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	67,64	67,66	67,86	67,94	68,05	68,16	68,27
2	Indragiri Hulu	69,63	69,64	69,67	69,74	69,76	69,80	69,83
3	Indragiri Hilir	66,50	67,60	68,50	69,00	70,00	70,84	71,68
4	Pelalawan	70,04	70,13	70,13	70,28	70,33	70,40	70,47
5	Siak	70,51	70,54	70,54	71,55	71,56	71,88	72,19
6	Kampar	69,77	69,80	70,00	70,09	70,21	70,32	70,44
7	Rokan Hulu	68,85	68,93	69,03	69,28	69,37	69,51	69,65
8	Bengkalis	70,38	70,38	70,58	70,65	70,75	70,85	70,95
9	Rokan Hilir	69,23	69,27	69,47	69,56	69,68	69,80	69,92
10	Kep Meranti	66,38	66,42	66,72	66,85	67,09	67,25	67,47
11	Pekanbaru	71,54	71,55	71,65	71,69	71,75	71,80	71,86
12	Dumai	70,04	70,05	70,25	70,06	70,17	70,19	70,22

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

- * Target Tahun Transisi
- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.8
TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat kemiskinan (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	11,29	10,75	10,80	9,85	9,61	9,37	9,13
2	Indragiri Hulu	7,17	7,28	7,76	7,15	7,02	6,89	6,76
3	Indragiri Hilir	7,81	7,51	8,11	7,99	7,87	7,75	7,63
4	Pelalawan	11,11	11,15	12,09	11,00	9,91	8,82	7,73
5	Siak	5,17	5,22	5,67	5,52	5,37	5,22	5,07
6	Kampar	8,36	8,68	9,17	8,38	7,59	6,80	6,01
7	Rokan Hulu	10,86	10,13	11,05	11,05	11,00	10,95	10,90
8	Bengkalis	6,76	7,20	7,38	6,82	6,26	5,70	5,14
9	Rokan Hilir	7,38	7,28	7,67	7,97	7,91	7,85	7,79
10	Kep Meranti	35,89	33,85	34,08	30,89	29,23	27,57	25,91
11	Pekanbaru	3,38	3,17	3,27	3,07	2,87	2,67	2,47
12	Dumai	5,24	4,83	5,26	4,74	4,22	3,70	3,18

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

- * Target Tahun Transisi
- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran terbuka (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	3,92	6,13	2,60	2,27	2,14	2,00	1,87
2	Indragiri Hulu	3,82	3,97	4,82	4,44	4,06	3,68	3,30
3	Indragiri Hilir	2,98	4,27	7,16	6,02	5,89	5,75	5,61
4	Pelalawan	2,97	3,42	7,61	6,14	5,67	5,19	4,72
5	Siak	5,38	3,56	10,02	8,04	7,07	6,09	5,11
6	Kampar	6,20	6,10	8,07	7,47	6,86	6,26	5,66
7	Rokan Hulu	5,04	7,90	7,82	7,50	7,18	6,86	6,55
8	Bengkalis	7,02	7,30	10,08	9,33	8,57	7,82	7,07
9	Rokan Hilir	6,04	6,25	8,62	8,37	8,12	7,88	7,63
10	Kep Meranti	6,99	11,76	9,37	8,29	7,21	6,13	5,05
11	Pekanbaru	6,66	9,20	7,46	7,21	6,96	6,71	6,46
12	Dumai	9,60	9,14	11,23	11,06	10,89	10,72	10,55

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

- * Target Tahun Transisi
- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.10
NILAI INVESTASI PMDN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	96,96	739,60	245,83	739,60	368,43	388,27	393,62
2	Indragiri Hulu	33,11	338,66	188,63	684,57	762,33	789,18	791,02
3	Indragiri Hilir	407,75	14,13	528,93	344,98	405,57	438,22	470,87
4	Pelalawan	219,04	48,80	823,30	359,35	478,46	634,61	661,48
5	Siak	681,17	2,395,75	527,65	601,04	524,28	533,43	560,00
6	Kampar	143,50	105,27	977,24	403,39	438,25	470,89	501,81
7	Rokan Hulu	372,90	83,41	275,10	205,45	414,76	424,28	454,63
8	Bengkalis	208,02	12,72	205,11	619,40	318,61	327,35	343,21
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	10,20	16,15	19,83
10	Kep Meranti	-	22,65	-	-	20,00	20,90	21,80
11	Pekanbaru	1,332,63	2,658,32	4,463,50	785,29	1,016,67	1,153,96	1,278,27
12	Dumai	1,389,18	1,238,23	1,707,76	,318,98	2,350,73	2,478,73	2,702,13

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

- * Target Tahun Transisi
- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing
- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

TABEL 5.11
NILAI INVESTASI PMA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Nilai investasi PMA (juta USD)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kuantan Singingi	2,09	59,12	23,22	34,6	39,83	45,16	48,96
2	Indragiri Hulu	0,9	38,21	0,06	8,42	12,36	13,51	13,99
3	Indragiri Hilir	65,23	62,95	21,98	0,23	21,39	30,71	31,72
4	Pelalawan	33,94	7,01	316,38	244,29	328,19	333,52	340,39
5	Siak	647,94	501,24	6,91	319,33	320,52	321,71	322,52
6	Kampar	74,84	17,56	29,57	5,16	14,47	17,62	22,39
7	Rokan Hulu	0,13	-	16,10	0,64	8,63	10,39	12,15
8	Bengkalis	53,76	15,81	23,69	3,38	29,38	31,39	35,64
9	Rokan Hilir	2,86	1,78	63,39	4,95	35,22	42,01	48,80
10	Kep Meranti	1,88	2,75	0,69	0	4,60	4,20	3,70
11	Pekanbaru	5,46	18,92	69,55	9,56	41,60	47,89	54,18
12	Dumai	415,93	644,23	81,88	236,92	252,10	253,69	258,95

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Proyeksi

Keterangan:

* Target Tahun Transisi

- Tahun 2013 - 2016 Kondisi Existing

- Tahun 2017 - 2019 Target Pencapaian

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Provinsi Riau

Dalam mengimplementasikan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2014-2019).

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi juga memperhatikan: (1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Pencapaian perioderisasi RPJP Provinsi Riau tahap ke-3; (3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; serta (4) Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirangkum dalam isu strategis daerah.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dengan peningkatan dan pemantapan infastruktur untuk mendorong peningkatan investasisehingga terbuka kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta adanya penguatan dan sinergitas antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan.
2. Pendekatan kewilayahan yang fokus dan lokus dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendekatan tersebut dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah termasuk pesisir dan laut. Sementara dari aspek lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pencegahan

Karhutla, pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan, menjaga dan mengawasi luas kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah dan meningkatkan mutu kawasan hutan.

3. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas SDM (*human skill*) dengan mengamalkan nilai-nilai budaya melayu dan agama untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi sinergitas antara strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang atau yang akan dituangkan dalam RPJMD, sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN, maka secara rinci tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau disajikan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1:
Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan
Pembangunan Provinsi Riau RPJMD 2014-2019

VISI : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.				
Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas pembangunan jaringan infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan Jaringan Infrastruktur
			1. Peningkatan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung, keselamatan transportasi 3. Penyediaan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan 5. Pembangunan sarana dan prasarana air	1. Meningkatkan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, keselamatan transportasi 3. Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik 4. Membangun energi baru dan terbarukan 5. Membangun sarana dan prasarana air

			bersih dan air minum 6. Peningkatan kualitas potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya 7. Penguatan sistem dan data informasi infrastruktur dasar	bersih dan air minum 6. Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya 7. Memperkuat sistem dan data informasi infrastruktur dasar
Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan Kuantitas SDM yang berkualitas 1. Meningkatkan Kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan 2. Membangun sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan 5. Memperkuat sistem dan data informasi Pendidikan
Misi 3: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 1. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan

				Pustu) 3. Membangun sarana dan prasarana kesehatan 4. Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan 6. Memperkuat sistem dan data informasi Kesehatan
Misi 4: Menurunkan Kemiskinan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.1	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Peningkatan akses terhadap determinan kemiskinan 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan RT miskin 2. Pengurangan beban biaya RT miskin 3. Pembangunan infrastruktur dasar bagi RT miskin 4. Pengendalian inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan 1. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT Msikin 2. Mengurangkan beban biaya RT miskin 3. Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin 4. Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin.
		Menurunnya angka pengangguran	1. Perluasan kesempatan kerja dan usaha 2. Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja	1. Memperluas kesempatan kerja dan usaha RT Miskin 2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.1	Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya	Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>	Peningkatan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan

	serta pemantapan kehidupan politik		1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan 2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur pemerintahan 3. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah; 4. Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Peningkatan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Penguatan sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Penguatan sistem dan data informasi kependudukan 8. Peningkatan peran pemerintah dalam fasilitator pengembangan kepariwisataan 9. Peningkatan kesadaran politik masyarakat	1. Meningkatkan Sarana Prasarana Pemerintahan 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur pemerintah 3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah; 4. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Memperkuat sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan 8. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan 9. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
Misi 6: Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6.1	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1. Pelestarian nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan	1. Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

			2. Peningkatan dan penerapan nilai-nilai budaya melayu pada dunia Pendidikan 3. Pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya 4. Pemanfaatan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu dalam pengembangan kepariwisataan	2. Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan 3. Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya 4. Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan
		Meningkatnya kerukunan hidup beragama	1. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 2. Penghilangan konflik beragama	1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 2. Menghilangkan konflik beragama
Misi 7: Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7.1	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan)	1. Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas. 2. Peningkatan intensitas penggunaan lahan dan teknologi input 3. Peningkatan Nilai tukar Petani 4. Penguatan sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan. 5. Peningkatan peran swasta dan asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan	1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas 2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan 3. Meningkatkan nilai tukar petani 4. Menguatkan sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan 5. Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan

			perkebunan 6. Peningkatan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai	perkebunan 6. Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai
Misi 8: Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
8.1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 2. Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil 3. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Peningkatan Pengelolaan Kepariwisataaan 1. Pembangunan destinasi, sarana dan prasarana wisata 2. Peningkatanday asaing industri pariwisata 3. Pengembangan produk-produk ekonomi kreatif	Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan 1. Membangun destinasi, sarana dan prasarana wisata 2. Meningkatkan promosi wisata 3. Mengembangk produk-produk ekonomi kreatif
Misi 9: Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
9.1	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatnya nilai investasi	Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif

			1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang investasi. 2. Pembangunan kawasan industri dan pengembangan industri unggulan 3. Peningkatan promosi investasi industri unggulan. 4. Peningkatan penyerapan tenaga sesuai dengan kompetensi TK	1. Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi. 2. Membangun kawasan industri dan mengembangkan industri unggulan 3. Meningkatkan promosi investasi industri unggulan. 4. Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau

Arah kebijakan pembangunan provinsi Riau 2014-2019 selaras dengan arah kebijakan RPJMN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim; penyiapan landasan pembangunan yang kokoh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci pada Tabel 6.1, maka arah kebijakan RPJMD yang merupakan pedoman untuk merumuskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sebagaimana berikut ini.

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada periodisasi pelaksanaan RPJMD 2014-2019, sembilan arah kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan pembangunan jaringan Infrastruktur yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan irigasi dan telekomunikasi serta kawasan industri. Disamping itu, juga membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan dengan gejolak perekonomian. Sedangkan arah kebijakan secara rinci sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan (Termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung keselamatan transportasi; (3) Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik; (4) Membangun energi baru dan terbarukan; (5) Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai; (6) Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya; (7) Membangun sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
2. Arah kebijakan bidang pendidikan adalah: Meningkatkan SDM yang berkualitas; yang meliputi; (1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diprioritaskan pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang

meliputi; (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah.

3. Arah kebijakan bidang kesehatan adalah: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; (1) Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); (3) Membangun sarana dan prasarana kesehatan dengan prioritas pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakatnya yang masih rendah; (4) Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambahnya angka harapan hidup.
4. Arah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah: Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; (1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT miskin; (2) Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air minum); (3) Mengurangkan beban biaya RT miskin (pendidikan, kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat RT); (4) Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin; (5) Mengembangkan perekonomian masyarakat (UMKM dan IKM) untuk mendukung kepariwisataan.
5. Arah kebijakan dalam tatakelola pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan: (1) Menyediakan sarana prasarana pemerintahan; (2)

Meningkatkan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sehingga terciptanya pemerintahan yang secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam meningkatkan pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut, dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan umum yang ditandai dengan membaiknya indeks efektifitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi; (3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui capaian opini WTP, nilai akuntabilitas dan LPPD serta meraih kepercayaan masyarakat dan nilai reformasi birokrasi. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (5) Menguatkan sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah (6) Menguatkan sistem dan data informasi kependudukan; (7). Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan dan (8) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

6. Arah kebijakan meningkatkan penerapan nilai budaya melayu adalah: (1) Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kehidupan bermasyarakat yang dimulai pada dunia pendidikan; (3) Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya; (4) Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan. Sementara arah kebijakan keagamaan antara lain (1) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan; (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah; (3) Menghilangkan konflik beragama.

7. Arah kebijakan dalam memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keaneragaman pangan yang berkualitas; (2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; (3) Meningkatkan nilai tukar petani; (4) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan (Menciptakan perekonomian yang berdayasaing).
8. Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kualitas adalah: (1) Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; (2) Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam, dan (3) Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah). Sedangkan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; (3) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Sementara itu arah kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan antara lain; (1) Membangun desinasi, sarana dan prasarana wisata; (2) Meningkatkan promosi wisata; (3) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif
9. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan Menciptakan perekonomian yang berdayasaing dan iklim usaha serta investasi yang kondusif dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi sebagaimana arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur; (2) Membangun kawasan industri sebagai wilayah pusat pertumbuhan ekonomi; (3) Meningkatkan promosi investasi untuk hilirisasi industri unggulan; (3) Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah; (5) Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK; (6) Mendorong

peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan

6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Meningkatkan pembangunan jaringan Infrastruktur yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan jaringan Infrastruktur yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan irigasi dan telekomunikasi serta kawasan industri. Disamping itu, juga membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan dengan gejolak perekonomian. Sedangkan arah kebijakan secara rinci sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan (Termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung keselamatan transportasi; (3) Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik; (4) Membangun energi baru dan terbarukan; (5) Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai; (6) Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya; (7) Membangun sarana dan prasarana air bersih dan air minum.
2. Arah kebijakan bidang pendidikan adalah: Meningkatkan SDM yang berkualitas; yang meliputi; (1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diprioritaskan pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan

sumberdaya pendidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang meliputi; (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah.

3. Arah kebijakan bidang kesehatan adalah: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; (1) Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); (3) Membangun sarana dan prasarana kesehatan dengan prioritas pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakatnya yang masih rendah; (4) Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambahnya angka harapan hidup.
4. Arah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah: Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; (1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT Msikin; (2) Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air minum); (3) Mengurangkan beban biaya RT miskin (pendidikan, kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat RT); (4) Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin; (5) Mengembangkan perekonomian masyarakat (UMKM dan IKM) untuk mendukung kepariwisataan.

5. Arah kebijakan dalam tatakelola pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan: (1) Menyediakan sarana prasarana pemerintahan; (2) Meningkatkan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sehingga terciptanya pemerintahan yang secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam meningkatkan pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut, dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan umum yang ditandai dengan membaiknya indeks efektivitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi; (3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui capaian opini WTP, nilai akuntabilitas dan LPPD serta meraih kepercayaan masyarakat dan nilai reformasi birokrasi. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (5) Memperkuat sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah (6) Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan; (7). Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan dan (8) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
6. Arah kebijakan meningkatkan penerapan nilai budaya melayu adalah: (1) Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kehidupan bermasyarakat yang dimulai pada dunia pendidikan; (3) Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya; (4) Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan. Sementara arah kebijakan keagamaan antara lain (1) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan; (2)

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah; (3) Menghilangkan konflik beragama.

7. Arah kebijakan dalam memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keaneragaman pangan yang berkualitas; (2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; (3) Meningkatkan nilai tukar petani; (4) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan (Menciptakan perekonomian yang berdayasaing).
8. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas adalah: (1) Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; (2) Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam, dan (3) Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah). Sedangkan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; (3) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Sementara itu arah kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan antara lain; (1) Membangun desinasi, sarana dan prasarana wisata; (2) Meningkatkan promosi wisata; (3) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif
9. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan Menciptakan perekonomian yang berdayasaing dan iklim usaha serta investasi yang kondusif dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi sebagaimana arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur; (2) Membangun kawasan industri sebagai wilayah pusat pertumbuhan ekonomi; (3) Meningkatkan promosi investasi untuk hilirisasi industri unggulan; (3) Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah; (5) Meningkatkan

daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK;(6) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau.

1. Memperkuat pembangunan jaringan Infrastruktur yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan irigasi dan telekomunikasi serta kawasan industri. Disamping itu, juga membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan dengan gejolak perekonomian. Sedangkan arah kebijakan secara rinci sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan (Termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung keselamatan transportasi; (3) Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik; (4) Membangun energi baru dan terbarukan; (5) Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai; (6) Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya; (7) Membangun sarana dan prasarana air bersih dan air minum; (8) Peningkatan sistem, data dan informasi infrastruktur.
2. Arah kebijakan bidang pendidikan adalah: Meningkatkan SDM yang berkualitas; yang meliputi; (1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diprioritaskan pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas

pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan; (5) Meningkatkan sistem, data dan informasi kependidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang meliputi; (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah.

3. Arah kebijakan bidang kesehatan adalah: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; (1) Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); (3) Membangun sarana dan prasarana kesehatandengan prioritas pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakatnya yang masih rendah; (4) Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; (6). Meningkatkan sistem, data dan informasi kesehatan. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambahnya angka harapan hidup.

4. Arah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah: Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; (1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT Msikin; (2) Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air minum); (3) Mengurangkan beban biaya RT miskin (pendidikan, kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat RT); (4)

Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin; (5) Mengembangkan perekonomian masyarakat (UMKM dan IKM) untuk mendukung kepariwisataan; (6) Meningkatkan sistem, data dan informasi kemiskinan yang terkoordinasi dengan data kependudukan dan determinan kemiskinan.

5. Arah kebijakan dalam tatakelola pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan: (1) Menyediakan sarana prasarana pemerintahan; (2) Meningkatkan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sehingga terciptanya pemerintahan yang secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam meningkatkan pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut, dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan umum yang ditandai dengan membaiknya indeks efektivitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi; (3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui capaian opini WTP, nilai akuntabilitas dan LPPD serta meraih kepercayaan masyarakat dan nilai reformasi birokrasi. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (5) Memperkuat sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah (6) Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan; (7). Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan dan (8) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat; (9) Meningkatkan sistem, data dan informasi pemerintahan dan kependudukan.
6. Arah kebijakan meningkatkan penerapan nilai budaya melayu adalah: (1) Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada

kehidupan bermasyarakat yang dimulai pada dunia pendidikan; (3) Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya; (4) Menjadikan nilai-nilai dan keaneragaman budaya melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan. Sementara arah kebijakan keagamaan antara lain (1) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan; (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah; (3) Menghilangkan konflik beragama.

7. Arah kebijakan dalam memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keaneragaman pangan yang berkualitas; (2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; (3) Meningkatkan nilai tukar petani; (4) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan; (5) Meningkatkan sistem, data dan informasi pertanian dan perkebunan (Menciptakan perekonomian yang berdayasaing).
8. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas adalah: (1) Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; (2) Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam, dan (3) Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah). Sedangkan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; (3) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Sementara itu arah kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan antara lain; (1) Membangun desinasi, sarana dan prasarana wisata; (2) Meningkatkan promosi wisata; (3) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif; (4). Meningkatkan sistem, data dan informasi lingkungan hidup dan kepariwisataan.

9. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan menciptakan perekonomian yang berdayasaing dan iklim usaha serta investasi yang kondusif dengan:

- (1) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi sebagaimana arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur;
- (2) Membangun kawasan industri sebagai wilayah pusat pertumbuhan ekonomi;
- (3) Meningkatkan promosi investasi untuk hilirisasi industri unggulan;
- (3) Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah;
- (5) Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK;
- (6) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan;
- (7) Meningkatkan sistem, data dan informasi asosiasi industri dan lainnya.

6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2018)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat merupakan lanjutan dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau

1. Memperkuat dan memantapkan pembangunan jaringan Infrastruktur yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan irigasi dan telekomunikasi serta kawasan industri. Disamping itu, juga membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan dengan gejolak perekonomian. Sedangkan arah kebijakan secara rinci sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas pembangunan Jalan dan jembatan (Termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung keselamatan transportasi; (3) Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik; (4) Membangun energi baru dan terbarukan; (5) Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai; (6) Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya; (7) Membangun sarana dan prasarana air bersih dan air minum; (8) Meningkatkan sistem, data dan informasi infrastruktur.

2. Arah kebijakan bidang pendidikan adalah: Meningkatkan SDM yang berkualitas; yang meliputi; (1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diprioritaskan pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan; (5). Meningkatkan sistem, data dan informasi kependidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang meliputi; (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah.
3. Arah kebijakan bidang kesehatan adalah: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; (1) Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); (3) Membangun sarana dan prasarana kesehatan dengan prioritas pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakatnya yang masih rendah; (4) Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; (5)

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; (6) Meningkatkan sistem, data dan informasi kesehatan. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambahnya angka harapan hidup.

4. Arah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah: Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; (1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT miskin; (2) Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air minum); (3) Mengurangkan beban biaya RT miskin (pendidikan, kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat RT); (4) Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin; (5) Mengembangkan perekonomian masyarakat (UMKM dan IKM) untuk mendukung kepariwisataan; (6). Meningkatkan sistem, data dan informasi kemiskinan yang terkoordinasi dengan data kependudukan dan determinan kemiskinan.
5. Arah kebijakan dalam tatakelola pemerintahan adalah meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan: (1) Menyediakan sarana prasarana pemerintahan; (2) Meningkatkan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sehingga terciptanya pemerintahan yang secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam meningkatkan pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut, dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan umum yang ditandai dengan membaiknya indek efektifitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi; (3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui capaian opini WTP, nilai akuntabilitas dan LPPD serta meraih kepercayaan masyarakat dan nilai reformasi birokrasi. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4)

Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (5) Memperkuat sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah (6) Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan; (7). Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan dan (8) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.(9) Meningkatkan sistem, data dan informasi pemerintahan dan kependudukan.

6. Arah kebijakan meningkatkan penerapan nilai budaya melayu adalah: (1) Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kehidupan bermasyarakat yang dimulai pada dunia pendidikan; (3) Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya; (4) Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan. Sementara arah kebijakan keagamaan antara lain (1) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan; (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah; (3) Menghilangkan konflik beragama.
7. Arah kebijakan dalam memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas; (2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; (3) Meningkatkan nilai tukar petani; (4) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan; (5) Meningkatkan sistem, data dan informasi pertanian dan perkebunan (Menciptakan perekonomian yang berdayasaing)
8. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: (1) Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; (2) Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam, dan (3) Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah). Sedangkan arah kebijakan dalam meningkatkan

kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; (3) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Sementara itu arah kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan kepariwisataan antara lain; (1) Membangun desinasi, sarana dan prasarana wisata; (2) Meningkatkan promosi wisata; (3) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif; (4) Meningkatkan sistem, data dan informasi kepariwisataan.

9. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan meningkatkan daya saing perekonomian dan meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi sebagaimana arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur; (2) Membangun kawasan industri sebagai wilayah pusat pertumbuhan ekonomi; (3) Meningkatkan promosi investasi untuk hilirisasi industri unggulan; (3) Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah; (5) Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK; (6) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan; (7) Meningkatkan sistem, data dan informasi industri dan lainnya.

6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2019)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima merupakan lanjutan dari tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Pada tahun 2019 pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau

1. Memperkuat dan memantapkan jaringan Infrastruktur yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan irigasi dan telekomunikasi serta kawasan industri. Disamping itu, juga membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan dengan gejolak perekonomian. Sedangkan arah kebijakan secara rinci sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas

pembangunan Jalan dan jembatan (Termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung keselamatan transportasi; (3) Menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik; (4) Membangun energi baru dan terbarukan; (5) Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai; (6) Meningkatkan potensi air baku dan konservasi sumber daya air lainnya; (7) Membangun sarana dan prasarana air bersih dan air minum; (8) Meningkatkan sistem, data dan informasi infrastruktur.

2. Arah kebijakan bidang pendidikan adalah: Meningkatkan SDM yang berkualitas; yang meliputi; (1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diprioritaskan pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan. (5) Meningkatkan sistem, data dan informasi kependidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang meliputi; (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah.

3. Arah kebijakan bidang kesehatan adalah: Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; (1) Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); (3) Membangun sarana dan prasarana kesehatan dengan prioritas pada wilayah yang aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakatnya yang masih rendah; (4) Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; (5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; (6). Meningkatkan sistem, data dan informasi kesehatan. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari bertambahnya angka harapan hidup.
4. Arah kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah: Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; (1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan RT miskin; (2) Membangun infrastruktur dasar bagi RT miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air minum); (3) Mengurangkan beban biaya RT miskin (pendidikan, kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat RT); (4) Mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli RT miskin; (5) Mengembangkan perekonomian masyarakat (UMKM dan IKM) untuk mendukung kepariwisataan; (6). Meningkatkan sistem, data dan informasi kemiskinan yang terkoordinasi dengan data kependudukan dan determinan kemiskinan
5. Arah kebijakan dalam tatakelola pemerintahan adalah meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan dengan: (1) Menyediakan sarana prasarana pemerintahan; (2) Meningkatkan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sehingga terciptanya pemerintahan yang secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, meningkatkan kompetensi aparatur, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang

partisipasi publik melalui *citizen charter* dalam meningkatkan pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut, dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan umum yang ditandai dengan membaiknya indek efektifitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi; (3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui capaian opini WTP, nilai akuntabilitas dan LPPD serta meraih kepercayaan masyarakat dan nilai reformasi birokrasi. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (5) Memperkuat sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah (6) Memperkuat sistem dan data informasi kependudukan; (7). Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan dan (8) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat; (9) Meningkatkan sistem, data dan informasi pemerintahan dan kependudukan.

6. Arah kebijakan meningkatkan dan menerapkan nilai budaya melayu adalah: (1) Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya Melayu dan Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kehidupan bermasyarakat yang dimulai pada dunia pendidikan; (3) Membangun dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana seni dan budaya; (4) Menjadikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu sebagai salah satu basis pengembangan kepariwisataan. Sementara arah kebijakan keagamaan antara lain (1) Meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan; (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah; (3) Menghilangkan konflik beragama.
7. Arah kebijakan dalam memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas; (2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; (3) Meningkatkan nilai tukar petani; (4) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan;

- (5) Meningkatkan sistem, data dan informasi pertanian dan perkebunan (Menciptakan perekonomian yang berdayasaing)
8. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas adalah: (1) Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; (2) Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam, dan (3) Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah). Sedangkan arah kebijakan dalam mengoptimalkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: (1) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; (3) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Sementara itu arah kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan kepariwisataan antara lain; (1) Membangun desinasi, sarana dan prasarana wisata; (2) Meningkatkan promosi wisata; (3) Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif; (4) Meningkatkan sistem, data dan informasi kepariwisataan
9. Arah kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan dengan meningkatkan dayaasaing perekonomian dan meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi sebagaimana arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur; (2) Membangun kawasan industri sebagai wilayah pusat pertumbuhan ekonomi; (3) Meningkatkan promosi investasi untuk hilirisasi industri unggulan; (3) Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah; (5) Meningkatkan daya serap TK sesuai keahlian dan keterampilan TK; (6) Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan; (7) Meningkatkan sistem, data dan informasi industri dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sembilan arah kebijakan secara garis besar sesuai dengan visi

yang akan dicapai dan misi yang dijalankan. Namun dalam Sembilan arah kebijakan tersebut memuat beberapa arah kebijakan yang lebih spesifik yang tidak tertuang secara eksplisit dalam Sembilan misi yang ada untuk mengakomodir program pembangunan yang ada di setiap Perangkat Daerah. Adapun Sembilan arah kebijakan secara garis besarnya dapat disimpulkan pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2:
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

No	T A H U N				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan pembangun jaringan Infrastruktur	Meningkatkan Membangun jaringan Infrastruktur	Menguatkan pembangun jaringan Infrastruktur	Menguatkan dan memantapkan jaringan Infrastruktur	Menguatkan dan Memantapkan Jaringan Infrastruktur
2	Meningkatkan SDM yang berkualitas	Meningkatkan SDM yang berkualitas	Meningkatkan SDM yang berkualitas	Meningkatkan SDM yang berkualitas	Meningkatkan SDM yang berkualitas
3	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
4	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan
5	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
6	Meningkatkan penerapan nilai Budaya Melayu dan agama	Meningkatkan penerapan nilai Budaya Melayu dan agama	Meningkatkan penerapan nilai Budaya Melayu dan agama	Meningkatkan penerapan nilai Budaya Melayu dan agama	Meningkatkan penerapan nilai Budaya Melayu dan agama
7	Menciptakan perekonomian yang berdayasaing	Menciptakan perekonomian yang berdayasaing	Menciptakan perekonomian yang berdayasaing	Menciptakan perekonomian yang berdayasaing	Menciptakan perekonomian yang berdayasaing

No	T A H U N				
	2015	2016	2017	2018	2019
8	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan pariwisata Serta Meningkatkan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan pariwisata serta Meningkatkan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan pariwisata serta Meningkatkan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan pariwisata serta Meningkatkan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan pariwisata serta Mengoptimalkan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut
9	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Menciptakan perekonomian iklim usaha dan investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif

6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Riau, sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pengembangan kewilayahan merupakan suatu keniscayaan.

Arah kebijakan pembangunan pada Tabel 6.1 dan 6.2 yang terkait dengan kewilayahan maka harus disesuaikan dengan kebijakan pengembangan kewilayahan. Arah kebijakan pengembangan kewilayahan dibagi kedalam tiga kategori yaitu 1). Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya dengan melibatkan 10(sepuluh) wilayah/kawasan yang perlu dikembangkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau, yaitu: (1) Kawasan Strategis Duri – Dumai – Rupat; (2) Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya; (3) Kawasan Kuala Enok - Pulau Burung; (4) Kawasan Industri Tenayan; (5) Kawasan Industri Tanjung Buton; (6) Kawasan Teknopolitan Pelalawan; (7) Kawasan Pengembangan Pulau Rupat; (8) Kawasan Strategis Budaya Istana Siak Sri Indrapura; (9) Kawasan Candi Muara Takus dan Sekitarnya; (10) Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang; 2). Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Kerjasama Antar Daerah yaitu Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan); 3) Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang meliputi (1) Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Betabuh; (2) Hutan Lindung (HL) Mahato; (3) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT); (4) Pulau-pulau Kecil Terluar.

6.3.1 Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya

Sesuai kewenangan untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya, wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Riau terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan disebut sebagai kawasan strategis Provinsi Riau. Berdasarkan analisa peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis di wilayah provinsi Riau terdiri atas:

1) Kawasan Strategis Duri – Dumai – Rupert

Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Riau yang ditinjau berdasarkan pertumbuhan ekonomi maka Kawasan Duri-Dumai-Rupert merupakan kawasan yang diharapkan dapat tumbuh sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Provinsi Riau pada khususnya dan ekonomi regional pada umumnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor lokasi, Kawasan Duri-Dumai-Rupert memiliki berbagai keunggulan. Faktor-faktor lokasi yaitu terdiri dari: (a) Faktor Endowment; (b) Pasar dan Harga; (c) Bahan Baku dan Energi; (d) Aglomerasi; (e) Kebijakan Pemerintah dan (f) Biaya Angkut. Berdasarkan kesemua faktor lokasi tersebut, Kawasan Duri-Dumai-Rupert memiliki keunggulan yang belum tentu dimiliki daerah lain. Dari faktor endowment, yaitu ketersediaan faktor produksi secara kualitatif dan kuantitatif, telah dipenuhi oleh kawasan ini, yaitu dengan masih luasnya tersedia lahan untuk pengembangan, banyaknya tersedia tenaga kerja dan banyaknya investor yang telah menanamkan modal di Kawasan Duri-Dumai-Rupert. Faktor selanjutnya yaitu pasar dan harga, dengan letak Kawasan Duri-Dumai-Rupert yang sangat strategis yaitu dekat dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan negara ASEAN lainnya menjadi keuntungan tersendiri dalam memasarkan produk yang dihasilkan pada kawasan ini. Ditambah lagi dengan tersedianya bahan baku dan energi yang melimpah pada kawasan ini dan daerah hinterlandnya.

Menariknya Kota Dumai sebagai lokasi industri telah memunculkan gejala aglomerasi. Berkumpulnya berbagai jenis industri mengakibatkan timbulnya penghematan eksternal ekonomi, ini terjadi karena faktor-faktor luar dan dinikmati oleh semua industri yang ada di kota tersebut, seperti ketersediaan infrastruktur dan bahan baku yang mudah didapat.

Kebijakan Pemerintah pada Kawasan Duri-Dumai-Rupert menjadi faktor pendorong bagi pengembangan kawasan ini. Kebijakan Pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, terminal agribisnis, balai latihan kerja dan infrastruktur pendukung lainnya pada Kawasan Duri-Dumai-Rupert akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan ini.

Sehingga dengan tersedianya infrastruktur transportasi yang mantap menuju dan dari kawasan ini, tentunya akan mempermudah biaya angkut.

Kondisi dan peluang pengembangan Kawasan Duri, Dumai dan Rupert berdasarkan aspek perekonomian dapat ditentukan dengan menggunakan skala prioritas sektor unggulan dengan cara mengkombinasikan hasil analisis LQ, analisis Shift-Share serta Analisis Input-Output. Hasil perhitungan menunjukkan estimasi prioritas sektor unggulan perekonomian pada Kawasan Duri-Dumai-Rupert di masa yang akan datang adalah:

- (a) Prioritas I adalah (1) Sektor Pertanian khususnya Sub sektor Perkebunan dan Kehutanan, (2) Sektor Pertambangan dan Penggalian.
- (b) Prioritas II adalah sektor (1) Industri Pengolahan.

Dengan demikian, secara umum berdasarkan pendekatan berbagai analisis di atas diketahui bahwa potensi sektor yang dapat diunggulkan di Kawasan Duri-Dumai-Rupert dalam lingkup Provinsi Riau adalah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang akan bermuara pada sektor perdagangan dan jasa. Pertambangan sebenarnya memberi sumbangan yang besar terhadap pembangunan Provinsi Riau. Ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB. Namun demikian, peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil sehingga sektor ini tidak dimasukkan sebagai sektor unggulan.

Potensi pengembangan ekonomi yang mendukung pengembangan Kawasan Duri-Dumai-Rupert adalah adanya dukungan potensi komoditi unggulan pada kantong-kantong produksi yang terdapat di wilayah hinterlandnya, khususnya dalam skala Kawasan Duri-Dumai-Rupert. Komoditi yang potensial unggul diantaranya adalah padi, jagung, kelapa sawit, kelapa, karet dan ayam kampung. Namun berdasarkan seleksi lanjutan, di dalam kawasan ini belum ada komoditi yang dapat unggul dibandingkan dengan komoditi lainnya. Selain komoditi hasil pertanian, terdapat juga komoditi industri hasil olahan sektor kehutanan berupa paper dan pulp yang cukup besar serta hasil galian minyak bumi dari wilayah Duri dan Rokan Hilir. Muara distribusi kedua komoditi terakhir berada di Pelabuhan Dumai.

Dari segi pemasaran, tingginya permintaan pasar terhadap komoditi industri yang dihasilkan oleh jenis-jenis industri prospektif (misalnya CPO) merupakan potensi pasar yang perlu dipertahankan bahkan bila masih memungkinkan terus ditingkatkan. Dengan tingkat permintaan pasar yang tinggi harga komoditi industri yang dihasilkan akan semakin baik dan pada gilirannya akan turut memacu tingkat produksi maupun permintaan terhadap bahan baku industri yang dihasilkan kantong-kantong produksi di Kawasan Duri-Dumai-Rupat.

Dengan demikian, selain kegiatan industri yang terdapat di dalam kawasan perencanaan, kegiatan pada sektor/sub-sektor unggulan yang menghasilkan komoditi unggulan juga akan turut terpacu perkembangannya. Dari sini terlihat ada korelasi positif yang significant antara perkembangan kegiatan agroindustri dengan peningkatan intensitas kegiatan pada sektor/sub-sektor unggulan di wilayah hinterland-nya. Kendala pengembangan ekonomi khususnya di sektor industri kecil dan industri kerajinan dan rumah tangga adalah terbatasnya kemampuan permodalan dan rendahnya pengetahuan pengusaha terhadap aspek pemasaran. Dalam sektor pertanian dalam arti luas, kendala yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya jenis diversifikasi produk yang dihasilkan dari sebuah komoditi pertanian, terhambatnya akses ke pasar dan panjangnya rantai perniagaan dari areal produksi ke pengguna akhir.

Disektor kemaritiman Provinsi Riau memiliki pelabuhan Utama Dumai dengan aktivitas bongkar muat barang baik domestik maupun luar negeri, 13 pelabuhan pengumpul untuk aktivitas bongkar muat barang dalam negeri, dan 19 pelabuhan pengumpan. Transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah makin rendah. Keberadaan pelabuhan di Provinsi Riau jumlahnya cukup banyak mengingat aktivitas pelayanan angkutan barang dan penumpang di Riau melalui laut dan Sungai.

Riau memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas yaitu 470,80 km², sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Riau. Sebagian besar produksi

perikanan di Provinsi merupakan perikanan tangkap laut dengan produksi mencapai 50 persen dari total produksi perikanan Riau. Produksi perikanan tangkap laut di Riau sebesar 93.279 ton, diikuti perikanan budidaya kolam sebesar 45.284 ton. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain udang windu, udang galah, gurame, mujair, nila dan ikan mas. Hasil produksi perikanan tangkap laut Riau menyumbang 1,76 persen terhadap hasil produksi perikanan tangkap laut nasional yang sebesar 5.707.012 ton. Potensi perikanan yang besar di Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir, didukung dengan perbedaan pasang surut arus laut yang tinggi sehingga potensi perikanan cukup tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Riau antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu sebagai konsep gerbong dengan lokomotifnya, melalui peningkatan kegiatan ekonomi maka akan dapat didorong pengembangan aktivitas pariwisatanya. Tanpa penerapan konsep diatasapun, pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan sebagai kegiatan yang sangat spekulatif dari banyaknya tamu asing yang datang ke Dumai untuk transit. Pembenahan Kota Dumai menjadi pilihan yang strategis bagi langkah-langkah berikutnya. Dengan penambahan atau peningkatan kualitas pelayanan hotel dan restoran atau biro perjalanan, akan menjadi sarana pendukung wisata yang penting dikemudian hari. Pengembangan kawasan-kawasan wisata skala jangkauan kota menjadi prioritas meskipun tidak tertutup kemungkinan dengan aktivitas yang memakan waktu jauh seperti penyeberangan ke Pulau Rupat dengan perencanaan resort dan view

pemandangan alam yang indah. Terakhir, upaya rencana menghubungkan Duri dengan Dumai melalui jalan tol perlu disambut dengan antusiasme yang tinggi mengingat dari aspek pariwisata sangat positif. Dengan konsep Kota Dumai sebagai pelabuhan yang memerlukan dukungan wilayah hinterland yang subur dan nyaman, ide jalan tol ini merupakan alternatif memperpendek jarak Duri-Rupat menjadi sangat rasional dalam time distance. Penggabungan 2 pusat pertumbuhan ini akan disokong oleh input Pulau Rupat sebagai kawasan pariwisata skala regional, niscaya Kawasan Duri-Dumai-Rupat ini akan mampu menggeliat dimasa mendatang.

Dari konstelasi tata ruang menunjukkan bahwa Rupat memegang peran penting dalam penyediaan aktivitas input berupa pariwisata sedangkan Dumai sebagai pintu menuju kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang didukung oleh pelabuhan besar. Berkaitan dengan Duri yang akan diposisikan sebagai wilayah hinterland yang subur akan jauh lebih dekat bila rencana toll way dapat direalisasikan. Dengan fakta yang menunjukkan kedatangan pengunjung ke pintu Pekanbaru yang tinggi, Kota Pekanbaru dapat menjadi feeder wisatawan yang menguntungkan ke Kawasan Duri-Dumai-Rupat ini atau justru sebaliknya kawasan ini akan membagi orientasinya ke Pekanbaru dengan banyaknya ODTW diwilayahnya. Untuk mendukung berbagai rencana diatas, telah dan sedang dibangun infrastruktur pendukung antara lain, Ro-RO Dumai Melaka, Ro- Ro Tanjung Kapal dan Tanjung Medang, Terminal Agribisnis dan balai Latihan Kerja yang berstandar internasional.

Isu strategis lain yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Duri-Dumai-Rupat adalah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR). KESR dikembangkan dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing yang bersifat komplementaritas untuk mempercepat arus masuk investasi dengan kekuatan pendorong utamanya adalah sektor swasta dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor. Komplementaritas pada dasarnya adalah saling melengkapi apa yang dimiliki dan diberikan kepada negara lain, sebagai contoh: Singapura mempunyai sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dan infrastruktur yang telah berkembang; Johor mempunyai tanah luas dan tenaga kerja semi terampil; dan Riau mempunyai tanah luas dan

buruh murah. Namun demikian komplementaritas juga mengandung kompetisi bebas. Dalam hal ini Pemerintah masing-masing negara berperan sebagai fasilitator. Meski dibangun atas dasar enlightened self interest yang bertitik tolak dari pengakuan adanya kepentingan bersama, namun pada tahap selanjutnya akan sangat bergantung pada daya tarik kawasan yang akan dijadikan sasaran para investor swasta untuk menanamkan modalnya. Daya tarik kawasan ini tidak semata-mata dilihat dari potensi sumberdaya alam manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, serta sistem perdagangan yang diberlakukan.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia tidak lepas dari perekonomian global. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki secara kuantitas sangat besar, namun secara kualitas belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Untuk itu diperlukan upaya menjalin sistem perdagangan yang lebih terbuka yang akhirnya dapat mendorong efisiensi kegiatan ekonomi dan kompetisi produk-produk yang dihasilkan. Tujuan kerjasama antarnegara ini antara lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mempercepat upaya pemerataan di kawasan sub regional melalui upaya-upaya seperti:

- Memberikan kemudahan untuk mengadakan investasi langsung;
- Mempertinggi nilai kompetitif (internasional) produk ekspor;
- Menekan biaya transportasi dan transaksi;
- Mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga mencapai nilai ekonomis.

Kawasan Duri-Dumai-Rupat juga merupakan bagian pengembangan kawasan strategis di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan KESR IMS-GT dan menekankan pengembangan kerjasama pada sektor perdagangan dan industri, pertambangan dan energi, pertanian dan peternakan, pariwisata dan transportasi, serta pendidikan dan pelatihan sebagai wahana untuk transfer teknologi. Kondisi tersebut diatas semakin memperkuat peran dan fungsi strategis kawasan Duri-Dumai-Rupat yang akan menjadi outlet utama di Pulau Sumatera.

2) Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya

Secara geografis Selat Panjang mempunyai keunggulan sebagai daerah lintas antara Riau Pesisir dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Negara Malaysia – Singapura. Sebagai daerah lintas, Selat Panjang merupakan daerah yang sejak dulu menjadi transit bagi masyarakat sekaligus menjadi titik awal pendistribusian barang. Selat Panjang direncanakan dimasa depan sebagai outlet utama dari tiga pulau besar yang mengelilinginya yaitu Pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi itu sendiri.

Selain letak Selat Panjang yang sangat strategis, daerah ini mempunyai berbagai sumber daya alam baik hasil hutan, pertanian, perkebunan dan minyak/gas bumi. Salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah produksi sagu dan hasil turunannya. Daerah Selat panjang dan sekitarnya memiliki karakteristik yang sesuai dengan budidaya tanaman sagu. Secara bertahap, masyarakat dan pemerintah daerah telah berhasil mengembangkan budidaya tanaman sagu serta mendorong terbentuknya industri sagu dan turunannya. Potensi Selat Panjang lainnya adalah minyak dan gas yang terus dikelola oleh BUMN bekerjasama perusahaan swasta lainnya.

Sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kaupaten Kepulauan Meranti, maka Selat Panjang telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga hal ini akan semakin memantapkan posisi Selat Panjang yang semakin menentukan ke depannya.

3) Kawasan Kuala Enok - Pulau Burung

Bila diwilayah Riau bagian utara dan Sumatera Utara bagian selatan terdapat Kota Dumai sebagai pelabuhan hasil-hasil bumi, maka dirasakan sangat perlu untuk mengembangkan daerah Kuala Enok – Pulau Burung sebagai outlet utama hasil bumi bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara. Daerah hinterland Kuala Enok merupakan daerah – daerah yang kaya akan hasil sumberdaya alam seperti perkebunan Kelapa Sawit, kopra, karet, hasil hutan, perikanan, minyak kelapa serta mulai dibukanya penambangan batu bara di daerah hinterland nya. Keberadaan pintu keluar bagi daerah Riau

bagian Selatan dan Jambi bagian utara sudah sangat mendesak karena akan memperpendek waktu dan efisiensi biaya dalam memasarkan hasil bumi di daerah tersebut. Kuala Enok akan didorong untuk menjadi outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara.

Guna mempersiapkan Kuala Enok sebagai outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian Utara, telah tersedia pelabuhan yang sarana dan prasarananya setara dengan pelabuhan internasional serta dukungannya terhadap pembangunan kemaritiman. Disamping itu pembangunan ekonomi bidang kemaritiman pada sub sektor perikanan yang memiliki potensi pada wilayah pesisir dan laut, dengan sebagian besar produksi perikanan merupakan perikanan tangkap laut sebesar 93.279 tonyang terdapat salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk pengembangan kawasan Kuala Enok, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung lainnya. Secara bertahap Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, telah membangun jalan yang langsung menghubungkan Kuala Enok dengan Jalan Lintas Timur (Jalan Nasional) sebagai akses langsung bagi daerah – daerah sekitar untuk masuk ke Kuala Enok.

Sedangkan Pulau Burung merupakan pulau kembaran dari kuala enok yang dipersiapkan sebagai pusat industri untuk pengolahan berbagai hasil bumi daerah hinterland Kuala Enok. Sampai sekarang, industri yang paling menonjol di Pulau Burung adalah pengolahan hasil kelapa dan kelapa sawit. Industri daerah ini telah mampu menghasilkan turunan hasil kelapa dan kelapa sawit, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk nya.

Kedepan diharapkan dengan dukungan kawasan industri yang baik akan memberi nilai tambah bagi sumber daya alam secara keseluruhan bagi hinterland Kuala Enok sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat.

Perencanaan pengembangan kawasan industri Kuala Enok telah dimulai sejak tahun 2010. Milestone pengembangan kawasan industri Kuala Enok tahun 2010 – 2014 meliputi: (1) Feasibility studi kawasan klaster industri berbasis pertanian dan oleokimia di Kuala Enok 2010 oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. (2) Penyusunan dokumen eksisting infrastruktur fisik dan non fisik

serta rancangan umum pengembangan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2011 oleh Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Riau. (3) Identifikasi dan inventarisasi kepemilikan lahan kawasan klaster Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Kuala Enok tahun 2011 oleh Bappeda Provinsi Riau. (4) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. (5) Penyusunan dokumen AMDAL kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (6) Penyusunan business plan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. (7) Penyusunan Perda penetapan kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. (8) Penyusunan Perda badan pengelola kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. (9) Penyusunan blok plan dan animasi kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012. (10) Rencana penyertaan modal pada badan pengelola klaster IHKS Kuala Enok tahun 2013 oleh Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau. (11) Rencana penyusunan dokumen identifikasi dan inventarisasi exsisting teknologi IHKS pada perusahaan dan perguruan tinggi serta lembaga terkait lainnya tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (12) Pembebasan lahan kawasan IHKS Kuala Enok tahun 2014 oleh Badan Pengelola. (13) Master plan pengembangan IHKS Kuala Enok tahun 2014. (14) Pelaksanaan persiapan pembangunan infrastruktur dalam kawasan tahun 2014.

Pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok memerlukan dana yang besar sehingga juga memerlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Namun perlu disadari bahwa memasuki tahun 2014, peta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau telah mengalami perubahan yang cukup drastis. Meski pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok termasuk kedalam isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, namun komitmen pimpinan di Provinsi Riau sudah mulai teralihkan dengan isu-isu strategis lainnya. Disisi lain, semakin terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan kawasan industri yang sudah direncanakan

“ditinjau kembali” berdasarkan skala prioritas. Hingga saat ini, keberadaan IHKS Kuala Enok prioritasnya berada dibawah kawasan IHKS Pelintung dan bahkan dengan kawasan industri Buton.

Peluang terbesar untuk melanjutkan pembangunan IHKS Kuala Enok selain mempunyai potensi sumber daya alam adalah dengan letak yang strategis, dimana pelabuhan Kuala Enok terhubung dengan alur pelayaran internasional (Selat Malaka) dan bisa menampung kapal yang berbobot 25.000 DWT serta adanya rencana pemerintah pembangunan Hight Way dan Rail Way Ke Pelabuhan Kuala Enok. Daya dukung lainnya adalah tersedianya areal pelabuhan seluas 105 Ha dan kawasan industri seluas 5.203,95 Ha yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir. Selain itu pengembangan IHKS Kuala Enok sejalan dengan program strategis nasional (nawacita – 9) dengan agenda prioritas meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.

4) Kawasan Industri Tenayan

Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota provinsi sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau daratan membutuhkan sarana transportasi guna mendukung aktifitas ekonomi di daerahnya. Selain transportasi darat, transportasi air merupakan alat penghubung yang ekonomis. Sampai saat ini Sungai Siak masih dapat menyediakan transportasi air bagi Kota Pekanbaru, namun kedepan dengan meningkatnya lalu lintas di sungai Siak serta semakin tingginya pertumbuhan industri, maka perlu dilakukan relokasi pelabuhan maupun kawasan industri yang selama ini berpusat di Kota Pekanbaru.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mulai merealisasikan pembangunan kawasan industri terpadu yang terletak di daerah Tenayan Raya. Berbagai sarana dan prasarana pendukung telah dan sedang dipercepat pembangunannya dengan menggunakan dana APBD Kota Pekanbaru dan APBD Provinsi Riau. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini, telah terbentuk Kawasan Industri Tenayan yang berada pada lokasi yang strategis dan tertata serta sesuai dengan peruntukan lahannya. Sehingga visi dan

misi Kota Pekanbaru secara bertahap dapat diwujudkan yang sekaligus merupakan implementasi penataan ruang di daerah.

5) Kawasan Industri Tanjung Buton

Sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Siak, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten telah membangun berbagai sarana dan prasarana di kawasan industri Buton. Hal ini amat diperlukan mengingat 2 (dua) industri besar kertas di Provinsi Riau membutuhkan kawasan industri buton sebagai kawasan industri yang juga telah didukung dengan pelabuhan yang memadai. PT. RAPP sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya juga telah membangun jalan dari dan ke pelabuhan Buton guna memudahkan pergerakan produknya. Disamping itu industri kelapa sawit yang tumbuh dengan pesat di daerah Riau bagian tengah juga memerlukan outlet untuk memasarkan produknya, dalam hal ini Pelabuhan Buton akan menjadi kunci transportasi hasil – hasil daerah Riau untuk diekspor ke luar negeri atau dikirim ke provinsi lain.

6) Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Suatu pusat keunggulan (*Center of Excellence*) yang merupakan kawasan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kawasan industri terpadu. Kawasan ekonomi baru yang di kembangkan berdasarkan keunggulan komparatif sumberdaya ekonomi di Pelalawan dan Provinsi Riau ini terdiri dari 3 pilar utama: yakni industri Hilir produk unggulan, perguruan tinggi dan pusat riset/pusat inovasi yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan mempunyai tujuan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar komunitas akademik, bisnis, pemerintah (ABG) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*).

Dalam rangka mewujudkan berdiri dan beroperasinya Kawasan Teknopolitan Pelalawan, Pemerintah Daerah Pelalawan secara intensif menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut mencakup: (1) Perjanjian Kerjasama ini untuk menyusun Draft Master Plan Pengembangan Teknopolitan dalam rangka Program Penguatan Sistem

Inovasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau; (2) Perjanjian kerja sama untuk melakukan review kebijakan spasial dan sinkronasi rencana tindak dan program Masterplan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau; (3) Perjanjian Kerjasama melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi untuk pengembangan Inovasi Hijau Dalam Rangka Program Penguatan sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan provinsi Riau; (4) Mengembangkan Klaster Industri Integrasi Sapi-Sawit dalam bentuk Pilot Project untuk mendukung program penguatan sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau; (5) Perjanjian Kerjasama untuk melakukan Pendampingan proses pelimpahan kewenangan perjanjian dari SKPD/OPD dan peningkatan kualitas sistem perijinan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau; (6) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Kedua Belah Pihak dalam Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Pelalawan sebagai wahana menunjang pelaksanaan penumbuhkembangan wirausaha-wirausaha baru dan perusahaan baru berbasis teknologi di kabupaten pelalawan; (7) Melakukan review/evaluasi terhadap Penerapan Teknologi di Kabupaten Pelalawan; (8) Mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian dan penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

7) Kawasan Pengembangan Pulau Rupert

Pengembangan kawasan Pulau Rupert sudah termasuk dalam rencanapengembangan Kawasan Nasional pada saat ini memasukitahap penyusunan identifikasi dan skenario (*Pra Grand Design*) pengembangan kawasan pulau Rupert. Untuk penyusunan identifikasi dan skenario pengembangan kawasan pulau Rupert dapat membantu pemerintah Daerah dalam mewujudkan penataan ruang kawasan Pulau Rupert sebagai dasar acuan untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur dikawasan pulau Rupert. Pengembangan kawasan Pulau Rupert nantinya akan menjadi stimulan bagi pengembangan kawasan dan pengembangan fasilitas pelayanan daerah sekitar Pulau Rupert, Nasional dan Internasional. Pulau Rupert

adalah sebuah pulau di Kabupaten Bengkalis, Pulau ini memiliki luas lebih kurang 1.500 Km² dan dihuni sekitar 47.000 jiwa penduduk. Pulau rupa memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangan perekonomian dengan menerapkan kawasan cepat tumbuh pada kawasan kodidor ekonomi regional dan infrastruktur dengan membuka daerah terisolasi dengan mempromosikan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan diwilayah daratan, pesisir dan kepulauan Rupa. Selain itu pulau rupa bisa dilakukan pengembangan sistem transportasi antar moda untuk merangkai dan meningkatkan aksesibilitas wilayah daratan dan kepulauan dengan rencana pembangunan jalan lingkar pulau Rupa dengan fungsi jalan lokal primer.

Pulau Rupa terdiri dari 2 kecamatan yaitu Rupa dan Rupa Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pulau ini juga memiliki posisi yang sangat strategis, karena langsung berhadapan dengan perairan internasional yang sangat ramai, yaitu Selat Malaka. Pulau Rupa memiliki nilai jual yang sangat eksotis, karena kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka bisa langsung merapat ke pulau yang memiliki pasir putih terpanjang di indonesia ini. Pantai pasir putihnya membentang sepanjang ± 17 Km mulai dari Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak (Rupa Utara) sampai sungai Cingam (Rupa). Pantai yang lebarnya ± 30 meter jika air surut atau sekitar ±7 meter saat air pasang ini memiliki keindahan yang tidak kalah penting dengan pantai-pantai di pulau Bali.

Kegiatan bertaraf internasional yang pernah dilaksanakan di Pulau ini adalah berenang menyebrangi Selat Malaka non-stop mulai dari Pantai Pasir Panjang menuju Portdickson (Malaysia).Aktivitas wisata yang dapat dilakukan para wisatawan yang berkunjung adalah: berjemur (sun burning), selancar (surfing), selam (scuba diving), memancing (fishing), dan berenang (swimming).

Pengembangan pulau Rupa sebagai tujuan wisata, bukan saja menjadi program pembangunan di Kabupaten Bengkalis, tetapi juga di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan strategis pembangunan Bengkalis maupun Riau. Karena itu berbagai fasilitas pengembangannya sudah dibangun, baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau, seperti akses jalan, dermaga pelabuhan

ferry penyeberangan. Selain sebagai kawasan wisata unggulan, Rupat bersama Dumai dan Duri direncang menjadi salah satu kawasan segitiga andalan untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau.

Sebagai kawasan terluar Indonesia, pembangunan Pulau Rupat juga menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Republik Indonesia, yakni dicanangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Pulau Rupat. Dalam pembangunan sektor kepariwisataan Indonesia, pulau Rupat juga akan dijadikan kawasan wisatanasional.

8) Kawasan Strategis Budaya Istana Siak Sri Indrapura

Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan melayu terbesar di provinsi Riau dengan wilayah terbentang dari kuala kampar sampai perbatasan Sumatera Utara. Kerajaan Siak awalnya merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Johor. Sebagai bentuk eksistensi dan kebesaran Kerajaan Siak Sri Indrapura dimasa lalu maka sampai sekarang masih dijumpai Istana Siak Masjid Kerajaan, Makam Koto Tinggi, dan Balai Karapatan Tinggi. Peninggalan kerajaan ini mengandung nilai social dan budaya yang tinggi yang perlu dilestarikan dan diposisikan sebagai penghargaan atas eksistensinya dimasa. Dengan demikian eksistensi Istana Siak dan sekitarnya amat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya melayu serantau, sehingga diharapkan nilai – nilai budaya yang tinggi ini tidak hilang dan dapat dilestarikan serta diwariskan ke generasi – generasi mendatang.

Kawasan Istana Siak diwarnai oleh kekayaan potensi yang beragam yaitu mulai dari abad kejayaan Kerajaan Siak Indrapura sampai dengan budaya peninggalannya beserta alam atau panorama yang sangat indah. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan melayu terbesar di provinsi Riau dengan wilayah terbentang dari kuala kampar sampai perbatasan Sumatera Utara. Kerajaan Siak awalnya merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Johor. Sebagai bentuk eksistensi dan kebesaran Kerajaan Siak Sri Indrapura dimasa lalu maka sampai sekarang masih dijumpai Istana Siak Masjid Kerajaan, Makam Koto Tinggi, dan Balai Karapatan Tinggi. Peninggalan kerajaan ini mengandung nilai social dan budaya yang tinggi yang perlu dilestarikan dan diposisikan sebagai penghargaan atas eksistensinya dimasa lalu dan menjadi motivasi bagi generasi mendatang.

Dengan demikian eksistensi Istana Siak dan sekitarnya amat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya melayu serantau, sehingga diharapkan nilai – nilai budaya yang tinggi ini tidak hilang dan dapat dilestarikan serta diwariskan ke generasi – generasi mendatang.

9) Kawasan Candi Muara Takus dan Sekitarnya

Candi Muara Takus merupakan salah satu peninggalan candi tertua di Pulau Sumatera yang diduga sempat menjadi pusat kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan demikian amat penting untuk melestarikan candi muara takus pelestarian nilai-nilai budaya masa pra Islam provinsi Riau. Kawasan ini juga penting bagi penelitian kondisi masa silam di Provinsi Riau. Penetapan kawasan candi Muara Takus sebagai kawasan strategis dapat disinergiskan dan dikolaborasikan dengan kawasan PLTA Koto Panjang akan dapat meningkatkan daya tarik wisata Candi Muara Takus.

10) Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang

Danau PLTA Koto Panjang merupakan pembangkit listrik tenaga air yang selama ini mensuplai kebutuhan energi untuk daerah Riau – Sumbar. Posisi Danau PLTA Koto Panjang terbentang di sepanjang perbatasan Sumbar – Riau yang dilintasi Jalan Nasional. Disamping sebagai sumber energy, Danau PLTA Koto Panjang juga berfungsi sebagai penyangga dan pengendali hidroorologis wilayah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah rawan bencana terutama bencana longsor serta banjir pada bagian hilir Danau PLTA Koto Panjang. Danau PLTA yang mempunyai debit yang besar, juga potensial menjadi sumber air baku serta untuk keperluan pengairan/irigasi untuk mendukung sector pertanian di daerah hiterlandnya. Danau PLTA Koto Panjang juga menyimpan potensi wisata yang besar, keindahan danau tersebut membutuhkan sentuhan professional sehingga dapat diciptakan objek wisata unggulan dimas mendatang.

Mengingat vitalnya fungsi Danau PLTA Koto Panjang maka perlu langkah – langkah mendesak untuk perlindungan dan pelestraian kawasan ini guna tetap menjaga kesinambungan suplai energy sekaligus pelestarian kawasan Danau PLTA Koto Panjang.

Dengan demikian kawasan strategis yang dikembangkan untuk Provinsi Riau adalah:

1. Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Betabuh
2. Hutan Lindung (HL) Mahato
3. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT)
4. Pulau-pulau Kecil Terluar
5. Kawasan Strategis Duri – Dumai – Rupat
6. Selat Panjang dan sekitarnya
7. Kuala Enok - Pulau Burung
8. Kawasan Industri Tenayan
9. Kawasan Industri Tanjung Buton
10. Kawasan Kemaritiman
11. Kawasan Teknopolitan Pelalawan
12. Kawasan Pembangunan Pulau Rupat
13. Kawasan Strategis Pekansikawan
14. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya
15. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya
16. Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang

6.3.2 Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN

Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Pekanbaru, Siak, dan Kampar (PEKAN SIKAWAN), empat Kepala Daerah telah melakukan serangkaian pertemuan yang bermuara pada terbentuknya forum kerjasama antara daerah perkotaan PEKAN SIKAWAN yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, menunjang keserasian pembangunan, penyelesaian konflik daerah perbatasan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergisitas dan saling menguntungkan. Kemudian tujuan tersebut diprioritaskan pada rencana program kerjasama, antara lain: (1) tata batas administrasi wilayah; (2) pembangunan infrastruktur; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) pariwisata; (6) perhubungan/transportasi; dan (7) lingkungan hidup.

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan) telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dengan Dinas Pehubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dengan Dinas Perhubungan Dan Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kampar Dengan Dinas Perhubungan Dan Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Siak Dengan Dinas Perhubungan Dan Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Pelalawan. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK serta untuk mewujudkan Transportasi Perkotaan yang handal.

6.3.3 Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1) Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Betabuh

Hutan Lindung Bukit Betabuh dengan luas ± 94.292 . Ha, memegang peranan kunci sebagai pengendali hidrologis wilayah dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air DAS Indragiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa daerah perbatasan Riau dan Sumbar merupakan daerah rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Perubahan ekosistem daerah tersebut akan langsung berdampak terhadap semakin besarnya peluang terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor. Padahal pada daerah ini terbentang jalan nasional lintas Sumatera Bagian Tengah yang merupakan salah satu urat nadi pergerakan barang dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Terhambatnya lalu lintas pada daerah ini akan berpengaruh besar terhadap pergerakan barang dan jasa serta pergerakan ekonomi wilayah sekitar. Dengan posisi dan peran seperti ini, telah menempatkan Hutan Lindung Bukit Betabuh memiliki fungsi strategis dalam memelihara dan menjaga kestabilan ekosistem daerah perbatasan Sumbar – Riau.

2) Hutan Lindung (HL) Mahato

HL Mahato seluas ± 28.000 Ha merupakan salah satu kawasan strategis nasional terletak di Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hulu) dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Hutan lindung Mahato merupakan hulu anak –anak sungai dari DAS Rokan yang mengalir dari Provinsi Sumatera Barat melewati Kabupaten Rokan Hulu

dan bermuara di Kabupaten Rokan Hilir. Sungai Rokan ini merupakan salah satu Sungai Strategis Nasional yang terdapat di Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan ini, keberadaan HL Mahato perlu menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga kelestariannya sehingga tetap mampu berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

3) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT)

Taman Nasional Butkit Tiga Puluh membentang dipunggug gugusan Bukit Barisan dan terletak di perbatasan Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang berada di wilayah Provinsi Riau seluas 111.453 Ha dan terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

TNBT sebagai kawasan pelestarian alam, juga menjadi sumber mata air bagi DAS Indragiri dan DAS Batang Hari. Berbagai potensi wisata juga terdapat di kawasan ini diantaranya air terjun yang cukup indah, masyarakat asli yaitu Talang Mamak di Provinsi Riau dan Kubu di Provinsi Jambi juga keindahan eksotis TNBT yang didominasi hutan hujan tropis yang masih cukup terjaga keasliannya.

4) Pulau-pulau Kecil Terluar

Provinsi Riau memiliki beberapa pulau – pulau kecil dan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional adalah Batu Mandi (Kepulauan Arwah) di Kabupaten Rokan Hilir. Kepulauan ini merupakan garis terdepan wilayah Indonesia yang mempunyai peran sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang berfungsi sebagai perairan internasional. Kepulauan ini berperan sebagai gugusan terdepan pertahanan dan keamanan Negara dan sekaligus merupakan bukti kedaulatan yang harus tetap dijaga dan dipertahankan. Disamping fungsi pertahanan, Pulau Batu Mandi juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti perikanan, habitat pelestarian penyu serta memiliki keindahan alam yang sangat potensial dikembangkan.

6.3.4 Kawasan Strategis Nasional untuk Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Nasional untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau melalui :

- 1) Pengembangan terminal regional yang berfungsi koleksi dan distribusi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama,
- 2) Mendorong akselerasi pengembangan kawasan industri dan pusat-pusat aglomerasi industri di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok
- 3) Membangun dan memantapkan keterkaitan (integrasi) pengembangan kluster-kluster ekonomi berbasis masyarakat, khususnya komoditas karet, kelapa, sagu, perikanan dan kelapa sawit dengan kawasan industri
- 4) Mendorong pembangunan jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan pengembangan Pelabuhan Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama Provinsi Riau yang terintegrasi dengan jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya,
- 5) Mendorong percepatan koordinasi dan implementasi pembangunan jaringan kereta api regional sebagai bagian Trans Sumatera Railway yang terintegrasi dengan jaringan terminal antar moda transportasi lainnya,
- 6) Mendorong terbangunnya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan terbangunnya struktur kepelabuhan secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dan moda transportasi lainnya,
- 7) Mendorong percepatan pembangunan pembangkit energi listrik milik daerah untuk memenuhi kecukupan elektrifikasi masyarakat dan kebutuhan industri,
- 8) Mendorong terbangunnya pembangkit listrik dari sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi daerah,
- 9) Mendorong pembangunan Pembangunan Waduk untuk Pembangkit Listrik Lompatan Harimau (Rokan Kiri) dan

Pengembangan Bandara SSK II di Pekanbaru serta Bandara Pinang Kampai di Dumai.

- 10) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui SPAM Regional.
- 11) Mendorong Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi, Pembangunan Jalan Tol Jambi – Rengat, Pembangunan Jalan Tol Rengat – Pekanbaru dan Pembangunan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat sebagai bagian dari Trans Sumatera.
- 12) Mendorong pembangunan kilang minyak dengan melakukan upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP).

6.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

Guna mendukung agenda pencapaian nasional yang tertuang dalam Nawacita, maka prioritas pembangunan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
- 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- 4) Peningkatan dan penerapan nilai budaya melayu dan agama
- 5) Peningkatan iklim usaha, investasi dan daya saing sektor perekonomian
- 6) Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut
- 7) Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup
- 8) Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Sinergitas Pembangunan Antara Pemerintah dan Swasta
- 9) Penurunan Kemiskinan

Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi:

- 1) Penguatan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana, hal ini mendukung agenda pembangunan nasional bidang infrastruktur yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan serta penerapan nilai budaya melayudalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pada dimensi pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Mental/Karakter) dan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melakukan revolusi karakter bangsa.
- 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan penyelarasan agenda pembangunan nasional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 4) Peningkatan iklim usaha, investasi dan daya saing perekonomian dan penurunan kemiskinan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- 5) Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup merupakan Prioritas Utama Daerah yang tidak termasuk kedalam agenda Nasional. Didukung dengan program pembangunan dan total anggaran prioritas.

6.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Rumusan kebijakan umum, melalui strategi untuk menghasilkan berbagai program yang efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang

konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, perlu didukung oleh indikator capaian kinerja masing-masing program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Untuk mencapai target kinerja program pembangunan, perlu dilakukan perubahan indikator kinerja capaian yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan secara terukur yang dapat dilihat pada table 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Riau

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL- UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
				2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur																	
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur																	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	72.59	83.01	84.00	89.16	91.65	93.84	93.84								
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Tersedianya prasarana air minum di 12 Kab/Kota	12	-	-	-	-								Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Pertanahan	
			Panjang jaringan air minum mendukung penyehatan PDAM (Km)	-			18	105,200.00	18	22,000.00	19	22,000.00	55	149,200.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD			
			Panjang jalan dalam kondisi baik	931.10	1,151.04	1,330.97	1,486.68	1,615.08	1,615.08	1,665.93	1,665.93	1,665.93	1,665.93					
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (km)	931.10	129.00	2,138,109.52	152.00	947,082.28	1,486.68	1,113,650.00	1,615.08	529,359.68	1,665.93	541,808.23	1,665.93	5,270,009.7	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jembatan provinsi Dalam Kondisi baik (unit)	-			28			28	28	28	28	28	28	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
			panjang Jembatan provinsi Dalam Kondisi baik (meter)	8,852	-	-	1,065	35,707.09						1,065	35,707.09	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama		
			Jum lah desa yang rendah aksesibilitas	71	-	-	9	8,034.10						9	8,034.10	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama		
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi yang di Pelihara (km)	390	284,532	317,732.77	283,566	327,344.74	903.2	263,650.00	2,217	78,900.67	2,417	78,900.67	2,417.00	1,066,529	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jembatan Provinsi yang dipelihara (unit)	600	26,492	-	26,492	13,390.16	600		600	600	600	-	1,800	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru		
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen)	12	12	2,415.52	12	5,737.68	12	2,500.00				12		Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi yang di Pelihara (km)	390	284,532	317,732.77	283,566	327,344.74	903.2	263,650.00	2,217	78,900.67	2,417	78,900.67	2,417.00	1,066,529	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jembatan Provinsi yang dipelihara (unit)	600	-	-	26,492	13,390.16	600		600	600	600	-	1,800	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama & Baru		
		Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan	n/a	994	4,059.04								994	4,059.04	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perhubungan	
			Persentase fasilitas perlengkapan keselamatan yang terpasang	-			10.73	13,216.44	16.50	7,711.00	46.94	7,711.00	46.94	28,638.44	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD			
			Rasio elektrifikasi	85.19	78.62	80.99	82.33	85.83	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33			
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms)	2,787	1,581	54,225.28	10	5,618.38						1,591	59,843.66	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
			Jumlah lokasi yang memperoleh manfaat pembangunan sarana ketenagalistrikan (lokasi)	-				5	19,484.80	5	37,263.15	5	37,263.15	15	94,011.10	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit)	N/A	-	-	1,583	27,155.24						1,583	27,155.24	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
			Jumlah pembangkit isolated yang menggunakan EBT	-				120 SHS, 1 PLTS Terpusat, 1 PLTMH	13,708.00	55 Unit ; 12 Unit Biogas; 578 Unit	19,527.51	55 Unit ; 12 Unit Biogas; 578 Unit	19,527.51	55 Unit ; 12 Unit Biogas; 578 Unit	52,763.02	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sektor energi baru terbarukan (EBT) (Dokumen)	-						2		2		2		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
				2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan																	
	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan																	
		Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8.47	8.49	8.56		8.61		8.67		8.72		8.72				
			Angka harapan lama sekolah	12.45	12.74	12.86		13.19		13.43		13.66		13.66				
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APK SD/MI/SDLB/Paket A	115.21	116.063	41,632.18	116.86	12,631.32	115.80%	109,419.30	116.20%	31,252.03	116.80%	18,126.18	116.80%	213,061.01	Indikator dan Capaian Kinerja Lama dan Perubahan RPJMD	Dinas Pendidikan
			APM SD/MI/SDLB/Paket A	97.71	98.25		98.78		95.09%		95.73%		96.37%		96.37%			
			APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	106.18	106.72		107.25		107.50%		108.10%		109.10%		109.10%			
			APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	95.90	96.6		97.2		90.67%		95.73%		97.50%		97.50%			
			APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	89.00	89.73		90.46		76.51%		79.80%		82.44%		82.44%			
			APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	70.28	71.29		72.3		63.28%		68.10%		73.26%		73.26%			
		Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	79.36	79.84	186,801.56	80.34	276,803.42	76.51	373,463.93	79.80	373,351.50	82.44	298,681.20	82.44	1,509,101.61	Indikator dan Capaian Kinerja Lama dan Perubahan RPJMD	Dinas Pendidikan
			APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	71.57	72.26		72.94		63.28		68.10		73.26		73.26		Indikator dan Capaian Kinerja Lama dan Perubahan RPJMD	
			APS SMA/MA/SMK/SMALB (16- 18 Tahun)	46.27	48.35		50.53										Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
			Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK/SMALB	15.92	18.3		21.05										Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
			Rasio murid terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	35.92	35.95		35.99										Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
			Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	2.33	2.1		1.89										Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik	2	2	10,966.81		105,527.23							2	116,494.04	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pendidikan
			SD/MI	-	-													
			SMP/MTs	-	-													
			SMA/MA/SMK	-	-													
			Persentase Sekolah yang Terakreditasi														Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
			SD/MI	84.00					83.00	237,251.91	84.00	83,667.54	85.00	48,527.18	85.00	369,446.63		
			SMP/MTs	70.60					69.60		70.60		71.60		71.60			
			SMA/MA	81.30					80.30		81.30		82.30		82.30			
			SMK	50.80					49.80		50.80		51.80		51.80			
			APK Perguruan Tinggi	34.18					30.00		34.18		38.36		38.36			
			Persentase Kegiatan pusat dan Daerah yang terfasilitasi (%)	100.00					100.00		100.00		100.00		100.00			
3	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan																	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan																	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70.76	70.93		70.97		71.20		71.33		71.47		71.47			
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	60	65	7,816.34	70	18,536.88						70.00	26,353.23	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan	
			Persentase Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah	-					70.00	1,551.66	75.00	1,680.46	80.00	1,680.46	80.00	4,912.58	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (%)	14	30	2,910.46	40	8,216.39								11,126.85	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)	-					40	3,847.90	50	6,911.31	65	4,264.37	65.00	15,023.58	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBELUM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA		
								2015		2016		2017		2018		2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						Persentase RS yang menerapkan PKRS (Promosi Kesehatan di RS)	-					30		40		50		50.00		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat	-					67	828.95	83	1,050.51	95	594.83	95.00	2,474.29	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakit Jiwa Tamparan
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita (%)	1.60	1.50	1,814.54	1.40	7,483.51	1.30	1,876.79	1.20	1,361.31	1.20	1,361.31	1.20	13,897.45	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Kesehatan
					Program Keluarga Berencana	Meningkatkannya partisipasi program keluarga berencana. Rasio Akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur (orang)	11,356	3,360	1,321.77	3,870	1,708.30							7,230	3,030.07	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Akseptor KB aktif (orang)	-					1,740	782.60	3,870	1,270.00	4,170	867.30	9,780	2,919.90	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Persentase peningkatan kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana (%)	6	5	6,989.05	10	2,449.00							10	9,438.05	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah
						Jumlah rekomendasi peningkatan kesehatan perempuan dan keluarga berencana (Dokumen)	-					10	4,092.00	12	614.15	12	614.15	34	5,320.30	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per 100.000 penduduk	9	10	-	10.5	11,098.21							10.5	11,098.21	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan (Tenaga Kesling, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Analis Kesehatan)	-					87	13,889.69	90	8,193.44	95	8,193.44	95	30,276.57	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Persentase RSU Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	-					90		90		95		95			
					Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Persentase jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi menjadi kader penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV/AIDS (%)	80	80	289.86	80	267.76							80	557.62	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Persentase pemuda yang dibina menjadi kader penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV/AIDS	-					85	150.00	90	150.00	95	150.00	95	450.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta (%)	65	70	132,367.79	75	4,855.64							75	137,223.43	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	-					35.00	9,443.24	38.00	11,532.33	40.00	11,532.33	40	32,507.89	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Arifin Achmad, Rumah Sakit Petala Bumi, dan
						Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk	-					0.83 per 1000 penduduk		0.85 per 1000 penduduk		0.90 per 1000 penduduk		0.90 per 1000 penduduk	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
						Jumlah Cakupan Kunjungan pelayanan Kesehatan	-					27,990	3,369.71	30,789	2,343.12	33,868	2,343.12	92,647	8,055.95		Rumah Sakit Jiwa Tamparan
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan terhadap tenaga medis/paramedis yang teregistrasi dan terakreditasi (%)	60	65	10,476.55	70	2,685.49							70	13,162.05	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi (%)	-					50	300.00	75	280.51	80	280.51	80	861.02	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kesehatan
						Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas Terakreditasi (%)	-					20		40		60		60		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kesehatan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
							KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
						Persentase Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	-					100	250.00	100	748.90	100	258.90		1,257.80		Rumah Sakit Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tamparan
							-					75	580.15	75	283.00	100	283.00		1,146.15		Rumah Sakit Petala Bumi
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan Jenis Pelayanan (%)	65	70	184,114.60	75	59,008.63									Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit	-					80	281,059.08	83	312,897.42	85	312,897.42	85	906,853.93	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tamparan dan Rumah Sakit Petala Bumi
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesebatan masyarakat rujukan yang dipelihara (%)	50	65	8,043.45	80	26,423.94						80			Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	-					95	76,864.58	95	70,236.87	95	70,236.87	95	217,338.32	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakit Arifin Achmad, Rumah Sakit Petala Bumi
						Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	-					94	1,253.85	95	1,291.12	96	1,291.12	96	3,836.09	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakit Jiwa Tamparan
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan, bayi dan anak (per 100,000)	Kematian Ibu : 116, Kematian Bayi : 24, Kematian Anak : 28	Kematian Ibu : 113, Kematian Bayi : 24, Kematian Anak : 28	3,266.22	Kematian Ibu : 110, Kematian Bayi : 23, Kematian Anak : 27	10,569.58						Kematian Ibu : 110, Kematian Bayi : 23, Kematian Anak : 27	13,835.80	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan	
						Angka kematian ibu melahirkan (per 100,000) diukur dengan Proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%)	-					Fasyankes : 72 % K4 : 74 %	3,234.26	Fasyankes : 74 % K4 : 76 %	2,237.93	Fasyankes : 77 % K4 : 78 %	2,237.93	Fasyankes : 77 % K4 : 78 %	7,710.12	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Angka kematian bayi dan anak (per 1,000) diukur dengan Proksi : Kunjungan Neonatal Pertama(KN 1)	-					KN 1: 89%		KN 1: 90%		KN 1: 91%		KN 1: 91%		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan (%)	90	92	-	94	8,455.81	96	15,504.43	97	14,917.22	98	14,917.22	98	53,794.62	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Kesehatan
					Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan	Persentase pemeriksaan laboratorium Klinis dan lingkungan yang dilayani telah terakreditasi (ISO) (%)	Lab Klinis : 24,29	Lab Klinis : 24,29	-	Lab Klinis : 24,29	9,015.05	Lab Klinis: 45	6,250.00	Lab Klinis: 60	6,843.04	Lab Klinis: 70	6,843.04	Lab Klinis: 70	28,951.12		Dinas Kesehatan
							Lab Lingk : 44,90	Lab Lingk : 44,90	-	Lab Lingk : 44,90		Lab Lingk : 100		Lab Lingk: 100		Lab Lingk: 100		Lab Lingk: 100			
					Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang sakit mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	-	100	126,834.16							100	126,834.16	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase Masyarakat Miskin dan tak mampu mempunyai jaminan kesehatan melalui JKN	-					65	21,547.76	70	88,294.62	75	88,294.62	75	198,137.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penyakit menular, diantaranya DBD, malaria, dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi DBD: 52/100.000 Penduduk	< 39	< 37	4,670.77	< 37	18,496.76							< 37	23,167.53	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Malaria: 0,3/1000 Penduduk	0	0.2		0.18								0.18		Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
						HIV/AIDS : 2.9 Dari penduduk beresiko tinggi	2	1.5		1								1		Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA		
								2015		2016		2017		2018		2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						1. Angka kesakitan Penyakit menular Demam Berdarah (DBD)	-					DBD: 48 per 100.000	8,232.48	DBD: 47 per 100.000	8,137.10	DBD: 46 per 100.000	8,137.10	DBD: 46 per 100.000	24,506.68	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						2. Angka kesakitan Penyakit menular Malaria	-					Malaria: 0,15 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						3. Persentase ODHA yang pernah mengakses layanan ARV (%)	-					85		87		90		90		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						4. Case Notification Rate (CNR) semua kasus TB per 100.000 penduduk	-					102 per 100.000 penduduk		107 per 100.000 penduduk		112 per 100.000 penduduk		112 per 100.000 penduduk		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						5. Persentase Bayi Usia < 1 Tahun yang mendapatkan imunisasi dasar (lengkap %)	-					92		93		93		93		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						6. Persentase UCI (Universal Child Immunization)	-					88		90		92		92		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase Prosentase Krisis kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 Jam (%)	100	-	-	100	3,012.67	100	1,378.05	100	479.30	100	479.30	100	5,349.32	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Kesehatan
						Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat	-					65		65		68		68		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Kemitraan peningkatn pelayanan kesehatan	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat (%)	1	80	15,287.60	90	692.35							90		Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan
						Persentase kemandirian layanan unggulan	-					67	4,346.27	67	2,368.93	-	-	67	6,715.20	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakti Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan padal BLUD RS sesuai standar Pelayanan Minimal (%)	60	70	143,763.21	80	177,163.58							80	320,926.79	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan
						Indeks kepuasan masyarakat	-					75	221,149.95	83	230,000.00	82	230,000.00	82	681,149.95	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakit Arifin Achmad
						Indeks kepuasan masyarakat	-					82	32,988.21	83	17,940.54	84	17,940.54	84	68,869.28	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Rumah Sakit Jiwa Tampan
						Indeks kepuasan masyarakat	-					80	12,000.00	81	13,000.00	82	13,000.00	82	38,000.00		Rumah Sakit Petala Bumi
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (jumlah perda & kab/kota)	225 Org	1 & 4	241.55	1 & 2	454.42							2 & 6	695.98		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang disosialisasikan (Kab/Kota)	-					2	155.00	-	-	-	-	2	155.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan dan Anak yang terlindungi (kasus/ orang)	0 org	100/175	676.35	100/275	826.23							100/275	1,502.57	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak
						Jumlah kasus yang ditangani	-					100	540.00	134	1,000.00	140	1,000.00	374	2,540.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Meningkatnya Pelayanan Akseptor KB baru Khususnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (akseptor)	600	110	193.24	230	289.18							340	482.42	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah akseptor KB baru dengan MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (Orang)	-					100	303.80	-	-	-	-	100	303.80	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (%)	40	50	-	55	2,589.61	60	1,050.20	70	886.33	80	886.33	80	5,412.47	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasyankes yang melaksanakan deteksi dan Tata Laksana dini faktor resiko penyakit tidak menular	-													Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Perubahan	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA
				2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	Menurunkan Kemiskinan																
	Menurunkan Kemiskinan																
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	7.99	8.82		7.67		6.65		6.35		6.20		6.20			
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang)	1,595	1526	2,765.77	1,991	6,720.74							3,517	9,486.51	Indikator dan capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Sosial
		Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-					1,500	5,661.00	1,500	3,427.06	1,500	3,427.06	4,500	12,515.11	Indikator dan capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan (%)	100	100	188.43	100	535.52							100	723.95	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampuan
		Persentase terlayannya pasien miskin yang datang ke RS	-					100	284.54	100	1,214.54	100	1,214.54	100	2,713.61	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Terselenggarakannya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial (orang)	5,020	2,605	4,565.34	2,640	4,551.90							5,245	9,117.24	Indikator dan Capaian kinerja RPJMD Lama	Dinas Sosial
		Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial	-					2,725	3,149.02	2,725	3,069.34	2,760	3,069.34	8,210	9,287.70	Indikator dan Capaian kinerja Perubahan RPJMD	
	Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Meningkatnya Pelayanan Sosial di Panti (orang)	425	220	7,149.95	225	9,562.80							445	16,712.75	Indikator dan Capaian kinerja RPJMD Lama	Dinas Sosial
		Jumlah PMKS yang dilayani melalui Panti	-					225	7,391.00	225	5,831.87	230	5,831.87	680	19,054.74	Indikator dan Capaian kinerja Perubahan RPJMD	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil PMKS lainnya (KK) Pembinaan Pendamping, Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (orang) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (unit)	0/2097/1	649/2458/1	4,749.11	649/2628/2	7,924.12							649/2628/2	12,673.23	Indikator dan capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Sosial,
		Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial	-					20	750.00	20	266.98	20	266.98	20	1,283.95	Indikator dan capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah
		Jumlah PMKS yang diberdayakan dan jumlah masyarakat miskin (KK) yang dibantu (jumlah PMKS/Dokumen)	-					154/2	920.00	154/2	1,759.70	154/2	1,759.70	154/2	4,439.40	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas Penyelenggara kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	1,424	1,380	3,661.93	1,470	4,291.79							2,850	7,953.72	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Sosial
		Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS serta Pendamping yang diberdayakan						1,520	1,827.00	1,268	5,238.13	1,290	5,238.13	4,078	12,303.25	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
		Gini Rasio	0.38	0.37		0.35		0.35		0.35		0.34		0.34			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (%)	8	3	5,718.41	3	8,078.73							3	13,797.14	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	-					0.1	2,659.96	0.1	2,900.00	0.1	2,947.86	0	8,507.82	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan lembaga ekonomi desa	5	3	426.10	3	779,677.57							3	780,103.67	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK)	-					BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	747.33	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	1,280.00	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	828.22	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	2,855.55	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
						KONDISI AWAL/SEBELUM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
				Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	12	12	3,831.19	12	4,398.89						12	8,230.08	Indikaor dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah Provinsi	
					Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	-				12	1,100.00	12	175.25	12	175.25	36	1,450.51	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dibangun (Unit)	105	25	869.59	80	24,971.73	15	4,178.40	780	855.52	15	855.52	915	31,730.76	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Kepala Keluarga yang diberdayakan dalam Kelompok Ekonomi Masyarakat (KK)	1,251	678	869.59	758	3,570.71	765	3,682.25	780	2,665.2	795	2,665.2	3,776	13,452.94	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Tingkat pengangguran terbuka (%)	6.56	7.83		7.43		6.85		6.68		6.60		6.60			
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Terlaksananya Koordinasi dan rekomendasi Pemerintah dan swasta dalam pengembangan bidang perekonomian (%)	40	100	1,761.40	100	1,512.20						100	3,273.59	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah	
					Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan	-				1,717	450.00	1,720	381.48	1,725	381.48	1,725	1,212.96	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan KUMKM (Rekomendasi dan Kebijakan)	-				1	210.00	1	293.22	-	-	2	503.22	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah	
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang menjadi pelopor dan penggerak pembangunan yang berkarakter mandiri dan berwawasan kebangsaan	160	205	4,903.51	210	6,120.20						415	11,023.71	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Jumlah Pemuda yang ditingkatkkan perannya dalam penggerak pembangunan (orang)	-				217	4,300.00	217	7,650.00	217	4,765.41	651	16,715.41			
				Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	jumlah pemuda yang dibina berhasil menjadi wirausaha (%)	1	75	289.86	75	535.52						75	825.38	Indikaor dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Persentase Pemuda yang dibina berhasil menjadi wirausaha (%)	-				80	600.00	90	1,950.00	95	664.94	95	3,214.94	Indikaor dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Berkualitas	2,048	2,216	6,951.87	2,196	14,825.83	2,628	13,727.50	2,650	9,639.40	2,900	9,639.40	12,590	54,784.01	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,30	63,70	632.87	64,35	2,142.07						64,35	2,774.94	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (orang)	-					605	3,710.00	610	7,640.20	650	7,640.20	1,865	18,990.40	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik																			
				Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik																
				Terwujudnya good governance and clean government	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah (%)	-	20	42,509.18	20	34,698.08						40	77,207.25	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah	
					Jumlah BUMD sehat	-					2	1,756.10	3	1,150.00	3	1,150.00	8	4,056.10	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah Provinsi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
								2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						Persentase penyelesaian administrasi pengadaan dan pemeliharaan aset	-					100		100		100		100		-		Sekretariat Daerah Provinsi
						1. Peningkatan penerimaan pajak daerah 2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah 3. Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah	-					1. Pajak Daerah Rp.3.000.000.000.000,00, 2. Retribusi Rp. 7.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 155.300.000.000, 4. penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 503.800.000.000	13,073.77	1. Pajak Daerah Rp.3.203.607.923.218,25, 2. Retribusi Rp. 12.100.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 239.800.000.000, 4. penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 545.351.250.000	3,063.24	1. Pajak Daerah Rp.3.323.553.601.455,27, 2. Retribusi Rp. 11.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 141.684.015.851,89 4. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 402.593.858.033,47	3,063.24	1. Pajak Daerah Rp.3.323.553.601.455,27, 2. Retribusi Rp. 11.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 141.684.015.851,89 4. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 402.593.858.033,47	19,200.24	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Pendapatan Daerah	
						Opini LKPD dari BPK	-					WTP	18,391.79	WTP	15,236.89	WTP	15,236.89	WTP	48,865.56	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat (%)	10	10	19,725.90	10	33,050.11							10	52,776.02	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Semua OPD		
					Persentase ketepatan penyampaian laporan	-					94	27,659.94	100	5,827.25	100	4,953.17	100	38,440.36	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Semua OPD		
					Nilai Akuntabilitas	CC	CC		B		BB		BB		A							
					Skor LPKD	2,50	2,60		2,95		3,24		3,53		3,82		3,82					
				Program Penataan Kelembagaan	Prosentase SKPD yang sesuai dengan visi dan misi, kebutuhan, potensi dan kemampuan daerah	40	60	2,657.07	75	994.53							75	3,651.61	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah Provinsi		
					Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-					85	1,150.00	95	688.67	95	688.67	95	2,527.33	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD			
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	52	104	13,950.13	105	13,480.13							209	27,430.26	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Bappeda, Sekretariat Daerah		
					Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	-					85	9,275.00	87	8,373.95	90	8,373.95	90	26,022.91	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Bappeda		
					Persentase kesesuaian rencana terhadap realisasi	-					90	113.24	-	-	-	-	90	113.24	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah		
					Persentase Perencanaan pembangunan yang berkualitas	-					100	590.37	-	-	-	-	100	590.37	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
				Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan kerjasama pembangunan (dokumen)	8 dokumen	13	5,579.86	19	8,020.48							32	13,600.34	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Bappeda		
					Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama pembangunan (rekomendasi kebijakan)	-					7	1,385.00	-	-	-	-	7	1,385.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Bappeda		
					Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama pembangunan (rekomendasi kebijakan)	-					2	3,550.00	7	3,252.52	7	2,764.64	16	9,567.16	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah		
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	n/a	82	6,062.96	88	7,650.24							88	13,713.21	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Sekretariat Daerah Provinsi		
				Program Penataan tatalaksana	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP)	15	30	2,802.01	60	803.28							60	3,605.28	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah Provinsi		
					Jumlah standar operasional prosedur	-					SOP: 0 70% LPSE Provinsi: 0	960.00	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	449.34	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	449.34	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	1,858.69	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Sekretariat Daerah Provinsi		
					Persentase implementasi standar operasional prosedur	-															Sekretariat Daerah Provinsi	
					Jumlah LPSE yg bersertifikat ISO	-															Sekretariat Daerah Provinsi	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL SEBELUM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA		
							2015		2016		2017		2018		2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					Nilai keterbukaan informasi	17,40	30,57		35,16		40,43		46,49		53,47		53,47			
				Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	44	47	3,612.28	50	6,990.68						97	10,602.96	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Komunikasi Informatika dan statistik	
					Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	-					47	7,798.36	57	3,352.55	67	3,352.55	171	14,503.46	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi (%)	36	39.36	10,714.79	42.91	8,496.32	47	150.00	-	-	-	-	47	19,361.11	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan RPJMD	Dinas Komunikasi Informatika dan statistik
					Jumlah informasi media massa yang difasilitasi dan dipublish di tingkat nasional (kali)	-					15	900.00	-	-	-	-	15	900.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Penghubung
					Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	-					11	4,117.56	11	3,156.06	11	3,156.06	33	10,429.68		Sekretariat Daerah Provinsi
					Jumlah event dan dokumen hasil kelibangan	-					event: 1 dokumen: 1	300.00	event: 1 dokumen: 1	218.14	event: 1 dokumen: 1	218.14	event: 3 dokumen: 3	736.29		Badan Penelitian dan Pengembangan
				Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa	-		18,870.42		23,131.28							-	42,001.70	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah Provinsi
					Jumlah kerjasama informasi dengan media massa (kali)						95	7,456.66	140	8,865.05	105	8,263.73	340	24,585.44	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Jumlah kerjasama informasi dengan media massa (kali)	-					40	858.20	40	86.10	40	86.10	120	1,030.40	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Komunikasi Informatika dan statistik
				Program Pelayanan Publik	Prosentase Standar Pelayanan Publik (SPP) (%)	50	60		70	10,327.83							70	10,327.83	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Sekretariat Daerah Provinsi
					Presentase SKPD terkait dengan pelayanan masyarakat yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)	-					80	1,082.81	90	444.99	95	444.99	95	1,972.79	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dibuat (SOP)	3	2	193.24	3	61.20							5	254.44	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Inspektorat Daerah Provinsi
					Jumlah SOP pengawasan (SOP)	-					3	100.00	4	49.60	5	42.16	12	191.76	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data	Tersedia dan meningkatnya sumber daya pengelolaan bank data (orang)	-	0	-	7	142.83							7	142.83	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Jumlah pengelola basis data kelibangan dengan sistem aplikasi (Orang)	-					8	200.00	10	140.24	10	140.24	28	480.48	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen (dokumen)	51	51	11,518.43	51	12,497.95							102	24,016.38	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Semua SKPD
					Persentase ketersediaan data/informasi	-					100	200	100	100	100	100	100	400.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											100	150					100	150.00		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
											100	150					100	150.00		Dinas Pendidikan
						-					100	110					100	110.00		Dinas Kebudayaan
						-					100	150	100	150	100	100	100	400.00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						-					100	623.04					100	623.04		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
											100	80.00	100	81.32	100	81.32	100	242.64		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						-					100	175					100	175.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											100	85	100	85	100	85	100	255.00		Dinas Perhubungan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)		2015		2016		2017		2018				2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
						KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Tenaga Penataan ADM Kependudukan (Orang)	200	100	1,276.43	100	934.27						200	2,210.70	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Tenaga Penataan ADM Kependudukan yang ditingkatkan (Orang)	-				674.00	2,456.01	687.00	450.00	687.00	450.00	2,048	3,356.01	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/Petugas sebagai Administrator Kependudukan	-	12		96	764.45						96	764.45	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Pengelola/ Petugas Administrator Kependudukan yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)	-				100.00	350.00	-	-	-	-	100	350.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
6	Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertakwa																			
				Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa																
				Lestari nya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	21.00		na	30.00		60.00		100.00		100.00				
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengelolaan Fasilitas Budaya Anjungan Riau (area/unit/orang)	-	8/5/140	-	6/5/140	14,140.01						14/10/280	14,140.01	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	DINAS KEBUDAYAAN	
					1. Jumlah kunjungan masyarakat ke museum 2. Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental	-				-	-	Kunjungan: 50.000 Karya seni: 60	4,798.16	Kunjungan: 75.000 Karya seni: 100	4,798.16	Kunjungan: 125.000 Karya seni: 160	9,596.32	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Tersedianya informasi dan pelaksanaan workshop tentang kebudayaan melayu (kesiatan)	4	-	-	-	-								Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	DINAS KEBUDAYAAN	
					Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi: - Warisan budaya tidak benda - Warisan budaya benda (cagar budaya)	-				-	-	tidak benda: 25 benda: 91	7,001.34	tidak benda: 32 benda:101	7,001.34	tidak benda: 57 benda:192	14,002.68	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (paket)	11	23	14,783.00	25	1,530.05						48	16,313.05	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pariwisata	
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis seni dan budaya (Orang) **	-				495	8,134.92	504	18,291.64	549	9,015.39	1,548	35,441.95	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dipergelarkan	0 orang, 0 kali	29/27	8,925.84	29/31	2,228.12						58/58	11,153.96	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kebudayaan	
					Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)	-				-	-	35	8,019.09	40	8,019.09	75	16,038.19	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD		
					Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi (kali)	-				31	8,868.14	-	-			31	8,868.14	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Penghubung	
					Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na		na	50.00		150.00		300.00		300.00				
				Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Jumlah Ormas,LSM dan LNL yang terdaftar dan memiliki SKT serta Fasilitasi Forum Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	10 ormas 5 LSM 1 Forum	10/5/1	2,009.71	15/7/1	1,606.55						25/12/2	3,616.27	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Jumlah Ormas,LSM dan LNL yang terdaftar dan memiliki SKT serta Fasilitasi Forum Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	-				Ormas: 10 LSM: 5 Forum: 1	895.00	Ormas: 15 LSM: 7 Forum: 1	330.00	Ormas: 15 LSM: 7 Forum: 1	330.00	Ormas: 40 LSM: 19 Forum: 3	1,555.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	25	55	-	70	15,028.90						70	15,028.90	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Baru	Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA			
						KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
				Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
				Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan umat beragama	Jumlah penerima manfaat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama (orang)	1,497	1425	64,371.78	1425	10,809.79	1425	5,612.53	1425	38,870.11	1425	38,870.11	7,125	158,534.32	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Baru	Sekretariat Daerah Provinsi
				Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	11,160.65	100	12,669.62							100	23,830.27	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Satpol Pamong Praja
					Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-					100.00	10,361.25	100.00	10,578.79	100.00	10,578.79	100	31,518.83	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pemeliharaan Kantirantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pemeliharaan Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (jumlah patroli wilayah terhadap rawan gangguan sebanyak 48 kali dan Jumlah gangguan trantibum yang ditanggapi oleh tim reaksi cepat satpol pp sebanyak 24 kali dalam 1 tahun) (%)	100	100	1,372.50	100	1,468.85							100	2,841.35	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Satpol Pamong Praja, Badan Kesbagpolmas
					Persentase Pemeliharaan Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-					100.00	675.00	-	-	-	-	100	675.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Meningkatnya peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	n/a	424	845.43	374	1,722.87							798	2,568.30	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Satpol Pamong Praja
					Jumlah peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemananan	-					424.00	721.84	-	-	-	-	424	721.84		
7	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan																			
	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan																			
				Meningkatkan kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24.22	24.27		24.68		24.65		24.88		25.12		25.12			
					Nilai Tukar Petani (NTP)	95.02	95.03		102.23		103.95		105.55		107.86		107.86			
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	2	2	38,027.19	2	39,683.64	82,5	6,084.77	83	5,711.50	83,5	5,711.50	83,5	95,218.60	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase Penguatan cadangan pangan	-					75		80		85		85		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Penghasil Pangan (Sagu/Ton)	-					340,632	1,400.00	345,741	841.17	351	841.17	686,723.93	3,082.34	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-					95	100.00	-	-	-	-	95	100.00		
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian (%)	62	64	28,438.43	66	28,504.81							66	56,943.24	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
					Terwujudnya pengembangan teknologi yang diterapkan dalam pengembangan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta sarana dan prasarana paket teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (Teknologi)	-	N/A	-	7	5,226.86							7	5,226.86	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
							KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
						Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pertanian (kelompok)	-					149	17,092.00	200	10,005.99	220	10,005.99	569	37,103.98	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
						Persentase Tingkat penerapan teknologi perkebunan	-					62		63		63		63		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
												68	835.34	-	-	-	-	68	835.34		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani(%) - Tanaman Pangan Tanaman Hortikultura Komoditi dan Perkebunan	116.03, 120.86	116.26, 121.11	15,029.38	116.50, 121.35	14,755.95							116.50, 121.35	29,785.34	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
						Nilai Tukar Petani(%) - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Tingkat Pendapatan Petani Perkebunan (Rp/th dalam juta)	-					103.95, 117, 122	9,566.48	102.58, 117.122	2,342.19	107.86, 129.134	2,342.19	107.86, 129.134	14,250.85	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Nilai Tukar Petani	-					102.33	1,350.00	102.58	1,042.10	102.89	1,042.10	102.89	3,434.20	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Ragam Pemasaran Produk Pertanian (komoditi)	11	12	8,550.95	13	5,967.19							13	14,518.14	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
						Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan petani (unit)	40	20	1,545.93	20	25,825.15							40	27,371.09	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
						Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran (kelompok)	-					30	5,200.00	40	184.25	44	184.25	114	5,568.50	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit)	-					50		59		65		174		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Pertanian (ton/ekor)	-	N/A	91,401.93	-	28,767.98							-	120,169.90	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
						Jumlah produksi Pertanian (ton) - Padi (ton) Buah-buahan - Sayuran	-					- 504.551 - 189.129 - 24.517	54,603.53	- 526.151 - 191.957 - 26.704	31,218.86	- 578,766 - 211,153 - 29,374	31,218.86	- 1,609,468 - 592,239 - 80,595	117,041.24	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Produktifitas komoditi utama perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa) (Kg/Ha/Thn)	-					Kelapa Sawit: 3.762 Karet: 1.130 Kelapa: 1.187		Kelapa Sawit: 3.765 Karet: 1.135 Kelapa: 1.191		Kelapa Sawit: 3.768 Karet: 1.137 Kelapa: 1.196		Kelapa Sawit: 3.768 Karet: 1.137 Kelapa: 1.196	-	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (orasi)	2,130	1,441	5,309.26	1,452	6,649.99							2,893	11,959.25	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah BP3K/UPTD/BPP berstatus Madya	-					50	5,458.40	100	958.94	116	958.94	266	7,376.28	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Jumlah Kelompok berstatus Madya	-					816		970		1,000		2,786		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Jumlah BP3K/UPTD/BPP berstatus Madya	-					-	-	100	200.00	100	200.00	200	400.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Kelompok berstatus Madya	-							979				979		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan angka kematian ternak (%)	2	2.00	8,903.65	1.60	7,009.56							2	15,913.21	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Persentase angka kematian ternak (%)	-					8	9,150.00	5	8,981.27	5	8,981.27	5	27,112.53	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase tingkat konsumsi produk asal ternak terutama daging (kg/perkapita pertahun)	7,22	8.42	69,636.62	9.32	4,667.41							9	74,304.03	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH					INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA		
								2015		2016		2017		2018		2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						Jumlah produksi daging (Kg)	-					12,219,064	45,893	13,210,812	47,180.49	14,531,893	47,180.49	39,961,769.20	140,254.41	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah skim kredit yang disalurkan (Rp Milyar)	28	30	2,892.83	38	2,517.35							68	5,410.18	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran (kelompok)	-					35	3,150.00	40	1,165.29	44	1,165.29	119	5,480.59	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun	40	41	4,848.29	42	6,190.31							42	11,038.61	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kelautan dan Perikanan
						1. Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran 2. Nilai ekspor produk perikanan	-					Kelompok: 5 Nilai Ekspor (US\$): 8.500.000	2,788.05	Kelompok :10 Nilai Ekspor (US\$): 8.800.000	3,003.90	Kelompok: 15 Nilai Ekspor (US\$): 8.900.000	3,089.81	Kelompok: 30 Nilai Ekspor (US\$): 8.900.000	8,881.76	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	86,452	123,471.75	12,054.67	154,290.60	89,704.14							154,291	101,758.81	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah produksi hasil Perikanan Budidaya (ton).	-					111,762	15,640.71	125,173	18,298.52	136,000	18,298.52	372,935	52,237.76	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Pengembangan Perikanan Tangkapan	Meningkatnya hasil tangkapan perairan laut (ton)	130,312	133,209	9,809.49	136,106	15,736.55							136,106	25,546.04	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah produksi hasil tangkapan (ton).	-					134,261	2,454.01	135,603	4,209.58	136,000	2,719.61	405,864	9,383.19	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
8	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata																				
					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																
					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.59	54.49		56.36		58.23		60.10		61.99		61.99			
					Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	2	2	4,950.36	2	9,486.30							2	14,436.66	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2) Jumlah Kab/Kota berwawasan lingkungan	-					120 Usaha/Kegiatan	3,870.00	120 Usaha/Kegiatan	1,923.41	120 Usaha/Kegiatan	1,923.41	120 Usaha/Kegiatan	7,716.82	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Desa dan kelurahan yang mendapat pembinaan di bidang lingkungan hidup (desa)	46	50	1,159.45	60	3,060.10							110	4,219.55	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (lokasi)	-					20	900.00	20	130.36	20	130.36	60	1,160.72	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
						Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang bina (ha)	-					411,292.80	770.00	20 lokasi 20 ha	3,300.00	20 lokasi 20 ha	3,300.00	40 lokasi 40 ha	7,370.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan luas areal yang terbakar	penurunan 0%	40	1,401.00	60	1,147.54							60	2,548.54	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	-					20	500.00	-	-	-	-	20	500.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	760,273	600	3,178.83	600	8,028.17							600	11,206.99	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)	-					761.773	5,624.00	914,128	1,811.49	1,096,954	1,811.49	1,096,954	9,246.99	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	53	62.50	30,227.85	72.50	18,037.75							73	48,265.60	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Bencana yang Tertanggulangi (Kejadian)	-					5	4,975.00	8	3,874.42	14	3,874.42	27	12,723.84	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI AWAL/SEBELUM REVISI (2014)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	OPD PELAKSANA		
							2015		2016		2017		2018		2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terbangunnya Turap di Danau Raja di Kabupaten Indragiri Hulu (lanjutan)	1	1	2,657.07	-	-							1	2,657.07	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Luas sungai, danau dan sumber daya air lainnya dalam kondisi baik (Km)	-					0.4	8,800.00	0.4	100.00	0.5	100.00	0.50	9,000.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana (%)	55	65	-	75	7,264.67							75	7,264.67	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase lokasi dampak bencana alam yang direhab dan direkonstruksi	-					45	6,459.74	29	3,170.00	26	3,170.00	26	12,799.74	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Jumlah kunjungan wisatawan asing	47,934	52,971		61,742		70,509		79,227		88,044		88,044			
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Jumlah Event Pariwisata dan Ekraf, dan Lama tinggal wisatawan mancanegara (orang)	48,633	51,430	21,812.17	54,388	4,287.96							105,818	26,100.13	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pariwisata
					(event) (hari)	2 Event 4 Hari	6 / 4		26 / 4	22,470.30							26 / 4	22,470.30	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
					Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Jiwa).**	-					70,509	4,586.48	79,227	11,891.56	88,044	11,891.56	237,780	28,369.59	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Jumlah event pariwisata dan ekonomi kreatif (Event).**	-					23	1,615.39	24		27	-	27	1,615.39	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (Destinasi)	N/A	16	90,703.84	16	4,743.15	1	200.00	1	3,400.00	1	3,400.00	35	102,446.99	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif (kelompok)	8	8	-	32	979.23							32	979.23	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama dan Perubahan	Dinas Pariwisata
					Jumlah desa wisata yang dikembangkan (desa)	26	26	-	38	2,907.09	19	912.00	20	1,510.00	22	1,510.00	99	6,839.09	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	
					Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan (Lokasi Wisata).**	-					3	1,050.00	3		4	-	10	1,050.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah tenaga SDM profesi pariwisata yang disertifikasi	26	200	2,463.83	200	1,530.05							400	3,993.88	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pariwisata
					Jumlah SDM profesi pariwisata yang disertifikasi (Orang).**	-					665	3,550.00	676	1,040.00	737	1,040.00	2,078	5,630.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (paket)	-	5	2,802.01	10	4,590.15							15	7,392.15	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Pariwisata
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis media, desain dan IPTEK (Orang).**	-					152	1,520.36	155	1,160.00	169	1,160.00	476	3,840.36	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
9	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan																			
				Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan																
				Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	7,707.50	9,943.04		6,613.75		10,955.61		11,200.31		11,523.46		11,523.46			
					Nilai investasi PMA (juta USD)	1,369.56	653.39		869.11		1,015.53		1,067.21		1,119.90		1,119.90			
					Pertumbuhan ekonomi (%)	2.70	0.22		2.23		3.39		3.73		3.91		3.91			
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai dan Komoditas Ekspor (Juta US\$)	21	22.266	9,499.77	23.379	8,926.77							23	18,426.54	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase meningkatnya nilai ekspor Provinsi Riau (%)	-					5	3,269.14	5	878.38	5	878.38	5	5,025.90	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KETERANGAN	OPD PELAKSANA	
						KONDISI AWAL/SEBEL UM REVISI (2014)	2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
				Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi PMDN (jumlah proyek) PMA (jumlah proyek)	48 79	39 72	1,587.15	43 80	3,991.65							43 80	5,578.80	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah proyek Investasi yang terealisasi PMA/PMDN (proyek dihitung berdasar izin usaha)	-					10	2,212.39	12	1,625.00	14	1,625.00	36	5,462.39	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
					Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai Interval IKM)	-					82		82		82		82		Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya kemampuan Teknologi Produksi Tepat guna/alsintan (PU)	236	284	483.10	290	9,373.11							290	9,856.22	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perindustrian
					Jumlah unit usaha kemampuan reknologi tepat guna alat mesin pertanian (unit usaha)	-					4	1,450.00	5	2,100.00	6	1,606.94	15	5,156.94	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi	Jumlah industri agro berbasis teknologi yang dikembangkan	-	N/A	-	1	3,905.91	1	200.00	-	-	-	-	2	4,105.91	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Perindustrian
				Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan jumlah produk IKM yang mampu bersaing (IKM)	7,517	400	4,106.39	400	4,124.17							400	8,230.56	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Perindustrian
					Persentase peningkatan pertumbuhan IKM (%)	-					7	4,729.15	7	1,160.00	7	1,160.00	7	7,049.15	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Tersedianya potensi/peluang investasi (Jumlah Peluang yang ditawarkan)	22	25	2,478.39	28	2,435.53							53	4,913.92	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah dokumen investasi yang layak untuk ditawarkan (dokumen proposal project investasi)	-					2	830.00	2	170.00	2	170.00	6	1,170.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	
				Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp milyar) PMA (US\$)juta	4,032 549	4,233 577	3,664.08	4,425 603	7,053.89							4,425 603	10,717.97	Indikator dan Capaian Kinerja RPJMD Lama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penghubung
					Jumlah calon investor yang tertarik untuk berinvestasi (calon investor dihitung berdasar izin prinsipal)	-					29	1,185.30	32	570.00	35	570.00	96	2,325.30	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah promosi dan peluang investasi yang difasilitasi (kali)	-					1	1,500.00	-	-	-	-	1	1,500.00	Indikator dan Capaian Kinerja Perubahan RPJMD	Badan Penghubung

6.6. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya dari program pembangunan daerah yang telah dijabarkan pada tabel 6.3 untuk pencapaian sasaran dengan memperhatikan rekomendasi laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program.

Rekomendasi laporan KLHS RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi KLHS, seperti tabel 6.4 dibawah ini.

Tabel. 6.4 Perumusan Rekomendasi Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (80 ruas jalan dengan total panjang 2.799,81 km)	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem (hutan lindung, HTI, gambut)	•Penaatan terhadap struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan untuk kawasan hutan lindung, gambut •Jalur jalan meminimalkan penggunaan kawasan hutan lindung dan kesatuan hidrologis gambut dengan mempertimbangkan prioritas asas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan atau penggunaan dana CSR untuk rehabilitasi lahan dan jalan	•Pembuatan jalan dan jembatan layang guna menghindari akses langsung ke kawasan konservasi (hutan lindung, gambut) •Pemindahan jalur yang direncanakan, apabila melintasi kawasan konservasi (hutan lindung, gambut) •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya pembangunan jalan dan jembatan di hutan lindung dan gambut	Ya	•Pemerintah Provinsi Riau perlu menambahkan program menyusun instrumen lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH 32/2009 (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian kerentanan perubahan iklim, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan lain-lain) •Penaatan terhadap RTRW

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			•Mencegah terjadinya permukiman liar di sepanjang jalan (khusus yang berbatasan dengan kawasan konservasi) •Mempertahankan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya pembangunan jalan dan jembatan di hutan lindung dan gambut
		Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Penaatan terhadap struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan untuk kawasan hutan lindung, gambut	•Pembuatan jalan dan jembatan layang guna menghindari akses langsung ke kawasan konservasi •Pemindahan jalur yang direncanakan, apabila melintasi kawasan konservasi (hutan lindung dan gambut)		•Pemerintah Provinsi Riau perlu menambahkan program menyusun instrumen lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH 32/2009 (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			•Menghindari daerah rawan bencana (banjir dan kebakaran) •Penggunaan material yang ramah lingkungan •Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana •Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. •Penghijauan sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon,			kerentanan perubahan iklim, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan lain-lain) •Penaatan terhadap RTRW •Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana •Kontruksi ramah lingkungan •Kegiatan penghijauan •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya pembangunan jalan

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang •Pemberian rambu-rambu peringatan rawan bencana •Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			dan jembatan di hutan lindung dan gambut
		Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan konflik sosial	•Kesepahaman antara pihak pengusaha lahan (perusahaan dan masyarakat) dengan pemerintah terkait ganti rugi dan asas manfaat •Sosialisasi aturan berlalu lintas •Membuat rambu lalu lintas	•Penerapan agroforestry pada kawasan konservasi/lindung yang telah diokupasi oleh masyarakat		•Kesepahaman antara pihak pengusaha lahan (perusahaan dan masyarakat) dengan pemerintah terkait ganti rugi dan asas manfaat •Sosialisasi aturan berlalu lintas

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						•Membuat rambu lalu lintas •Penerapan agroforestry pada kawasan konservasi/lindung yang telah diokupasi oleh masyarakat
		Rendahnya kualitas pendidikan serta pelestarian nilai budaya melayu	•Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Internalisasi budaya melayu dalam setiap aspek kehidupan •Optimalisasi administrasi kependudukan •Optimalisasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Internalisasi budaya melayu dalam setiap aspek kehidupan •Optimalisasi administrasi kependudukan •Optimalisasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
		Rendahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan	•Peninjauan kembali struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Sinkronisasi regulasi sektor yang berkaitan dengan kebijakan rencana program yang dijalankan	•Pemindahan jalur yang direncanakan, apabila melintasi kawasan konservasi (hutan lindung, gambut)		•Peninjauan kembali struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Sinkronisasi regulasi sektor yang berkaitan dengan kebijakan rencana program yang dijalankan •Pemindahan jalur yang direncanakan, apabila melintasi kawasan konservasi (hutan lindung, gambut)
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang	•Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya di ekosistem gambut	Ya	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	Pertanian/Perkebunan (Kebun sagu di Kab Inhil dan Kab Meranti)	layanan jasa ekosistem	sudah dan sedang direncanakan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan •Rekayasa sosial dengan optimalisasi partisipasi masyarakat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Memperhatikan tata kelola hidrologis (misalnya dengan sekat kanal)	•Intensifikasi pada lahan dan perkebunan yang sudah ada		ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan •Rekayasa sosial dengan optimalisasi partisipasi masyarakat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Memperhatikan tata kelola hidrologis (misalnya dengan sekat kanal)

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						•Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya di ekosistem gambut •Intensifikasi pada lahan dan perkebunan yang sudah ada
		Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana •Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau	•Intensifikasi pada lahan dan perkebunan yang sudah ada		•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana •Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			•Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana •Memperhatikan tata kelola hidrologis (misalnya dengan sekat kanal) •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana •Memperhatikan tata kelola hidrologis (misalnya dengan sekat kanal) •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Intensifikasi pada lahan dan perkebunan yang sudah ada
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Penumbuhan dan	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan	•Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya di ekosistem gambut •Intensifikasi pada lahan eksisting	Ya	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	pengembangan tanaman padi di Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. ROHIL, Kab. Kep. Meranti, Kab. ROHUL, Kab. INHU, Kab. Kampar, Penumbuhan dan pengembangan tan. Kacang kacangan dan umbi umbian, Kota Dumai, kab. Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kab. ROHUL, Penumbuhan		•Meminimalkan penggunaan kawasan hutan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan •Rekayasa sosial dengan optimalisasi partisipasi masyarakat •Melakukan pendampingan penyuluhan dalam pengelolaan lahan •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Meminimalkan penggunaan kawasan hutan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan •Rekayasa sosial dengan optimalisasi partisipasi masyarakat •Melakukan pendampingan penyuluhan dalam pengelolaan lahan •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	dan Pengembangan Kawasan Buah-buahan dan Tan. Hias Kota Dumai, Kab. Siak, Kab. Kep. Meranti, Kota Pekanbaru, Kab. ROHUL, Kab. INHU, Kab. Kampar, Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Jagung kab. Pelalawan, Peremajaan Kebun Karet Rakyat Kab. Kep. Meranti, Kab. ROHUL,	Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana •Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau •Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana	• Intensifikasi pada lahan eksisting		•Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan, khususnya di ekosistem gambut •Intensifikasi pada lahan eksisting •Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana •Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau •Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	kab. INHU, Kab. Kampar.		•Melakukan pendampingan penyuluhan dalam pengelolaan lahan •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Melakukan pendampingan penyuluhan dalam pengelolaan lahan •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Intensifikasi pada lahan eksisting
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Desa Pulau Godang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, Desa Tolontam Kec. Benai Kab. Kuansing, Kepenghuluan Teluk Pulau,	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung perairan •Mengembangkan spesies endemik •Penyediaan data dan informasi perikanan yang akurat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Penggunaan pakan alami •Penggunaan bibit atau jenis ikan lokal tempatan	•Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan •Sistem budidaya polikultur dan terpadu	Ya	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung perairan •Mengembangkan spesies endemik •Penyediaan data dan informasi perikanan yang akurat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Penggunaan pakan alami

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	Kepenghuluhan Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas Kec. Rokan Hilir, Desa Sungai Undan Kec. Reteh Kab. Inhil, Desa Selat Akar Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti dan Desa Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai)		Melakukan pendampingan penyuluhan pengelolaan lahan budidaya			- Penggunaan bibit atau jenis ikan lokal tempatan - Melakukan pendampingan penyuluhan dalam pengelolaan lahan budidaya - Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan - Sistem budidaya polikultur dan terpadu
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja	Memperhatikan zonasi pemanfaatan pesisir	Penggunaan teknologi ramah lingkungan	Ya	Memperhatikan zonasi pemanfaatan pesisir

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	(Desa Concong Luar, Bekawan, Sungai Laut dan Sungai Belah Kab. Indragiri Hilir, Kepenghulu Panipahan dan Desa Sungai Bakau Kab. Rohil Dusun Makeruh Kec. Rupert Kab. Bengkalis)	layanan jasa ekosistem	• Penyediaan data dan informasi perikanan yang akurat • Pengaturan musim penangkapan • Selektifitas alat tangkap • Pemanfaatan berbasis kearifan lokal masyarakat • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	• Penggunaan teknologi berbasis GIS dalam penangkapan		• Penyediaan data dan informasi perikanan yang akurat • Pengaturan musim penangkapan • Selektifitas alat tangkap • Pemanfaatan berbasis kearifan lokal masyarakat • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan • Penggunaan teknologi ramah lingkungan • Penggunaan teknologi berbasis GIS dalam penangkapan
		Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan	• Peningkatan kapasitas nelayan lokal • Pemberdayaan berbasis nelayan lokal	• Peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan pascapanen		• Peningkatan kapasitas nelayan lokal • Pemberdayaan berbasis nelayan lokal

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		dan konflik sosial				•Peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan pasca panen
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (Penyediaan lahan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu dan Desa Lembah Dusun Gading Kab. Indragiri Hilir)	Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan •Mengembangkan budidaya tanaman lokal	•Pemindahan lokasi pengembangan yang direncanakan, apabila berada di kawasan hidrologis gambut •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan	Ya	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Tidak memanfaatkan kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung •Mengembangkan <i>Payment Environmental Services</i> (PES) yaitu jasa lingkungan

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			•Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			•Mengembangkan budidaya tanaman lokal •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Pemindahan lokasi pengembangan yang direncanakan, apabila berada di kawasan hidrologis gambut •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan
		Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim	•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana	•Pemindahan lokasi pengembangan yang direncanakan, apabila berada di kawasan hidrologis gambut •Memanfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan		•Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan •Memperhatikan struktur dan pola ruang yang sudah dan sedang direncanakan •Menghindari daerah rawan bencana

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			• Penggunaan material yang ramah lingkungan • Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana • Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang • Pemberian rambu-rambu peringatan rawan bencana • Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan			• Penggunaan material yang ramah lingkungan • Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana • Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang • Pemberian rambu-rambu peringatan rawan bencana • Melakukan kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						•Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Pemindahan lokasi pengembangan yang direncanakan, apabila berada di kawasan hidrologis gambut •Memfaatkan rekayasa teknologi ramah lingkungan
		Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan konflik sosial	•Transmigrasi pendatang dan penduduk lokal •Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Mengenal budaya calon transmigran yang tidak bergesekan dengan budaya penduduk tempatan •Ketersediaan lahan yang tidak tumpang tindih	• Penyediaan lahan transmigrasi yang terpisah secara geografis dengan penduduk tempatan		•Transmigrasi pendatang dan penduduk lokal •Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Mengenal budaya calon transmigran yang tidak bergesekan dengan budaya penduduk tempatan

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						•Ketersediaan lahan yang tidak tumpang tindih •Penyediaan lahan transmigrasi yang terpisah secara geografis dengan penduduk tempatan
		Rendahnya kualitas pendidikan serta pelestarian nilai budaya melayu	•Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Internalisasi budaya melayu dalam setiap aspek kehidupan •Optimalisasi administrasi kependudukan •Optimalisasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat •Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	• Mempersiapkan transmigran (luar daerah) dengan pengetahuan budaya lokal • Menciptakan proses asimilasi budaya antara pendatang dan penduduk tempatan		•Pendekatan pendidikan dan nilai-nilai religius •Internalisasi budaya melayu dalam setiap aspek kehidupan •Optimalisasi administrasi kependudukan •Optimalisasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
						•Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan •Mempersiapkan transmigran (luar daerah) dengan pengetahuan budaya lokal •Menciptakan proses asimilasi budaya antara pendatang dan penduduk tempatan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi Rencana Program Prioritas Provinsi Riau berisikan program-program baik untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk pemenuhan pelaksanaan Tugas, pokok dan fungsi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan disertai dengan indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Revisi pada bab VIII lebih diarahkan kepada penyesuaian pengelompokan urusan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, perbaikan indikator kinerja program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan sesuai perkembangan terkini serta perubahan nomenklatur OPD di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penyajian pencapaian program dan kebutuhan pendanaan disusun dengan 2 (dua) tabel terpisah terkait dengan tahun rencana yang telah dilaksanakan dan sisa tahun rencana.

Pemisahan dimaksud terdiri dari (1) tabel 7.1 yang berisikan program, indikator kinerja program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan (2) tabel 7.2 berisikan program, indikator kinerja program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan serta OPD penanggung jawab Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019.

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD
PROVINSI RIAU 2015 - 2016

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab	
					2015		2016		Target	Rp. (juta)		
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		BELANJA DAERAH				10,718,616.47		10,671,531.98		21,390,148.45		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,020,228.79		3,874,693.06		7,894,921.85		
	1	Program Pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah Pegawai (orang)	7,882	8,276	8,690	1,114,276.62	9,124	1,896,846.81	9,124	3,011,123.43	Seluruh SKPD
	2	Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Jumlah kabupaten/kota yang menerima dana Bagi Hasil (Kab/Kota)	12	12	12	1,074,016.01	12	652,514.59	12	1,726,530.61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3	Program Belanja Tidak Terduga	Persentase tersalurnya Belanja Tidak Terduga (%)	30	31	32	10,000.00	33	10,500.00	33	20,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Program Belanja Subsidi	Jumlah lembaga penerima Subsidi	N/A	N/A	N/A	-	N/A	640,565.11	N/A	640,565.11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5	Program Belanja Hibah	Jumlah Lembaga penerima bantuan (lembaga)	5396	5666	5949	850,921.97	6247	235,834.43	6247	1,086,756.40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Program bantuan sosial	Jumlah penerima bantuan sosial (orang)	7369	7737	8124	9,527.30	8531	22,532.11	8531	32,059.41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		7	Program bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan	Jumlah kabupaten/kota yang menerima bantuan (Kab/Kota)	12	12	12	961,486.89	12	415,900.00	12	1,377,386.89	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			BELANJA LANGSUNG					6,698,387.67		6,796,838.93		13,495,226.60	
			NON URUSAN					525,279.69		279,552.87		804,832.56	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persenatase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	-	48	48	266,579.00	48	107,692.29	48	374,271.29	Semua SKPD
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	60%	20	20	190,661.18	20	66,100.22	81	256,761.40	Semua SKPD
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi (%)	5%	15	15	18,394.31	15	49,575.17	3.8	67,969.47	Semua SKPD
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat (%)	N/A	7	7	29,919.31	7	23,135.08	86	53,054.38	Semua SKPD
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat (%)	10%	10	10	19,725.90	10	33,050.11	13	52,776.02	Semua SKPD
								-					

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
			URUSAN WAJIB					5,594,360.33		6,064,533.94		11,658,894.26			
1	01		PENDIDIKAN					605,574.32		838,491.41		1,808,224.76			
1	01	01	Program Pendidikan Anak Usia dini	APK PAUD APS PAUD (0 - 6 tahun) Rasio Ketersediaan Lembaga PAUD/Penduduk Usia 0 - 6 Tahun Rasio Murid terhadap guru Rasio Guru terhadap kelas	53.76	53.76	58.32	30,827.87	62.88	11,223.67	62.88	42,051.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	02	Program Pendidikan Dasar					120,759.59		88,039.01		208,798.60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				APK SD/MI/SDLB/Paket A	112.50	112.56	112.61		112.67		112.79				
				APM SD/MI/SDLB/Paket A	97.10	97.42	97.73		98.05		98.69				
				APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	102.75	103.27	103.79		104.31		104.31				
				APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	95.20	95.52	95.84		96.17		96.17				
				APS SD (7-12 Tahun)	70.54	72.30	74.11		75.96		75.96				
				APS SMP (13-15 Tahun)	56.79	58.78	60.83		62.96		62.96				
				Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (7-12 tahun)	244.00	239.00	234.00		230.00		230.00				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015					2016	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (13-15 tahun)	213.00	209.00	205.00		200.00		200.00		
				Rasio murid terhadap guru SD/MI	19.34	21.27	23.40		25.74		25.74		
				Rasio murid terhadap guru SMP/MTs	14.38	16.54	19.02		21.89		21.89		
				Rasio murid terhadap kelas SD/MI	33.23	33.10	32.96		32.83		32.57		
				Rasio murid terhadap kelas SMP/MTs	21.23	23.46	25.92		28.64		28.64		
				Rasio guru terhadap kelas SD/MI	1.72	1.59	1.47		1.36		1.36		
				Rasio guru terhadap kelas SMP/MTs	1.48	1.37	1.27		1.17		1.17		
1	01	03	Program Pendidikan Menengah					186,801.56		276,803.42		463,604.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	78.87	79.36	79.84		80.34		80.34			
			APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	70.9	71.57	72.26		72.94		72.94			
			APS SMA/MA/SMK/SMALB (16-18 Tahun)	44.28	46.27	48.35		50.53		50.53			
			Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK/SMALB	13.84	15.92	18.3		21.05		21.05			
			Rasio murid terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	35.88	35.92	35.95		35.99		35.99			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	2.59	2.33	2.1		1.89		1.89		
1	01	04	Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun	APM SD/MI, SLTP/MTS, SDLB/SMPLB, Paket A dan B		-	-		-		-		
1	01	05	Program pendidikan menengah/pemerataan akses rintisan wajib belajar 12 tahun	APM SMA/MA, SMA/SMLB dan Paket C		-	-		-		-		
1	01	06	Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	-		-		-		
1	01	07	Program peningkatan mutu kurikulum	Penguatan kurikulum pada mata pelajaran tertentu di 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-		-		-		
1	01	08	Program pemerataan dan perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing di semua jenjang pendidikan	Penguatan dan daya saing di semua jenjang pendidikan di 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-		-		-		
1	01	09	Program pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi	Dukungan sarana dan prasarana PTN dan PTS serta fasilitasi akses PT terkemuka	10 PTN/PTS	10 PTN/PTS	-		-		-		
1	01	10	Program pengembangan pendidikan karakter dan budaya	Diklat dan Workshop semua jenjang pendidikan di 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-		-		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	11	Program Pembangunan Sekolah Terpadu					52,175.29		214,206.83		266,382.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SD/MI/SDLB/Paket A	114.38	115.206	116.063		116.86		116.86		
				APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	105.63	106.18	106.72		107.25		107.25		
				APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	69.27	70.28	71.29		72.3		72.3		
1	01	12	Program Pendidikan Khusus Layanan Khusus					41,632.18		12,631.32		54,263.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SD/MI/SDLB/Paket A	114.38	115.206	116.063		116.86		116.86		
				APM SD/MI/SDLB/Paket A	97.18	97.71	98.25		98.78		98.78		
				APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	105.63	106.18	106.72		107.25		107.25		
				APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	95.25	95.9	96.6		97.2		97.20		
				APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	88.27	89.00	89.73		90.46		90.46		
				APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	69.27	70.28	71.29		72.3		72.30		
1	01	13	Program Pendidikan Tinggi	APK Pendidikan Tinggi (PT)	25.73	26.33	26.93	106,091.25	27.53	109,872.80	28.13	215,964.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	14	Program Pendidikan Non formal dan Informal	Angka Melek Huruf Persentase lembaga kursus yang terakreditasi	97.79 50.00	97.79 50.00		56,319.77		20,187.12	97.79 50	76,506.90	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	01	15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik		2	2	10,966.81	N/A	105,527.23	2	116,494.04	
				SD/MI									
				SMP/MTs									
				SMA/MA/SMK									
				Persentase Sekolah yang Terakreditasi									
				TK/RA									
				SD/MI									
				SMP/MTs									
			SMA/MA/SMK										
1	02		KESEHATAN					642,828.18		577,167.03		1,219,995.21	
1	02	01	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	56	60	65	7,816.34	70	18,536.88	70	26,353.23	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun	60	65	70	132,367.79	75	4,855.64	75	137,223.43	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, dan RSUD Petalabumi
1	02	03	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (%)	14.10	14.10	30	2,910.46	40	8,216.39	40	11,126.85	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan
1	02	04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita (%)	1.60	1.60	1.50	1,814.54	1.40	7,483.51	1.40	9,298.05	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memanfaatkan air minum berkualitas (%)	52.75	60	65	1,217.42	70	6,625.68	70	7,843.10	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015					2016	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	06	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penyakit menular, diantaranya DBD, malaria, dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi DBD: 52/100.000 Penduduk	DBD: 52/100.000 Penduduk	< 39	< 37	4,670.77	< 37	18,496.76	< 37	23,167.53	Dinas Kesehatan
				Malaria: 0,3/1000 Penduduk	Malaria: 0,3/1000 Penduduk	0.25	0.2	-	0.175		0.175		
				HIV/AIDS : 2,9 Dari penduduk beresiko tinggi	HIV/AIDS : 2,9 Dari	2	1.5	-	1		1		
1	02	07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan terhadap tenaga medis/paramedis yang teregistrasi dan terakreditasi (%)	60	60	65	10,476.55	70	2,685.49	70	13,162.05	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petalabumi
1	02	08	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dengan kelengkapan alat kesehatan yang memadai dengan jumlah penduduk(per 100.000 penduduk (%))	50	60	65	126,890.79	75	58,131.91	75	185,022.70	Dinas Kesehatan
1	02	09	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit	Persentase ketersediaan Jenis Pelayanan (%)	60	65	70	184,114.60	75	59,008.63	75	243,123.22	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad,RSUD Petalabumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan
1	02	10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan masyarakat rujukan yang dipelihara (%)	50	50	65	8,043.45	80	26,423.94	80	34,467.39	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad,RSUD Petalabumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	02	11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu melahirkan, bayi dan anak (per 100,000) Ibu: 118/100.000 Kelahiran Hidup	Ibu: 118/100.000 Kelahiran Hidup	116	113	3,266.22	110	10,569.58	110	13,835.80	Dinas Kesehatan		
				bayi: 24/1.000 Kelahiran	bayi:	24	24		23		23				
				Anak: 28/1.000 Kelahiran hidup	Anak: 28/1.000 Kelahiran hidup	28	28		27		27				
1	02	12	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan (%)	87	90	92	-	94	8,455.81	94	8,455.81	Dinas Kesehatan		
1	02	13	Program Pengendalian Penyakit tidak Menular	Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (%)	30	40	50	-	55	2,589.61	55	2,589.61	Dinas Kesehatan		
1	02	14	Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per 100.000 penduduk	9.4 per 100.000 penduduk	9.4	10	-	10.5	11,098.21	10.5	11,098.21	Dinas Kesehatan		
1	02	15	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Persentase perencanaan kesehatan dengan sistem informasi kesehatan (%)	60	63	-	-	70	16,012.73	70	16,012.73	Dinas Kesehatan		
1	02	16	Program Diklat dan Penelitian Kesehatan	Persentase Pelatihan yang dikerjakan (%)	25	75	-	-	100	722.95	100	722.95	Dinas Kesehatan		
1	02	17	Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase Prosentase Krisis kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 Jam (%)	95	100	-	-	100	3,012.67	100	3,012.67	Dinas Kesehatan		
1	02	18	Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan Lingkungan	Persentase pemeriksaan laboratorium Klinis dan lingkungan yang dilayani	Lab. Klinis : 24.29%	24.29	24.29	-	40	9,015.05	40	9,015.05	Dinas Kesehatan		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				telah terakreditasi (ISO) (%)	Lab. Lingkungan : 44,90%	44.90	44.90	-					
1	02	19	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang sakit mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	-	100	126,834.16	100	126,834.16	Dinas Kesehatan,
1	02	20	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit (%)	100	100	100	188.43	100	535.52	100	723.95	RS Jiwa Tampan dan RSUD Petala Bumi
1	02	21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan pada BLUD RS sesuai standar Pelayanan Minimal (%)	50	60	70	143,763.21	80	177,163.58	80	320,926.79	RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi dan Rumah Sskit Jiwa Tampan
1	02	22	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat (%)	70	70	80	15,287.60	90	692.35	90	15,979.95	Rumah Sakit Jiwa Tampan, RSUD Arifin Achmad
1	03		LINGKUNGAN HIDUP					8,863.51		17,748.57		26,612.07	
1	03	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kabupaten/Kota yang meraih penghargaan tentang kebersihan tingkat nasional	2%	2		-		1,759.56	2	1,759.56	Badan Lingkunga Hidup, Cipta Karya
1	03	02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	2%	2	2	4,950.36	2	9,486.30	2	14,436.66	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, PU dan CK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	03	03	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Desa dan kelurahan yang mendapat pembinaan di bidang lingkungan hidup (desa)	41	46	50	1,159.45	60	3,060.10	60	4,219.55	Badan Lingkungan Hidup
1	03	04	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase penyediaan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi masyarakat (100)	100	100	100.00	1,352.69	100.00	1,912.56	100.00	3,265.25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
1	03	05	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase penurunan luas areal yang terbakar (penurunan %)	15.269 ha	0	40	1,401.00	60	1,147.54	60	2,548.54	Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa,Badan Koordinasi Penanaman
1	03	06	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam rangka peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau (Kab/Kota)	0	-	-	-	6	382.51	6	382.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Cipta Karya tata ruang
1	04		PEKERJAAN UMUM					2,977,372.94		1,954,436.00		4,931,808.94	
1	04	01	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (km)	931.1		129	2,138,109.52	152	947,082.28	1,212	3,085,191.80	Dinas Bina Marga
				Panjang Jembatan provinsi Dalam Kondisi baik (meter)	8,852		1,065	-	1,065	35,707.09	10,292.3	35,707.09	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kumuh di Perkotaan (kawasan)		-	2	17,150.21	2	5,356.06	4	22,506.27	
1	04	06	Program Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Terkelolanya Rusunawa Pekerja Provinsi Riau (unit)	1 Unit		-	-	1	765.02	1	765.02	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	07	Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa (Km)	674,28 KM	783.58	130	5,024.29	160	60,589.93	1,074	65,614.22	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
				Terkelolanya Kawasan Tangkapan Air dan Tertatanya sumber daya air (kawasan)	4	4	-	-	1	6,885.22	5	6,885.22	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	08	Program Penyediaan dan Pegelolaan Air Baku	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat (/det)	240/det	240	100	-	100	22,950.73	100	22,950.73	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	09	Program Pengendalian Banjir	Terlindunginya wilayah sungai dan pantai dari abrasi dan erosi (Km)	281.6	288.6	12	42,194.35	9	72,677.32	310	114,871.67	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	10	Program Penyediaan Prasaran Air Minum Pedesaan	Jumlah desa yang terlayani air minum (desa)	141	223	223	-	100	22,316.93	323	22,316.93	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air minum yang aman dan layak skala regional di provinsi Riau (/det)	40	40	40	13,212.91	269	192,148.78	349	205,361.68	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	04	12	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Panjang pipa air minum yang terbangun (meter)	15000	15,850	26,600	-	20,000	35,707.09	62,450	35,707.09	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	04	13	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungan	Jumlah kawasan yang tertata sesuai dengan kaidah penataan pembangunan dan lingkungan (kawasan)	-	2	2	-	5	22,316.93	7	22,316.93	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
				Jumlah bangunan dan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	10	20	10	126,752.13	10	89,267.72	40	216,019.86	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air, Dinas Pekerjaan Umum
1	04	14	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terbangunnya Turap di Danau Raja di Kabupaten Indragiri Hulu (lanjutan)	0	1	1	2,657.07	N/A	-	1	2,657.07	Dinas Pekerjaan Umum/ Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
1	04	15	Program pengembangan/peningkatan laboratorium pengujian	Tersedianya Peralatan Laboratorium Pengujian	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	16	Program pengujian material/bahan konstruksi	Tersedianya sistem pengendalian mutu dan kualitas konstruksi	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	17	Program peningkatan fasilitas pendukung fungsi ke- PU an	Tersedianya perangkat pendukung teknis kePU-an	N/A	N/A	N/A	5,217.53	N/A	-	N/A	5,217.53	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	04	18	Program Penyediaan dan pengelolaan air minum	Tersedianya prasarana air minum di 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	04	19	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Jumlah Sistim Informasi jalan dan jembatan yang dibuat	0	1	N/A	5,604.01	N/A		N/A	5,604.01	Dinas Bina Marga
1	04	20	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya prasarana lingkungan di permukiman perkotaan yang berkualitas di 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12	N/A	5,120.91	N/A		N/A	5,120.91	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	05		PENATAAN RUANG					-		16,371.52		16,371.52	
1	05	01	Program perencanaan tata ruang	Terlaksananya Fasilitas Perencanaan penataan ruang wilayah (kawasan)	2 Kawasan	2	2	-	4	1,071.03	6	1,071.03	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air, Bappeda
1	05	02	Program Pemanfaatan ruang	Terbangunnya kawasan ruang terbuka hijau (RTH) (kawasan)	0	2	2	-	4	15,300.49	6	15,300.49	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	05	03	Program Penataan Ruang	Tersedianya dokumen/ Fisik RTH Provinsi Riau	4	4		-	N/A	-	N/A	-	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					36,970.06		34,715.78		71,685.83	
1	06	01	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Jumlah aparatur perencana yang mengikuti berbagai pendidikan (orang)	48 orang	181	223	11,570.35	223	3,652.99	223	15,223.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Daerah										
1	06	02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	-	52	104	13,950.13	105	13,480.13	261	27,430.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan
1	06	03	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen koordinasi,'sinkronisasi dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	3	9	8	4,251.32	8	3,557.36	25	7,808.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	04	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Tersedianya dokumen koordinasi, 'sinkronisasi dan	-	2	5	2,029.04	6	2,677.59	13	4,706.62	Badan Perencanaan Pembangunan
			dan Sumberdaya Alam	evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam (dokumen)									Daerah
1	06	05	Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar (dokumen)	-	2	2	628.04	2	535.52	6	1,163.55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	06	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial budaya (dokumen)	-	5	6	2,802.01	6	2,218.57	17	5,020.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	07	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya perencanaan dan pembangunan di wilayah perbatasan (kegiatan)	0	-	4	1,739.18	15	8,593.62	19	10,332.79	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	07		PERUMAHAN				583,522.63		614,276.15		1,197,798.78		
1	07	01	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah sederhana layak huni yang dibangun (unit)	6,842	8,999	2,000	1,498	2,000	142,828.36	12,999	144,325.98	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
				Terbangunnya Restlement pemukiman masyarakat (kawasan)	1	1	1	-	2	5,356.06	3	5,356.06	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air
				Jumlah unit bangunan rumah (unit)	0	0	2	65,605.59	2	86,752.34	4	152,357.93	Badan Penghubung
1	07	02	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terfasilitasinya sinkronisasi Program nasional dalam pengembangan Infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau (laporan)	0	1	1	-	1	446.34	2	446.34	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air
				Pembinaan teknis dan pengendalian untuk mendukung program - program nasional dalam pembangunan Infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat (desa)	1,235	1,235	1,235	-	100	446	1,335	446.34	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	07	03	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Jumlah Kawasan Pemukiman yang Memiliki Sanitasi yang Baik dan Berwawasan Lingkungan (kawasan)	0	-	5	30,918.69	5	4,463.39	10	35,382.08	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air
1	07	04	Program Penyusunan dan Perencanaan Teknis kegiatan Bidang Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis kegiatan Bidang Pemukiman (laporan)	0	-	-	-	6	765.02	6	765.02	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air
1	07	05	Program Pengembangan Perumahan Pedesaan	Jumlah rumah layak huni dan sanitasi lingkungan yang dibangun bagi rumah tangga miskin di pedesaan (unit)	0	3,638	3,638	485,500.72	5,520	373,218.30	9,158	858,719.02	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	08		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					65,389.21		96,699.08		162,088.30	
1	08	01	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Keserasian Kebijakan kepemudaan tingkat provinsi dengan kabupaten dan kota (%)	0.00	100	100	241.55	100	382.51	100	624.06	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	08	02	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang menjadi pelopor dan penggerak pembangunan yang berkarakter mandiri dan berwawasan kebangsaan (orang)	80	160	205	4,903.51	210	6,120.20	575	11,023.71	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	08	03	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup	jumlah pemuda yang dibina berhasil menjadi wirausaha (%)	65	75	75	289.86	75	535.52	75	825.38	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	08	04	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi menjadi kader penyuluh penyalahgunaan narkoba dan penularan	70	80	80	289.86	80	267.76	80	557.62	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	08	05	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase atlit baik junior maupun senior yang dibina menjadi atlit berprestasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga (%)	70	121	80	45,751.01	80	51,141.88	80	96,892.89	Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	08	06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikelola dan dipelihara (Unit)	38	58	122	13,913.41	23	30,600.98	203	44,514.39	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	08	07	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aktifitas Kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang dikelola dan	1	1	1	-	5	7,650.24	6	7,650.24	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	09		PENANAMAN MODAL					7,729.62		13,481.07		21,210.69	
1	09	01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp milyar) PMA (US\$juta)	1257.7115.3	5.289,7664,3	4.233577	3,664.08	4.425603	7,053.89	13.947,71.844,3	10,717.97	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	09	02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi PMDN (jumlah proyek) PMA (jumlah proyek)	1314	4879	3972	1,587.15	4380	3,991.65	130159	5,578.80	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	09	03	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Tersedianya potensi/ peluang investasi (Jumlah Peluang yang ditawarkan)	19	22	25	2,478.39	28	2,435.53	28	4,913.92	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
1	09	04	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	48,211	59,211	N/A	-	N/A	-	59,211	-	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
							N/A	-	N/A			-			
1	09	05	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya akuntabilitas perizinan dan non perizinan (Dokumen Berita Acara)	350	420	N/A	-	N/A		420	-	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		
1	09	06	Program penerbitan, monitoring, Evaluasi dan penanganan Pengaduan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kualitas pengelolaan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan (IKM)	78	158	N/A	-	N/A		158	-	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		
1	09	07	Program penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan terpadu	tersediaanya instrumen/dokumen penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu (dokumen)	1	27	N/A	-	N/A		27	-	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		
1	09	08	Program penjajakan calon investor ke Perwakilan Negara Sahabat	Terlaksananya advetorial promosi dalam bahasa inggris ke negara sahabat (kali)	0	6	N/A	-	N/A		6	-	Badan Penghubung		
1	09	09	Program peningkatan pelayanan hubungan Perwakilan Negara Sahabat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya buku panduan beasiswa dari negara sahabat (buku)	0	225	N/A	-	N/A		225	-	Badan Penghubung		
1	10		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					22,713.25		33,626.40		56,339.65			
1	10	01	Program Peningkatan Daya saing UMKM	Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau (%)	7.90	8.90	2	-	2	-	12.90	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	10	02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau (%)	7.90	-	9.90	10,084.29	10.90	22,356.05	10.90	32,440.34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	03	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM untuk Pendukung Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya koperasi aktif di Provinsi Riau (%)	0.70	1.5	N/A	-		-	1.5	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	04	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya koperasi aktif di Provinsi Riau (%)	-	-	0.90	7,867.47	10	8,413.38	10	16,280.86	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	05	Program Penguatan Permodalan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan (%)	100	100	N/A	-			100.0	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	06	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan (%)			100	3,000.08	100	1,344.77	100	4,344.85	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	07	Program Penyelenggaraan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Pengembangan Sistem pendukung di UMKM	Meningkatnya pembinaan teknis produk dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (%)	100	100	2	-	2%		100	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	10	08	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pembinaan teknis produk dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (%)			100	1,761.40	100	1,512.20	100	3,273.59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	12		KETENAGAKERJAAN					11,134.66		22,100.15		33,234.81	
1	12	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Tenaga Penataan Adm Kependudukan (orang)	100 Orang	200	100	1,276.43	100	934.27	400	2,210.70	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	12	02	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/ petugas sebagai administrator ADMINDUK	0	-	12		96	764.45	108	764.45	Biro Tata Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	12	03	Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja %	62,65	63,30	63,70	632.87	64,35	2,142.07	64,35	2,774.94	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	12	04	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang diawasi dan dilindungi (perusahaan) (kasus)	75 75	150 150	100 75	2,273.49		3,433.53		5,707.02	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	12	05	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang berkualitas (orang)	922 Orang	2,048	2,216	6,951.87	2,196	14,825.83	6,460	21,777.71	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	13		KETAHANAN PANGAN					85,807.04		77,357.82		163,164.85	
1	13	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH (%)	2	2	2	38,027.19	2	39,683.64	2	77,710.83	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	13	02	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	88.89		95	-	95	2,754.09	95	2,754.09	Badan Ketahanan Pangan
1	13	03	Program Optimalisasi Kerjasama Pembangunan dibidang Perekonomian dengan mewujudkan Kerjasama yang baik, Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat,	Terlaksananya Pengendalian dan Kebijakan kepala Daerah tentang subsidi Gas, Minyak Solar (%)	0	20	2	2,444.51	2	-	100	2,444.51	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	04	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah (%)	0	20	2	-	2	-	100	-	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1	13	05	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah (%)	-	60	20	42,509.18	20	34,698.08	100	77,207.25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Biro Administrasi Pembangunan,Biro umum, Dispenda, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan, Dinas Pemuda dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	13	06	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Terlaksananya Koordinasi dan rekomendasi Pemerintah dan swasta dalam pengembangan bidang perekonomian (%)	20 %	40	20	1,376.85	20	107.18	80	1,484.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1	13	07	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perekonomian	Tersedianya Data sembilan sektor ekonomi	0	20		-			20	-	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1	13	08	Program Optimalisasi Teknologi Informasi	Tersedianya Data sembilan sektor ekonomi	2%	4	20	1,449.31	20	114.83	44	1,564.14	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1	14		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2,753.70		3,635.40		6,389.09	
1	14	01	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (jumlah perda & kab/kota)	1 Perda Pemenuhan Hak Anak dan 120 Org	1	1 & 4	241.55	1 & 2	454.42	2 & 6	695.98	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	14	02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan dan Anak yang terlindungi (kasus/ orang)	146 Kasus & 580 Org	146/580	100/175	676.35	100/275	826.23	346/1,030	1,502.57	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	14	03	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang meningkat produktifitas ekonominya	720 Org & 1964 Kelompok	488 Org & 120 Kelompok	120 Org & 120 Kelompok	869.59	155 Org & 120 Kelompok	1,115.41	1483 org dan 2324 kelompok	1,984.99	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	14	04	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tersedianya Kelembagaan PUG dan Anak se-Provinsi Riau (jumlah SKPD & orang)	2 SKPD & 1490 Org	2 & 3284	45 & 420	966.21	38 & 775	1,239.34	38 & 4479	2,205.55	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	14	05	Program Peningkatan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan	Tersedianya dokumen kebijakan pembinaan Gender dan kualitas hidup perempuan	0	2	N/A	-	N/A	-	2	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1	14	05	Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terlaksananya kegiatan pembinaan HIV, AIDS dan UKS di 12 Kab/Kota (kegiatan)	0	4	N/A	-	N/A	-	4	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1	14	05	Program Peningkatan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan	Tersedianya satu dokumen monev KDRT (dokumen)	0	1		-	N/A	-	1	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1	15		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					1,926.62		2,598.02		4,524.64	
1	15	01	Program Keluarga Berencana	Meningkatkannya partisipasi program keluarga berencana. Rasio Akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur (orang)	8,440	11,356	3,360	1,321.77	3,870	1,708.30	18,586	3,030.07	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015					2016	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	15	02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan advokasi dan TOT kebijakan Program PKBR (orang)	0	36	-	-	-	-	36	-	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	15	03	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya Pelayanan Akseptor KB baru Khususnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (akseptor)	100	600	110	193.24	230	289.18	940	482.42	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	15	04	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja dan Mahasiswa (klpk) menjadi 411 PIK	400 Org & 40 PIK	40	36	284.07	36	491.15	112	775.21	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	15	05	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya Ibu rumah tangga, Remaja dan Kelompok Khusus terhadap penaggulangan	0	620	100	127.54	200	109.40	920	236.94	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	16		PERHUBUNGAN					22,647.94		20,207.85		42,855.79	
	16	01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkoordinasi baik (%)	3	3	4	-	6	4,216.90	6	4,216.90	Dinas Perhubungan
1	16	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum (lintas penyebrangan)	3	3	3	593.25	3	243.28	3	836.53	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	16	03	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan (simpul/penunjang)	11 Simpul dan 66 Penunjang	11/66	14/66	2,802.01	18/66	7,349.48	18/66	10,151.49	Dinas Perhubungan
1	16	04	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya Pengendalian keamanan lalu lintas (rambu jalan/rambu sungai/ marka jalan)	1 307 rambu jalan 152 rambu sungai	1700 /0/12000m	2500/500 /24000 m	-	3500/500 /100.000 m	5,303.57	3500/500 /100.000 m	5,303.57	Dinas Perhubungan
1	16	05	Program peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas (unit)	894	750	650	483.10	550	973.13	550	1,456.24	Dinas Perhubungan
1	16	06	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Terpenuhnya jumlah simpul pelayanan perhubungan yang di fasilitasi dan di bina (simpul)	33	33	33	-	33	2,121.48	33	2,121.48	Dinas Perhubungan
1	16	07	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen pengendalian prasarana dan fasilitas fisik perhubungan (dokumentasi / lokasi)	0	2/1	N/A	14,710.53	N/A		2/1	14,710.53	Dinas Perhubungan
1	16	08	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan	N/A	N/A	N/A	4,059.04	N/A		N/A	4,059.04	Dinas Perhubungan
1	17		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					46,380.74		50,337.08		96,717.82	
1	17	01	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah desa / SKPD Pemerintah Provinsi Riau yang terkoneksi Jaringan Komunikasi dan informatika (Desa / SKPD)	1.014 desa/ 38 SKPD	1052 / 38	38 / 52	4,918.00	38 / 54	4,490.69	1,090/ 54	9,408.70	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	17	02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi (%)	32.27	35.82	39.36	10,714.79	42.91	8,496.32	42.91	19,211.11	Dinas Komunikasi dan Informatika,Badan Penelitian dan Pengembangan,Bir o Hubungan Masyarakat,Sekret ariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,badan
1	17	03	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ jumlah aplikasi yang terintegrasi	3 aplikasi	5/0	2/5	5,940.25	30/20	3,415.84	37/25	9,356.09	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	17	04	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	41	44	47	3,612.28	50	6,990.68	50	10,602.96	Dinas Komunikasi dan Informatika
	17	05	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa	-	-	-	18,870.42	-	23,131.28	-	42,001.70	Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat KORPRI
1	17	06	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Prosentase jasa titipan dan provider yang mematuhi peraturan (%)	10%	10	20	144.93	0.50	312.44	30.50	457.37	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	17	07	Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika (orang)	415,600	416,791	2,566	2,180.07	3,216	3,499.83	422,573	5,679.91	Dinas Komunikasi dan Informatika,Biro Hubungan Masyarakat,Sekret ariat Komisi
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					14,081.52		8,832.21		22,913.73	
1	19	01	Program Bina Ideologi dan Wawasan	Jumlah generasi muda,masyarakat dan	500 Generasi			2,391.37		1,797.81		4,189.17	Badan Kesatuan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kebangsaan	forum yang memperoleh fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan (orang/ forum)	Muda/ Masyarakat 1 Forum	300 2	400 2		450 2		1,150 2		Bangsa dan Politik, Biro Administrasi kemasyarakatan
1	19	02	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Berkurangnya Potensi konflik dan aksi unjuk rasa dikalangan	152	150	145	3,246.46	140	2,692.89	140	5,939.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				(jumlah aksi)	199 aksi	190	185		180	180			
1	19	03	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, Pilkada Provinsi dan	Pemilihan Legislatif 2009 68,17 % Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 65,67 %	75	75	1,971.07	75	2,134.42	75	4,105.48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	04	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Fasilitasi Forum Ketahanan Ekonomi dalam cakupan pemantauan ketersediaan kebutuhan sembako di daerah (forum)		2	2	676.35	2	600.54	2	1,276.89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	05	Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Jumlah Ormas,LSM dan LNL yang terdaftar dan memiliki SKT serta Fasilitasi Forum Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (jumlah	353 ormas 229 LSM dan 12 LNL 1 Forum	10/5/1	10/5/1	2,009.71	15/7/1	1,606.55	15/7/1	3,616.27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	06	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat/ Generasi Muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (orang)	230		N/A	3,786.57	N/A	-	230	3,786.57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	19	07	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat/ Generasi Muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	230 org		N/A	-	N/A	-	230 org	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	08	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu , Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota (orang)	1200	1,200	N/A	-	N/A	-	1,200	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					337,719.40		391,516.96		729,236.36	
1	20	01	Program Penataan Kelembagaan	Prosentase SKPD yang sesuai dengan visi dan misi, kebutuhan, potensi dan kemampuan daerah (%)	20	40	60	2,657.07	75	994.53	75	3,651.61	Biro Organisasi
1	20	02	Program Reformasi Birokrasi	Prosentase SKPD yang melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi (%)	20	40	60	1,932.42	75	765.02	75	2,697.44	Biro Organisasi
1	20	03	Program Penataan Tatalaksana	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP) (%)	8	15	30	2,802.01	60	803.28	60	3,605.28	Biro Organisasi
1	20	04	Program Pelayanan	Prosentase Standar	40	50	60		70	10,327.83	70	10,327.83	Biro Organisasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Publik	Pelayanan Publik (SPP)									
1	20	05	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (SKPD)	43	43	43	4,058.08	43	10,684.30	43	14,742.38	Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase peningkatan sistem pengawasan internal secara berkala (reguler) yang dilaksanakan dan Pengendalian Pelaksanaan	20	20	40	17,874.87	60	15,896.25	60	33,771.12	Inspektorat
1	20	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	70	76	82	-	88	2,605.67	88	2,605.67	Biro Administrasi Pembangunan
1	20	07	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan kebutuhan sarana dan prasara aparatur (%)	N/A	100	100	-	100	2,044.38	100	2,044.38	Biro Umum
1	20	08	Program Pelayanan Umum	Persentase terselenggaranya pelayanan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah (%)	N/A	100	100	-	100	2,952.04	100	2,952.04	Biro Umum
1	20	09	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang - undangan yang ditata (%)	-	10	15	7,367.34	20	5,381.95	100	12,749.29	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Sekretariat KOPPRI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase penguatan kerjasama antara Pemerintah (%)	-	10	15	2,415.52	20	2,241.75	100	4,657.28	Biro Hukum,Badan Penghubung
				Terlaksananya Pengendalian dan Kebijakan kepala Daerah tentang subsidi Gas, Minyak Solar (%)	0	-	20	6,473.60	20	5,133.39	40	11,606.99	Biro Organisasi dan tata laksana, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya
1	20	11	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian masalah Hukum yang dihadapi Masyarakat (%)	-	10	15	-	20	592.89	45	592.89	Biro Hukum
1	20	12	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kab/kota)	12 Kab/Kota	12	12	5,072.60	12	3,251.35	12	8,323.95	Biro Tata Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20	13	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau	Tersedianya lokasi kawasan (bisnis, hijau dan lainnya) (kawasan)	0	3	N/A	-	N/A	-	3	-	Biro Tata Pemerintahan
1	20	14	Program Pengelolaan Pemerintahan yang Baik	Tersedianya dokumen kapasitas pemerintahan Daerah (dokumen)	0	2	N/A	-	N/A	-	2	-	Biro Tata Pemerintahan
1	20	15	Program Percepatan Implementasi Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen implementasi otonomi daerah (dokumen)	0	3	N/A	-	N/A	-	3	-	Biro Tata Pemerintahan
1	20	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rapat / pertemuan yang di fasilitasi oleh Badan Penghubung (kali/orang/buku)	0 kali, 0 orang, 0 buku	11/150/0	12/0/200	21,019.88	12/0/200	856.97	35/150/400	21,876.85	Biro Umum, Badan Penghubung, Biro Tata Pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	17	Program pembinaan mental dan akhlak remaja masyarakat Riau di JABODETABEK	Terlaksananya kegiatan sosial	0	1	N/A	-	N/A		1	-	Badan Penghubung
1	20	18	Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya fasilitasi masyarakat dan PEMDA di JAKARTA (kegiatan)	0	7	N/A	-	N/A		7	-	Badan Penghubung
1	20	19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH dan Legislatif (%)	100	100	100	3,333.42	100	1,243.16	100	4,576.59	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
				Persentase rapat dan pertemuan yang dihadiri oleh KDH dan WKDH	N/A	100	100	-	100	12,565.14	100	12,565.14	Biro Umum
1	20	20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan (%)	N/A	76	82	6,062.96	88	7,650.24	88	13,713.21	Biro Tata Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20	21	Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi	Persentase terfasilitasinya aspek pertanahan dan wilayah administrasi	N/A	60	82	1,835.80	80	5,483.27	80	7,319.07	Biro Administrasi Pemerintahan Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan serta Toponimi	Tersusunnya grand design penataan pemekaran, pembakuan nama rupa bumi dan pelayanan umum Pemerintahan (jumlah pembakuan nama rupa bumi)	N/A	4	4	1,153.27	4	420.76	8	1,574.03	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20	23	Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil Penelitian dan Pengembangan (kali)	-	24	24	434.79	24	446.34	24	881.13	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	24	Program Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah	Terbentuknya sistem informasi dan pengembangan hasil kelitbangan dan potensi keunggulan daerah (rekomendasi)	-	0	0	2,076.12	6	5,731.88	6	7,808.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	25	Program Peningkatan Sumber daya Pengelolaan Bank Data	Tersedia dan meningkatnya sumber daya pengelolaan bank data (orang)	-	0	0	-	7	142.83	7	142.83	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	26	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau (rekomendasi)	75 rekomendasi	0	84	4,933.08	18	10,868.35	102	15,801.42	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	27	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa)	Jumlah peningkatan kerjasama dibanding angka sebelumnya (rekomendasi)	2 rekomendasi	0	7	966.21	4	2,142.43	11	3,108.63	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	28	Program pemetaan penelitian dan pengembangan	Jumlah rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau (dokumen)	69 dokumen	98	0	-	-	-	98	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	29	Program peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (dokumen)	38 dokumen	77	0	-	-	-	77	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	30	Program koordinasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Terlaksananya koordinasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (rekomendasi)	7 Rekomendasi	18	0	-	-	-	18	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	20	31	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan kerjasama pembangunan (dokumen)	-	8 dokumen	13	5,579.86	19	8,020.48	40	13,600.34	Badan Perencanaann Pembangunan Daerah,Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	20	32	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah (perda)	13 Perda	36	24	123,963.17	25	144,922.17	85	268,885.34	Sekretariat DPRD
1	20	33	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dilaksanakan (%)	60%	68	76	1,304.38	84	596.72	84	1,901.10	Inspektorat
1	20	34	Program Penataan dan Penyempurnaan	Jumlah penyusunan kebijakan sistem dan prosedur	1 SOP	3	2	193.24	3	61.20	8	254.44	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	pengawasan yang dibuat (SOP)									
1	20	35	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (%)	70	76	82	241.55	88	554.64	88	796.19	Inspektorat
1	20	36	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan IPK	N/A	4	4.5	1,787.49	5	1,147.54	5	2,935.02	Inspektorat
1	20	37	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota (% jumlah kab/kota yang memperoleh opini WTP)	90	100	100	1,939.27	100	1,910.45	100	3,849.72	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	38	Program Peningkatan Sistem, Akuntansi dan Pertanggungjawaban	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kab/Kota yang akuntabel (%)	100	100	100	-	100	450.84	100	450.84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	39	Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina (Kab/Kota)	0	12	12	3,831.19	12	4,398.89	12	8,230.08	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	40	Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase peningkatan kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana (%)	0	6	5	6,989.05	10	2,449.00	21	9,438.05	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	41	Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan	Meningkatnya Pendidikan dan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat Provinsi Riau (orang/kali/kegiatan)	0	2957/5/3	3000/11/2	2,751.74	3050/12/2	15,264.78	9007/28/7	18,016.52	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	42	Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama	Jumlah penerima manfaat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama (orang)	0	1497	1425	64,371.78	1425	10,809.79	4347	75,181.58	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	43	Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Agama	Jumlah penerima manfaat peningkatan kualitas pendidikan dan agama (orang dan instansi)	0	3000 orang 12 Instansi	3000 orang 12 Instansi	-	3030 orang 12 Instansi	1,109.29	9030 orang 36 Instansi	1,109.29	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	44	Program Bantuan Pembinaan dan Peningkatan SDM	Jumlah penerima manfaat pembinaan dan peningkatan SDM (paket)	0	4	4	-	4	726.77	12	726.77	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	45	Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase sosialisasi dan penegakan peraturan daerah (6 Perda dan 24 kali/tahun) (%)	100	100	100	579.73	100	1,606.55	100	2,186.28	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	46	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	100	11,160.65	100	12,669.62	100	23,830.27	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan bangsa Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	47	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (jumlah patroli wilayah terhadap rawan gangguan sebanyak 48 kali dan Jumlah gangguan trantibum yang ditanggapi oleh tim reaksi cepat satpol pp sebanyak 24 kali dalam 1 tahun) (%)	100	100	100	1,372.50	100	1,468.85	100	2,841.35	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	48	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegak Hukum (Perda)	Persentase aset yang diawasi dan ditertibkan sebanyak 20% dalam 1 tahun	NA	100	100	-	100	734.42	100	734.42	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	49	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum (%)	100	100	100	2,364.42	100	4,619.76	100	6,984.18	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	50	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	meningkatnya jumlah pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Provinsi Riau (kali)	0	10	10	289.86	10	1,124.77	30	1,414.64	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
1	20	51	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	NA		424	845.43	374	1,722.87	798	2,568.30	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	52	Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung	Jumlah Masyarakat / mahasiswa Riau yang difasilitasi dalam satu tahun Anggaran (orang/kali)	0 orang, 0 kali	5/22	1900/21	4,633.56	2280/23	6,778.85	4185/ 66	11,412.41	Badan Penghubung
1	20	53	Program Peningkatan Pelayanan Dan Koordinasi Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebudayaan di anjungan Riau yang dipelihara (Rumah)	NA	0	4	-	4	321.36	8	321.36	Badan Penghubung
1	20	54	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Terlaksananya kerjasama antar Daerah (dokumen)	0	1	N/A	-	N/A		1	-	Badan Penghubung
1	20	55	Program pengembangan Konservasi Budaya tidak benda Anjungan Riau TMII (UNESCO)	Terlaksananya pagelaran seni budaya di Jakarta (kegiatan)	0	3	N/A	-	N/A		3	-	Badan Penghubung
1	20	56	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengelolaan Fasilitas Budaya Anjungan Riau (area/unit/orang)	0 area, 0 unit, 0 orang	-	8/5/140	-	6/5/140	14,140.01	14/10/280	14,140.01	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif ,Badan Penghubung
1	20	57	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dipergelarkan (orang/kali)	0 orang, 0 kali	-	29/27	8,925.84	29/31	2,228.12	58/58	11,153.96	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penghubung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun	300	633	844	-	879	8,195.71	879	8,195.71	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	58	Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI	Terwujudnya Pembinaan Organisasi KORPRI diseluruh kab/kota se- Provinsi Riau (orang PNS)	NA	0	500	-	1,000	3,638.55	1,500	3,638.55	Sekretariat KORPRI
1	20	59	Program Pembinaan Jasmani dan Rohani Anggota KORPRI	Terwujudnya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani anggota KORPRI melalui lembaga dibawah KORPRI Prov. Riau (lembaga)	NA	0	2	-	3	1,555.04	5	1,555.04	Sekretariat KORPRI
1	20	60	Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum	Meningkatnya Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Advokat (orang)	NA	0	733	-	1466	1,227.43	2,199	1,227.43	Sekretariat KORPRI
1	20	61	Program Pengembangan Motivasi dan Informasi	Meningkatnya Jumlah anggota yang mengikuti sosialisasi dan asistensi (orang)	NA	0	130	-	260	1,235.47	390	1,235.47	Sekretariat KORPRI
1	20	62	Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama	Meningkatnya jumlah usaha - usaha bisnis yang di kelola KORPRI atau lembaga lain dibawah KORPRI (usaha bisnis)	1 usaha bisnis	1	1	-	2	98.19	2	98.19	Sekretariat KORPRI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	63	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Aturan Hukum (%)	0%	10	15	1,140.13	20	9,412.10	20	10,552.22	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat
1	20	64	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Terlaksananya fasilitasi pindah/purna tugas PNS (kegiatan)	0	4	N/A	-			4	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	65	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan (orang)	105	240	391	-	401	6,745.22	401	6,745.22	Biro Administrasi Pembangunan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	66	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar (%)	75	75	80	-	85	1,730.49	85	1,730.49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	67	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi (%)	79	80	82	-	84	1,603.49	84	1,603.49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	68	Program Peningkatan Ketatalaksanaan	Jumlah layanan kinerja yang dapat disosialisasikan (Kab/kota)	12 kab/kota	12	12	-	12	1,044.43	12	1,044.43	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	20	69	Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersedia (dokumen)	12 Dokumen	12	12	806.78	12	2,079.94	12	2,886.72	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	20	70	Program Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama yang dapat dikembangkan stakeholders terkait (%)	-	25	50	178.75	65	643.62	65	822.37	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	20	71	Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok masyarakat dan lembaga penyiaran yang terlibat (Kab/kota)	12 kab/kota	12	12	-	12	1,243.50	12	1,243.50	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	21		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					31,495.71		1,004,982.91		1,036,478.62	
1	21	01	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemerintah Desa yg Akuntabel (%))	5	8	3	6,074.56	3	7,552.05	14	13,626.61	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	21	02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Tingkat kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (%)	5	8	3	5,718.41	3	8,078.73	14	13,797.14	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	21	03	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rasio tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (%)	5	8	3	2,440.45	3	2,374.52	14	4,814.97	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	21	04	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan lembaga ekonomi desa	5	8	3	426.10	3	779,677.57	14	780,103.67	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	21	05	Program pengembangan komunitas perumahan pedesaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pengembangan resetlemen di kabupaten/kota (%)	0	2	2	-	4	13,221.44	8	13,221.44	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	21	06	Program pembangunan Infrastruktur jalan perdesaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan desa di kabupaten/kota (%)	0	2	2	-	1.033	194,078.59	1.033	194,078.59	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	21	07	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terlaksananya resetlemen pemukiman (kegiatan)	0	3	N/A	16,836.19	N/A	-	3	16,836.19	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	22		SOSIAL					63,060.88		237,676.29		300,737.17	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	22	01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil PMKS lainnya (KK) Pembinaan Pendamping, Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	391/1750/1	0/2097/1	649/2458/1	4,749.11	649/2628/2	7,924.12	1689/8933/2	12,673.23	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	22	02	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang)	432	1,595	1,526	2,765.77	1,991	6,720.74	5,112	9,486.51	Dinas Sosial
1	22	03	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas Penyelenggara kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	736	1,424	1,380	3,661.93	1,470	4,291.79	4,274	7,953.72	Dinas Sosial
1	22	04	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Terselenggarakannya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial (orang)	1,790	5,020	2,605	4,565.34	2,640	4,551.90	10,265	9,117.23	Dinas Sosial
1	22	05	Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Meningkatnya Pelayanan Sosial di Panti (orang)	190	425	220	7,149.95	225	9,562.80	870	16,712.75	Dinas Sosial
1	22	06	Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesejahteraan sosial terlatih (orang)			60	966.21	120	2,524.58	180	3,490.79	Dinas Sosial
1	22	07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana (%)	60.00	70	80	338.17	85	2,390.70	85	2,728.87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	22	08	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terantisipasinya resiko korban akibat kejadian bencana (%)	40.00	50	55	8,636.54	60	171,077.86	60	179,714.40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
1	22	09	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (%)	38.75	52.50	62.50	30,227.85	72.50	18,037.75	72.50	48,265.60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	22	10	Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana (%)	45.00	55	65	-	75	7,264.67	75	7,264.67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	22	11	Program Peringatan Dini	Terantisipasinya resiko akibat kejadian bencana (%)	40.00	50	60	-	70	2,432.78	70	2,432.78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	22	12	Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam	45.00	50	60	-	65	896.61	65	896.61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	22	13	Program Perencanaan Umum	Tersedianya dokumen penanggulangan bencana (dokumen)	0	2	N/A	-	N/A	-	2	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	23		KEBUDAYAAN					12,359.75		15,028.90		27,388.65	
1	23	01	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal (%)	25%		55	-	70	15,028.90	70	15,028.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	23	02	Program Pengembangan nilai budaya	Tersedianya informasi dan pelaksanaan workshop tentang kebudayaan melayu (kegiatan)	0	4	N/A	-	N/A	-	4	-	Dinas Pariwisata dan Eknomi Kratif
1	23	03	Program Pagelaran Seni Budaya Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pagelaran seni budaya daerah (kegiatan)	0	6	N/A	-	N/A	-	6	-	Badan Penghubung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	23	04	Program Pelestarian Budaya	Tersedianya informasi, sarana dan prasarana tentang seni budaya melayu Riau (kegiatan)	0	32	N/A	12,359.75	N/A	-	32	12,359.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	24		STATISTIK					11,518.43		12,497.95		24,016.38			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	24	01	Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen (dokumen)	51 Paket	51	51	11,518.43	51	12,497.95	51	24,016.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Cipta Karya tata ruang dan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretaris KORPRI, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Penghubung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bina Marga, Sekretariat KPID, Dinas Kehutan
1	25		KEARSIPAN					1,254.14		5,814.90		7,069.04	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab	
							2015		2016					
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	25	01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatkan jumlah institusi (Pemerintah dan Swasta) dalam pelaksanaan administrasi kearsipan (berkas)	16.630 Berkas, 8 Spesifikasi, 0 Unit, 5 SKPD, 4	16,680	50	338.17	50	901.61	16,780	1,239.78	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas	
1	25	02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan (SKPD)	0 Gedung, 162 Org, 3x Keg, 1 Pedoman, 0 SKPD, 5 Set/unit	-	3	289.86	3	2,499.50	6	2,789.36	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1	25	03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatkan jumlah koleksi arsip di lembaga kearsipan (kegiatan)	1 Sistem, 12 Kab/Kota,	-	2	338.17	2	1,160.48	4	1,498.65	Badan Perpustakaan, Arsip dan	
1	25	04	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Menigkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan (keg/jenis)	3x Keg, 2 Jenis	4/2	1/2	96.62	1/2	446.34	6/6	542.96	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1	25	05	Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi	Terwujudnya penyusunan dan pembinaan dokumentasi yang dikelola oleh tenaga profesional dengan dukungan pelayanan dokumentasi yang terstruktur dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dengan perangkat yang memenuhi standar dan mengikuti		0	60/100	0/100	191.31	0/100	806.98	60/300	998.29	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26		PERPUSTAKAAN					1,256.07		14,934.49		16,190.56		
1	26	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya gemar membaca dengan dukungan bahan pustaka yang berkualitas dan TIK yang Mutakhir (eks)		720,000	28,655	0	-	0	28,655	-	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	26	02	Program Penyediaan Infrastruktur TI dan SI Perpustakaan	Terwujudnya Perpustakaan yang modern sebagai pusat pengembangan budaya melayu dengan dukungan TIK dan SI (paket)	1 paket	1	0	-	0		1	-	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	03	Program Pelestarian dan Penyelematan Literatur Kebudayaan Riau	Terwujudnya Layanan Perpustakaan yang intensive dan sosialisasi perpustakaan dengan konsep promosi yang kreative (kegiatan)	12 bulan	1	0	-	0		1	-	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	04	Program Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Terwujudnya pelayanan perpustakaan dalam bentuk bimbingan perpustakaan keliling, stock opname, dan koordinasi antar perpustakaan (orang/pos/judul/eks/lap oran)	0	36/20/83.00 0 /720.000/3	0	-	0		36/20/83.00 0 /720.000/3	-	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	05	Program Pengembangan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan, Pelayanan, Pelestarian fisik dan Pemanfaatan TIK menuju Perpustakaan bernuansa Melayu (pengunjung)	234.439 Pengunjung	234,439	260,462	1,062.83	286,508	14,755.95	781,409	15,818.78	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	26	06	Program Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan dalam bentuk bimbingan pemakai, layanan perpustakaan keliling, koordinasi dan kerjasama antar perpustakaan, dan gerakan minat baca masyarakat dengan target peningkatan perpustakaan yang terakreditasi dan standar operasional prosedur serta	3 keg Monitoring, Inventarisasi Perpus, Nomor Pokok Perpus Kab/Kota	-	20	193.24	20	178.54	40	371.78	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2			URUSAN PILIHAN					578,747.65		452,752.12		1,031,499.78	
2	01		KELAUTAN DAN PERIKANAN					34,997.69		127,866.13		162,863.82	
2	01	01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	74,343.01	86,451.79	123,471.75	12,054.67	154,290.60	89,704.14	154,290.60	101,758.81	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil tangkapan perairan laut (ton)	127,415	130,312	133,209	9,809.49	136,106	15,736.55	136,106	25,546.04	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	03	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Produksi Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun	39	40	41	4,848.29	42	6,190.31	42	11,038.61	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	04	Program Pegembangan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10	28	-	-	-	-	28	-	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	01	05	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10	10	26	1,787.49	34	2,251.33	34	4,038.82	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	06	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang)	98	196	-	-	-	-	196	-	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	07	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Meningkatnya Kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang)	98	98	98	4,053.25	98	12,229.68	294	16,282.93	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	08	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (%)	10	12	-	-	-	-	20	-	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01	09	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (%)	10	-	14	2,444.51	16	1,754.11	16	4,198.62	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	02		PERTANIAN					231,708.98		122,830.15		354,539.13	
2	02	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)				15,029.38		4,048.51		19,077.89	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Peternakan dan
			- Tanaman Pangan		115.80	116.03	116.26		116.50		116.96		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				- Tanaman Hortikultura - Komoditi dan Perkebunan	120.62	120.86	121.11		121.35		121.83		Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan
2	02	02	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Ragam Pemasaran Produk Pertanian (komoditi) dan	10	11	12	8,550.95	13	5,967.19	13	14,518.14	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan
				Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan petani (unit)	20	40	20	1,545.93	20	25,825.15	80	27,371.09	Dinas Perkebunan
2	02	03	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian (%)	60	62	64	28,438.43	66	28,504.81	66	56,943.24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Terwujudnya pengembangan teknologi yang diterapkan dalam pengembangan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta sarana dan prasarana paket teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (Teknologi)	0		N/A	-	7	5,226.86	7	5,226.86	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2	02	04	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Pertanian (ton/ekor)	-	-	N/A	91,401.93	-	28,767.98	-	120,169.90	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan
2	02	05	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang dikembangkan (unit)	123 Unit	185	200	-	202	1,912.56	587	1,912.56	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
2	02	06	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan angka kematian ternak (%)	2.50	2.25	2.00	8,903.65	1.60	7,009.56	1.60	15,913.21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	02	07	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase tingkat konsumsi produk asal ternak terutama daging (kg/perkapita pertahun)	6,72 kg/perkapita pertahun	7.22	8.42	69,636.62	9.32	4,667.41	9.32	74,304.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,Dinas Pertanian dan Peternakan/ Perkebunan
2	02	08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah skim kredit yang disalurkan (Rp Milyar)	25	28	30	2,892.83	38	2,517.35	38	5,410.18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,Dinas Pertanian dan Peternakan/ Perkebunan
2	02	09	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (orang)	2130	2,130	1,441	5,309.26	1,452	6,649.99	5,023	11,959.25	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2	02	10	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Terlaksananya penyuluhan pertanian,perikanan dan Kehutanan (kegiatan)	0	26	N/A	-	N/A	-	26	-	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2	02	11	Program Bantuan Pengembangan Pekarangan (untuk rumah layak huni)	Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pemakai air oleh penyuluh pertanian serta asosiasi penyuluh (kelompok)	690 kelompok	769	400	-	500	1,732.78	1,669	1,732.78	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2	03		KEHUTANAN				13,671.86		37,895.77		51,567.63				
2	03	01	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Usaha ekonomi masyarakat miskin (Kelompok)	11	16	6	-	6	1,445.90	39	1,445.90	Dinas Kehutanan		
2	03	02	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa sekitar hutan (desa)	9	14	6	-	6	1,675.40	35	1,675.40	Dinas Kehutanan		
2	03	03	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	759,773	760,273	600	3,178.83	600	8,028.17	761,473	11,206.99	Dinas Kehutanan		
2	03	04	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Tertanganinya tindak pidana perusakan kawasan hutan (kasus)	32	37	7	4,362.43	7	9,075.94	83	13,438.38	Dinas Kehutanan		
2	03	05	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi (unit)	66	67	2	4,246.49	2	4,636.05	71	8,882.54	Dinas Kehutanan		
2	03	06	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (unit)	21	24	4	1,159.45	4	2,567.42	32	3,726.87	Dinas Kehutanan		
2	03	07	Program perencanaan dan pengembangan Baton	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	4	5	1	-	1	3,556.43	7	3,556.43	Dinas Kehutanan		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	03	08	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	4	5	1	-	1	4,385.88	7	4,385.88	Dinas Kehutanan
2	03	09	Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri	Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin	38	38	2	338.17	-	-	40	338.17	Dinas Kehutanan
2	03	10	Perencanaan dan Pengembangan Baton	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	4 Dokumen	4		386.48			4	386.48	Dinas Kehutanan
2	03	11	Program Optimalisasi Peran Badan Usaha Bidang Kehutanan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran badan usaha bidang kehutanan dalam pembangunan (unit)	58	59	2	-	2	2,524.58	121	2,524.58	Dinas Kehutanan
2	04		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					57,983.08		46,776.39		104,759.47	
2	04	01	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tersedianya laporan pengawasan dan pembinaan pertambangan mineral batubara (Dokumen)	222	444	225	3,757.80	91	5,652.54	760	9,410.34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	04	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedinnya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms)	1,909	2,787	1,581	54,225.28	10	5,618.38	4,378	59,843.66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	04	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit)	0	N/A	1,584	-	1,583	27,155.24	3,167	27,155.24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	04	04	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	Tersedianya sumur air dalam, evaluasi geologi wilayah dan evaluasi/monitoring migas (dokumen dan unit)	2	2	-	-	113	5,663.82	115	5,663.82	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	04	05	Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi	Tersusunnya fasilitas data pendukung pembangunan ESDM dan Sertifikasi UPT Laboratorium dan Pengujian ESDM (dokumen)	3	6	-	-	61	2,686.41	67	2,686.41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	04	06	Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terciptanya tertib administrasi perizinan ABT-AP serta terpenuhinya ketentuan teknis dan kaidah yang berlaku terhadap pemanfaatan ABT-AP	1	2	N/A	-	N/A	-	2	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	05		PARIWISATA					134,508.86		43,037.98		177,546.84	
2	05	01	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (destinasi)	3 Destinasi	N/A	16	90,703.84	16	4,743.15	32	95,446.99	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	05	02	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah tenaga SDM profesi pariwisata yang disertifikasi (orang)	26 Orang	26	200	2,463.83	200	1,530.05	426	3,993.88	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	05	03	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif (kelompok)	8 Kelompok	8	8	-	32	979.23	40	979.23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah desa wisata yang dikembangkan (desa)	26 Desa	26	26	-	38	2,907.09	64	2,907.09	
2	05	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, disain dan IPTEK (paket)	0 Paket	-	5	2,802.01	10	4,590.15	15	7,392.15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	05	05	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (paket)	11 Paket	11	23	14,783.00	25	1,530.05	59	16,313.05	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	05	06	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,Jumlah Event Pariwisata dan Ekraf, dan Lama tinggal	45.988 Orang	48,633	51,430	21,812.17	54,388	4,287.96	54,388	26,100.13	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				(event)	2 Event	2	6		26	21,229.43	34	21,229.43	
				(hari)	3.68 Hari	4	4		4	1,240.87	4	1,240.87	
2	05	07	Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi/ publikasi pengembangan pariwisata (kegiatan)	0	3	N/A	1,944.01				1,944.01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	06		INDUSTRI				14,976.24		30,696.94		45,673.18		
2	06	01	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan jumlah produk IKM yang mampu bersaing (IKM)	7,117	7,517	400	4,106.39	400	4,124.17	8,317	8,230.56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016				
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	06	02	Program Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri (kajian)	8	9	13	7,005.02	10	2,295.07	32	9,300.09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	03	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kemampuan Teknologi Produksi Tepat guna/alsintan (PU)	223	236	284	483.10	290	9,373.11	290	9,856.22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	04	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru (Unit Usaha)	25	30	35	3,381.73	40	10,998.68	40	14,380.41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	05	Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan berbasis Teknologi	Meningkatnya Industri Agro dan Industri Unggulan	0	N/A	N/A	-	1	3,905.91	1	3,905.91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07		PERDAGANGAN				89,161.77		15,106.33		104,268.10		
2	07	01	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terciptanya Tertib Ukur di segala Bidang dan Perlindungan konsumen (Alat UTTP dan Jumlah Toko)	5000	N/A	5100	1,401.00	5200	3,374.32	5200	4,775.32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	02	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai dan Komoditas Ekspor (Juta US\$)	20.196	21.206	22.266	9,499.77	23.379	8,926.77	23.379	18,426.54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	03	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Stabilisasi Harga Bahan Pokok (Laju Inflasi(%))	6.83	6.67	6.51	78,261.00	6.34	1,912.56	6.34	80,173.56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2013 (CEK)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada sebelum Perubahan RPJMD (2015 - 2016)		SKPD Penanggung Jawab		
							2015		2016		Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
2	07	04	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Terciptanya Kerjasama Perdagangan Internasional (MOU)	0	N/A		-	1	892.68	1	892.68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
2	08		KETRANSMIGRASIAN				1,739.18		28,542.44		30,281.61				
2	08	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang terbangun (unit)	30	105	25	869.59	80	24,971.73	210	25,841.31	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan		
2	08	02	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah kepala Keluarga yang diberdayakan dalam kelompok ekonomi Masyarakat (KK)	598	1,251	678	869.59	758	3,570.71	2,687	4,440.30	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan		
TOTAL								10,718,616.47		10,671,531.98		21,390,148.45			

TABEL 7.2
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017-2019
PROVINSI RIAU

Kode	Kapasitas Riil / Belanja		Proyeksi		
			2017	2018	2019
			Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		KAPASITAS RIIL KEUANGAN			
		BELANJA	9,804,380.79	9,887,577.70	8,898,504.09
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,891,952.44	5,802,920.36	5,138,228.10
	1	Belanja Pegawai	2,088,441.38	2,374,176.46	2,444,284.24
	2	Belanja Bunga	-	-	-
	3	Belanja Subsidi	-	-	-
	4	Belanja Hibah	1,293,607.02	1,466,411.10	1,067,696.33
	5	Belanja Bantuan Sosial	10,000.00	36,400.00	10,000.00
	6	Belanja Bagi Hasil	1,346,603.72	1,361,533.96	1,361,533.96
	7	Belanja Bantuan Keuangan	143,300.31	528,398.85	244,713.58
	8	Belanja Tidak Terduga	10,000.00	36,000.00	10,000.00
		BELANJA LANGSUNG	4,912,428.35	4,084,657.34	3,760,275.99

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019						
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			BELANJA DAERAH		9,804,380.79		9,887,577.70		8,898,504.09		28,590,462.59		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG		4,891,952.44		5,802,920.36		5,138,228.10		15,833,100.91		
		1	Program Pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah Pegawai (orang)	17,615	2,088,441.38	18,050	2,374,176.46	18,485	2,444,284.24	18,485	6,906,902.08	Seluruh SKPD
		2	Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintah Desa	Jumlah kabupaten/kota yang menerima dana Bagi Hasil	12	1,346,603.72	12	1,361,533.96	12	1,361,533.96	12	4,069,671.64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3	Program Belanja Tidak Terduga	Persentase tersalurnya Belanja Tidak Terduga	N/A	10,000.00	N/A	36,000.00	N/A	10,000.00	N/A	56,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		4	Program Belanja Subsidi	Jumlah lembaga penerima Subsidi	-	-		-		-		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Program Belanja Hibah	Jumlah Lembaga penerima bantuan (lembaga)	-	1,293,607.02	-	1,466,411.10	-	1,067,696.33	-	3,827,714.45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		6	Program bantuan sosial	Jumlah penerima bantuan sosial (orang)	-	10,000.00	-	36,400.00	-	10,000.00	-	56,400.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
		7	Program bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan pemerintahan desa	Jumlah kabupaten/kota yang menerima bantuan	12	143,300.31	12	528,398.85	12	244,713.58	12	916,412.74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			BELANJA LANGSUNG			4,912,428.35		4,084,657.34		3,760,275.99		12,757,361.68	
1			URUSAN WAJIB			3,919,738.53		3,378,646.71		3,092,647.61		10,391,032.86	
1	1		WAJIB PELAYANAN DASAR			3,560,125.74		3,134,897.58		2,868,521.84		9,563,545.16	
		01	PENDIDIKAN			742,474.04		744,627.62		621,369.58		2,108,471.24	
			DINAS PENDIDIKAN			742,474.04		744,627.62		621,369.58		2,108,471.24	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	18,710.90	100	11,578.45	100	11,578.45	100	41,867.79	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	1,650.00	100	1,493.50	100	1,269.48	100	4,412.98	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	1,428.00	100	650.00	100	552.50	100	2,630.50	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	93.5	550.00	-	-	-	-	93.5	550.00	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C (%)	76.51	373,463.93	79.80	373,351.50	82.44	298,681.20	82.44	1,045,496.64	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C (%)	63.28		68.10		73.26		73.26		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi		237,251.91		83,667.54		48,527.18		369,446.63	DINAS PENDIDIKAN
				SD/MI (%)	83.00		84.00		85.00		85.00		
				SMP/MTs (%)	69.60		70.60		71.60		71.60		
				SMA/MA (%)	80.30		81.30		82.30		82.30		
				SMK (%)	49.80		50.80		51.80		51.80		
				APK Perguruan Tinggi (%)	30.00		34.18		38.36		38.36		
				Persentase Kegiatan pusat dan Daerah yang terfasilitasi (%)	100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APK SD/MI/SDLB/Paket A	115.80%	109,419.30	116.20%	31,252.03	116.80%	18,126.18	116.80%	158,797.51	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI/SDLB/Paket A	95.09%		95.73%		96.37%		96.37%		
				APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	107.50%		108.10%		109.10%		109.10%		
				APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	90.67%		95.73%		97.50%		97.50%		
				APK SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C	76.51%		79.80%		82,44%		82,44%		
				APM SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C	63.28%		68.10%		73,26%		73,26%		
			Program Bantuan Operasional Sekolah	APK SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C	-	-	93,42	242,634.60	93,42	242,634.60	93,42	485,269.20	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK/SMA LB/Paket C	-	-	73,43		73,43		73,43		
		02	KESEHATAN			892,905.89		961,640.47		950,798.83		2,805,345.19	
			DINAS KESEHATAN			130,815.54		178,218.37		173,319.66		482,353.57	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90.00	6,199.34	100.00	5,511.34	100.00	5,511.34	100.00	17,222.01	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88.00	23,616.25	100.00	14,274.04	100.00	12,132.94	100.00	50,023.24	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96.26	1,077.53	100.00	226.05	100.00	192.14	100.00	1,495.72	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93.00	1,108.03	100.00	374.85	100.00	318.62	100.00	1,801.50	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	93.50	927.20	100.00	136.85	100.00	116.33	100.00	1,180.38	DINAS KESEHATAN
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah	70.00	1,551.66	75.00	1,680.46	80.00	1,680.46	80.00	4,912.58	DINAS KESEHATAN
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	35.00	6,832.25	38.00	4,904.04	40.00	4,904.04	40.00	16,640.33	DINAS KESEHATAN
				Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,83 per 1000 penduduk		0,85 per 1000 penduduk		0,90 per 1000 penduduk		0,90 per 1000 penduduk		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)	40	3,847.90	50	6,911.31	65	4,264.37	65	15,023.58	DINAS KESEHATAN	
			2. Persentase RS yang menerapkan PKRS (Promosi Kesehatan di RS)	30		40		50		50			
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita (%)	1.30	1,876.79	1.20	1,361.31	1.20	1,361.31	1.20	4,599.40	DINAS KESEHATAN	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	30	2,394.77	35	2,173.97	40	2,173.97	40	6,742.71	DINAS KESEHATAN	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Angka kesakitan Penyakit menular Demam Berdarah (DBD)	DBD: 48 per 100.000	8,232.48	DBD: 47 per 100.000	8,137.10	DBD: 46 per 100.000	8,137.10	DBD: 46 per 100.000	24,506.68	DINAS KESEHATAN	
			2. Angka kesakitan Penyakit menular Malaria	Malaria: 0,15 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000		Malaria: 0.1 per 1000			
			3. Persentase ODHA yang pernah mengakses layanan ARV (%)	85		87		90		87			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
				4. Case Notification Rate (CNR) semua kasus TB per 100.000 penduduk	102 per 100.000 penduduk		107 per 100.000 penduduk		112 per 100.000 penduduk		112 per 100.000 penduduk		
				5. Persentase Bayi Usia < 1 Tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)	92		93		93		93		
				6. Persentase UCI (Universal Child Immunization)	88		90		92		92		
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi (%)	50	300.00	75	280.51	80	280.51	80	861.02	DINAS KESEHATAN
				2. Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas Terakreditasi (%)	20		40		60		60		
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit	80	452.25	83	223.09	85	223.09	85	898.43	DINAS KESEHATAN
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan (per 100,000) diukur dengan Proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%)	Fasyankes : 72 % K4 : 74 %	3,234.26	Fasyankes : 74 % K4 : 76 %	2,237.93	Fasyankes : 77 % K4 : 78 %	2,237.93	Fasyankes : 77 % K4 : 78 %	7,710.12	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Angka kematian bayi dan anak (per 1,000) diukur dengan Proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)	KN 1: 89%		KN 1: 90%		KN 1: 91%		KN 1: 91%			
			Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan	96	15,504.43	97	14,917.22	98	14,917.22	98	45,338.88	DINAS KESEHATAN
			Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Fasyankes yang melaksanakan deteksi dan Tata Laksana dini faktor resiko penyakit tidak menular	60	1,050.20	70	886.33	80	886.33	80	2,822.86	DINAS KESEHATAN
				Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular									
			Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan (Tenaga Kesling, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Analis Kesehatan)	87	13,889.69	90	8,193.44	95	8,193.44	95	30,276.57	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			Persentase RSUD Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	90		90		95		95			
			Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan	Persentase Manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	73	9,013.28	76	5,638.11	78	5,638.11	78	20,289.51	DINAS KESEHATAN
			Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase Krisis kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 Jam	100	1,378.05	100	479.30	100	479.30	100	2,336.66	DINAS KESEHATAN
				Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat	65		65		68		68		
			Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan	Persentase pemeriksaan laboratorium Klinis	Lab Klinis: 45	6,250.00	Lab Klinis: 60	6,843.04	Lab Klinis: 70	6,843.04	Lab Klinis: 70	19,936.07	DINAS KESEHATAN
					Lab Lingk : 100		Lab Lingk: 100		Lab Lingk: 100		Lab Lingk: 100		
			Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase Masyarakat Miskin dan tak mampu mempunyai jaminan kesehatan melalui JKN	65	21,547.76	70	88,294.62	75	88,294.62	75	198,137.00	DINAS KESEHATAN
			Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih dengan kompetensi baik	95	531.42	95	4,533.45	95	4,533.45	95	9,598.32	DINAS KESEHATAN
				Persentase Penelitian Kesehatan yang dimanfaatkan	100		100		100		100	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			580,086.30		618,806.27		614,455.18		1,813,347.75	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	62,032.54	100	68,317.92	100	68,317.92	100	198,668.39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	20,961.75	100	8,627.75	100	7,333.59	100	36,923.08	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	2,865.49	100	2,738.29	100	2,327.55	100	7,931.33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	6,200.00	100	1,650.00	100	1,402.50	100	9,252.50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	585.09	100	198.37	100	168.62	100	952.08	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,83 per 1000 pddk	598.11	0,85 per 1000 pddk	4,304.03	0,90 per 1000 pddk	4,304.03	0 per 1000 pddk	9,206.18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar akreditasi rumah sakit	100	250.00	100	258.90	100	258.90	100	767.80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit	80	193,940.70	83	232,315.19	85	232,315.19	85	658,571.08	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	95	67,807.17	95	62,926.77	95	62,926.77	95	193,660.72	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kemandirian layanan unggulan rumah sakit	67	3,695.51	67	2,368.93	-	-	100	6,064.44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Indeks kepuasan masyarakat	75	221,149.95	83	230,000.00	82	230,000.00	82	681,149.95	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
			Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih dengan kompetensi baik	-	-	95	5,100.10	97	5,100.10	97	10,200.20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
				Persentase Penelitian Kesehatan yang dimanfaatkan	-	100	-		100				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN		100,965.63		94,742.68		93,769.28		289,477.58		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	8,435.73	100	9,702.06	100	9,702.06	100	27,839.85	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	974.82	100	537.00	100	456.45	100	1,968.27	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	832.70	100	263.35	100	223.84	100	1,319.89	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	2,647.10	100	2,651.04	100	2,253.38	100	7,551.53	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	331.94	-	-	-	-	94	331.94	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Cakupan Kunjungan pelayanan Kesehatan	27,990	3,369.71	30,789	2,343.12	33,868	2,343.12	33,868	8,055.95	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat	67	828.95	83	1,050.51	95	594.83	95	2,474.29	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase terlayannya pasien miskin yang datang ke RS	100	284.54	100	1,214.54	100	1,214.54	100	2,713.61	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit	80	48,367.32	83	57,259.41	85	57,259.41	85	162,886.14	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	94	1,253.85	95	1,291.12	96	1,291.12	96	3,836.09	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kemandirian layanan unggulan	67	650.76	-	-	-	-	67	650.76	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Indeks kepuasan masyarakat	82	32,988.21	83	17,940.54	84	17,940.54	84	68,869.28	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar akreditasi rumah sakit	-	-	100	490.00	100	490.00	100	980.00	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
			RUMAH SAKIT PETALA BUMI			81,038.42		69,873.16		69,254.71		220,166.29	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	13,355.63	100	19,733.08	100	19,733.08	100	52,821.78	RUMAH SAKIT PETALA BUMI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	1,430.00	100	999.50	100	849.58	100	3,279.08	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	1,409.25	100	303.50	100	257.98	100	1,970.73	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	2,576.80	100	2,770.00	100	2,354.50	100	7,701.30	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	317.50	100	50.00	100	42.50	100	410.00	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,83 per 1000 pddk	2,012.87	0,85 per 1000 pddk	2,324.25	0,90 per 1000 pddk	2,324.25	0 per 1000 pddk	6,661.38	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar akreditasi rumah sakit	75	580.15	75	283.00	100	283.00	100	1,146.15	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit	80	38,298.82	83	23,099.73	85	23,099.73	85	84,498.28	RUMAH SAKIT PETALA BUMI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	95	9,057.40	95	7,310.10	100	7,310.10	100	23,677.60	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Indeks kepuasan masyarakat	80	12,000.00	81	13,000.00	82	13,000.00	82	38,000.00	RUMAH SAKIT PETALA BUMI
		03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,676,263.00		1,248,635.61		1,118,200.36		4,043,098.97	
			DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,625,780.00		1,074,765.44		1,087,003.36		3,787,548.80	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	4,450.00	100	13,218.25	100	13,218.25	100	30,886.49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	2,150.00	100	1,097.00	100	932.45	100	4,179.45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	600.00	100	25.00	100	21.25	100	646.25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	700.00	100	282.19	100	239.86	100	1,222.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	500.00	-	-	-	-	100	500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (km)	1,486.68	1,113,650.00	1,615.08	529,359.68	1,665.93	541,808.23	1,665.93	2,184,817.91	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Jembatan provinsi Dalam Kondisi baik (unit)	28		28		28		28	-	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara (km)	903.2	263,650.00	2,217	78,900.67	2,417	78,900.67	2,417	421,451.34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Jembatan Provinsi yang dipelihara (m)	600		600		600		1,800	-	
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan (Dokumen)	12	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Pengujian Material/Bahan Konstruksi	Persentase kualitas mutu	95	250.00	-	-	-	-	-	250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang (Dokumen)	1	500.00	-	-	-	-	-	500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (Bangunan)	10	43,000.00	15	412,050.72	17	412,050.72	42	867,101.44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Penataan Ruang	Jumlah ruang kawasan strategis provinsi yang ditata/ditingkatkan kualitasnya (Kawasan)	1	5,000.00	-	-	-	-	1	5,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya dalam kondisi baik (Km)	130	22,430.00	105	673.85	112	673.85	112	23,777.70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas sungai, danau dan sumber daya air lainnya dalam kondisi baik (Km)	0.4	8,800.00	0.4	100.00	0.5	100.00	0.5	9,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Pengendalian Banjir	Luas wilayah sungai dan pantai dalam kondisi baik (Km)	1.7	45,200.00	1.3	17,058.09	1.4	17,058.09	1	79,316.18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Ke - PU - an	Persentase peningkatan perangkat pendukung teknis ke PU -an	100	7,200	-	-	-	-	100	7,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Panjang jaringan air minum mendukung penyehatan PDAM (Km)	18	105,200.00	18	22,000.00	19	22,000.00	55	149,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			49,050.00		173,870.17		31,197.00		254,117.17	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan strategis yang ditingkatkan infrastrukturnya (kawasan)	1	10,150.00	4	48,226.12	1	11,249.00	5	69,625.12	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman Pedesaan (m')	40,000	20,000.00	-	-	-	-	40	20,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan lingkungan kawasan permukiman Perkotaan (m')	35,000	18,000.00	37,000	125,644.05	40,500	19,948.00	112,500	163,592.05	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Ke - PU - an	Persentase peningkatan perangkat pendukung teknis ke PU -an	100	900	-	-	-	-	100	900.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			433.00		-		-		433.00	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Laut Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	1	433.00	-	-	-	-	1	433.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,000.00		-		-		1,000.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah fasilitasi perencanaan tata ruang	4	1,000.00	-	-	-	-	4	1,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			199,978.00		133,265.13		133,107.15		466,350.28	
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			157,828.00		118,265.13		118,107.15		394,200.28	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	10,040.00	100	2,656.57	100	2,656.57	100	15,353.14	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	1,555.00	100	506.35	100	430.39	100	2,491.74	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	1,210.00	100	57.50	100	48.88	100	1,316.38	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	525.00	-	-	-	-	93	525.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,148.00	100	489.39	100	415.98	100	2,053.37	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Pengembangan Perumahan	Jumlah sarana perumahan kawasan permukiman strategis yang diadakan (unit)	2,000	143,000.00	2,151	114,555.33	2,200	114,555.33	6,351	372,110.65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah dokumen lingkungan sehat perumahan (dokumen)	1	350.00	-	-	-	-	1	350.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			42,150.00		15,000.00		15,000.00		72,150.00	
			Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Panjang saluran drainase (Km)	10	42,150.00	8	15,000.00	9	15,000.00	27	72,150.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN M			22,143.27		12,933.04		12,898.57		47,974.88	
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			22,143.27		12,933.04		12,898.57		47,974.88	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90.00	2,596.99	100.00	1,683.08	100.00	1,683.08	100.00	5,963.15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88.00	1,154.00	100.00	156.88	100.00	133.35	100.00	1,444.23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96.26	1,945.52	-	-	-	-	100.00	1,945.52	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93.00	425.20	100.00	72.90	100.00	61.97	100.00	560.07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	93.50	1,152.64	-	-	-	-	100.00	1,152.64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100.00	10,361.25	100.00	10,578.79	100.00	10,578.79	100.00	31,518.83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100.00	675.00	-	-	-	-	100.00	675.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	Persentase aparatur Satpol PP yang sigap, tanggap, dan terlatih	100.00	1,822.80	100.00	387.90	100.00	387.90	100.00	2,598.60	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Jumlah peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemananan	424.00	721.84	-	-	-	-	424.00	721.84	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Peningkatan pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Provinsi Riau	10 kali	415.00	-	-	-	-	10 kali	415.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah operasional penanganan gangguan bencana alam yang dilakukan TRC	70.00	295.00	-	-	-	-	70.00	295.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Perda/Perkada yang disosialisasikan dan ditegakkan	100.00	578.02	100.00	53.49	100.00	53.49	100.00	685.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		06	SOSIAL			26,361.54		33,795.71		32,147.36		92,304.61	
			DINAS SOSIAL			25,611.54		33,528.73		31,880.38		91,020.66	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,854.60	100	2,213.64	100	2,213.64	100	7,281.88	DINAS SOSIAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	2,015.00	100	10,949.00	100	9,306.65	100	22,270.65	DINAS SOSIAL
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	250.00	100	20.00	100	17.00	100	287.00	DINAS SOSIAL
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	50.00	100	20.00	100	17.00	100	87.00	DINAS SOSIAL
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	693.92	-	-	-	-	94	693.92	DINAS SOSIAL
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang diberdayakan dan jumlah masyarakat miskin (KK) yang dibantu (jumlah PMKS/Dokumen)	154/2	920.00	154/2	1,759.70	154/2	1,759.70	154/2	4,439.40	DINAS SOSIAL
			Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1,500	5,661.00	1,500	3,427.06	1,500	3,427.06	1,500	12,515.11	DINAS SOSIAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS serta Pendamping yang diberdayakan	1,520	1,827.00	1,268	5,238.13	1,290	5,238.13	1,290	12,303.25	DINAS SOSIAL
			Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial	2,725	3,149.02	2,725	3,069.34	2,760	3,069.34	8,210	9,287.70	DINAS SOSIAL
			Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Jumlah PMKS yang dilayani melalui Panti	225	7,391.00	225	5,831.87	230	5,831.87	230	19,054.74	DINAS SOSIAL
			Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial	Jumlah PSKS yang terlatih (orang)	120	800.00	120	1,000.00	120	1,000.00	360	2,800.00	DINAS SOSIAL
			SEKRETARIAT DAERAH			750.00		266.98		266.98		1,283.95	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial	20	750.00	20	266.98	20	266.98	20	1,283.95	SEKRETARIAT DAERAH
1	2		WAJIB NON PELAYANAN DASAR			359,612.80		243,749.13		224,125.77		827,487.70	
		01	TENAGA KERJA			31,634.33		24,462.40		24,186.40		80,283.12	
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			30,534.33		24,287.14		24,011.14		78,832.61	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	4,283.80	100	3,167.54	100	3,167.54	100	10,618.88	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	3,545.50	100	1,540.00	100	1,309.00	100	6,394.50	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	361.45	-	-	-	-	100	361.45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	174.50	100	300.00	100	255.00	100	729.50	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	730.00	-	-	-	-	100	730.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Berkualitas (orang)	2,628	13,727.50	2,650	9,639.40	2,900	9,639.40	8,178	33,006.30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (orang)	605	3,710.00	610	7,640.20	650	7,640.20	650	18,990.40	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang diawasi dan dilindungi	Kasus: 75 Perusahaan: 75	4,001.58	Kasus: 75 Perusahaan: 75	2,000.00	Kasus: 75 Perusahaan: 75	2,000.00	Kasus: 75 Perusahaan: 75	8,001.58	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			SEKRETARIAT DAERAH		1,100.00		175.25		175.25		1,450.51		
			Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	12	1,100.00	12	175.25	12	175.25	12	1,450.51	SEKRETARIAT DAERAH
	02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11,724.30		8,536.47		8,478.98		28,739.75	
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7,632.30		7,922.32		7,864.83		23,419.45	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,162.39	100	939.06	100	939.06	100	3,040.51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,355.00	100	130.92	100	111.28	100	1,597.20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	86.46	100	73.54	100	62.51	100	222.51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	93.5	290.06	100	178.79	100	151.97	100	620.82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang disosialisasikan (Kab/Kota)	2	155.00	-	-	-	-	2	155.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah kelembagaan PUG dan Anak yang dibina	1,542	3,200.66	1,740	3,300.00	1,900	3,300.00	5,182	9,800.66	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus yang ditangani	100	540.00	134	1,000.00	140	1,000.00	374	2,540.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah gender yg ditingkatkan peran sertanya (orang)	172	842.73	155	2,300.00	170	2,300.00	497	5,442.73	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			SEKRETARIAT DAERAH			4,092.00		614.15		614.15		5,320.30	
			Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Jumlah rekomendasi peningkatan kesehatan perempuan dan keluarga berencana (Dokumen)	10	4,092.00	12	614.15	12	614.15	34	5,320.30	SEKRETARIAT DAERAH
		03	PANGAN			8,836.28		7,071.33		7,030.87		22,938.48	
			DINAS KETAHANAN PANGAN			8,836.28		7,071.33		7,030.87		22,938.48	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,287.92	100	1,090.08	100	1,090.08	100	3,468.08	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	638.65	100	150.00	100	127.50	100	916.15	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	149.94	100	104.75	100	89.04	100	343.73	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	50.00	100	15.00	100	12.75	100	77.75	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	525.00	-	-	-	-	94	525.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	82,5	6,084.77	83.0	5,711.50	83,5	5,711.50	83,5	17,507.77	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Persentase penguatan cadangan pangan	75		80		85		85		DINAS KETAHANAN PANGAN
			Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	95	100.00	-	-	-	-	100	100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		04	PERTANAHAN			-		-		-		-	
		05	LINGKUNGAN HIDUP			19,047.60		11,157.85		11,044.01		41,249.46	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		18,277.60		7,857.85		7,744.01		33,879.46		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	7,291.52	100	4,610.71	100	4,610.71	100	16,512.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	2,144.00	100	346.00	100	294.10	100	2,784.10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	305.60	100	174.50	100	148.33	100	628.43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	291.00	100	28.00	100	23.80	100	342.80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,485.00	100	210.39	100	178.83	100	1,874.22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2) Jumlah Kab/Kota berwawasan lingkungan	Usaha/Kegiatan	3,870.00	Usaha/Kegiatan	1,923.41	Usaha/Kegiatan	1,923.41	Usaha/Kegiatan	7,716.82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (lokasi)	20	900.00	20	130.36	20	130.36	60	1,160.72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100	1,490.47	100	434.47	100	434.47	100	2,359.42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	20	500.00	-	-	-	-	20	500.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			770.00		3,300.00		3,300.00		7,370.00	
			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dibina (ha)	411,292.80	770.00	20 lokasi 20 ha	3,300.00	20 lokasi 20 ha	3,300.00	40 lokasi 40 ha	7,370.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3,760.45		2,196.01		2,173.55		8,130.01	
			DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3,760.45		2,196.01		2,173.55		8,130.01	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90.00	754.43	100.00	1,596.27	100.00	1,596.27	100.00	3,946.97	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88.00	50.00	-	-	-	-	100.00	50.00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96.26	20.00	-	-	-	-	100.00	20.00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	93.50	130.00	100.00	149.75	100.00	127.29	100.00	407.03	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Tenaga Penataan ADM Kependudukan yang ditingkatkan (Orang)	674.00	2,456.01	687.00	450.00	687.00	450.00	2,048.00	3,356.01	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/ Petugas Administrator Kependudukan yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)	100.00	350.00	-	-	-	-	100.00	350.00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10,366.05		14,222.15		8,882.56		33,470.75	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10,366.05		14,222.15		8,882.56		33,470.75	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,915.92	100	2,116.29	100	2,116.29	100	7,148.50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	731.00	100	419.01	100	356.16	100	1,506.17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	123.00	-	-	-	-	96	123.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	155.00	100	127.05	100	107.99	100	390.04	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,161.77	100	531.00	100	451.35	100	2,144.12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	0.1	2,659.96	0.1	2,900.00	0.1	2,947.86	0.1	8,507.82	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK)	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	747.33	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	1,280.00	BUMDes: 50 Pasar desa: 50 POSYANTEK : 30	828.22	BUMDes: 150 Pasar desa: 150 POSYANTEK : 90	2,855.55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel (%)	10	1,872.06	10	6,848.80	35	2,074.69	35	10,795.55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,239.00		1,270.00		867.30		3,376.30	
			DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,239.00		1,270.00		867.30		3,376.30	
			Program Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor KB aktif (orang)	1,740	782.60	3,870	1,270.00	4,170	867.30	4,170	2919.90	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Jumlah akseptor KB baru dengan MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (Orang)	100	303.80	-	-	-	-	460	303.8	DINAS KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Jumlah remaja yang dikonseling (orang) dan Jumlah Pusat Informasi Konseling (Unit)	36 Orang	152.60	-	-	-	-	265 Orang & 421 PIK	152.6	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		09	PERHUBUNGAN			29,142.26		29,553.52		22,511.98		81,207.76	
			DINAS PERHUBUNGAN			29,142.26		29,553.52		22,511.98		81,207.76	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	4,586.07	100	4,668.55	100	4,668.55	100	13,923.17	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,888.40	100	3,125.10	100	2,055.00	100	7,068.50	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	538.23	100	229.80	100	195.33	100	963.36	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	865.60	100	903.00	100	767.55	100	2,536.15	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	442.85	100	350.25	100	297.71	100	1,090.81	DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas yang dibangun	3	350.00	3	246.92	3	246.92	9	843.84	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang dipelihara	46.90	1,236.62	23.58	2,319.71	23.58	1,000.00	94.06	4,556.33	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase terselenggaranya pelayanan angkutan umum	63.48	646.33	63.48	1,748.82	73.48	716.28	73.48	3,111.43	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun	17.24	1,471.73	23.58	3,150.00	23.58	2,650.00	64.40	7,271.73	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas perlengkapan keselamatan yang terpasang	10.73	13,216.44	16.50	7,711.00	46.94	7,711.00	46.94	28,638.44	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase penurunan pelanggaran	21.43	950.00	17.14	1,050.00	14.29	700.00	14.29	2,700.00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Jumlah dokumen perencanaan sarana penunjang transportasi	2	2,950.00	6	4,050.37	2	1,503.63	10	8,504.00	DINAS PERHUBUNGAN
		10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			48,449.25		28,887.57		28,069.38		105,406.19	
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			35,540.33		16,648.31		16,431.44		68,620.08	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,638.27	100	1,642.70	100	1,642.70	100	4,923.66	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	2,053.90	100	793.40	100	674.39	100	3,521.69	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	240.00	-	-	-	-	100	240.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	647.71	100	400.00	100	340.00	100	1,387.71	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	708.64	100	252.40	100	214.54	100	1,175.57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	1. Jumlah masyarakat yang memahami komunikasi dan informatika 2. Jumlah aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	aparatur: 424 masyarakat: 3216	1,942.52	aparatur: 424 masyarakat: 3096	2,285.57	aparatur: 424 masyarakat: 3096	2,285.57	aparatur: 450 masyarakat: 3180	6,513.67	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terpasang (titik jaringan)	51	12,669.97	51	4,485.53	54	4,485.53	54	21,641.03	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi informatika	50	5,176.72	60	3,350.06	70	3,350.06	70	11,876.85	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	47	7,798.36	57	3,352.55	67	3,352.55	67	14,503.46	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi	47	150.00	-	-	-	-	47	150.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Peningkatan Ketatalaksanaan	Presentase standar operasional prosedur (SOP)	70	150.00	-	-	-	-	70	150.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang tersedia	12 Dokumen	1,206.04	-	-	-	-	12 Dokumen	1,206.04	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Kerjasama Antar Lembaga	Persentase kerjasama antar lembaga yang dapat dikembangkan stakeholder	70	150.00	-	-	-	-	70	150.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga penyiaran yang terlibat	12 kab/kota	150.00	-	-	-	-	12 kab/kota	150.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa (kali)	40	858.20	40	86.10	40	86.10	40	1,030.40	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			300.00		218.14		218.14		736.29	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah event dan dokumen hasil kelitbangan	event: 1 dokumen: 1	300.00	event: 1 dokumen: 1	218.14	event: 1 dokumen: 1	218.14	event: 3 dokumen: 3	736.29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			BADAN PENGHUBUNG			900.00		-		-		900.00	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah informasi media massa yang difasilitasi dan dipublish di tingkat nasional (kali)	15	900.00	-	-	-	-	15	900.00	BADAN PENGHUBUNG
			SEKRETARIAT DAERAH			11,708.91		12,021.11		11,419.79		35,149.82	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	11	4,117.56	11	3,156.06	11	3,156.06	11	10,429.68	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa (kali)	95	7,456.66	140	8,865.05	105	8,263.73	340	24,585.44	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Jumlah masyarakat dan Aparatur yang memahami komunikasi dan informatika (orang)	60	134.70	-	-	-	-	60	134.70	SEKRETARIAT DAERAH
		11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8,398.48		4,667.37		4,374.15		17,440.00	
			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8,188.48		4,374.15		4,374.15		16,936.79	
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi akses Permodalannya	400	1,076.09	400	168.34	400	168.34	1,200	1,412.77	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan UMKM (Usaha Kecil)	149,390	516.00	149,440	75.85	149,490	75.85	149,440	667.70	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang di tingkatkan	2,234	6,146.39	2,284	3,748.49	2,334	3,748.49	2,334	13,643.36	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan	1,717	450.00	1,720	381.48	1,725	381.48	1,725	1,212.96	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			SEKRETARIAT DAERAH			210.00		293.22		-		503.22	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan KUMKM (Rekomendasi dan Kebijakan)	1	210.00	1	293.22	-	-	1	503.22	SEKRETARIAT DAERAH
		12	PENANAMAN MODAL			9,220.40		4,245.12		4,101.12		17,566.64	
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			7,720.40		4,245.12		4,101.12		16,066.64	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,198.73	100	920.12	100	920.12	100	4,038.96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	393.94	100	960.00	100	816.00	100	2,169.94	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	189.72	-	-	-	-	96	189.72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	323.52	-	-	-	-	93	323.52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	386.81	-	-	-	-	94	386.81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah calon investor yang tertarik untuk berinvestasi (calon investor (dihitung berdasar izin prinsip))	29	1,185.30	32	570.00	35	570.00	35	2,325.30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah proyek Investasi yang terealisasi PMA/PMDN (proyek (dihitung berdasar izin usaha)	10	2,212.39	12	1,625.00	14	1,625.00	14	5,462.39	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
				Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai Interval IKM)	82		82		82		82		
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Jumlah dokumen investasi yang layak untuk ditawarkan (dokumen proposal project investasi)	2	830.00	2	170.00	2	170.00	2	1,170.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			BADAN PENGHUBUNG			1,500.00		-		-		1,500.00	
			Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah promosi dan peluang investasi yang difasilitasi (kali)	1	1,500.00	-	-	-	-	1	1,500.00	BADAN PENGHUBUNG
			13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			96,856.09		75,114.25		70,811.29		242,781.63	
			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			95,946.09		74,902.50		70,599.53		241,448.12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	3,642.00	100	5,089.37	100	5,089.37	100	13,820.73	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	480.00	100	834.05	100	708.94	100	2,022.99	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	389.72	100	16.00	100	13.60	100	419.32	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	25.00	100	31.00	100	26.35	100	82.35	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	375.00	100	7.73	100	6.57	100	389.29	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang ditingkatkkan perannya dalam penggerak pembangunan (orang)	217	4,300.00	217	7,650.00	217	4,765.41	217	16,715.41	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang dibina berhasil menjadi wirausaha	80	600.00	90	1,950.00	95	664.94	95	3,214.94	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase pemuda yang dibina menjadi kader penyuluh penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV/AIDS	85	150.00	90	150.00	95	150.00	95	450.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase olahragawan yang dibina dapat berprestasi ditingkat nasional	85	74,234.37	85	47,953.57	85	47,953.57	85	170,141.50	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga standar nasional yang dikelola dan dipelihara (unit/tahun)	23	11,198.21	22	11,220.79	22	11,220.79	22	33,639.79	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan	Jumlah sarana prasarana aktifitas kepemudaan yang dikelola dan dipelihara (unit/tahun)	6	551.79	-	-	-	-	6	551.79	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			SEKRETARIAT DAERAH			910.00		211.76		211.76		1,333.51	
			Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Rekomendasi kebijakan pemuda dan olahraga	3	910.00	3	211.76	2	211.76	8	1,333.51	SEKRETARIAT DAERAH
		14	STATISTIK			-		-		-		-	
		16	KEBUDAYAAN			68,806.86		24,325.94		24,027.60		117,160.40	
			DINAS KEBUDAYAAN			58,013.72		24,325.94		24,027.60		106,367.26	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,835.00	100	2,518.37	100	2,518.37	100	6,871.74	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	690.00	100	1,805.35	100	1,534.55	100	4,029.90	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	145.00	100	65.00	100	55.25	100	265.25	DINAS KEBUDAYAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	320.00	100	118.64	100	100.84	100	539.48	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	550.00	-	-	-	-	94	550.00	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	85	54,473.72	-	-	-	-	85	54,473.72	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Jumlah kunjungan masyarakat ke museum 2. Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental	-	-	Kunjungan: 50.000 Karya seni: 60	4,798.16	Kunjungan: 75.000 Karya seni: 100	4,798.16	Kunjungan: 75.000 Karya seni: 100	9,596.32	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)	-	-	35	8,019.09	40	8,019.09	40	16,038.19	DINAS KEBUDAYAAN
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi: - Warisan budaya tidak benda - Warisan budaya benda (cagar budaya)	-	-	tidak benda: 25 benda: 91	7,001.34	tidak benda: 32 benda:101	7,001.34	tidak benda: 32 benda:101	14,002.68	DINAS KEBUDAYAAN
			DINAS PENDIDIKAN			1,925.00		-		-		1,925.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	85	1,925.00	-	-	-	-	85	1,925.00	DINAS PENDIDIKAN
			BADAN PENGHUBUNG			8,868.14		-		-		8,868.14	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi (kali)	31	8,868.14	-	-			31	8,868.14	BADAN PENGHUBUNG
		17	PERPUSTAKAAN			10,636.46		7,104.28		6,998.80		24,739.54	
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			10,636.46		7,104.28		6,998.80		24,739.54	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	5,787.84	100	5,177.38	100	5,177.38	100	16,142.59	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	840.00	100	411.29	100	349.60	100	1,600.89	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	203.62	100	20.00	100	17.00	100	240.62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	1,340.00	100	172.00	100	146.20	100	1,658.20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	415.00	100	99.87	100	84.89	100	599.76	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan Perpustakaan	jumlah kunjungan keperpustakaan (orang)	60,000	1,900.00	80,000	1,211.66	100,000	1,211.66	240,000	4,323.32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	100	150.00	100	12.08	100	12.08	100	174.16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		18	KEARSIPAN			1,495.00		934.88		567.79		2,997.67	
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			1,495.00		934.88		567.79		2,997.67	
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah daftar arsip Statis yang diperbaiki (berkas)	1,000	175.00	1,000	561.03	1,000	193.94	3,000	929.97	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Jumlah Pelayanan informasi kearsipan yang ditingkatkan (SMA/SMK)	15		15		15		45		
			Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah koleksi arsip yang dilestarikan dan terdokumentasi (berkas)	30	175.00	30	275.85	30	275.85	90	726.69	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang ditingkatkan kualitasnya (Unit)	2	150.00	2	98.00	2	98.00	6	346.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
(1)	(2)		(3)										
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan pelayanan informasi	1	495.00					1	495.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi	Persentase peningkatan penyusunan dokumentasi yang terbina	1	500.00					1	500.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2			URUSAN PILIHAN			344,094.00		299,916.15		284,033.57		928,043.72	
01			KELAUTAN DAN PERIKANAN			32,485.12		30,667.98		29,133.37		92,286.47	
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			32,485.12		30,667.98		29,133.37		92,286.47	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	3,080.50	100	2,133.35	100	2,133.35	100	7,347.20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	885.50	100	273.05	100	232.09	100	1,390.64	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	279.32	100	37.40	100	31.79	100	348.51	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	500.00	-	-	-	-	100	500.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	996.00	100	559.90	100	475.92	100	2,031.82	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Berkurangnya IUU Fishing (kasus)	12	1,670.23	5	672.33	3	672.33	3	3,014.89	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi hasil Perikanan Budidaya (ton)	111,762	15,640.71	125,173	18,298.52	136,000	18,298.52	136,000	52,237.76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi hasil tangkapan (ton)	134,261	2,454.01	135,603	4,209.58	136,000	2,719.61	136,000	9,383.19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran 2. Nilai ekspor produk perikanan	Kelompok: 5 Nilai Ekspor (US\$): 8.500.000	2,788.05	Kelompok :10 Nilai Ekspor (US\$): 8.800.000	3,003.90	Kelompok: 15 Nilai Ekspor (US\$): 8.900.000	3,089.81	Kelompok: 15 Nilai Ekspor (US\$): 8.900.000	8,881.76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan	Peningkatan Jumlah SDM bidang perikanan dan kelautan yang bersertifikat (CPIP dan CBIB)	50	4,190.80	50	1,479.95	50	1,479.95	150	7,150.70	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02		PARIWISATA			30,918.99		45,984.05		36,327.33		113,230.37		
		DINAS PARIWISATA			30,918.99		45,984.05		36,327.33		113,230.37		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	5,986.71	100	6,154.39	100	6,154.39	100	18,295.49	DINAS PARIWISATA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,872.00	100	1,804.58	100	1,533.89	100	5,210.46	DINAS PARIWISATA
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	430.00	100	194.89	100	165.66	100	790.55	DINAS PARIWISATA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	300.00	100	65.48	100	55.66	100	421.14	DINAS PARIWISATA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	761.14	100	471.52	100	400.79	100	1,633.44	DINAS PARIWISATA
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Jiwa).**	70,509	4,586.48	79,227	11,891.56	88,044	11,891.56	88,044	28,369.59	DINAS PARIWISATA
				Jumlah <i>event</i> pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>Event</i>).**	23	1,615.39	24		27	-	27	1,615.39	DINAS PARIWISATA
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (Destinasi)	1	200.00	1	3,400.00	1	3,400.00	3	7,000.00	DINAS PARIWISATA
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis media, desain dan IPTEK (Orang).**	152	1,520.36	155	1,160.00	169	1,160.00	169	3,840.36	DINAS PARIWISATA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif (Kelompok)	19	912.00	20	1,510.00	22	1,510.00	22	3,932.00	DINAS PARIWISATA
			Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan (Lokasi Wisata).**	3	1,050.00	3		4	-	4	1,050.00	DINAS PARIWISATA	
			Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM profesi pariwisata yang disertifikasi (Orang).**	665	3,550.00	676	1,040.00	737	1,040.00	737	5,630.00	DINAS PARIWISATA
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis seni dan budaya (Orang).**	495	8,134.92	504	18,291.64	549	9,015.39	549	35,441.95	DINAS PARIWISATA
	03		PERTANIAN			175,961.47		115,784.99		115,420.32		407,166.78	
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANAN			111,053.90		53,344.72		53,184.97		217,583.59	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	9,751.05	100	6,728.32	100	6,728.32	100	23,207.69	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	4,480.00	100	765.01	100	650.26	100	5,895.27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparaturnya	96	1,251.80	100	40.00	100	34.00	100	1,325.80	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparaturnya sipil negaranya	93	946.14	100	220.00	100	187.00	100	1,353.14	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,304.49	100	40.00	100	34.00	100	1,378.49	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103.95	9,566.48	105.55	2,342.19	107.86	2,342.19		14,250.85	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
				- Tanaman Pangan	117		117		129		129		
				- Tanaman Hortikultura	122		122		134		134		
				Tingkat pendapatan petani perkebunan (Rp/tahun dalam juta)	30,88 juta		32,42 juta		34,03 juta		34,03 juta	-	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran (kelompok)	30	5,200.00	40	184.25	44	184.25	44	5,568.50	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
				Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit)	50		59		65		65	-	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pertanian (kelompok)	149	17,092.00	200	10,005.99	220	10,005.99	220	37,103.98	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				Persentase Tingkat penerapan teknologi perkebunan	62		63		63		63	-	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi Pertanian (ton) - Padi (ton) - Buah-buahan - Sayuran	- 504.551 - 189.129 - 24.517	54,603.53	- 526.151 - 191.957 - 26.704	31,218.86	- 578,766 - 211,153 - 29,374	31,218.86	- 578,766 - 211,153 - 29,374	117,041.24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
				Produktifitas komoditi utama perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa) (Kg/Ha/Thn)	Kelapa Sawit: 3.762 Karet: 1.130 Kelapa: 1.187		Kelapa Sawit: 3.765 Karet: 1.135 Kelapa: 1.191		Kelapa Sawit: 3.768 Karet: 1.137 Kelapa: 1.196		Kelapa Sawit: 3.768 Karet: 1.137 Kelapa: 1.196	-	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Penghasil Pangan (Sagu/Ton)	340,632	1,400.00	345,741	841.17	351	841.17	351	3,082.34	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah BP3K/UPTD/BPP berstatus Madya	50	5,458.40	100	958.94	116	958.94	116	7,376.28	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
				Jumlah Kelompok berstatus Madya	816		970		1,000		1,000		
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			-		200.00		200.00		400.00	
			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah BP3K/UPTD/BPP berstatus Madya	-	-	100	200.00	100	200.00	100	400.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Kelompok berstatus Madya			979						
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			64,907.58		62,240.26		62,035.35		189,183.19	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,162.10	100	2,505.00	100	2,505.00	100	7,172.10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,290.55	100	1,025.00	100	871.25	100	3,186.80	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	162.15	100	138.20	100	117.47	100	417.82	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	200.00	100	202.92	100	172.48	100	575.40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	714.00	-	-	-	-	94	714.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak	8	9,150.00	5	8,981.27	5	8,981.27	5	27,112.53	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase tingkat penerapan teknologi	68	835.34	-	-	-	-	5	835.34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging (Kg)	12,219,064	45,893	13,210,812	47,180.49	14,531,893	47,180.49	14,531,893	140,254.41	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah kelompok yang mendapatkan akses pemasaran (kelompok)	35	3,150.00	40	1,165.29	44	1,165.29	44	5,480.59	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102.33	1,350.00	102.58	1,042.10	102.89	1,042.10	103	3,434.20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
04			KEHUTANAN			23,422.43		9,026.55		9,026.55		41,475.53	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			23,422.43		9,026.55		9,026.55		41,475.53	
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luas hutan yang dimanfaatkan sesuai fungsi (ha)	3.597.506	2,241.06	3.597.506	2,420.56	3.597.506	2,420.56	3.597.506	7,082.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)	761.773	5,624.00	914,128	1,811.49	1,096,954	1,811.49	2,772,855	9,246.99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luas hutan yang terlindungi (ha)	234.015	10,868.38	280,818	3,142.88	336,982	3,142.88	851,815	17,154.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah industri hasil hutan yang dibina dan ditertibkan (unit)	33	250.00	35	108.64	37	108.64	37	467.27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Jumlah dokumen tata kelola hutan (judul)	32	3,389.00	32	1,192.97	32	1,192.97	96	5,774.94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah kelembagaan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan (kelompok)	12	1,050.00	14	350.00	16	350.00	42	1,750.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	05		ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL			48,283.13		77,325.99		77,044.47		202,653.59	
			DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			48,283.13		77,325.99		77,044.47		202,653.59	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	6,018.73	100	9,997.83	100	9,997.83	100	26,014.40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,122.92	100	542.92	100	461.48	100	2,127.32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	510.00	-	-	-	-	96	510.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	1,003.27	100	892.46	100	758.59	100	2,654.32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	981.50	100	441.41	100	375.20	100	1,798.11	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sektor mineral dan batubara (Dokumen)	5	1,680.68	7	1,470.00	7	1,470.00	19	4,620.68	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah lokasi yang memperoleh manfaat pembangunan sarana ketenagalistrikan (lokasi)	5	19,484.80	5	37,263.15	5	37,263.15	15	94,011.10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	Jumlah pembangkit isolated yang menggunakan EBT	120 SHS, 1 PLTS Terpusat, 1 PLTMH	13,708.00	55 Unit ; 12 Unit Biogas; 578 Unit	19,527.51	55 Unit ; 12 Unit Biogas; 578 Unit	19,527.51	120 SHS, 1 PLTS Terpusat, 1 PLTMH ,	52,763.02	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sektor energi baru terbarukan (EBT) (Dokumen)			2		2		4			
		Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	Jumlah dokumen pengawasan pengambilan air tanah , dan ketersediaan peta geologi serta sosialisasi terhadap kerentanan gerakan tanah di daerah (Dokumen)	2	950.00	3	1,444.43	3	1,444.43	8	3,838.87	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi	Jumlah dokumen pendukung sertifikasi Laboratorium	3 dokumen (1 dokumen pengujian Lab, 1 dokumen pemeliharaan lab, 1 dokumen pemeliharaan peralatan)	2,823	4 dokumen (ditambah sertifikat akreditasi)	5,746.27	4 dokumen (ditambah dokumen pemeliharaan sistem mutu)	5,746.27	4 dokumen (ditambah dokumen pemeliharaan sistem mutu)	14,315.76	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
06			PERDAGANGAN			10,104.05		4,402.32		4,239.27		18,745.65	
			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			10,104.051		4,402.322		4,239.27		18,745.65	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,910.78	100	2,114.00	100	2,114.00	100	6,138.77	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,363.92	100	1,087.00	100	923.95	100	3,374.86	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	233.64	-	-	-	-	100	233.64	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	223.78	-	-	-	-	100	223.78	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	187.12	-	-	-	-	100	187.12	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kasus pelanggaran pelaku usaha (kasus)	15	2,215.66	10	165.82	7	165.82	7	2,547.30	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase meningkatnya nilai ekspor Provinsi Riau	5	3,269.14	5	878.38	5	878.38	5	5,025.90	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Inflasi (%)	4.34	700.00	4.32	157.13	4.30	157.13	4.30	1,014.27	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	07		PERINDUSTRIAN			14,108.16		13,203.56		9,321.54		36,633.26	
			DINAS PERINDUSTRIAN			14,108.16		13,203.56		9,321.54		36,633.26	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,961.34	100	2,710.43	100	2,710.43	100	8,382.19	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,000.00	100	1,350.00	100	1,147.50	100	3,497.50	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	200.00	-	-	-	-	100	200.00	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	225.44	100	60.00	100	51.00	100	336.44	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,118.42	100	213.14	100	181.17	100	1,512.72	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah unit usaha kemampuan teknologi tepat guna alat mesin pertanian (unit usaha)	4	1,450.00	5	2,100.00	6	1,606.94	6	5,156.94	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase peningkatan pertumbuhan IKM	7	4,729.15	7	1,160.00	7	1,160.00	7	7,049.15	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah wirausaha baru/IKM yang terlatih (wirausaha baru)	312	2,223.81	342	5,610.00	342	2,464.50	342	10,298.31	DINAS PERINDUSTRIAN
			Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi	Jumlah industri agro berbasis teknologi yang dikembangkan	1	200.00	-	-	-	-	1	200.00	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019				
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
08	TRANSMIGRASI			8,810.65		3,520.72		3,520.72		15,852.08	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			7,860.65		3,520.72		3,520.72		14,902.08	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dibangun (Unit)	15	4,178.40	780	855.52	15	855.52	270	5,889.44	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Kepala Keluarga yang diberdayakan dalam Kelompok Ekonomi Masyarakat (KK)	765	3,682.25	780	2,665.2	795	2,665.2	795	9,012.64	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	SEKRETARIAT DAERAH			950.00		-		-		950.00	
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah kerjasama perdagangan internasional	3	950.00	-	-	-	-	3	950.00	SEKRETARIAT DAERAH
3	PENUNJANG URUSAN			223,872.07		149,048.59		143,171.49		516,092.15	
01	PERENCANAAN			52,393.79		30,334.96		29,452.25		112,181.01	
	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH			38,008.25		23,146.95		22,877.09		84,032.29	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	10,143.60	100	8,805.16	100	8,805.16	100	27,753.91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	4,078.70	100	1,082.50	100	920.13	100	6,081.33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	659.96	100	163.60	100	139.06	100	962.62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	550.00	100	500.00	100	425.00	100	1,475.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	211.21	100	53.00	100	45.05	100	309.26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	75	4,129.95	85	1,705.74	85	1,705.74	85	7,541.43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama pembangunan (rekomendasi kebijakan)	1	1,385.00	-	-	-	-	7	1,385.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	2 dokumen	3,300.00	2 dokumen	2,463.00	6 dokumen	2,463.00	10 dokumen	8,226.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	85	9,275.00	87	8,373.95	90	8,373.95	90	26,022.91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	871.16	-	-	-	-	2	871.16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Perencanaan Sosial Budaya	5	3,150.00	-	-	-	-	5	3,150.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	6	253.68	-	-	-	-	6	253.68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			DINAS PENDIDIKAN			150.00	-	-	-	-		150.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	150.00	-	-	-	-	100	150.00	DINAS PENDIDIKAN
			DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			200.00		100.00		100.00		400.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	200.00	100	100.00	100	100.00	100	400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN			150.00		-		-		150.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	150.00	-	-	-	-	100	150.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			100.00		-		-		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan	100	100.00	-	-	-	-	100	100.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			DINAS SOSIAL			450.00		100.00		100.00		650.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersedian data/informasi	100	450.00	100	100.00	100	100.00	100	650.00	DINAS SOSIAL
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			100.00		75.00		75.00		250.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi	100	100.00	100	75.00	100	75.00	100	250.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			DINAS KETAHANAN PANGAN			670.23		721.88		721.88		2,113.98	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi	100	670.23	100	721.88	100	721.88	100	2,113.98	DINAS KETAHANAN PANGAN
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			623.04		-		-		623.04	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	623.04	-	-	-	-	100	623.04	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
			DINAS PERHUBUNGAN			85.00		85.00		85.00		255.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersedian data/informasi	100	85.00	100	85.00	100	85.00	100	255.00	DINAS PERHUBUNGAN
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			889.72		823.30		823.30		2,536.31	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data/Informasi	75	889.72	85	823.30	90	823.30	90	2,536.31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			DINAS KEBUDAYAAN			110.00		-		-		110.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	110.00	-	-	-	-	100	110.00	DINAS KEBUDAYAAN
			DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			150.00		150.00		100.00		400.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	150.00	100	150.00	100	100.00	100	400.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			DINAS PERINDUSTRIAN			350.00		100.00		100.00		550.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	350.00	100	100.00	100	100.00	100	550.00	DINAS PERINDUSTRIAN
			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			670.37		81.32		81.32		833.01	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	100	590.37	-	-	-	-	100	590.37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	80.00	100	81.32	100	81.32	100	242.64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			150.00		1,130.00		1,130.00		2,410.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana (Dokumen)	5	150.00	2	1,130.00	5	1,130.00	12	2,410.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			BADAN PENGHUBUNG			775.00		80.53		75.00		930.53	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	775.00	100	80.53	100	75.00	100	930.53	BADAN PENGHUBUNG
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			175.00		-		-		175.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	175.00	-	-	-	-	100	175.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			SEKRETARIAT DAERAH			8,073.24		3,471.55		2,983.67		14,528.47	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian rencana terhadap realisasi	90	113.24	90	-	-	-	90	113.24	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama pembangunan	2	3,550.00	7	3,252.52	7	2,764.64	16	9,567.16	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah kegiatan perencanaan dan pembangunan di wilayah perbatasan.	12	4,410.00	-	-	-	-	12	4,410.00	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	-	-	100	219.03	100	219.03	100	438.06	SEKRETARIAT DAERAH
			SEKRETARIAT DPRD PROVINSI			363.94		119.44		100.00		583.38	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan	94	363.94	100	119.44	100	100.00	100	583.38	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			150.00		-		-		150.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi	100	150.00	-	-	-	-	100	150.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-		150.00		100.00		250.00	
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersedian data/informasi	-	-	100	150.00	100	100.00	100	250.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	02		KEUANGAN			80,712.21		54,458.98		53,419.76		188,590.94	
			BADAN PENDAPATAN DAERAH			52,908.81		31,476.42		30,783.51		115,168.75	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	32,209.73	100	23,793.76	100	23,793.76	100	79,797.26	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	5,509.60	100	4,440.64	100	3,774.54	100	13,724.77	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	850.00	100	178.79	100	151.97	100	1,180.75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	800.00	-	-	-	-	100	800.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	465.72	-	-	-	-	100	465.72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Peningkatan penerimaan pajak daerah 2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah 3. Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah	1. Pajak Daerah Rp.3.000.000.00 daerah 0.000,00, 2. Retribusi Rp. 7.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 155.300.000.000, 4. penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 503.800.000.000	13,073.77	1. Pajak Daerah Rp.3.203.607.92 3.218,25, 2. Retribusi Rp. 12.100.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 239.800.000.000 , 4. penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 545.351.250.000	3,063.24	1. Pajak Daerah Rp.3.323.553.60 1.455,27, 2. Retribusi Rp. 11.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 141.684.015.851 ,89 4. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 402.593.858.033 ,47	3,063.24	1. Pajak Daerah Rp.3.323.553.60 1.455,27, 2. Retribusi Rp. 11.000.000.000, 3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 141.684.015.851 ,89 4. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Rp. 402.593.858.033 ,47	19,200.24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			26,047.30		21,832.55		21,486.25		69,366.10	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	3,102.22	100	3,750.96	100	3,750.96	100	10,604.14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	2,212.25	100	1,573.82	100	1,337.75	100	5,123.81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	250.00	-	-	-	-	100	250.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	25.00	100	205.86	100	174.98	100	405.85	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,036.88	100	529.03	100	449.68	100	2,015.58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini LKPD dari BPK	WTP	18,391.79	WTP	15,236.89	WTP	15,236.89	WTP	48,865.56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100	1,029.17	100	535.99	100	535.99	100	2,101.16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			SEKRETARIAT DAERAH			1,756.10		1,150.00		1,150.00		4,056.10	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah BUMD sehat	2	1,756.10	3	1,150.00	3	1,150.00	3	4,056.10	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase penyelesaian administrasi pengadaan dan pemeliharaan aset	100		100		100		100		
03			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			44,604.59		38,018.49		35,839.49		118,462.57	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			18,722.06	19,322	31,413.77		29,517.50		79,653.33	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,154.20	100	4,214.25	100	4,214.25	100	9,582.71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	356.20	100	545.45	100	463.64	100	1,365.29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	155.53	100	505.96	100	430.06	100	1,091.55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	75.00	100	575.92	100	489.53	100	1,140.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	267.00	-	-	-	-	100	267.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	75	3,637.65	80	2,189.58	85	1,861.14	85	7,688.36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti	2	471.91	2	187.39	2	159.28	2	818.59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional	55	9,834.75	100	8,637.46	100	7,341.84	100	25,814.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI	Jumlah ASN yang diberikan bimbingan usaha dan kerjasama dengan lembaga	Orang: 50 Lembaga: 4	700.00	-	-	-	-	Orang: 50 Lembaga: 4	700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar (orang)	-	-	50	14,063.11	50	14,063.11	50	28,126.21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100	2,069.82	100	494.65	100	494.65	100	3,059.12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			22,187.61		6,604.72		6,321.99		35,114.32	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	5,801.81	100	1,994.87	100	1,994.87	100	9,791.55	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	700.00	100	1,098.24	100	823.68	100	2,621.92	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	1,423.39	100	54.50	100	46.33	100	1,524.22	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	2,420.25	-	-	-	-	100	2,420.25	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	358.14	-	-	-	-	100	358.14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)	Target	Rp. (juta)	Target (15)	Rp. (juta) (16)	
(1)	(2)	(3)										(17)	
		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar (orang)	50	8,289.51	50	2,384.23	50	2,384.23	150	13,057.97	BADAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional	55	810.00	100	445.34	100	445.34	100	1,700.68	BADAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100	2,384.51	100	627.54	100	627.54	100	3,639.60	BADAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			2,880.98		-		-		2,880.98		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100	2,880.98	-	-	-	-	100	2,880.98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		SEKRETARIAT DAERAH			813.94		-		-		813.94		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Peningkatan Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50	540.34	-	-	-	-	90	540.34	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100	273.60	-	-	-	-	100	273.60	SEKRETARIAT DAERAH
04			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8,455.00		6,620.63		5,263.70		20,339.33	
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8,455.00		6,620.63		5,263.70		20,339.33	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,331.44	100	1,730.27	100	1,730.27	100	4,791.99	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	970.00	100	979.60	100	832.66	100	2,782.26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	319.62	100	30.20	100	25.67	100	375.49	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	200.00	100	50.00	100	42.50	100	292.50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	135.00	-	-	-	-	100	135.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi regulasi dan kebijakan yang disampaikan kepada Gubernur dan SKPD Provinsi Riau (Rekomendasi)	17	1,750.00	6	2,890.32	6	1,939.41	6	6,579.73	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa)	Jumlah peningkatan kerjasama kelitbangan berbasis sumberdaya lokal antara stakeholder SIDa (antar institusi pemerintah,pemerintahan daerah,lembaga kelitbangan,lembaga pendidikan,lembaga penunjang inovasi,dunia usaha, dan masyarakat di daerah)	Kawasan: 1 Rekomendasi: 9	3,050.00	-	-	-	-	Kawasan: 1 Rekomendasi: 9	3,050.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di provinsi	Monitoring: 24 kali Laporan: 2	498.94	Monitoring: 24 kali Laporan: 2	800.00	Monitoring: 24 kali Laporan: 2	552.94	Monitoring: 24 kali Laporan: 2	1,851.88	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019					
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	
		Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data	Jumlah pengelola basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi (Orang)	8	200.00	10	140.24	10	140.24	10	480.48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05		FUNGSI LAINNYA			37,706.48		19,615.53		19,196.29		76,518.30	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			17,369.92		10,504.00		10,356.40		38,230.32	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,285.00	100	2,475.58	100	2,475.58	100	7,236.16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,800.00	100	940.00	100	799.00	100	3,539.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	142.68	100	44.00	100	37.40	100	224.08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	50.00	-	-	-	-	100	50.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	382.50	-	-	-	-	100	382.50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		Program Penelitian, Pendidikan dan Latihan	Peningkatan Kemampuan Aparatur, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Desa: 5 Kota: 1 orang: 115	1,275.00	-	-	-	-	Desa: 5 Kota: 1 orang: 115	1,275.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Persentase lokasi dampak bencana alam yang direhab dan direkonstruksi	45	6,459.74	29	3,170.00	26	3,170.00	26	12,799.74	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Bencana yang Tertanggulangi (Kejadian)	5	4,975.00	8	3,874.42	14	3,874.42	14	12,723.84	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		BADAN PENGHUBUNG		9,406.49	5,812.72	5,547.43	20,766.63						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	3,455.32	100	3,064.42	100	3,064.42	100	9,584.15	BADAN PENGHUBUNG	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	1,870.50	100	1,768.65	100	1,503.35	100	5,142.50	BADAN PENGHUBUNG	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	167.19	-	-	-	-	100	167.19	BADAN PENGHUBUNG	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	100.00	-	-	-	-	100	100.00	BADAN PENGHUBUNG
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,180.45	-	-	-	-	100	1,180.45	BADAN PENGHUBUNG
			Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung	Jumlah masyarakat Riau difasilitasi (Orang)	2,736	2,633.03	3,283	979.66	3,300	979.66	9,319	4,592.34	BADAN PENGHUBUNG
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8,815.08		3,298.81		3,292.47		15,406.35	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	1,723.94	100	764.93	100	764.93	100	3,253.80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	88	575.00	100	36.78	100	31.26	100	643.04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	145.40	100	5.50	100	4.68	100	155.58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	55.00	-	-	-	-	100	55.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	590.53	-	-	-	-	100	590.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Jumlah Ormas,LSM dan LNL yang terdaftar dan memiliki SKT serta Fasilitasi Forum Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Ormas: 10 LSM: 5 Forum: 1	895.00	Ormas: 15 LSM: 7 Forum: 1	330.00	Ormas: 15 LSM: 7 Forum: 1	330.00	Ormas: 40 LSM: 19 Forum: 3	1,555.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Orang: 800	1,455.00	Orang: 100	700.00	Orang: 550 Forum: 2	700.00	Orang: 1.900 Forum: 4	2,855.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Penurunan potensi konflik di Masyarakat	Orang: 590 Potensi konflik: 130	2,025.21	Orang: 590 Potensi konflik: 130	751.60	Orang: 590 Potensi konflik: 130	751.60	Orang: 1770 Potensi konflik: 390	3,528.41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Persentase partisipasi pemilih dalam pilkada/pilgub dan pemilu	Pilkada kab/kota: 75% Orang: 1200	900.00	Pilkada kab/kota: 75% Orang: 1200	550.00	Pilkada kab/kota: 75% Orang: 1200	550.00	Pilkada kab/kota: 75% Orang: 3600	2,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Forum Ketahanan Ekonomi yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	Forum: 2 Kab/Kota: 12	450.00	Forum: 2 Kab/Kota: 12	160.00	Forum: 2 Kab/Kota: 12	160.00	Forum: 2 Kab/Kota: 12	770.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			DINAS SOSIAL			840.00		-		-		840.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memahami nilai wawasan kebangsaan (orang)	3,434	840.00	-	-	-	-	3,434	840.00	DINAS SOSIAL
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			225.00		-		-		225.00	
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan (Orang)	100	225.00	-	-	-	-	100	225.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			SEKRETARIAT DAERAH			1,050.00		-		-		1,050.00	
			Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	200	1,050.00	-	-	-	-	200	1,050.00	SEKRETARIAT DAERAH
4			PENDUKUNG			400,987.73		246,220.57		229,825.02		877,033.33	
	01		KEPALA DAERAH			142,458.08		131,287.62		129,329.48		403,075.18	
			SEKRETARIAT DAERAH			141,482.92		131,145.95		129,209.05		401,837.92	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	72,081.57	100	58,301.46	100	58,301.46	100	188,684.50	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	27,900.00	100	10,150.00	100	8,627.50	100	46,677.50	SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	2,577.94	100	875.20	100	743.92	100	4,197.05	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	1,023.00	100	-	-	-	100	1,023.00	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,203.90	100	509.65	100	433.20	100	2,146.75	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100	13,452.20	100	9,967.15	100	9,967.15	100	33,386.51	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian	2 Rekomendasi dan Kebijakan	600.00	2 Rekomendasi dan Kebijakan	325.00	2 Rekomendasi dan Kebijakan	325.00	6 Rekomendasi dan Kebijakan	1,250.00	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama dibidang Perekonomian (kerjasama)	2	969.00	3	536.27	4	536.27	4	2,041.53	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum provinsi yang telah diharmonisasi dan Jumah produk hukum provinsi yang telah disosialisasikan	Produk hukum: 900 Produk yg disosialisasikan: 0	3,879.65	Produk hukum: 950 Produk yg disosialisasikan: 20	3,223.15	Produk hukum: 1000 Produk yg disosialisasikan: 40	3,223.15	Produk hukum: 1000 Produk yg disosialisasikan: 40	10,325.94	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	74	3,155.79	85	2,227.74	90	2,227.74	90	7,611.26	SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Penataan Kelembagaan	Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85	1,150.00	95	688.67	95	688.67	95	2,527.33	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Penataan tatalaksana	1. Jumlah standar operasional prosedur 2. Persentase implementasi standar operasional prosedur, 3. Jumlah LPSE yg bersertifikat ISO	SOP: 0 70% LPSE Provinsi: 0	960.00	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	449.34	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	449.34	SOP: 15 72,5% LPSE Provinsi: 1	1,858.69	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang melaksanakan area perubahn Reformasi Birokrasi	85	550.00	90	294.61	95	294.61	95	1,139.22	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kab/kota)	12	1,584.54	12	1,431.10	12	1,431.10	12	4,446.73	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi	Persentase terfasilitasinya aspek pertanahan dan wilayah administrasi	90	1,150.00	100	1,145.55	100	1,145.55	100	3,441.10	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi	Persentase kode data wilayah yang sudah ditetapkan	99	350.00	99	594.55	100	387.88	100	1,332.43	SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan	Jumlah rekomendasi peningkatan pendidikan dan keagamaan	Kebijakan: 2 Orang: 3050, 12 Kali Kegiatan: 2	2,200.00	Kebijakan: 2 Orang: 3050, 12 Kali Kegiatan: 2	1,111.42	Kebijakan: 2 Orang: 3050, 12 Kali Kegiatan: 2	1,111.42	Kebijakan: 2 Orang: 3050, 12 Kali Kegiatan: 2	4,422.84	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama	Jumlah penerima manfaat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama (orang)	1425	5,612.53	1425	38,870.11	1425	38,870.11	1425	83,352.74	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Pelayanan Publik	Presentase SKPD terkait dengan pelayanan masyarakat yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)	80	1,082.81	90	444.99	95	444.99	95	1,972.79	SEKRETARIAT DAERAH
			INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI			150.00		-		-		150.00	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	35	150.00	-	-	-	-	35	150.00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			BADAN PENGHUBUNG			225.17		141.67		120.42		487.26	
			Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100	225.17	100	141.67	100	120.42	100	487.26	BADAN PENGHUBUNG
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			600.00		-		-		600.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum provinsi yang telah diharmonisasi, Jumlah produk hukum provinsi yang telah disosialisasikan	100 Orang / 1 Lok	600.00	-	-	-	-	600 Orang / 1 Lok	600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	02		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			258,529.65		114,932.95		100,495.55		473,958.15	
			SEKRETARIAT DPRD PROVINSI			258,327.65		114,588.34		100,202.63		473,118.62	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	28,930.58	100	18,683.60	100	18,683.60	100	66,297.78	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	28,457.26	100	3,024.40	100	2,570.74	100	34,052.40	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	865.45	-	-	-	-	100	865.45	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	850.30	100	228.00	100	193.80	100	1,272.10	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	679.56	-	-	-	-	100	679.56	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	94	198,544.51	96	92,652.34	98	78,754.49	1	369,951.33	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
			SEKRETARIAT DAERAH			202.00		344.61		292.92		839.53	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pengurusan izin yang difasilitasi	100	202.00	100	344.61	100	292.92	100	839.53	SEKRETARIAT DAERAH
5			PENGAWASAN			23,736.02		10,825.31		10,598.30		45,159.63	
	01		PENGAWASAN			23,736.02		10,825.31		10,598.30		45,159.63	
			INSPEKTORAT			16,793.96		7,016.08		6,789.07		30,599.12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90	2,572.67	100	2,052.43	100	2,052.43	100	6,677.53	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88	750.00	100	404.07	100	343.46	100	1,497.53	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	96	310.50	100	133.72	100	113.66	100	557.88	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93	490.00	100	188.34	100	160.09	100	838.42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	94	1,680.00	100	354.81	100	301.59	100	2,336.40	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah	100	8,630.00	100	3,450.25	100	3,450.25	100	15,530.49	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang kompeten dan bersertifikat	20	480.00	30	152.05	35	129.24	35	761.29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SOP pengawasan (SOP)	3	100.00	4	49.60	5	42.16	12	191.76	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Nilai RAD PPK Provinsi (Aksi PPK) 2. SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas	90 2 SKPD	1,780.80	95 3 SKPD	230.82	95 3 SKPD	196.20	95 3 SKPD	2,207.82	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			406.39		381.01		381.01		1,168.41	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan	90	406.39	95	381.01	95	381.01	90	1,168.41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase penurunan penyimpangan non keuangan	90		90		90		90		
			SEKRETARIAT DAERAH			6,535.66		3,428.22		3,428.22		13,392.10	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Setelah Perubahan)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017		2018		2019				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Persentase pencapaian dayaserpa APBD dan APBN	95 % APBD 95 % APBN 95 %	6,535.66	95 % APBD 95 % APBN 95 %	3,428.22	95 % APBD 95 % APBN 95 %	3,428.22	95 % APBD 95 % APBN 95 %	13,392.10	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL						4,912,428.35		4,084,657.34		3,760,275.99		12,757,361.68	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Riau Tahun 2015–2019 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatannya. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, aspek pelayanan umum terdiri dari pelayanan urusan wajib dan pelayanan urusan pilihan. Selain itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI RIAU

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	PDRB							
	a. Harga Konstan Tanpa Migas (Rp Milyar)	351.413,42	358.490,27	371.957,93	381.165,05	393.212,53	403.366,44	403.366,44
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Milyar)	447.951,61	448.936,60	458.998,09	463.008,58	471.053,07	476.408,23	476.408,23
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)							
	a. Pertumbuhan Ekonomi - Tanpa Migas (%)	5,92	2,01	3,74	4,48	4,58	4,69	4,69
	b. Pertumbuhan Ekonomi - Dengan Migas (%)	2,70	0,22	2,23	3,39	3,73	3,91	3,91
3	Laju inflasi (%)	8,65	2,65	4,04	4,34	4,73	5,07	5,07
4	PDRB per kapita HK (Rp)							
	a. Harga Konstan Tanpa Migas (Rp Juta)	56,78	56,51	57,22	58,95	59,69	60,43	60,43
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Juta)	72,39	70,77	70,60	70,16	69,43	68,71	68,71
5	Indek Gini Ratio	0,380	0,370	0,347	0,342	0,331	0,323	0,323
6	Indeks Ketimpangan Williamson - TM (Indeks)	0,254	0,240	0,226	0,219	0,211	0,200	0,20
7	ICOR							
8	Persentase Penduduk Miskin (%)							
	a. Penduduk Miskin (Jiwa)	498.280	562.920	501.590	516.076	509.213	506.920	506.920,28
	b. Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	8,82	7,67	6,65	6,35	6,20	6,20
	c. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun)	379.223	417.164	437.259	459.833	448.882	489.187	489.187,03
	d. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,20	1,45	1,35	1,29	1,20	1,13	1,13

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	e. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,29	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,33	70,84	71,24	71,76	72,17	72,64	72,64
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,76	70,93	70,97	71,20	71,33	71,47	71,47
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,45	12,74	12,86	13,19	13,43	13,66	13,66
	c. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,47	8,49	8,56	8,61	8,67	8,72	8,72
	d. Pengeluaran Per Kapita Riil (Rp 000)	10.262	10.364	10.465	10.565	10.659	10.762	10.762
2	Angka Partisipasi Kasar							
	a. SD/MI (%)	113,40	113,12	112,89	111,85	111,60	110,96	110,96
	b. SMP/MTS (%)	119,33	95,22	95,34	95,46	95,58	95,70	95,70
	c. SMA/SMK/MA (%)	74,92	71,69	74,92	73,84	73,84	74,92	74,92
3	Angka Partisipasi Murni							
	a. SD/MI (%)	95,27	93,64	93,41	93,17	92,23	92,00	92,00
	b. SMP/MTS (%)	88,44	76,44	76,72	77,00	77,28	77,56	77,56
	c. SMA/SMK/MA (%)	57,33	54,59	56,71	58,83	59,14	59,68	59,68
4	AKB/AKABA/AKI							
	a. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (Persen)	92,30	89,80	89,83	89,23	91,00	91,19	91,19
	b. Persalinan di fasilitas kesehatan (Persen)	86,80*	59,00**	65,00	72,00	77,00	83,33	83,33
	c. Kunjungan Antenatal (K4) (Persen)	92,40	86,70	86,80	74,00	78,00	82,00	82,00
	d. Persentasi kunjungan pasien ke Rumah Sakit							
5	Angka Kesakitan DBD dan Malaria							
	a. Angka Kesakitan DBD (Per 100.000 Penduduk)	38,30	51,40	49,50	48,00	46,00	50,24	50,24
	b. Angka Kesakitan Malaria (Per 1000 Penduduk)	0,14	0,10	0,15	0,15	0,10	0,08	0,08
6	Jumlah Gedung Kesenian	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
7	Jumlah PMKS dan PSKS							
	a. Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.524,00	2.011,00	1.307,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	b. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan PSKS serta pendamping yang diberdayakan	1.073,00	675,00	1.220,00	1.520,00	1.268,00	1.290,00	1.290,00
II	PELAYANAN UMUM							
2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	a. SD/MI (Sekolah/Penduduk 7 - 12 Tahun)	204,00	223,00	224,00	225,00	226,00	227,00	227,00
	b. SMP/MTS (Sekolah/Penduduk 13 - 15 Tahun)	238,00	228,00	229,00	230,00	231,00	232,00	232,00
	c. SMA/SMK/MA (Sekolah/Penduduk 16 - 18 Tahun)	44,74	44,59	42,44	41,62	39,92	38,80	38,80

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2	Rasio murid terhadap Guru							
	a. SD/MI (Murid/Guru)	16,00	15,00	14,40	13,97	13,58	12,83	12,83
	b. SMP/MTS (Murid/Guru)	14,00	11,00	15,01	15,38	15,72	16,57	16,57
	c. SMA/SMK/MA (Murid/Guru)	14,00	12,00	14,16	14,16	14,15	14,44	14,44
3	Rasio murid Terhadap kelas							
	a. SD/MI (Jumlah Murid/Kelas)	22,00	24,00	22,67	22,17	21,67	21,17	21,17
	b. SMP/MTS (Jumlah Murid/Kelas)	28,00	28,00	26,67	25,67	24,44	23,52	23,52
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Murid/Kelas)	28,00	30,00	29,33	29,33	29,33	29,80	29,80
4	Rasio guru Terhadap kelas							
	a. SD/MI (Jumlah Guru/Kelas)	0,72	0,60	0,65	0,67	0,68	0,70	0,70
	b. SMP/MTS (Jumlah Guru/Kelas)	0,49	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,49
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Guru/Kelas)	0,50	0,39	0,40	0,45	0,50	0,54	0,54
5	Tingkat kelulusan menurut jenjang pendidikan (%)							
	a. SD	99,84	99,84	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
	b. SLTP	99,29	99,19	99,42	99,53	99,64	99,76	99,76
	C. SLTA	98,25	98,92	98,45	98,87	99,25	99,45	99,45
6	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na	na	50,00	150,00	300,00	300,00
2.1.2	Kesehatan							
1	Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk							
	a. Rasio Puskesmas (Per 100.000 Penduduk)	3,41	3,34	3,28	3,22	3,16	3,10	3,10
	b. Rasio Pustu (Per 100.000 Penduduk)	15,08	14,71	15,04	15,20	15,35	15,50	15,50
	c. Rasio Puskesmas Keliling (Per 100.000 Penduduk)	3,43	3,34	3,31	3,27	3,22	3,18	3,18
	d. Rasio Total Puskesmas/Pustu/keliling (Per 100.000 Penduduk)	21,91	21,22	20,99	20,64	20,30	19,95	19,95
2	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
3	Rasio Dokter Persatuan Penduduk							
	a. Dokter Spesialis (Per 100.000 Penduduk)	13,40	13,50	14,47	15,22	15,97	16,72	16,72
	b. Dokter Umum (Per 100.000 Penduduk)	18,80	19,10	19,73	20,28	20,83	21,38	21,38
	c. Dokter Gigi (Per 100.000 Penduduk)	5,90	5,90	6,30	6,60	6,90	7,20	7,20
4	Rasio Tenaga Paramedis Per satuan penduduk							
	a. Perawat (Per 100.000 Penduduk)	119,00	113,00	123,00	129,00	135,00	141,00	141,00
	b. Bidan (Per 100.000 Penduduk)	84,50	78,00	81,50	82,50	83,50	84,50	84,50
6	Cakupan Puskesmas (Per Kecamatan)	1,29	1,28	2,00	2,53	3,07	3,60	3,60
7	Cakupan Puskesmas Pembantu + Keliling (Per Desa/Kelurahan)	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,69
8	Prevalensi Balita Gizi Buruk							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	a. Gizi kurang	6,60	7,70	6,39	6,14	5,40	4,81	4,81
	b. Gizi baik	90,20	88,78	90,40	90,86	91,99	92,98	92,98
	c. Gizi lebih	2,00	2,40	2,20	1,99	1,81	1,60	1,60
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Panjang Jalan Provinsi (Km)	3.033,32	3.033,32	3.033,32	2.799,81	2.799,81	2.799,81	2.799,81
2	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi baik (Km)	931,10	1.153,42	1.330,97	1.486,68	1.615,08	1.665,93	1.665,93
3	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Sedang (Km)	936,11	756,55	582,14	251,69	528,09	504,69	504,69
4	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Ringan (Km)	544,88	383,65	410,98	148,65	329,35	317,90	317,90
5	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Berat (Km)	621,23	739,70	709,23	1.015,04	560,79	544,79	544,79
6	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Rusak Ringan - Berat (Km)	1.166,11	1.123,35	1.120,21	1.163,69	890,14	862,69	862,69
7	Panjang Jembatan Provinsi (m)	10.292,30	10.292,30	10.292,30	10.292,30	10.292,30	10.292,30	10.292,30
8	Panjang Irigasi/rawa (Km)	229,00	229,00	359,00	464,00	576,00	650,10	650,10
9	Banjir (Frekuensi)	29,00	27,00	51,80	47,00	38,75	32,81	32,81
2.1.4	Kebudayaan							
1	Jumlah kunjungan ke Museum	33.798,00	29.808,00	21.081,00	21.081,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Jumlah pertunjukan seni ditaman budaya	10,00	15,00	15,00	10,00	35,00	40,00	40,00
2,2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1	Ketenagakerjaan							
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,31	63,22	63,39	63,52	63,67	63,80	63,80
2	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	6,56	7,83	7,43	6,85	6,68	6,60	7,25
2.2.2	Ketahanan Pangan							
	a. Rasio Produksi Beras thd Konsumsi Penduduk Riau	0,37	0,38	0,27	0,22	0,18	0,13	0,13
	b. Rasio Produksi Jagung thd Konsumsi Penduduk Riau	0,53	0,48	0,22	0,17	0,13	0,09	0,09
	c. Rasio Produksi Sayur-Sayuran thd Konsumsi Penduduk Riau	0,58	0,51	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
	d. Rasio Produksi Buah-Buahan thd Konsumsi Penduduk Riau	1,18	1,17	1,08	1,11	1,13	1,15	1,15
	e. Rasio Ketersediaan Pangan Utama terhadap Konsumsi penduduk Riau							
	f. Rasio Produksi Daging Ruminansia thd Konsumsi Penduduk Riau	0,82	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,89
	g. Rasio Produksi Daging Unggas thd Konsumsi Penduduk Riau	1,01	1,06	1,07	1,11	1,14	1,17	1,17
	h. Rasio Produksi Ikan thd Konsumsi Penduduk Riau	1,26	0,91	0,92	0,99	1,02	1,06	1,06

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.2.3	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,59	54,49	56,36	58,23	60,10	61,99	61,99
2.2.4	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.188.442	6.344.402	6.505.000	6.654.000	6.802.000	6.949.000	6.949.000
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,57	2,52	2,53	2,29	2,22	2,16	2,16
2.2.5	Koperasi dan UKM							
1	Jumlah Koperasi (Unit)	4.993	5.048	5.365	5.417	5.468	5.654	5.654
2	Jumlah Anggota Koperasi (Jiwa)	545.025	506.614	534.482	514.431	494.380	494.380	494.380
2.2.6	Penanaman Modal							
1	PMDN (Rp Miliar)	7.707,50	9.943,04	6.613,75	10.955,61	11.200,31	11.523,46	11.523,46
2	PMA (US\$ Juta)	1.369,56	653,39	869,11	1.015,53	1.067,21	1.119,90	1.119,90
2,3	Urusan Pemerintahan Pilihan							
2.3.1	Kelautan dan Perikanan							
	a. Produksi perikanan (ton)	180.562	178.283	511.749	541.253	570.757	570.757	570.757
	b. Rasio Produksi Ikan thd Konsumsi Penduduk Riau	1,60	2,00	2,71	3,97	6,85	7,16	7,16
2.3.2	Pariwisata							
	a. Kunjungan Wisata Asing (Jiwa)	47.934	52.971	61.742	70.509	79.227	88.044	88.044
	b. Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan (Destinasi)	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	11,00
2.3.3	Pertanian							
	Tanaman Pangan							
	a. Luas Panen (Hektar)							
	- Padi Sawah (Hektar)	85.062	105.357	103.720	102.082	100.445	98.808	98.808
	- Padi Ladang (Hektar)	20.975	23.541	23.613	23.685	23.757	23.829	23.829
	- Jagung (Hektar)	12.057	13.878	13.449	13.021	12.592	13.251	13.251
	b. Produksi							
	- Padi Sawah (Ton GKG)	337.233	387.819	451.971	473.427	525.898	574.151	574.151
	- Padi Ladang (Ton GKG)	48.242	52.436	52.580	52.724	52.868	54.632	54.632
	- Jagung (Ton)	28.651	24.697	30.933	30.026	29.120	30.565	30.565
	c. Produktivitas							
	- Padi Sawah (Ton GKG/Hektar/Tahun)	3,96	3,68	4,01	4,05	4,06	4,12	4,06
	- Padi Ladang (Ton GKG/Hektar/Tahun)	2,30	2,23	2,31	2,29	2,30	2,31	2,31
	- Jagung (Ton/Hektar/Tahun)	2,38	1,78	2,34	2,33	2,33	2,37	2,37
	d. Produksi Beras (Ton Beras/Tahun)	245.625	256.970	293.781	307.728	341.834	373.198	373.198
	e. Produksi Sayur-Sayuran (Ton/Tahun)	171.189	152.315	189.129	191.957	211.153	219.020	219.020
	f. Produksi Buah-Buahan (Ton/Tahun)	224.749	223.797	193.306	193.401	193.497	193.593	193.593

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perkebunan							
	a. Luas Areal							
	- Kelapa Sawit (Hektar)	2.411.819	2.424.544	2.424.544	2.424.544	2.424.544	2.424.544	2.424.544
	- Kelapa (Hektar)	516.895	515.167	512.347	509.800	507.253	504.706	504.706
	- Karet (Hektar)	502.906	501.787	499.842	498.104	496.365	494.627	494.627
	b. Produksi							
	- Kelapa Sawit (Ton CPO)	7.761.293	7.841.947	7.923.608	7.972.386	8.017.641	8.096.315	8.096.315
	- Kelapa (ton Kopra)	421.653	421.465	417.784	414.977	412.169	409.362	409.362
	- Karet (Ton KKK)	367.260	374.900	386.115	396.437	406.758	417.080	417.080
	c. Produktivitas							
	- Kelapa Sawit (Ton CPO/Hektar/Tahun)	3,937	3,752	3,268	3,7620	3,7650	3,7680	3,768
	- Kelapa (Ton Kopra/Hektar/Tahun)	1,15	1,29	0,82	1,1300	1,1350	1,1370	1,14
	- Karet (Ton KKK/Hektar/Tahun)	1,12	1,12	0,77	1,1870	1,1910	1,1960	0,84
	Peternakan							
	Produksi Daging							
	a. Produksi Daging Ruminansia	8.285.264,55	9.186.073,00	12.219.064	13.210.812	13.440.970	14.531.893	14.531.893
	b. Produksi Daging Unggas	48.984.991,00	52.492.216,00	55.579.658	58.772.046	61.964.434	65.156.822	65.156.822
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB							
	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Harga Konstan Dengan Migas (%)	24,22	24,27	24,68	24,65	24,88	25,12	25,12
	b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Harga Konstan Tanpa Migas (%)	30,89	30,39	30,00	29,71	29,44	29,01	29,01
2.3.4	Kehutanan							
	a. Luas Hutan Produksi Terbatas (Hektar)	1.031.600	1.031.600	1.031.600	1.031.600	1.031.600	1.031.600	1.031.600
	b. Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar)	1.289.493	1.187.172	158.467	158.467	158.467	158.467	158.467
	c. Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis (Hektar)	152.455	158.531	151.287	150.000	150.000	150.000	150.000
	d. Kebakaran Hutan dan Lahan (Titik Api)	4.400	1.916	1.000	900	800	700	700
	e. Produksi (ton)							
	- Kayu Gergajian (M3)	10.676,33	56.709,71	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	- Kayu Lapis (M3)	81.234,42	117.685,10	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	- Chip (Ton)	109.422,24	65.515,50	65.668,29	65.821,08	65.973,87	66.127,01	438.527,99
	- Pulp (Ton)	4.283.425,12	13.754.976,84	14.891.525,37	16.028.073,91	17.164.622,44	18.381.763,47	84.504.387,15
2.3.5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	39,57	30,63	32,05	30,55	29,14	26,11	26,11
	a. Minyak dan Gas Bumi (%)	-	-	23,13	21,72	20,38	18,98	18,98
	b. Pertambangan Tanpa Migas (%)	-	-	8,24	8,13	8,02	7,91	7,91
	c. Penggalan (%)	-	-	0,67	0,71	0,75	0,79	0,79

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.3.7	Perdagangan							
	a. Eskpor Bersih Termasuk Minyak Bumi (Ribu US\$)	21.865.160,00	14.371.730,00	14.527.074,87	14.684.094,85	14.842.812,01	15.000.397,71	15.000.397,71
	b. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	7,77	8,89	12,60	13,19	13,79	14,39	14,39
2.3.8	Perindustrian							
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)							
	a. Industri Migas (%)	20,88	23,87	28,84	29,52	30,17	30,84	30,84
	b. Industri Tanpa Migas (%)	29,74	29,66	32,62	32,90	33,15	33,42	33,42
III	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pengeluaran konsumsi RT harga konstan terhadap total pengeluaran per tahun (%)	31,39	33,19	32,68	33,41	34,10	34,82	34,82
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per bulan (Rp.)	435.740,00	510.187,00	529.122	566.258	603.394	640.530	640.530
3	PDRB Per jumlah tenaga kerja (Rp Milyar per tenagakerja)	0,1340	0,1330	0,1347	0,1372	0,1397	0,1420	0,1420
4	Nilai Tukar Petani	95,02	95,03	102,23	103,95	105,55	107,86	107,86
	a. Pangan	102,74	107,27	112,73	116,96	121,00	126,00	126,00
	b. Hortikultura	97,88	96,05	97,59	98,83	99,81	100,98	100,98
	c. Perkebunan	91,64	89,92	90,10	93,77	96,11	100,67	100,67
	d. Peternakan	97,58	101,03	102,27	102,33	102,58	102,89	102,89
	e. Perikanan	102,82	106,53	107,28	107,86	108,25	108,77	108,77
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Jumlah Energi Listrik Yang di Produksi (Mwh) (Hal 280)	458,50	486,70	492,77	513,59	524,57	542,12	542,12
2	Persentase RT akses listrik PLN (%)	85,19	78,62	80,99	82,33	85,83	87,33	87,33
3	Persentase RT akses air minum (%)	72,59	83,01	84,00	89,16	91,65	93,84	93,84
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Angka Kriminalitas	7.043	7.799	9.183	9.629	10.075	11.114	11.114
2	Jumlah Potensi Konflik (Konflik)	124	113	0	0	0	0	0
3	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Fokus Sumberdaya Manusia							
1	Rasio ketergantungan (%)	58,54	59,68	60,82	61,97	63,11	64,26	64,26
2	Rasio lulusan (S1, S2 dan S3) per jumlah penduduk	4,73	5,02	5,33	5,64	5,95	6,26	6,26
3	Rasio Ketergantungan Penduduk Non Produktif Per 100 penduduk Produktif	51,96	51,56	50,64	50,17	49,73	49,27	49,27
	Rasio Jumlah Tenaga kerja berpendidikan sarjana terhadap total tenaga kerja							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	a. Indeks Pembangunan Gender (%)	87,62	97,3	101,11	106,39	111,67	116,95	116,95
5	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
	a. Rasio Akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur (%)	0,68	0,72	0,73	0,75	0,77	0,79	0,79
6	Pemerintahan Umum							
	a. Indeks Efektifitas Pemerintahan	2,50	2,60	2,95	3,24	3,53	3,82	3,82
	b. Nilai keterbukaan Informasi	17,40	30,57	35,16	40,43	46,49	53,47	53,47
7	Administrasi Keuangan Daerah							
	a. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Nilai Akuntabilitas	CC	CC	B	BB	BB	A	A
	c. Skor LPPD	2,50	2,60	2,95	3,24	3,53	3,82	3,82
	d. Nilai Reformasi Birokrasi	na	37,66	37,69	38,63	39,60	40,59	40,59
8	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	21	na	30	60	100	100

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 berikut perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 beserta perubahannya, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 berikut perubahannya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) beserta perubahannya yang dijabarkan kedalam kegiatan tahunan yang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2019. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020 – 2023, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005 - 2025 Provinsi Riau, arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2020 menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 berikut perubahannya merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta perubahannya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan, perencanaan penganggaran dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota dilingkup Provinsi Riau.

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 beserta perubahannya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau untuk tahun 2014, 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Sehubungan dengan ini akan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan

- diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014–2019 beserta perubahannya dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 3) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) beserta perubahannya Renstra Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Riau;
 - 4) Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang didukung Instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, Perangkat Daerah Provinsi Riau wajib menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD ini;
 - 5) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya merupakan panduan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dalam menyusun visi, misi dan program Bupati/Walikota, serta berfungsi untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 beserta perubahannya menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2014 – 2019. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 - 7) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 beserta perubahannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau beserta perubahannya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
 - 8) Pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 beserta perubahannya perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

- 9) Gubernur Provinsi Riau wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014—2019 beserta perubahannya kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 10) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 11) DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 berikut perubahannya sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya, yang ditunjukkan dari ketercapaian indikator kinerja daerah sebagaimana ditetapkan pada bab sebelumnya.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN